

BAB II

ANALISIS GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH

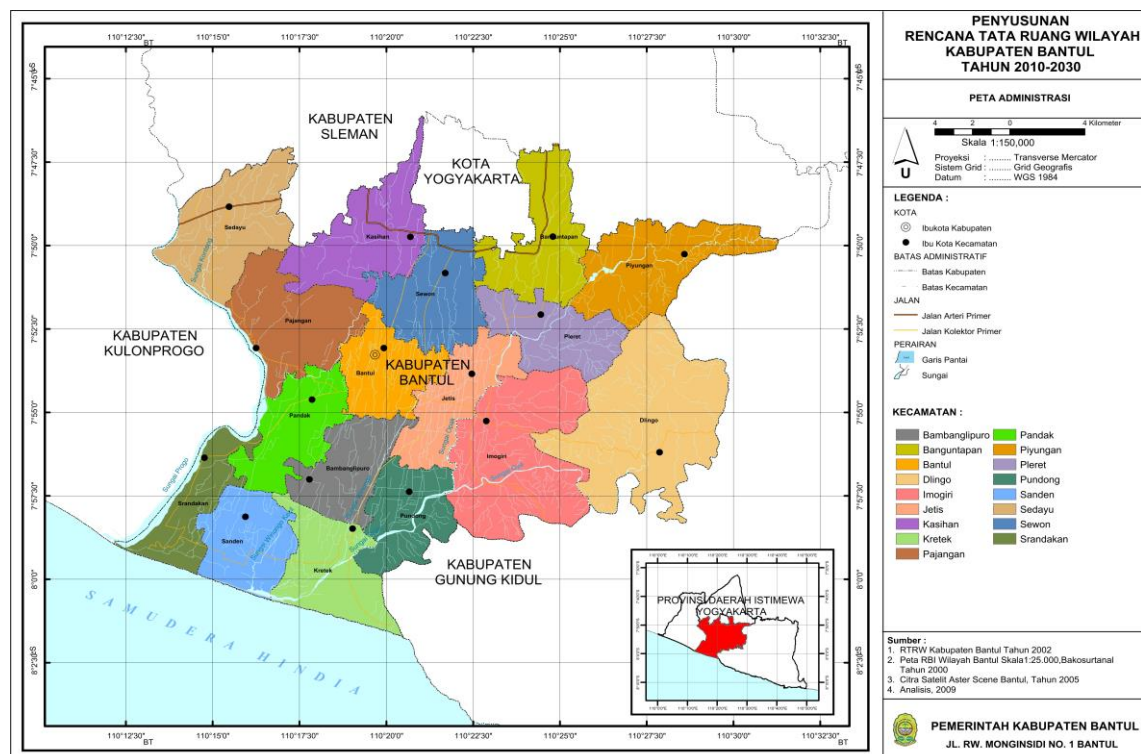
2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Bantul merupakan salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di wilayah bagian selatan dengan luas wilayah 506,85 km² (sekitar 15,91% dari luas wilayah DIY). Wilayah administratif Kabupaten Bantul memiliki batas-batas sebagai berikut.

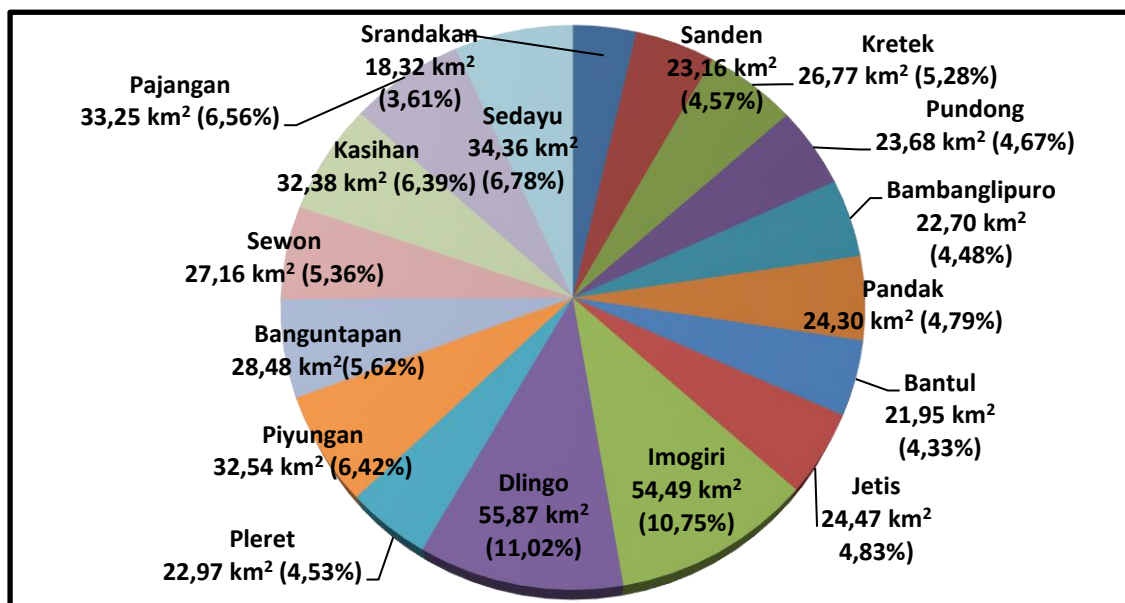
- Sebelah Utara : Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman
- Sebelah Selatan : Samudera Hindia
- Sebelah Barat : Kabupaten Kulon Progo
- Sebelah Timur : Kabupaten Gunungkidul



Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul, 2020

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Bantul

Secara administratif Kabupaten Bantul terdiri dari 17 kecamatan. Kecamatan Dlingo adalah kecamatan yang mempunyai wilayah paling luas, yaitu 55,87 km² sementara Kecamatan Srandakan adalah kecamatan dengan wilayah paling sempit, yaitu 18,32 Km². Persentase luas wilayah menurut kecamatan di Kabupaten Bantul disajikan pada Gambar 2.2.



Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul, 2020

Gambar 2.2 Luas Wilayah menurut Kecamatan di Kabupaten Bantul

Wilayah Kabupaten Bantul juga terbagi atas 75 desa dan 933 pedukuhan. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 37/2010 tentang Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia, terdapat 21 desa (28%) dengan klasifikasi 'perdesaan' (*rural area*) dan 54 desa (72%) dengan klasifikasi 'perkotaan' (*urban area*) dari 75 desa yang ada di Kabupaten Bantul.

Berdasarkan wilayah administrasi kecamatan, maka seluruh desa yang ada di Kecamatan Srandakan, Pundong, Bambanglipuro, Pandak, Bantul, Piyungan, Banguntapan, Sewon, dan Kasihan merupakan 'perkotaan'. Klasifikasi wilayah lebih detail dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1 Klasifikasi Wilayah Desa di Kabupaten Bantul

No.	Kecamatan		Klasifikasi Wilayah					
	Nama	Jumlah Desa	Desa Perdesaan	Jumlah Dusun	Luas (km ²)	Desa Perkotaan	Jumlah Dusun	Luas (km ²)
1	Srandakan	2	-			Trimurti	19	6,46
						Poncosari	24	11,86
2	Sanden	4	Gadingharjo	6	3,08	Gadingsari	18	8,12
						Srigading	20	7,57
						Murtigading	18	4,39
3	Kretek	5	Tirtoharjo	6	3,62	Donotirto	13	4,70
			Parangtritis	11	11,87	Tirtomulyo	15	4,19
			Tirtosari	7	2,39			
4	Pundong	3	-			Srihardono	17	6,87
						Seloharjo	16	11,10
						Panjangrejo	16	5,71
5	Bambanglipuro	3				Sidomulyo	15	8,05
						Sumbermulyo	16	8,19
						Mulyodadi	14	6,45
6	Pandak	4	-			Wijirejo	10	4,68
						Caturharjo	14	5,93
						Triharjo	10	6,43
						Gilangharjo	15	7,26
7	Bantul	5	-			Palbapang	10	5,53
						Ringinharjo	6	2,77
						Bantul	12	5,24
						Trirenggo	17	6,10
						Sabdodadi	5	2,32
8	Jetis	4	Patalan	20	5,65	Canden	15	5,36
			Trimulyo	12	7,11	Sumberagung	17	6,35
9	Imogiri	8	Selopamioro	18	22,75	Karangtalun	5	1,21
			Sriharjo	13	6,32	Imogiri	4	0,83
			Karantengah	6	2,88	Wukirsari	16	15,39
			Kebonagung	5	1,87			
			Girirejo	5	3,24			
10	Dlingo	6	Mangunan	6	9,52	Temuwuh	12	7,67
			Muntuk	11	12,85			
			Dlingo	10	9,16			
			Jatimulyo	10	8,91			
			Terong	9	7,76			
11	Pleret	5	Bawuran	7	4,97	Wonokromo	12	4,34
			Wonolelo	8	4,54	Pleret	11	4,25
						Segoroyoso	9	4,87
12	Piyungan	3	-			Srimulyo	22	14,56
						Srimartani	17	8,58
						Sitimulyo	21	9,40

No.	Kecamatan		Klasifikasi Wilayah					
	Nama	Jumlah Desa	Desa Perdesaan	Jumlah Dusun	Luas (km2)	Desa Perkotaan	Jumlah Dusun	Luas (km2)
13	Banguntapan	8	-			Baturetno	8	3,94
						Banguntapan	11	8,33
						Tamanan	9	3,75
						Jagalan	2	0,27
						Singosaren	5	0,67
						Wirokerten	8	3,86
						Jambidan	7	3,76
						Potorono	9	3,90
14	Sewon	4	-			Pendowoharjo	16	6,98
						Panggungharjo	14	5,61
						Timbulharjo	16	7,78
						Bangunharjo	16	6,79
15	Kasihan	4	-			Tirtonirmolo	12	5,13
						Tamantirto	10	6,72
						Ngestiharjo	12	5,10
						Bangunjiwo	19	15,43
16	Pajangan	3	Triwidadi	22	12,71	Guwosari	15	8,78
			Sendangsari	18	11,76			
17	Sedayu	4	Argodadi	14	11,21	Argosari	13	6,37
						Argorejo	13	7,23
						Argomulyo	14	9,55
	Jumlah	75	21	224	164,17	54	709	342,68
	Jumlah Dusun						933	
	Luas Kabupaten (km2)							506,85

Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul (diolah sesuai Perka BPS No 37/2010), 2020

2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis, Kabupaten Bantul terletak antara 14°04'50" 27°50'50" Lintang Selatan dan 110°10'41"-110°34'40" Bujur Timur.

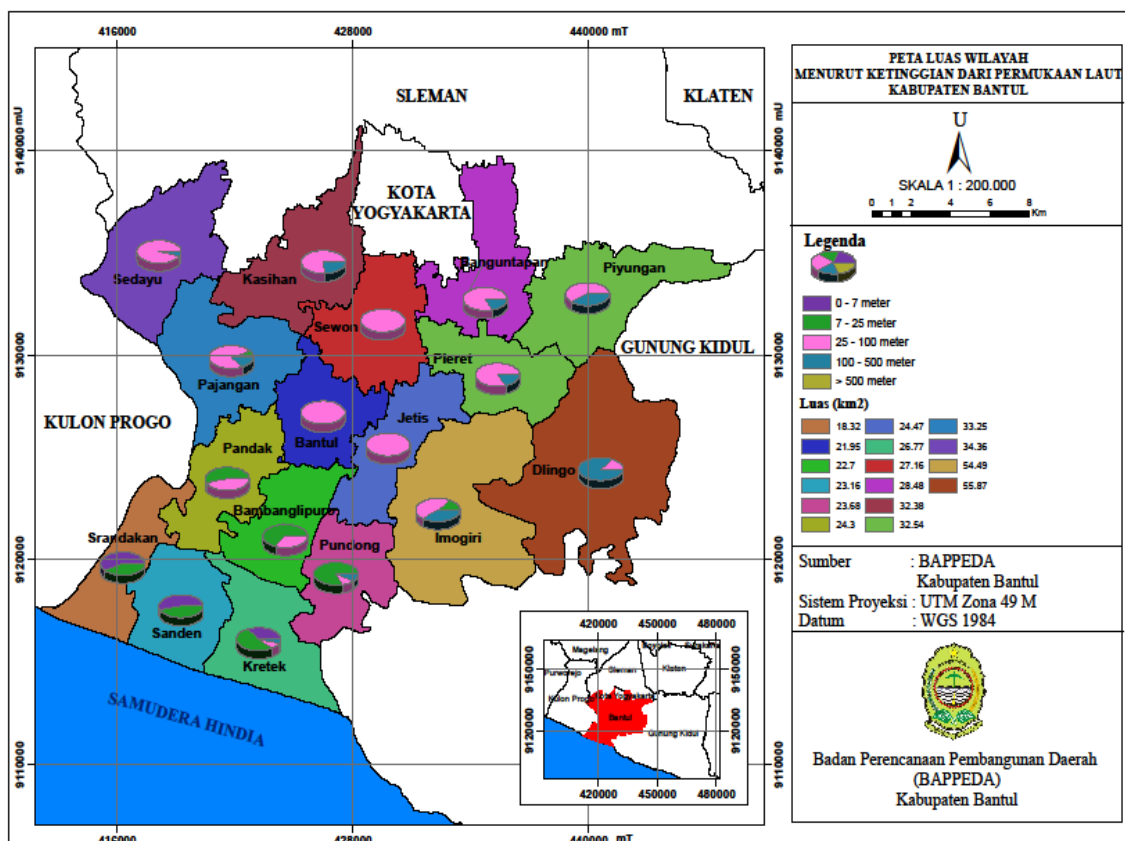
Wilayah Kabupaten Bantul merupakan dataran rendah 40% dan lebih dari separuhnya (60%) daerah perbukitan yang kurang subur, secara garis besar terdiri dari:

- a. Bagian Barat, adalah daerah landai yang kurang serta perbukitan yang membujur dari Utara ke Selatan seluas 89,86 km² (17,73 % dari seluruh wilayah).
- b. Bagian Tengah, adalah daerah datar dan landai merupakan daerah pertanian yang subur seluas 210.94 km² (41,62 %).
- c. Bagian Timur, adalah daerah yang landai, miring dan terjal yang keadaannya masih lebih baik dari daerah bagian Barat, seluas 206,05 km² (40,65%).
- d. Bagian Selatan, adalah sebenarnya merupakan bagian dari daerah bagian Tengah dengan keadaan alamnya yang berpasir dan sedikit berlaguna, terbentang di Pantai Selatan dari Kecamatan Srandakan, Sanden dan Kretek.

2.1.1.3 Topografi

Berdasarkan elevasi lahan daratan dari permukaan air laut, ketinggian tempat atau elevasi dapat ditentukan di mana permukaan air laut dianggap 0 meter. Ketinggian tempat Kabupaten Bantul meliputi empat kelas ketinggian dan hubungan kelas ketinggian dengan luas sebarannya secara spasial ditunjukkan pada peta luas wilayah menurut ketinggian dari permukaan laut. Kelas ketinggian tempat yang dimiliki Kabupaten Bantul penyebaran paling luas adalah elevasi antara 25 - 100 meter (27.709 Ha atau 54,67%) yang terletak pada bagian utara, bagian tengah dan bagian tenggara Kabupaten Bantul. Sedangkan wilayah yang mempunyai elevasi rendah (elevasi <7 meter) seluas 3.228 Ha (6,37%) terdapat di Kecamatan Kretek, Kecamatan Sanden dan Kecamatan Srandakan. Wilayah dengan elevasi rendah umumnya berbatasan

dengan Samudra Hindia. Untuk wilayah yang mempunyai elevasi di atas 100 meter terdapat di Kecamatan Dlingo, Imogiri, Piyungan, dan Pajangan. Kecamatan Srandakan dan Kecamatan Sanden merupakan daerah terendah di antara kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Bantul, yaitu berkisar 0-25 meter dari permukaan laut, mencakup areal seluas 4.161 Ha (8,2%).

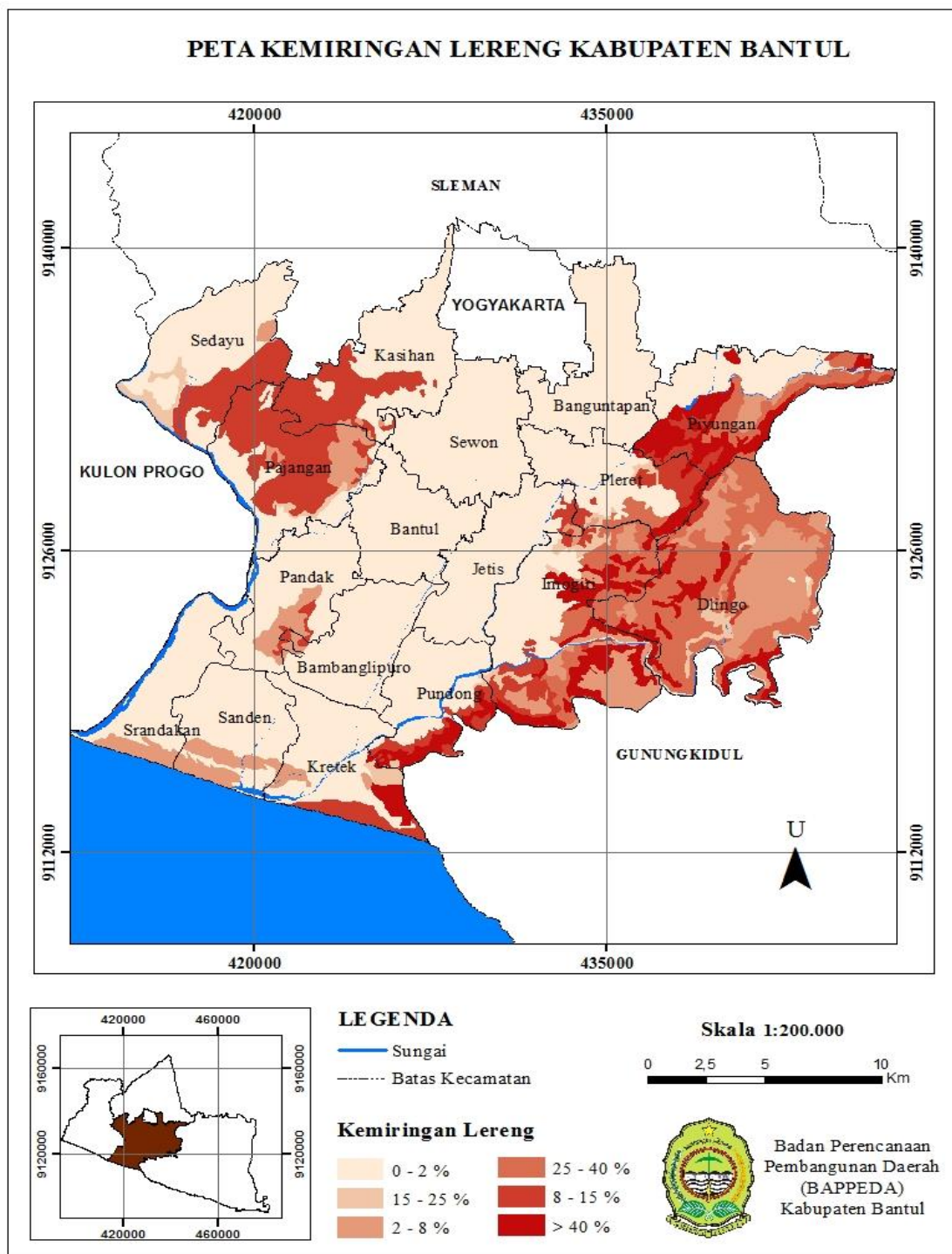


Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul, 2020

Gambar 2.3 Luas Wilayah menurut Ketinggian dari Permukaan Laut di Kabupaten Bantul

Klasifikasi kemiringan lahan di Kabupaten Bantul dibagi menjadi enam kelas. Wilayah Kabupaten Bantul pada umumnya berupa daerah dataran (kemiringan kurang dari 2%) dengan penyebaran di wilayah selatan, tengah, dan utara dari Kabupaten Bantul dengan luas sebesar 31,421 Ha (61,96%). Untuk wilayah timur dan barat umumnya berupa daerah yang mempunyai kemiringan 40,0% dengan luas sebesar 15.148 Ha (30%). Sebagian kecil wilayah timur dan barat seluas 4.011 Ha (8,04%) mempunyai kemiringan lereng di atas 40,1%. Apabila dilihat per

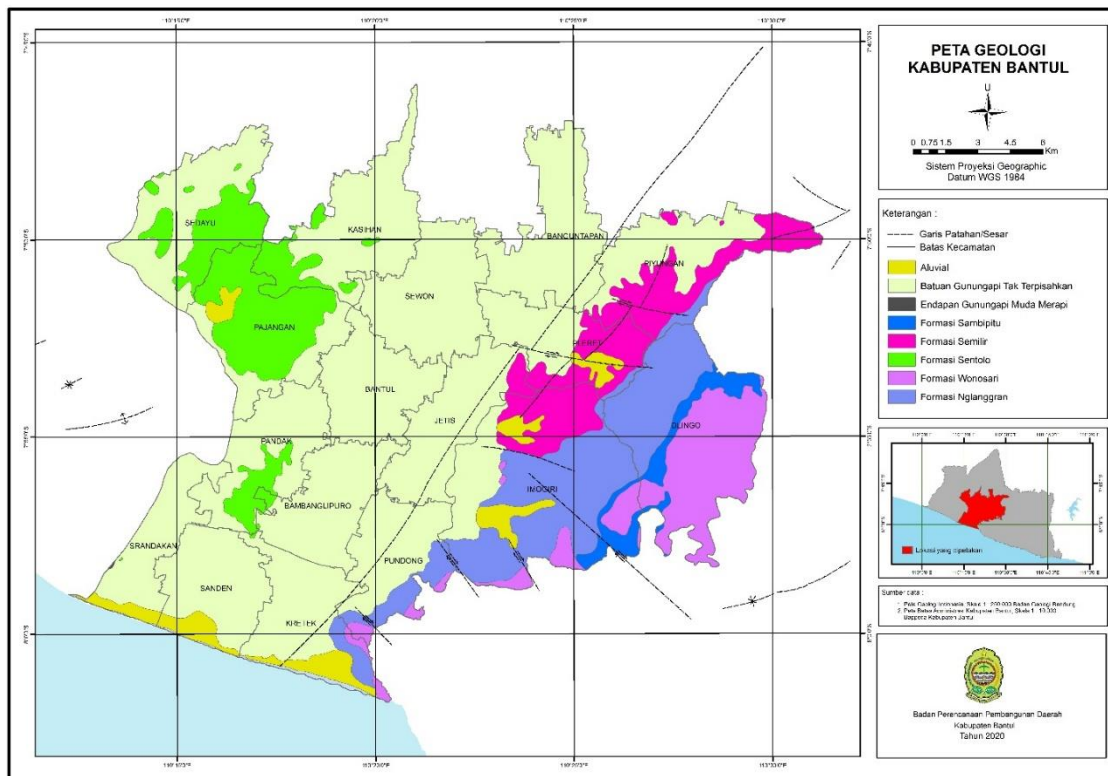
wilayah kecamatan terlihat bahwa wilayah kecamatan yang paling luas memiliki lahan miring terletak di Kecamatan Dlingo dan Imogiri, sedangkan wilayah kecamatan yang didominasi oleh lahan datar terletak di Kecamatan Sewon dan Banguntapan.



Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul, 2020

Gambar 2.4 Kemiringan Lereng di Kabupaten Bantul

2.1.1.4 Geologi



Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul, 2020

Gambar 2.5 Peta Geologi Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul sesuai Peta Geologi Indonesia, sebagian besar terdiri atas formasi batuan Gunung Api Tak Terpisahkan (Consolidated) seluas 30.984,03 Ha atau 60,63%; formasi Nglanggron seluas 5.783,37 Ha atau 11,32%; formasi Sentolo seluas 4.622,49 Ha atau 9,04 %; formasi Aluvial seluas 1.669,69 Ha atau 3,27%; endapan Gunungapi Muda Merapi seluas 4,02 Ha atau 0,01%; formasi Sambipitu 950,10 Ha atau 1,86%; formasi Wonosari seluas 3.388,69 Ha atau 6,63%; dan formasi semilir seluas 3.703,62 Ha atau 7,25%.

Formasi Wonosari tersingkap baik di daerah Wonosari dan sekitarnya, dengan ketebalan lebih dari 800 meter. Formasi ini didominasi oleh batuan karbonat yang terdiri dari batugamping berlapis dan batugamping terumbu. Sedangkan sebagai sisipan adalah napal. Sisipan tuf hanya terdapat di bagian timur. Formasi Sambipitu memiliki lokasi tipe formasi terletak di Desa Sambipitu pada jalan raya Yogyakarta-Patuk-Wonosari dengan ketebalan mencapai 230 meter.

Batuan penyusun formasi ini di bagian bawah terdiri dari batupasir kasar, kemudian ke atas berangsur menjadi batupasir halus yang berselang-seling dengan serpih, batulanau dan batulempung. Pada bagian bawah kelompok batuan ini tidak mengandung bahan karbonat. Namun di bagian atasnya, terutama batupasir, mengandung bahan karbonat. Formasi Semilir memiliki lokasi tipe formasi di Gunung Semilir, sebelah selatan Klaten. Dengan ketebalan lebih dari 460 meter. Litologi penyusunnya terdiri dari tuf, tuf lapili, lapili batuapung, breksi batuapung dan serpih. Komposisi tuf dan batuapung tersebut bervariasi dari andesit hingga dasit. Di bagian bawah satuan batuan ini, yaitu di Suntain Opak, Dusun Watuadeg, Desa Jogotirto, Kec. Berbah, Kab. Sleman, terdapat andesit basal sebagai aliran lava bantal (Bronto dan Hartono, 2001).

Formasi Nglanggran batuan penyusunnya terdiri dari breksi gunungapi, aglomerat, tuf dan aliran lava andesit-basal dan lava andesit. Breksi gunungapi dan aglomerat yang mendominasi formasi ini umumnya tidak berlapis. Kepingannya terdiri dari andesit dan sedikit basal, berukuran 2 – 50 cm. Di bagian tengah formasi ini, yaitu pada breksi gunungapi, ditemukan batugamping terumbu yang membentuk lensa atau berupa kepingan. Secara setempat, formasi ini disisipi oleh batupasir. Formasi Sentolo terletak di bagian tenggara Pegunungan Kulonprogo dengan lapisan alas berupa aglomerat dan napal. Formasi ini berupa batugamping berlapis yang diendapkan di lingkungan neritik sebagai hasil genanglaut pada akhir Miosen Tengah (Bemmelen, 1949). Barianto drr. (2010) berpendapat bahwa fase pengendapan Formasi Sentolo dalam keadaan susut laut bersamaan dengan pembentukan Graben Bantul. Formasi Endapan Gunungapi Merapi Muda yang berumur Kuarter dan terdiri dari material lepas sebagai hasil kegiatan letusan Gunungapi Merapi.

Endapan Gunungapi Merapi Muda batuanannya berupa tuf, abu, breksi, aglomerat, dan lelehan lava tak terpilahkan. Hasil pelapukan pada lereng kaki bagian bawah membentuk dataran yang meluas di

sebelah selatan, terutama terdiri dari rombakan vulkanik yang terangkut kembali oleh alur-alur yang berasal dari lereng atas. Dataran Aluvial terbentuk dan berkembang pada lahan deposisional yang merupakan hasil endapan aluvial yang berada di dataran rendah di Kabupaten Bantul. Kondisi topografinya datar dengan lereng di bawah 8% dan sebagian besar kemiringan lereng 0 – 3%. Selain bentanglahan yang terdapat meliputi teras sungai, dataran aluvial, dataran banjir, rawa belakang dan tanggul alam, sekitar dataran aluvial pantai tanahnya Aluvial, Kambisol, Grumusol, Gleisol yang produktif untuk pertanian, karena terdapat air permukaan yang mencukupi.

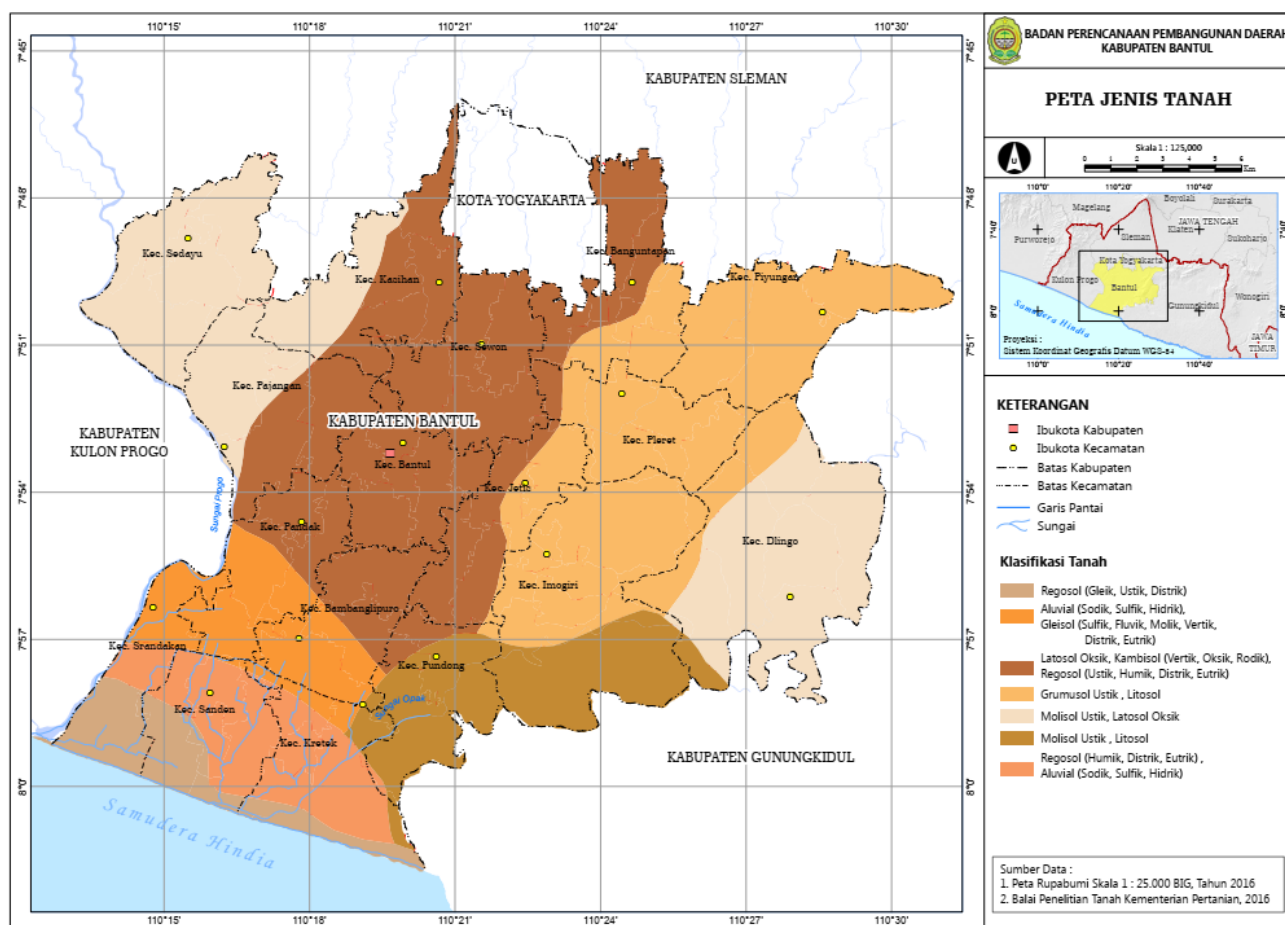
Tabel 2.2 Formasi Batuan Kabupaten Bantul

No.	Formasi Batuan	Luas (Ha)	%
1	Aluvial	1.669,69	3,27
2	Batuan Gunungapi Tak Terpisahkan	30.984,03	60,63
3	Endapan Gunungapi Muda Merapi	4,02	0,01
4	Formasi Sambipitu	950,10	1,86
5	Formasi Semilir	3.703,62	7,25
6	Formasi Sentolo	4.622,49	9,04
7	Formasi Wonosari	3.388,69	6,63
8	Formasi Nglanggran	5.783,37	11,32
9	Jumlah	51.106,02	100,00

2.1.1.5 Tanah

Jenis tanah di Kabupaten Bantul didapatkan dari pendekatan klasifikasi tanah skala tinjau yang diklasifikasikan berdasarkan klasifikasi tanah nasional. Klasifikasi tanah ini ditetapkan dari hierarki tingkat kematangan dan perkembangan horizon dan diturunkan menjadi jenis tanah dan macam tanah (horizon penciri). Jenis tanah mengacu pada klasifikasi Dudal dan Soeprtohardjo tahun 1957 (Kementan, 2016) diikuti dengan pendetailan macam tanah berdasarkan horizon penciri baik dari horizon A (horizon atas, epipedon) dan horizon bawah

permukaan. Klasifikasi tanah di Bantul secara umum terdiri dari tanah regosol, alluvial, gleisol, latosol, grumusol, dan molisol.



Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul, 2020

Gambar 2.6 Peta Jenis Tanah Kabupaten Bantul

2.1.1.6 Hidrologi

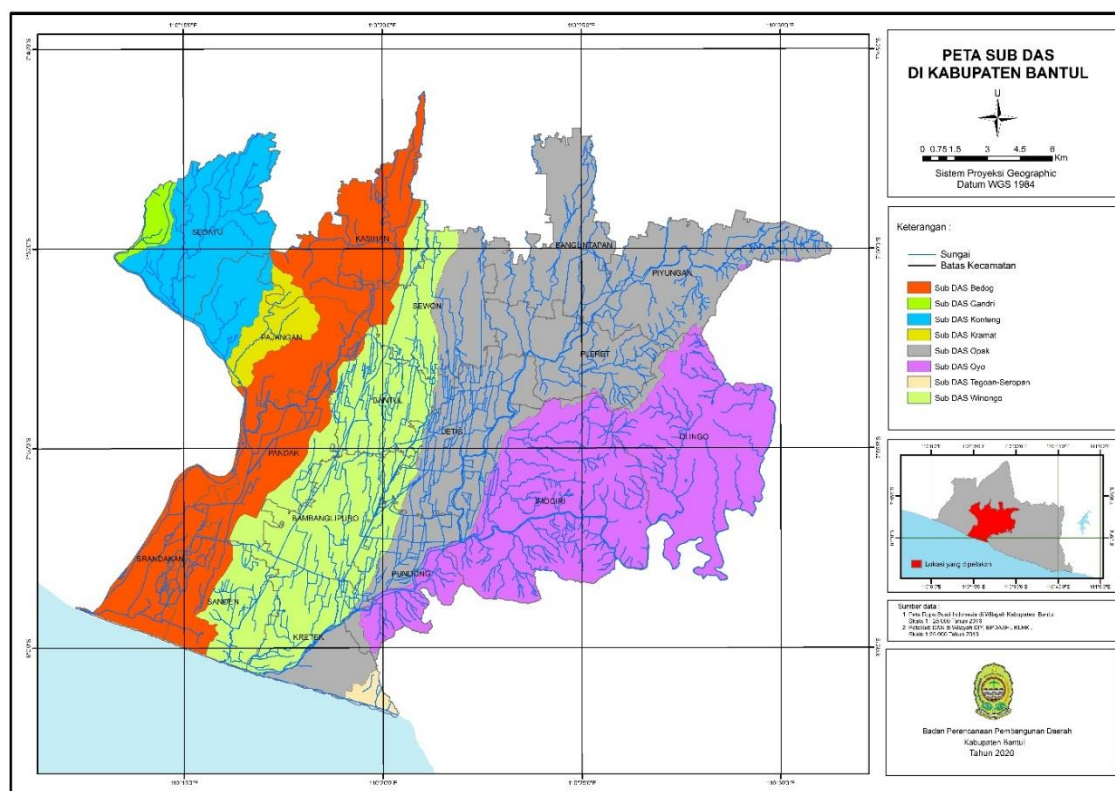
Kabupaten Bantul terdapat empat Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu DAS Progo, DAS Tegoan Seropan, DAS Oyo, dan DAS Opak. DAS di wilayah Kabupaten Bantul menempati lahan seluas 51.144,98 Ha. Rincian DAS tersebut dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2.3 Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Bantul

No.	Nama Sub DAS	Luas (Ha)	%
A.	PROGO	14.590,77	28,53
1.	Bedog	9.120,77	17,83
2.	Gandri	402,83	0,79
3.	Konteng	4.032,40	7,88
4.	Kramat	1.034,77	2,02

No.	Nama Sub DAS	Luas (Ha)	%
B.	TEGOAN-SEROPAN	211,90	0,41
5.	Tegoan-Seropan	211,90	0,41
C.	OYO	11.563,12	22,61
6.	Oyo	11.563,12	22,61
D.	OPAK	24,779,18	48,45
7.	Opak	15.013,52	29,35
8.	Winongo	9.765,67	19,09
	Jumlah	51.144,98	100,00

Sumber: BPDAS KLHK, 2019



Sumber: BPDAS KLHK, 2019

Gambar 2.7 Peta Sub Das di Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul memiliki Daerah Irigasi (DI) yang terbagi dalam kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Bantul berdasarkan Permen PU No.293/KPTS/M/2014 Tentang Penetapan Status Daerah Irigasi Yang Pengelolaan Menjadi Wewenang Dan Tanggung Jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Rincian DI dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4 Daerah Irigasi Kabupaten Bantul Sesuai Kewenangan

No	Kewenangan	Jumlah Daerah Irigasi	Luas Lahan (Ha)
1	Pusat	1	706
2	Provinsi	34	3637.77
3	Kabupaten	100	8484
Jumlah		135	12827.77

Sumber : Permen PU No.293/KPTS/M/2014

2.1.1.7 Klimatologi

Berdasar data curah hujan dari 13 stasiun pemantau cuaca di Kabupaten Bantul yaitu Pemantau Ringinharjo, Nyemengan, Gandok, Kotagede, Pundong, Barongan, Ngental, Kebenengan, Piyungan, Sedayu, Ngestiharjo, Dlingo dan Karang Ploso maka kondisi cuaca pada tahun 2019, curah hujan tertinggi tercatat 1.189 mm sedangkan banyaknya hari hujan berkisar antara 0-24 hari. Bulan dengan curah hujan tertinggi terjadi pada November-Desember dengan curah hujan terendah terjadi pada Juli-Oktober. Oktober merupakan musim pancaroba/peralihan, pada umumnya disertai angin kencang dan pada pertengahan November mulai memasuki awal musim hujan.

2.1.1.8 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan merupakan informasi yang menggambarkan sebaran pemanfaatan lahan yang ada di Kabupaten Bantul. Luas lahan di Kabupaten Bantul sebesar 50.685 ha terbagi dalam beberapa klasifikasi penggunaan lahan yang terdiri dari permukiman, sawah, tegal, dan kebun campur, hutan, tanah tandus, tambak dan lainnya. Data penggunaan lahan di Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.5 Penggunaan Lahan Tahun 2015-2019 di Kabupaten Bantul

No.	Klasifikasi penggunaan Lahan	Luas Lahan (ha)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Permukiman	3.997,3018 (7,88%)	4.022,3897 (7,94%)	4.061,5542 (8,01%)	4.115,63 (8,12%)	4.733,87 (9,34%)
2.	Sawah	15.786,7911 (31,15%)	15.757,8323 (31,09%)	15.713,2745 (31,00%)	15.684,02 (30,94%)	13.225,28 (26,09%)

No.	Klasifikasi penggunaan Lahan	Luas Lahan (ha)				
		2015	2016	2017	2018	2019
3.	Tegal	6.621,5972 (13,06%)	6.485,7696 (12,80%)	6.484,0135 (12,79%)	6.483,42 (12,79%)	6.474,97 (12,77%)
4.	Kebun Campur	16.581,1645 (32,73%)	16.958,2259 (33,46%)	16.943,8098 (33,43%)	16.941,76 (33,43%)	16.941,76 (33,43%)
5.	Kebun Rakyat	-	-	-	-	-
6.	Hutan	1.385 (2,73%)	1.136,185 (2,24%)	1.136,185 (2,24%)	1.136,19 (2,24%)	1.136,19 (2,24%)
7.	Tanah Tandus	543 (1,07%)	543 (1,07%)	543 (1,07%)	543 (1,07%)	543 (1,07%)
8.	Waduk	-	-	-	-	-
9.	Tambak	30 (0,06%)	30 (0,06%)	30 (0,06%)	30 (0,06%)	30 (0,06%)
10.	Lainnya	5.740,1485 (11,32%)	5.751,5975 (11,35%)	5.773,163 (11,39%)	5.750,98 (11,35%)	7.602,75 (15,00%)
Jumlah		50.685 (100%)	50.685 (100%)	50.685 (100%)	50.685 (100%)	50.685 (100%)

Sumber: BPN Kabupaten Bantul, 2020

Dari data penggunaan lahan di Kabupaten Bantul tahun 2015-2019 pada tabel tentang penggunaan lahan di atas, dapat diketahui bahwa pada kurun waktu tersebut terjadi perubahan penggunaan lahan khususnya pengurangan luas lahan sawah, tegal, dan kebun campur.

Perlu diketahui data penggunaan lahan sawah di tahun 2015-2018 didasarkan pada data status lahan, sedangkan pada tahun 2019 data penggunaan lahan, khususnya lahan sawah, didasarkan pada penggunaan lahan sesuai kondisi di lapangan.

Adanya alih fungsi lahan sawah, tegal, dan kebun campur menjadi lahan permukiman sesuai tabel di atas tentunya akan berdampak pada berkurangnya lahan pertanian, menurunnya produksi pangan, terancamnya keseimbangan ekosistem, serta banyaknya buruh tani yang kehilangan pekerjaan yang berakibat pada tingginya angka urbanisasi. Oleh karena itu, diperlukan adanya kebijakan strategis dari Pemerintah Bantul terkait alih fungsi lahan tersebut.

2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030, rencana pola ruang Kabupaten Bantul terdiri atas:

1. Kawasan Lindung Kabupaten

Rencana pengembangan Kawasan Lindung Kabupaten meliputi:

a. Kawasan hutan lindung

Penyebaran kawasan hutan lindung meliputi Desa Dlingo, Desa Mangunan, Desa Muntuk, Desa Jatimulyo, Desa Temuwuh, Desa Terong Kecamatan Dlingo, Desa Wonolelo Kecamatan Pleret, Desa Wukirsari Kecamatan Imogiri, dan Desa Srimulyo Kecamatan Piyungan.

b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yaitu kawasan resapan air yang direncanakan seluas kurang lebih 1.001 Ha (1,98%) yang tersebar di sebagian wilayah Desa Parangtritis Kecamatan Kretek, sebagian wilayah Desa Argorejo, Desa Argomulyo Kecamatan Sedayu, sebagian di Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan, sebagian wilayah Desa Seloharjo Kecamatan Pundong, hampir seluruh wilayah Kecamatan Imogiri, hampir seluruh wilayah Kecamatan Pleret, hampir seluruh wilayah Kecamatan Piyungan dan seluruh wilayah Kecamatan Dlingo.

c. Kawasan perlindungan setempat

Kawasan perlindungan setempat adalah kawasan sempadan sungai, kawasan sempadan pantai, kawasan sekitar mata air, dan ruang terbuka hijau perkotaan kabupaten dengan sebaran sebagai berikut:

- 1) Kawasan sempadan sungai direncanakan seluas 2.805 Ha (5,53%) atau 58% dari luas DAS di Kabupaten Bantul dengan penyebaran di kiri dan kanan aliran sungai meliputi Sungai Opak, Sungai Oyo, Sungai Progo, Sungai Krusuk, Sungai Timoho, Sungai Konteng, Sungai Kramat, Sungai Bedog, Sungai Winongo, Sungai Bulus, Sungai Code, Sungai Belik, Sungai Gadjahwong, Sungai Kedung Semerangan, Sungai Tambakbayan, Sungai Kuning, Sungai Buntung, Sungai

- Gawe, Sungai Kenteng, Sungai Plilan, Sungai Celeng, dan Sungai Kedungmiri.
- 2) Kawasan sempadan pantai mencakup areal sepanjang garis pantai dengan lebar paling rendah 100 meter dari pasang paling tinggi ke arah daratan dan sepanjang 13,5 km atau seluas kurang lebih 123 Hektar (0,24%) yang tersebar di Desa Poncosari Kecamatan Srandakan, Desa Gadingsari, Desa Srigading Kecamatan Sanden dan Desa Tirtohargo, Desa Parangtritis Kecamatan Kretek.
 - 3) Kawasan lindung sekitar mata air direncanakan seluas kurang lebih 1.578 Ha (3,11%) yang tersebar di Desa Parangtritis (Kecamatan Kretek), Desa Seloharjo, dan Desa Panjangrejo (Kecamatan Pundong), Desa Muntuk, Desa Mangunan, Desa Dlingo, Desa Temuwuh, Desa Terong, dan Desa Jatimulyo (Kecamatan Dlingo), Desa Srimulyo, dan Desa Srimartani (Kecamatan Piyungan), Desa Caturharjo dan Desa Triharjo (Kecamatan Pandak), Desa Srigading, Desa Gadingsari, dan Desa Gadingharjo (Kecamatan Sanden) serta Desa Sendangsari (Kecamatan Pajangan). Masing-masing kawasan mata air ditetapkan zona bebas kegiatan budidaya paling rendah dalam radius 200 meter dari pusat kawasan.
 - 4) Kawasan ruang terbuka hijau (RTH) direncanakan paling rendah 30% dari luas kawasan perkotaan, meliputi 20% RTH Publik dan 10% RTH privat.
- d. Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya
- Kawasan suaka alam yaitu Cagar Alam Imogiri di Desa Girirejo, Kecamatan Imogiri. Kawasan pelestarian alam meliputi kawasan mangrove terletak di Desa Tirtohargo Kecamatan Kretek dan kawasan konservasi penyu di Desa Srigading, Kecamatan Sanden. Sedangkan persebaran kawasan cagar budaya meliputi:

- Masjid Agung Kotagede di Desa Jagalan, Kecamatan Banguntapan dan Museum Wayang Kekayon di Desa Baturetno, Kecamatan Banguntapan;
 - Kompleks Makam Raja-raja di Desa Imogiri, Kecamatan Imogiri;
 - Situs Ambarbinangun dan Masjid Patok Negara di Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan;
 - Petilasan/Ziarah Mangir di Desa Sendangsari dan Gua Selarong di Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan;
 - Petilasan Keraton Mataram di Desa Pleret dan Desa Segoroyoso, Kecamatan Pleret;
 - Cagar Budaya Pendidikan di Desa Panggunharjo, Kecamatan Sewon; dan
 - Makam Sewu di Desa Wijirejo, Kecamatan Pandak.
- e. Kawasan rawan bencana
- Kawasan rawan bencana meliputi kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan longsor, kawasan rawan banjir, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan kekeringan, meliputi :
- 1) Kawasan rawan gempa bumi terdapat di seluruh wilayah Kabupaten Bantul;
 - 2) Kawasan rawan longsor terdapat di Kecamatan Imogiri, Kecamatan Dlingo, Kecamatan Pleret, Kecamatan Piyungan, dan Kecamatan Pundong;
 - 3) Kawasan rawan banjir terdapat di Kecamatan Kretek, Kecamatan Srandakan, Kecamatan Sanden, Kecamatan Pandak, Kecamatan Jetis, Kecamatan Pundong, dan Kecamatan Pleret;
 - 4) Kawasan rawan gelombang pasang terdapat di Kecamatan Kretek, Kecamatan Srandakan, dan Kecamatan Sanden, sebagian Kecamatan Pandak, sebagian Kecamatan Pundong, sebagian Kecamatan Imogiri, sebagian Kecamatan Jetis, dan sebagian Kecamatan Bambanglipuro;

- 5) Kawasan rawan kekeringan terdapat di Kecamatan Dlingo, sebagian Kecamatan Piyungan, sebagian Kecamatan Pajangan, sebagian Kecamatan Pleret, sebagian Kecamatan Imogiri, sebagian Kecamatan Pundong, sebagian Kecamatan Sedayu, sebagian Kecamatan Kasihan, dan sebagian Kecamatan Kretek.

2. Kawasan Budidaya Kabupaten

Rencana pengembangan kawasan budidaya Kabupaten terdiri atas:

a. Kawasan peruntukan hutan rakyat

Kawasan peruntukan kehutanan (hutan rakyat) direncanakan seluas kurang lebih 8.545 Ha (16,86%) penyebarannya difokuskan pada Kecamatan Piyungan, Kecamatan Pleret, Kecamatan Dlingo, Kecamatan Imogiri, Kecamatan Pajangan, Kecamatan Jetis, Kecamatan Pundong, Kecamatan Kretek, Kecamatan Bambanglipuro, Kecamatan Sedayu, Kecamatan Kasihan, Kecamatan Srandakan, Kecamatan Pandak, dan Kecamatan Sanden.

b. Kawasan peruntukan pertanian

Kawasan peruntukan pertanian meliputi kawasan pertanian lahan basah, kawasan pertanian lahan kering, dan kawasan peternakan, yaitu:

- 1) Kawasan pertanian lahan basah direncanakan seluas ± 13.324 Ha (26,29%) difokuskan terutama pada bagian tengah dan selatan, tetapi penyebarannya terdapat di seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Kasihan hanya sebagian kecil wilayah;
- 2) Kawasan pertanian lahan kering direncanakan seluas ± 5.247 Ha (10,35%) difokuskan terutama pada bagian timur yaitu di Desa Jatimulyo, Desa Terong, Desa Muntuk, Desa Dlingo Kecamatan Dlingo, sebagian Desa Srimartani, Desa Srimulyo, Desa Sitimulyo Kecamatan Piyungan, Desa Wonolelo, Desa Bawuran, Desa Segoroyoso Kecamatan Pleret, Desa Imogiri, Desa Selopamioro, Desa Wukirsari, Desa Girirejo, Desa

Karangtalun Kecamatan Imogiri, Desa Parangtritis Kecamatan Kretek, Desa Seloharjo Kecamatan Pundong.

3) Kawasan Peternakan meliputi:

- Peternakan itik di Kecamatan Kretek, Kecamatan Bantul, dan Kecamatan Sanden;
- Peternakan sapi perah di Kecamatan Srandakan, Kecamatan Banguntapan, Kecamatan Jetis, dan Kecamatan Sedayu;
- Peternakan sapi potong dan kambing tersebar di hampir seluruh kecamatan;
- Peternakan babi di Kecamatan Srandakan dan Kecamatan Kasihan;
- Peternakan kerbau di Kecamatan Sanden dan Kecamatan Banguntapan;
- Peternakan kelinci di Kecamatan Sanden.

c. Kawasan peruntukan perikanan

Kawasan peruntukan perikanan terdiri dari:

- Kawasan peruntukan perikanan tangkap direncanakan di wilayah Kecamatan Srandakan, Kecamatan Sanden dan Kecamatan Kretek untuk pengembangan jenis perikanan laut dan untuk jenis perikanan darat direncanakan di seluruh kecamatan;
- Kawasan peruntukan budidaya perikanan direncanakan di Kecamatan Banguntapan, Kecamatan Pandak, Kecamatan Piyungan, Kecamatan Pundong, Kecamatan Sanden, dan Kecamatan Sedayu.

d. Kawasan peruntukan pertambangan

Kawasan peruntukan pertambangan terdapat di :

- Kecamatan Dlingo berupa Breksi Andesit, Batu Gamping, Batu Pasir, Batu Lempung, dan Fosfat;

- Kecamatan Imogiri berupa Breksi Andesit, Batu Gamping, Mangaan, Lempung, Breksi Pumice, Batu Pasir Tufan, dan Batu Pasir Pumice;
 - Kecamatan Piyungan berupa Lempung, Breksi Pumice, dan Batu Pasir Pumice;
 - Kecamatan Banguntapan berupa Usaha Lempung dan Tanah Urug;
 - Kecamatan Sewon berupa Batu Pasir dan Tanah Urug;
 - Kecamatan Pleret berupa Batu Pasir Pumice, Breksi Pumice, Lempung, dan Pasir Tufan;
 - Kecamatan Jetis berupa Pasir, Lempung, Breksi Batu Apung, dan Breksi Andesit;
 - Kecamatan Banguntapan berupa Batu lempung dan Tanah Urug;
 - Kecamatan Pajangan berupa Batu Gamping Berlapis, Pasir, Kerikil berpasir (sirtu), dan Tanah Urug;
 - Kecamatan Sedayu berupa Batu Pasir, Batu Gamping, dan Tanah Urug;
 - Kecamatan Pandak berupa Batu Gamping, Pasir, Kerikil berpasir, dan Tanah Urug;
 - Kecamatan Bambanglipuro berupa Tanah Urug dan Pasir;
 - Kecamatan Srandakan berupa Pasir, Kerikil berpasir (Sirtu), Pasir Besi, dan Tanah urug;
 - Kecamatan Sanden berupa Tanah Urug, Pasir, dan Pasir Besi.
 - Kecamatan Kretek berupa Tanah Urug, Pasir, dan Pasir Besi;
 - Kecamatan Pundong berupa Pasir, Lempung, dan Breksi Andesit; dan
 - Seluruh kecamatan yang meliputi Wilayah Kerja Eksplorasi ataupun Wilayah Kerja Eksploitasi minyak dan gas bumi.
- e. Kawasan peruntukan industri
- Kawasan peruntukan industri meliputi:

- Industri menengah dan besar di Desa Argosari, Desa Argorejo, Desa Argodadi, Desa Argomulyo Kecamatan Sedayu dan Desa Srimulyo, Desa Sitimulyo Kecamatan Piyungan, Industri kecil, dan menengah tersebar di seluruh Kecamatan;
- Industri mikro dan kecil dapat berada di luar kawasan peruntukan industri sepanjang tidak bertentangan sifat dominasi kawasan dan sesuai dengan ketentuan umum peraturan zonasi.
- Pengembangan sentra industri kecil dan menengah yang tersebar di seluruh kecamatan diarahkan menjadi kawasan industri tertentu UMKM

f. Kawasan peruntukan pariwisata

Kawasan peruntukan pariwisata meliputi pariwisata budaya, pariwisata alam, dan pariwisata buatan, dengan sebaran sebagai berikut :

1) Kawasan peruntukan pariwisata budaya terdapat di :

- Kompleks Makam Raja-raja Imogiri di Desa Girirejo Kecamatan Imogiri;
- Kompleks Situs Ambarbinangun di Desa Tirtonirmolo Kecamatan Kasihan;
- Situs Keraton Mataram di Desa Pleret Kecamatan Pleret;
- Padepokan Ki Ageng Mangir di Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan;
- Kawasan Kotagedhe di Desa Jagalan dan Desa Singosaren Kecamatan Banguntapan;
- Gua Selarong di Desa Guwosari Kecamatan Pajangan;
- Goa Jepang di Desa Seloharjo Kecamatan Pundong;
- Desa Budaya Dlingo Kecamatan Dlingo, Desa Seloharjo Kecamatan Pundong, Desa Srigading Kecamatan Sanden, Desa Triwidadi Kecamatan Pajangan, Desa Trimurti Kecamatan Srandakan; Padepokan Seni Bagong Kusudiharja di Desa Tamantirto Kecamatan Kasihan;

- Cepuri Parangkusumo di Desa Parangtritis; dan
 - Parangendog di Desa Parangtritis;
- 2) Kawasan peruntukan pariwisata alam terdapat di :
- Kawasan Pantai Parangtritis (Parangtritis, Parangkusumo, Depok);
 - Kawasan Pantai Samas (Pantai Samas, Pandansari, Patehan);
 - Kawasan Pantai Pandansimo (Kuwaru, Pandansimo);
 - Kompleks Gua Cerme di Desa Selopamioro, Kecamatan Imogiri;
 - Goa Jepang di Desa Seloharjo Kecamatan Pundong;
 - Agrowisata Samas di Desa Srigading, Kecamatan Sanden; dan
 - Agrowisata Dlingo di Desa Mangunan, Kecamatan Dlingo.
- 3) Kawasan peruntukan pariwisata buatan di Kabupaten terdapat di :
- Desa Wisata Kebon Agung di Desa Kebon Agung, Kecamatan Imogiri.
 - Desa Kerajinan Gabusan – Manding – Tembi (GMT) di Kecamatan Bantul dan Kecamatan Sewon;
 - Desa Kerajinan Krebet di Desa Sendangsari Kecamatan Pajangan;
 - Desa Kerajinan Kasongan – Jipangan – Gendeng – Lemahdadi (Kajigelem) di Kecamatan Kasihan;
 - Desa Kerajinan Panjangrejo Kecamatan Pundong;
 - Desa Wisata Serut;
 - Desa Wisata Trimulyo; dan
 - Tempat Rekreasi dan Taman Bermain di Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan.

g. Kawasan peruntukan permukiman

Kawasan peruntukan permukiman terbagi menjadi permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan dengan sebaran sebagai berikut:

- 1) Rencana kawasan permukiman perkotaan direncanakan seluas kurang lebih 5.434 Ha (10,72%) penyebarannya difokuskan di wilayah Kecamatan Sewon, Kecamatan Banguntapan, Kecamatan Kasihan, Kecamatan Pajangan, Kecamatan Bantul, Kecamatan Pleret dan Kecamatan Piyungan;
- 2) Rencana Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun (Kasiba/Lisiba) Bantul Kota Mandiri di Desa Guwosari, Desa Sendangsari dan Desa Triwidadi Kecamatan Pajangan dan di Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan direncanakan seluas kurang lebih 1.300 Ha;
- 3) Rencana untuk kawasan permukiman perdesaan direncanakan seluas kurang lebih 5.738 Ha (11,32%) penyebarannya di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten kecuali Kecamatan Banguntapan.

h. Kawasan peruntukan lainnya.

Kawasan peruntukan lainnya meliputi : kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan dan kawasan peruntukan fasilitas pelayanan umum lainnya, dengan sebaran sebagai berikut:

- 1) Rencana kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan meliputi:
 - a. Akademi Angkatan Udara dan Sekolah Penerbangan TNI Angkatan Udara di Kecamatan Banguntapan;
 - b. Sekolah Polisi Negara di Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri;
 - c. Kompi Brimob Polda Daerah Istimewa Yogyakarta Gondowulung;
 - d. Polisi Air Udara di Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek;

- e. Pos Angkatan Laut di Desa Srigading Kecamatan Sanden; dan
 - f. Stasiun Radar di Kecamatan Kretek.
- 2) Rencana pengembangan kawasan fasilitas pelayanan umum lainnya diarahkan sebagai berikut:
- a. Rencana pengelolaan dan pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa yaitu pertumbuhan perdagangan secara linier diarahkan sepanjang jalan arteri sekunder dan kolektor sekunder;
 - b. Rencana pengembangan fasilitas pendidikan, yaitu mengupayakan terlayannya wilayah Kabupaten secara merata dengan fasilitas pendidikan dari tingkat dasar (TK dan SD) sampai dengan SMA, pengembangan kawasan pendidikan tinggi terpadu di Desa Tamantirt Kecamatan Kasihan dan Kecamatan Sewon;
 - c. Rencana pengembangan fasilitas kesehatan;
 - d. Rencana pengelolaan peribadatan;
 - e. Rencana pengembangan fasilitas rekreasi/olah raga yaitu fasilitas olah raga skala Kabupaten berpusat di area Stadion Sultan Agung, dan fasilitas rekreasi dan olahraga diarahkan tersebar di masing-masing;
 - f. Rencana pengembangan fasilitas perkantoran dapat berlokasi pada semua kawasan budidaya kecuali padakawasan pertanian;
 - g. Rencana pengembangan taman pekuburan/pemakaman.

2.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 4 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 disebutkan kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang berpotensi tinggi mengalami bencana alam, meliputi kawasan rawan gempa bumi,

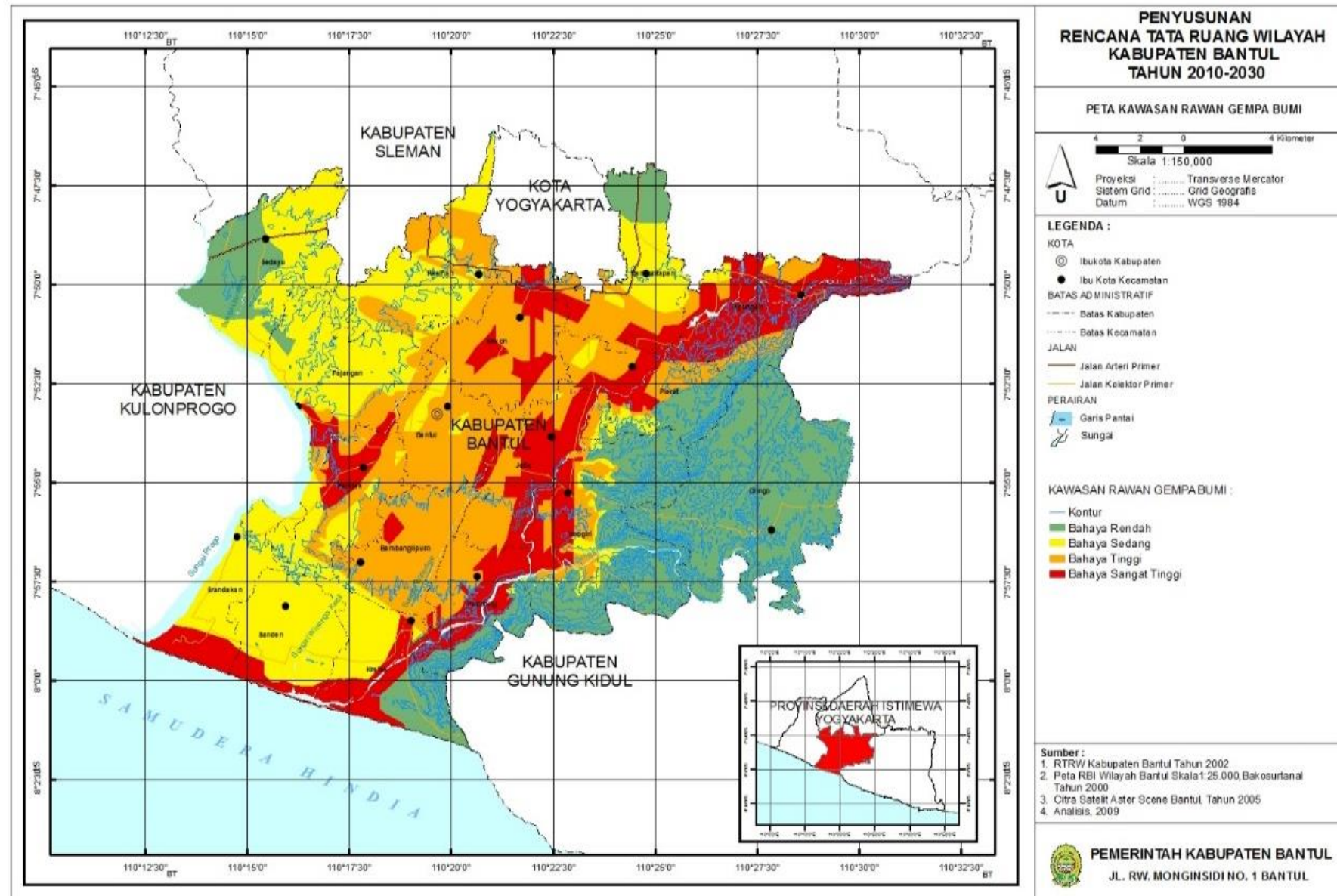
kawasan rawan longsor, Kawasan rawan banjir, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan kekeringan.

Tabel 2.6 Kawasan Rawan Bencana Menurut Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030

No	Jenis Bencana	Lokasi yang berpotensi
1	Kawasan rawan gempa bumi	Di seluruh kecamatan
2	Kawasan rawan longsor	Piyungan, Pleret, Dlingo, Imogiri, Pundong dan Pajangan
3	Kawasan rawan banjir	Srandakan, Pandak, Kretek, Sanden, Pundong, Jetis dan Pleret
4	Kawasan rawan gelombang ekstrim dan abrasi	Kretek, Srandakan, dan Sanden, sebagian Kecamatan Pandak, sebagian Kecamatan Pundong, sebagian Kecamatan Imogiri, sebagian Kecamatan Jetis, dan sebagian Kecamatan Bambanglipuro
5	Kawasan rawan kekeringan	Dlingo, sebagian Piyungan, sebagian Pajangan, sebagian Pleret, sebagian Imogri, sebagian Pundong, sebagian Sedayu, sebagian Kasihan, dan sebagian Kretek

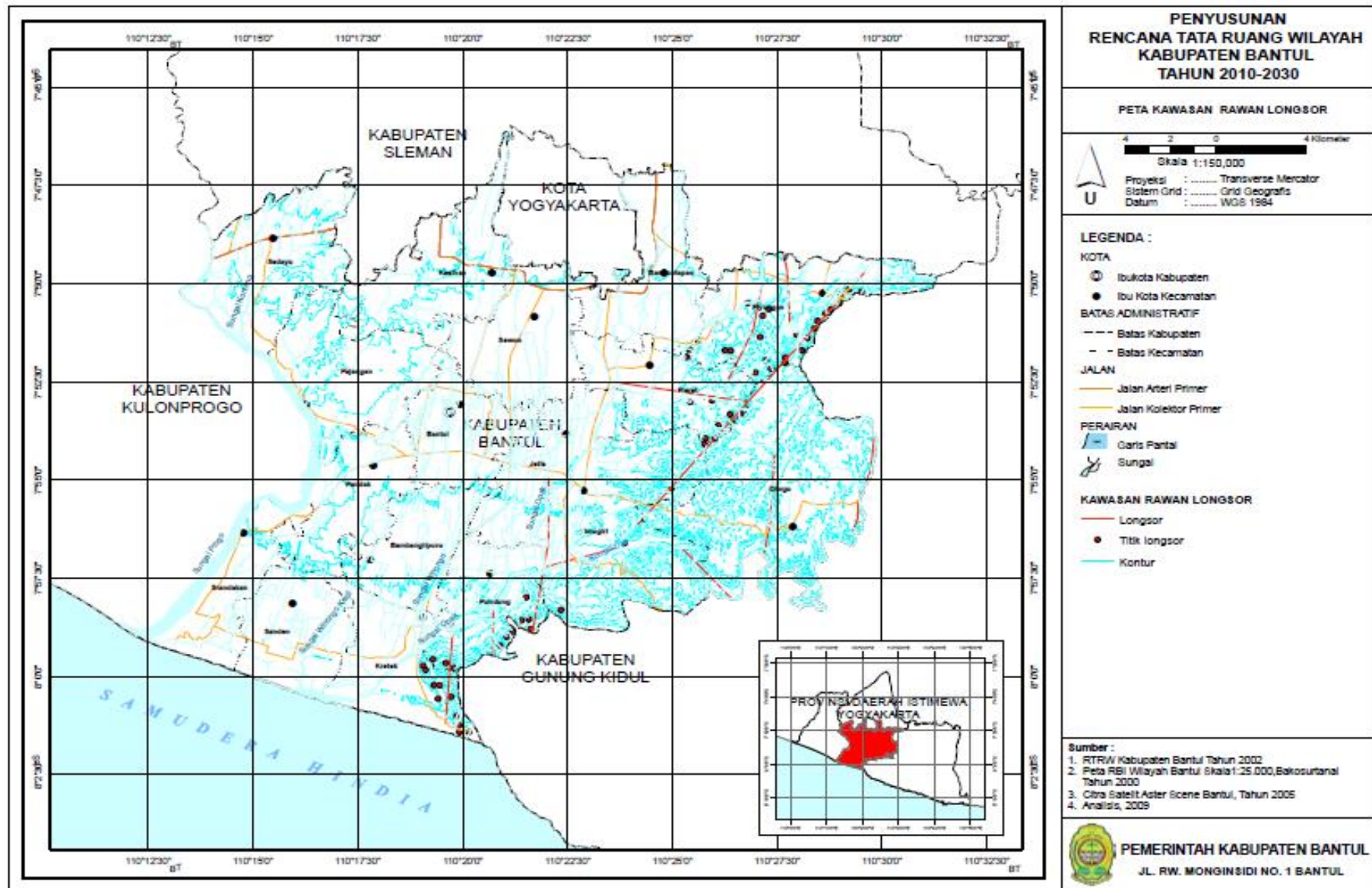
Sumber: RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030

Wilayah Kabupaten Bantul berada pada pertemuan lempeng Eurasia dan lempeng Indonesia-Australia, juga terletak pada lintasan patahan/sesar Opak yang masih aktif. Merupakan kawasan rawan bencana gempa bumi tektonik yang potensial tsunami, terutama wilayah bagian selatan. Bencana gempa tanggal 27 Mei 2006 terjadi hampir di seluruh Kabupaten Bantul. Secara spasial, sebaran kawasan rawan bencana dapat dilihat pada gambar berikut.



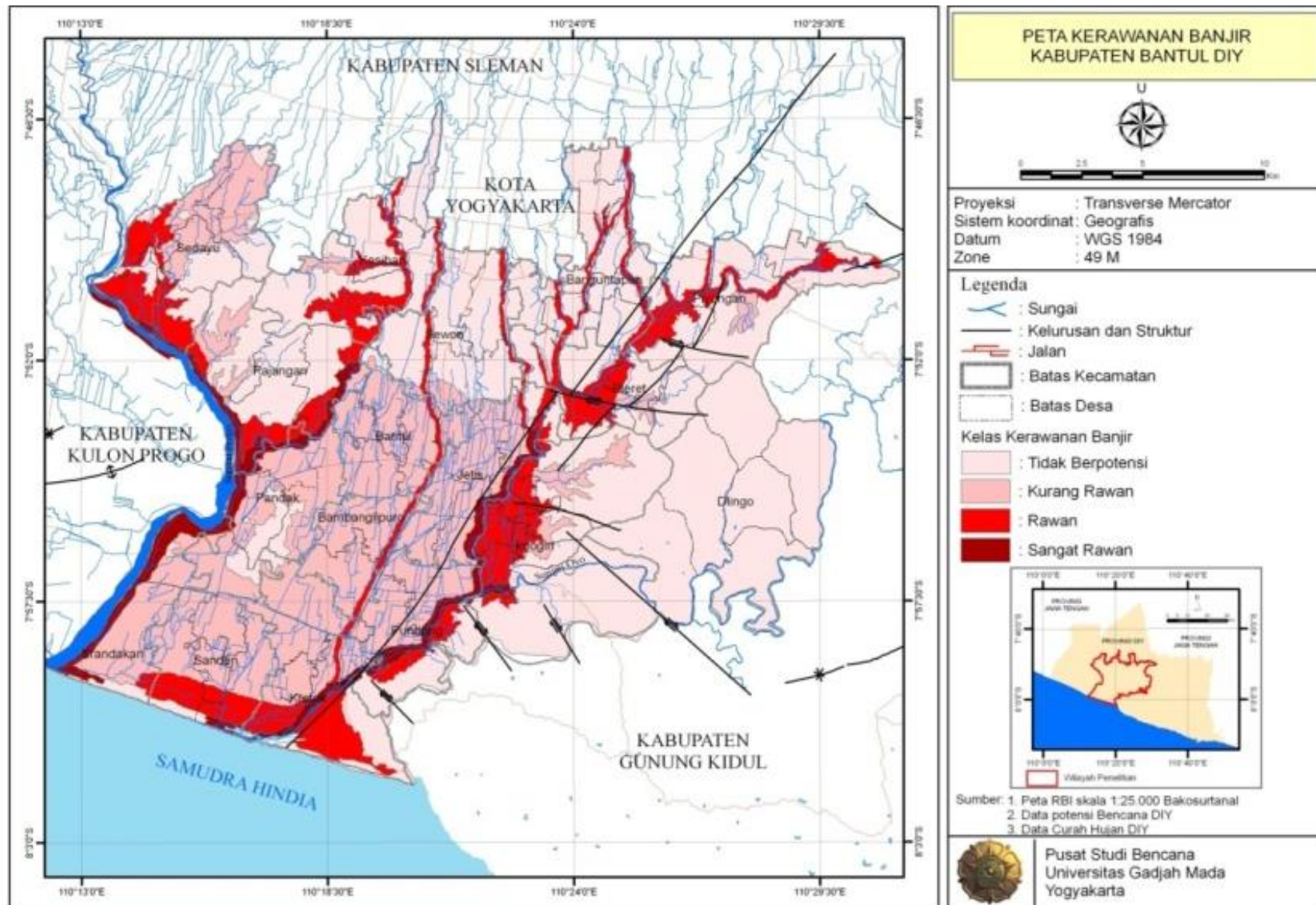
Sumber: RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030, Bappeda Kabupaten Bantul, 2020

Gambar 2.8 Peta Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Bantul



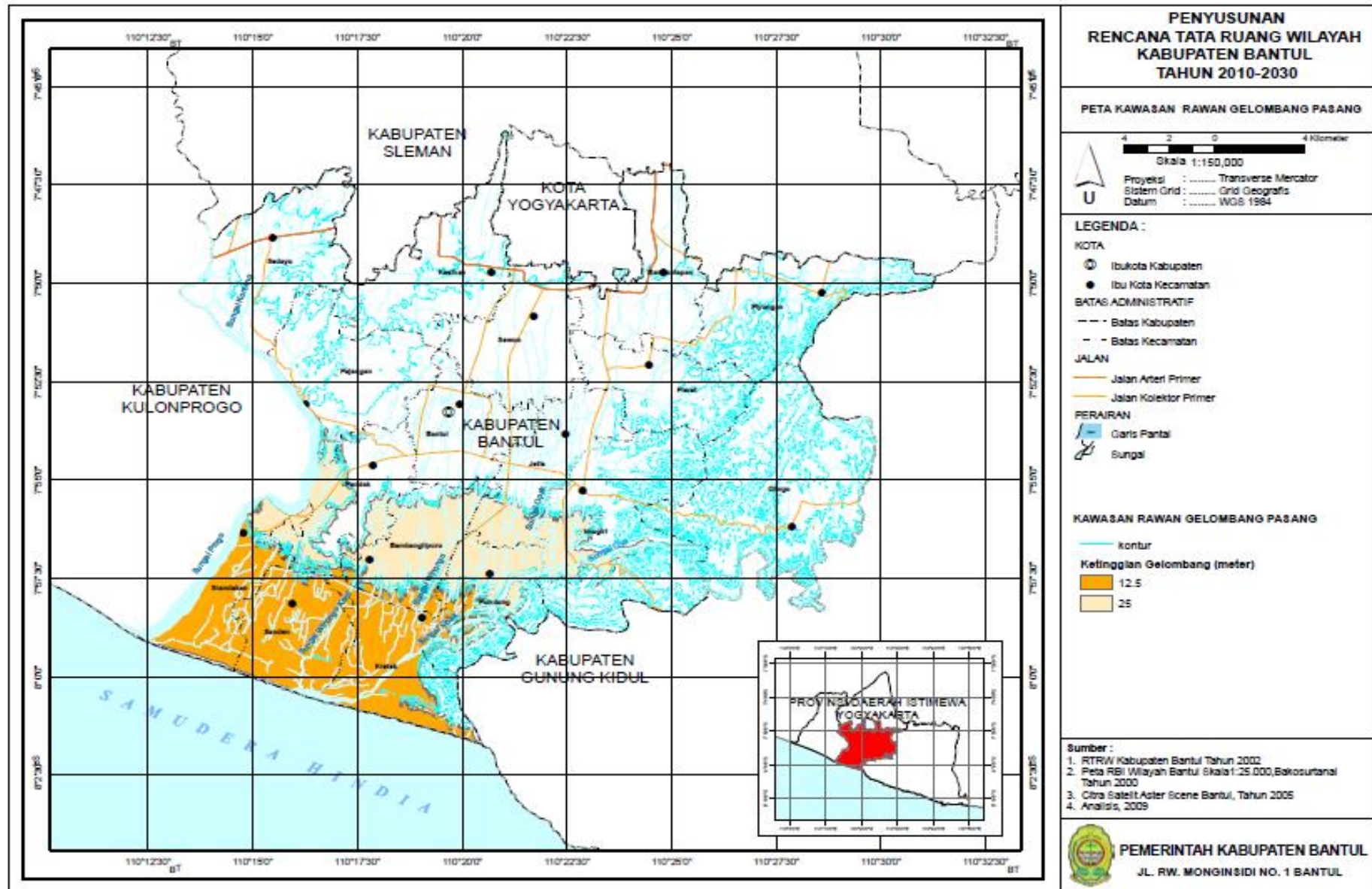
Sumber: RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030, Bappeda Kabupaten Bantul, 2020

Gambar 2.9 Peta Kawasan Rawan Bencana Longsor Kabupaten Bantul



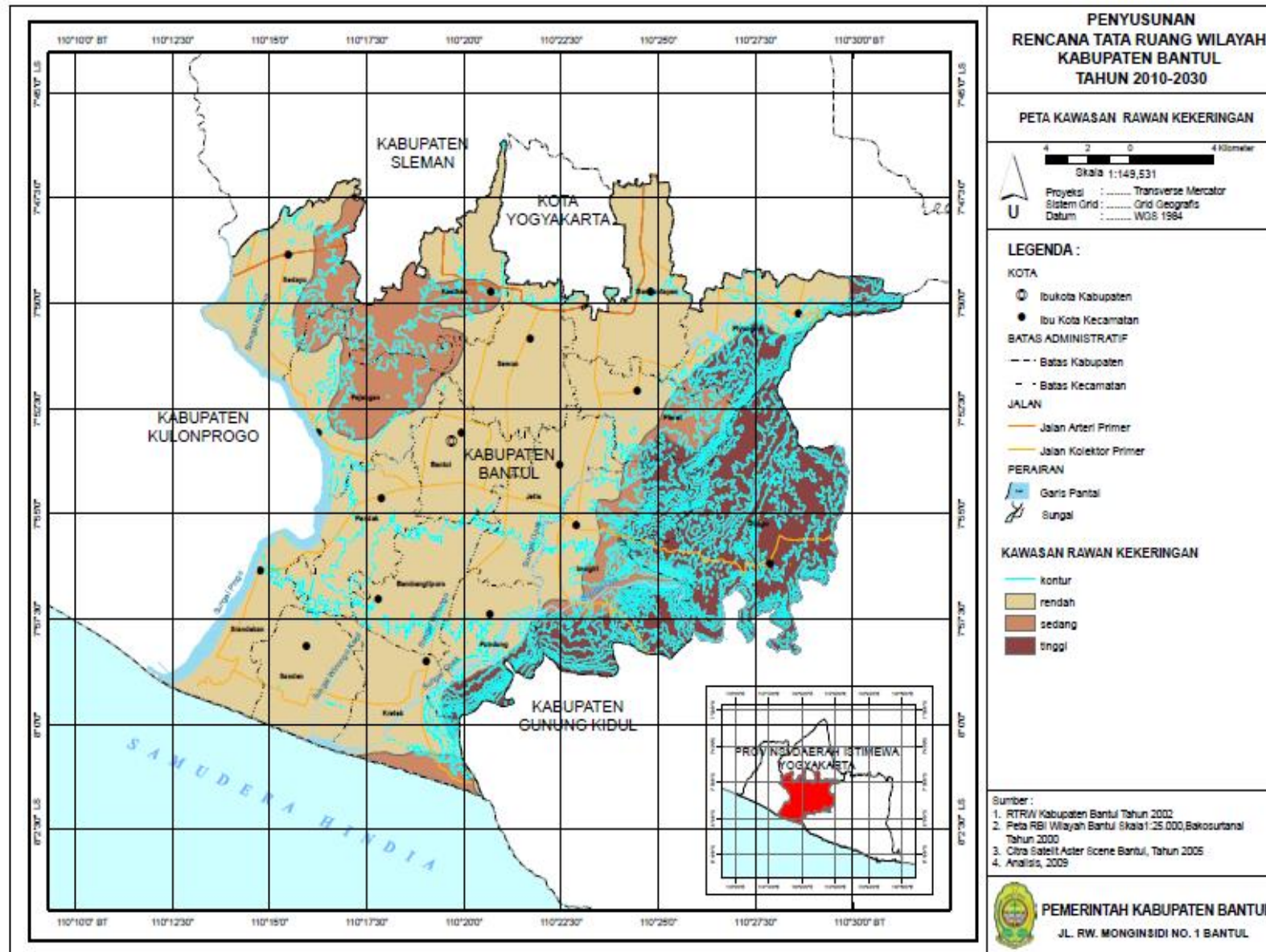
Sumber: RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030, Bappeda Kabupaten Bantul, 2020

Gambar 2.10 Peta Kawasan Rawan Bencana Banjir Kabupaten Bantul



RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030, Bappeda Kabupaten Bantul, 2020

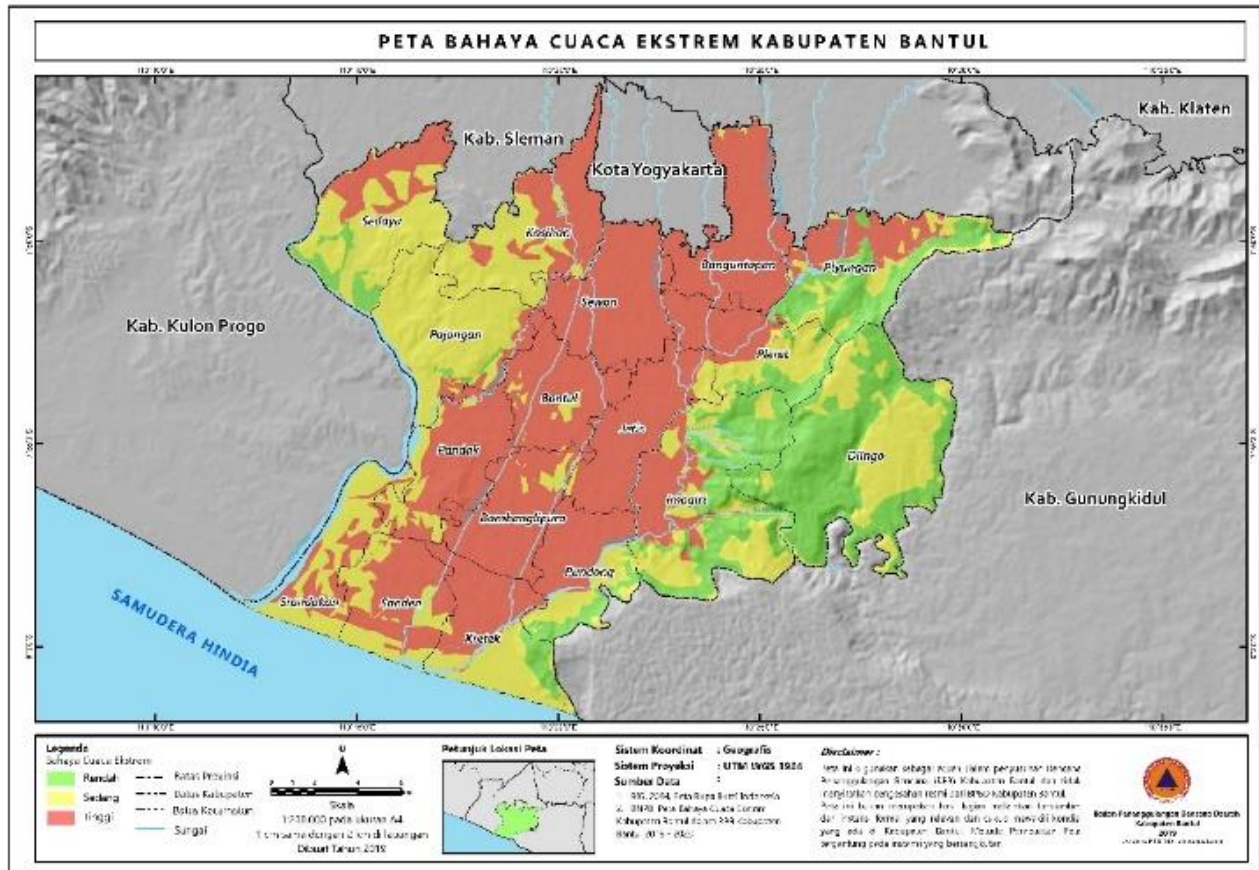
Gambar 2.11 Peta Kawasan Rawan Bencana Gelombang Pasang Kabupaten Bantul



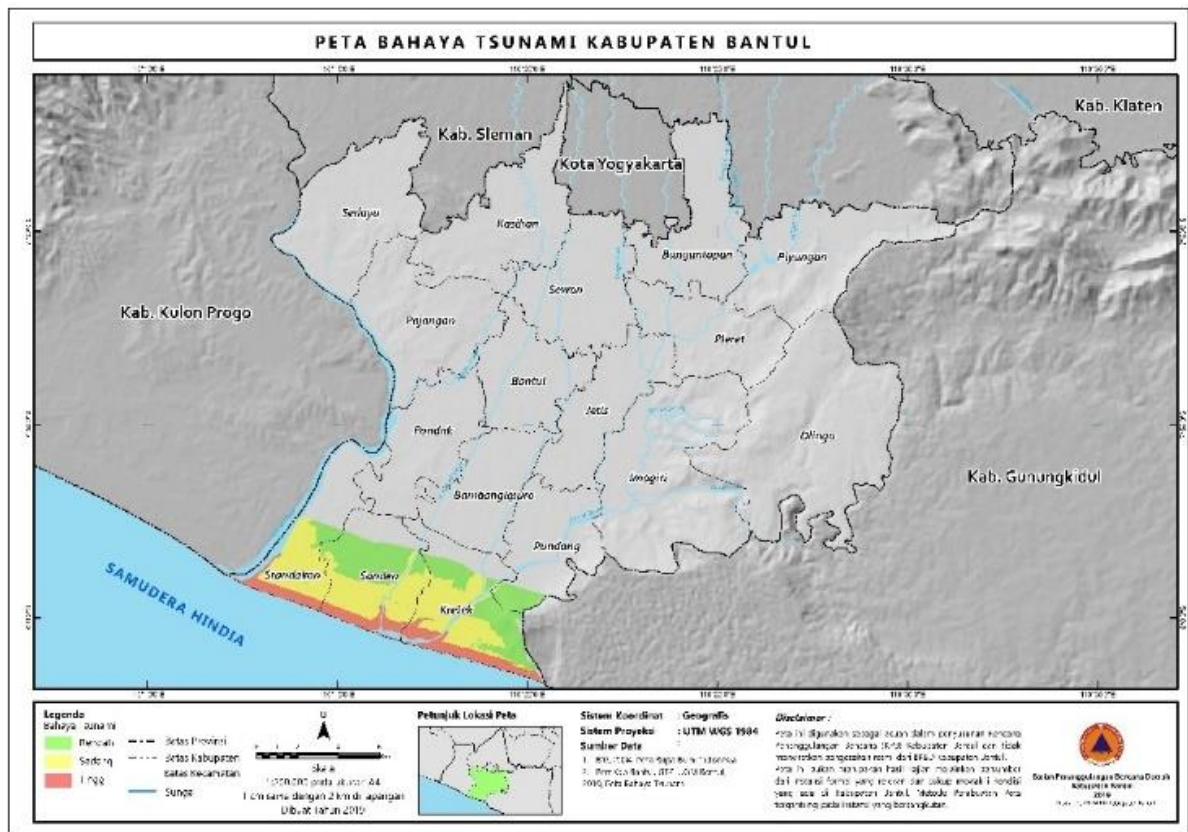
Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul, 2020

Gambar 2.12 Peta Kawasan Rawan Bencana Kekeringan Kabupaten Bantul

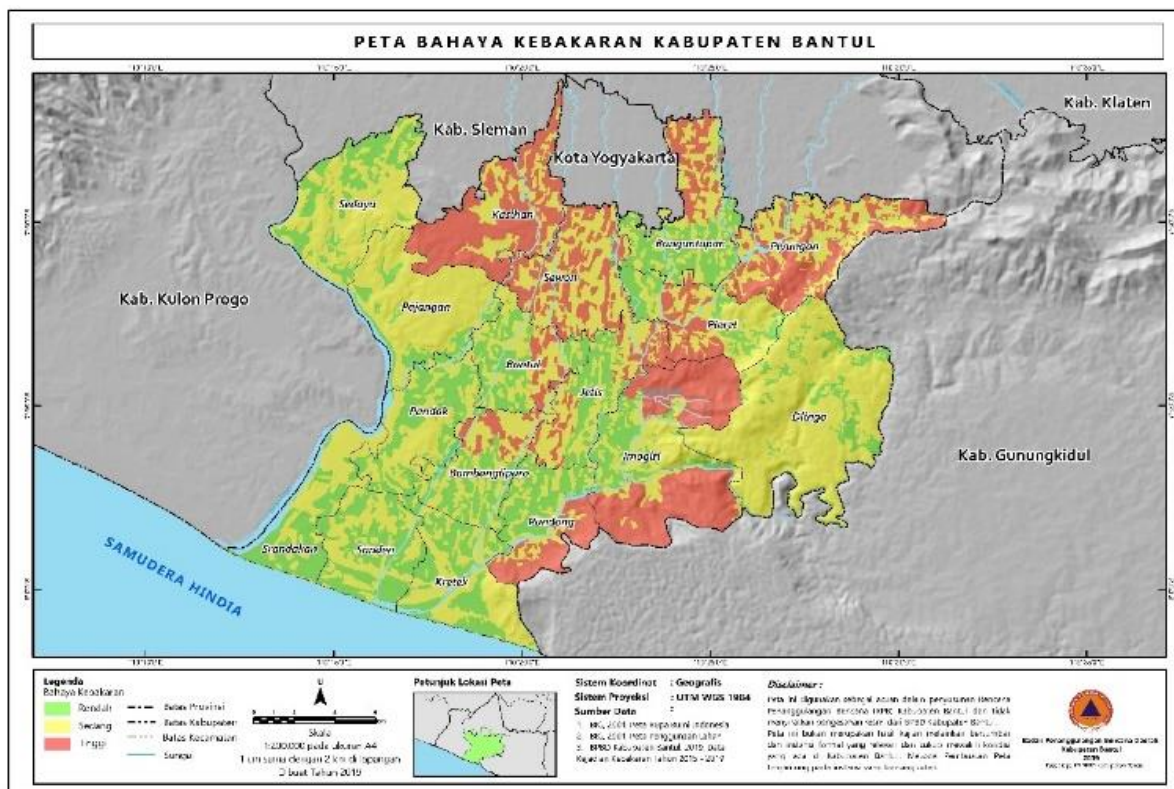
Selain 5 (lima) jenis bencana yang tertuang dalam RTRW, di Kabupaten Bantul terdapat 4 (empat) potensi bencana lain, yaitu cuaca ekstrim, tsunami, kebakaran dan epidemi/wabah penyakit, dengan peta bahaya dapat dilihat pada gambar berikut.



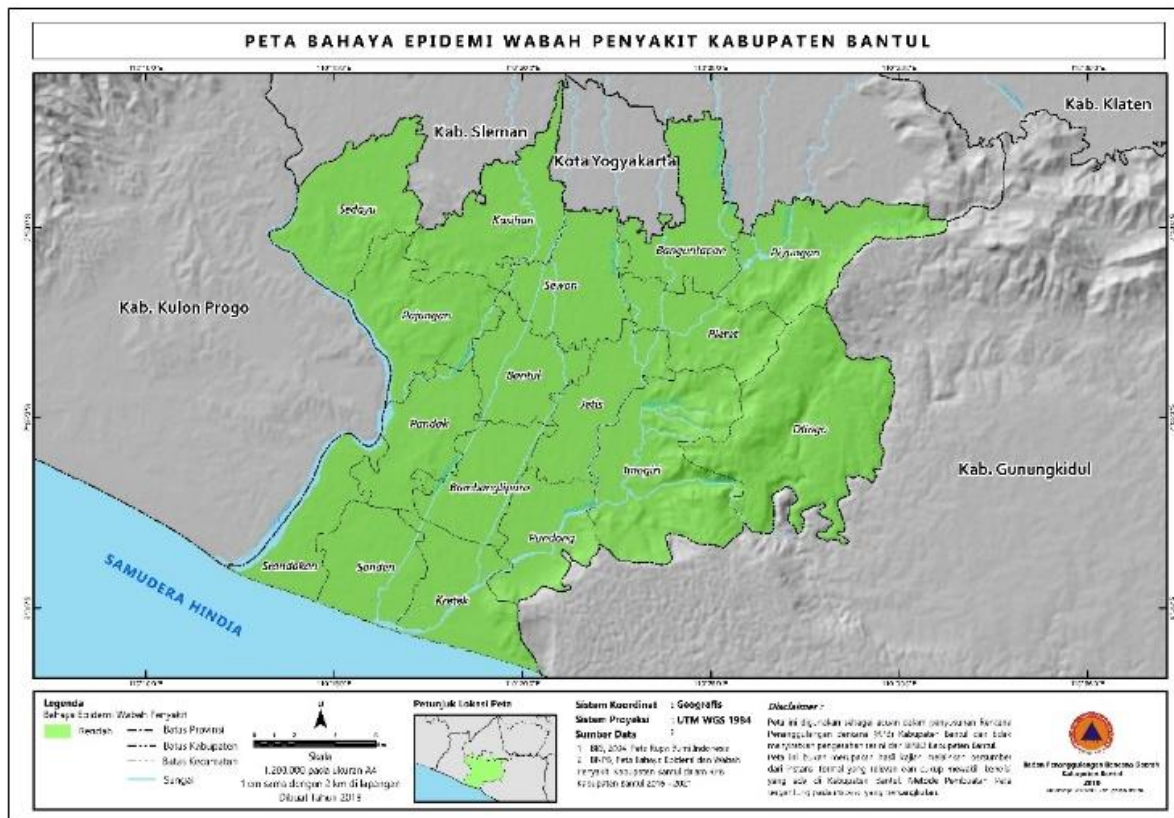
Gambar 2.13 Peta Bahaya Cuaca Ekstrem Kabupaten Bantul



Gambar 2.14 Peta Bahaya Tsunami Kabupaten Bantul



Gambar 2.15 Peta Bahaya Kebakaran Kabupaten Bantul



Gambar 2.16 Peta Bahaya Epidemi Wabah Penyakit Kabupaten Bantul

Potensi tingkat risiko bencana pada 9 (sembilan) jenis bencana adalah tingkat risiko rendah, sedang dan tinggi.

Tabel 2.7 Tingkat Risiko Bencana di Kabupaten Bantul

No	Jenis Ancaman	Luas Ancaman		Jumlah Penduduk Terpapar		Nilai Kerugian		Tingkat Kapasitas Daerah	Tingkat risiko
		Ha	Kelas	Jiwa	Kelas	Miliar	Kelas	Kelas	
1	Gempa Bumi	6.978	Tinggi	93.414	Sedang	8.417	Sedang	Rendah	Sedang
2	Longsor	6.874	Tinggi	63.369	Sedang	5.629	Sedang	Rendah	Sedang
3	Banjir	15.068	Tinggi	24.558	Sedang	24.104	Tinggi	Rendah	Tinggi
4	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	799	Tinggi	7.031	Rendah	651	Rendah	Rendah	Rendah
5	Kekeringan	11.225	Tinggi	93.460	Sedang	13	Rendah	Rendah	Rendah
6	Cuaca Ekstrim	44.768	Tinggi	692.936	Tinggi	53.486	Tinggi	Rendah	Tinggi
7	Tsunami	3.384	Tinggi	34.735	Sedang	1.751	Sedang	Rendah	Sedang*
8	Kebakaran	11.727	Tinggi	94.878	Sedang	22.173	Tinggi	Rendah	Tinggi
9	Epidemi dan Wabah penyakit	50.685	Rendah	945.441	Tinggi	-	Rendah	Rendah	Rendah*

Sumber : BPBD Kabupaten Bantul Tahun 2019

Keterangan : *Jenis ancaman yang belum pernah terjadi di Kabupaten Bantul

2.1.4 Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Bantul tahun 2015-2019 menurut data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul cenderung meningkat. Secara rinci jumlah penduduk Kabupaten Bantul sebagai berikut:

Tabel 2.8 Jumlah Penduduk Kabupaten Bantul menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)				
		2015	2016	2017	2018	2019*
1	Srandakan	31.301	31.244	31.276	31.164	31.218
2	Sanden	32.702	32.494	31.924	31.967	31.972
3	Kretek	31.101	31.082	30.837	30.855	30.863
4	Pundong	35.202	35.484	35.448	35.668	35.908
5	Bambanglipuro	41.165	41.385	41.201	41.621	41.880
6	Pandak	51.307	51.770	51.492	51.781	52.013
7	Bantul	63.161	63.124	62.788	63.669	64.365
8	Jetis	57.573	57.474	57.408	58.206	58.549
9	Imogiri	62.299	62.419	62.531	63.179	63.542
10	Dlingo	39.129	38.666	38.502	39.092	39.537
11	Pleret	46.609	46.663	46.825	47.499	48.170
12	Piyungan	50.517	50.846	51.051	51.692	52.333
13	Banguntapan	107.318	107.548	107.596	110.126	111.955
14	Sewon	96.937	97.420	97.034	98.506	99.807
15	Kasihan	95.719	100.330	100.222	102.175	103.527
16	Pajangan	34.264	34.674	34.894	35.465	36.040
17	Sedayu	43.136	46.053	46.152	47.053	47.646
Jumlah		919.440	928.676	927.181	939.718	949.325

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul, diolah, 2020.

Jumlah penduduk terbanyak ada di Kecamatan Banguntapan, Kasihan dan Sewon. Daerah tersebut merupakan daerah percepatan pengembangan wilayah dan pusat-pusat perekonomian sehingga secara umum menjadi daya tarik bagi penduduk untuk tinggal di lokasi tersebut. Ditilik dari kepadatan penduduk kecamatan, penyebaran penduduk belum merata. Kecamatan dengan luas wilayah yang lebih kecil mempunyai jumlah penduduk lebih banyak dibandingkan dengan

kecamatan yang memiliki luas wilayah lebih besar, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.9.

Tabel 2.9 Kepadatan Penduduk Geografis di Kabupaten Bantul

No.	Kecamatan	Kepadatan (jiwa/km ²)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Srandakan	1.708,57	1.705,46	1.707,21	1.701,09	1.704,04
2	Sanden	1.412,00	1.403,02	1.378,41	1.380,27	1.380,48
3	Kretek	1.161,79	1.161,08	1.151,92	1.152,60	1.152,90
4	Pundong	1.486,57	1.498,48	1.496,96	1.506,25	1.516,39
5	Bambanglipuro	1.813,44	1.823,13	1.815,02	1.833,52	1.844,93
6	Pandak	2.111,40	2.130,45	2.119,01	2.130,91	2.140,45
7	Bantul	2.877,49	2.875,81	2.860,50	2.900,64	2.932,35
8	Jetis	2.352,80	2.348,75	2.346,06	2.378,67	2.392,68
9	Imogiri	1.143,31	1.145,51	1.147,57	1.159,46	1.166,12
10	Dlingo	700,36	692,07	689,14	699,70	707,66
11	Pleret	2.029,12	2.031,48	2.038,53	2.067,87	2.097,08
12	Piyungan	1.552,46	1.562,57	1.568,87	1.588,57	1.608,27
13	Banguntapan	3.768,19	3.776,26	3.777,95	3.866,78	3.931,00
14	Sewon	3.569,11	3.586,89	3.572,68	3.626,88	3.674,78
15	Kasihan	2.956,11	3.098,52	3.095,18	3.155,50	3.197,25
16	Pajangan	1.030,50	1.042,83	1.049,44	1.066,62	1.083,91
17	Sedayu	1.255,41	1.340,31	1.343,19	1.369,41	1.386,67
Rata-rata		1.814,03	1.832,25	1.829,30	1.854,04	1.872,99

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul, diolah, 2020.

Kepadatan penduduk tertinggi ada di 3 (tiga) wilayah kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman yaitu Kecamatan Banguntapan (3.931,00 jiwa/km²), Kecamatan Sewon (3.674,78 jiwa/km²), dan Kecamatan Kasihan (3.197,25 jiwa/km²). Sementara itu kepadatan penduduk geografis terendah ada di Kecamatan Dlingo (707,66 jiwa/km²).

Dari data di atas dapat dilihat bahwa hampir di semua kecamatan mengalami peningkatan kepadatan penduduk. Hal ini perlu diwaspadai karena dengan semakin pesatnya pertambahan penduduk akan menyebabkan masalah daya dukung lingkungan menjadi semakin

terbatas, dan akan berdampak pada peningkatan alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman.

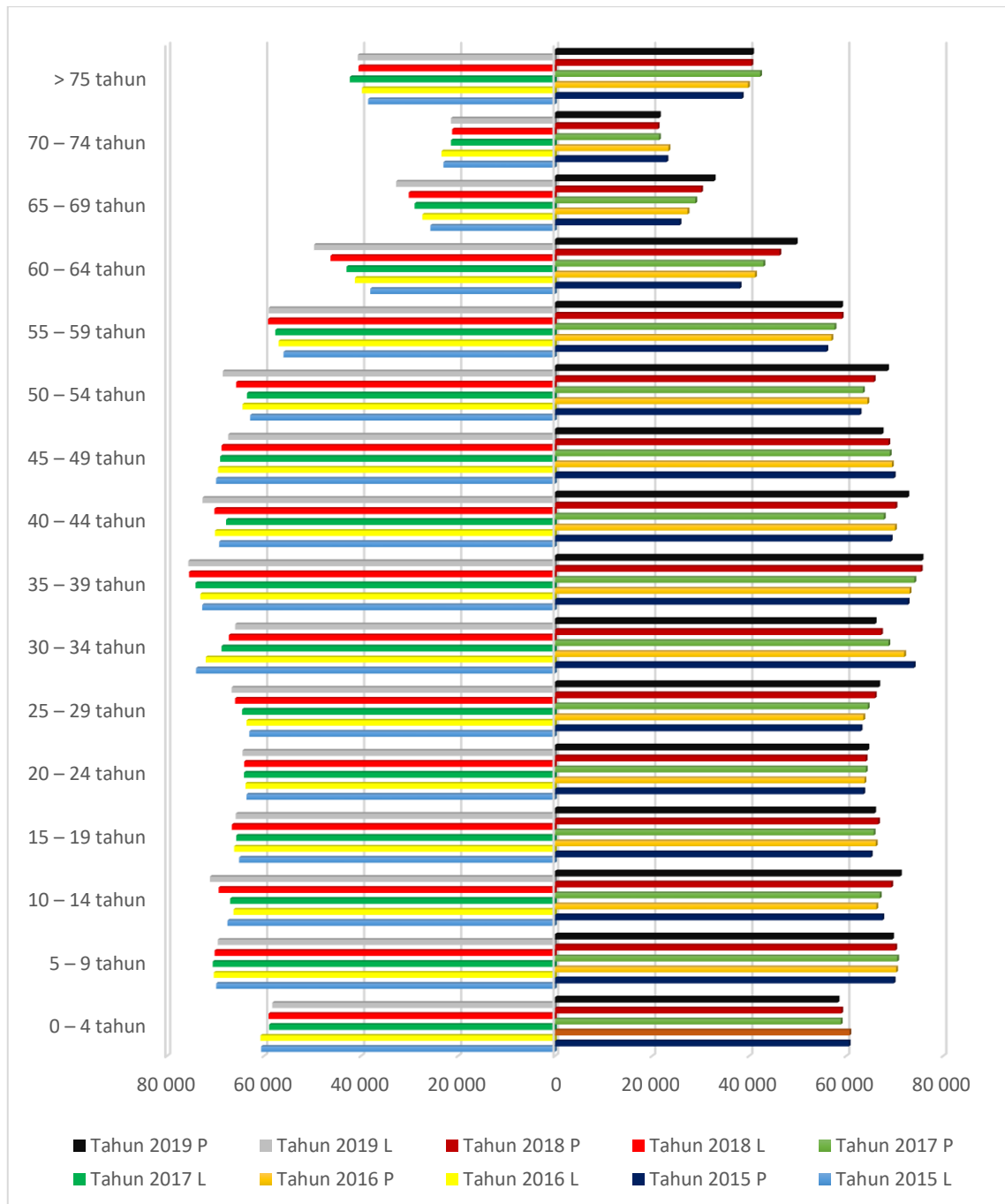
Tabel 2.10 Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Usia
di Kabupaten Bantul Tahun 2015 - 2019

No.	Kelompok Usia	Jumlah Penduduk (jiwa)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	0 – 4 tahun	60.565	60.708	58.920	59.034	58.270
2	5 – 9 tahun	69.841	70.339	70.557	70.171	69.500
3	10 – 14 tahun	67.506	66.261	66.964	69.332	71.130
4	15 – 19 tahun	65.108	66.141	65.710	66.612	65.820
5	20 – 24 tahun	63.581	63.811	64.096	64.063	64.420
6	25 – 29 tahun	63.013	63.577	64.489	65.950	66.659
7	30 – 34 tahun	73.975	71.990	68.746	67.229	65.916
8	35 – 39 tahun	72.719	73.112	74.094	75.432	75.583
9	40 – 44 tahun	69.214	70.090	67.799	70.200	72.659
10	45 – 49 tahun	69.856	69.466	69.025	68.737	67.358
11	50 – 54 tahun	62.829	64.417	63.492	65.721	68.482
12	55 – 59 tahun	55.947	56.973	57.649	59.134	59.016
13	60 – 64 tahun	38.082	41.241	42.972	46.266	49.665
14	65 – 69 tahun	25.689	27.340	28.941	30.145	32.746
15	70 – 74 tahun	23.005	23.402	21.439	21.193	21.437
16	> 75 tahun	38.510	39.808	42.288	40.499	40.664
Jumlah		919.440	928.676	927.181	939.718	949.325

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul, diolah, 2020.

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa struktur penduduk Kabupaten Bantul didominasi oleh penduduk usia sekolah dan usia produktif, sehingga diperlukan adanya kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul terkait pendidikan dan ketenagakerjaan.

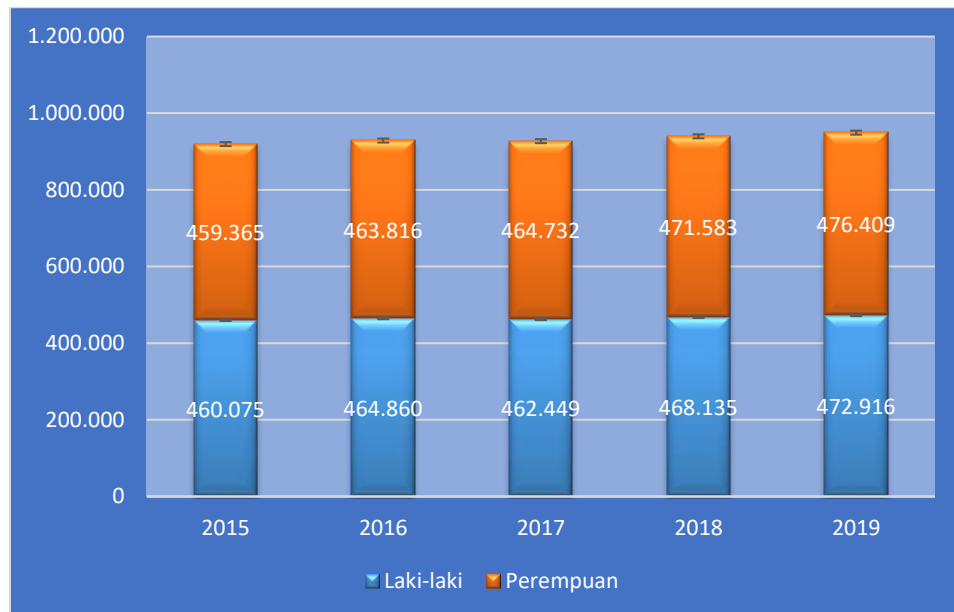
Berdasarkan Piramida Penduduk dalam Gambar 2.17 dapat dilihat proporsi penduduk Kabupaten Bantul pada tahun 2019 didominasi kelompok umur produktif (15-64 tahun) sebesar 69,06%, sementara itu penduduk kelompok usia muda (0-14 tahun) sebesar 20,95%, dan kelompok usia lanjut (di atas 64 tahun) sebesar 9,99%.



Sumber: Disdukcapil Kabupaten Bantul, diolah Bappeda, 2020

Gambar 2.17 Piramida Pendudukn Kabupaten Bantul 2015-2019

Penduduk usia muda dan penduduk usia lanjut disebut juga penduduk non produktif. Berdasarkan komposisi tersebut, rasio beban ketergantungan penduduk usia non produktif terhadap penduduk usia produktif sebesar 44,81%, yang menunjukkan bahwa 100 orang penduduk usia produktif menanggung sekitar 45 orang penduduk yang belum/tidak produktif.



Sumber : Disdukcapil Kabupaten Bantul, semester I, diolah, 2020.

Gambar 2.18 Jumlah Penduduk Kabupaten Bantul Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Bantul Tahun 2015-2019

Komposisi penduduk menurut jenis kelamin diperlukan guna menentukan kebijakan yang berprespektif *gender*. Gambar 2.18 menunjukkan jumlah penduduk perempuan semakin meningkat dan lebih banyak dari penduduk laki-laki, oleh sebab itu dalam menentukan suatu kebijakan perlu mempertimbangkan kesetaraan gender.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat dapat dinilai dari IPM di mana IPM merupakan indeks komposit yang menggambarkan tingkat pembangunan manusia. IPM diukur dengan pendekatan tiga dimensi yaitu kesehatan, pengetahuan dan dimensi hidup layak. Penghitungan IPM untuk dimensi pengetahuan menggunakan indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Dimensi standar hidup layak menggunakan indikator Produk Nasional Bruto (PNB) perkapita, sedangkan untuk menghitung dimensi kesehatan menggunakan indikator Usia Harapan Hidup saat lahir (UHH). Metode agregasinya disempurnakan menjadi rata-rata geometrik. Ketidaktersediaan data PNB ditingkat provinsi dan kabupaten/kota, digunakan proksi pengeluaran perkapita yang disesuaikan, dari data

hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Metode ini mulai diterapkan di Indonesia pada penghitungan IPM tahun 2014.

Tabel 2.11 Perkembangan IPM di Kabupaten Bantul dan DIY

No	Tahun	NILAI IPM Kabupaten Bantul	NILAI IPM DIY
2	2015	77,99	77,59
3	2016	78,42	78,38
4	2017	78,67	78,89
5	2018	79,45	79,53
6	2019	80,01	79,99

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2020

Berdasarkan hasil penghitungan IPM, dapat dilihat bahwa selama lima tahun terakhir nilai IPM Kabupaten Bantul menunjukkan perkembangan yang positif. Nilai IPM terus mengalami peningkatan mulai dari 77,99 pada tahun 2015 hingga mencapai 80,01 pada tahun 2019 dengan level capaiannya menjadi sangat tinggi ($IPM \geq 80$).

IPM Kabupaten Bantul masih dapat ditingkatkan antara lain dengan peningkatan laju pertumbuhan indeks kesehatan yaitu lebih mengutamakan perbaikan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kemudahan akses sarana kesehatan yang tersedia, penggunaan air bersih, keberadaan fasilitas BAB penduduk dan kualitas kesehatan lingkungan tempat tinggal penduduk; peningkatan laju pertumbuhan indeks pengetahuan yaitu dengan meningkatkan partisipasi sekolah penduduk melalui upaya semua anak usia sekolah (SD-SLTA) bisa bersekolah dan tidak putus sekolah; peningkatan laju pertumbuhan indeks pengeluaran dengan meningkatkan daya beli penduduk melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita, membuka lapangan usaha baru, dan adanya program bantuan sosial pemerintah seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), dll. Lebih detail terkait kesejahteraan masyarakat dapat dilihat pada sub bab berikut.

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1 Kemiskinan

Tabel 2.12 menunjukkan bahwa dari tahun 2015 sampai dengan 2019 tingkat kemiskinan menunjukkan kecenderungan menurun. Penurunan tingkat kemiskinan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2016 yaitu turun 1,78 dari tahun 2015, apabila dilihat dari indeks kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan tahun 2017 lebih tinggi dari 2016. Hal ini menunjukkan pengeluaran penduduk miskin dan kesenjangan antara penduduk miskin belum mengalami perbaikan kualitas. Namun demikian pada tahun 2018 diketahui indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan lebih rendah dari tahun 2017 dan juga tingkat kemiskinan turun begitu pula tahun 2019 mengalami penurunan cukup signifikan yang menunjukkan keberhasilan upaya pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan meskipun belum sesuai target yang diharapkan.

Tabel 2.12 Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Bantul Tahun 2015 - 2019

Tahun	Tingkat Kemiskinan (%)	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahannya Kemiskinan	Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bln)
2015	16,33	160.150	3.16	0.89	312.514
2016	14,55	142.760	2.02	0.41	332.057
2017	14,07	139.670	2.21	0.56	347.476
2018	13,43	134.835	2.17	0.46	369.480
2019	12,92	131.151	1,87	0,43	381.538

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, diolah, 2020.

2.2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pertumbuhan perekonomian daerah secara umum dapat dilihat melalui indikator perkembangan PDRB, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Besaran PDRB Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.13 PDRB (Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku) di Kabupaten Bantul

No.	Lapangan Usaha	PDRB	2015 (%)	PDRB	2016 (%)	PDRB	2017 (%)	PDRB	2018*)	PDRB	2019**)
		(milyar Rp)		(milyar Rp)		(milyar Rp)		(milyar Rp)		(milyar Rp)	
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.821,40	14,60	2.995,87	14,33	3.131,89	13,85	3.331,34	13,63	3.442,61	13,07
B	Pertambangan dan Penggalan	125,53	0,65	128,52	0,61	129,08	0,57	133,02	0,54	135,24	0,51
C	Industri Pengolahan	2.909,86	15,06	3.180,27	15,21	3.449,02	15,25	3.721,10	15,22	3.999,98	15,18
D	Pengadaan Listrik dan Gas	21,88	0,11	26,44	0,13	32,30	0,14	35,20	0,14	37,93	0,14
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	16,19	0,08	17,04	0,08	17,98	0,08	19,08	0,08	20,72	0,08
F	Konstruksi	1.803,23	9,33	1.943,46	9,29	2.121,98	9,38	2.374,86	9,72	2.569,86	9,75
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	1.585,61	8,20	1.771,63	8,47	1.945,84	8,61	2.123,78	8,69	2.277,89	8,65
H	Transportasi dan Pergudangan	940,53	4,87	1.001,48	4,79	1.070,71	4,74	1.153,28	4,72	1.278,99	4,85
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.239,28	11,59	2.439,52	11,67	2.652,69	11,73	2.856,63	11,69	3.140,31	11,92
J	Informasi dan Komunikasi	1.411,57	7,30	1.530,26	7,32	1.668,38	7,38	1.789,60	7,32	1.915,28	7,27
K	Jasa Keuangan	545,35	2,82	585,22	2,80	626,18	2,77	692,77	2,83	775,32	2,94
L	Real Estat	1.262,12	6,53	1.376,06	6,58	1.486,18	6,57	1.604,53	6,56	1.767,42	6,71
M,N	Jasa Perusahaan	94,90	0,49	100,78	0,48	107,58	0,48	116,05	0,47	128,33	0,49
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.432,62	7,41	1.578,24	7,55	1.756,87	7,77	1.888,56	7,73	2.010,64	7,63
P	Jasa Pendidikan	1.372,47	7,10	1.437,13	6,87	1.541,56	6,82	1.661,76	6,80	1.816,96	6,90
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	354,92	1,84	387,70	1,85	419,29	1,85	443,27	1,81	488,35	1,85
R,S,T,U	Jasa lainnya	387,74	2,01	413,48	1,98	454,17	2,01	498,44	2,04	539,65	2,05
	PDRB	19.325,20	100,00	20.913,09	100,00	22.611,71	100,00	24.443,27	100,00	26.345,48	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2020

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Tabel 2.14 PDRB (Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun Dasar 2010) di Kabupaten Bantul

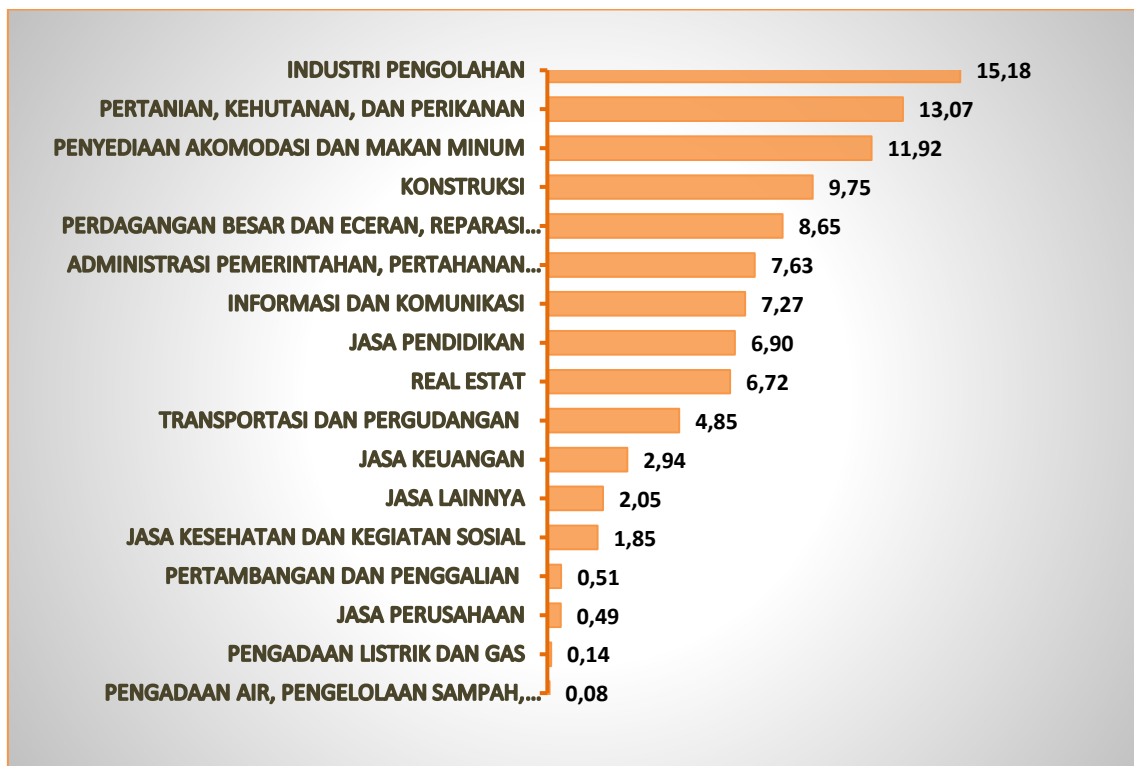
No.	Lapangan Usaha	PDRB (milyar Rp)	2015 (%)	PDRB (milyar Rp)	2016 (%)	PDRB (milyar Rp)	2017 (%)	PDRB (milyar Rp)	2018*) (%)	PDRB (milyar Rp)	2019**) (%)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.952,98	12,53	1.982,71	12,11	2.032,34	11,81	2.073,02	11,42	2.075,62	10,84
B	Pertambangan dan Penggalan	102,42	0,66	102,78	0,63	102,85	0,60	104,46	0,58	104,17	0,54
C	Industri Pengolahan	2.283,70	14,65	2.407,77	14,70	2.561,72	14,89	2.703,16	14,89	2.848,52	14,87
D	Pengadaan Listrik dan Gas	24,24	0,16	28,02	0,17	29,14	0,17	30,55	0,17	32,00	0,17
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	13,02	0,08	13,41	0,08	13,83	0,08	14,55	0,08	15,75	0,08
F	Konstruksi	1.506,24	9,66	1.567,47	9,57	1.660,50	9,65	1.780,78	9,81	1.872,85	9,78
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	1.315,61	8,44	1.401,61	8,56	1.482,80	8,62	1.566,47	8,63	1.647,73	8,60
H	Transportasi dan Pergudangan	777,54	4,99	810,46	4,95	841,89	4,89	888,31	4,89	945,66	4,94
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.646,73	10,56	1.748,67	10,68	1.848,34	10,74	1.973,11	10,87	2.144,45	11,20
J	Informasi dan Komunikasi	1.536,41	9,86	1.665,68	10,17	1.763,48	10,25	1.872,38	10,32	2.008,89	10,49
K	Jasa Keuangan	418,45	2,68	437,90	2,67	450,27	2,62	479,95	2,64	527,82	2,76
L	Real Estat	1.057,94	6,79	1.119,54	6,84	1.175,16	6,83	1.238,68	6,82	1.318,30	6,88
M,N	Jasa Perusahaan	87,19	0,56	90,91	0,56	94,80	0,55	99,89	0,55	107,26	0,56
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.063,25	6,82	1.125,30	6,87	1.181,30	6,86	1.235,06	6,80	1.277,25	6,67
P	Jasa Pendidikan	1.157,44	7,42	1.191,60	7,28	1.253,06	7,28	1.329,25	7,32	1.417,60	7,40
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	302,84	1,94	318,58	1,95	334,92	1,95	350,39	1,93	374,99	1,96
R,S,T,U	Jasa lainnya	342,51	2,20	363,11	2,22	383,49	2,23	410,87	2,26	435,89	2,28
	PDRB	15.588,52	100,00	16.375,51	100,00	17.209,87	100,00	18.150,88	100,00	19.154,77	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2020

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Berdasarkan Gambar 2.19 dapat dilihat bahwa empat kategori lapangan usaha yang memiliki kontribusi terbesar adalah lapangan usaha industri pengolahan; lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan; lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum; dan lapangan usaha konstruksi. Oleh sebab itu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada masa yang akan datang, program kegiatan dapat diprioritaskan pada sektor tersebut.



Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2020

Gambar 2.19 Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Bantul Tahun 2019 (dalam persen)

Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Bantul pada tahun 2019 berdasarkan harga konstan 2010 sebesar 5,53% (angka sangat-sangat sementara) menunjukkan adanya kenaikan jika dibandingkan tahun 2018 sebesar 5,47%. Hal ini disebabkan karena laju pertumbuhan yang lebih cepat beberapa sektor antara lain jasa keuangan dan asuransi, penyediaan akomodasi makan dan minum, dan pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantul disajikan pada tabel 2.15 berikut ini:

Tabel 2.15 Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Bantul

Kategori	Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,12	1,52	2,50	2,00	0,13
B	Pertambangan dan Penggalian	0,61	0,35	0,06	1,57	-0,27
C	Industri Pengolahan	2,67	5,43	6,39	5,52	5,38
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3,08	15,58	3,99	4,85	4,73
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,95	2,96	3,18	5,16	8,25
F	Konstruksi	4,05	4,07	5,93	7,24	5,17
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,77	6,54	5,79	5,64	5,19
H	Transportasi dan Pergudangan	3,80	4,23	3,88	5,51	6,46
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,89	6,19	5,70	6,75	8,68
J	Informasi dan Komunikasi	5,65	8,41	5,87	6,18	7,29
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,55	4,65	2,82	6,59	9,97
L	Real Estate	6,87	5,82	4,97	5,41	6,43
M,N	Jasa Perusahaan	7,06	4,26	4,27	5,37	7,38
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,26	5,84	4,98	4,55	3,42
P	Jasa Pendidikan	7,80	2,95	5,16	6,08	6,65
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,51	5,20	5,13	4,62	7,02
R,S,T,U	Jasa lainnya	8,41	6,02	5,61	7,14	6,09
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		4,97	5,05	5,10	5,47	5,53

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2020

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Berdasarkan data laju pertumbuhan dan kontribusi tiap sektor PDRB Kabupaten Bantul (ADHK) serta dengan membandingkan data laju pertumbuhan dan kontribusi tiap sektor PDRB Daerah Istimewa Yogyakarta (ADHK) pada tahun 2018-2019 sebagaimana Tabel 2.15 maka dilakukan analisis tipologi klassen untuk klasifikasi produktivitas sektor ekonomi sebagai berikut:

Tabel 2.16 Perbandingan Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor PDRB di Kabupaten Bantul dengan DIY pada tahun 2019

Lapangan Usaha	Bantul		DIY	
	Laju (%)	Kontribusi (%)	Laju (%)	Kontribusi (%)
	rik	yik	ri	yi
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,34	13,07	1,03	7,83
Pertambangan dan Penggalian	1,67	0,51	3,04	0,53
Industri Pengolahan	7,49	15,18	5,73	12,63
Pengadaan Listrik dan Gas	7,76	0,14	5,43	0,16
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8,60	0,08	8,90	0,10
Konstruksi	8,21	9,75	14,36	10,93
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	7,26	8,65	5,16	8,27
Transportasi dan Pergudangan	10,90	4,85	3,55	5,26
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,93	11,92	8,89	9,78
Informasi dan Komunikasi	7,02	7,27	7,45	11,19
Jasa Keuangan	11,92	2,94	8,52	3,64
Real Estat	10,15	6,71	5,93	7,18
Jasa Perusahaan	10,58	0,49	6,75	1,17
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,46	7,63	3,30	7,16
Jasa Pendidikan	9,34	6,9	6,57	8,75
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10,17	1,85	6,61	2,65
Jasa lainnya	8,27	2,05	6,25	2,76
PDRB	7,78	100	6,59	100

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2020 dan BPS Daerah Istimewa Yogyakarta, 2020

rik : laju pertumbuhan sektor (i) Kabupaten Bantul
ri : laju pertumbuhan sektor (i) DIY
yik : kontribusi sektor (i) Kabupaten Bantul
yi : kontribusi sector (i) DIY

Tabel 2.17 Analisis Tipologi Klassen

		Kontribusi sektor i di kabupaten lebih besar dari kontribusi provinsi	Kontribusi sektor i di kabupaten lebih kecil dari kontribusi provinsi
		yik > yi	yik < yi
Laju pertumbuhan sektor i di kabupaten lebih besar dari kontribusi provinsi	rik > ri	Sektor Maju dan Tumbuh Cepat	Sektor Berkembang Cepat
		1. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 2. Industri Pengolahan 3. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 4. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor 5. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	--
Laju pertumbuhan sektor i di kabupaten lebih kecil dari kontribusi provinsi	rik < ri	Sektor Maju dan Tertekan	Sektor Tertinggal
		1. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 2. Jasa Keuangan 3. Jasa lainnya 4. Jasa Pendidikan 5. Jasa Perusahaan 6. Pengadaan Listrik dan Gas 7. Real Estat 8. Transportasi dan Pergudangan	1. Informasi dan Komunikasi 2. Konstruksi 3. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 4. Pertambangan dan Penggalian

Sumber: Analisis Tipologi Klassen Kabupaten Bantul, 2020

Analisis Tipologi Klassen dapat dilakukan untuk menilai potensi kinerja sektor dalam PDRB (Muta'ali, 2015). Sektor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bantul diketahui berasal dari sektor primer, sekunder, dan tersier. Sektor tersier dan sekunder yang potensial (maju dan tumbuh cepat) dapat digunakan untuk mendorong pengembangan pariwisata di Kabupaten Bantul. Sedangkan potensi dari sektor pertanian di mana sub sektor pertanian memiliki kontribusi yang tinggi di dalam sektor tersebut, dapat dijadikan dasar untuk mempertahankan luas lahan pertanian dan menguatkan ketahanan

pangan di Kabupaten Bantul.

Sebagian besar sektor tersier diketahui masih masuk ke dalam kategori sektor maju tetapi tertekan, yaitu memiliki laju pertumbuhan sektor yang baik tetapi kurang memiliki kontribusi yang cukup baik. Sektor-sektor tersebut, terutama sektor Jasa Pendidikan dan sector Real Estat yang memiliki laju pertumbuhan dan distribusi cukup baik perlu untuk didorong perkembangannya agar dapat menjadi sektor yang juga mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bantul.

Sektor yang terkategori tertinggal sebenarnya potensial untuk dikembangkan, terutama sektor Informasi dan Komunikasi dan sektor Konstruksi yang memiliki laju sekitar 7-8% dan distribusi 7-9%. Dapat diasumsikan bahwa perputaran modal di Kabupaten Bantul pada dua sektor tersebut cukup baik, namun kurang kompetitif di tingkat DIY. Perlu upaya untuk dapat meningkatkan daya tarik dan daya saing sektor Informasi dan Komunikasi dan sektor Konstruksi sehingga distribusi modal dapat meningkat dan kompetitif dengan daerah lain.

2.2.1.3 PDRB Perkapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB perkapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Bantul sejak tahun 2015-2019 (Tabel 2.18) senantiasa mengalami kenaikan menunjukkan bahwa adanya peningkatan kesejahteraan penduduk Kabupaten Bantul. Pada tahun 2018 nilai PDRB per kapita tercatat sebesar Rp24.280.000,00 Secara nominal mengalami kenaikan pada tahun 2019 mencapai 26.197.000,00. Hal ini menggambarkan bahwa ketersediaan barang dan jasa yang dapat dinikmati oleh setiap masyarakat di Kabupaten Bantul semakin besar,

sehingga akan semakin banyak pula ketersediaan barang dan jasa yang dapat mereka nikmati untuk peningkatan kesejahteraan.

Tabel 2.18 Perkembangan PDRB Per Kapita (Menurut Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2010) di Kabupaten Bantul

No.	Tahun	Harga Berlaku		Harga Konstan	
		Nilai (000 Rp)	Pertumbuhan (%)	Nilai (000 Rp)	Pertumbuhan (%)
1	2015	19.891	7,93	16.045	3,66
2	2016	21.263	6,89	16.649	3,77
3	2017	22.719	6,85	17.291	3,86
4	2018*)	24.280	6,87	18.030	4,27
5	2019**)	25,869	6,54	18,808	4,32

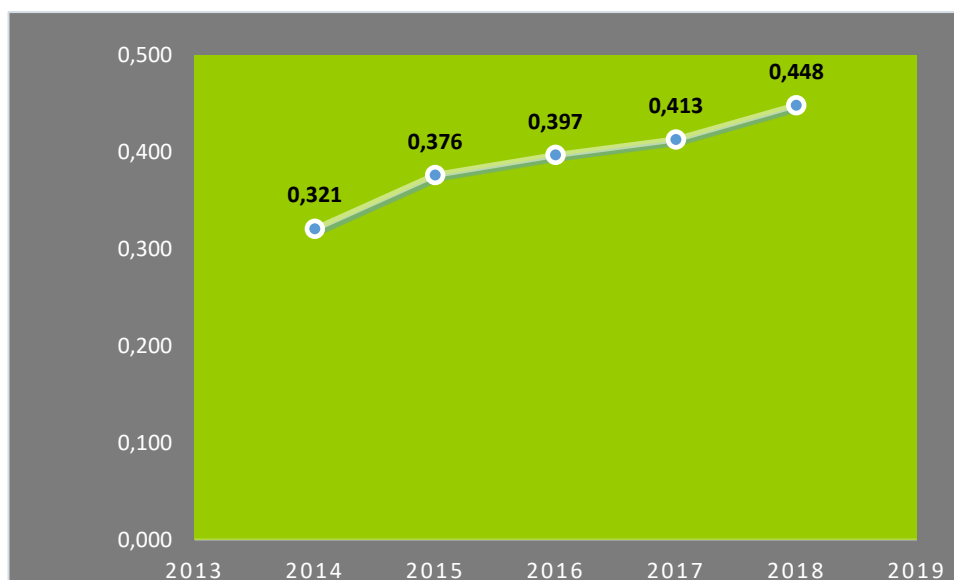
Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2020

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

2.2.1.4 Koefisien Gini

Koefisien Gini merupakan salah satu indikator untuk mengetahui distribusi dan ketimpangan pendapatan penduduk. Semakin tinggi rasio Koefisien Gini, semakin kurang merata distribusi pendapatan masyarakat. Koefisien Gini Kabupaten Bantul pada lima tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan Gambar 2.20.



Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2020

*) angka sementara

Gambar 2.20 Perkembangan Gini Rasio di Kabupaten Bantul

Dengan menggunakan klasifikasi kesenjangan yang dirumuskan oleh Todaro berdasarkan angka Gini Rasio, maka tingkat kesenjangan di Kabupaten Bantul pada kurun waktu 2014-2018 masih tergolong dalam kategori “kesenjangan sedang”. Angka Gini Rasio sampai dengan tahun 2018 menunjukkan kecenderungan naik. Pada tahun 2018, angka Gini Rasio mencapai 0,448*, hampir mendekati ambang batas bawah kesenjangan tinggi yaitu 0,50 – 0,70. Hal ini perlu diwaspadai karena perkembangan kenaikan menunjukkan kesenjangan distribusi pendapatan semakin melebar. Perbandingan angka Gini Rasio Kabupaten Bantul dengan angka Gini Rasio Nasional (0,384) dan angka Gini Rasio DIY (0,422), memperlihatkan bahwa tingkat kesenjangan Kabupaten Bantul tergolong lebih tinggi.

Peningkatan koefisien Gini ini dimungkinkan karena terjadinya pergeseran kontribusi sektor skunder yang bergeser ke sector tersier di dalam struktur PDRB Kabupaten Bantul. Sementara sektor primer yang merupakan sektor yang banyak dilakukan masyarakat Kabupaten Bantul cenderung mengalami penurunan dalam kontribusi PDRB dan cenderung melambat dalam pertumbuhannya. Pergeseran sektor ekonomi ini perlu mendapatkan perhatian lebih, mengingat hal ini akan mengubah dan memberikan warna baru bagi kegiatan ekonomi di Kabupaten Bantul. Jika tidak dilakukan upaya perbaikan dalam sektor primer, maka pergeseran ekonomi yang sedang terjadi akan semakin memperparah kondisi tersebut. Program pembangunan pada sektor primer dan penciptaan lapangan kerja baru akan menjadi salah satu solusi dalam memutus mata rantai kesenjangan, namun perlu dilakukan dengan mempertimbangkan aktivitas ekonomi terkini.

2.2.1.5 Laju Inflasi

Laju inflasi Kabupaten Bantul mengalami peningkatan dari 2,61% pada tahun 2018 menjadi 2,71% pada tahun 2019. Laju inflasi tersebut diukur melalui pemantauan harga yang dilakukan di Kabupaten Bantul pada tahun 2019. Angka tersebut relatif lebih rendah apabila dibandingkan

dengan laju inflasi Kota Yogyakarta yaitu 2,77% dan laju inflasi nasional yaitu sebesar 2,72%. Rendahnya inflasi tahun 2019 disebabkan harga-harga barang yang bergejolak relatif terkendali, seperti harga beras, gula pasir, minyak goreng, tepung terigu, daging, telur ayam, cabai, bawang merah/putih, Bahan Bakar Minyak (BBM) dan tarif tiket pesawat. Hal ini dipengaruhi oleh kinerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Bantul dan DIY sangat efektif.

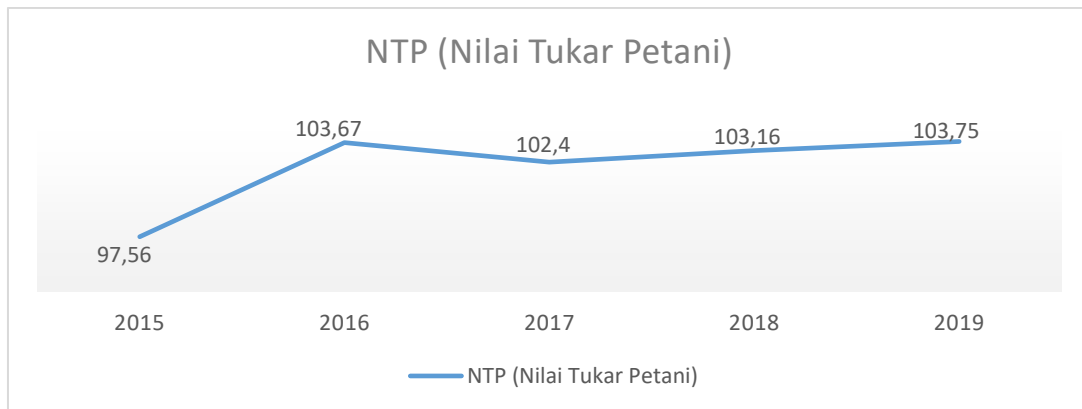
Tabel 2.19 Perkembangan Laju Inflasi di Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta, dan Nasional Tahun 2015-2019

No.	Tahun	Laju Inflasi Kab. Bantul	Laju Inflasi Kota Yogyakarta	Laju Inflasi Nasional
1	2015	3,02	3,09	3,35
2	2016	2,26	2,29	3,02
3	2017	3,96	4,20	3,61
4	2018	2,61	2,66	3,13
5	2019	2,71	2,77	2,72

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2020

2.2.1.6 Nilai Tukar Petani (NTP)

Indeks Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib), di mana It menunjukkan fluktuasi barang-barang yang dikonsumsi petani termasuk barang yang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian. Sektor pertanian yang dicakup dalam penyusunan Nilai Tukar Petani (NTP) meliputi lima subsektor yaitu subsektor tanaman pangan, subsektor tanaman hortikultura, subsektor tanaman perkebunan rakyat (TPR), subsektor peternakan, dan subsektor perikanan. NTP digunakan untuk mengukur daya tukar produk yang dijual petani dengan produk yang dibutuhkan petani dalam produksi dan konsumsi rumah tangga.



Sumber : BPS Kabupaten Bantul, 2020

Gambar 2.21 Nilai Tukar Petani Kabupaten Bantul Tahun 2015-2019

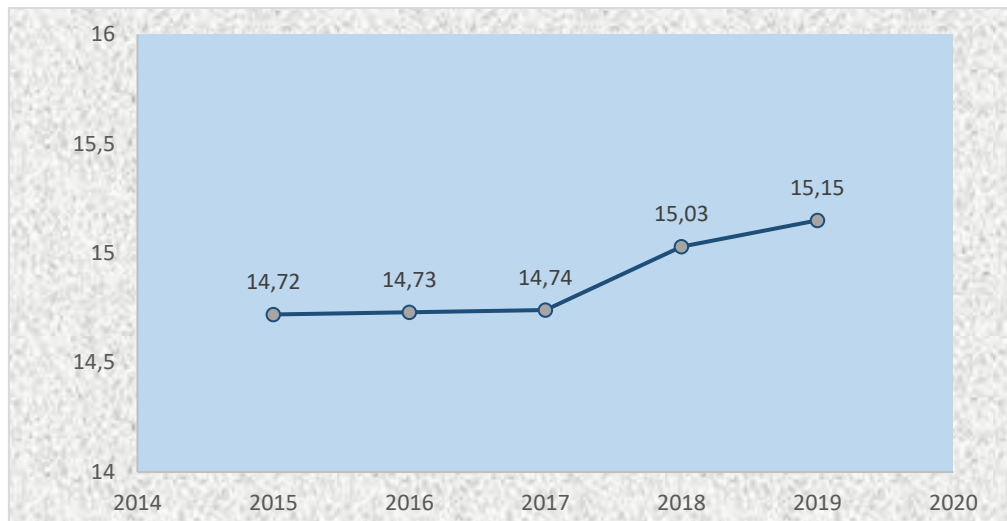
Gambar di atas menunjukkan perkembangan nilai tukar petani dari tahun 2015-2019 menggambarkan tren yang semakin membaik. NTP Kabupaten Bantul tahun 2019 memiliki indeks sebesar 103,75, sedikit lebih tinggi dari tahun 2018 yaitu 103,16. $NTP > 100$, berarti petani mengalami surplus. Harga produksinya naik lebih besar dari kenaikan harga barang konsumsi dan biaya produksi.

NTP mengasumsikan tingkat produksi yang tetap sehingga tidak mengakomodir kemajuan produktivitas pertanian, kemajuan teknologi dan pembangunan. Oleh karena itu, NTP cukup diposisikan sebagai alat ukur untuk menghitung daya beli penerimaan petani terhadap pengeluaran petani. NTP bukan mutlak sebagai kesejahteraan petani karena walaupun indeks harga yang diterima meningkat dengan berbagai kebijakan perlindungan harga, namun belum tentu NTP meningkat karena masih tergantung dengan indeks harga yang dibayar petani (Renstra Kementerian pertanian 2014-2019).

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1 Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah merupakan indikator kinerja daerah dalam bidang pendidikan. Angka Harapan Lama Sekolah digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan bidang pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.



Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2020

*Angka Sementara

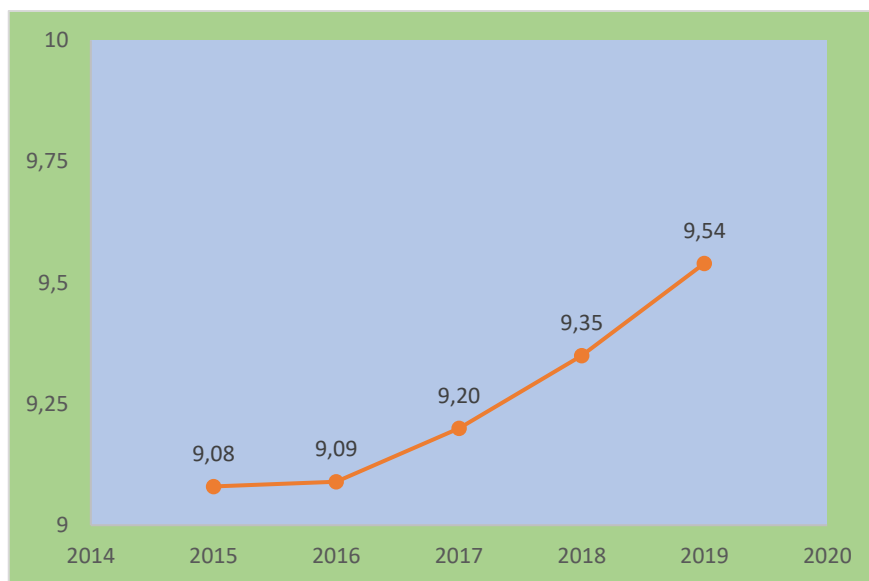
Gambar 2.22 Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Bantul Tahun 2015-2019

Gambar 2.22 di atas menunjukkan bahwa Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bantul pada tahun 2019 sebesar 15,15 tahun. Apabila dibandingkan dengan DIY, Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bantul masih dibawah DIY (15,58).

Capaian tersebut dapat diartikan bahwa lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu (tujuh tahun ke atas) di masa mendatang adalah selama 15,15 tahun atau setara dengan mengenyam pendidikan sampai perguruan tinggi jenjang Diploma III.

2.2.2.2 Rata-rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bantul terus mengalami peningkatan, dari 9,08 tahun pada tahun 2015 menjadi 9,54 pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan minat penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi semakin meningkat, meskipun angka ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk di Kabupaten Bantul bersekolah hanya setingkat SLTP. Namun apabila dibandingkan dengan DIY, Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Bantul masih di atas DIY sebesar 9,38.



Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2020

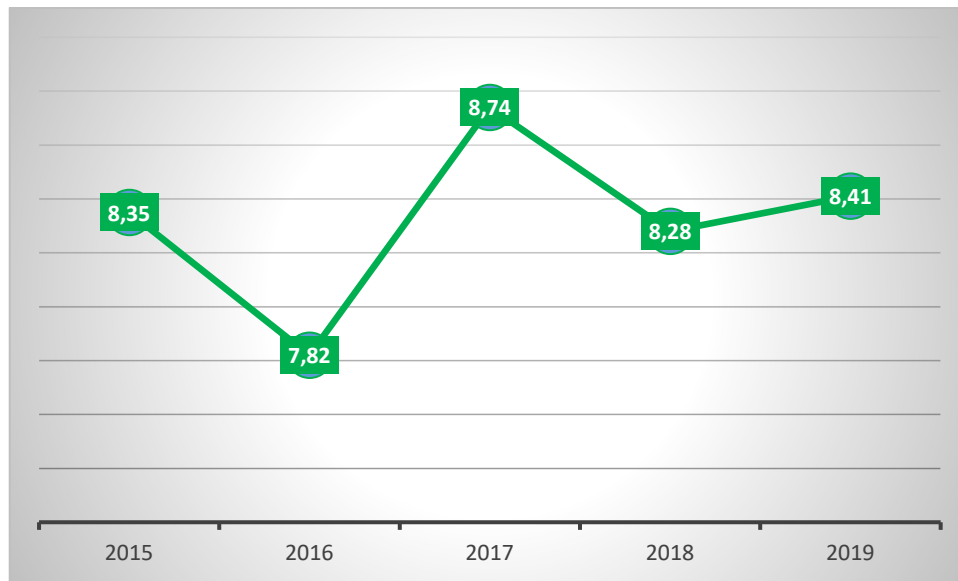
* Angka Sementara

Gambar 2.23 Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Bantul Tahun 2015-2019

Upaya Peningkatan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bantul perlu dilakukan dengan upaya menekan angka putus sekolah melalui kebijakan Bantuan Operasional Sekolah.

2.2.2.3 Angka Kematian Bayi

Angka kematian bayi dihitung dengan jumlah kematian bayi usia dibawah satu tahun dalam kurun waktu setahun per 1000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Pada tahun 2019 jumlah absolut kematian bayi sebesar 110 kasus meningkat dibanding tahun 2018 sebesar 99 kasus. Capaian indikator Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2019 sebesar 8,41 terjadi peningkatan dibanding tahun 2018 sebesar 8,28 per 1.000 kelahiran hidup.



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2020

Gambar 2.24 Angka Kematian Bayi di Kabupaten Bantul Tahun 2015-2019

Penyebab kematian bayi pada tahun 2019 terbanyak disebabkan penyakit seperti aspirasi, diare, pendarahan, intrakranial dan penyakit lainnya. Data penyebab kematian bayi di Kabupaten Bantul disajikan pada Tabel 2.20.

Tabel 2.20 Penyebab Kematian Bayi di Kabupaten Bantul Tahun 2015-2019

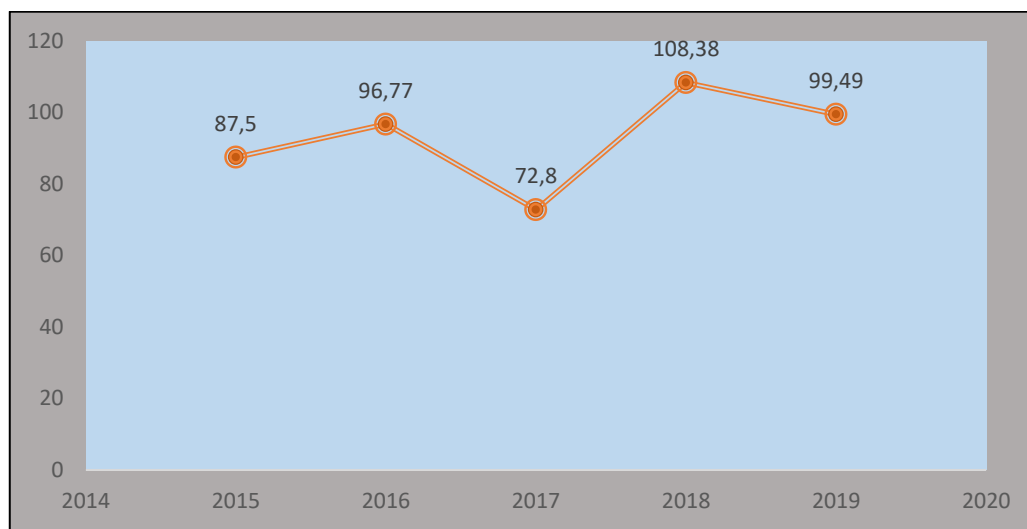
No	Sebab Kematian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Bayi Berat Lahir Rendah	30	22	22	31	28
2	Asfiksia	27	24	14	32	27
3	Kelainan bawaan	21	23	20	19	20
4	Lain2 (Aspirasi, diare, perdarahan intrakranial dan penyebab lainnya)	27	25	52	25	35
	J u m l a h	105	94	108	107	109

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2020

Upaya yang dapat dilakukan untuk menurunkan AKB antara lain meningkatkan peran serta masyarakat melalui program Desa Bebas 4 Masalah Kesehatan (DB4MK), dan keterpaduan lintas program yaitu program pencegahan penyakit melalui imunisasi pada bayi dan program perbaikan gizi masyarakat serta dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas sumberdaya di fasilitas pelayanan kesehatan ibu dan anak.

2.2.2.4 Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) dihitung dari jumlah kematian ibu maternal (hamil, melahirkan, dan nifas), bukan karena sebab kecelakaan ataupun penyakit lainnya. Capaian angka kematian ibu pada tahun 2019 sebesar 99,49 per 100.000 kelahiran hidup (13 kasus kematian ibu) turun dibandingkan tahun 2018 sebesar 108,36 per 100.000 kelahiran hidup (14 kasus kematian ibu).



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2020

Gambar 2.25 Angka Kematian Ibu di Kabupaten Bantul Tahun 2015-2019

Penyebab kematian ibu antara lain adanya perdarahan dan Pre Eklampsia, serta penyebab lain-lain yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.21 Penyebab Kematian Ibu di Kabupaten Bantul Tahun 2015-2019

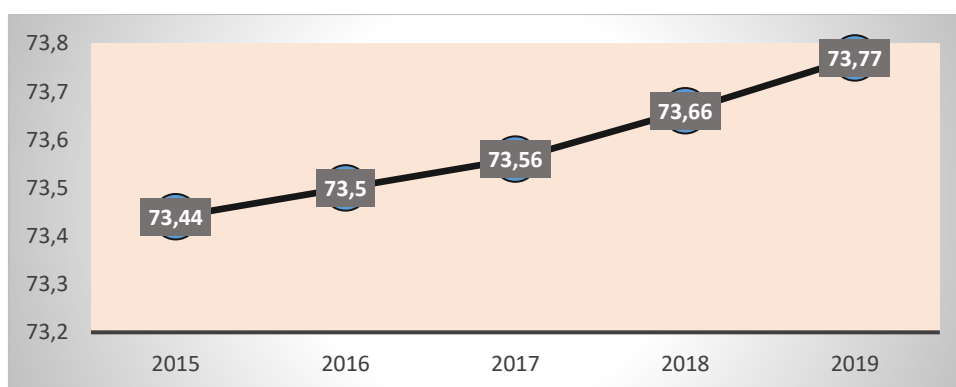
No	Penyebab Kematian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Perdarahan	4	2	2	5	3
2	PER/PEB/Eklampsi	4	4	2	2	4
3	Emboli air ketuban	1	0	0	0	1
4	Infeksi	0	2	2	0	-
5	Lain2/Penyakit penyerta	2	2	2	7	2
6	Penyakit Jantung	0	0	0	0	2
7	Psikosis post partum dengan acute coronary syndrome	0	2	1	0	-
8	Ileus paralitik	0	0	0	0	1
	J u m l a h	11	12	9	14	13

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2020

Upaya mempercepat penurunan kematian ibu memerlukan keterpaduan lintas program, yaitu program perbaikan gizi masyarakat, khususnya pada ibu hamil melalui Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pemulihan bagi ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) ibu hamil, program pencegahan penyakit, program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat melalui penyiapan masyarakat dalam desa siaga, ambulan desa, dan donor darah, partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan kader kesehatan untuk pendampingan ibu hamil risiko tinggi dan pengenalan deteksi dini risiko ibu hamil risiko tinggi, peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan serta sumber daya manusia juga melalui Kelompok Pendukung Ibu (KP Ibu) yang sudah diintegrasikan dengan kelas ibu, membentuk jejaring Kesehatan Ibu Bayi Baru Lahir dan Anak (KIBBLA), dan peningkatan Puskesmas mampu Penanganan Obstetri Neonatal Emergency Dasar (PONED) serta pelaksanaan Jaminan Persalinan (Jampersal).

2.2.2.5 Umur Harapan Hidup

Derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Bantul di wujudkan dalam IKU Bupati yaitu Umur Harapan Hidup (UHH).



Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2020

Gambar 2.26 Umur Harapan Hidup di Kabupaten Bantul Tahun 2015-2019

Umur Harapan Hidup Kabupaten Bantul dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Gambar di atas menunjukkan UHH Kabupaten Bantul pada tahun 2019 yaitu 73,77 tahun meningkat dari tahun 2018 sebesar 73,66 tahun. Peningkatan UHH ini dipengaruhi oleh multifactor

antara lain Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, Prevalensi Balita Gizi Buruk, Prevalensi HIV /AIDS, dan Angka Kesakitan (Incidence Rate/ IR) DBD.

Penyakit Tidak Menular (PTM) juga mempengaruhi pencapaian indikator UHH. Kelompok Penyakit Tidak Menular (PTM), seperti stroke, Diabetes Mellitus, kanker, hipertensi merupakan kelompok penyakit penyebab kematian terbanyak di Indonesia, dengan kecenderungan meningkat. Peningkatan PTM jelas berdampak negatif pada produktivitas masyarakat. Di sisi lain, penyakit menular masih merupakan masalah kesehatan. Kondisi morbiditas dan mortalitas PTM makin meningkat disertai dengan masih banyaknya penyakit menular di masyarakat, akan menjadikan beban ganda dalam pelayanan kesehatan sekaligus tantangan yang harus dihadapi dalam pembangunan bidang kesehatan di Indonesia. Untuk itu penanganan penyakit menular dan tidak menular harus dilakukan secara komprehensif dan sistematis.

Data penyakit menular dan tidak menular di Kabupaten Bantul disajikan sebagai berikut.

Tabel 2.22 Data Penyakit Menular dan Tidak Menular
di Kabupaten Bantul Tahun 2015-2019

NO	Angka Kesakitan	Jumlah Kasus				
		2015	2016	2017	2018	2019
A	Penyakit Menular					
1	Tuberkulosis (TB) BTA Positif	224	295	175	344	112,9
2	Jumlah Kasus HIV	35	144	49	184	127
3	Jumlah Kasus AIDS	5	55	9	36	22
4	Jumlah Kasus Syphilis	-	18	100	8	64
5	Kusta	-	11	7	15	8
6	Jumlah Kasus Campak	54	124	-	3	1
7	Pneumonia Balita ditemukan dan ditangani	1.034	744	1.197	1.093	941
8	Jumlah kasus diare ditemukan dan ditangani	4.453	4.822	5.481	4.877	4.622
9	AFP Rate (non polio) < 15 th	6	6	10	9	5
10	DBD	1.441	2.442	538	181	150
11	Malaria	3	-	3	-	7
12	Leptospirosis	87	74	94	93	92
B	Penyakit Tidak Menular					

NO	Angka Kesakitan	Jumlah Kasus				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Kasus IVA positif pada perempuan usia 30-50 tahun	234	254	74	19	44
2	Jumlah tumor/benjolan payudara pada perempuan 30-50 tahun	14	17	4	31	45
3	Desa/Kelurahan terkena KLB ditangani < 24 jam	0	26	14	9	12
4	Diabetes Melitus	7.088	20.969	50.242	33.013	43.696
5	Gangguan Jiwa	6.336	3.875	6.864	6.844	9.761
6	Hipertensi/tekanan darah tinggi	38.641	44.954	50.242	69.228	91.266
7	Obesitas	239	398	406	994	239

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2020

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

2.2.3.1 Seni Budaya

Pembangunan bidang seni budaya dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Seni serta budaya merupakan dua hal yang saling berkaitan, setiap seni harus mengandung kebudayaan yang khas dan setiap kebudayaan pasti memiliki nilai seni yang indah.

Kabupaten Bantul memiliki setidaknya tiga jenis kelompok seni dan budaya, yaitu (1) Seni Musik (33 kelompok); (2) Seni Tari (31 kelompok) dan; (3) Seni Teater (7 kelompok). Kelompok tersebut sudah terdaftar di Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul.

Mengingat adanya sekolah seni di Kabupaten Bantul dan berkembangnya seni kreatif maka diperlukan sarana dan prasarana yang memadai dan dapat memberikan fasilitas bagi kelompok seni untuk semakin mengembangkan karyanya. Pemerintah perlu memikirkan pembangunan gedung/sanggar seni/taman budaya yang dapat memfasilitasi kelompok seniman dan budayawan untuk terus mengapresiasi karya-karyanya. Selain itu, seni budaya merupakan penunjang sektor pariwisata di Kabupaten Bantul maka perlu

dikembangkan wisata budaya yang merupakan salah satu pilar pariwisata sekaligus dapat melestarikan seni dan budaya lokal.

2.2.3.2 Olahraga

Pembangunan di bidang pemuda dan olahraga di Kabupaten Bantul dapat dilihat dari semakin banyak jumlah organisasi dan prestasi olahraga yang dicapai oleh Kabupaten Bantul baik tingkat provinsi maupun nasional meskipun jumlah klub dan gedung olahraga yang ada masih terbatas. Melihat kelompok/organisasi olahraga yang semakin berkembang dan munculnya jenis olahraga baru yang dipertandingkan perlu upaya pemerintah dalam mengembangkan potensi sumberdaya manusia olahraga yaitu pelatih, wasit, pembina, klub olahraga dan atlet. Selain itu juga perlu melengkapi sarana dan prasarana olahraga yang dapat dimanfaatkan untuk latihan maupun pertandingan.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

2.3.1.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

2.3.1.1.1 Pendidikan

1) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, melalui jalur pendidikan formal, non formal, dan/atau informal. Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal meliputi TK dan RA, sedangkan jalur pendidikan non formal meliputi Kelompok Bermain (KB), TPA, dan satuan PAUD sejenis.

Tabel 2.23 Kondisi Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Bantul Tahun 2019

No.	Nama Lembaga	Jumlah		Jumlah Peserta Didik	Guru		
		Negeri	Swasta		Jumlah	Sertifikasi	%
1.	TK/RA	2	530	16.998	2.446	1.209	49

No.	Nama Lembaga	Jumlah		Jumlah Peserta Didik	Guru		
		Negeri	Swasta		Jumlah	Sertifikasi	%
2.	KB	0	487	14.251	1.428	0	0
3.	TPA	0	52	830	108	0	0
4.	SPS	0	248	4.571	740	0	0

Sumber: Dinas Dikpora Kabupaten Bantul, 2020

Tabel 2.23 menunjukkan bahwa Lembaga PAUD yang dikelola swasta di Kabupaten Bantul cukup banyak sehingga dapat membantu dalam peningkatan Pendidikan PAUD di Kabupaten Bantul. Pemerintah Kabupaten Bantul perlu memberikan insentif untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik.

2) Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Wajib belajar sembilan tahun yang merupakan kewenangan pemerintah Kabupaten adalah pendidikan dasar jenjang SD dan SMP.

a) Kondisi Pendidikan Dasar

Gambaran kondisi yang mendukung keberhasilan wajib belajar sembilan tahun disajikan pada Tabel 2.24 yang menunjukkan bahwa lembaga pendidikan dan tenaga pendidikan di Kabupaten Bantul dalam rangka penuntasan wajib belajar sembilan tahun secara kuantitas telah cukup memadai. Jumlah guru SD yang telah bersertifikat pendidik profesional adalah 2.507 orang atau 49,37% dari total guru (PNS, guru tetap yayasan, dan GTT SD). Sementara itu, guru SMP yang telah bersertifikat pendidik profesional sejumlah 1.612 orang atau 67,59% dari total guru PNS, GTY, dan GTT. Banyaknya guru yang telah bersertifikat pendidik profesional menunjukkan bahwa profesionalitas kinerja dan kesejahteraan pendidik di Kabupaten Bantul semakin meningkat. Namun masih perlu perhatian terhadap peningkatan kesejahteraan bagi guru GTT dan PTT.

Tabel 2.24 Kondisi Pendidikan Dasar di Kabupaten Bantul Tahun 2019

No.	Nama Lembaga	Jumlah		Jumlah Siswa	Guru		
		Negeri	Swasta		Jumlah	Sertifikasi	%
1	SD	281	82	75.099	5.007	2.507	50,07
2	MI	3	29	6.195	450	136	30,22
3	SMP	47	45	31.552	2.399	1.612	67,19

No.	Nama Lembaga	Jumlah		Jumlah Siswa	Guru		
		Negeri	Swasta		Jumlah	Sertifikasi	%
4	MTs	9	15	8.026	693	436	62,91

Sumber: Dinas Dikpora Kabupaten Bantul, 2020

b) Tingkat Kelulusan SD dan SMP di Kabupaten Bantul

Tingkat kelulusan jenjang SD/MI dan SMP/MTs pada lima tahun terakhir hingga tahun 2019 mencapai 100%, sesuai dengan target yang dicanangkan pada tahun 2019. Dalam kaitannya dengan angka putus sekolah, segala upaya telah dilakukan untuk meniadakan anak putus sekolah. Angka putus sekolah pada tahun 2018 untuk jenjang SD/MI sebesar 0,01% turun menjadi 0,004% pada tahun 2019 dan jenjang SMP/MTs tahun 2018 sebesar 0,02% turun menjadi 0,01% pada tahun 2019.

c) Biaya Operasional Pendidikan (BOP)

BOP Kabupaten Bantul diberikan untuk tiap siswa SDMI sebesar Rp350.000,00 per siswa per tahun sedangkan untuk tiap siswa SMP Negeri sebesar Rp.500.000,00 per siswa per tahun dan siswa SMP Swasta diberikan Rp450.000,00 per siswa per tahun. Selain itu untuk siswa miskin SD/MI diberikan dana bantuan sebesar Rp450.000,00 per siswa per tahun dan siswa miskin SMP sebesar Rp750.000,00 per siswa per tahun.

d) Kondisi Pendidikan Non Formal

Penyelenggaraan program pendidikan non formal diselenggarakan dalam rangka mendukung dan melengkapi pendidikan formal.

Tabel 2.25 Kondisi Lembaga Pendidikan Non Formal di Kabupaten Bantul Tahun 2019

No.	Nama Lembaga	Jumlah Lembaga	Jumlah Warga Belajar	Jumlah Tutor
1	SKB	1	170	7
2	PKBM	33	2.570	518
3	LKP	62	2.272	182
4	TBM	35	1.768	35
5	Rumpin	2	12	6
6	Homeschooling	2	5	10

Sumber: Dinas Dikpora Kabupaten Bantul, 2020

Keterangan :

- SKB : Sanggar Kegiatan Belajar
- PKBM : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
- LKP : Lembaga Kursus dan Pelatihan;
- TBM : Taman Bacaan Masyarakat;
- Rumpin : Rumah Pintar;

Pelayanan pendidikan bagi masyarakat yang belum mampu menamatkan pendidikan formal (SD, SMP, dan SMA) dilakukan melalui program pendidikan kesetaraan yaitu Kelompok Belajar (Kejar) paket. Kejar paket A setara dengan SD, Kejar paket B setara dengan SMP, dan Kejar paket C setara dengan SMA.

Tabel 2.26 Jumlah Warga Belajar Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Bantul Tahun 2019

No.	Nama Program	Jumlah Warga Belajar		Jumlah
		L	P	
1	Paket A	178	377	555
2	Paket B	203	372	575
3	Paket C	679	761	1.440

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, 2020

Hasil Ujian Nasional Program Kesetaraan (UNPK) tahun 2017 baik paket B dan C serta ujian sekolah paket A penentuan kelulusan dilaksanakan oleh lembaga masing-masing. Pada Tahun Ajaran 2017/2018, untuk Kejar Paket B dan Kejar Paket C dilaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Adapun hasil UNBK disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.27 Hasil Ujian Nasional Program Kesetaraan di Kabupaten Bantul Tahun 2019

Program	Jumlah Peserta (orang)	Lulus (orang)	Belum Lulus (orang)	Kelulusan (%)
Paket A	293	267	26	91,12
Paket B	754	648	106	90,71
Paket C	680	557	123	81,91

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, 2020

Persentase kelulusan Paket C lebih rendah dari Paket A dan Paket B, karena banyaknya peserta UNBK Paket C yang sudah mendaftar tetapi tidak hadir pada saat pelaksanaan ujian karena beberapa alasan seperti pindah domisili dan pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

e) Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan.

APM merupakan indikator yang digunakan untuk menentukan tingkat partisipasi murni penduduk usia sekolah. APM adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya terhadap jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu.

Tabel 2.28 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK)
di Kabupaten Bantul Tahun 2015-2019

No	Jenjang Pendidikan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Angka Partisipasi Kasar					
	APK SD/MI	96,06	96,12	98,20	98,45	95,26
	APK SMP/MTs	93,82	95,00	99,23	97,83	101,38
2.	Angka Partisipasi Murni					
	APM SD/MI	84,09	84,10	88,68	89,55	85,86
	APM SMP/MTs	67,64	71,09	76,60	77,33	76,8

Sumber : Dinas Dikpora Kabupaten Bantul, 2020

Untuk mengetahui keberhasilan program wajib belajar sembilan tahun, dapat dilihat dari indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Realisasi APK SD/MI tahun 2019 sebesar 95,26%, menunjukkan adanya penurunan sebesar 3,19% dari capaian tahun 2018 sebesar 98,45. Sedangkan realisasi APK SMP/MTs tahun 2018 2019 mengalami kenaikan sebesar 3,55% menjadi 101,38%.

Realisasi APM SD/MI pada tahun 2019 adalah 85,56%, dan APM SMP/MTs tahun 2019 adalah 76,8%. Capaian APM seperti di atas bukan berarti bahwa anak usia 7-12 tahun dan anak usia 13-15 tahun banyak yang tidak bersekolah, akan tetapi dimungkinkan dari kelompok umur

tersebut bersekolah di luar Kabupaten Bantul dan atau sudah masuk di jenjang sekolah yang lebih tinggi.

2.3.1.1.2 Kesehatan

1) Pelayanan Kesehatan

a) Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) per Satuan Balita

Posyandu merupakan wadah peran serta masyarakat untuk memberikan dan memperoleh pelayanan kesehatan dasar, maka strategi operasional pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak secara dini dapat dilakukan di setiap posyandu. Idealnya satu Posyandu melayani 100 Balita.

Tabel 2.29 Rasio Posyandu per 1.000 Balita di Kabupaten Bantul

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah posyandu	1.137	1.137	1.141	1.141	1.139
2	Jumlah balita	60.565	59.720	58.255	60.087	59.522
3	Rasio (per 1000 balita)	18,77	19,04	19,59	18,99	19,2

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2020

Dari Tabel 2.29 dapat diketahui bahwa pada tahun 2019 rasio Posyandu per 1.000 Balita sebesar 19,2 berarti dalam 1.000 Balita terdapat 19 Posyandu. Hal ini dapat diartikan bahwa satu Posyandu melayani 52 Balita.

b) Ketersediaan Fasilitas

Keberhasilan program pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan dapat diketahui dengan semakin meningkatnya kuantitas dan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan oleh pemerintah dan swasta.

Tabel 2.30 Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Bantul

No	Fasilitas Pelayanan Kesehatan Umum	2015 (unit)	2016 (unit)	2017 (unit)	2018 (Unit)	2019 (unit)
1	Rumah Sakit Umum	10	10	11	10	11
2	Rumah Sakit Bersalin	1	0	0	0	0
3	Rumah Sakit Khusus (bedah, paru, KIA)	3	5	5	6	6
4	Klinik Utama	2	2	3	2	2

No	Fasilitas Pelayanan Kesehatan Umum	2015 (unit)	2016 (unit)	2017 (unit)	2018 (Unit)	2019 (unit)
5	Klinik Pratama	30	47	55	56	61
	Klinik Pratama Rawat Jalan	-	38	45	45	50
	Klinik Pratama Rawat Inap	-	9	10	11	11
6	Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar	5	4	5	0	0
7	Apotek	107	123	125	140	157
8	Klinik kecantikan estetika	5	10	9	9	8
9	Laboratorium	4	4	3	3	3
10	Toko obat	4	4	5	7	8
11	Optik	11	12	12	13	7
12	Puskesmas rawat inap	16	16	16	16	16
13	Puskesmas non rawat inap	11	11	11	11	11
14	Puskesmas pembantu	67	65	65	65	65
15	Puskesmas keliling	27	27	27	27	27
16	Posyandu	1132	1132	1132	1142	1142
17	Posyandu lansia	901	901	967	1034	1034

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2020

Secara umum fasilitas kesehatan semakin meningkat, dengan demikian diharapkan lebih banyak kemudahan akses masyarakat untuk mendapat pelayanan kesehatan.

Setiap 240.000 penduduk harus tersedia satu unit RS sebagaimana diatur dalam Kepmen Permukiman dan Prasarana Wilayah nomor 534/KPTS/M/2001. Penduduk Kabupaten Bantul tahun 2019 sebanyak 949.325, berarti minimal harus ada 4 unit RS. Sampai tahun 2019 terdapat RS sejumlah 11 unit, hal ini menunjukkan ketersediaan rumah sakit di Kabupaten Bantul telah mencukupi.

Pada tahun 2018 dibentuk *Public Safety Center* (PSC) 119 Bantul yaitu unit respon cepat penanganan pertama kasus kegawatdaruratan. PSC 119 Bantul tertuang dalam peraturan Bupati Bantul No. 99 Tahun 2018. Operasional PSC dilakukan oleh call center nomer akses 119. Instansi yang terkait dengan PSC 119 yaitu Rumah Sakit Se-Kabupaten Bantul, Puskesmas se Kabupaten Bantul, UPTD Jamkesda, BPBD Bantul, Polres Bantul dan Jasa Raharja. Petugas lapangan PSC 119 berjumlah 16 orang terdiri dari: tenaga kesehatan yaitu 6 perawat dan 2 bidan, Operator *Call Center* 4 Orang (tenaga kesehatan), dan Sopir 4 Orang.

Seluruh puskesmas di Kabupaten Bantul sudah berstatus BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) penuh sejak tanggal 2 Januari 2016. Pelaksanaan BLUD Puskesmas ini dilaksanakan di 27 Puskesmas yang

terdiri dari 16 Puskesmas rawat inap, dan 11 Puskesmas rawat jalan. Adapun hasil penilaian akreditasi Puskesmas sebanyak 27 Puskesmas telah terakreditasi.

Tabel 2.31 Penilaian Akreditasi Puskesmas di Kabupaten Bantul

No.	Puskesmas	2015	2016	2017	2018	2019	Status
1	Pajangan		ü			ü	Utama
2	Pleret		ü			ü	Utama
3	Piyungan		ü			ü	Paripurna
4	Banguntapan II		ü			ü	Utama
5	Srandakan		ü		ü		Utama
6	Sanden		ü			ü	Madya
7	Pundong		ü			ü	Madya
8	Bantul I		ü			ü	Utama
9	Imogiri I		ü		ü		Utama
10	Bambanglipuro	ü			ü		Utama
11	Jetis I		ü		ü		Utama
12	Jetis II	ü			ü		Paripurna
13	Kasihan I			ü		ü	Utama
14	Pandak I			ü		ü	Utama
15	Pandak II			ü		ü	Utama
16	Kretek			ü			Utama
17	Bantul II			ü			Utama
18	Imogiri II			ü			Madya
19	Dlingo I			ü			Madya
20	Dlingo II			ü			Utama
21	Sewon I			ü			Madya
22	Sewon II			ü			Utama
23	Sedayu I			ü			Madya
24	Sedayu II			ü			Madya
25	Banguntapan I			ü			Utama
26	Banguntapan III			ü			Madya
27	Kasihan II			ü			Madya

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2020

Standarisasi fasilitas pelayanan kesehatan rujukan dilakukan melalui penetapan kelas dan akreditasi rumah sakit milik pemerintah dan

swasta. Penetapan kelas dan status akreditasi rumah sakit disajikan pada Tabel 2.32

Tabel 2.32 Kelas Rumah Sakit Tahun 2019

No.	Rumah Sakit	Kelas	Akreditasi
1	RSUD Panembahan Senopati	B-Umum	Akreditasi
2	RSPAU dr. Suradji Hardjolukito	B-Umum	Akreditasi
3	RSU PKU Muhammadiyah	C-Umum	Akreditasi
4	RSU Nur Hidayah	D-Umum	Akreditasi
5	RSU Santa Elizabeth	D-Umum	Akreditasi
6	RSU Permata Husada	D-Umum	-
7	RSU Rahma Husada	D-Umum	Akreditasi
8	RSU Rajawali Citra	D-Umum	Akreditasi
9	RSU Griya Mahardika	C-Umum	Akreditasi
10	RSK Ibu dan Anak Ummi Kasanah	C-Khusus KIA	Akreditasi
11	RSK Bedah Ringroad Selatan	C-Khusus Bedah	Akreditasi
12	RSK Paru Respira	C-Khusus Paru	Akreditasi
13	RSK Ibu dan Anak Adinda	C-Khusus KIA	-
14	RSK Ibu dan Anak Kahyangan	C-Khusus KIA	-
15	RSK Bedah Adelia	C-Khusus Bedah	Akreditasi
16	RS UII	C-Umum	-

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2020

Berdasarkan data di atas masih terdapat empat rumah sakit yang belum terakreditasi. Adapun alasan belum terakreditasinya rumah sakit tersebut yaitu:

1. RS Permata Husada, telah mengajukan penilaian pada tahun 2019
2. RS Adinda dan RS Kahyangan, belum mengajukan proses akreditasi
3. RS UII merupakan rumah sakit baru dan dalam proses penilaian.

Pembiayaan pelayanan kesehatan penduduk Bantul melalui kepesertaan JKN pada tahun 2019 telah terdaftar sebesar 827.231 jiwa atau 87,50%, Data kepesertaan JKN disajikan pada Tabel 2.33.

Tabel 2.33 Data Kepesertaan Jaminan Kesehatan di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2019

No.	Jenis Kepesertaan Jaminan Kesehatan	2018		2019	
		Jumlah Peserta (jiwa)	%	Jumlah Peserta (jiwa)	%
1	Jaminan Kesehatan Nasional				
1.1	Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN	503.365	53,57	443.462	53,61

No.	Jenis Kepesertaan Jaminan Kesehatan	2018		2019	
		Jumlah Peserta (jiwa)	%	Jumlah Peserta (jiwa)	%
1.2	Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD	62.841	6,69	46.674	5,64
1.3	Pekerja Penerima Upah (PPU)	210.009	22,35	216.212	26,14
1.4	Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU)	92.000	9,79	88.543	10,70
1.5	Bukan Pekerja	35.865	3,82	32.340	3,90
	<i>Jumlah penduduk yang terdaftar JKN</i>	904.080	96,21	827.231	87,50
	<i>Jumlah penduduk yang belum terdaftar JKN</i>	35.638	3,79	118.210	12,50
	<i>Total penduduk Kab Bantul</i>	939.718	100,00	945.441	100,00%

Sumber: BPJS Kesehatan Bantul, 2020

Dari total kepesertaan JKN tersebut, Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN merupakan kepesertaan dengan jumlah terbesar yaitu 443.462 jiwa atau 53,61%. Kepesertaan JKN-PBI dari APBD sebesar 46.674 jiwa atau 5,64%. Hal tersebut merupakan perubahan program pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin/Jamkesda menjadi peserta JKN. Pekerja Penerima Upah (PPU) sebesar 216.212 jiwa atau 26,14%, Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) sebesar 88.543 jiwa atau 10,70% dan Bukan Pekerja (BP) sebesar 32.340 atau 3,90%. Jumlah Penduduk yang belum terdaftar kepesertaan JKN sebesar 118.210 jiwa atau 12,50%, dalam hal ini upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bantul adalah dengan berkoordinasi secara intensif dengan stakeholder dan pemutakhiran data setiap bulan. Meningkatnya jumlah penduduk yang belum terdaftar JKN merupakan tugas pemerintah untuk mengupayakan agar semua penduduk terdaftar dalam JKN.

c) Ketersediaan Tenaga Kesehatan

Ketersediaan tenaga kesehatan yang disertai dengan peningkatan ketersediaan fasilitas kesehatan tentunya akan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kondisi ini perlu diimbangi dengan regulasi agar tenaga kerja benar-benar kompeten di bidangnya, sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pelayanan yang dapat berakibat fatal. Regulasi tersebut antara lain dengan menerbitkan aturan bahwa

setiap tenaga yang bekerja di sektor kesehatan (dokter, dokter gigi, perawat, bidan, apoteker, nutrisisionis, analis, *radiographer*, fisioterapis dan sanitarian) wajib memiliki surat izin sebelum melakukan pekerjaan sesuai kompetensinya.

Tabel 2.34 Jumlah Tenaga Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Pemerintah di Kabupaten Bantul

No.	Jenis Tenaga	2015	2016	2017	2018	2019
1	Dokter Spesialis	46	61	65	202	241
2	Dokter Umum	103	127	154	238	329
3	Dokter Gigi Spesialis	8	6	7	8	22
4	Dokter Gigi	54	42	41	44	84
5	Perawat	562	670	703	1.007	1434
6	Perawat Gigi	78	87	93	93	59
7	Bidan	327	306	317	403	454
8	Kefarmasian	61	85	92	90	217
9	Kesehatan Masyarakat	52	100	113	37	62
10	Sanitarian	53	58	64	57	73
11	Gizi	62	63	69	77	95
12	Keterampilan Fisik	25	30	36	26	67
13	Teknis Medis	90	152	149	103	146
14	Tenaga Kesehatan Non	563	641	697	203*	1369**

*Jumlah tenaga di Puskesmas dan Dinas Kesehatan

**Jumlah tenaga di Kabupaten Bantul

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2020

Secara khusus, ketersediaan tenaga kesehatan erat kaitannya dengan rasio dokter per jumlah penduduk. Rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Menurut standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu dokter melayani 2.500 penduduk.

Tabel 2.35 Jumlah Dokter per 1.000 Penduduk di Kabupaten Bantul Tahun 2015-2019

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Dokter Umum	103	127	154	238	307
2	Jumlah Dokter Spesialis	46	61	65	202	215
3	Jumlah Penduduk	919.440	928.676	931.356	939.718	945.441
4	Rasio Dokter Umum	0,11	0,14	0,16	0,25	0,32

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
	(per 1000 penduduk)					
5	Rasio Dokter Spesialis (per 1000 penduduk)	0,050	0,065	0,070	0,21	0,23

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2020

Pada Tahun 2019 rasio dokter per jumlah penduduk mencapai 0,32 per 1.000 penduduk atau satu dokter melayani 3.125 penduduk. Hal ini menunjukkan masih kurangnya dokter di Kabupaten Bantul. Upaya pemenuhan kebutuhan dokter dengan cara melakukan kontrak tenaga dokter. Sebaran dan kebutuhan tenaga kesehatan dokter umum di Puskesmas Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.36 Sebaran dan Kebutuhan Tenaga Kesehatan Dokter Umum di Puskesmas Kabupaten Bantul Tahun 2019

NO	NAMA PUSKESMAS	TENAGA KESEHATAN DOKTER UMUM			SELISIH	KEBUTUHAN
		PNS	BLUD	TOTAL		
1	Puskesmas Sanden	1	2	3	-2	5
2	Puskesmas Srandakan	1	1	2	0	2
3	Puskesmas Kretek	1	2	3	2	1
4	Puskesmas Pundong	1	4	5	3	2
5	Puskesmas Bambanglipuro	3	4	7	4	3
6	Puskesmas Pandak I	3		3	-1	4
7	Puskesmas Pandak II	2	2	4	1	3
8	Puskesmas Bantul I	2	3	5	3	2
9	Puskesmas Bantul II	2	3	5	1	4
10	Puskesmas Jetis I	2	2	4	-1	5
11	Puskesmas Jetis II	2	1	3	0	3
12	Puskesmas Imogiri I	2	2	4	-1	5
13	Puskesmas Imogiri II	1	2	3	0	3
14	Puskesmas Dlingo I	1		1	-1	2
15	Puskesmas Dlingo II	1	2	3	1	2
16	Puskesmas Pleret	2	2	4	3	1
17	Puskesmas Piyungan	2	5	7	6	1
18	Puskesmas Banguntapan II	1	2	3	-4	7
19	Puskesmas Banguntapan I	2		2	-3	5
20	Puskesmas Banguntapan III	2		2	-1	3
21	Puskesmas Sewon I	2		2	-1	3
22	Puskesmas Sewon II	1	2	3	2	1
23	Puskesmas Kasihan I	2	3	5	3	2
24	Puskesmas Kasihan II	3	1	4	0	4
25	Puskesmas Pajangan	2	2	4	3	1
26	Puskesmas Sedayu I	2	1	3	2	1
27	Puskesmas Sedayu II	2	1	3	1	2
	JUMLAH	48	49	97	20	77

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2020

d) Pelayanan Kesehatan Lansia

Pelayanan kesehatan lansia meliputi promotif dan preventif sesuai standar (SPM) meliputi pemeriksaan tanda vital, tes kolesterol, gula darah dan tes gangguan memori. Pelayanan ini dilaksanakan bersama oleh dan dari masyarakat melalui Posyandu Lansia. Pada Tahun 2019 telah terbentuk Posyandu Lansia sejumlah 1.034 meningkat jika dibandingkan tahun 2018 sejumlah 937 unit dan telah dilaksanakan skrining, senam lansia dan penyuluhan kesehatan.

2) Balita Gizi Buruk

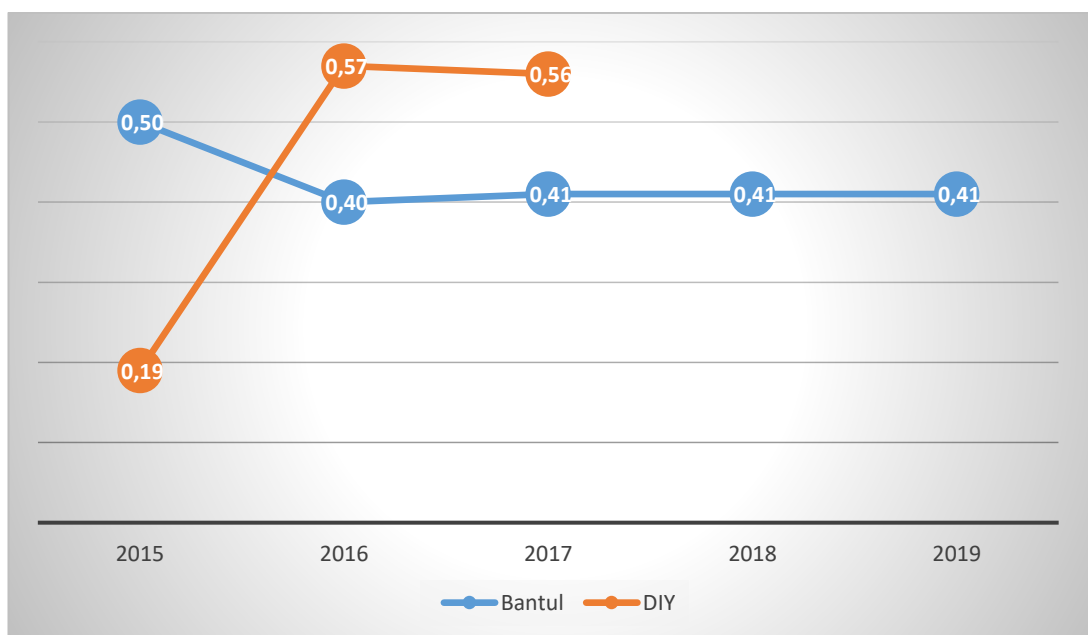
Status gizi Balita dapat diketahui dari berat badan menurut umur, yaitu membandingkan antara berat badan menurut umur ataupun panjang badannya dengan rujukan (standar) yang telah ditetapkan.

Tabel 2.37 Jumlah Balita Gizi Buruk di Kabupaten Bantul Tahun 2015-2019

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Balita yang diukur			48.895	48.943	48.502
Jumlah Balita Gizi Buruk	195	195	202	202	199
Prevelensi Balita Gizi Buruk	0,38%	0,4%	0,413%	0,41%	0,41%

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Bantul, 2020

Pada tahun 2019 target Balita status gizi buruk (BB/U) sebesar 0,41% belum tercapai. Masih banyaknya kasus gizi buruk disebabkan oleh beberapa hal diantaranya kurangnya asupan, pola asuh yang kurang tepat, sanitasi lingkungan, penyakit infeksi, penyakit bawaan, riwayat BBLR dan adanya permasalahan sosial di dalam keluarga. Prevalensi gizi buruk pada Balita disajikan pada grafik berikut.



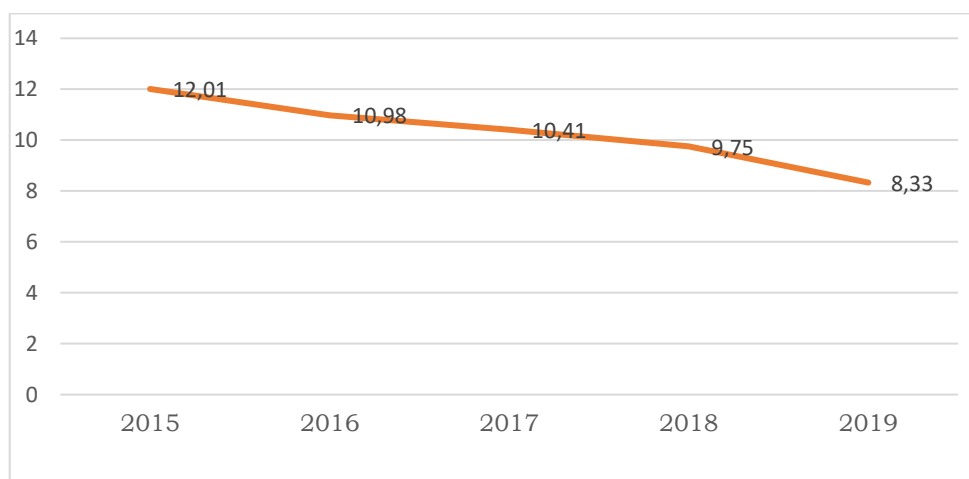
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2020

Gambar 2.27 Prevalensi Gizi Buruk pada Balita di Kabupaten Bantul dan Status Gizi Buruk di DIY

Gizi buruk dapat mengarah pada stunting. Stunting adalah kondisi tubuh anak mengalami gangguan pertumbuhan sehingga menyebabkan ukuran tubuh yang lebih pendek daripada teman-teman seusianya. Kondisi stunting tidak bisa dikembalikan seperti semula. Kondisi stunting dapat dicegah, dengan memenuhi kebutuhan nutrisi sejak hamil hingga anak berusia dua tahun (periode 1000 hari pertama kehidupan). Tahun 2019 Kabupaten Bantul ditunjuk oleh pemerintah pusat sebagai Lokasi khusus (LOKUS) dalam penanggulangan Stunting Tahap 2. Stunting adalah adalah sebuah kondisi di mana tinggi badan seseorang jauh lebih pendek dibandingkan tinggi badan orang seusianya. Penyebab utama stunting adalah kekurangan gizi kronis sejak bayi dalam kandungan hingga masa awal anak lahir yang biasanya tampak setelah anak berusia 2 tahun. Prevalensi stunting berhasil diturunkan secara signifikan, yaitu pada tahun 2017 sebesar 10,41% menurun pada tahun 2018 menjadi sebesar 9,75% dan menurun lagi pada tahun 2019 menjadi 7,73%.

Upaya yang telah dilakukan dalam menurunkan prevalensi balita stunting diantaranya adalah kampanye dan deklarasi penanggulangan

stunting, penyusunan peraturan bupati dan RAD Stunting, peningkatan kapasitas kader dalam pemantauan pertumbuhan, konsultasi dan pemeriksaan dokter spesialis anak pada balita stunting, dan pendampingan balita stunting oleh kader.



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2020

Gambar 2.28 Prevalensi Balita Stunting di Kabupaten Bantul Tahun 2015-2019

Adapun apabila dilihat determinan masalah penyebab stunting di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.38 Penyebab Balita Stunting di Kabupaten Bantul

No	Analisa Penyebab	% Balita Stunting
1	Keluarga Gakin	47,29
2	Usia Ibu<20	3,05
3	Usia Ibu>35	9,20
4	Ibu KEK Sewaktu Hamil	15,60
5	Ibu Anemia Sewaktu Hamil	11,41
6	Tidak ASI Eksklusif	21,04
7	Pengasuhan Anak kepada Orang Lain	2,7
8	Pengasuhan Anak kepada Campuran	30,03

Sumber :Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2020

Terdapat 10 desa yang dijadikan lokus stunting yaitu Desa Trimulyo, Canden, Patalan, Terong, Jatimulyo, Triwidadi, Sendangsari, Argodadi, Triharjo, Timbulharjo. Dalam Upaya keseriusan penanggulangan stunting di Kabupaten Bantul, pada bulan April tahun 2019 Dinas Kesehatan Menyelenggarakan Kampanye Penanggulangan dan Deklarasi Stunting yang di hadiri oleh Bupati Bantul. Kegiatan dimaksudkan untuk mengajak bersama-sama instansi terkait mempersiapkan generasi kedepan dengan

memprioritaskan nutrisi dan gizi, sehingga anak-anak kita dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai tahapan pertumbuhannya. Dengan Generasi yang sehat semua akan mengikuti ke arah yang lebih baik.

3) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

a) Pencegahan dan Penanggulangan Demam Berdarah Dengue (DBD)

Angka kesakitan DBD pada tahun 2019 sebesar 151,5 per 100.000 penduduk (1.424 kasus) jauh lebih tinggi dibanding tahun 2018 yaitu 19,52 per 100.000 penduduk (182 kasus). Pada tahun 2019 terdapat empat kematian penderita DBD, meningkat dibandingkan tahun 2018 di mana pada tahun tersebut tidak terjadi kasus kematian akibat DBD.

Tabel 2.39 Jumlah Kasus DBD di Kabupaten Bantul

NO	TAHUN	JML KASUS	IR (‰)	JML MENINGGAL	CFR (%)
1	2015	1441	1,48	13	0,92
2	2016	2442	2,62	4	0,16
3	2017	538	0,55	2	0,37
4	2018	182	0,18	0	0
5	2019	1424	1,5	4	0,6

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2020

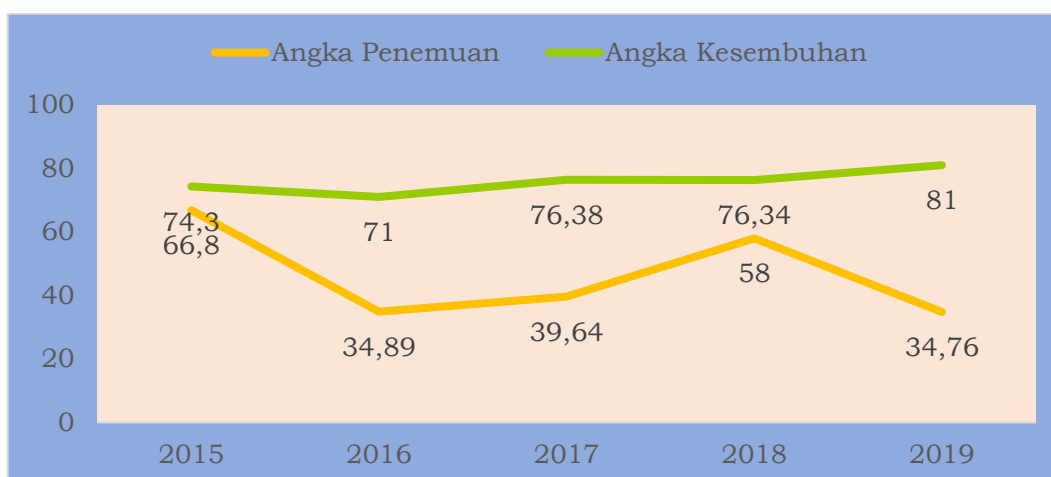
Berbagai upaya yang dilaksanakan dalam menangani kasus DBD yang meningkat antara lain melalui kegiatan pengendalian bekerjasama dengan Yayasan Tahija dalam Eliminate Dengue Project (EDP), yaitu dengan melepas nyamuk Wolbachia; mengeluarkan surat edaran Kepala Dinas Kesehatan No tentang 443/497/2019 Kewaspadaan Dengue; Peningkatan penyuluhan oleh petugas DBD; Pemberdayaan kader-kader dusun, remaja dan siswa SD untuk PSN; Melakukan dan koordinasi dan komunikasi di tingkat kecamatan; Melaksanakan foging sesuai Standar Prosedur yang telah ditetapkan; Pelaksanaan pelayanan deteksi dini DB di puskesmas pada semua kasus demam yang sudah ≥ 2 hari, dengan cara pemeriksaan menggunakan antigen dengue; Promosi kesehatan tentang kewaspadaan DB melalui media elektronik; Pembagian Larvasida di wilayah endemik pada saat PE; KIE dan kerjasama Lintas program dan

lintas sektor; Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui gertak PSN; dan Foging Fokus untuk memutus mata rantai penularan.

b) Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit menular Tuberkulosis (TB)

Tuberkulosis adalah penyakit saluran nafas yang disebabkan oleh *mycobacterium*, yang berkembang biak di dalam bagian tubuh di mana terdapat banyak aliran darah dan oksigen. Tuberkulosis adalah penyakit yang paling umum yang dialami oleh masyarakat, hal ini disebabkan karena masyarakat kurang bisa menjaga kebersihan yang ada dilingkungannya.

Masalah yang dihadapi terkait penyakit TB adalah penemuan kasus dan kesembuhan penderita TBC. Adapun grafik penemuan kasus (*Case Detection Rate/DR*) dan Angka Kesembuhan TB (*Cure Rate/CR*) dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten, 2020

Gambar 2.29 Angka Penemuan Kasus dan Kesembuhan TB di Kabupaten Bantul

Penemuan kasus TB pada tahun 2019 sebesar 112,9 per 100.000 penduduk. Jumlah kematian akibat TB dilaporkan sejumlah 16 orang. Angka kesembuhan pengobatan TB pada tahun 2019 naik menjadi 81% dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 76,34% tetapi angka kesembuhan ini masih berada di bawah target Nasional (85%).

Angka penemuan kasus TB (*case detection rate*) terlihat menurun, upaya pemerintah dan masyarakat dalam menemukan kasus TB secara aktif dan selektif (*Active Selective Case Finding*). Namun demikian, angka

kesembuhan (*cure rate*) tampak fluktuatif, dan terjadinya penurunan cakupan disebabkan antara lain karena putus obat dari pasien TB dan adanya kasus TB dengan jenis *Multi Drug Resisten* (TB MDR). Diperlukan upaya yang lebih kuat dalam pemutusan rantai penularan TBC.

Upaya penanganan kasus TB antara lain adalah Penyusunan RAD penanggulangan TB; Meningkatkan peran serta dari layanan kesehatan swasta dalam penemuan TB melalui supervisi oleh wasor TB/ *District officer* TB, dan pengelola program HIV; Kemitraan dengan pihak swasta dan masyarakat; Kolaborasi dengan PD Aisyiyah; Revitalisasi Gerakan Terpadu Daerah (Gerduda) Kecamatan; Penyediaan ruang tersendiri untuk poli batuk dan TB MDR di Puskesmas; dan Pendampingan penemuan TB di Puskesmas melalui kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dengan fokus pada penyegaran tentang strategi DOTS, *Active Selective Case Finding* (ASCF) melalui pemeriksaan dahak pada suspek, Pemberian makanan tambahan pada penderita TB yang sedang diobati.

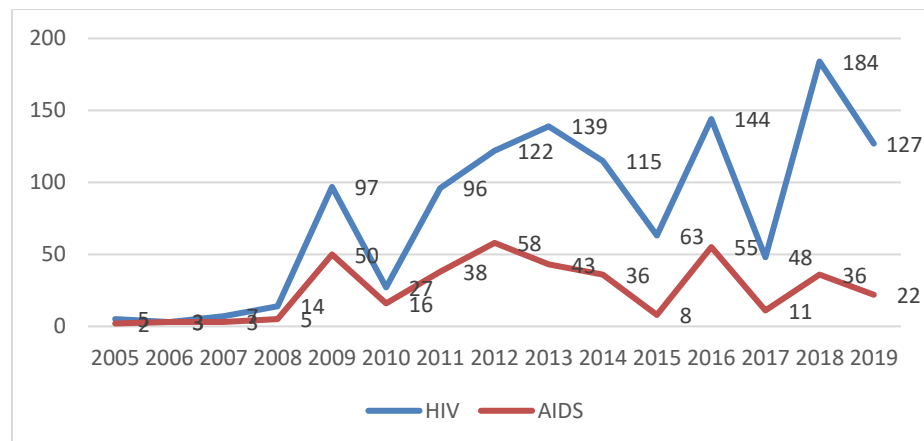
c) Pencegahan dan Penanggulangan Leptospirosis

Pada tahun 2019 telah ditemukan kasus leptospirosis sebanyak 92 kasus dengan satu di antaranya meninggal dunia, turun dibandingkan tahun 2018 sebanyak 98 kasus. Angka kesakitan leptospirosis pada tahun 2019 adalah 9.79 per 100.000 penduduk, menurun dibandingkan tahun 2018 yaitu 10.5 per 100.000 penduduk (98 kasus dengan 1 kematian). Upaya-upaya komprehensif dalam rangka pencegahan dan penanggulangan leptospirosis telah dilakukan meliputi sosialisasi penyakit leptospirosis, koordinasi lintas sektor dan program, peningkatan kapasitas SDM kesehatan dalam tatalaksana kasus leptospirosis serta peningkatan surveilans leptospirosis sebagai upaya kewaspadaan dini dan respon terhadap penyakit potensial kejadian luar biasa dan wabah.

d) Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS

Penyebaran HIV-AIDS memang sangat sulit terdeteksi. Data yang didapatkan saat ini hanya sebagian kecil dari besarnya jumlah orang yang

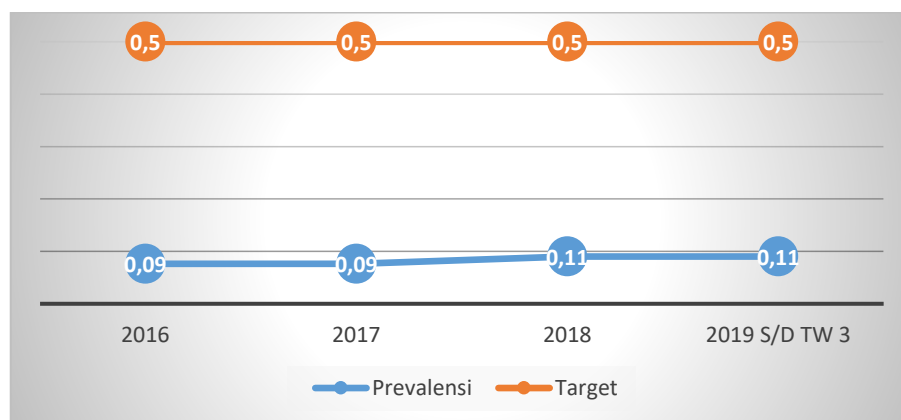
sebenarnya mengidap HIV-AIDS. Banyak orang yang tidak memeriksakan dirinya sehingga angka pasti jumlah ODHA hingga saat ini tidak dapat diketahui. Inilah yang dinamakan fenomena gunung es. Masih banyak ODHA yang tidak terdeteksi hingga hari ini. Lebih dari itu, banyak ODHA yang tidak sadar bahwa saat ini dirinya terjangkit HIV. Berikut kami sajikan grafik penemuan HIV AIDS tahun 2005 - 2019.



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2020

Gambar 2.30 Penemuan Kasus HIV AIDS di Kabupaten Bantul

Angka prevalensi HIV-AIDS sampai tahun 2019 sebesar 0,12% dari target <0,5%. Angka prevalensi ini masih termasuk dalam kategori endemis rendah (<0,5%). Bila di dibandingkan dengan tahun 2018 terjadi penurunan kasus dari 184 kasus menjadi 127 kasus. Angka ini menunjukkan endemisitas kasus HIV termasuk baik, jauh lebih rendah dibandingkan target sebesar 0,5%. Prevalensi HIV AIDS tahun 2016 – 2019 digambarkan dalam grafik berikut.



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2020

Gambar 2.31 Prevalensi HIV AIDS di Kabupaten Bantul

Akselerasi pengendalian HIV-AIDS pada tahun 2019 dilakukan melalui kegiatan peningkatan akses pemeriksaan HIV terhadap orang berisiko (Bumil, TBC dan IMS) dengan pengadaan bahan medis habis pakai yang didistribusikan ke seluruh fasyankes yang sudah mampu melaksanakan pemeriksaan HIV (27 Puskesmas dan 8 Rumah Sakit); Peningkatan akses pelayanan kesehatan pada kelompok kunci dan pada kelompok potensial serta kelompok berisiko rendah (Bumil dan penderita TB) dengan cara intensifikasi konseling, penemuan dan pengobatan kasus melalui VCT di Puskesmas; Klinik layanan Infeksi Menular Seksual (IMS) di 6 (enam) puskesmas yaitu Puskesmas Kretek, Imogiri I, Srandakan, Kasihan II, Dlingo I dan Sedayu I yang intensif melaksanakan penyuluhan, pelayanan *Voluntary Counseling and Testing* (VCT); Klinik layanan *Harm Reduction* di Puskesmas Banguntapan II. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi Program Terapi Rumatan *Metadhon* (PTRM) yang ditujukan bagi Pengguna Narkoba Suntik (Penasun). Sedangkan bagi penasun yang sulit untuk terapi *metadhone*, akan diberikan Layanan Alat Suntik Steril (LASS); Klinik pelayanan *Voluntary Consulting and Testing* (VCT) di 27 Puskesmas dan 8 RS (RS PKU, RS Elizabeth, RS Nur Hidayah, RS Rahma Husada, RS Rajawali Citra, RSK Paru Respira, RSPAU Harjolukito, RS Panembahan Senopati). Layanan *Care Support and Treatment* (CST) atau Pengobatan Dukungan Perawatan (PDP) di dua (2) RS dan 1 Puskesmas, yaitu RSUD Panembahan Senopati, RSPAU Hardjo Lukitodan Puskesmas Kretek; Penambahan layanan PDP dengan melatih puskesmas (Puskesmas Kasihan II, Puskesmas Banguntapan I, Puskesmas Srandakan, Puskesmas Piyungan dan Puskesmas Sedayu II) untuk memudahkan akses pengobatan Orang dengan HIV AIDS (ODHA); dan Peningkatan penemuan penderita melalui Pengendalian Penularan Ibu dan Anak (PPIA) dengan cara tes VCT pada semua ibu hamil.

4) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

a) Deabetes Melitus (DM) dan Pengendalian kasus Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah (PJPD)

Tahun 2019 dilakukan upaya screening awal untuk mendeteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular DM dan PJPD pada 734 orang dengan hasil yang berrisiko Hipertensi : 231 orang (31,47 %); Diabetes : 73 orang (9,94 %); dan Kadar kolesterol total dalam darah: 206 orang (28,06 %).

b) Deteksi Dini NAPZA

Upaya yang dilakukan pemerintah melalui Dinkes bekerjasama dengan BNNK Bantul dan RSPAU dr S. Harjolutomo serta Paskas TNI AU dan Kodim 0729 Bantul sebanyak 310 orang.

c) Pengendalian kasus kesehatan jiwa

Pada tahun 2019 pelayanan pada ODGJ sebanyak 4.895 jiwa meningkat dibandingkan tahun 2018 sebanyak 4.567 kasus. Untuk gangguan jiwa ringan pada tahun 2018 ditemukan kasus baru sebanyak 787, kasus lama 527. Untuk kejadian bunuh diri di tahun 2018 ada 8 kasus.

5) Kewaspadaan Dini dan Respon terhadap Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Wabah.

Fungsi utama surveilans penyakit adalah sebagai bentuk kewaspadaan dini dan respon terhadap potensial KLB dan wabah. Pada tahun 2018 telah terantisipasi 9 (sembilan) kasus kejadian potensial KLB di wilayah Kabupaten Bantul dengan 6 (enam) di antaranya adalah kasus keracunan makanan. Secara kuantitas, jumlah ini menurun dibandingkan tahun 2017 yaitu 14 kasus. pada tahun 2019 masih didominasi dengan kejadian Keracunan Makanan yaitu 9 (Sembilan) kasus diikuti adanya dugaan kasus Pertusis, gastroenteritis dan GHPR (Gigitan Hewan Penular Rabies) masing-masing 1 (satu) kasus. Capaian *Accute Flaccid Paralysis* (AFP) sebagai upaya kewaspadaan dini terhadap adanya virus Polio liar di

masyarakat sebanyak 5 (lima) kasus. Surveilans Campak mencatat sebanyak 199 suspek dengan hasil konfirmasi Campak positif 1 kasus dan Rubella positif sebanyak 14 kasus.

6) Promosi Kesehatan

Pendataan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat di tatanan rumah tangga, institusi tempat kerja, institusi pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan tempat-tempat umum. Data capaian PHBS tahun 2018 di Kabupaten Bantul pada semua tatanan disajikan pada Tabel 2.40.

Tabel 2.40 Hasil Capaian Tatanan PHBS di Kabupaten Bantul

No.	Tatanan PHBS	2016	2017	2018	2019
1	Rumah Tangga	41,21%	47,14%	50,27%	53%
2	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	88,31%	83,82%	83,82%	91,67%
3	Institusi Pendidikan	44,38%	54,77%	54,77%	61%
4	Tempat Kerja	26,15%	39,15%	39,15%	41,21%
5	Tempat-tempat Umum	63,18%	58,52%	58,52%	59%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2020

7) Sanitasi

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), mencakup lima pilar, yaitu Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS), Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), Pengelolaan Air Minum Rumah Tangga (PAM RT), pengelolaan sampah rumah tangga, dan pengelolaan limbah rumah tangga.

a. Akses Jamban

Pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga (PIS-PK) telah dilakukan oleh 27 puskesmas dengan memotret kondisi kesehatan dari anggota keluarga sekaligus memberikan intervensi dan edukasi kesehatan salah satunya adalah tersedianya akses/jamban sehat

untuk keluarga sebesar 100%, meskipun masih ada yang menggunakan jenis cemplung dan plengsengan.

b. Pengawasan Kualitas Air

Kegiatan pengawasan kualitas air meliputi pengawasan kualitas air baik secara internal maupun eksternal serta pembinaan DAM dan pengelola air minum pedesaan Yogyakarta. Pengawasan dilakukan terhadap air bersih maupun air minum. Pengawasan dilakukan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), perusahaan Depot Air Minum (DAM), Pengelola Air Minum Pedesaan (Pamdes), dan sumber air bersih masyarakat (sumur gali, mata air, dan lain-lain). Kegiatan pengawasan eksternal dilakukan dengan pengambilan sampel dan pengujian kualitas air bagi masyarakat dan dunia usaha. Pengawasan kualitas mencakup sampel sejumlah 2.573 sampel, yang terdiri dari sampel air minum yang bersumber dari PDAM adalah lima sampel tiap kecamatan dan jumlah sampel air bersih sebanyak lima sampel tiap desa.

Cakupan air bersih pada tahun 2019 sebesar 100%, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016 sebesar 98,0%. Dengan demikian semua masyarakat sudah dapat mengakses air bersih, walaupun masih mengalami kendala dari segi kualitas, kontinuitas dan kuantitas. Pada beberapa rumah tangga di kecamatan Dlingo, Imogiri, dan Pandak, tidak semua air memenuhi syarat secara kualitas karena terjadi kesulitan mendapatkan air pada musim kemarau.

2.3.1.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1) Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik

Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan. Jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh sebab itu jalan harus dalam kondisi baik untuk memperlancar transportasi.

Berdasarkan Keputusan Gubernur DIY nomor 118/KEP/2016 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Provinsi, lokasi ruas jalan provinsi di Kabupaten Bantul sepanjang 162,150 km. Sedangkan, berdasarkan Keputusan Bupati Bantul Nomor 265 Tahun 2017 tentang Status Jalan Kabupaten di Kabupaten Bantul, jumlah ruas jalan kabupaten sebanyak 376 ruas, dengan panjang 624,47 Km.

Tabel 2.41 Kondisi Jalan di Kabupaten Bantul Tahun 2017-2019

Tahun	Panjang (Km)	Kondisi Mantap		Kondisi Belum Mantap	
		Panjang (km)	%	Panjang (km)	%
2017	624.47	463.23	74.18	161.24	25.82
2018	624.47	465.73	74.58	158.74	25.42
2019	624.47	468.97	75.10	156.64	25.08

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul, Tahun 2019.

Jalan kondisi mantap yaitu jalan aspal kondisi baik dan sedang, sebaliknya kondisi belum mantap yaitu kondisi jalan rusak dan rusak berat. Pada Tahun 2019 jalan kabupaten dalam kondisi mantap sepanjang 468,97 km (75,10%) naik dari tahun sebelumnya sepanjang 465,73 km (74,58%) pada Tahun 2018.

2) Rasio Jaringan Irigasi

Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. Secara operasional, jaringan irigasi dibedakan ke dalam tiga kategori, yaitu jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier. Rasio jaringan irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap luas lahan pertanian. Panjang jaringan irigasi meliputi jaringan primer, sekunder dan tersier.

Dalam pengelolaan jaringan irigasi, tolok ukur keberhasilan pengelolaan adalah efisiensi dan efektifitas. Tolok ukur efisiensi dapat diwakili dengan cakupan daerah irigasi (DI) yang terlayani air irigasi sementara tolok ukur efektifitas diwakili oleh capaian saluran irigasi dalam kondisi baik.

Berdasarkan Permen PU dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi bahwa kewenangan Kabupaten Bantul meliputi 118 DI (DI Permukaan: 100 dan DI Air Tanah: 18) dengan luas 9.368 Ha.

Kondisi jaringan irigasi primer dan sekunder yang berfungsi baik tahun 2019 (DI kewenangan Kabupaten Bantul) adalah 82,15% (193.125,6m) melebihi dari target yang ditetapkan 82% (192.773m). Data target dan capaian saluran irigasi dalam kondisi baik selama lima tahun terakhir dari tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.42 Target dan Capaian Saluran Irigasi dalam Kondisi Baik di Kabupaten Bantul Tahun 2015-2019

Tahun	Saluran irigasi (Primer dan Sekunder) dalam kondisi baik)			
	Target (m)	%	Realisasi (m)	%
2015	183.521,40	88,00	186.754,37	89,55
2016	190.422,09	81,00	193.957,00	82,50
2017	188.071,20	80,00	188.541,38	80,20
2018	189.247,65	80,5	190.422,09	81,00
2019	192.773,00	82,00	193.125,60	82,15

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul, 2020

Kondisi luas sawah DI yang menjadi kewenangan Kabupaten Bantul yang terairi dengan baik tercapai 82,19% (7.096,28Ha) melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 82,16% (7.093,69Ha). Data target dan capaian DI kewenangan Kabupaten Bantul yang terlayani air irigasi selama lima tahun terakhir dari tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.43 Target dan Capaian DI yang Terlayani Air Irigasi di Kabupaten Bantul Tahun 2015-2019

Tahun	Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Bantul Yang Terairi Dengan Baik			
	Target (Ha)	%	Realisasi (Ha)	%
2015	7.511,58	87,00	7.565,97	87,63
2016	6.820,86	79,00	7.004,00	81,12
2017	6.907,20	80,00	7.007,35	81,16
2018	7.050,52	81,16	6.945,19	80,44

Tahun	Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Bantul Yang Terairi Dengan Baik			
	Target (Ha)	%	Realisasi (Ha)	%
2019	7.093,69	82,16	7.096,28	82,19

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul, 2020

3) Drainase Dalam Kondisi Baik

Drainase merupakan pembuangan air permukaan baik secara gravitasi maupun dengan pompa dengan tujuan untuk mencegah terjadinya genangan, menjaga dan menurunkan permukaan air sehingga genangan air dapat dihindarkan. Kondisi sistem drainase di Kabupaten Bantul masih merupakan drainase gabungan dengan sistem drainase terbuka, di mana pembuangan air limbah dan air hujan serta air kotor disalurkan dalam satu saluran. Sehingga, kondisi drainase yang baik atau tidak tersumbat dapat diwakili oleh ada/tidaknya banjir genangan akibat curah hujan yang tinggi. Semakin luas banjir genangan menunjukkan drainase tidak berfungsi dengan baik. Presentase kinerja penanganan banjir mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dikarenakan adanya kejadian bencana cuaca ekstrem berupa siklon tropis yang menyebabkan banjir.

Tabel 2.44 Data Penanganan Banjir di Kabupaten Bantul Tahun 2015-2019

No	Tahun	Target		Realisasi		Kinerja (%)
		%	Penanganan Banjir (ha)	%	Penanganan Banjir (ha)	
1	2015	13,52	120,80	13,52	120,80	100
2	2016	13,78	123,13	20,30	181,43	147,71
3	2017	20,56	183,71	24,90	222,49	121,11
4	2018	27,34	244,30	28,84	257,70	105,49
5	2019	34,12	303,81	34,00	257,70	99,65

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul, 2020

Ket.: Luas daerah rawan banjir luapan tahun 2014 adalah 893,56 Ha

4) Tempat Pemakaman Umum

Tempat pemakaman umum tersebar dilingkungan permukiman penduduk, beberapa merupakan makam keluarga. Sampai saat ini belum ada permasalahan di lingkungan perkampungan warga terkait tempat pemakaman, tetapi dengan pesatnya pembangunan perumahan yang berdekatan dengan lokasi perkampungan menimbulkan potensi konflik

sosial antara masyarakat sekitar dengan warga perumahan yang mayoritas merupakan penduduk luar daerah. Hal ini perlu disediakan tempat pemakaman umum yang dapat menampung warga perumahan maupun masyarakat umum.

Penyediaan areal pemakaman umum di Kecamatan Imogiri salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan pemakaman khususnya bagi masyarakat yang tinggal di perumahan.

5) Perencanaan Tata Ruang

Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Produk perencanaan tata ruang yang telah dimiliki Kabupaten Bantul sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 2.45.

Tabel 2.45 Produk Perencanaan Tata Ruang di Kabupaten Bantul Tahun 2018

No.	Produk Perencanaan Tata Ruang
1.	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Kabupaten Bantul tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030
2.	Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Sewon 2018-2038
3.	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Kasihan 2018-2038
4.	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perizinan Pemanfaatan Ruang
5.	Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sejumlah 17 Kecamatan
6.	Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)

Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul, 2020

Dari 17 dokumen RDTR yang telah disusun, baru dua buah RDTR yang ditetapkan menjadi peraturan daerah yaitu RDTR dan PZ BWP Sewon dan Kasihan. Hal ini dikarenakan proses penetapan dokumen RDTR menjadi perda harus melalui proses yang panjang dan melibatkan pemerintah provinsi maupun pusat.

Tabel 2.46 Rencana Tata Ruang yang disusun di Kabupaten Bantul

Tahun	Rencana tata ruang yang disusun
2014	RDTR dan PZ Kec. Pajangan, Imogiri, Pleret, Pandak, dan Sedayu
2015	RDTR dan PZ Kec. Piyungan, dan Pantai Selatan (Sanden, Kretek, Srandakan)

Tahun	Rencana tata ruang yang disusun
2016	RDTR dan PZ Kec. Pundong dan Jetis
2017	RDTR dan PZ Kec. Bambanglipuro, Dlingo,
2017	KLHS RTDR Kec. Bambanglipuro, Dlingo
2017	Raperda RDTR dan PZ Piyungan, Pansela, Jetis, Pundong
2017	Desain Citra Kota Bantul, Jalan Jendral Sudirman
2018	RDTR dan PZ Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan
2018	RTBL Kawasan Srandakan, Kawasan Bantul Kota, Kawasan Sanden dan RTBL Zona pengembangan Kawasan Parangtritis II
2018	Kajian KLHS RTRW dan review Naskah Akademik RTRW
2018	Masterplan dan DED Gerbang masuk Kabupaten Bantul dan Kawasan Lindung Hargodumilah

Sumber: Bappeda dan Dipertaru Kabupaten Bantul, 2020

Peninjauan Kembali (PK) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Kabupaten Bantul tentang RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 telah dilaksanakan pada tahun 2016. Namun pada tahun 2018 peninjauan kembali disesuaikan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 6 tahun 2017 tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah. Hasil rekomendasi PK RTRW yaitu dilakukan review RTRW.

Pada Tahun 2019 dilaksanakan kegiatan perbaikan revisi RTRW disesuaikan aturan baru yaitu Peraturan Menteri ATR Nomor 1 Tahun 2018 RTRW Kabupaten/Kota dan kegiatan konsultasi peta RTRW ke Badan Informasi Geospasial (BIG). Untuk tahapan persetujuan substansi RTRW ke Kementerian ATR, masih diperlukan persyaratan yang perlu dilengkapi pada tahun 2020 antara lain:

1. Berita Acara kesepakatan pengajuan persetujuan substansi dengan DPRD;
2. Rekomendasi Gubernur terhadap rancangan RTRW;
3. SK Bupati tentang rekomendasi hasil PK RTRW (sedang dilaksanakan);
4. Tabel sandingan RTRW eksisting dengan rancangan perubahan RTRW;
5. Surat pernyataan Bupati bahwa bertanggungjawab terhadap kualitas raperda RTRW;
6. Konsultasi publik minimal dua kali;
7. Berita Acara dengan kabupaten yang berbatasan;
8. Berita acara yang dikeluarkan oleh BIG perihal peta dasar RTRW;

9. KLHS RTRW yang sudah divalidasi; dan
10. Surat permohonan persetujuan substansi Materi teknis dan album peta RTRW;

Perlu dilakukan upaya dan langkah percepatan dalam penyelesaian revisi RTRW Kabupaten Bantul 2011-2030 pada tahun 2020, mengingat periode dokumen RPJMD Kabupaten Bantul berakhir tahun 2021 dan penyusunan RPJMD harus berpedoman pada RTRW.

6) Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Tujuan penyelenggaraan penataan ruang menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah untuk mencapai kondisi ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Kondisi ruang tersebut dapat dipenuhi melalui proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang

Untuk dapat menjaga konsistensi dari pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang wilayah, maka perlu dilakukan upaya monitoring terhadap pemanfaatan ruang yang berjalan serta mengevaluasi kesesuaian pemanfaatan ruang yang ada terhadap rencana tata ruang wilayahnya. Hasil evaluasi kesesuaian pemanfaatan ruang dapat dilihat pada tabel 2.47.

Tabel 2.47 Kesesuaian Pola Ruang Kabupaten Bantul

FUNGSI KAWASAN		Tingkat Kesesuaian (Ha)			Jumlah (Ha)
		Sesuai	Belum Sesuai	Tidak Sesuai	
LINDUNG	Kawasan Hutan Lindung	588,41	163,15	519,42	1.270,98
	Kawasan Resapan Air	2.231,20	0	408,53	2.639,71
	Sempadan Pantai	187,33	0	67,09	254,42
	Sempadan Sungai	1.716,24	0	657,93	2.374,17
	Kawasan Cagar Budaya	146,48	20,14	109,02	275,64
	Jumlah Lindung (Ha)	4.869,66	183,28	1.762,00	6.814,94
	% terhadap Kawasan Lindung	71,46	2,69	25,85	100,00
	% terhadap Kabupaten Bantul	9,73	0,37	3,52	13,62
BUDIDAYA	Kawasan Peruntukan Permukiman Perdesaan	9.661,39	918,38	356,23	10.936,00
	Kawasan Peruntukan Permukiman Perkotaan	7.005,58	5.182,31	7,87	12.195,75

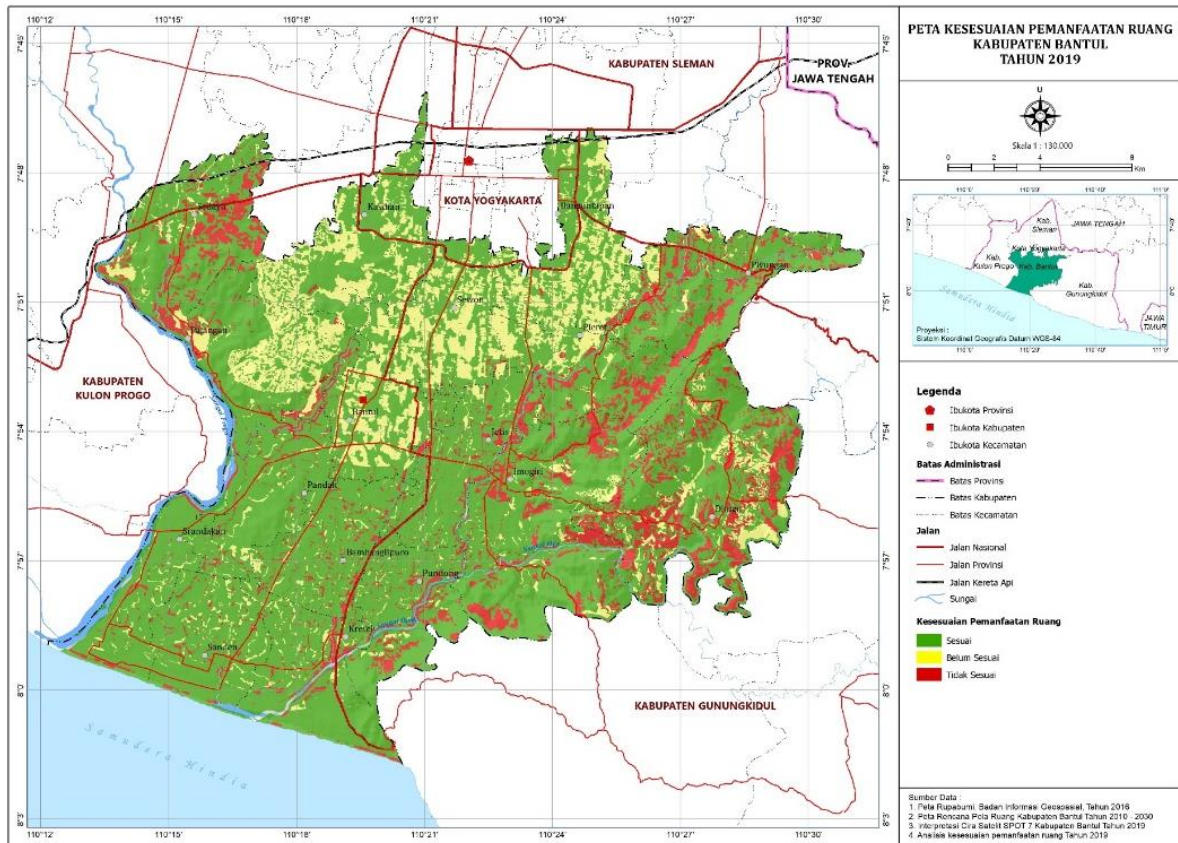
FUNGSI KAWASAN	Tingkat Kesesuaian (Ha)			Jumlah (Ha)
	Sesuai	Belum Sesuai	Tidak Sesuai	
Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat	410,27	383,85	385,39	1.179,52
Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Basah	8.284,00	654,09	1.728,10	10.666,19
Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Kering	3.660,16	2,15	1.122,99	4.785,30
Kawasan Peruntukan Industri	1.776,79	-	686,96	2.463,75
Kawasan Peruntukan Pariwisata	982,96	-	-	982,96
Jumlah Budidaya (Ha)	31.781,15	7.140,78	4.287,54	43.209,47
% terhadap Kawasan Budidaya	73,55	16,53	9,92	100,00
% terhadap Kabupaten Bantul	63,53	14,27	8,57	86,38
TOTAL (Ha)	36.650,81	7.324,07	6.049,54	50.024,41*
% terhadap Kabupaten Bantul	72,50	9,61	17,89	100,00

Sumber: Analisis, 2019

ket: *tidak termasuk luasan sungai dalam analisis kesesuaian pemanfaatan ruang

Evaluasi terhadap kesesuaian pemanfaatan pola ruang diperoleh hasil bahwa tingkat kesesuaian pola ruang Kabupaten Bantul tahun 2019 dengan kriteria 'sesuai' sebesar 72,50%; 'belum sesuai' sebesar 9,61%; dan 'tidak sesuai' sebesar 17,89%.

Berdasarkan penilaian kesesuaian pola ruang tersebut, maka tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang RTRW Kabupaten Bantul menurut klasifikasi dari Permen ATR/Kepala BPN No. 9/2017 secara umum berada pada klasifikasi tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang **kurang berkualitas (<80%)**, artinya pelaksanaan pemanfaatan ruang belum sesuai dengan rencana pola ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah.



Gambar 2.32 Peta Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2019

7) Ruang Terbuka Hijau (RTH)

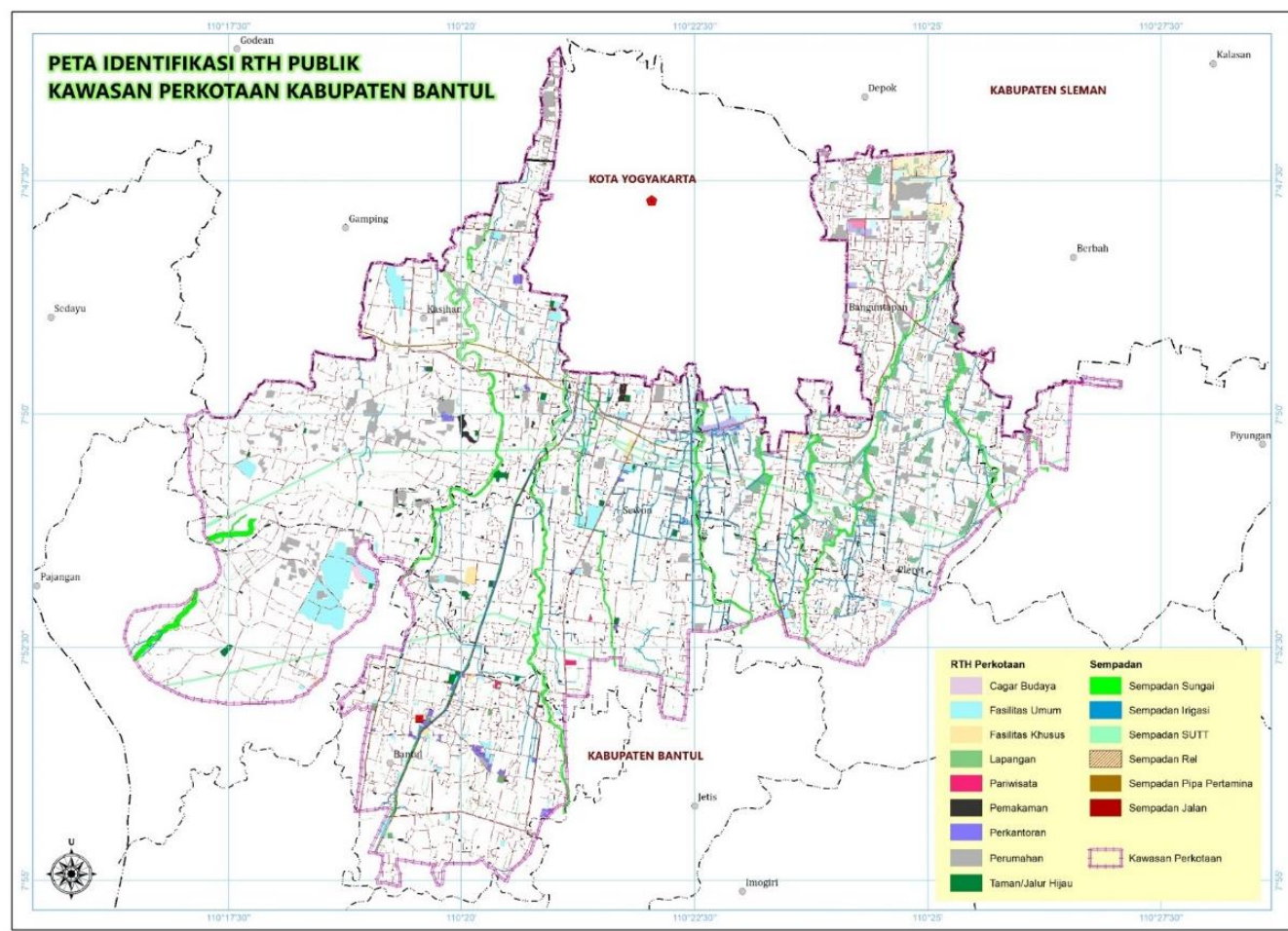
Ruang Terbuka Hijau (RTH) menurut UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Pada pasal 20 menyebutkan bahwa terdapat dua jenis RTH, yaitu RTH publik dan RTH privat. Proporsi RTH pada wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota, sedangkan proporsi RTH publik pada wilayah kota paling sedikit 20% dari luas wilayah kota. Angka tersebut menunjukkan bahwa belum memenuhi standar luasan RTH yang telah ditetapkan.

Tabel 2.48 Jenis dan Luas Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Bantul

No.	Jenis RTH		Luas RTH (Ha)
1	BANGUNAN	Perumahan	132,61
		Perkantoran (pemerintah dan swasta)	26,05

No.	Jenis RTH		Luas RTH (Ha)
		Fasilitas Umum (pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosbud)	113,42
		Sub total	272,08
2	LINGKUNGAN	Lapangan	32,03
		Pemukaman	81,93
		Taman Kelurahan	230,63
		Taman Kecamatan	9,58
		Taman Kota	1,51
		Wanadesa	5,51
		Sub total	361,2
3	PERKOTAAN	Sempadan Jalan	630,43
		Taman/jalur hijau	3,86
		Sub total	634,3
4	FUNGSI TERTENTU	Sempadan SUTT	107,09
		Sempadan Rel	1,12
		Sempadan Sungai	254,88
		Sempadan Irigasi	88,92
		Sempadan Danau/Telaga Desa	3,63
		Pariwisata	15,19
		Sempadan Pipa Pertamina	14,03
		Cagar Budaya	11,87
		Gardu Induk PLN	3,1
		Hankam	23,86
		IPAL	7,39
		TPST	0,17
		Sub total	531,25
Total Luas RTH			1.798,83
Luas Wilayah			19.873,00
Luas Kawasan Perkotaan			12.544,00
% Luas Kawasan Perkotaan			63,12
RTH Kawasan Perkotaan (%)			14,34

Sumber : Bappeda, diolah, 2020



Gambar 2.33 Peta Identifikasi RTH Publik Kawasan Perkotaan Kabupaten Bantul Tahun 2019

2.3.1.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1) Penduduk Berakses Air Bersih

Upaya untuk meningkatkan akses terhadap air bersih diantaranya dengan menambah jumlah sambungan rumah ke jaringan PDAM dan membangun instalasi Sistem Penyediaan Air Sederhana (SIPAS) melalui program APBD dan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di daerah yang rawan air bersih. Proporsi jumlah penduduk yang mendapat air bersih disajikan pada Tabel 2.49.

Tabel 2.49 Persentase Penduduk Berakses Air Bersih di Kabupaten Bantul

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah penduduk yang mendapatkan akses air bersih	882.663	910.103	927.181	939.718	949.325

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
2	Jumlah penduduk	919.44	928.676	927.181	939.718	949.325
3	Persentase penduduk berakses air bersih (%)	96	98	100	100	100

Sumber: Dinkes Kabupaten Bantul, 2020

Akses air bersih masyarakat memang sudah 100%, namun demikian dari segi kualitas, kontinuitas, dan jangkauan belum sepenuhnya terpenuhi sehingga masih diperlukan penambahan sambungan rumah. Pada beberapa rumah tangga di Kecamatan Dlingo, Imogiri, dan Pandak, tidak semua air memenuhi syarat secara kualitas karena terjadi kesulitan mendapatkan air pada musim kemarau.

2) Lingkungan Permukiman Kumuh

Kebutuhan rumah yang terus meningkat tiap tahun khususnya di wilayah perkotaan yang jumlah penduduknya relatif banyak dan padat, sempitnya lahan dan mahal nya harga tanah di wilayah perkotaan mendorong munculnya permukiman kumuh. Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh ditetapkan dengan SK Bupati Nomor 220 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 364 Tahun 2014 tentang Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bantul, sebanyak 19 lokasi dengan luas 79,58 Ha.

Tabel 2.50 Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bantul Tahun 2019

No.	Nama Lokasi	Luas (Ha)	Lingkup Administratif		Penanganan	
			Desa	Kecamatan	Tahun	%
1	Gandekan	1,27	Bantul	Bantul	2017-2018	100%
2	Deresan	2,76	Ringinharjo	Bantul	-	0%
3	Mandingan	2,31	Ringinharjo	Bantul	-	0%
4	Soropaten	0,71	Ringinharjo	Bantul	2017	100%
5	Karangmojo	2,96	Trirenggo	Bantul	2017	100%
6	Kweden	0,91	Trirenggo	Bantul	-	0%
7	Jaranan	0,34	Banguntapan	Banguntapan	2019	100%
8	Jomblang	3,60	Banguntapan	Banguntapan	2017	100%
9	Blado	15,77	Potorono	Banguntapan	2017-2018	100%
10	Semoyan	1,91	Singosaren	Banguntapan	2017	100%

No.	Nama Lokasi	Luas (Ha)	Lingkup Administratif		Penanganan	
			Desa	Kecamatan	Tahun	%
11	Dladan	2,70	Tamanan	Banguntapan	2017	100%
12	Ngewotan	16,97	Ngestiharjo	Kasihan	2018	100%
13	Gonjen	3,92	Tamantirto	Kasihan	2018	100%
14	Kalipakis	1,11	Tirtonirmolo	Kasihan	2017	100%
15	Salakan	2,45	Bangunharjo	Sewon	2017	100%
16	Glugo	4,37	Panggunharjo	Sewon	2017	100%
17	Cepit	11,71	Pendowoharjo	Sewon	2018	100%
18	Pacetan	2,18	Pendowoharjo	Sewon	2017	100%
19	Pendowo	1,66	Pendowoharjo	Sewon	2017	100%
	Total	79,58				92,49%

Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul, 2020

Penanganan kawasan kumuh dengan gerakan nasional 100-0-100 diantaranya tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0%. Tahun 2018, upaya penanganan kawasan kumuh Kabupaten Bantul telah mencapai 92,06%. Kemudian pada tahun 2019, terdapat penambahan penanganan di Dusun Jaranan Banguntapan sehingga total penanganan hingga tahun 2019 mencapai 92,49%.

3) Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah bangunan tempat tinggal yang tidak memenuhi persyaratan hunian secara teknis maupun non teknis. Kriteria atau persyaratan yang dimaksud, yaitu keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni

Realisasi pembangunan RTLH mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dari Tahun 2018 ke 2019, menunjukkan peningkatan sebesar 15% dengan jumlah RTLH dapat tertangani 1.794 unit, sedangkan pada tahun 2019 sebanyak 2.067 unit.

Tabel 2.51 Realisasi Pembangunan RTLH di Kabupaten Bantul Tahun 2015-2019

Sumber Anggaran RTLH	2015	2016	2017	2018	2019
BSPS (Unit)	-	652	365	959	1365
DAK (Unit)	-	-	-	150	176
APBD I (Unit)	-	-	582	517	443
APBD II (Unit)	-	-	-	171	83

Sumber Anggaran RTLH	2015	2016	2017	2018	2019
Total	-	652	947	1794	2067

Sumber : DPUPKP Kabupaten Bantul, 2020

4) Fasilitas Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terjadi perubahan kewenangan terhadap penanganan perumahan bagi MBR yaitu menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sementara kewenangan pemerintah kabupaten antara lain penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana, fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemda, penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman, penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG), dan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha.

Kebijakan pembangunan perumahan selain untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni, juga untuk mengatasi *backlog* rumah dan mengurangi kawasan kumuh perkotaan. Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas kawasan perumahan dan permukiman sederhana sehat, Pemerintah Kabupaten Bantul telah melaksanakan pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dan bantuan stimulan pembangunan sarana prasarana lingkungan seperti jalan lingkungan, drainase dan jembatan. Pembangunan Rusunawa dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan kawasan kumuh perkotaan dan menyediakan perumahan yang layak bagi MBR.

Rusunawa di Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY) telah dibangun di wilayah Kecamatan Sewon, Kasihan, dan Banguntapan. Pada tahun 2009 di wilayah Kecamatan Sewon telah dibangun rusunawa Panggunharjo sebanyak 2 Twin Blok (TB) atau 198 unit. Pada tahun 2011 di wilayah Kecamatan Kasihan dibangun Rusunawa di Dusun Tambak, Desa Ngestiharjo sebanyak satu TB atau 98 unit. Selanjutnya di wilayah Kecamatan Banguntapan dibangun rusunawa di dua desa, yaitu pada

tahun 2012 di Dusun Pringgolayan, Desa Banguntapan sebanyak dua TB atau 198 unit, dan pada tahun 2016 di Desa Tamanan dibangun rusunawa pekerja sebanyak dua TB atau 190 unit.

Tahun 2017 Operasional 4 unit rusunawa, yaitu Rusunawa Panggungharjo, Rusunawa Ngestiharjo, Rusunawa Banguntapan, dan Rusunawa Tamanan. Selain itu peningkatan sarana dan prasarana pendukung Rusunawa Banguntapan yaitu pembangunan pos satpam dan landsekap. Tahun 2018 masih dilakukan operasional empat unit rusunawa tersebut dan pembangunan tempat parkir Rusunawa Panggungharjo dan Tamanan.

Tabel 2.52 Pembangunan Rusunawa dan Operasional pada Kawasan Perkotaan Yogyakarta di Kabupaten Bantul Tahun 2008-2018

No.	Lokasi Rusunawa	Tahun		Kapabilitas	
		Pembangunan	Operasional	Twin blok	Unit
1.	Panggungharjo, Sewon	2008	2010	2	198
2.	Tambak, Ngestiharjo, Kasihan	2011	2012	1	96
3.	Pringgolayan, Banguntapan	2012	2013	2	198
4.	Tamanan, Banguntapan (Rusunawa Pekerja)	2015 (Pematangan lahan)	2017 2018	2	190 (66 pekerja keluarga, 104 pekerja lajang)

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul, 2020

2.3.1.1.5 Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1) Kesatuan Bangsa dan Politik

a. Pembinaan Politik Daerah

Pembinaan politik daerah di Kabupaten Bantul juga dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik. Kegiatan ini perlu dilaksanakan mengingat pentingnya pendidikan politik dan berorganisasi bagi masyarakat agar masyarakat sadar dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik di Kabupaten Bantul. Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan kualitas kehidupan sosial politik dan meningkatnya partisipasi politik serta partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan umum.

Data tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu Tahun 2014 sebagai berikut pada tabel berikut.

Tabel 2.53 Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu di Kabupaten Bantul Tahun 2014

No.	Jumlah DPT	Jumlah suara sah	Jumlah tidak sah/ golput	Persentase suara sah
1	716.367	560.727	155.640	78%

Sumber: Kesbangpol Kabupaten Bantul, 2020

Tabel di atas menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu Tahun 2014 yang digambarkan melalui persentase suara sah sebesar 78%, sehingga tampak bahwa suara tidak sah/golput masih relatif tinggi yaitu 22%. Melihat partisipasi masyarakat dalam pemilu belum optimal maka dalam rangka persiapan Pilkada Kabupaten Bantul tahun 2020 perlu upaya-upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terutama generasi muda sebagai pemilih pemula. Kegiatan pembinaan politik salah satunya adalah sosialisasi politik bagi pemilih pemula dan perempuan, forum komunikasi generasi muda, dan sosialisasi pemilih pemula melalui pemilihan OSIS (Pemilos).

Tabel 2.54 Kegiatan Sosialisasi Pemilos di Kabupaten Bantul Tahun 2014-2018

No.	Kegiatan	Sasaran					Narasumber
		2014	2015	2016	2017	2018	
1	Sosialisasi	91 Sekolah	93 Sekolah	93 sekolah	93 sekolah	93 sekolah	- Komisioner KPU - Kakan Kesbangpol
2	TOT	78 Sekolah	65 Sekolah	70 sekolah	70 sekolah	93 sekolah	- KPU - Dikmenof - Pemda
3	Bimtek	78 Sekolah	65 Sekolah	70 Sekolah	-	-	- KPU - Pemda
4	Pelaksanaan Pemilos	75 Sekolah	65 Sekolah	70 Sekolah	-	-	Tim: - Kemenag, - Dikmenof, - Kesbangpol, - KPU
5	Monitoring Evaluasi	75 Sekolah	65 Sekolah	70 sekolah	-	-	Tim: - Kemenag, - Dikmenof, - Kesbangpol, - KPU

Sumber: Kesbangpol Kabupaten Bantul, 2020

b. Rasio Jumlah linmas

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam upaya menciptakan lingkungan yang kondusif dan demokratis sehingga tercipta kehidupan strata sosial yang interaktif. Rasio jumlah petugas linmas dan jumlah RT di Kabupaten Bantul pada tahun 2018, tercapai 95,3 %, yaitu jumlah Linmas 5.501 dan jumlah RT 5775.

2) Satuan Polisi Pamong Praja

Satpol PP melaksanakan tugas Penegakan Perda melalui operasi Yustisi dan Non Yustisi sebanyak 64 kali pada tahun 2019 dan melaksanakan patroli wilayah yang dilakukan tiga kali dalam sehari untuk menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Operasi Yustisi dilaksanakan berdasarkan peraturan daerah untuk meminimalisir penyakit masyarakat dan pelanggaran peraturan daerah. Hasil dari operasi ini terdapat pada table 2.55 berikut.

Tabel 2.55 Jumlah Hasil Operasi Yustisi dan Non Yustisi di Kabupaten Bantul Tahun 2014-2018

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Pelanggaran	228	396	410	318	406
Sasaran	357	565	641	636	

Sumber : Satpol PP Kab. Bantul, 2020

Operasi Yustisi dilaksanakan 2 (dua) kali dalam sebulan dan juga dilaksanakan diluar jadwal jika ada aduan dari masyarakat. Tidak semua hasil operasi ditindaklanjuti ke proses hukum. Selama 2018 dilaksanakan 20 kali sidang hasil operasi Yustisi.

Selain pelaksanaan operasi yustisi, juga dilakukan penyuluhan untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban dengan penyuluhan pencegahan praktek prostitusi dan pencegahan miras dan Napza.

3) Penanggulangan Bencana

Sesuai Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 terdapat tiga jenis pelayanan dasar dalam penanggulangan bencana yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada setiap warga negara secara minimal, yaitu (1) pelayanan informasi rawan bencana; (2) pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; dan (3) pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Pelayanan Informasi rawan bencana diwujudkan dalam Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang menerangkan bahwa terdapat 9 (Sembilan) ancaman bencana dengan berbagai tingkat risiko. Capaian nilai risiko bencana tahun 2019 berdasarkan dokumen PRB adalah 187 (kategori tinggi).

Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, berupa serangkaian kegiatan pra bencana melalui pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan warga negara dalam menghadapi bencana. Sampai dengan tahun 2019 telah terbentuk 21 Sekolah Siaga Bencana, dengan demikian capaian persentase sekolah Siaga Bencana adalah 4,12% dibawah target yang ditetapkan yaitu 4,2%

Capaian persentase Desa Tangguh Bencana yang terbentuk adalah 46,67% (35 desa) telah melebihi target yang ditetapkan yaitu 38,66 % (28 desa). Pada tahun 2019 dilaksanakan pembentukan 4 Desa Tangguh Bencana yaitu desa Terong, Temuwuh, Dlingo, Guwosari. Dan juga pengembangan 4 desa tangguh bencana yang sudah terbentuk untuk menuju desa tangguh bencana tingkat madya. yaitu Desa Sriharjo, Desa Karangtengah, Desa Srimartani, dan Desa Munthuk

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, berupa serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dan menyelamatkan korban bencana. Kejadian bencana terbesar di tahun 2019 adalah kebakaran diikuti tanah longsor dan cuaca ekstrim, dengan trend yang cenderung meningkat dalam 5 tahun terakhir.

Tabel 2.56 Jumlah Hasil Operasi Yustisi dan Non Yustisi di Kabupaten Bantul Tahun 2014-2018

Bencana	Jumlah Kejadian				
	2015	2016	2017	2018	2019
Tanah Longsor	34	77	345	23	174
Cuaca Ekstrem/Angin Kencang	0	4	0	22	24
Kebakaran	99	48	111	208	227
Erosi	13	36	27	8	11
Abrasi	0	1	2	3	0
Laka Laut	0	5	12	16	6
Banjir	0	20	22	0	8
Gempa	4	11	27	97	0

Sumber : BPBD Kab. Bantul, 2020

Tabel 2.57 Capaian Standar Pelayanan Minimal Tahun 2019

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	TAHUN 2019		
		Jumlah orang yang berhak mendapat layanan	Jumlah orang yang terlayani	Capaian
Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	836.085	324.300	38,79%
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	836.085	836.085	100%
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	11.464	11.464	100%
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	227	227	100%

Sumber : BPBD Kab. Bantul, 2020

Khusus penanganan bencana kebakaran, mengacu Permendagri No 114 Tahun 2018 yaitu SPM Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran, berupa layanan respon cepat (*Response Time*) penanggulangan kejadian kebakaran; layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian

kebakaran; layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi; layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran; dan layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran.

Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) merupakan perbandingan antara jumlah kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu tanggap terhadap jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK.

Tabel 2.58 Tingkat Waktu Tanggap di Kabupaten Bantul Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap.	58	39	93	175	203
2	Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK	62	39	93	175	193
3	Jumlah total terjadi kebakaran	99	48	111	208	227
4	Jumlah kebakaran di luar jangkauan WMK	27	9	18	34	34
5	Tingkat waktu tanggap	93,5%	100%	100%	100%	100%

Sumber: BPBD Kabupaten Bantul, 2020

Cakupan pelayanan kebakaran kabupaten dapat dinyatakan dengan perbandingan jumlah luas Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) terhadap jumlah luas potensi kebakaran. Pada tahun 2018 jumlah luas WMK adalah 176,62 Ha di tahun 2019 adalah 353,35 Ha. Sementara jumlah luas potensi kebakaran tercatat sebesar 506,85 Ha.

Cakupan pelayanan kebakaran sangat tergantung dengan jumlah mobil pemadam kebakaran yang dimiliki. Jumlah mobil pemadam kebakaran di atas 3000-5000 liter yang dimiliki pada tahun 2019 sebanyak delapan unit. Mengingat luasnya WMK dan potensi terjadinya musibah kebakaran di wilayah Kabupaten Bantul ini, pada tahun 2018 sudah terdapat 3 pos pemadam yaitu Kecamatan Kasihan, Banguntapan dan Imogiri, dan di tahun 2019 dilakukan upaya menambah 3 pos pemadam di Kecamatan Piyungan, Pundong dan Sedayu namun belum dapat beroperasi.

2.3.1.1.6 Sosial

1) Sarana Sosial (Panti Asuhan, Panti Jompo, dan Panti Rehabilitasi)

Kabupaten Bantul memiliki beberapa sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, dan panti rehabilitasi. Pada tahun 2015 sampai dengan 2019 ada peningkatan jumlah panti.

Tabel 2.59 Sarana Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi di Kabupaten Bantul Tahun 2015-2019

No.	Tahun	Jumlah
1	2015	27
2	2016	27
3	2017	26
4	2018	26
5	2019	43

Sumber: Dinsos P3A Kabupaten Bantul, 2020

2) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh Bantuan Sosial

PMKS adalah seseorang, keluarga, atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, atau keterasingan dari kondisi atau perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan. PMKS merupakan permasalahan sosial yang tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah saja tetapi masyarakat dan dunia swasta.

Tabel 2.60 Jenis PMKS di Kabupaten Bantul Tahun 2015-2019

No.	Jenis PMKS	2015	2016	2017	2018	2019
1	Anak Yang Berhadapan dengan Hukum	72	35	43	29	45
2	Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	5	0	0	14	0
3	Kelompok Minoritas	0	0	0	0	0
4	Korban Trafficking	2	0	0	0	1
5	Fakir Miskin	112.300	112.300	112.300	98.604	174.313
6	Anak Dengan Kedisabilitas	996	947	821	625	450
7	Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan	52	55	70	54	115
8	Pemulung	23	99	145	153	154
Jumlah		113.655	113.450	113.357	99.425	175.040

Sumber: Dinsos P3A Kabupaten Bantul, 2020

DATA PMKS

1. Anak Balita Terlarang
2. Anak Terlarang
3. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi
4. Lanjut Usia Terlarang
5. Anak Dengan Kedisabilitas (ADK)
6. Penyandang Disabilitas
7. Fakir Miskin
8. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah
9. Anak yang berhadapan dengan hukum
10. Anak yang memerlukan perlindungan khusus
11. Anak Jalanan
12. Korban Tindak Kekerasan
13. Tuna Susila
14. Pengemis
15. Gelandangan
16. Pemulung
17. Kelompok Minoritas
18. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)
19. Korban Penyalahgunaan NAPZA
20. Komunitas Adat Terpencil
21. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis
22. Korban Bencana Alam
23. Korban Bencana Sosial
24. Pekerja Migran Bermasalah Sosial
25. Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA)
26. Korban Trafficking

Sumber: Dinsos P3A Kabupaten Bantul, 2020

Gambar 2.34 Data PMKS Kabupaten Bantul

Pelayanan rehabilitasi bagi PMKS, antara lain meningkatkan mentalitas anak yatim menjadi anak yang lebih mandiri dan berakhlak mulia, meningkatkan keterlibatan lanjut usia potensial dalam usaha kesejahteraan sosial, penyelenggaraan penanganan jenazah terlantar, meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian bagi PMKS anak, mengurangi permasalahan anak putus sekolah dan anak berhadapan dengan hukum melalui pelayanan jamkesmas dengan bekerjasama dengan Bapeljamkesmas DIY sebanyak 4 kali dengan jumlah target 2.000 orang, senam bugar lansia dengan peserta 1.600 orang di Pantai baru, Poncosari, Srandakan dalam rangka Hari Lanjut Usia Nasional, pemberian fasilitas konsumsi (permakanan) ke 19 panti, perawatan dan pemakaman jenazah terlantar, sosialisasi peduli PMKS di Sewon Srandakan Banguntapan Kasihan dan Pandak. Selain itu dilakukan razia anak gelandangan dan pengemis dan psikotik lainnya dengan data sebagai berikut.

Tabel 2.61 Daftar PMKS Terjaring Razia di Kabupaten Bantul Tahun 2015-2019

No	Jenis PMKS	Jumlah
1	Anak Jalanan	12 orang
2	Gelandangan/Pengemis	57 orang
3	Psikotik	- orang
Total		69 orang

Sumber: Dinsos P3A Kabupaten Bantul, 2020

2.3.1.2 Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar

2.3.1.2.1 Tenaga Kerja

1) Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja merupakan perbandingan jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja dapat digunakan untuk menyatakan jumlah angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Bantul disajikan pada Tabel 2.62.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul, tingkat partisipasi angkatan kerja di

Kabupaten Bantul cenderung meningkat. Pada tahun 2019 tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 73,18 %.

Tabel 2.62 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
di Kabupaten Bantul Tahun 2015-2019

No.	Tahun	Jumlah
1	2015	67,84
2	2016	67,84
3	2017	72,21
4	2018	73,87
5	2019*	73,18

Sumber: Disnakertrans Kabupaten Bantul, 2020

*Angka sementara

2) Pengangguran

Ada dua jenis pengangguran yaitu pengangguran terbuka (*open unemployment*) dan setengah pengangguran (*disguised unemployment*). Pengangguran Terbuka adalah orang yang tidak punya pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha. Setengah pengangguran adalah orang yang bekerja dibawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan).

Statistik Ketenagakerjaan Daerah Istimewa Yogyakarta 2017-2018. Pengangguran di Kabupaten Bantul cenderung mengalami peningkatan meskipun dengan laju yang lambat. Hal ini ditunjukkan oleh tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Tabel 2.60. TPT merupakan perbandingan antara jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja. Pada tahun 2015, tingkat pengangguran di Kabupaten Bantul mencapai angka 2,99%, naik menjadi 3,00 pada tahun 2016 dan pada Tahun 2017 meningkat menjadi 3,12%. Menurut data BPS tahun 2019 tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 3,06 %.

Tabel 2.63 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Bantul Tahun 2015-2019

No.	Tahun	TPT
1	2015	3,00
2	2016	3,00
3	2017	2,87
4	2018	2,72
5	2019*	3,06

Sumber: Disnakertrans Kabupaten Bantul, 2020

*Angka sementara

Beberapa upaya berupa program kegiatan yang telah dilakukan yaitu: Program Peningkatan kesempatan kerja, penempatan tenaga kerja, transmigrasi umum, perlindungan dan pengembangan ketenagakerjaan, peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, dan perluasan tenaga kerja.

3) Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Tabel 2.64 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Tahun 2015-2019

No	Tahun	Angkatan Kerja		Total	Prosentase Angkatan Kerja Perempuan
		Laki-laki	Perempuan		
1	2015	290.346	220.198	510.544	43,13%
2	2016	Na	Na	Na	Na
3	2017	313.139	25.839	558.978	46,22%
4	2018	323.287	254.243	577.530	44,02%
5	2019	319.784	259.445	579.229	44,79%

Sumber: Disnakertrans Kabupaten Bantul, 2020

4) Pencari Kerja yang Ditempatkan

Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan adalah persentasi jumlah pencari kerja yang mendaftarkan dan tercatat pada dinas kabupaten/kota yang menangani bidang ketenagakerjaan dan jumlah pencari kerja yang diterima bekerja oleh pemberi kerja dalam hal ini perusahaan yang mendaftarkan lowongan pekerjaannya pada dinas kabupaten/kota. Capaian besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan tahun 2015-2019 di Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.65 Besaran Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan di Kabupaten Bantul Tahun 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Pembilang: Pencari kerja yang ditempatkan	2.531	2.107	2.650	3.230	1.811
Penyebut: Pencari kerja yang terdaftar	3.291	2.797	4.188	3.772	14.374
Besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	77%	75,3%	63,27%	85,63%	12,60%

Sumber: Disnakertrans Kabupaten Bantul, 2020

Besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan pada tahun 2015 hingga 2017 cenderung fluktuatif. Hal ini karena jumlah pencari kerja yang terdaftar juga mengalami fluktuasi. Sebelumnya pada tahun 2014, besaran pencari kerja yang ditempatkan baru mencapai 55,55% sehingga terdapat *gap expectation* yang cukup besar terhadap target yang ditetapkan pada akhir periode RPJMD. Oleh karena itu, pada tahun 2015 dilakukan intervensi besar pada program peningkatan kesempatan kerja, sehingga pencari kerja yang ditempatkan mencapai 77%, turun sebesar 75,3% di tahun 2016 dan 63,27% di tahun 2017. Tetapi pada tahun 2018 naik menjadi 85,63% dan pada tahun 2019 turun drastis menjadi 12,60%.

5) Perlindungan Tenaga Kerja

Pelaksanaan perlindungan tenaga kerja di Kabupaten Bantul, dilakukan melalui program perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan serta program peningkatan norma kerja dan norma keselamatan dan kesehatan kerja yang dilaksanakan setiap tahun oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul. Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja perlindungan tenaga kerja adalah besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek (kepesertaan BPJS ketenagakerjaan) dan besaran penyelesaian sengketa hubungan industrial. Capaian besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta jamsostek tahun 2014-2018 Kabupaten Bantul ditampilkan pada Tabel 2.66.

Tabel 2.66 Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Jamsostek di Kabupaten Bantul Tahun 2014-2018

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
Pembilang: Jumlah pekerja/buruh peserta program jamsostek	23.654	23.906	25.325	23.753	26.664
Penyebut: Jumlah pekerja/buruh	39.386	40.932	40.484	42.842	48.908
Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek	60,06%	58,40%	62,00%	55,44%	54,73%

Sumber: Disnakertrans Kabupaten Bantul, 2020

Besaran pekerja/buruh di Kabupaten Bantul yang menjadi peserta Jamsostek/kepesertaan BPJS ketenagakerjaan mencapai 54,73%, mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah bahwa masih banyak pekerja/buruh yang belum menjadi peserta Jamsostek.

Besaran penyelesaian sengketa hubungan industrial tahun 2014-2018 Kabupaten Bantul disajikan pada Tabel 2.67 berikut ini.

Tabel 2.67 Besaran Sengketa Hubungan Industrial yang terselesaikan di Kabupaten Bantul Tahun 2014-2018

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
Besaran sengketa yang terselesaikan	95%	95%	97%	97%	95%

Sumber: Disnakertrans Kabupaten Bantul, 2020

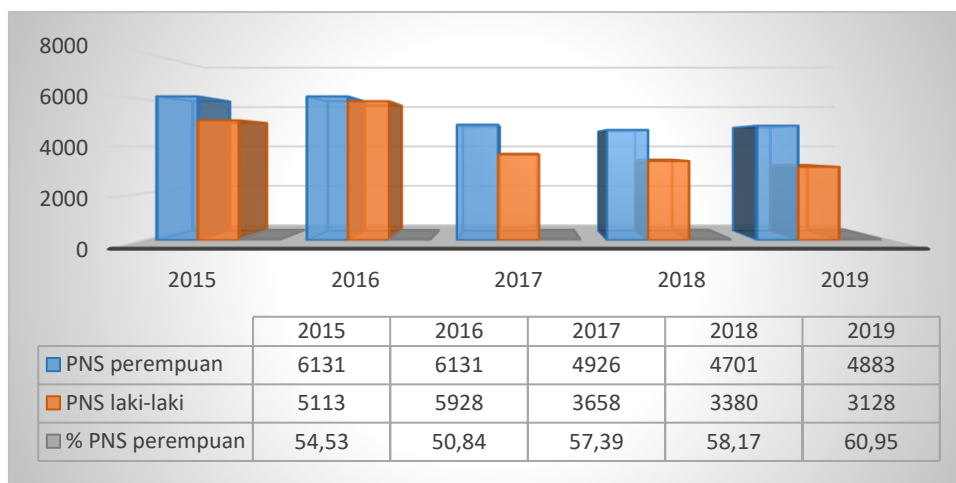
Kasus yang terselesaikan tahun 2017 mencapai 97% dari jumlah kasus yang ada tetapi pada tahun 2018 turun menjadi 95%. Hal ini disebabkan beberapa kasus muncul menjelang akhir tahun dan masih dalam proses penyelesaian.

2.3.1.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1) Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Persentase partisipasi perempuan di Lembaga Pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap

jumlah seluruh pekerja. Persentase partisipasi perempuan di Lembaga Pemerintah ini diwakili dengan persentase Pegawai Negeri Sipil perempuan yang disajikan pada Gambar 2.35.



Sumber: BKPP Kabupaten Bantul 2020

Gambar 2.35 Persentase Partisipasi PNS Perempuan di Lembaga Pemerintahan Kabupaten Bantul Tahun 2015 - 2019

Berdasarkan data pilah PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul menunjukkan bahwa tingkat partisipasi dan pemberdayaan perempuan di lembaga pemerintah semakin meningkat. Jumlah PNS perempuan yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul tersebut sejumlah 300 pegawai menduduki jabatan eselon II-IV pada tahun 2019.

Tabel 2.68 Persentase PNS Perempuan yang Menduduki Jabatan Eselon Di Kabupaten Bantul Tahun 2015-2019

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon II	3	3	3	4	4
2	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon III	37	37	37	43	46
3	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon IV	233	223	223	231	250
4	Jumlah Pekerja perempuan yang menempati jabatan eselon II -IV	273	273	263	278	300

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
5	Jumlah PNS perempuan	5.881	6.131	5.928	4.701	4883
6	Persentase PNS perempuan yang menempati jabatan eselon II – IV (4/5)	4.64	4.45	4.44	5,91	6,14

Sumber: BKPP Kabupaten Bantul, 2020

2) Partisipasi Perempuan di Masyarakat

Pemberdayaan Perempuan adalah usaha sistematis dan terencana untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Tujuan dari pemberdayaan perempuan adalah untuk perempuan sendiri untuk menjadi agen perubahan yang aktif dalam melakukan transformasi gender.

Tabel 2.69 Partisipasi Perempuan di Masyarakat di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2019

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019
1	Aktifis P2WKSS	300	300	300	Na
2	Pengurus harian Parpol	75	76	76	Na
3	Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	101	101	101	Na
4	Lembaga Legislatif Daerah	3	3	3	Na
5	Pekerja Sektor Informal	128.958	206.055	206.055	Na

Sumber: Dinsos Kabupaten Bantul, 2020

3) Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 15

Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan mengamanatkan bahwa anak dan perempuan berhak bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia serta berhak mendapatkan rasa aman, bebas dari segala bentuk tindak kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak-hak perempuan dan anak, seperti kekerasan fisik (*physical violence*), kekerasan psikis (*psychological violence*), pencabulan (*molestation*), perkosaan (*rape*), pelecehan seksual (*sexual harassment*), eksploitasi (*sexual exploitation*), perdagangan orang (*trafficking*), dan penelantaran (*neglect*).

Kasus KDRT di Kabupaten Bantul belum dapat dipantau secara keseluruhan dikarenakan belum semua korban KDRT mau melaporkan kasusnya ke pihak yang berwenang. Diharapkan dengan adanya pemberian pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang bersedia melaporkan kasus dan mengalami tindak kekerasan/KDRT akan menjadi solusi yang tepat. Kasus yang telah ditangani pada tahun 2018 meningkat menjadi 124 kasus dibandingkan tahun 2017 sejumlah 111 kasus.

4) Pernikahan Dini

UU Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan batas usia pernikahan adalah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Perempuan yang menikah muda menghadapi akibat buruk terhadap kesehatan mereka sebagai dampak dari melahirkan dini, peningkatan risiko kekerasan dalam rumah tangga, gizi buruk, dan gangguan kesehatan seksual dan reproduksi.

Rumah tangga pasangan pernikahan dini dapat mengalami kondisi yang buruk untuk seluruh indikator sosial dan ekonomi dibandingkan dengan anak yang menunda usia perkawinan, termasuk tingkat pendidikan yang lebih rendah dan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi. Dampak buruk ini juga akan dialami oleh anak-anak mereka dan berlanjut pada generasi yang akan datang. Persentase pernikahan dini di Kabupaten Bantul terdapat pada tabel berikut.

Tabel 2.70 Persentase Pernikahan Dini di Kabupaten Bantul Tahun 2014-2018

No.	Jumlah pernikahan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Usia dini	300	95	83	81	74
2	Semua usia	10.537	11.528	12.359	12.604	12.927
	Persentase pernikahan dini	2,85	0,82	0,67	0,64	0,57

Sumber: Kementrian Agama, Kantor Kabupaten Bantul, 2020

5) Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan merupakan perbandingan antara jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk perempuan usia kerja. Angka tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Bantul menunjukkan persentase angkatan kerja perempuan di Kabupaten Bantul.

Tabel 2.71 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kabupaten Bantul Tahun 2014-2019

No	Tahun	Angkatan Kerja		Total	Prosentase Angkatan Kerja Perempuan
		Laki-laki	Perempuan		
1	2015	290.346	220.198	510.544	43,13%
2	2016	Na	Na	Na	Na
3	2017	313.139	25.839	558.978	46,22%
4	2018	323.287	254.243	577.530	44,02%
5	2019	319.784	259.445	579.229	44,79%

Sumber: Sakernas, BPS, 2020

Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Bantul menunjukkan tren kenaikan sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah perempuan di Kabupaten Bantul yang aktif terlibat dalam kegiatan ekonomi. Hal ini menunjukkan kesetaraan gender di mana peran perempuan semakin

diakui. Akan tetapi di tahun 2018 dan 2019 tingkat partisipasi perempuan mengalami penurunan yakni sebesar 44,02% dan 44,79% dibandingkan tahun 2017.

6) Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang tersusun dari beberapa variabel yang mencerminkan tingkat keterlibatan wanita dalam proses pengambilan keputusan dibidang politik dan ekonomi. Indeks pemberdayaan gender di Kabupaten Bantul cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 sebesar 61,99% turun menjadi 61,01 pada tahun 2018. Hal ini mengindikasikan bahwa pemberdayaan perempuan di Kabupaten Bantul semakin meningkat.

2.3.1.2.3 Ketahanan Pangan

1) Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita

Ketersediaan pangan adalah tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan/atau sumber lain. Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya. Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari tiga sumber yaitu (1) produksi dalam negeri; (2) pasokan pangan; (3) pengelolaan cadangan pangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2013 dan Rekomendasi dari Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi XI Tahun 2012, rata-rata kecukupan energi dan protein bagi penduduk Indonesia yaitu energi sebesar 2.150 kal/kap/hr dan protein sebesar 57 gr/kap/hr pada tingkat konsumsi. Pada tahun 2019 berdasar Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 28 Tahun 2019 menjadi 2.400 kal/kap/hr.

Tabel 2.72 Ketersediaan Energi dan Protein untuk dikonsumsi di Kabupaten Bantul Tahun 2015-2019

No.	Tahun	Energi (Kal/Kap/Hr)	Tingkat Ketersediaan Energi (%)	Protein (Gram/Kap/hr)		
				Nabati	Hewani	Total
1	2015	3.050	141.86	55,98	18,99	74,97
2	2016	3.072	142.88	54,61	23,20	77,80
3	2017	3.079	143.21	56,93	18,80	75,73
4	2018	2.993	139.21	66,73	11,63	78,36

No.	Tahun	Energi (Kal/Kap/Hr)	Tingkat Ketersediaan Energi (%)	Protein (Gram/Kap/hr)		
				Nabati	Hewani	Total
5	2019	3.123	130.13	75,10	14,86	89,95

Sumber: Diperpautkan Kabupaten Bantul, 2020

Berdasarkan Tabel 2.72 dapat dilihat bahwa dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 ketersediaan energi dan protein di atas rata-rata kecukupan energi dan protein penduduk Indonesia. Pada tahun 2019 ketersediaan energi mencapai 3.123 kal/kap/hr, atau 30,13% di atas rata-rata kecukupan energi penduduk Indonesia. Ketersediaan protein mencapai 89,95 gr/kap/hr atau 57,63% di atas rata-rata kecukupan protein penduduk Indonesia.

2) Penguatan Cadangan Pangan

Cadangan pangan merupakan salah satu komponen penting dalam ketersediaan pangan, karena cadangan pangan merupakan sumber pasokan untuk mengisi kesenjangan antara produksi dan kebutuhan dalam negeri atau daerah dari waktu ke waktu, sehingga diharapkan tidak terjadi lonjakan harga pangan pokok. Cadangan pangan terdiri dari cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat. Cadangan pangan pemerintah terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, yang mencakup pangan tertentu yang bersifat pangan pokok. Cadangan pangan masyarakat adalah cadangan pangan yang dikelola masyarakat atau rumah tangga, termasuk petani, koperasi, pedagang, dan industri rumah tangga.

Pada tahun 2017 (270 ton) cadangan pangan Kabupaten Bantul mengalami kenaikan sebesar 3 ton dibanding tahun 2016 (267 ton). Cadangan pangan pada tahun 2017 terdiri dari cadangan pangan pemerintah sebesar 5,04 ton beras dan cadangan pangan masyarakat sebesar 147,11 ton yang disimpan dalam 20 lumbung pangan dan 17 Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM).

Pada tahun 2018 cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Bantul sebesar 5,036 ton beras. Data cadangan pangan didapat dari analisis cadangan pangan rumah tangga di 6 (enam) kecamatan. Dapat diketahui

bahwa stok cadangan pangan rumah tangga di Kecamatan Bambanglipuro : 12,20%, Bantul : 17,29%, Kasihan : 6,32%, Imogiri : 5,08%, Srandakan : 9,34%, dan Pleret : 5,44%. Rata-rata cadangan pangan rumah tangga di 6 kecamatan tersebut 9,28%.

Pada tahun 2019 cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Bantul sebesar 5,036 ton beras. Data cadangan pangan didapat dari analisis cadangan pangan rumah tangga di 6 (enam) kecamatan dan didapatkan bahwa stok cadangan pangan rumah tangga di Kec. Pajangan : 8,12%, Kec. Piyungan : 12,04%, Kec. Kretek : 11,46%, Kec. Pundong : 11,07%, Kec. Dlingo : 4,82% dan Kec. Banguntapan : 2,93%. Rata - rata cadangan pangan rumah tangga di 6 kecamatan tersebut adalah 8,41%.

3) Skor Pola Pangan Harapan

Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama baik secara absolut maupun dari suatu pola ketersediaan atau konsumsi pangan. Acuan untuk menilai tingkat keragaman konsumsi pangan adalah PPH dengan skor 100 sebagai pola yang ideal. Skor PPH semakin mendekati angka 100 menunjukkan bahwa pola konsumsi pangan masyarakat semakin beragam.

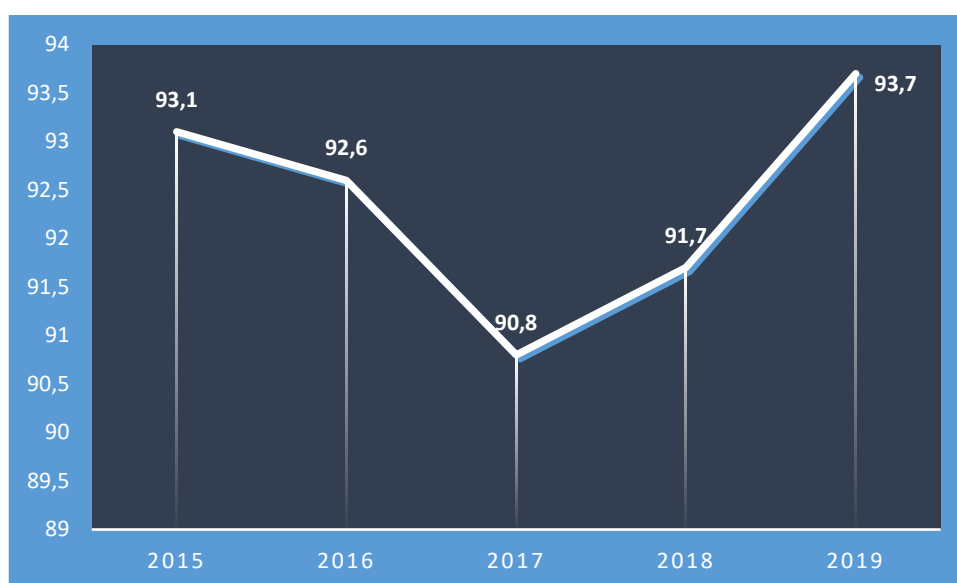
Tabel 2.73 Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
di Kabupaten Bantul Tahun 2015-2019

No .	Kelompok Pangan	Skor Pola Pangan Harapan				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Padi-padian	25,0	25,0	21,7	25,0	25,0
2	Umbi-umbian	1,6	1,5	1,7	1,4	1,3
3	Pangan hewani	24,0	24,0	24	24,0	24,0
4	Minyak dan lemak	1,2	2,8	3,1	1,5	1,8
5	Buah/biji berlemak	1,0	0,7	0,9	0,6	1,0
6	Kacang-kacangan	10,2	10,0	10,0	10,0	10,0
7	Gula	1,1	1,1	1,4	0,4	0,6
8	Sayur dan buah	29,0	27,5	28,0	28,8	30,0
9	Lain-lain	0	0	0,0	0,0	0,0
	Total	93,1 0	92,6	90,8	91,7	93,7

Sumber: Diperpautkan Kabupaten Bantul, 2020

Tahun 2019 Skor PPH mulai meningkat mencapai 93,7, lebih tinggi dari tahun 2018. Peningkatan ini mengindikasikan kualitas konsumsi pangan masyarakat Bantul semakin baik, semakin beragam dan berimbang, Skor ideal PPH adalah sebesar 100 yang mengindikasikan kualitas pola konsumsi pangan sudah menerapkan pola konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) beragam diantara 9 kelompok pangan utama.

Perkembangan skor pola pangan harapan Kabupaten bantul tahun 2015-2019 disajikan pada Gambar 2.36.



Sumber: Diperpautkan Kabupaten Bantul, 2020

Gambar 2.36 Skor Pola Pangan Harapan di Kabupaten Bantul Tahun 2015-2019

Skor pola pangan harapan di Kabupaten Bantul pada tahun 2015 mengalami penurunan hingga tahun 2017, namun meningkat di tahun 2018 dan 2019 dengan adanya perbaikan pola konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) di masyarakat.

2.3.1.2.4 Pertanian

1) Luas Lahan Bersertifikat

Pensertifikatan tanah pada tahun 2017 dilakukan pada lima bidang tanah pemerintah. Data status tanah di Kabupaten Bantul tahun 2018 disajikan pada Tabel 2.74.

Tabel 2.74 Luas Wilayah Kerja dan Kepemilikan HAT
di Kabupaten Bantul Tahun 2018

No	Uraian	Jumlah		Prosentase (%)	
		Bidang	Luas (m ²)	Bidang	Luas (m ²)
A	Kabupaten Bantul	643.481	506.850.000	100	100
B	Tanah terdaftar				
	- Hak milik (HM)	614.340	352.724.817	95,47	69,59
	- Hak Guna Bangunan (HGB)	19.702	7.614.396	3,06	1,50
	- Hak Pakai (HP)	3.461	9.394.135	0,54	1,85
	- Wakaf	1.765	501.855	0,27	0,09
	- Hak lainnya (HGU, HPL)	44	806.781	0,01	0,16
	Jumlah	639.312	371.041.984	99,37	73,20
C	Tanah belum terdaftar	4.169	135.808.016	0,65	26,79

Sumber : BPN Kabupaten Bantul, 2020

Tabel di atas menunjukkan sebagian besar tanah telah terdaftar, yaitu 93,16%, meskipun masih ada sebagian kecil bidang tanah yang belum terdaftar yaitu 6,83%.

Tabel 2.75 Permasalahan Tanah di Kabupaten Bantul Tahun 2017 – 2018

No	Lokasi	Jumlah	Masalah	Tahun
1	Desa Selopamioro	2	Tukar guling tanah	2017
2	Desa Argorejo	1	Tukar guling tanah	2017
3	Desa Poncosari	1	Tukar guling tanah	2017
4	Desa Sriharjo	1	Tukar guling tanah	2017
5	Desa Sendangsari	1	Warisan	2017
6	Desa Bangunjiwo	1	Tukar guling tanah	2018
7	Desa Selopamioro	1	Tukar guling tanah	2018

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, 2020

Tabel menunjukkan adanya konflik permasalahan tanah yang terjadi pada warga di 6 (enam) desa di Kabupaten Bantul, dan sebagian besar mengenai tukar guling tanah.

1) **Penyelesaian Izin Lokasi**

Perizinan terkait pemanfaatan ruang berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Bantul yaitu persetujuan prinsip, kesesuaian aspek tata ruang, Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT), perizinan klarifikasi/perizinan lokasi, perizinan mendirikan bangunan, perizinan gangguan, dan perizinan teknis operasional. Perizinan lokasi di peruntukan untuk izin pemanfaatan ruang dengan luasan lahan di atas satu hektar.

Tabel 2.76 Persentase Jumlah Izin Lokasi di Kabupaten Bantul Tahun 2014-2018

Tahun	Jumlah Permohonan Izin Lokasi	Jumlah Izin Lokasi	Persentase (%)
2014	8	7	87,50
2015	14	13	92,85
2016	6	3	50,00
2017	2	2	100,00
2018	6	4	66,67

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul, 2019

2.1.3.1.1.1. **Lingkungan hidup**

1. **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**

Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara Nasional, di mana IKLH merupakan generalisasi dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh kabupaten/kota dan Provinsi di Indonesia.

IKLH terdiri dari 3 indikator : Indeks Kualitas Air (IKA) dengan bobot 30%, parameter yang diukur yaitu TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli, dan Total Coliform; Indeks Kualitas Udara (IKUd) dengan bobot 30%,

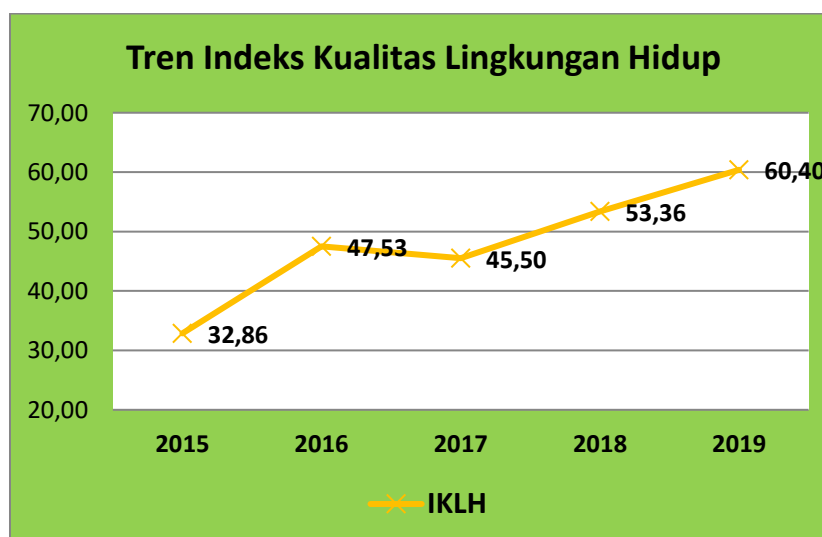
parameter yang diukur yaitu: SO₂ dan NO₂; dan Indek Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dengan bobot 40%, yang diukur berdasarkan luas tutupan lahan.

Tabel 2.77 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2019

No	Indeks Kualitas	Tahun	
		2018	2019
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	34,67	39,63
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	85,66	90,9
3	Indeks Tutupan Lahan (ITL)	43,15	53,09
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		53,36	60,40

Sumber : DLH, 2019

Berdasarkan capaian IKA, IKU dan ITL Tahun 2019 di atas, memberi dampak positif terhadap kinerja kualitas lingkungan hidup Kabupaten Bantul yang tercermin dari capaian nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2019 sebesar 60,40 yaitu cukup baik ($60 < \text{IKLH} \leq 70$), meningkat lebih baik di atas capaian tahun 2018 sebesar 53,36, yaitu kurang baik ($50 < \text{IKLH} \leq 60$). Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan pencapaian adalah meningkatnya kualitas udara dan tutupan lahan, namun pada capaian kualitas air masih belum optimal. IKLH Kabupaten Bantul dari tahun ke tahun menunjukkan trend membaik.



Sumber : DLH, 2019

Keterangan :

Sangat baik ($\text{IKLH} > 80$)

Baik ($70 < \text{IKLH} \leq 80$)

Cukup Baik ($60 < \text{IKLH} \leq 70$)

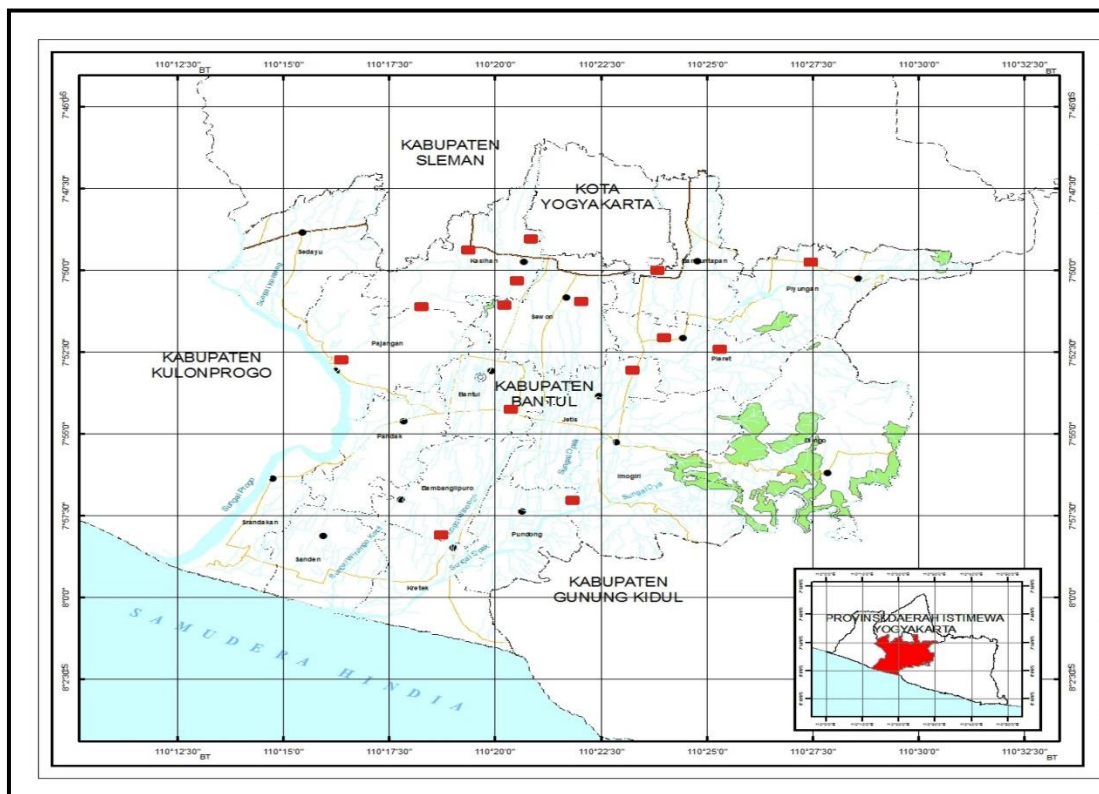
Kurang Baik ($50 < \text{IKLH} \leq 60$)
Waspada ($40 < \text{IKLH} \leq 50$)

Gambar 2.37 Tren Kualitas Lingkungan Hidup

a. Indeks Kualitas Air

Perhitungan indeks untuk indikator kualitas air sungai berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air, dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 20 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Air di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tahun 2019 pemantauan kualitas air sungai dilakukan di 5 sungai yang mengalir di wilayah Kabupaten Bantul, yaitu Winongo, Oyo, Bedog, Code dan Gajahwong di 15 titik (mewakili hulu, tengah, hilir) pada 2 periode (penghujan dan kemarau).



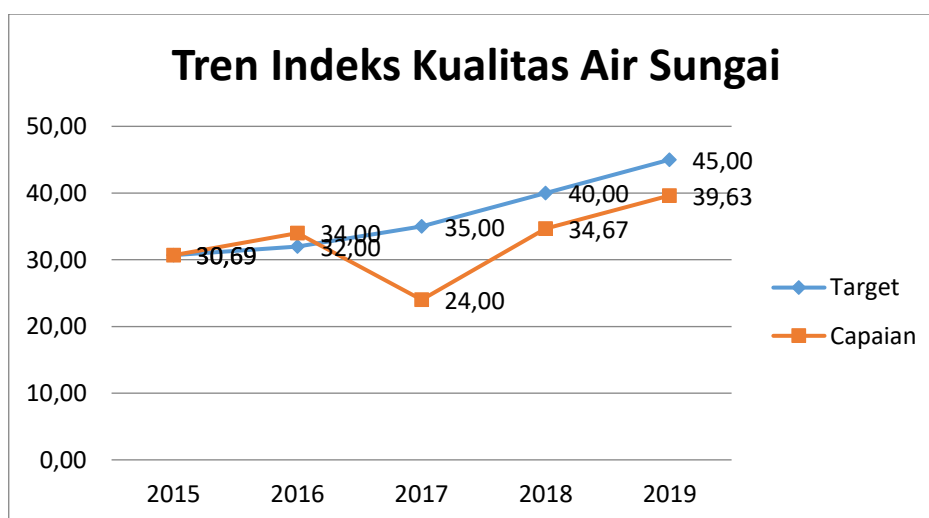
Gambar 2.38 Peta lokasi pengambilan sampel air sungai

Kabupaten Bantul berdasarkan parameter kimia anorganik, mikrobiologi, dan kimia organik, selanjutnya dianalisa untuk mengetahui kondisi kualitas air di masing masing sungai.

Tabel 2.78 Hasil Kualitas Air Sungai di Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2019

Nama Sungai	Nilai Indeks Pencemaran Air			
Tahun	2016	2017	2018	2019
Winongo	32,500	33,334	37,500	43,333
Code	35,832	33,334	41,666	42,500
Gajahwong	33,334	31,666	38,334	30,000
Bedog	27,334	31,334	43,332	40,667
Oyo	28,334	28,334	33,334	41,667

Hasil capaian IKA Kabupaten Tahun 2019 sebesar 39,63 belum mencapai target IKA 2019 sebesar 45 (86,67%). Hasil ini menunjukkan bahwa secara umum kualitas air sungai di wilayah Kabupaten Bantul masih belum cukup baik, termasuk kategori pencemaran sedang. Indeks Kualitas Air dari tahun ke tahun menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan



Gambar 2.39 Grafik Indeks Kualitas Air Sungai Kabupaten Bantul

b. Indeks Kualitas Udara

Indeks kualitas udara digunakan sebagai tolak ukur terjadinya pencemaran udara. Perhitungan indeks untuk indikator kualitas udara ambient dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep- 45/MENLH/10/1997 tentang Indeks Pencemar Udara.

Pemantauan udara ambient dilakukan di 4 (empat) titik pantau/lokasi yang tersebar di wilayah Kabupaten Bantul, pada lokasi-lokasi yang mewakili wilayah padat kendaraan bermotor (transportasi), wilayah industri/argoindustri, wilayah pemukiman, dan wilayah perkantoran/komersial.

Tabel 2.79 Hasil Analisa Laboratorium Udara Ambient

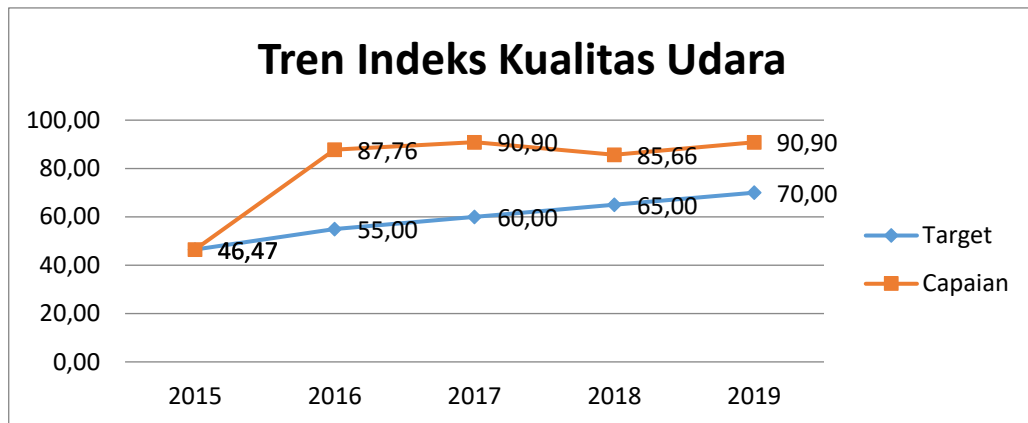
Kota	Peruntukan	TAHAP 1	TAHAP 2	TAHAP 1	TAHAP 2
		Kadar NO ₂	Kadar NO ₂	Kadar SO ₂	Kadar SO ₂
		µg/Nm ³	µg/Nm ³	µg/Nm ³	µg/Nm ³
BANTUL (3402)	Transportasi	12,40	14,10	5,63	<2,57
	Industri/ Agro Industri	22,00	27,10	2,81	<2,57
	Pemukiman	11,70	11,20	4,37	<2,57
	Perkantoran / Komersial	11,20	8,80	<2,57	<2,57
	Rerata	14,32	15,30	3,84	<2,57

Tabel 2.80 Indeks Kualitas Udara

Parameter	Rerata (µg/Nm ³)	EU	IEU
NO ₂	14,81	40,00	0,3703
SO ₂	3,15	20,00	0,1573
Rerata			0,2638
Indeks Kualitas Udara			90,90

Indeks Kualitas Udara Kabupaten Bantul telah melebihi target kinerja pada Tahun 2019 sebesar 90,9. Nilai capaian ini relatif tinggi mengingat nilai indeks kualitas udara optimum yang bisa dicapai yaitu sebesar 105,56.

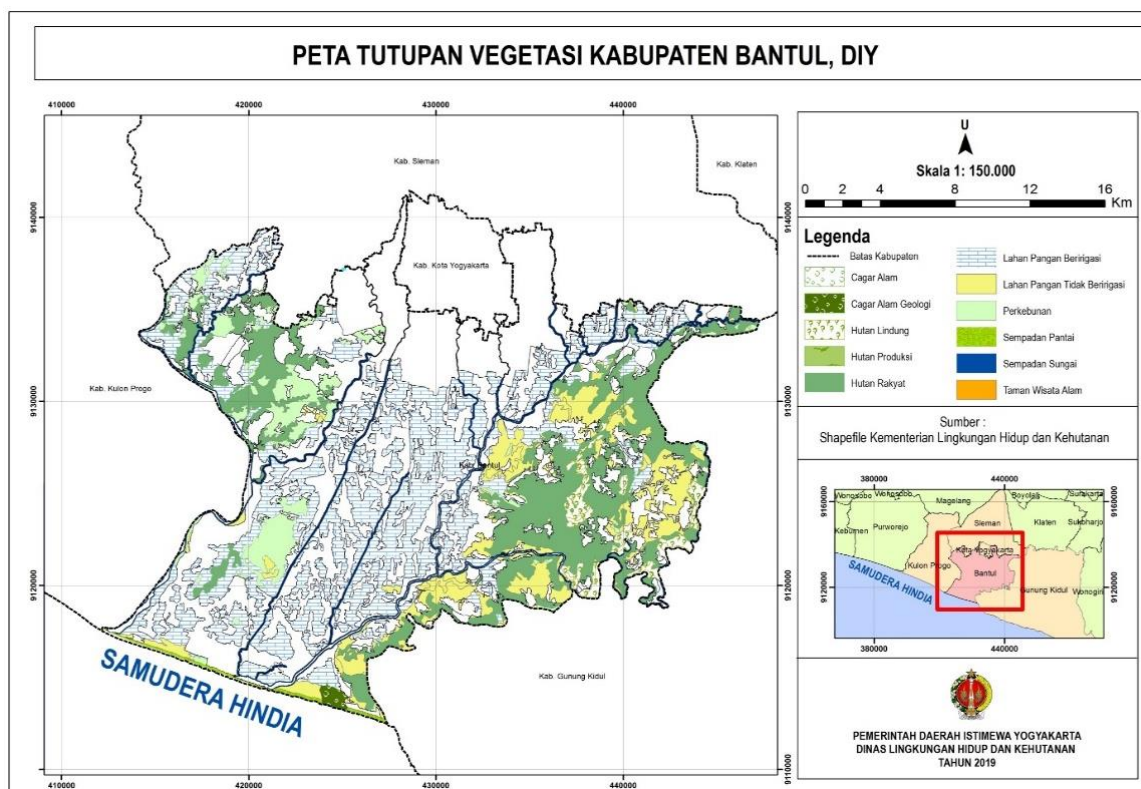
Indeks kualitas udara Kabupaten Bantul mengalami peningkatan pada tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.



Gambar 2.40 Grafik Indeks Kualitas Udara Kabupaten Bantul

c. Indeks Tutupan Lahan

Indeks Tutupan Lahan (IKTL) dihitung berdasarkan luas tutupan lahan dibandingkan dengan luas wilayah kabupaten. Tutupan lahan/vegetasi yang dimaksud adalah luasan hutan, ruang terbuka hijau, kawasan lindung bervegetasi dan lain-lain.



Gambar 2.41 Peta Tutupan Vegetasi Kabupaten Bantul

Upaya untuk meningkatkan luas tutupan lahan dilakukan secara intensif melalui penanaman pohon dengan sasaran pada

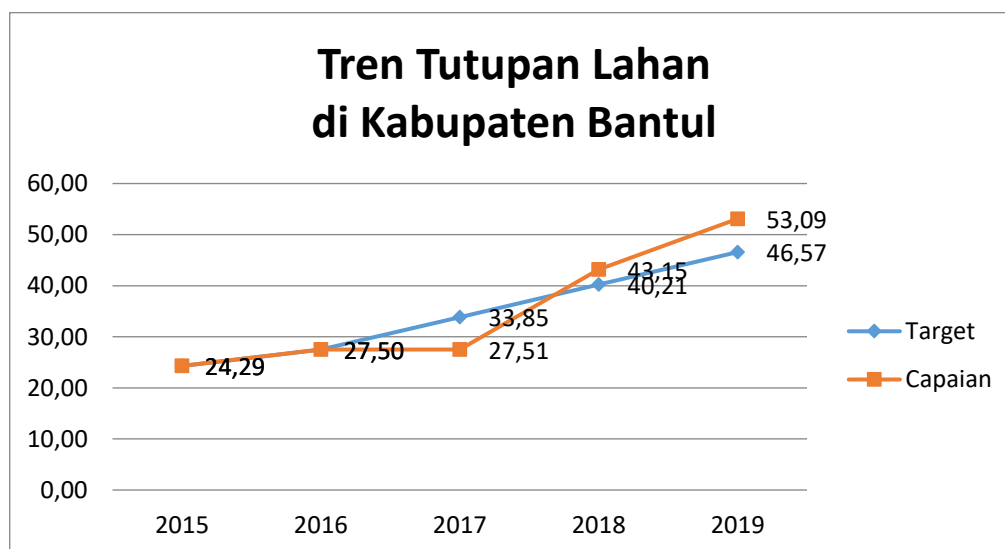
hutan, lahan kritis, sempadan sungai, jalur selatan, kawasan mangrove dan area bekas tambang dan pembangunan RTH.

Tabel 2.81 Penambahan Tutupan Lahan Tahun 2019

Jenis Tutupan Vegetasi	Luasan	
	ha	km ²
penghijauan lingkungan	1.200	12,000
mangrove	1,2	0,012
reklamasi bekas tambang	2,1	0,021
hutan rakyat	4.265	42,650
Total penambahan	5.468,3	54,683

Sumber : DLH Kabupaten Bantul Tahun 2019

Dengan adanya penambahan tutupan lahan sebesar 54,683 km² pada tahun 2019, maka total luas tutupan lahan Kabupaten Bantul hingga tahun 2019 menjadi 169,06 km². Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh bahwa indeks tutupan lahan Kabupaten Bantul tahun 2019 adalah sebesar 53,09 atau naik sebesar 9,94 poin dibandingkan dengan tahun 2018, trend meningkat dari tahun sebelumnya.



Gambar 2.42 Grafik Indeks Tutupan Lahan Kabupaten Bantul

2. Penanganan Air Limbah

Air limbah domestik diklasifikasikan menjadi dua yaitu *grey water* dan *black water*. Air limbah yang termasuk dalam kategori grey water adalah air limbah rumah tangga berupa limbah cucian dapur, cucian

pakaian (sabun), dan air buangan dari kamar mandi. Sedangkan yang termasuk dalam black water adalah, tinja manusia, urine, air penggelontor, kertas pembersih, dan air pembersih. Secara umum dari hasil survey air limbah relative terkelola dengan baik. Limbah rumah tangga selain tinja masuk dalam saluran air limbah ataupun sumur peresapan, sedangkan limbah tinja terkelola dengan tangki septik ataupun IPAL Komunal.

Pengelolaan air limbah ini sangat mempengaruhi derajat kesehatan di masyarakat. Jika limbah tidak dikelola dengan baik maka akan menimbulkan pencemaran pada lingkungan terutama pada air tanah. Pengelolaan air limbah yang baik dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain: kesadaran masyarakat akan kesehatan, sarana dan prasarana infrastruktur yang mendukung, dan kelembagaan yang ada.

Tabel 2.82 Kondisi Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Domestik

No	Jenis	Satuan	Jumlah/ Kapasitas	Kondisi	
				Berfungsi	Tdk berfungsi
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)
	SPALD-Setempat				
1	Berbasis komunal				
	- MCK Komunal	unit	-		-
2.	Truk Tinja	unit	1	√	
3	IPLT : kapasitas	m3/hari	50	√	
	SPALD-Terpusat				
1	Berbasis komunal				
	- Tangki septik komunal >10KK	unit	-	-	-
	- IPAL Komunal	unit	170/ 12.521 kk	√	-
2	IPAL Kawasan/Terpusat				
	- Kapasitas	m3/hari	3.000 kk	-	-
	- Sistem		-	-	-

Sumber : DPUPKP Kabupaten Bantul, 2018

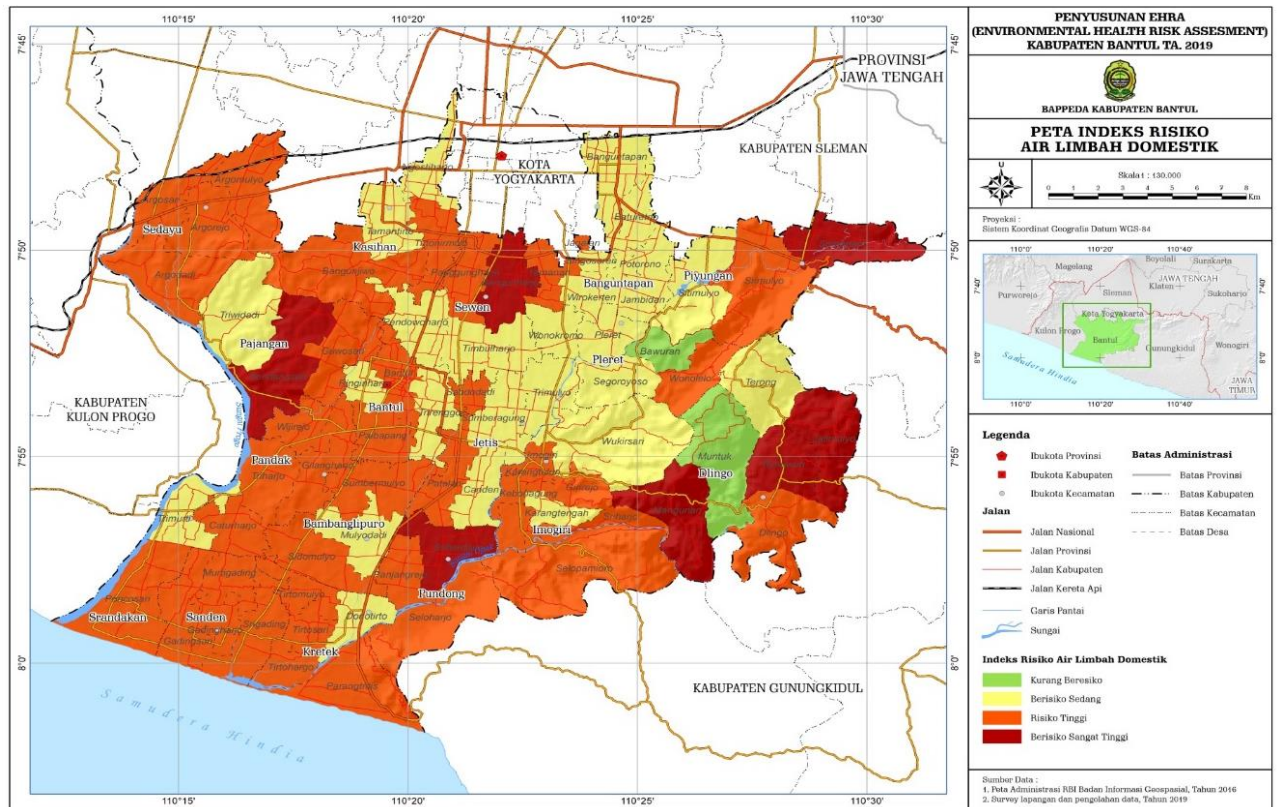
Berdasarkan data kondisi Pengelolaan Air Limbah Domestik menunjukkan bahwa prasarana dan sarana yang terbangun sampai 2019 ini masih berfungsi dengan baik.

Penanganan pengelolaan air diupayakan dengan sistem pengelolaan

air limbah domestik setempat dan terpusat. Sistem pengolahan air limbah domestik setempat meliputi pembuangan air limbah domestik ke dalam tangki septik individual, tangki septik komunal atau Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) terpusat. Sistem pengolahan air limbah domestik terpusat adalah pembuangan air limbah domestik ke dalam jaringan air limbah terpusat yang disediakan oleh Pemerintah di IPAL Sewon.

Berdasarkan Studi EHRA (2019), ditinjau dari sanitasi air limbah domestik Kabupaten Bantul terbagi menjadi 2 zona tingkat risiko sanitasi yang menunjukkan skala 4 dan 3, yaitu :

1. Risiko Sangat Tinggi (skala 4) , yang meliputi Desa Srihardono, Desa Mangunan, Desa Temuwuh, Desa Jatimulyo, Desa Srimartani, Desa Bangunharjo, Desa Sendangsari
2. Risiko Tinggi (skala 3), yang meliputi Desa Poncosari, Desa Gadingsari, Desa Gadingharjo, Desa Srigading, Desa Murtigading, Desa Tirtohargo, Desa Parangtritis, Desa, Tirtosari, Desa Tirtomulyo, Desa Seloharjo, Desa Panjangrejo, Desa Sidomulyo, Desa Sumbermulyo, Desa Caturharjo, Desa Triharjo, Desa Gilangharjo, Desa Wijirejo, Desa Palbapang, Desa Bantul, Desa Sabdodadi, Desa Patalan, Desa Selopamioro, Desa Sriharjo, Desa Kebonagung, Desa Giri Rejo, Desa Karang Talun, Desa Imogiri, Desa Dlingo, Desa Wonolelo, Desa Tamanan, Desa Jagalan, Desa Panggungharjo, Desa Bangunjiwo, Desa Tirtonirmolo, Desa Guwosari, Desa Argodadi, Desa Argorejo, Desa Argosari, Desa Argomulyo.



Sumber: Bappeda, Studi EHRA, 2019

Gambar 2.43 Peta Indeks Risiko Air Limbah Domestik

3. Penanganan Sampah

Pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul dilaksanakan dengan prinsip mengurangi, memanfaatkan, dan mendaur ulang sampah. Pengembangan sistem persampahan terdiri atas pengelolaan cara setempat, pengelolaan cara komunal dan pengolahan sampah mandiri. Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019, sedangkan arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga tertuang dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 156 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah (JAKSTRADA) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pengelolaan sampah pada tempat penampungan sampah sementara ditetapkan tersebar di seluruh kecamatan sesuai dengan tingkat pelayanannya. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah yaitu

di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan yang berada di Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan seluas kurang lebih 1,5 hektar, yang dikelola dengan *sanitary landfill* untuk sampah residu akhir. TPST Piyungan ini merupakan tempat pembuangan terpadu skala Regional yang melayani Kabupaten Bantul, Sleman dan Kota Yogyakarta. Kerjasama pengelolaan sampah antar daerah melalui Sekretariat Bersama Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul (Sekber Kartamantul) dan Pemda DIY.

Volume timbulan sampah di Kabupaten Bantul dalam setahun 2019 mencapai 608.731,64m³, sedangkan sampah yang terkelola sebanyak 452.185,43m³, sehingga capaian volume sampah yang tertangani pada tahun 2019 adalah 74,28%, belum mencapai target volume sampah yang tertangani yang tertuang dalam JAKSTRADA yaitu sebesar 80%

Tabel 2.83 Volume Sampah yang Terkelola selama Tahun 2019

No	Uraian	Volume (m ³ /th)
1	Sampah terangkut ke TPST Piyungan	82.380,96
2	Sampah yang terolah di TPS 3R, Bank sampah	36.523,89
3	Sampah organik yang terkelola di pedesaan	271.646,49
4	Sampah organik yang terkelola di Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY)	61.634,08
Total sampah yang terkelola (a)		452.185,43
Volume timbulan sampah (b)		608.731,64
Volume Sampah yang tertangani (a/b)x100%		74,28%

Sumber : DLH Kabupaten Bantul, 2020

Volume timbulan sampah per hari di Kabupaten Bantul untuk wilayah perkotaan, tertinggi di Kecamatan Banguntapan dengan volume 197,49 m³/ hari sedangkan untuk wilayah pedesaan volume tertinggi di Kecamatan Jetis dengan volume 103,28 m³/ hari.

Tabel 2.84 Volume Timbunan Sampah per hari di Kabupaten Bantul Tahun 2019

Nama Kecamatan		Jumlah Penduduk			Volume Timbunan Sampah					
		Wilayah Pedesaan	Wilayah Perkotaan	Total	Wilayah Perdesaan		Wilayah perkotaan		Total	
		Orang	Orang	Orang	(%)	m3/hari	(%)	m3/hari	(%)	m3/hari
1	Srandakan	0	31.218	31.218	0.00%	0.00	3.30%	55.07	3.30%	55,07
2	Sanden	31.972	0	31.972	3.38%	56.40	0.00%	0.00	3.38%	56,40
3	Kretek	23.147	7.716	30.863	2.45%	40.83	0.82%	13.61	3.26%	54,44
4	Pundong	35.908	0	35.908	3.80%	63.34	0.00%	0.00	3.80%	63,34
5	Bambanglipuro	41.880	0	41.880	4.43%	73.88	0.00%	0.00	4.43%	73,88
6	Pandak	52.013	0	52.013	5.50%	91.75	0.00%	0.00	5.50%	91,75
7	Bantul	0	60.481	60.481	0.00%	0.00	6.40%	106.69	6.40%	106,69
8	Jetis	58.549	0	58.549	6.19%	103.28	0.00%	0.00	6.19%	103,28
9	Imogiri	55.916	7.626	63.542	5.91%	98.64	0.81%	13.45	6.72%	112,09
10	Dlingo	39.537	0	39.537	4.18%	69.74	0.00%	0.00	4.18%	69,74
11	Pleret	48.170	0	48.170	5.09%	84.97	0.00%	0.00	5.09%	84,97
12	Piyungan	52.333	0	52.333	5.54%	92.32	0.00%	0.00	5.54%	92,32
13	Banguntapan	0	111.955	111.955	0.00%	0.00	11.84%	197.49	11.84%	197,49
14	Sewon	0	99.807	99.807	0.00%	0.00	10.56%	176.06	10.56%	176,06
15	Kasihan	25.881	77.646	103.527	2.74%	45.65	8.21%	136.97	10.95%	182,62
16	Pajangan	36.040	0	36.040	3.81%	63.57	0.00%	0.00	3.81%	63,57
17	Sedayu	33.352	14.294	47.646	3.53%	58.83	1.51%	25.21	5.04%	84,05
JUMLAH		534.698	410.743	945.441	56.56%	943.2073	43.44%	724.5507	100.00%	1.667,75
Per tahun (m3) =										608.731,64

Sumber : DLH Kabupaten Bantul, 2020

Tabel 2.85 Cakupan Akses dan Sistem Layanan Persampahan Kecamatan Tahun 2019

Kecamatan		Pengelolaan Sampah Mandiri						Pengelolaan 3R (Bank Sampah + TPST 3R)						Volume Sampah Yang terangkut Ke TPA					
		Wilayah Pedesaan		Wilayah Perkotaan		Total		Wilayah Perdesaan		Wilayah Perkotaan		Total		Wilayah Pedesaan		Wilayah Perkotaan		Total	
		%	m3/Hari	%	m3/hari	%	m3/hari	%	m3/hari	%	m3/hari	%	m3/hari	%	m3/hari	%	m3/hari	%	m3/hari
1	Srandakan	0.00%	0	1.39%	10.10	0.61%	10.10	0.00%	0.00	0.44%	3.19	0.19%	3.19	0.00%	0	0.51%	3.66	0.22%	3,66
2	Sanden	5.06%	47.76	0.00%	0	2.86%	47.76	0.27%	2.55	0.00%	0.00	0.15%	2.55	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0
3	Kretek	3.86%	36.45	0.00%	0	2.19%	36.45	0.25%	2.39	0.11%	0.80	0.19%	3.19	0.64%	6.05	0.28%	2.02	0.48%	8,06
4	Pundong	5.56%	52.41	0.00%	0	3.14%	52.41	0.20%	1.91	0.00%	0.00	0.11%	1.91	0.70%	6.60	0.00%	0	0.40%	6,60
5	Bambanglipuro	5.77%	54.47	0.00%	0	3.27%	54.47	0.61%	5.74	0.00%	0.00	0.34%	5.74	1.01%	9.53	0.00%	0	0.57%	9,53
6	Pandak	7.04%	66.43	0.00%	0	3.98%	66.43	0.61%	5.74	0.00%	0.00	0.34%	5.74	1.55%	14.66	0.00%	0	0.88%	14,66
7	Bantul	0.00%	0	1.91%	13.86	0.83%	13.86	0.00%	0.00	1.06%	7.65	0.46%	7.65	0.00%	0	10.01%	72.55	4.35%	72,55
8	Jetis	8.17%	77.06	0.00%	0	4.62%	77.06	0.74%	7.01	0.00%	0.00	0.42%	7.01	1.48%	13.92	0.00%	0	0.83%	13,92
9	Imogiri	9.02%	85.05	0.00%	0	5.10%	85.05	0.24%	2.24	0.04%	0.31	0.15%	2.55	0.41%	3.87	0.07%	0.53	0.26%	4,40
10	Dlingo	6.52%	61.47	0.00%	0	3.69%	61.47	0.34%	3.19	0.00%	0.00	0.19%	3.19	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0
11	Pleret	6.56%	61.89	0.00%	0	3.71%	61.89	0.70%	6.57	0.00%	0.00	0.39%	6.57	0.47%	4.40	0.00%	0	0.26%	4,40
12	Piyungan	7.40%	69.81	0.00%	0	4.19%	69.81	0.81%	7.65	0.00%	0.00	0.46%	7.65	0.39%	3.66	0.00%	0	0.22%	3,66
13	Banguntapan	0.00%	0	8.28%	59.96	3.60%	59.96	0.00%	0.00	0.70%	5.10	0.31%	5.10	0.00%	0	1.62%	11.72	0.70%	11,72
14	Sewon	0.00%	0	7.38%	53.45	3.21%	53.45	0.00%	0.00	2.17%	15.74	0.94%	15.74	0.00%	0	6.78%	49.10	2.94%	49,10
15	Kasihan	2.53%	23.86	4.35%	31.49	3.32%	55.45	0.22%	2.07	0.86%	6.21	0.50%	8.29	0.04%	0.37	0.15%	1.10	0.09%	1,47
16	Pajangan	5.54%	52.24	0.00%	0	3.13%	52.24	0.27%	2.55	0.00%	0.00	0.15%	2.55	0.54%	5.13	0.00%	0	0.31%	5,13
17	Sedayu	5.85%	55.21	0.00%	0	3.31%	55.21	0.85%	8.03	0.47%	3.44	0.69%	11.47	1.25%	11.80	0.70%	5.06	1.01%	16,85
JUMLAH		78.89%	744.12	23.31%	168.86	54.75%	913.09	6.11%	57.63	0.06	42.43	6.00%	100,06	0.08	79.97	0.20	145.73	0.14	225,70
																			82.380,50

Tabel 2.86 Kondisi Prasarana dan Sarana Persampahan Tahun 2019

No	Jenis Prasarana / Sarana	Satuan	Jumlah	Kapasitas	Ritasi/hari	Kondisi		
						Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Pewadahan							
	A Individual							
	Bak Biasa	Unit	145	870	-	145	-	-
	B Komunal							
	Kontainer	Unit	38	228	1	38	-	-
	Transfer Depo	Unit	3	96		3	-	-
2	Pengumpulan							
	- Gerobak Sampah	Unit	52	52		51		1
	- Motor Sampah	Unit	31	31		31		
	- Pick Up Sampah	Unit	3	4,5		3		
3	Pengangkutan							
	- Dump Truck	Unit	32	104	1	29	2	1
	- Armroll	Unit	6	36	1	5		1
	- Compactor	Unit					-	-
4	Pengolahan Sampah							
	- TPS 3R	Unit	11	62		11	-	-
	- SPA	Unit					-	-
	- ITF	Unit					-	-
	- TPST	Unit					-	-
	- Rumah Pilah Sampah							
	• Tipe A	unit	7	2800		7		
	• Tipe B	unit	22	990		22		
	• Tipe C	unit	24	360		24		
	- Bank Sampah	Unit	157				-	-
	- Incenerator	Unit					-	-
5	TPA / TPST Regional							
	- TYPE	Lahan Urug Saniter/Lahan Urug Terkendali/Penimbunan Terbuka						
	- Luas Lahan TPST	Ha	12,5					
	- Luas Sel Landfill	Ha	10					
	- Daya Tampung TPA	m3/hari	493					
		Total (m3)	700.000					
	- Bulldozer	Unit	10			1	1	8
	- Exavator / Beckhoe	Unit	2				2	
	- Truck Tanah	Unit	1				1	
6	Alat Berat							
	- Bulldozer	Unit	3					
	- Exavator / Beckhoe	Unit	1					
	- Truck Tanah	Unit						

Sumber : DLH Kabupaten Bantul, 2020

Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk adalah jumlah daya tampung tempat pembuangan sampah per 1.000 jumlah penduduk.

Tabel 2.87 Rasio Tempat Pembuangan Sampah
di Kabupaten Bantul Tahun 2015-2019

URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah TPS (unit)	165	231	245	275	334
Jumlah Daya Tampung TPS (m3)	173	1.386	1.470	1.650	2.668
Jumlah Penduduk (Jiwa)	919.440	968.632	927.181	939.718	945.441
Rasio Daya Tampung TPS per 1000 penduduk (m3/1000 penduduk)	0,19	1,43	1,59	1,76	2,82

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, 2020

Rasio daya tampung TPS per 1000 penduduk di Kabupaten Bantul mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 jumlah TPS sebanyak 334 unit dengan rasio daya tampung TPS per 1000 penduduk adalah 2,82 m3. Masih sangat kecil namun ada peningkatan dibanding tahun 2018.

2.3.1.2.5 Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Pendaftaran penduduk mengatur mengenai pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan, yaitu kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau

perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Sementara pencatatan sipil mengatur mengenai pencatatan atas pelaporan peristiwa penting yaitu kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan kewarganegaraan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa poin utama pengelolaan administrasi kependudukan meliputi :

1. Pendaftaran Penduduk, yang akan membawa akibat terhadap penerbitan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan atau surat keterangan kependudukan lainnya;
2. Pencatatan sipil, yang akan membawa akibat terhadap penerbitan Akte Kelahiran, Akte Kematian serta surat keterangan terkait lainnya;
3. Pengelolaan informasi administrasi Kependudukan

Selanjutnya berkaitan dengan hal tersebut, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimum bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota, Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan dokumen kependudukan diantaranya meliputi Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga, Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk, Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran, dan Akta Kematian

2.3.1.2.5.1 Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga

Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. Cakupan penerbitan KK di Kabupaten Bantul tahun 2019 adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.88 Kepemilikan Kartu Keluarga di Kabupaten Bantul Tahun 2019

No	Kecamatan	Kartu Keluarga (KK)		
		Jumlah KK	Kepemilikan KK	Prosentase
1	Srandakan	10.961	10.961	100
2	Sanden	11.492	11.492	100
3	Kretek	11.036	11.036	100
4	Pundong	12.656	12.656	100
5	Bambanglipuro	15.006	15.006	100
6	Pandak	18.133	18.133	100
7	Pajangan	11.838	11.838	100
8	Bantul	22.585	22.585	100
9	Jetis	20.426	20.426	100
10	Imogiri	22.176	22.176	100
11	Dlingo	13.612	13.612	100
12	Banguntapan	36.787	36.787	100
13	Pleret	16.050	16.050	100
14	Piyungan	17.699	17.699	100
15	Sewon	33.659	33.659	100
16	Kasihan	34.717	34.717	100
17	Sedayu	16.249	16.249	100
	Total	325.082	325.082	100

Sumber : Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri Semester 2 Tahun 2019

2.3.1.2.5.2 Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk

Kartu tanda penduduk (KTP) merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana dan berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.

Cakupan penerbitan KTP adalah cakupan penduduk yang telah memperoleh KTP sesuai dengan standar pelayanan lima hari harus selesai diterbitkan KTP. Cakupan penerbitan KTP di Kabupaten Bantul tahun 2019 adalah sebagaimana tabel berikut

Tabel 2.89 Cakupan Penerbitan KTP di Kabupaten Bantul Tahun 2019

KECAMATAN	KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK		
	JUMLAH WAJIB KTP	KEPEMILIKAN KTP EL	PROSENTASE
SRANDAKAN	24.169	24.068	99,58
SANDEN	25.130	25.027	99,59
KRETEK	24.209	24.119	99,63
PUNDONG	27.825	27.701	99,55
BAMBANGLIPURO	32.470	32.333	99,58
PANDAK	40.243	40.053	99,53
PAJANGAN	27.325	27.145	99,34
BANTUL	49.069	48.839	99,53
JETIS	44.578	44.375	99,54
IMOGIRI	48.379	48.169	99,57
DLINGO	30.622	30.448	99,43
BANGUNTAPAN	83.091	82.670	99,49
PLERET	35.394	35.190	99,42
PIYUNGAN	39.126	38.902	99,43
SEWON	75.580	75.239	99,55
KASIHAN	78.190	77.797	99,50
SEDAYU	36.287	36.104	99,50
TOTAL	721.687	718.179	99,51

Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri Semester 2 Tahun 2019

Sementara itu perkembangan pencapaian cakupan penerbitan kartu tanda penduduk di Kabupaten Bantul tahun 2014 – 2019 ditampilkan pada Tabel 2.90.

Tabel 2.90 Cakupan Penerbitan KTP di Kabupaten Bantul Tahun 2015 – 2019

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan	668.144	677.425	703.660	713.078	718.179
2	Jumlah Penduduk Wajib KTP	687.219	704.074	710.225	714.518	721.687
3	Persentase penduduk yang memiliki KTP ber-NIK	97,22%	96,21%	99,07%	99,79%	99,51

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul, 2020

2.3.1.2.5.3 Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran

Akta kelahiran merupakan salah satu dokumen hasil pencatatan sipil yang meregistrasi setiap kelahiran sebagai peristiwa kependudukan. Cakupan penerbitan akta kelahiran adalah cakupan penduduk lahir yang memperoleh akta kelahiran sebagai bentuk registrasi kependudukan sesuai dengan standar pelayanan tujuh hari harus selesai diterbitkan.

Penerbitan akta kelahiran dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melalui serangkaian kegiatan yang meliputi penyebaran informasi publik tentang pelayanan akta kelahiran, registrasi setiap kelahiran dan penerbitan akta kelahiran dari setiap peristiwa kelahiran di tahun bersangkutan. Cakupan penerbitan akta kelahiran di Kabupaten Bantul tahun 2019 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.91 Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran di Kabupaten Bantul Tahun 2019

KECAMATAN	KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN		
	JUMLAH PENDUDUK	MEMILIKI AKTE KELAHIRAN	PROSENTASE
SRANDAKAN	31.218	19.01	60,91
SANDEN	31.972	18.61	58,24
KRETEK	30.863	17.14	55,56
PUNDONG	35.908	18.78	52,30
BAMBANGLIPURO	41.880	22.04	52,64
PANDAK	52.013	29.90	57,49
PAJANGAN	36.040	21.71	60,26
BANTUL	64.365	40.22	62,49
JETIS	58.549	34.70	59,28
IMOGIRI	63.542	34.54	54,36
DLINGO	39.537	19.08	48,27
BANGUNTAPAN	111.955	62.60	55,92
PLERET	48.170	25.79	53,55
PIYUNGAN	52.333	28.55	54,57
SEWON	99.807	56.03	56,14
KASIHAN	103.527	54.50	52,65
SEDAYU	47.646	28.90	60,67
TOTAL	949.325	532.18	56,06

Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri Semester 2 Tahun 2019

Selanjutnya pencapaian cakupan penerbitan akta kelahiran di Kabupaten Bantul dari tahun 2014 hingga tahun 2019 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.92 Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran di Kabupaten Bantul Tahun 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah penduduk yang lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun N	10.446	10.127	10.949	10.000	9.928
Jumlah kelahiran di tahun N	11.286	10.516	11.056	10.900	9.938
Persentase penerbitan akta kelahiran	92,56	96,30	99,85	99,88	99,90

Sumber: Dispendukcapil Kabupaten Bantul, 2020

2.3.1.2.5.4 Cakupan Penerbitan Akta Kematian

Akta kematian merupakan dokumen sebagai tanda bukti sah mengenai peristiwa kematian seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dokumen Akta Kematian mempunyai manfaat penting bagi penduduk karena dapat digunakan sebagai penetapan status janda atau duda (terutama bagi pegawai negeri), sebagai syarat menikah lagi bagi janda atau duda cerai mati, persyaratan pengurusan pembagian waris (Peralihan Hak Atas Tanah), pengurusan pensiun bagi ahli warisnya, pengurusan uang duka, tunjangan kecelakaan, Taspen, asuransi, dan perbankan

Menurut UU No. 24 Tahun 2013 pasal 44 ayat 1, setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua RT atau nama lainnya di domisili penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, pejabat pencatatan sipil kemudian akan mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian. Pelaporan tersebut dilakukan secara berjenjang melalui RW atau nama lain,

Desa/Kelurahan dan Kecamatan, dengan kebijakan ini diharapkan cakupan pencatatan kematian akan meningkat secara signifikan.

Tabel 2.93 Cakupan Penerbitan Akta Kematian di Kabupaten Bantul Tahun 2015-2019

No	Tahun	Jumlah Akta Kematian yang Diterbitkan
1	2015	8.300
2	2016	10.817
3	2017	15.653
4	2018	20.672
5	2019	12.245

Sumber: Dispendukcapil Kabupaten Bantul, 2020

Dari uraian di atas, secara keseluruhan penyelenggaraan administrasi Kependudukan di Kabupaten Bantul tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.94 Data Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Tahun 2019

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KK	JUMLAH KEPEMILIKAN KK	JUMLAH WAJIB KTP	KEPEMILIKAN KTP-EL	MEMILIKI AKTE KELAHIRAN
1	Srandakan	31,218	10,961	10,961	24,169	24,068	19,015
2	Sanden	31,972	11,492	11,492	25,13	25,027	18,619
3	Kretek	30,863	11,036	11,036	24,209	24,119	17,148
4	Pundong	35,908	12,656	12,656	27,825	27,701	18,781
5	Bambanglipuro	41,88	15,006	15,006	32,47	32,333	22,045
6	Pandak	52,013	18,133	18,133	40,243	40,053	29,903
7	Pajangan	36,04	11,838	11,838	27,325	27,145	21,719
8	Bantul	64,365	22,585	22,585	49,069	48,839	40,221
9	Jetis	58,549	20,426	20,426	44,578	44,375	34,708
10	Imogiri	63,542	22,176	22,176	48,379	48,169	34,542
11	Dlingo	39,537	13,612	13,612	30,622	30,448	19,084
12	Banguntapan	111,955	36,787	36,787	83,091	82,67	62,6
13	Pleret	48,17	16,05	16,05	35,394	35,19	25,793
14	Piyungan	52,333	17,699	17,699	39,126	38,902	28,559
15	Sewon	99,807	33,659	33,659	75,58	75,239	56,033
16	Kasihan	103,527	34,717	34,717	78,19	77,797	54,504
17	Sedayu	47,646	16,249	16,249	36,287	36,104	28,908
Total		949,325	325,082	325,082	721,687	532.182	532,182

Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri Semester 2 Tahun 2019

2.3.1.2.6 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1) Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintahan desa atau kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Rata-rata jumlah kelompok binaan LPMD di Kabupaten Bantul tahun 2015-2019 disajikan pada Tabel 2.95.

Tabel 2.95 Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan LPMD di Kabupaten Bantul Tahun 2015-2019

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Kelompok Binaan LPMD	313	313	313	313	313
2	Jumlah LPMD	75	75	75	75	75
3	Rata-rata jumlah Kelompok Binaan LPMD	4,17	4,17	12,44	12,44	12,44

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, KB, dan PMD Kabupaten Bantul, 2020

Rata-rata jumlah kelompok binaan LPMD menggambarkan keaktifan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah melalui LPMD. Rata-rata jumlah kelompok binaan LPMD di Kabupaten Bantul tahun 2019 sebesar 12,44. Hal ini berarti bahwa rata-rata satu LPMD membina sekitar 12-13 kelompok.

2) Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolanya dari, oleh dan untuk masyarakat. Kelompok binaan PKK adalah kelompok-kelompok masyarakat yang berada di bawah tim penggerak PKK desa/kelurahan, yang dapat dibentuk berdasarkan kewilayahan atau kegiatan seperti kelompok dasawisma dan kelompok sejenis. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK menggambarkan keaktifan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah melalui PKK.

Tabel 2.96 Kelompok Binaan PKK di Kabupaten Bantul Tahun 2015-2019

No	Nama Organisasi	Jumlah				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	PKK Kecamatan	17	17	17	17	17
2	Kelompok PKBN	325	325	325	-	-
3	Kelompok Kadarkum	339	339	339	-	-
4	Kelompok Pola Asuh	402	402	402	-	-
5	Kelompok PKK Dusun	933	933	933	933	933
6	Kelompok UP2K-PKK	-	-	-	-	75
7	Kelompok Simulasi (GNAKSA, PAAR)	-	-	-	-	75

Sumber: DPPKBPMMD Kabupaten Bantul, 2020

3) Pemberian Bantuan Khusus P2MD dan BKK

Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa khususnya pembangunan sarana umum yang bersifat fisik diberikan bantuan khusus dengan mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 114 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Desa. Bantuan Keuangan P2MD tahun 2019 dialokasikan sebesar 20,16 Milyar dan terealisasi sebesar 20,16 Milyar. Sedangkan untuk Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dialokasikan sebesar 18,8 Milyar dan terealisasi sebesar 18,74 Milyar. Tahun 2019 bantuan khusus diberikan untuk pembangunan sarana umum yang bersifat fisik, kawasan khusus, pembangunan fisik obyek wisata dan kawasan kuliner.

Adapun output dari BKK dan P2MD Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.97 Tabel Output BKK dan P2MD di Kabupaten Bantul Tahun 2019

No	Proposal	Anggaran (Rp)	Kegiatan	Jumlah (%)	Jumlah proposal
1	BKK	18,740,044,000	Corblok, (Perbaikan Jalan)	46%	261
			Bangket, Talud	11%	62
			Drainase, Irigasi dll	5%	31
			Masjid / Rumah Ibadah	12%	69
			Penerangan Jalan	8%	43
			TK / PAUD	6%	36

No	Proposal	Anggaran (Rp)	Kegiatan	Jumlah (%)	Jumlah proposal
			Gedung (pertemuan, Olahraga, serbaguna)	6%	34
			Rumah Sederhana Tidak Layak Huni (RSTLH)	1%	4
			Lain- lain	5%	28
			TOTAL	100%	568
2	P2MD	20,160,000,000	Corblok, (Perbaikan Jalan)	47%	190
			Bangket, Talud	16%	65
			Drainase, Irigasi dll	4%	15
			Masjid / Rumah Ibadah	5%	19
			Penerangan Jalan	11%	43
			TK / PAUD	2%	10
			Gedung (pertemuan, Olahraga, serbaguna)	4%	16
			Rumah Sederhana Tidak Layak Huni (RSTLH)	2%	10
			Lain- lain	9%	35
			TOTAL	100%	403

Sumber: DPPKBPMD Kabupaten Bantul, 2020

2.3.1.2.7 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1) Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta KB Aktif

Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi peserta KB aktif adalah jumlah peserta KB aktif (PA) dibandingkan dengan seluruh PUS dalam suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Jumlah peserta PUS pada tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2018, tampak pada tabel berikut.

Tabel 2.98 Kepesertaan KB di Kabupaten Bantul Tahun 2015-2019

No.	Uraian	2015		2016		2017		2018		2019	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	PUS	149,683	-	154,202	-	143,861	-	141,317	47	139,938	-
2	Peserta KB Aktif	120,240	80.45	121,764	78,96	109,257	75,95	103,912	73.53	101,691	72.67
3	Peserta KB MKJP	41,234	34.24	42,308	34,75	37,453	34,28	36,454	35,08	35,850	35.25
4	Peserta KB Pria	9,306	7.73	9,543	7,84	9,308	8,52	9,651	9,29	11,472	11.28
5	Peserta KB Baru	13,864	100.95	13,837	100,45	11,801	85,36	17,686	44,42	9,473	53.54

No.	Uraian	2015		2016		2017		2018		2019	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
6	PUS <i>Unmetneed</i>	8,556	5.72	9,058	5,87	12,118	8,42	14,226	10,07	14,757	10.55

Sumber: DPPKBPMMD Kabupaten Bantul, 2020

Penurunan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) disebabkan oleh banyaknya pasangan yang telah memasuki Lansia. Hal ini juga diikuti oleh penurunan jumlah peserta Keluarga Berencana (KB) aktif maupun Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). Namun untuk kepesertaan KB pria dan peserta KB baru mengalami peningkatan. Hal ini berarti tingkat *awareness* dari Pasangan usia Subur (PUS) yang belum mengikuti program KB mengalami peningkatan.

2) Cakupan Anggota Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB

Cakupan anggota kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB adalah upaya pembinaan oleh para kader BKB terhadap anggotanya, khususnya yang masih Pasangan usia Subur (PUS) untuk menjaga kelangsungan ber-KB melalui pembinaan kelompok. Bina Keluarga Balita (BKB) adalah kelompok kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, keterampilan, dan sikap ibu serta anggota keluarga lainnya dalam membina tumbuh kembang anak usia dibawah lima tahun (Balita), melalui optimalisasi rangsangan emosional, moral, dan sosial.

Tabel 2.99 Cakupan Anggota BKB ber-KB di Kabupaten Bantul Tahun 2014-2018

Cakupan anggota BKB ber-KB	2015	2016	2017	2018	2019
	84,56	91,88	94,50	94,37	86,40

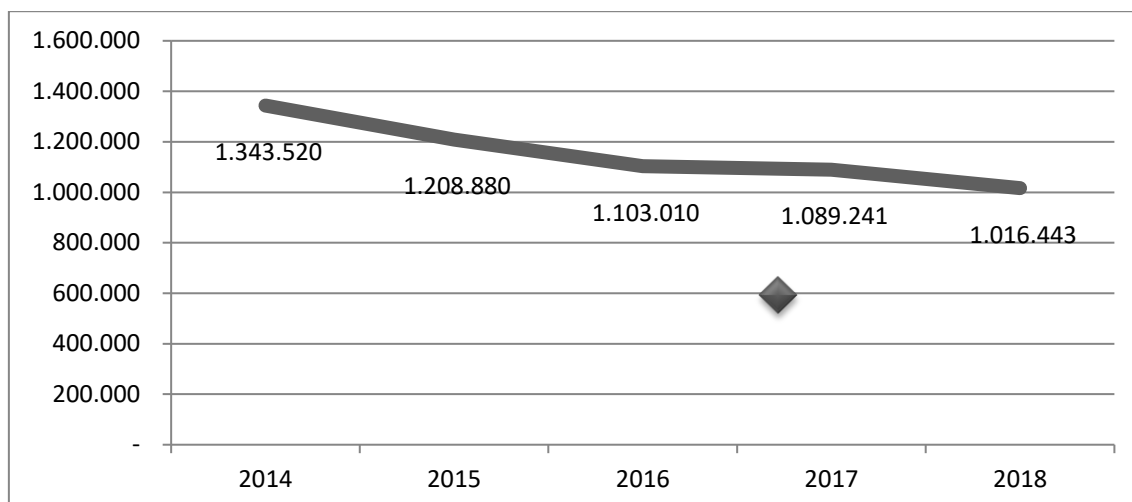
Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan PMD Kabupaten Bantul, 2020

Meskipun angka cakupan anggota BKB ber-KB pada tahun 2018 mengalami stagnansi jika dibandingkan tahun 2017, angka ini telah melampaui target yang ditetapkan nasional. Hal ini menunjukkan keberhasilan program keluarga berencana yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Bantul.

2.3.1.2.8 Perhubungan

1) Jumlah Penumpang Angkutan Umum

Angkutan umum yang ada di Kabupaten Bantul berupa armada bis angkutan umum sedangkan armada lain seperti kereta api, kapal laut, dan pesawat udara tidak terdapat di Kabupaten Bantul.



Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, 2020

Gambar 2.44 Jumlah Penumpang Angkutan Umum di Kabupaten Bantul Tahun 2014-2018

Jumlah penumpang angkutan umum bis di Kabupaten Bantul dari tahun 2014-2018 cenderung mengalami penurunan. Penurunan penggunaan angkutan umum tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain tingkat pertumbuhan kendaraan pribadi tinggi, pelayanan angkutan umum belum memenuhi standar pelayanan, jumlah angkutan umum berkurang, rute/trayek angkutan umum belum menjangkau wilayah, dan kondisi sarana dan prasarana angkutan umum buruk.

Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya guna meningkatkan penggunaan angkutan umum di masyarakat, antara lain melakukan kajian tentang pemerataan trayek angkutan umum pada pusat-pusat kegiatan yang belum tersentuh oleh angkutan umum, peningkatan kualitas pelayanan angkutan umum, memperbaiki sistem serta sarana dan prasarana fisik angkutan umum melalui Program peningkatan pelayanan angkutan, kegiatan pengumpulan database pelayanan angkutan, survei angkutan umum dan tradisional, dan survei angkutan barang.

2) Jumlah Ijin Trayek

Ijin trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan/atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek. Jaringan trayek adalah kumpulan trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, kewenangan kabupaten adalah memberikan ijin trayek untuk pedesaan. Ijin trayek di Kabupaten Bantul dikeluarkan oleh Dinas Perijinan dengan rekomendasi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul. Sejak tahun 2012 trayek yang ada di Bantul berjumlah enam trayek yang tersebar di lima kecamatan yaitu: Bantul, Kasihan, Pajangan, Dlinggo, dan Kasihan. Kemudian pada tahun 2014 terdapat ijin trayek baru sebanyak satu trayek yang melayani Imogiri. Sampai dengan tahun 2018 belum ada penambahan trayek. Jumlah ijin trayek di Kabupaten Bantul i dapat dilihat pada Tabel 2.100.

Tabel 2.100 Jumlah Ijin trayek di Kabupaten Bantul Tahun 2012-2018

No.	Tahun	Jumlah ijin trayek	Lokasi
1.	2012	6	Kecamatan Bantul, Kasihan, Pajangan, Dlinggo dan Kasihan
2.	2013	6	Kecamatan Bantul, Kasihan, Pajangan, Dlinggo dan Kasihan
3.	2014	7	Kecamatan Bantul, Kasihan, Pajangan, Dlinggo dan Kasihan, Imogiri
4.	2015	7	Kecamatan Bantul, Kasihan, Pajangan, Dlinggo dan Kasihan, Imogiri
5.	2016	7	Kecamatan Bantul, Kasihan, Pajangan, Dlinggo dan Kasihan, Imogiri
6.	2017	7	Kecamatan Bantul, Kasihan, Pajangan, Dlinggo dan Kasihan, Imogiri
7.	2018	7	Kecamatan Bantul, Kasihan, Pajangan, Dlinggo dan Kasihan, Imogiri

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, 2020

3) Jumlah Uji KIR Angkutan Umum

Uji kir angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Pengujian dimaksud meliputi uji tipe dan uji berkala. Uji tipe merupakan pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, sedangkan uji berkala merupakan pengujian yang diwajibkan untuk mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.

Tabel 2.101 Jumlah Uji Kir Angkutan Umum di Kabupaten Bantul Tahun 2014-2018

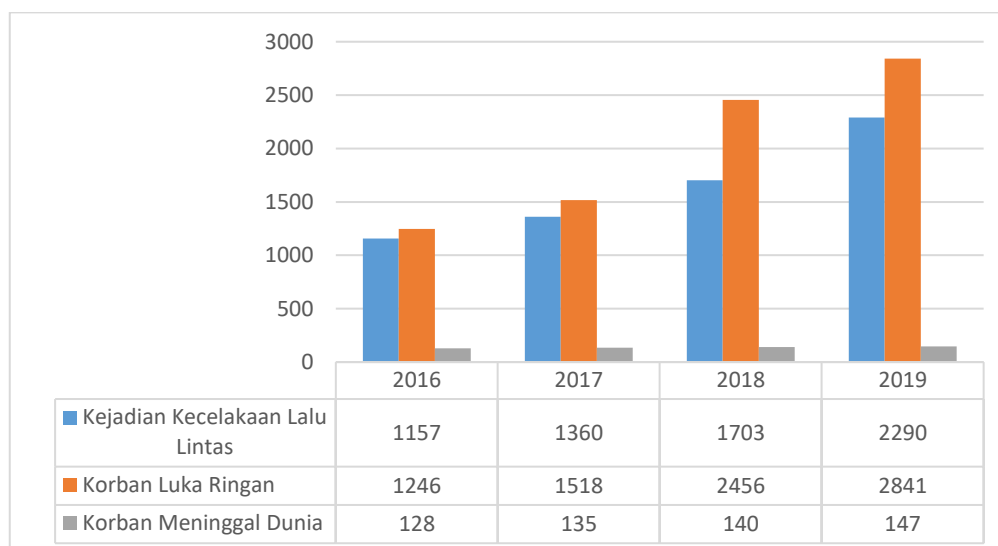
JENIS	Jumlah Uji Kir				
	2014	2015	2016	2017	2018
Uji kir kendaraan umum	15.418	16.870	17.810	18.730	20.923

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, 2020

Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor di Kabupaten Bantul dilakukan enam bulan sekali oleh tenaga penguji yang memiliki kualifikasi teknis berdasarkan ketetapan oleh Menteri Perhubungan. Jumlah uji kir di Kabupaten Bantul cenderung mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat menyadari pentingnya uji KIR untuk menekan angka kecelakaan khususnya mobil barang atau trayek umum.

4) Kecelakaan Lalu Lintas

Jumlah kecelakaan lalu lintas dari tahun 2016 hingga tahun 2019 cenderung mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kesadaran masyarakat terhadap tata tertib berlalu lintas masih kurang.



Sumber: POLRES Kabupaten Bantul, 2020

Gambar 2.45 Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2019

Jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas pada tahun 2019 sebanyak 2290 kejadian dengan korban meninggal dunia sebanyak 147 jiwa dan luka ringan sebanyak 2841 jiwa, artinya rata-rata dalam satu hari terjadi kecelakaan lalu lintas lebih dari 6 kejadian dengan korban jiwa lebih dari 8 orang. Untuk itu masih perlu dilakukan sosialisasi dan penekanan terkait keamanan ber lalu lintas kepada masyarakat agar jumlah kecelakaan terus dapat ditekan.

5) Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus

Pelabuhan laut diartikan sebagai sebuah fasilitas di ujung samudera, sungai, danau untuk menerima kapal dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya. Di Kabupaten Bantul pelabuhan laut dikembangkan dengan mengoptimalkan Kawasan Pandansimo di Desa Poncosari Kecamatan Srandakan sebagai pangkalan pendaratan ikan dan pendukung wisata pantai.

Pelabuhan udara/bandara bisa diartikan sebagai sebuah fasilitas untuk menerima pesawat dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya. Di Kabupaten Bantul tidak terdapat pelabuhan udara/bandara.

Terminal bus dapat diartikan sebagai prasarana transportasi untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum. Di Kabupaten Bantul terdapat empat terminal dengan kategori C, selain itu terdapat tiga lokasi pemungutan retribusi yaitu TPR Imogiri, TPR Piyungan, TPR Sedayu dan TPR Parangtritis Selama kurun waktu 5 tahun tidak mengalami penambahan atau pengurangan jumlah lokasi terminal.

Sistem transportasi darat (sebagaimana dimaksud dalam Perda Kabupaten Bantul Nomor 4 tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 (Pasal 13 ayat 2) untuk pergerakan lokal maupun regional didukung oleh pengembangan fasilitas angkutan darat di Kabupaten yang meliputi:

- a. terminal penumpang tipe C di Desa Palbapang Kecamatan Bantul;
- b. terminal angkutan barang di Desa Argosari Kecamatan Sedayu;
- c. stasiun penumpang dan stasiun barang serta pergudangan di Stasiun Sedayu;
- d. terminal angkutan barang di Desa Srimulyo Kecamatan Piyungan.

Tahun 2017 pembangunan halte sebanyak lima unit yang terpasang di halte Pasar Barongan, halte SMAN 1 Bantul, halte SMPN 1 Pandak, halte Sapuanging, dan halte Bandung. Tahun 2018 sebanyak lima unit halte terpasang di halte Utara Traffic Light S4 Kasongan, Utara Traffic Light S4 Palbapang, Depan SMP 2 Bantul, dan dua Depan SMU Muhammadiyah Bantul (MUHIBA).

6) Angkutan Darat

Angkutan Darat adalah jenis kegiatan ekonomi berupa pemberian/bisnis jasa angkutan/transportasi barang atau orang di darat, seperti yang dilakukan oleh perusahaan bus, taksi maupun kereta api. Angkutan darat yang terorganisir di Kabupaten Bantul berupa angkutan umum penumpang bus dan minibus.

Jumlah angkutan umum yang beroperasi di Kabupaten Bantul dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Penurunan jumlah pengguna

angkutan umum karena saat ini masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi dibanding dengan angkutan umum akibat semakin mudahnya dalam memperoleh kendaraan pribadi (sepeda motor). Penggunaan angkutan umum sebagai sarana transportasi massal dapat mengurangi beban lalu lintas yang semakin padat. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan strategis dari Pemerintah Daerah sehingga masyarakat bersedia beralih menggunakan angkutan umum.

Tabel 2.102 Data Trayek Kendaraan Angkutan Umum yang masih Beroperasi di Kabupaten Bantul Tahun 2014-2018

No.	Trayek	Jumlah Armada				
		2014	2015	2016	2017	2018
	Angkudes					
1	Ps.Bantul-Imogiri	10	10	10	0	0
2	Ps.Bantul-Tugu Genthong	3	3	0	0	0
3	Ps.Bantul-Pundong	0	0	0	0	0
4	Ps.Bantul-Kretek	0	0	0	0	0
5	Ps.Imogiri-Dlingo (lewat Munthuk)	0	0	0	0	0
6	Ps.Imogiri-Dlingo (lewat seropan)	4	4	4	0	0
7	Ps.Bantul-Pleret	0	0	0	0	0
8	Ps.Bantul-Krebet	0	0	0	0	0
9	Dlingo-Rejoanangun	0	0	0	0	0
10	Pajangan-Bantul-Pajangan	0	0		0	0
	Jumlah	<u>17</u>	<u>17</u>	<u>14</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Angkutan Perbatasan					
1	Yogya- Parangtritis	29	29	29	29	21
2	Yogya- Samas	7	7	7	7	5
3	Yogya- Sorobayan	8	8	8	8	3
4	Yogya-Srandakan	22	22	6	6	3
5	Dlingo - Terminal Giwangan	16	16	16	16	14
6	Yogyakarta – Petoyan	7	7	7	7	15
7	Trisik - Giwangan		16	16	16	14
	Jumlah	<u>89</u>	<u>105</u>	<u>89</u>	<u>89</u>	<u>75</u>
	AKDP					
1	Yogya- Panggang GK	22	22	17	18	13
2	Yogya- Parangtritis	26	26	26	26	26
3	Yogya- Samas	15	15	14	14	14
4	Yogya- Pandansimo	13	13	13	13	13
5	Yogya- Wates	21	21	16	16	17
6	Yogya- Ngentakrejo	8	8	8	8	8
	Jumlah	<u>109</u>	<u>105</u>	<u>105</u>	<u>94</u>	<u>91</u>

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, 2020

2.3.1.2.9 Komunikasi dan Informatika

1) Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal

Surat kabar merupakan penerbitan yang berupa lembaran yang berisi berita-berita karangan, iklan yang dicetak dan diterbitkan secara tetap atau periodik dan untuk dijual kepada umum. Lingkup berita dapat menyangkut berita internasional, nasional, maupun berita daerah (lokal). Fungsi dari surat kabar itu sendiri adalah untuk memberikan informasi yang beragam bagi masyarakat luas.

Jumlah surat kabar nasional/lokal adalah banyaknya jenis surat kabar terbitan nasional atau terbitan lokal yang masuk ke daerah. Semakin banyak surat kabar di daerah menunjukkan bahwa semakin besar ketersediaan fasilitas jaringan komunikasi massa berupa media cetak sebagai pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, namun demikian dari sekian banyak jenis surat kabar nasional/lokal yang masuk ke wilayah Kabupaten Bantul tersebut, hanya beberapa jenis yang dijadikan sebagai bahan referensi.

Tabel berikut menunjukkan jumlah jenis surat kabar terbitan lokal maupun nasional yang ada di wilayah kabupaten Bantul

Tabel 2.103 Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal
di Kabupaten Bantul Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah jenis surat kabar terbitan nasional	4	4	4	4	4
2	Jumlah jenis surat kabar terbitan lokal	5	6	6	6	6
3	Total jenis surat kabar	9	10	10	10	10

Sumber: Dinas Kominfo Kabupaten Bantul, 2020

Dari tabel di atas dapat diketahui jumlah jenis surat kabar, baik terbitan lokal maupun nasional yang masuk ke Kabupaten Bantul dari tahun ke tahun cenderung konstan, dengan total jenis surat kabar sekitar sepuluh jenis.

Selanjutnya selain memanfaatkan bahan referensi surat kabar, pemerintah Kabupaten Bantul juga menerbitkan Buletin Sejada yang penyebarannya sampai ke tingkat dusun melalui kecamatan. Tujuan

utama dari penerbitan buletin ini selain sebagai sarana komunikasi antara Pemerintah Kabupaten dengan masyarakat, juga sebagai sarana untuk mensosialisasikan program kerja dan kegiatan Pemerintah, sehingga masyarakat bisa mengetahui dan memahami program kerja dan kegiatan pembangunan yang telah, sedang dan akan dilakukan.

Penerbitan buletin ini dilakukan empat kali/edisi dalam setiap tahunnya, sementara kendala yang dihadapi adalah jumlah cetakannya yang masih terbatas sehingga belum bisa menjangkau sampai ke tingkat padukuhan, apalagi RT.

2) Penyiaran Radio/TV

Penyiaran adalah Pancaran melalui ruang angkasa oleh sumber frekuensi dengan sinyal yang mampu diterima oleh telinga atau didengar dan dilihat oleh publik. Salah satu bentuk media penyiaran yang ada di masyarakat adalah radio dan televisi. Jumlah penyiaran radio/TV nasional dan lokal adalah banyaknya penyiaran radio/TV nasional maupun radio/TV lokal yang masuk ke daerah. Semakin banyak jumlah penyiaran radio/TV nasional maupun lokal di daerah menggambarkan semakin besar pula ketersediaan fasilitas jaringan komunikasi sebagai pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Tabel 2.104 Jumlah Penyiaran Radio/TV
di Kabupaten Bantul Tahun 2015-2019

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah penyiaran radio lokal	2	2	2	2	2
2	Jumlah penyiaran radio nasional	1	1	1	1	1
3	Jumlah penyiaran TV lokal	4	4	4	4	4
4	Jumlah penyiaran TV nasional	1	1	1	14	14
5	Total penyiaran radio/TV lokal	6	6	6	6	21

Sumber: Dinas Kominfo Kabupaten Bantul, 2020

Dari data di atas dapat dilihat perkembangan jumlah penyiaran radio/TV lokal maupun nasional di Kabupaten Bantul. Perkembangan jumlah tercepat terjadi sejak tahun 2018. Kondisi tersebut sangat membantu masyarakat untuk bisa mengakses berbagai macam informasi

mulai dari pembangunan dan segala permasalahannya, ekonomi, budaya, religi, masalah keamanan, hiburan dan sebagainya, dari lingkup local, nasional sampai internasional.

Dengan memanfaatkan media televisi, Pemerintah Kabupaten Bantul berusaha melakukan interaksi dan komunikasi dengan masyarakatnya, agar bisa melakukan dialog interaktif dan terbentuk sinergitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Proses ini dilakukan dengan cara menjalin kerjasama dengan TVRI yang dikemas dalam acara Taman Gabusan.

Taman Gabusan merupakan siaran langsung di TVRI stasiun Yogyakarta, yang dilaksanakan sebanyak 40 kali dalam satu tahun, terdiri dari 36 kali di dalam studio dan 4 kali di luar studio. Model siaran adalah *talk show* dengan dialog interaktif dengan pemirsa di luar studio.

Disamping memanfaatkan media TV, pemerintah Kabupaten Bantul juga memanfaatkan media radio, dalam hal ini yang menjadi mitra adalah Radio Bantul, Radio Persatuan, dan RRI. Tujuan akhir dari kerjasama tersebut tentunya adalah agar program kerja dan kebijakan pemerintah dapat tersosialisasikan kepada masyarakat sehingga aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan diharapkan akan meningkat pula..

3) Website Milik Pemerintah Daerah

Keberadaan website milik pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bantul memiliki satu website utama dengan alamat <http://www.bantulkab.go.id/>, dengan 33 subdomain yang terdiri dari 32 subdomain untuk SKPD dan 1 subdomain untuk produk hukum Kabupaten Bantul. Subdomain untuk produk hukum Kabupaten Bantul, adalah <http://hukum.bantulkab.go.id/> dan subdomain untuk SKPD sebagaimana disajikan pada Tabel 2.105.

Tabel 2.105 Alamat Subdomain Website Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2019

No.	Dinas	Subdomain
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	dikpora.bantulkab.go.id
2	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bantul	sosial.bantulkab.go.id
3	Dinas Pariwisata	pariwisata.bantulkab.go.id
4	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	diperpautkan.bantulkab.go.id
5	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	pu.bantulkab.go.id
6	Dinas Kesehatan	dinkes.bantulkab.go.id
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	disdukcapil.bantulkab.go.id
8	Dinas Perhubungan	dishub.bantulkab.go.id
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	nakertrans.bantulkab.go.id
10	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	diskukmp.bantulkab.go.id
11	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	dppkbpmd.bantulkab.go.id
12	Dinas Kebudayaan	disbud.bantulkab.go.id
13	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	dptra.bantulkab.go.id
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	diskominfo.bantulkab.go.id
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	dpk.bantulkab.go.id
16	Satpol PP	satpolpp.bantulkab.go.id
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	dpmpt.bantulkab.go.id
18	Dinas Lingkungan Hidup	dlh.bantulkab.go.id
19	Dinas Perdagangan	perdagangan.bantulkab.go.id
No.	Badan	Subdomain
1	Bappeda	bappeda.bantulkab.go.id
2	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	bkpp.bantulkab.go.id
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	bkad.bantulkab.go.id
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	bpbd.bantulkab.go.id
5	Inspektorat	inspektorat.bantulkab.go.id
6	Kantor Kesbangpol	kesbangpol.bantulkab.go.id
No	PD	Subdomain
1	Sekretariat Daerah	setda.bantulkab.go.id
2	Sekretariat DPRD	dprd.bantulkab.go.id
3	RSUD Panembahan Senopati	rsudps.bantulkab.go.id
4	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	ulp.bantulkab.go.id
No.	Kecamatan	Subdomain
1	Kecamatan Banglupuro	kec-banglupuro.bantulkab.go.id
2	Kecamatan Banguntapan	kec-banguntapan.bantulkab.go.id
3	Kecamatan Bantul	kec-bantul.bantulkab.go.id
4	Kecamatan Dlingo	kec-dlingo.bantulkab.go.id

No.	Dinas	Subdomain
5	Kecamatan Imogiri	kec-imogiri.bantulkab.go.id
6	Kecamatan Jetis	kec-jetis.bantulkab.go.id
7	Kecamatan Kasihan	kec-kasihan.bantulkab.go.id
8	Kecamatan Kretek	kec-kretek.bantulkab.go.id
9	Kecamatan Pajangan	kec-pajangan.bantulkab.go.id
10	Kecamatan Pandak	kec-pandak.bantulkab.go.id
11	Kecamatan Piyungan	kec-piyungan.bantulkab.go.id
12	Kecamatan Pleret	kec-pleret.bantulkab.go.id
13	Kecamatan Pundong	kec-pundong.bantulkab.go.id
14	Kecamatan Sanden	kec-sanden.bantulkab.go.id
15	Kecamatan Sedayu	kec-sedayu.bantulkab.go.id
16	Kecamatan Sewon	kec-sewon.bantulkab.go.id
17	Kecamatan Srandakan	kec-srandakan.bantulkab.go.id
No.	Kelurahan	Subdomain
1	Kelurahan : Argodadi	http://argodadi.bantulkab.go.id
2	Kelurahan : Argomulyo	http://argomulyo.bantulkab.go.id
3	Kelurahan : Argorejo	http://argorejo.bantulkab.go.id
4	Kelurahan : Argosari	http://argosari.bantulkab.go.id
5	Kelurahan : Bangunharjo	http://bangunharjo.bantulkab.go.id
6	Kelurahan : Bangunjiwo	http://bangunjiwo.bantulkab.go.id
7	Kelurahan : Banguntapan	http://banguntapan.bantulkab.go.id
8	Kelurahan : Bantul	http://bantul.bantulkab.go.id
9	Kelurahan : Baturetno	http://baturetno.bantulkab.go.id
10	Kelurahan : Bawuran	http://bawuran.bantulkab.go.id
11	Kelurahan : Candan	http://candan.bantulkab.go.id
12	Kelurahan : Caturharjo	http://caturharjo.bantulkab.go.id
13	Kelurahan : Dlingo	http://dlingo-bantul.desa.id
14	Kelurahan : Donotirto	http://donotirto.bantulkab.go.id
15	Kelurahan : Gadingharjo	http://gadingharjo.bantulkab.go.id
16	Kelurahan : Gading Sari	http://gading Sari.bantulkab.go.id
No.	Kelurahan	Subdomain
17	Kelurahan : Gilangharjo	http://gilangharjo.bantulkab.go.id
18	Kelurahan : Girirejo	http://girirejo.bantulkab.go.id
19	Kelurahan : Guwosari	http://guwosari.bantulkab.go.id
20	Kelurahan : Imogiri	http://imogiri.bantulkab.go.id
21	Kelurahan : Jagalan	http://jagalan.bantulkab.go.id
22	Kelurahan : Jambidan	http://jambidan.bantulkab.go.id
23	Kelurahan : Jatimulyo	http://jatimulyo.bantulkab.go.id
24	Kelurahan : Karangtalun	http://karangtalun.bantulkab.go.id
25	Kelurahan : Karangtengah	http://karangtengah.bantulkab.go.id
26	Kelurahan : Kebonagung	http://kebonagung.bantulkab.go.id
27	Kelurahan : Mangunan	http://mangunan.bantulkab.go.id
28	Kelurahan : Mulyodadi	http://mulyodadi.bantulkab.go.id
29	Kelurahan : Muntuk	http://muntuk.bantulkab.go.id
30	Kelurahan : Murtigading	http://murtigading.bantulkab.go.id
31	Kelurahan : Ngestiharjo	http://ngestiharjo.bantulkab.go.id
32	Kelurahan : Palbapang	http://palbapang.bantulkab.go.id
33	Kelurahan : Panggungharjo	http://panggungharjo.desa.id
34	Kelurahan : Panjangrejo	http://panjangrejo.bantulkab.go.id
35	Kelurahan : Parangtritis	http://parangtritis.bantulkab.go.id
36	Kelurahan : Patalan	http://patalan.bantulkab.go.id
37	Kelurahan : Pendowoharjo	http://pendowoharjo.bantulkab.go.id

No.	Dinas	Subdomain
38	Kelurahan : Pleret	http://pleret.bantulkab.go.id
39	Kelurahan : Poncosari	http://poncosari.bantulkab.go.id
40	Kelurahan : Potorono	http://potorono.bantulkab.go.id
41	Kelurahan : Ringinharjo	http://ringinharjo.bantulkab.go.id
42	Kelurahan : Sabdodadi	http://sabdodadi.bantulkab.go.id
43	Kelurahan : Segoroyoso	http://segoroyoso.bantulkab.go.id
44	Kelurahan : Seloharjo	http://seloharjo.bantulkab.go.id
45	Kelurahan : Selopamioro	http://selopamioro.bantulkab.go.id
46	Kelurahan : Sendangsari	http://sendangsari.bantulkab.go.id
47	Kelurahan : Sidomulyo	http://sidomulyo.bantulkab.go.id
48	Kelurahan : Singosaren	http://singosaren.bantulkab.go.id
49	Kelurahan : Sitimulyo	http://sitimulyo.bantulkab.go.id
50	Kelurahan : Srigading	http://srigading.bantulkab.go.id
51	Kelurahan : Srihardono	http://srihardono.bantulkab.go.id
52	Kelurahan : Sriharjo	http://sriharjo.bantulkab.go.id
53	Kelurahan : Srimartani	http://srimartani.bantulkab.go.id
54	Kelurahan : Srimulyo	http://srimulyo.bantulkab.go.id
55	Kelurahan : Sumberagung	http://sumberagung.bantulkab.go.id
56	Kelurahan : Sumbermulyo	http://sumbermulyo.bantulkab.go.id
57	Kelurahan : Tamanan	http://tamanan.bantulkab.go.id
58	Kelurahan : Tamantirto	http://tamantirto.bantulkab.go.id
59	Kelurahan : Temuwuh	http://temuwuh.bantulkab.go.id
60	Kelurahan : Terong	http://terong.bantulkab.go.id
61	Kelurahan : Timbulharjo	http://timbulharjo.bantulkab.go.id
62	Kelurahan : Tirtohargo	http://tirtohargo.bantulkab.go.id
63	Kelurahan : Tirtomulyo	http://tirtomulyo.bantulkab.go.id
64	Kelurahan : Tirtonirmolo	http://tirtonirmolo.bantulkab.go.id
65	Kelurahan : Tirtosari	http://tirtosari.bantulkab.go.id
66	Kelurahan : Triharjo	http://triharjo.bantulkab.go.id
67	Kelurahan : Trimulyo	http://trimulyo.bantulkab.go.id
68	Kelurahan : Trimurti	http://trimurti.bantulkab.go.id
69	Kelurahan : Tirenggo	http://tirenggo.bantulkab.go.id
70	Kelurahan : Triwidadi	http://triwidadi.bantulkab.go.id
71	Kelurahan : Wijirejo	http://wijirejo.bantulkab.go.id
72	Kelurahan : Wirokerten	http://wirokerten.bantulkab.go.id
73	Kelurahan : Wonokromo	http://wonokromo.bantulkab.go.id
74	Kelurahan : Wonolelo	http://wonolelo.bantulkab.go.id
75	Kelurahan : Wukirsari	http://wukirsari.bantulkab.go.id
No.	Lembaga lain	Subdomain
1	PPID utama	ppid.bantulkab.go.id
2	KIM kab. Bantul	kim.bantulkab.go.id
3	Karang Taruna Kab bantul	karangtaruna.bantulkab.go.id
4	Ikatan Bidan	ibi.bantulkab.go.id

Sumber: Dinas Kominfo Kabupaten Bantul, 2020

Dengan adanya website beserta subdomainnya tersebut diharapkan akan meningkat pula keterbukaan informasi publik di wilayah Pemerintah Kabupaten Bantul.

Jumlah titik sambung jaringan internet Kabupaten Bantul hingga saat ini meliputi 202 titik. Dari jumlah tersebut 70 titik telah menggunakan jaringan *fiber optic (FO)* dan 132 titik lainnya menggunakan radio *wireless*. Guna melayani penggunaan internet, telah dialokasikan *bandwith* 500 MB.

4) Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat (IKM)

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Bantul diperoleh dari rata-rata nilai IKM PD pemberi layanan se-Kabupaten Bantul. Nilai IKM di Kabupaten mengalami peningkatan setiap tahun. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemberian layanan di PD Kabupaten Bantul mengalami peningkatan. Hasil penilaian IKM Tahun 2019 dari seluruh PD layanan yang telah menyusun dokumen IKM dengan nilai rata-rata 86,96, nilai terendah 79,33 dan nilai tertinggi 96,45. Indeks kepuasan layanan masyarakat di Kabupaten Bantul tahun 2015-2019 disajikan pada Tabel 2.106.

Tabel 2.106 Nilai IKM Kabupaten Bantul Tahun 2015-2019

No.	Tahun	IKM
1	2015	78,13
2	2016	78,69
3	2017	87,57
4	2018	88,70
5	2019	86,96

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul, 2020

Sesuai dengan Keputusan Menteri PAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, telah ditetapkan nilai persepsi, interval IKM, interval konversi IKM, mutu pelayanan, dan kinerja unit pelayanan sebagaimana disajikan pada Tabel 2.107.

Tabel 2.107 Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 1,75	25,00 – 43,75	D	Tidak Baik
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik
3	2,51 – 3,25	62,53 – 81,25	B	Baik
4	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Sangat Baik

Sumber: Bagian Organisasi Kabupaten Bantul, 2020

Berdasarkan Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, maka nilai rata-rata IKM Kabupaten Bantul tahun 2017 berada pada interval 81,26-100,00 yaitu memiliki nilai A dengan kinerja unit pelayanan dalam kategori sangat baik.

Untuk IKM kecamatan dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Bantul, per semester angkanya menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Dilihat dari standar deviasinya menunjukkan bahwa nilai IKM antar kecamatan cenderung mengalami fluktuasi. Secara umum dapat disimpulkan bahwa kualitas layanan publik ditingkat kecamatan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, meskipun kualitasnya cenderung variatif. Dengan demikian, diperlukan adanya terobosan yang dapat memperkecil tingkat fluktuasi/perbedaan kualitas layanan publik antar kecamatan.

Tabel 2.108 IKM Kecamatan di Kabupaten Bantul Tahun 2015-2019

No	Kecamatan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Dlingo	80,94	77,57	95,06	95,18	91,25
2	Piyungan	79,26	80,19	93,78	95,64	91,55
3	Pleret	80,00	81,85	96,60	96,83	89,73
4	Banguntapan	80,05	80,05	80,45	79,76	89,73
5	Imogiri	80,02	79,99	89,83	97,15	91,22
6	Sewon	75,20	76,93	96,07	95,38	88,51
7	Jetis	78,04	79,11	94,70	94,75	89,06
8	Pundong	88,16	85,05	96,90	97,09	90,56
9	Kretek	80,18	80,75	94,83	96,34	91,66

No	Kecamatan	2015	2016	2017	2018	2019
10	Bambanglipuro	78,64	77,83	97,06	97,38	90,18
11	Bantul	77,00	77,15	93,18	98,95	91,86
12	Kasihan	79,23	81,67	83,69	94,85	89,01
13	Sedayu	80,23	79,02	93,10	95,45	88,03
14	Pajangan	82,50	81,83	94,16	87,42	90,62
15	Pandak	73,24	79,53	82,93	84,57	92,23
16	Sanden	79,97	80,24	96,89	95,74	96,01
17	Srandakan	81,90	81,63	81,91	86,25	90,29
Rata-rata		79,68	80,02	91,83	93,45	96,17

Sumber: Bagian Organisasi Kabupaten Bantul, 2020

5) Inovasi Pelayanan Publik

Kompetisi inovasi pelayanan publik (Sinovik) dilaksanakan setiap tahun yang melibatkan semua unsur Perangkat Daerah dan BUMD dengan prinsip minimal satu institusi satu inovasi. Pada Seleksi Sinovik tingkat Nasional tahun 2019, ada 2 Inovasi dari Kabupaten Bantul yang masuk Top 99, yaitu:

1. SIPERKASA (Sistem Penjemuran Karya Santosa) dibidang pertanian dengan inovasi berupa mengatasi masalah pasca panen mendukung ketahanan pangan;
2. Mobil Keliling Pajak Bantul, Pelayanan Pajak Daerah Keliling berupa pelayanan PBB lebih dekat, lebih mudah, lebih murah.

Untuk Sinovik yang telah dilaksanakan pada tahun 2017, ada 10 inovasi terbaik dalam pelayanan publik di Kabupaten Bantul, sedangkan pada tahun 2018 ada 7 inovasi terbaik daerah dan pada tahun 2019 ada 8 inovasi terbaik daerah sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.109.

Tabel 2.109 Top Inovasi Pelayanan Publik
di Kabupaten Bantul Tahun 2017-2019

Top 10 Pemenang Sinovik Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2017		
No	Nama PD/Unit Kerja	Inovasi
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	SITUPAT, Siji Entuk Papat
2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	KAPERU, KTP Baru Bagi Pengantin Baru
3	Kecamatan Piyungan	Penerbitan IUMK Jemput Bola
4	Kecamatan Bantul	GETARR, Gerakan Tanggap Renovasi Rumah
5	Puskesmas Kasihan 1	KEKEP IBU
6	Puskesmas Jetis 1	GELIAT BARONGAN

Top 10 Pemenang Sinovik Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2017		
No	Nama PD/Unit Kerja	Inovasi
7	Puseksmas Pleret	KRIPEK PARU, Obat Mularab Penanggulangan TBC
8	Puskesmas Bambanglipuro	Paguyuban Tresno Rogo
9	Balai Benih Pertanian	SIPERKASA (Sistem Penjemuran Karya Santosa)
10	PDAM	PDAM Bantul Siap Prima
Top 7 Pemenang Sinovik Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2018		
No	Nama PD/Unit Kerja	Inovasi
1	Dinas Kesehatan	PSC 119 (<i>Public Safety Center</i>) 119
2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	AKSI SIMPATI (Akta Kematian Sehari Jadi)
3	Kecamatan Piyungan	E-lawar (Laporan Aduan Warga)
4	Puskesmas Jetis I	GROPYOK TBC
5	Puskesmas Kasihan II	Jamah Linsek Viagra
6	Puskesmas Pleret	BADOT TERSENYUM (Buatlah Anak dan Orang Tua Tersenyum)
7	Puskesmas Piyungan	Gardu Kelola
Top 8 Pemenang Sinovik Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2019		
No	Nama PD/Unit Kerja	Inovasi
1	BPBD	Biss (Bantul Intergreated Siren System)
2	Dinas Perhubungan	Pembayaran E-retribusi Kendaraan Bermotor.
3	Disdukcapil	Dukcapil Smart.
4	UPTD Puskesmas Sedayu I	Tante Sosialita (Pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga Solusi Sehat Alami Untuk Kita)
5	UPTD Puskesmas Jetis II	Garpu Salad (Gerakan Peduli Kesehatan Sulang Kidul)
6	UPTD Puskesmas Jetis I	Sijawara Joss (Pasien Sakit Jiwa Sehat Sejahtera Jenius Olah Sampah)
7	UPTD Puskesmas Pundong	Geplak Manis Dibawa Andong (Gerakan Pemberantasan TB Bersama Warga Kec. Pundong)
8	UPTD Rumah Potong Hewan	Sijempol (Sistem Jemput Bola)

Sumber : Bagian Organisasi Kabupaten Bantul, 2020

2.3.1.2.10 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1) Koperasi Berbadan Hukum

Pada tahun 2016 koperasi berbadan hukum di Kabupaten Bantul mengalami penurunan dikarenakan adanya Peraturan Menteri Koperasi No: 10/PER/KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan dan dikuatkan dengan Surat Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No: 244/Dep.1/XII/2016 Tanggal 23 Desember 2016 tentang : Pembubaran Koperasi Tidak Aktif Dalam Rangka Pendataan dan Penataan Koperasi. Di tahun 2016 telah dilaksanakan pembubaran koperasi tidak aktif sebanyak 64 koperasi. Jumlah koperasi berbadan hukum sampai dengan tahun 2019 ada

peningkatan dibanding tahun 2018. Jumlah koperasi Berbadan hukum disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.110 Koperasi Berbadan Hukum di Kabupaten Bantul

No.	Kecamatan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Kasihan	38	10	35	28	28
2	Sewon	61	62	51	43	42
3	Banguntapan	44	42	34	25	25
4	Pundong	12	12	6	8	9
5	Dlingo	19	20	19	16	16
6	Piyungan	23	23	21	17	16
7	Pajangan	10	10	9	8	8
8	Bantul	90	92	86	69	69
9	Srandakan	18	18	16	10	11
10	Pandak	17	17	15	13	13
11	Imogiri	30	31	30	24	25
12	Sanden	24	23	22	19	19
13	Kretek	10	10	9	10	10
14	Sedayu	17	18	16	15	15
15	Jetis	31	31	26	17	18
16	Pleret	22	23	17	10	10
17	Bambanglipuro	22	21	21	15	15
Jumlah		488	493	433	347	349

Sumber: Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian, 2020

2) Perkembangan UKM

Perkembangan UKM di Kabupaten Bantul menunjukkan hal yang positif bagi peningkatan aktivitas perekonomian. Pada tahun 2019 jumlah UMKM di Kabupaten Bantul mencapai sebanyak 48.148 unit, meningkat dibanding tahun 2018.

Tabel 2.111 Pertumbuhan Jumlah UMKM di Kabupaten Bantul

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Usaha Mikro	27.672	27.708	27.828	28.384	29.098
2.	Usaha Kecil	11.531	11.544	11.594	11.768	11.992
3.	Usaha Menengah	6.918	6.926	6.956	6.991	7.058
	Jumlah	46.121	46.178	46.378	47.143	48.148

Sumber: Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian, 2020

Tabel 2.112 Penyerapan Tenaga Kerja Pada UMKM di Kabupaten Bantul

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Usaha Mikro	55.344	55.416	55.656	56.768	58.225
2.	Usaha Kecil	34.593	34.632	34.782	35.130	36.048
3.	Usaha Menengah	6.918	6.926	6.956	111.856	112.977
	Jumlah	200.625	200.864	201.734	203.754	207.250

Sumber: Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian, 2020

Tabel 2.113 Data Penerbitan IUMK di Kabupaten Bantul

No	Tahun	Jumlah
1	2015	4.531
2	2016	4.674
3	2017	2.749
4	2018	4.996
5	2019	6.864
	Jumlah	23.814

Sumber data : Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian, 2020

2.3.1.2.11 Penanaman Modal

1) Investasi PMA dan PMDN

Jumlah investor Kabupaten Bantul Tahun 2018 sebanyak 94 terdiri dari 47 investor luar negeri (PMA) dan 47 investor dalam negeri (PMDN). Ditinjau dari jumlah investor secara keseluruhan (PMA dan PMDN), jumlah investor di Kabupaten Bantul pada tahun 2018 meningkat sebesar 33 investor dibandingkan dengan tahun 2017.

Tabel 2.114 Jumlah Investor Berskala Nasional di Kabupaten Bantul Tahun 2015-2019

No.	Tahun	Jumlah Investor		Jumlah
		PMA	PMDN	
1	2015	32	87	119
2	2016	37	5	42
3	2017	46	15	61
4	2018	47	47	94
5	2019	41	64	105

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul, 2020

Dalam proses pembangunan, investasi memiliki peranan yang sangat penting. Investasi menentukan dinamika dan akselerasi pembangunan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jika proses investasi berlangsung baik maka perekonomian akan tumbuh dengan baik selama proses investasi tersebut menghasilkan output yang efisien.

Tabel 2.115 Nilai Investasi PMA/PMDN di Kabupaten Bantul Tahun 2015-2019

Tahun	Jmlh Proyek PMDN	Jmlh Proyek PMA	Jmlh Proyek PMDN+PMA	Nilai Investasi PMDN	Nilai Investasi PMA (Rp)	Nilai Investasi PMDN+PMA (Rp)	Pertumbuhan Nilai Investasi (Rp)	Pertumbuhan (%)
s.d 2015	90	38	128	557.333.697.000,94	415.919.685.134,00	973.253.382.134,94	97.272.792.941,10	11,10
s.d 2016	5	37	42	564.682.781.966,05	550.714.055.730,00	1.115.396.837.696,05	142.143.455.561,11	14,60
s.d 2017	15	46	61	601.765.581.966,05	655.549.055.730,00	1.257.314.637.596,05	141.917.800.000,00	12,72
s.d 2018	47	47	94	666.256.881.966,05	740.109.755.730,00	1.406.366.637.696,05	149.052.000.000,00	11,85
s.d 2019	103	106	209	777.051.181.966,05	760.194.755.730,00	1.537.245.937.696,05	130.897.300.000,00	9,31

Catatan:

- Realisasi investasi pada tahun 2016 adalah realisasi investasi yang tercatat dalam Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disampaikan melalui situs <https://lkpmonline.bkpm.go.id>
- 2014, kurs US\$ 1 = Rp11.600 sesuai APBN-P2014
- 2015, kurs US\$ 1 = Rp12.500 sesuai APBN-P2015
- 2016, kurs US\$ 1 = Rp13.500 sesuai APBN-P2016
- 2017, kurs US\$ 1 = Rp13.400 sesuai APBN-P2017
- 2018, kurs US\$ 1 = Rp13.400 sesuai APBN-2018

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul, 2020

Berdasarkan Tabel 2.115 dapat dijelaskan bahwa realisasi investasi di Kabupaten Bantul pada tahun 2018 secara keseluruhan mencapai nilai Rp1.406.366.637.696,05 meningkat sebesar Rp149.052.000.000,00 atau 11,85% bila dibandingkan dengan capaian nilai investasi tahun 2017 sebesar Rp1.257.314.637.596,05 (dengan kurs 1 US\$ sama dengan Rp13.400,00). Jika dilihat dari nilai investasi, PMA lebih besar dibanding PMDN. Nilai investasi PMA tahun 2018 sebesar Rp740.109.755.730,00, sementara nilai investasi PMDN sebesar Rp666.256.881.966,05. Hal ini menunjukkan bahwa investor luar negeri sudah mulai tertarik untuk melakukan investasi di Kabupaten Bantul.

2) Daya Serap Tenaga Kerja

Rasio daya serap tenaga kerja merupakan perbandingan antara jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan PMA/PMDN dengan jumlah seluruh PMA/PMDN. Rasio ini mencerminkan daya tampung proyek investasi PMA/PMDN untuk menyerap tenaga kerja di suatu daerah. Semakin besar rasio daya serap tenaga kerja menunjukkan semakin besar daya tampung proyek investasi PMA/PMDN tersebut.

Tabel 2.116 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja di Kabupaten Bantul Tahun 2015-2019

No.	Tahun	Jumlah Investor			Jumlah Tenaga Kerja			Rasio Daya Serap Tenaga Kerja
		PMA	PMDN	Jumlah	PMA	PMDN	Jumlah	
1	2015	38	90	128	8.909	9.355	18.264	123,41
2	2016	37	5	42	10.364	9.366	19.730	469,76
3	2017	46	15	61	13.880	9.880	23.760	389,51
4	2018	47	47	94	15.311	11.610	26.921	286,39
5	2019	103	106	209	17.146	11.834	28.980	138.660

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul, 2020

Rasio daya serap tenaga kerja tahun 2018 mencapai 286,39 artinya satu perusahaan PMA/PMDN mampu menampung sekitar 286 tenaga kerja. Jumlah ini turun bila dibanding rasio daya serap tenaga kerja tahun 2017 yang mencapai 389,51. Dari sisi penyerapan tenaga kerja, mengalami penurunan sebesar 26,47%. Hal ini disebabkan karena adanya pengaruh kemajuan teknologi di mana pemanfaatan tenaga kerja manusia telah digantikan dengan penggunaan alat berteknologi tinggi.

2.3.1.2.12 Kepemudaan dan Olahraga

1) Organisasi Pemuda

Kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan khususnya generasi muda yang tergabung dalam organisasi dan komunitas melalui pengembangan potensi pemuda dan peningkatan peran pemuda dalam pembangunan diantaranya melalui pelatihan bela negara, bakti pemuda dan sosial, expo pemuda, kader anti narkoba dan pemuda pelopor Kegiatan kepemudaan tahun 2019 disajikan sebagai berikut.

Tabel 2.117 Kegiatan Kepemudaan di Kabupaten Bantul Tahun 2019

Program	Kegiatan	Wujud Kegiatan
1) Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	a) Kegiatan Pengembangan Potensi Pemuda	(1) Seleksi Jambore Pemuda Daerah/Indonesia; (2) Lomba Wirausaha Muda Bantul; (3) MTQ Pelajar Kecamatan se-Kabupaten Bantul; (4) MTQ Pelajar Kabupaten Bantul; (5) Lomba Mural (6) Pembinaan Kafilah & MTQ DIY; (7) Lomba Baris Berbaris; (8) Kompetisi Mural (ABT).
2) Program Peningkatan Peran Serta Pemuda	a) Kegiatan Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan	(1) Seleksi Pemuda Pelopor Kabupaten; (2) Fact Finding Pemuda Pelopor DIY; (3) Fact Finding Pemuda Pelopor Nasional.
	b) Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan dan Peningkatan Peran Serta Pemuda	(1) Seminar TUB Sekolah; (2) Kursus Mahir Dasar Pramuka; (3) Kursus Instruktur Muda (4) Gladian Pimpinan Satuan Pramuka; (5) Kursus Mahir Lanjut Pramuka; (6) Seleksi Paskibraka Kabupaten Bantul; (7) Diklatsar KOKAM; (8) Pra Pelatihan Paskibraka; (9) Pendidikan Dasar Pramuka Peduli; (10) Pelatihan Resmi Paskibraka; (11) Pelatihan Tallent Mapping; (12) Lomba Pawai, Karnaval dan Drumband HUT RI; (13) Pengadaan Website & Aplikasi Kepemudaan; (14) Expo Pemuda; (15) Seminar Bedah Perpang; (16) Festival Santri & Pondok Pesantren Expo; (17) Pembinaan Kader P4GN; (18) Pelatihan Bisnis Online bagi Pemuda (ABT);

Program	Kegiatan	Wujud Kegiatan
		(19) Bhakti Pemuda Kabupaten Bantul (ABT); (20) Kemah Bela Negara (ABT).
3) Program Peningkatan Upaya dan Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	a) Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda	(1) Pelatihan Kewirausahaan Pemuda Pemula; (2) Pelatihan Kewirausahaan Pemuda Lanjutan.
4) Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	a) Kegiatan Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan	(1) Pelatihan Wasit Tennis Lapangan dan Pelatih Sepak Takraw.
5) Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	a) Kegiatan Pengembangan Olahraga Rekreasi	(1) Car Free Day; (2) Olahraga Tradisional; (3) Pemassalan Olahraga.
	b) Kegiatan Pembinaan dan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	(1) Pekan Olahraga Pelajar Kab. Bantul; (2) Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA); (3) Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantren Daerah Kab. Bantul (POSPEDA); (4) Pekan Paralimpic Pelajar Daerah Kab. Bantul (PEPARPEDA); (5) Pekan Paralimpic Pelajar Daerah Kab. Bantul (PEPARDA) dan Pembinaan NPC; (6) Tri Lomba Juang Tingkat Kabupaten Bantul; (7) Pengiriman Tri Lomba Juang DIY; (8) Pembinaan Atlet Berprestasi; (9) Reward / Bonus Atlet Berprestasi POPDA, PEPARPEDA, PEPARDA dan POSPEDA;

Program	Kegiatan	Wujud Kegiatan
		(10) Kompetisi Cabang Olahraga yang berkembang di Masyarakat (Bola Voli, Sepak Bola Putra dan Putri, Basket, Gate Ball, Wood Ball, Korf Ball, Yong Moo Do, Tenis Meja, Tenis Lapangan, Bulutangkis dan Golf).
6) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	a) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	(1) Belanja Pembangunan Penambahan Pagar Keliling; (2) Pembangunan Pagar Gudang Lapangan Panahan; (3) Pengaspalan dan pelebaran Jalan Area Stadion; (4) Pembangunan Mushola; (5) Perkerasan jalan Area Sirkuit Sepatu Roda SSA; (6) Pemasangan Tambahan Lampu Penerangan Jalan SSA (7) Pemeliharaan rutin/berkala sarpras olahraga

Sumber : Disdikpora Kabupaten Bantul, 2020

2) Jumlah Organisasi Olahraga

Jumlah organisasi olahraga di Kabupaten Bantul mengalami peningkatan. Peningkatan organisasi olahraga di Kabupaten Bantul tersebut menunjukkan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam memasyarakatkan olahraga. Diantaranya melalui olahraga rekreasi yang dikemas dalam *Car Free Day* dan olahraga tradisional serta kompetisi olahraga (PORDA, PPDA, Pemasalan Olahraga, Pekan Olahraga Pelajar, Pekan Paralimpic Pelajar Daerah (PEPARPEDA)).

3) Ketersediaan Sarpras Olahraga

Tersedianya Sarpras Olahraga antara lain: Stadion Sultan Agung; Sirkuit Sepatu Roda; Lapangan Pacuan Kuda; Lapangan *Tennis In Door*; Lapangan dan Tenis Dwiwindu. Selain itu akan dibangun Arena Panjat Tebing dan Lapangan Panahan.

4) Jumlah Cabang Olahraga

Kabupaten Bantul mempunyai cabang olahraga unggulan antara lain: Cabang olahraga Panahan; Senam; Atletik; Judo; Sepak Takraw; Pencak Silat, Tae Kwon Do, Gulat, Tinju, Tenis Lapangan, dan Tenis Meja.

Cabang olahraga yang berkembang di masyarakat dan diselenggarakan dalam kompetisi olahraga antara lain: Cabang olahraga Bola voli; Tenis Meja; Tenis Lapangan; Bulutangkis; Futsal; Pencak Silat, Gate Ball, Basket, Korf Ball, Yoong Moo Do, Golf dan Sepak bola putri.

5) Prestasi dalam Bidang Olahraga

Beberapa prestasi keolahragaan telah diraih dalam tahun 2018, diantaranya:

- a. Kompetisi olahraga berjenjang atau Pekan Olahraga (POR) Pelajar kabupaten dengan peserta pelajar SD, SMP dan SMA, mempertandingkan 23 cabang olahraga, kegiatan ini merupakan seleksi yang hasil juaranya berhak mewakili kabupaten Bantul maju PPDA DIY. Pada ajang PPDA DIY Tahun 2019, Kabupaten Bantul mengirimkan atlet dan pendamping yang bertanding di 23 Cabang Olahraga dan Kontingen Kabupaten Bantul berhasil mempertahankan prestasi sebagai **Juara Umum** dengan memperoleh medali 75 emas, 68 perak dan 66 perunggu.

Tabel 2.118 Perolehan Medali pada Pekan Olahraga Pelajar di Kabupaten Bantul Tahun 2019

No	Kab./Kota	Emas	Perak	Perunggu	Jumlah	Peringkat
1	Kab. Bantul	75	68	66	209	1
2	Kota Yogyakarta	65	53	85	203	2
3	Kab. Sleman	56	54	68	178	3
4	Kab. Kulonprogo	20	32	60	112	4
5	Kab. Gunungkidul	17	26	52	95	5

Sumber: Dinas Dikpora Kabupaten Bantul, 2020

- b. Pekan Olahraga Seni Antar Ponpes Tingkat Daerah (POSPEDA) DIY tahun 2019 Kabupaten Bantul mengirimkan sebanyak 152 atlet dan 18 *official*/pendamping dari FKPP Kabupaten Bantul. POSPEDA DIY 2019 memertandingkan 7 Cabang Olahraga dan 9 cabang seni. Kabupaten Bantul hanya meraih peringkat 2 dari 5 Kabupaten Kota memperoleh medali 11 emas, 15 perak dan 4 perunggu.

Tabel 2.119 Perolehan Medali pada Pekan Olahraga Pelajar di Kabupaten Bantul Tahun 2019

No	Kab./Kota	Emas	Perak	Perunggu	Jumlah	Peringkat
1	Kota Yogyakarta	15	14	8	37	1
2	Kab. Bantul	11	15	4	30	2
3	Kab. Sleman	11	8	17	36	3
4	Kab. Kulonprogo	6	7	21	34	4
5	Kab. Gunungkidul	0	0	5	5	5

Sumber: Dinas Dikpora Kabupaten Bantul, 2020

Tabel 2.120 Perolehan Medali pada POSPEDA Cabang Seni Tahun 2018

No	Kab./Kota	Emas	Perak	Perunggu	Jumlah	Peringkat
1	Kab. Bantul	6	7	3	16	1
2	Kota Yogyakarta	4	3	2	9	2
3	Kab. Gunungkidul	3	4	6	13	3
4	Kab. Sleman	3	3	6	12	4
5	Kab. Kulonprogo	2	1	1	4	5

Sumber: Dinas Dikpora Kabupaten Bantul, 2020

- c. Pekan Paralympic Pelajar Daerah (PEPARPEDA), sub kegiatan ini menyeleksi 3 cabang olahraga pelajar SLB dan inklusi dan mengirimkan atlet luar biasa ke tingkat DIY sebanyak 40 atlet pada 3 cabang olahraga yaitu atletik, bulutangkis, dan tenis meja, kontingen Kabupaten Bantul kembali meraih **juara umum** dengan perolehan medali 9 emas, 6 perak dan 5 perunggu.

Tabel 2.121 Perolehan Medali pada PEPARPEDA Cabang Seni Tahun 2019

No	Kab./Kota	Emas	Perak	Perunggu	Jumlah	Peringkat
1	Kab. Bantul	9	6	5	20	1
2	Kota Yogyakarta	3	1	5	9	2
3	Kab. Gunungkidul	2	4	3	9	3
4	Kab. Sleman	2	2	2	6	4
5	Kab. Kulonprogo	0	3	1	1	5

Sumber: Dinas Dikpora Kabupaten Bantul, 2020

2.3.1.2.13 Statistik

Urusan statistik di Kabupaten Bantul masih ditangani oleh Pemerintah Pusat melalui Badan Pusat Statistik (BPS) yang bertempat di Bantul. Namun demikian, karena melihat bahwa di segenap kegiatan statistik perlu diadakan keseragaman dan koordinasi, maka Pemerintah Kabupaten Bantul bekerjasama dengan BPS melaksanakan beberapa program yang hasilnya dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai bahan penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan. Selain kerjasama dengan BPS, Pemerintah Kabupaten Bantul juga melaksanakan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan urusan statistik.

Tahun 2018 dilaksanakan pengumpulan data, melakukan verifikasi dan validasi serta mengolah data Gakin sehingga didapatkan data keluarga Miskin yang mutakhir dengan menggunakan data Gakin BDT 2015. Tujuannya antara lain mengumpulkan data keluarga Gakin BDG 2015, melakukan verifikasi data Gakin 2015, mendapatkan data yang *ter-update* sesuai kondisi tahun 2017, dan menyusun data statistik kemiskinan untuk 75 desa. Tahun 2018 penyusunan buku statistik pertumbuhan ekonomi, inflasi/deflasi di Kabupaten Bantul serta mendeteksi kelompok komoditas yang berpengaruh dalam inflasi/deflasi, Indeks Pembangunan Manusia, dan informasi pertumbuhan ekonomi selama periode 2013-2018

2.3.1.2.14 Persandian

Kegiatan sandi dalam pendekatan konsep komunikasi sejalan dengan ruang lingkup konsep komunikasi organisasi. Komunikasi

organisasi dimaknai sebagai proses penciptaan dan pertukaran pesan-pesan. Hal ini berarti pesan-pesan senantiasa diciptakan dan dipertukarkan dengan kesadaran untuk dimaknai oleh kedua belah pihak dalam rangkaian yang berlanjut dan dinamis. Pesan-pesan yang ciptakan dan dipertukarkan adalah makna dari simbol atau lambang yang dapat ditangkap panca indera. Simbol dapat berupa kata-kata atau nirkata, lisan atau tertulis. Penciptaan dan penafsiran pesan terjadi melalui *coding* dan *decoding*.

Pada hakekatnya pengelolaan informasi berklasifikasi rahasia dalam konteks persandian, akan berada pada alur mulai dari pembuatan informasi, pemberian label, pengiriman, dan penyimpanan. Untuk naskah dinas berklasifikasi rahasia, kerahasiaannya dilakukan dengan enkripsi. Khusus untuk komunikasi melalui jaringan, perlu ada jaminan terhadap keselamatan pesan melalui e-mail. Untuk informasi yang dihasilkan dan disimpan dalam bentuk arsip digital, maka kerahasiaan dilakukan dengan enkripsi dan keutuhan data dengan *hash function*. Sementara untuk pengiriman informasi digital, maka kerahasiaannya perlu dilakukan dengan cara enkripsi jaringan. Khusus untuk pengiriman dalam bentuk *hardcopy*, maka pengamanan dilakukan terhadap fisik pesan dan personil pembawa pesan.

Persandian dalam penyelenggaraan pengamanan persandian sebagaimana termuat dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2008 tentang Tunjangan Pengamanan Persandian adalah rangkaian kegiatan dan tindakan pencegahan atau penanggulangan yang dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk melindungi kelangsungan persandian dari segala hakekat ancaman dan gangguan dalam satu kesatuan sistem persandian negara. Bagi pemerintah daerah, masalah persandian sebagaimana dimuat dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, masuk menjadi salah satu urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pengendalian system keamanan informasi merupakan pelaksanaan dari urusan persandian. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain, meliputi:

1. Sosialisasi Keamanan Informasi

Kegiatan sosialisasi Keamanan Informasi yang dilaksanakan yaitu peningkatan kesadaran keamanan informasi, dengan menggunakan tanda tangan digital yang memanfaatkan *cryptography*/ persandian pada algoritmanya. Narasumber kegiatan ini dari Badan Siber dan Sandi Negara serta praktisi IT dari Yogyakarta.

Peserta sosialisasi kepala OPD untuk memberikan pemahaman pemanfaatan tanda tangan digital yang akan diimplementasikan dalam berbagai aplikasi seperti aplikasi perijinan online.

2. Pemeliharaan Jaringan telekomunikasi

Pemeliharaan jaringan telekomunikasi dilakukan berupa perbaikan jalur, penambahan *extension* dan pemeliharaan PABX. Koneksi antara Pemda I dan Pemda II serta 17 kecamatan di Kabupaten Bantul. Penambahan *extension* baru menggunakan *device* dari pengadaan SIP yang dilakukan pada tahun 2018.

3. Pelaksanaan kegiatan sterilisasi.

Kegiatan sterilisasi dilaksanakan setiap tahun untuk mengetahui adanya potensi kebocoran informasi di ruang Pimpinan Pemerintah Kabupaten Bantul. Kegiatan sterilisasi bekerja sama dengan Forum Komunikasi Sandi DIY yang dilakukan untuk ruang pimpinan daerah, yaitu Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris daerah

4. Penyediaan Layanan Frekuensi Radio Internal Pemkab.Bantul

Pemanfaatan Radio Komunikasi Internal untuk mendukung komunikasi di beberapa OPD yaitu Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan, serta Badan Penanggulangan Bencana daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika memfasilitasi sewa frekuensi untuk komunikasi radio dan pemeliharaan tower serta *repeater*-nya.

5. Peningkatan layanan komunikasi radio internal Pemkab. Bantul

Peningkatan layanan komunikasi berupa penggantian *tower* antena *repeater* di Blado, Gunungkidul dari *triangle* ke *tripole free standing* dengan hotdip galvanis. Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas layanan komunikasi radio termasuk pemanfaatan *tower* bersama sehingga dalam satu *tower* bisa terpasang beberapa antena *repeater* dengan jalur frekuensi yang berbeda-beda. Tahun 2019, dirancang menjadi *tower* induk dalam perancangan sistem komunikasi radio Pemkab. Bantul, sehingga cakupan sinyal radio semakin luas dan area *blank spot* bisa teratasi. Hal ini sangat mendukung kegiatan lapangan, khususnya dalam penanganan bencana alam, yaitu saat komunikasi yang lain tidak bisa diakses karena rusaknya infrastruktur.

6. Kegiatan Forum Komunikasi Sandi Daerah

Seksi Keamanan Informasi dan Persandian tergabung dalam Forum Komunikasi Sandi Daerah (Forkomsanda) DIY. Forkomsanda DIY menjadi media komunikasi dan koordinasi di tingkat Daerah DIY. Kegiatan ini untuk menyatukan pola pikir, pola tindak dan pola sikap petugas sandi di Lingkungan Pemda. DIY. Dalam forkomsanda ini, Unit Teknis Persandian Se-DIY bertukar informasi terkait kegiatan persandian, pelatihan pemanfaatan peralatan sandi serta perkembangan informasi keamanan informasi di DIY.

Urusan persandian sangat erat kaitannya dengan keamanan informasi. Hal – hal yang sudah dilaksanakan untuk menjaga keamanan informasi dengan memanfaatkan metode persandian adalah sebagai berikut:

- a. Pengklasifikasian berita yang keluar atau masuk melalui unit persandian.
- b. Enkripsi, dekripsi berita berklasifikasi rahasia atau terbatas yang keluar atau masuk melalui unit persandian.
- c. Secara berkala melaksanakan kegiatan sterilisasi ruang kerja pejabat dan ruang rapat pimpinan.
- d. Pengamanan sinyal pada kegiatan pimpinan.
- e. Implementasi kriptografi asimetrik pada tandatangan digital, untuk otentikasi data.

- f. Respon terhadap gangguan keamanan informasi pada sistem informasi aplikasi web.
- g. Peningkatan kesadaran keamanan kominfo penyelenggara pemerintahan melalui workshop atau sosialisasi.
- h. Layanan komunikasi tertutup bagi pejabat.

Kegiatan yang sudah dilaksanakan dan peningkatan pelayanan dengan:

- a. Mewujudkan CSIRT (Computer Security Incident Respon Team).
- b. Kampanye komunikasi informatika.
- c. Koordinasi persandian pusat dan daerah.
- d. Penyelenggaraan komunikasi internal pemerintah daerah (radio dan telepon).

2.3.1.2.15 Kebudayaan

Kebudayaan saat ini menjadi isu strategis dalam gelombang pembangunan di Indonesia, tidak hanya memunculkan bagaimana kebudayaan itu ada dan berkembang dalam masyarakat namun sebagai modal pembangunan. Undang Undang Pemajuan Kebudayaan Tahun 2017 menegaskan bahwa kebudayaan memegang peran penting dalam semua lini pembangunan dan mengamankan agar kebudayaan diperlakukan sebaik-baiknya melalui tindakan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan

Budaya sebagai salah satu potensi penyangga utama wisata di Kabupaten Bantul berupa warisan budaya benda maupun warisan budaya tak benda berbasis wisata heritage dan obyek wisata cagar budaya. Upaya pelestarian budaya yang dilakukan meliputi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian, nilai tradisi budaya dan warisan budaya.

1) Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Sebagai bagian dari DIY, Kabupaten Bantul tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan keistimewaan bidang kebudayaan. Pada tahun 2015-2016 saat masih bergabung dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan penyelenggaraan festival seni dan budaya mencapai 77 event dan setelah menjadi dinas sendiri (Dinas Kebudayaan) pada tahun 2017-2019 telah

diselenggarakan sebanyak 712 event seni budayameliputi pentas wayang, kethoprak, jathilan, reog, seni religi, dan hadroh. Peningkatan penyelenggaraan acara seni dan budaya ini merupakan wujud dari keseriusan pemerintah daerah untuk melestarikan seni dan budaya agar dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

2) Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya

Sarana penyelenggaraan seni dan budaya yang dimiliki Kabupaten Bantul pada tahun 2018 berupa 89 dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 108 sarana penyelenggara kesenian yang ada di Kabupaten Bantulyang berupa gedung dan joglo kesenian, serta 2.147 grup kesenian meningkat pada 2018 dibandingkan tahun 2015 yang baru mempunyai 1.952 grup kesenian. Untuk penataan administrasi dan dokumentasi seni budaya ditahun 2019 telah dilakukan sosialisasi registrasi kelompok seni (NIK: Nomor Induk Kesenian). Sampai tahun 2019 sebanyak 1.250 kelompok seni telah melakukan registrasi dan masih banyak kelompok kesenian yang belum mengajukan registrasi. Minimnya sarana fisik/gedung kesenian di Kabupaten Bantul perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah untuk mendukung pengembangan aktivitas grup kesenian yang semakin bertambah.

3) Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan

Kabupaten Bantul sebagai salah satu destinasi wisata penting di DIY, khususnya jenis wisata budaya maka penyelenggaraan urusan kebudayaan diarahkan untuk melestarikan kebudayaan daerah melalui kebijakan yang berlandaskan prinsip perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan aset seni budaya masyarakat, warisan budaya, dan Cagar Budaya (CB) guna menunjang predikat sebagai destinasi wisata budaya.

Tabel 2.122 Data Warisan/Cagar Budaya Kabupaten Bantul Tahun 2019

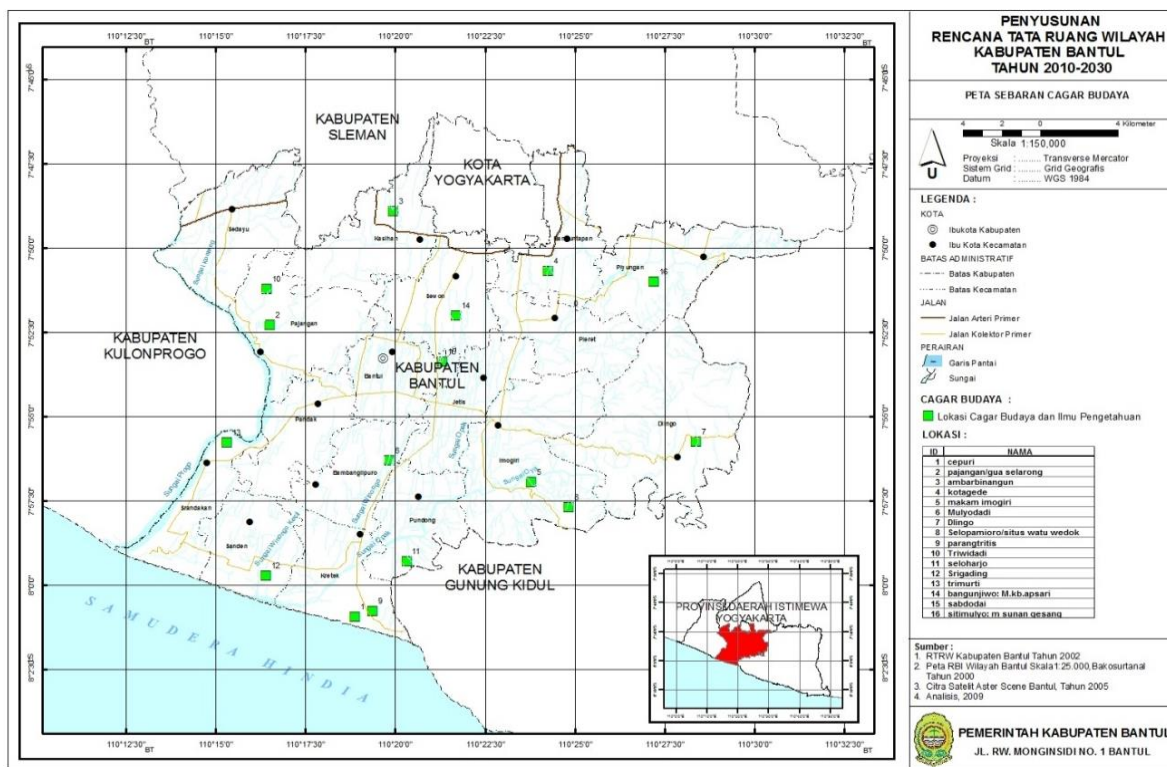
NO	KECAMATAN	JUMLAH
1	Kec. Bambanglipuro	3
2	Kec. Banguntapan	13
3	Kec. Bantul	6
4	Kec. Dlingo	1
5	Kec. Imogiri	9

NO	KECAMATAN	JUMLAH
6	Kec. Jetis	2
7	Kec. Kasihan	10
8	Kec. Kretek	4
9	Kec. Pajangan	4
10	Kec. Pandak	1
11	Kec. Piyungan	4
12	Kec. Pleret	15
13	Kec. Pundong	20
14	Kec. Sanden	2
15	Kec. Sedayu	1
16	Kec. Sewon	1
17	Kec. Srandakan	0
	TOTAL	96

Sumber: Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, 2020

Data berdasarkan pada Warisan Budaya yang telah dikaji, diusulkan dan ditetapkan menjadi Cagar Budaya (ditetapkan dengan SK Menteri, SK Gubernur DIY maupun SK Bupati Bantul). Pelestarian benda, situs, dan kawasan cagar budaya di Kabupaten Bantul meliputi:

- Benda bergerak berjumlah 295 buah yang terdiri dari arca, watu gilang, lingga, yoni, dan lain-lain;
- Situs berjumlah 3 buah berupa watu songkamal, watu lindung di Kecamatan Piyungan, dan watu gilang di Kecamatan Pandak;
- Kawasan Cagar Budaya ada 3 lokasi terdiri dari makam raja-raja di Imogiri, Keraton Pleret, Kotagede,
- Pengelolaan kawasan budaya yaitu pengelolaan museum, warisan dan cagar budaya serta taman budaya di daerah melalui kegiatan lawatan sejarah ke Museum di Kabupaten Bantul (misal: Museum Wayang Kekayon di Kecamatan Banguntapan), Kompleks Masjid Jami Kotagede, Kompleks Makam Raja Mataram I Kotagede, dan penilaian obyek yang diduga sebagai cagar budaya. Diharapkan potensi seni budaya, sejarah dan purbakala daerah dapat terinformasikan, terdokumentasi, dan terlindungi dengan baik.



Sumber: Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, 2020

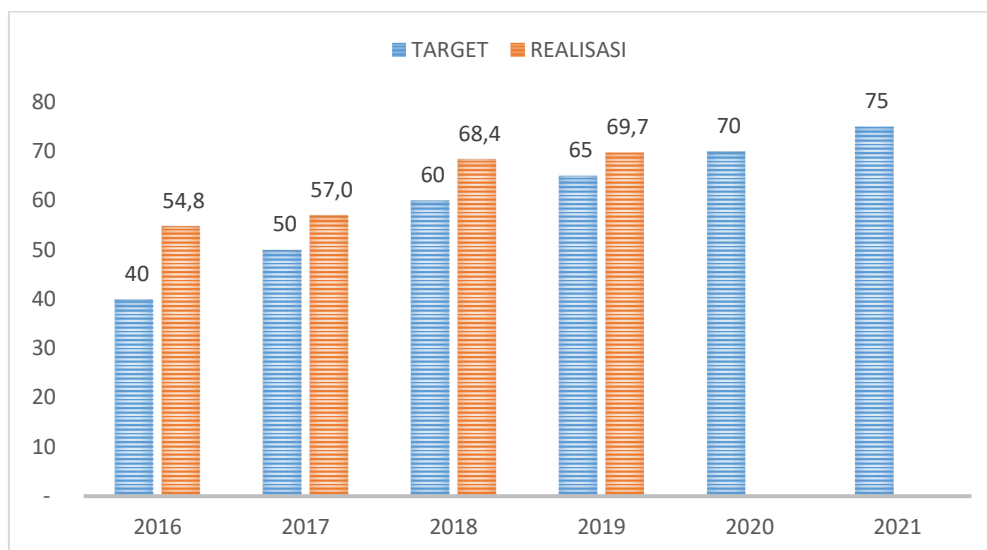
Gambar 2.46 Peta Sebaran Cagar Budaya di Kabupaten

4) Indeks Pembangunan Kebudayaan

Dengan adanya UU Nomor: 5 Tahun 2017 Tentang: Pemajuan Kebudayaan, menjadi tampak jelas bahwa kebudayaan memegang peranan penting dalam segala lini pembangunan. Undang-Undang ini mengamanahkan agar kebudayaan yang ada diperlakukan dengan sebaik-baiknya melalui tindakan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Berdasar Undang-Undang tersebut pula, tiap daerah memiliki kebijakan masing-masing terkait pengelolaan objek-objek kebudayaan. Capaian daerah dalam mengelola dan melestarikan kebudayaan tersebut sudah selayaknya mendapatkan apresiasi. Salah satu dukungan Pemerintah dalam mengapresiasi daerah dalam mengelola kebudayaannya tercermin dalam Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK).

Sebagai bagian dari Provinsi DIY yang memiliki Indeks Pembangunan Kebudayaan Tertinggi Nasional (tahun 2019 : 73,79), sudah selayaknya Kabupaten Bantul turut bangga dan mendapatkan angin segar atas prestasi tersebut. Selain prestasi, tentu saja kondisi tersebut merupakan

suatu tantangan bagi Kabupaten/Kota termasuk Kabupaten Bantul untuk turut berpartisipasi dalam memelihara, mempertahankan, dan meningkatkan kinerja bidang kebudayaannya.



Sumber: Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, 2020

Gambar 2.47 Target dan Realisasi IPK Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021

Capaian kinerja dengan Indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan di Kabupaten Bantul, terhitung sejak tahun 2016 sampai tahun 2019 telah melampaui target capaian (Tahun 2019: 69,70). Kabupaten Bantul telah berusaha memetakan capaian kinerja pembangunan kebudayaan sejak tahun 2016, langkah tersebut diperkuat dengan kegiatan inventarisasi objek-objek kebudayaan serta menggali hambatan serta dukungan dalam pembangunan kebudayaan di wilayah ini.

5) Desa Budaya

Pengembangan desa budaya bertujuan untuk lebih mengaktualisasikan potensi dan mengkonservasi kekayaan budaya yang dimiliki. Pada tahun 2019 terdapat 12 desa budaya di Kabupaten Bantul, sebagai berikut:

1. Desa Mulyodadi Bambanglipuro,
2. Desa Trimurti Srandakan,
3. Desa Srigading Sanden
4. Desa Dlingo Dlingo,

5. Desa Triwidadi Pajangan,
6. Desa Seloharjo Pundong.
7. Desa Selopamioro Imogiri,
8. Desa Sitimulyo Piyungan,
9. Desa Sabdodadi Kecamatan Bantul,
10. Desa Gilangharjo Pandak,
11. Desa Bangunjiwo Kasihan dan
12. Desa Panggungharjo Sewon.

Tabel 2.123 Data Kelompok Seni dan Budaya di Kabupaten Bantul Tahun 2019

No	Jenis Kelompok	Desa	Kecamatan
BANTUL			
1	PAGUYUBAN SENI TRADISIONAL “ RENO BUDOYO “	Sabdodadi	Bantul
2	Seni Terbang Campursari “ SEKAR PANGKUR “	Bantul	Bantul
3	Paguyuban Kesenian “ SEKAR PANGKUR “	Bantul	Bantul
4	Paguyuban Keprajuritan “ SONGGO RUMEKSO “	Sabdodadi	Bantul
5	Perkumpulan Jamaah Sholawatan Ibu-Ibu “ MUDHO PALUPI “	Palbapang	Bantul
6	Kelompok Keroncong “BAHANA KRISNA MURTI “	Trirenggo	Bantul
7	Paguyuban Campur Sari “ MADU RATIH “	Sabdodadi	Bantul
8	Sanggar Seni “ CANDRIKA ADIKARA “	Sabdodadi	Bantul
9	Sanggar Seni Karawitan “ SEKAR RINI “	Sabdodadi	Bantul
10	Sanggar Pedalangan Dan Karawitan “ REDISONO “	Sabdodadi	Bantul
11	Kelompok Seni Hadroh “ NURUL HIDAYAH “	Sabdodadi	Bantul
12	Kelompok Seni Karawitan Ngudi Laras “ KUNCUP MEKAR“	Sabdodadi	Bantul
13	Kelompok Karawitan “ TRI PUSPITA RINI “	Trirenggo	Bantul
14	Sanggar Seni Musik “ JAVA ENSEMBLE “	Bantul	Bantul
15	Kesenian Tradisional “ REOG KUBRO “	Trirenggo	Bantul
16	Paguyuban Seni Dan Budaya “ BREGODO SRIKANDI PUTRI “	Sabdodadi	Bantul
17	Komunitas Seni Macapat “SEKAR TAMAN SARI “	Trirenggo	Bantul
18	“YAYASAN LAKSITA BUDAYA JAWA “	Palbapang	Bantul
19	Sanggar tari “ NUANSA TRADISI “	Sabdodadi	Bantul
20	Gejok Lesung “ SIDOASIH “	Sabdodadi	Bantul
21	Paguyuban Ketoprak Mataram “ LESTARI BUDOYO “	Palbapang	Bantul
22	Paguyuban Seni Sholawatan “RISMADA“	Sabdodadi	Bantul
23	Paguyuban Seni Sholawatan “RISMADA“	Sabdodadi	Bantul
24	Kesenian Reog “ MANGGOLO MUDHO “	Sabdodadi	Bantul
25	Paguyuban Reog “ KI AGENG SELO MANUNGKAL “	Palbapang	Bantul

No	Jenis Kelompok	Desa	Kecamatan
26	Sanggar Budaya “ RINENGGO MANUNGGAL KARSA “	Trirenggo	Bantul
27	Pendapa Mudha Budaya	Trirenggo	Bantul
28	Wulan Tumanggal	Bantul	Bantul
29	Seni Baca Al Qur'an“JAM'YYATUL QURRA'WAL HUFFADZ AL WAHIDIYAH“	Palbapang	Bantul
30	"LASKAR TEATER BANTUL"	Bantul	Bantul
31	Ketoprak Mataram "MADYO LARAS"	Ringinharjo	Bantul
32	PAGUYUBAN REOG “RIA MUDA KELANA “	Trirenggo	Bantul
33	PAGUYUBAN GEJOG LESUNG “MAHARANI“	Bantul	Bantul
34	SANGGAR BUDAYA “ AR RAIHAN “	Sabdodadi	Bantul
35	Sanggar Seni Wulan Tumanggal	Bantul	Bantul
36	Paguyuban Kesenian Bregodo Yudo Manggolo	Bantul	Bantul
37	paguyuban kesenian Jathilan Satria Pringgondani	Bantul	Bantul
38	Kelompok Seni “Gema Berdaya”	Ringinharjo	Bantul
39	Sanggar “Tunas Budoyo”	Palbapang	Bantul
40	Paguyuban “Krido Mudho Turonggo”	Palbapang	Bantul
41	Kesenian Hadroh “Al Anwar”	Palbapang	Bantul
42	Kelompok Seni “Pena Kartika”	Trirenggo	Bantul
43	Paguyuban Macapat “Dwija Laras”	Palbapang	Bantul
44	Paguyuban Seni “Pendapa Mudha Budaya”	Trirenggo	Bantul
45	Sanggar Seni Budaya “Bina Muda Budaya”	Trirenggo	Bantul
46	Paguyuban Kesenian Reog “Madyo Laras Putro”	Ringinharjo	Bantul
47	Paguyuban Seni Jathilan “Kudho Mataram”	Trirenggo	Bantul
48	Kesenian Jathilan Campursari “Turonggo Wironggo Mudo”	Trirenggo	Bantul
49	Sanggar Seni Kethoprak “Wader Pari”	Palbapang	Bantul
50	Kelompok Teater “Kawat”	Trirenggo	Bantul
51	Paguyuban Hadroh “Qolbun Sa’ad”	Palbapang	Bantul
52	Sanggar Seni Hadroh “Manunggaling Roso”	Bantul	Bantul
53	Sanggar Seni Hadroh “Qolbun Salim”	Trirenggo	Bantul
54	Sanggar Seni Musik “Dewi Kunthi”	Sabdodadi	Bantul
55	Paguyuban Reog “Rias Budaya”	Trirenggo	Bantul
56	Paguyuban Jathilan “Rias Turonggo Mudo”	Trirenggo	Bantul
57	Paguyuban Jathilan Kreasi Baru “Kudho Marsudi Budoyo”	Trirenggo	Bantul
58	Paguyuban Kesenian Reog “Kelana Muda”	Palbapang	Bantul
59	Paguyuban Kethoprak “Tjipta Budaya Bantul”	Bantul	Bantul
60	Paguyuban Kesenian Jathilan “Melati Mudho”	Bantul	Bantul
61	Paguyuban Jathilan “Satriyo Kudo Sembodo”	Bantul	Bantul
62	Sanggar Seni dan Budaya “Roro Jonggrang”	Bantul	Bantul
63	Sanggar “Laksita Budaya”	Palbapang	Bantul

No	Jenis Kelompok	Desa	Kecamatan
64	Sanggar Seni “Padmasana”	Bantul	Bantul
65	Kelompok Gejog Lesung “Bucan Kolingin”	Sabdodadi	Bantul
66	Sanggar Seni Musik “Akrida”	Sabdodadi	Bantul
67	Sanggar Seni “Sekar Kinanti”	Bantul	Bantul
68	Sanggar Seni Tari “Lestari Budaya”	Palbapang	Bantul
69	Kelompok Kesenian Jathilan “Lestari Budaya”	Palbapang	Bantul
70	Kelompok Bregodo “Kyai Mojo”	Palbapang	Bantul
71	Paguyuban Kethoprak “Sekartaji”	Bantul	Bantul
72	Paguyuban Kesenian Jathilan “Turonggo Among Mudo Budoyo”	Bantul	Bantul
73	Sanggar Seni “Bina Natya Widya”	Bantul	Bantul
74	Kelompok Teater “Angkolade”	Trirenggo	Bantul
SEWON			
75	Sanggar Musik Etnis “TALIWANGSA “	Pendowoharjo	Sewon
76	Kelompok Seni dan Budaya “SATRIA KEMPLING “	Timbulharjo	Sewon
77	Sanggar Wayang “W A L I S A N G A “	Pendowoharjo	Sewon
78	Sanggar Wayang “WALISANGA “	Pendowoharjo	Sewon
79	“ SENI HADROH MASJID BAITUL MUKMININ “	Panggunharjo	Sewon
80	Paguyuban Seni Karawitan “ TRESNA BUDAYA “	Timbulharjo	Sewon
81	Sanggar Seni “ PUSPO RINONCE “	Timbulharjo	Sewon
82	“ KOMUNITAS TEATER BANTUL “	Pendowoharjo	Sewon
83	Sanggar Seni “ DWI PUTRI “	Timbulharjo	Sewon
84	Komunitas Kethoprak “ LINTANG KUMEDHAB “	Bangunharjo	Sewon
85	Sanggar Seni “ SUMEKAR “	Timbulharjo	Sewon
86	Paguyuban Kesenian Jathilan “ BEKSA WIRATAMA “	Timbulharjo	Sewon
87	Paguyuban Seni Karawitan “ SRI KUNCARA “	Pendowoharjo	Sewon
88	Paguyuban Ketoprak “ MANUNGAL BUDAYA “	Panggunharjo	Sewon
89	Paguyuban Seni Kethoprak “ SAMAN BUDAYA “	Bangunharjo	Sewon
90	Komunitas Seni “CANDA NADA “	Pendowoharjo	Sewon
91	Paguyuban Kesenian “ JAVA SONGS PROJO TAMANSARI “	Timbulharjo	Sewon
92	Sanggar Seni “KRESNA MUDA “	Timbulharjo	Sewon
93	Paguyuban Orkes Keroncong “ GITA NADA “	Timbulharjo	Sewon
94	Paguyuban Kesenian Bangun Budoyo “HANDAYANI “	Bangunharjo	Sewon
95	“KOMUNITAS RUMAH SENI SAWAH LADANG “	Panggunharjo	Sewon
96	Sanggar Anak “ SARASWATI “	Panggunharjo	Sewon
97	Paguyuban Karawitan dan Jathilan “ KRIDO BUDOYO “	Panggunharjo	Sewon
98	“ KOESMANIA BANTUL “	Pendowoharjo	Sewon
99	Jathilan New Version “ MANUNGAL BUDAYA “	Panggunharjo	Sewon
100	Paguyuban Seni Karawitan “ KUMOLO RETNO “	Panggunharjo	Sewon

No	Jenis Kelompok	Desa	Kecamatan
101	Group Musik Koesplusan The Neighbors	Panggunharjo	Sewon
102	Wargo Laras	Panggunharjo	Sewon
103	Grup Hadroh "RUMAH TAHFIDZ AL ANSHOR"	Panggunharjo	Sewon
104	Kelompok Seni Sholawat "JAMI'ATUL MUSLIMIN"	Panggunharjo	Sewon
105	Sanggar Seni "SUGENG LESTARI"	Timbulharjo	Sewon
106	Campursari "NGESTI WIROMO"	Bangunharjo	Sewon
107	Bergodo "WIROTAMTOMO"	Panggunharjo	Sewon
108	Bergodo "LANGENSARI"	Panggunharjo	Sewon
109	Komunitas Seni Budaya "SARI RASA TUNGGAL "	Pendowoharjo	Sewon
110	Sanggar studi sastra dan teater "SILA "	Pendowoharjo	Sewon
111	Paguyuban "LANGEN LARAS BUDAYA "	Pendowoharjo	Sewon
112	Kelompok Seni Sholawatan Jawi "JAMI'ATUL MUSLIMIN "	Panggunharjo	Sewon
113	Paguyuban Kesenian "JOLELO "	Panggunharjo	Sewon
114	Paguyuban Seni Sholawat Jawi "MUDO PAKARTI DONO LESTARI"	Timbulharjo	Sewon
115	Paguyuban Sholawat Arab Jawi "CAHYANING QOLBU"	Panggunharjo	Sewon
116	Sanggar "KADEMANGAN"	Bangunharjo	Sewon
117	Paguyuban Kesenian Gejog Lesung "MUKTI LESTARI"	Pendowoharjo	Sewon
118	Komunitas Seni dan Budaya "ARKA ASKARA"	Panggunharjo	Sewon
119	Sanggar Seni Budaya "MBELIK DHADHAP"	Panggunharjo	Sewon
120	Kelompok Seni Sholawat Jawi "WURSITO LUHUR"	Panggunharjo	Sewon
121	Sanggar Seni "LOH JINAWI"	Panggunharjo	Sewon
122	Paguyuban Kesenian Hadroh "JABARJUS"	Pendowoharjo	Sewon
123	Sholawatan Jawi "Ngudi Utomo"	Panggunharjo	Sewon
124	Group "HADRO As-SALAFY"	Panggunharjo	Sewon
125	Paguyuban Kesenian "TURONGGO KRIDHO"	Pendowoharjo	Sewon
126	grop orkes kroncong "DIHARSMA FAMILY"	Pendowoharjo	Sewon
127	paguyuban hadroh "AL-HIDAYAH"	Pendowoharjo	Sewon
128	majelis sholawat & dzikir "LASKAR ZULFIKAR "	Pendowoharjo	Sewon
129	PAGUYUBAN SENIMAN TARI BANTUL "KAWENTAR"	Panggunharjo	Sewon
130	PAGUYUBAN SENI "MUKTI LARAS "	Pendowoharjo	sewon
131	GROUP MUSIK "HEART PLUS "	Pendowoharjo	Sewon
132	PAGUYUBAN JATHILAN "KUDO MATARAM "	Pendowoharjo	Sewon
133	Sholawat Djawi Kiat Shollu	Panggunharjo	Sewon
134	Sanggar Tari Sekar Kusuma	Panggunharjo	Sewon
135	KESENIAN JATHILAN "Asandy Turonggo Mudho"	Bangunharjo	Sewon
136	FORUM KOMUNIKASI PEKERJA SENI "FKPS"	Timbulharjo	Sewon
137	KELOMPOK SENI "Sedhut Senut"	Bangunharjo	Sewon
138	KOMUNITAS SENI "Difabel and Friend Community"	Panggunharjo	Sewon
139	PAGUYUBAN KETHOPRAK "BASKORO MANUNGGAL BUDAYA"	Bangunharjo	Sewon
140	Kelompok Seni "Panggunharjo Nastiti"	Panggunharjo	Sewon
141	Sanggar Seni "Bangunharjo Lukito"	Bangunharjo	Sewon

No	Jenis Kelompok	Desa	Kecamatan
142	Kelompok Seni “Komunitas Sanggar Seni Bantul”	Timbulharjo	Sewon
143	Lembaga Persatuan Pengrajin “Guyub Rukun”	Pendowoharjo	Sewon
144	Sanggar Seni Tari, Suara, Peran “Pelangi”	Paggungharjo	Sewon
145	Paguyuban Seni Kethoprak “Anggoro Manis”,	Pendowoharjo	Sewon
146	Paguyuban Seni Tradisi “Tunggal Roso Ngesti Budaya”	Pendowoharjo	Sewon
147	Sanggar Seni “Bangun Laras Budaya	Bangunharjo	Sewon
148	Paguyuban Kesenian Karawitan “Timbul Budoyo”	Timbulharjo	Sewon
149	Paguyuban Panatacara Yogyakarta Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Bantul	Paggungharjo	Sewon
150	Sanggar “Sarwi jaya”	Timbulharjo	Sewon
151	Sanggar Seni “Rumah Kreatif Bintang”	Bangunharjo	Sewon
152	Paguyuban Jemparingan “Paggungharjo”	Paggungharjo	Sewon
153	Paguyuban Karawitan “Panggung Laras Budaya”	Paggungharjo	Sewon
154	Kelompok Teater “Renjana”	Paggungharjo	Sewon
155	Sanggar Tari “Fatmawati”	Pendowoharjo	Sewon
156	Sanggar Bregada “Pakoe Wodjo”	Bangunharjo	Sewon
157	Sanggar Musik “Sehati”	Bangunharjo	Sewon
158	Paguyuban Karawitan & Orgen Tunggal “Mudo Laras”	Pendowoharjo	Sewon
159	Paguyuban Kesenian Bregodo “Sorowoyo”	Paggungharjo	Sewon
160	Kelompok Kesenian Sholawat Laras Madyo “Ngesti Pertiwi”	Bangunharjo	Sewon
161	Paguyuban Thek Thonk “Nglaras Swara”	Paggungharjo	Sewon
162	Kelompok Seni “Studiogambargerak”	Pendowoharjo	Sewon
163	Sanggar “Araratan”	Pendowoharjo	Sewon
KASIHAN			
164	SANGGAR SENI PEDALANGAN “ WIRA BUDAYA “	Tirtonirmolo	Kasihan
165	SANGGAR SENI “ AMARTA BUDAYA “	Ngestiharjo	Kasihan
166	SANGGAR SENI “ WIRA BUDAYA “	Tirtonirmolo	Kasihan
167	SANGGAR SENI “ TEATER GARASI “	Tirtonirmolo	Kasihan
168	Paguyuban “ WAHYU MANUNGAL “	Bangunjiwo	Kasihan
169	Padepokan Seni Budaya dan Sejarah “ PADEPOKAN CAHAYA BUANA “	Tamantirto	Kasihan
170	Sanggar Tari “ UDANSORE “	Ngestiharjo	Kasihan
171	Paguyuban Seni “ NITI BUDAYA “	Ngestiharjo	Kasihan
172	Kesenian Tradisional Jathilan Kreasi Baru “ TURONGGO ARUM KUSUMO “	Ngestiharjo	Kasihan
173	Kelompok Kesenian Jathilan “ KUDHO SETYO BAWONO “	Bangunjiwo	Kasihan
174	Kelompok Kesenian Jathilan “ KELORAN PUTRO KENCONO “	Tirtonirmolo	Kasihan
175	Kesenian Jathilan Kreasi Baru “ TURONGGO PUTRO KENCONO “	Tirtonirmolo	Kasihan

No	Jenis Kelompok	Desa	Kecamatan
176	Paguyuban Karawitan " JAYA BUDAYA "	Bangunjiwo	Kasihan
177	Paguyuban Karawitan " SEKAR ONGGORINI "	Ngestiharjo	Kasihan
178	Paguyuban Kesenian Kethoprak Mataram "TRESNO BUDHOYO "	Tamantirto	Kasihan
179	" PAGUYUBAN BREGODO WIROSOBO "	Ngestiharjo	Kasihan
180	Paguyuban " ACAPELLA MATARAMAN "	Bangunjiwo	Kasihan
181	" STUDIO OMAH CANGKEM "	Bangunjiwo	Kasihan
182	Sanggar Seni " AKAR DANCE THEATER "	Bangunjiwo	Kasihan
183	Sanggar Seni Budaya Jawa " SWARA LARE "	Tirtonirmolo	Kasihan
184	Organisasi Budaya " JATHILAN KUDHO SAPUTRO "	Bangunjiwo	Kasihan
185	Paguyuban Kethoprak " MADUKACERMO "	Bangunjiwo	Kasihan
186	Kesenian Jathilan " KUDHO KENCONO "	Bangunjiwo	Kasihan
187	Sanggar Budaya " ARGO SEKAR JIWO "	Bangunjiwo	Kasihan
188	Kesenian Jathilan Kreasi Baru " TURONGGO BUDOYO "	Ngestiharjo	Kasihan
189	Paguyuban Karawitan "TIMBUL LARAS "	Bangunjiwo	Kasihan
190	Paguyuban Rebana " NGIDAM SUWARGO "	Bangunjiwo	Kasihan
191	Paguyuban Seni Tari Jathilan Kreasi Baru "SEKAR KINASIH	Bangunjiwo	Kasihan
192	Bregodo " WIRA PERTIWI "	Tirtonirmolo	Kasihan
193	Paguyuban Seni Jathilan " KUDHO MANUNGGAL "	Bangunjiwo	Kasihan
194	Paguyuban Kesenian Jathilan Jawa " TURONGGO SETO "	Bangunjiwo	Kasihan
195	Bergodo Prajurit "WIRO TAMTOMO "	Bangunjiwo	Kasihan
196	" KAMPUNG BUDAYA NGESTI BUDAYA "	Ngestiharjo	Kasihan
197	Paguyuban Seni Tari " LANGEN KUSUMA "	Tamantirto	Kasihan
198	Paguyuban Panembromo " KUSUMA LARAS "	Tamantirto	Kasihan
199	Yayasan " BAGONG KUSSUDIARDJA "	Tamantirto	Kasihan
200	Sanggar Seni Ketoprak Anak " AMONG MUDHO PUSPITO BUDHOYO "	Tamantirto	Kasihan
201	Paguyuban Jathilan " TRESNO BUDOYO "	Tamantirto	Kasihan
202	Paguyuban Bergodo Prajurit " PRAWIRO YUDHO "	Tamantirto	Kasihan
203	Paguyuban Karawitan Ibu-Ibu " PUSPITA BUDAYA "	Tamantirto	Kasihan
204	Paguyuban Prajurit " TIRTO YUDHO "	Tamantirto	Kasihan
205	Group Rebana Bilal Bin Rabbah	Bangunjiwo	Kasihan
206	Paguyuban Seni Wayang Wong Suko Budoyo	Bangunjiwo	Kasihan
207	Sanggar Tari Bakti Taruno Ngalogo	Tamantirto	Kasihan
208	Sanggar Seni "GOEBOEK POENOKAWAN"	Ngestiharjo	Kasihan
209	Widya Budaya	Ngestiharjo	Kasihan
210	Gedruk "TOLAK BALANITIPRAYAN"	Ngestiharjo	Kasihan
211	Paguyuban Kethoprak Mataram "WARGO BUDHOYO"	Bangunjiwo	Kasihan
212	Paguyuban Seni Budaya "TRI MUDHO BUDHOYO"	Tamantirto	Kasihan

No	Jenis Kelompok	Desa	Kecamatan
213	Seni Kaprajuritan "BERGODO KETANGGUNG"	Tamantirto	Kasihan
214	Campursari "TANPO ARAN"	Tamantirto	Kasihan
215	Paguyuban Karawitan "KUMARA LARAS"	Tamantirto	Kasihan
216	Sanggar Seni "MANGGALA BUDAYA"	Bangunjiwo	Kasihan
217	Sholawat "BABUSSALAM"	Bangunjiwo	Kasihan
218	Sholawat "BABUSSALAM"	Bangunjiwo	Kasihan
219	Sanggar "BODRONOYO"	Bangunjiwo	Kasihan
220	Campursari "KATON LARAS"	Bangunjiwo	Kasihan
221	Sanggar "ISMAYA"	Selopamioro	Kasihan
222	Sanggar "RUPA JAWA"	Bangunjiwo	Kasihan
223	Teater Kereta	Tirtonirmolo	Kasihan
224	Kesenian Jathilan Kreasi Baru "ANGGER KINANTI"	Bangunjiwo	Kasihan
225	Paguyuban Karawitan "MARSUDI BUDOYO"	Bangunjiwo	Kasihan
226	Paguyuban Seni Ketoprak "AMONG BUDOYO"	Bangunjiwo	Kasihan
227	Karawitan "AMONG RAOS"	Bangunjiwo	Kasihan
228	Paguyuban Ketoprak "AMUSA BUDAYA"	Bangunjiwo	Kasihan
229	"ASOSIASI NASYID NUSANTARA WILAYAH YOGYAKARTA"	Tirtonirmolo	Kasihan
230	PAGUYUBAN SENI HADROH "AL HUSNA"	Ngestiharjo	Kasihan
231	PAGUYUBAN SENI RUMAH BUDAYA "SEKAR PAKIS"	Ngestiharjo	KasihanS
232	PAGUYUBAN KETHOPRAK "SEKAR NIRMALA"	Tirtonirmolo	Kasihan
233	SANGGAR SENI "SEJATI"	Ngestiharjo	Kasihan
234	PAGUYUBAN KETHOPRAK "SURYA TAMTAMA"	Bangunjiwo	Kasihan
235	PAGUYUBAN KETHOPRAK "PANCA HASTA BUDAYA"	Ngestiharjo	Kasihan
236	Paguyuban Seni Budaya Sejarah Padepokan Cahaya Buana	Tamantirto	Kasihan
237	Paguyuban Bregada Winata Manggala	Ngestiharjo	Kasihan
238	Sanggar Seni Ngesti Langen Budaya	Ngestiharjo	Kasihan
239	SANGGAR KESENIAN "Sanggar Bambu"	Tamantirto	Kasihan
240	KELOMPOK KESENIAN "Dadung Awuk"	Bangunjiwo	Kasihan
241	PAGUYUBAN SENI KETHOPRAK "Krida Manunggal"	Bangunjiwo	Kasihan
242	SANGGAR SENI DAN TARI "DHARMA SATI"	Tirtonirmolo	Kasihan
243	KESENIAN HADROH "JAMASAN"	Bangunjiwo	Kasihan
244	PAGUYUBAN KETHOPRAK MATARAM "WARGA BUDAYA"	Bangunjiwo	Kasihan
245	PAGUYUBAN MACAPAT "LESTARI BUDAYA"	Bangunjiwo	Kasihan
246	Paguyuban Mocapat "Sekar Arum"	Bangunjiwo	Kasihan
247	Paguyuban Seni "Bangun Turmukti"	Bangunjiwo	Kasihan
248	Kelompok Teater "Garasi"	Ngestiharjo	Kasihan
249	Paguyuban Kethoprak "Tirto Budoyo"	Tirtonirmolo	Kasihan
250	Paguyuban Hadroh "Jamoesh Kalimo"	Tirtonirmolo	Kasihan
251	Paguyuban Karawitan "Kenanga Laras"	Tirtonirmolo	Kasihan
252	Paguyuban Jathilan "Cahaya Muda"	Tirtonirmolo	Kasihan

No	Jenis Kelompok	Desa	Kecamatan
253	Paguyuban Macapat “Suka Budaya”	Tirtonirmolo	Kasihan
254	Kethoprak Mataram “Pamong Budoyo”	Bangunjiwo	Kasihan
255	Tempat Pelatihan Dalang Anak Sanggar “Ayodya”	Bangunjiwo	Kasihan
256	Kelompok Kesenian Khosidah “Miftakhul Jannah”	Bangunjiwo	Kasihan
257	Paguyuban Kesenian Jathilan Jawa “Bekso Kudho Pangurip”	Bangunjiwo	Kasihan
258	Paguyuban Kesenian Karawitan “Laras Madyo”	Srihardono	Kasihan
259	Paguyuban Kethoprak “Ponco Kumboro”,	Tamantirto	Kasihan
260	Yayasan “Bagong Kassudiardja”	Tamantirto	Kasihan
261	Organisasi Keprajuritan “Bregodo Wirobayan”	Tirtonirmolo	Kasihan
262	Paguyuban Bregada Keprajuritan “Karang Cempaka”	Trtonirmolo	Kasihan
263	Sanggar Budaya “Grahatama”	Bangunjiwo	Kasihan
264	Paguyuban Kethoprak Mataram “Nitibudoyo”	Ngetiharjo	Kasihan
265	Paguyuban Seni Jathilan “Kudho Manunggal”	Ngestiharjo	Kasihan
266	Paguyuban Kesenian dan Kebudayaan Yogyakarta “Nyawiji Budaya”	Tamantirto	Kasihan
267	Paguyuban Nasyid “Ali Sahaja”	Bangunjiwo	Kasihan
268	Paguyuban Seni Karawitan “Laras Madumurti”	Tamantirto	Kasihan
269	Sanggar Seni “Raras”	Ngestiharjo	Kasihan
270	Sanggar Seni “Sedulur Nyeni”	Tamantirto	Kasihan
271	Paguyuban Karawitan “Sekar Laras Iromo”	Tamantirto	Kasihan
272	Kelompok Teater “Wanita Ngunandhika (WN)”	Ngestiharjo	Kasihan
273	Paguyuban Bregodo “Suropakis”	Ngestiharjo	Kasihan
274	Paguyuban Seni Karawitan “Wijaya Kusuma”	Tamantirto	Kasihan
275	Kelompok Kesenian Gejog Lesung “Ngudi Laras”	Bangunjiwo	Kasihan
276	Organisasi Seni Karawitan “Werdo Laras”	Bangunjiwo	Kasihan
277	Kelompok Sandiwara “Sawo Mateng”	Tirtonirmolo	Kasihan
278	Kelompok Teater “Kalanari”	Tirtonirmolo	Kasihan
279	Kelompok Jathilan Kreasi Baru “Madu Kumoro”	Tirtonirmolo	Kasihan
280	Sanggar Seni dan Budaya “Moro Kangen”	Tamantirto	Kasihan
281	Kelompok Bregodo “Wira Mudha”	Bangunjiwo	Kasihan
282	Kelompok Kethoprak “Wira Mudha Budaya”	Bangunjiwo	Kasihan
SEDAYU			
283	PAGUYUBAN JATILAN “KUDHO JAMBON MANUNGGAL “	Argosari	Sedayu
284	PAGUYUBAN KESENIAN JATILAN “TURONGGO BUDOYO “	Argodadi	Sedayu
285	Kelompok Kesenian Karawitan Sedayu “SEDYO MANUNGGAL “	Argorejo	Sedayu
286	Sanggar Seni Jatilan “ KUDHO SEMBODO “	Argosari	Sedayu
287	Kesenian Tradisional Jathilan Kreasi Baru “TURONGGO AJI BUDOYO “	Argosari	Sedayu
288	Paguyuban Karawitan “ SARI BUDOYO “	Argodadi	Sedayu

No	Jenis Kelompok	Desa	Kecamatan
289	Paguyuban Seni Jathilan “ MARDI RAHARJO “	Argorejo	Sedayu
290	Sanggar Seni “ SURYA SEKAR KENCANA “	Argosari	Sedayu
291	Paguyuban Sinau Seni Budaya Pemuda Kreativitas Dan Kebangsaan “ KSATRIA MATARAM “	Argomulyo	Sedayu
292	“ TEATER PELOPOR “	Argomulyo	Sedayu
293	Paguyuban Seni “ TARUNA BUDAYA “	Argosari	Sedayu
294	Paguyuban Seni Budaya “ABIPROYO ARGO BUDAYA“	Argosari	Sedayu
295	Paguyuban Seni “TARUNA BUDAYA “	Argosari	Sedayu
296	Paguyuban “LARAS IRAMA “	Argorejo	Sedayu
297	Sanggar Seni " TIRTO ARUM SARI "	Argomulyo	Sedayu
298	Sanggar Tari“LANGGENG BUDOYO“	Argomulyo	Sedayu
299	PAGUYUBAN KESENIAN “KRIDO LANGEN WIROGO“	Argomulyo	Sedayu
300	PAGUYUBAN SENI "SURO PAWIRO"	Argomulyo	Sedayu
301	KELOMPOK KESENIAN JATHILAN "KUDO LESTARI"	Argodadi	Sedayu
302	KELOMPOK KESENIAN KETHOPRAK "BAYU AJI"	Argodadi	Sedayu
303	KELOMPOK KESENIAN GELOG LESUNG "GUYUB RUKUN"	Argodadi	Sedayu
304	Kelompok Seni “Khadi Siswo”	Argodado	Sedayu
305	Sanggar Seni “Omah Djoget Sedayu”	Argorejo	Sedayu
306	Sanggar Seni “Argosari Manunggal”	Argosari	Sedayu
307	Sanggar Tari “Laksita Sedayu”	Argosari	Sedayu
308	Kelompok Kesenian Hadroh “Panembahan Cokrowesi”	Argodadi	Sedayu
309	Paguyuban Seni “Argo wasesa”	Argorejo	Sedayu
310	Paguyuban Orkes Keroncong “Sekar Asmara”	Argosari	Sedayu
311	Kesenian Jathilan Kreasi Baru “Mari Kangen”	Argodadi	Sedayu
312	Paguyuban Kethoprak “Sedyo Manunggal Budoyo”	Argorejo	Sedayu
313	Paguyuban Kesenian Jathilan “Mardi Mulyo”	Argomulyo	Sedayu
314	Paguyuban Seni Jathilan “Satrio Karang”	Argomulyo	Sedayu
315	Paguyuban Macapat & Geguritan “Sekar Mawar Arum”	Argomulyo	Sedayu
316	Paguyuban Seni Musik “Karidho Plus”	Argomulyo	Sedayu
317	Sanggar Seni “Merdusari”	Argosari	Sedayu
PAJANGAN			
318	Pagayuban Seni Karawitan “ SEKAR BUDAYA “	Triwidadi	Pajangan
319	Pagayuban Seni Jathilan “ TRI MUDHO BUDOYO “	Triwidadi	Pajangan
320	Perkumpulan Seni Komunitas Karawitan Bantul “ TRIMO LOTHONG “	Triwidadi	Pajangan
321	Paguyuban Gejok Lesung “ MEKAR SARI “	Triwidadi	Pajangan
322	Group Angklung “ ERMAKA NADA PERCUSSION “	Guwosari	Pajangan

No	Jenis Kelompok	Desa	Kecamatan
323	Organisasi Budaya “ SRI MUDHA BUDAYA “	Sendangsari	Pajangan
324	Sanggar Seni “ PENDOPO LARAS “	Sendangsari	Pajangan
325	Paguyuban Seni Kerawitan “ NGESTI LARAS “	Triwidadi	Pajangan
326	Paguyuban Macapat “ ARUM SARI “	Guwosari	Pajangan
327	Paguyuban Tari Kepang “ KUDHO JATI KUMORO “	Triwidadi	Pajangan
328	Sanggar Seni “KRIDHO BEKSO PAMBONG BUDOYO “	Triwidadi	Pajangan
329	“BEKSO KUDO MATARAM “	Sendangsari	Pajangan
330	Seni Sholawat & Hadroh “AL-MUSAFFA “	Sendangsari	Pajangan
331	Bregodo Karebet “JATI MANGGOLO “	Sendangsari	Pajangan
332	Bregodo Karebet “DEWI MANGGOLO “	Sendangsari	Pajangan
333	Sholawatan Jowo “TOMBO ATI “	Sendangsari	Pajangan
334	Paguyuban Seni Reog “BEKSO LUMAKSONO “	Sendangsari	Pajangan
335	“ SANGGAR PERTIWI “	Sendangsari	Pajangan
336	Jathilan Kreasi “ KUDHO BIROWO “	Sendangsari	Pajangan
337	“HADROH ASSIBYANUL MUKHSININ “	Sendangsari	Pajangan
338	Sholawat Rebana “MUSTIKA NADA “	Sendangsari	Pajangan
339	Kesenian Sholawat Jawa “AL-HUDA “	Sendangsari	Pajangan
340	Sholawat Maulud Gendring “MEKAR ASRI “	Sendangsari	Pajangan
341	Paguyuban Seni Macapat “SEKAR ASRI “	Sendangsari	Pajangan
342	Sholawat Jawi “NURUL ISLAM “	Sendangsari	Pajangan
343	Paguyuban Sholawatan Maulud nabi “LARAS MADYO “	Sendangsari	Pajangan
344	Paguyuban Seni Krawitan “MUDO BUDOYO “	Sendangsari	Pajangan
345	Paguyuban Campursari “KEMBANG EMAS “	Sendangsari	Pajangan
346	Sanggar Tari “SUKMA PAVO “	Sendangsari	Pajangan
347	Sholawat Nabi “TRI MANUNGGAL “	Sendangsari	Pajangan
348	Macapat “SEKAR SARI “	Sendangsari	Pajangan
349	Teater “TEMAN IDAMAN “	Sendangsari	Pajangan
350	Paguyuban Ketoprak Mataram Gilang Mudha Budaya “CANGGAH WARENG WANABAYA MANGIR “	Sendangsari	Pajangan
351	Paguyuban Ketoprak “LESTARI BUDOYO “	Sendangsari	Pajangan
352	Reog “GAGAK RIMANG “	Sendangsari	Pajangan
353	Kelompok Kesenian Karawitan “TIRTA KENCANA “	Sendangsari	Pajangan
354	Sanggar Tari “NARESWARI “	Sendangsari	Pajangan
355	Hadroh “SIDROTUL MUNTAHA “	Sendangsari	Pajangan
356	Campursari “MEGA MENDUNG “	Sendangsari	Pajangan
357	Paguyuban Karawitan “PRADONGGO LARAS “	Sendangsari	Pajangan
358	Paguyuban Musik Klenthing Modern “ ETERO NADA “	Guwosari	Pajangan
359	Condo Birowo	Sendangsari	Pajangan
360	Maswo Pati	Guwosari	Pajangan
361	Paguyuban Karawitan “TUNGGAL ROSO “	Triwidadi	Pajangan

No	Jenis Kelompok	Desa	Kecamatan
362	Ikatan Berzanji Putri "AL - YUMNA"	Guwosari	Pajangan
363	Seni Keprajuritan Bregodo "RANDU ALAS"	Guwosari	Pajangan
364	Qosidah Etnic "LINTANG REMBULAN"	Triwidadi	Pajangan
365	Paguyuban Karawitan "BHAKTI TARUNA MUDA"	Triwidadi	Pajangan
366	Jathilan Kreasi Baru "WAHYU TURONGGO MUDHO"	Triwidadi	Pajangan
367	Sanggar Teater "DIPO RATNA MUDA"	Guwosari	Pajangan
368	"BERGODO IROYUDO"	Guwosari	Pajangan
369	Seni Keprajuritan "BREGODO RANDU ALAS"	Guwosari	Pajangan
370	Kesenian Gejog Lesung "KARYO MANUNGGAL"	Guwosari	Pajangan
371	Paguyuban Jathilan Kreasi Baru "TURONGGO MUDHO SANTOSO"	Triwidadi	Pajangan
372	SANGGAR OGLEK "MUDHO UTOMO "	Triwidadi	Pajangan
373	SANGGAR SENI TARI LEYEK "RODAT FAUCHIYAH"	Sumberagung	Pajangan
374	PAGUYUBAN KARAWITAN " MUDHO GIRI LARAS"	Sendangsari	Pajangan
375	KELOMPOK KESENIAN HADROH "Al Muhibbin"	Triwidadi	Pajangan
376	JAMIAH SHOLAWAT NABI HADROH "NURUL IKHWAN"	Triwidadi	Pajangan
377	Kesenian Sholawat Jawa " Nurul Iman"	Guwosari	Pajangan
378	Kelompok Kesenian "Tari Rampak Satrio Selarong"	Guwosari	Pajangan
379	Grup Seni Gejog Lesung "Puspita Sari"	Guwosari	Pajangan
380	Grup Hadroh Klasik "Gugah Ati"	Guwosari	Pajangan
381	Grup Musik Keroncong "Sari Wirama"	Guwosari	Pajangan
382	Grup Seni Sholawat Jawa "Al Munawar"	Guwosari	Pajangan
383	Grup Hadroh "Al-Barqi"	Guwosari	Pajangan
384	Sanggar Tari "Sekar Banuwati"	Guwosari	Pajangan
385	Grup Seni Karawitan "Kridho Budhoyo Mudo"	Guwosari	Pajangan
386	Kesenian Hadroh "Al-Mursyid"	Guwosari	Pajangan
387	Paguyuban Kesenian "Kirani Art"	Guwosari	Pajangan
388	Organisasi Budaya "Bergodo Pringgading Aryo Pringgo"	Guwosari	Pajangan
389	Sanggar Seni Sholawat Hadroh "Qotrul Ghoist"	Sendangsari	Pajangan
390	Jatilan Kreasi Baru "Kudho Prakoso"	Triwidadi	Pajangan
391	Paguyuban Kesenian Jathilan "Rogo Wahyu Mataram"	Sendangsari	Pajangan
392	Paguyuban Jathilan "Kudo Mataram"	Guwosari	Pajangan
393	Kelompok Karawitan "Pringgo Laras"	Guwosari	Pajangan
394	Paguyuban Kesenian "Langen Muda Budaya"	Guwosari	Pajangan
395	Paguyuban Kesenian Reog "Puspa Pramudipa"	Sendangsari	Pajangan
396	Kelompok Kesenian Jathilan "Kridho Turonggo Mudho"	Triwidadi	Pajangan
397	Paguyuban Jathilan "Turonggo Kreasi Kudo Mataram"	Guwosari	Pajangan
PANDAK			

No	Jenis Kelompok	Desa	Kecamatan
398	PAGUYUBAN REOG “ KRIDHO MUDHO NGESTI BEKSO “	Triharjo	Pandak
399	Pengurus Upacara Adat “ MAKAM SEWU “	Wijirejo	Pandak
400	Kelompok Seni Karawitan “ BRONTO LARAS ROSO “	Gilangharjo	Pandak
401	Orkes Melayu “ BLANTIKA NADA “	Gilangharjo	Pandak
402	Organisasi Sanggar Karawitan “ DHARMO SRI WIROMO“	Wijirejo	Pandak
403	Paguyuban Karawitan “ SARI LARAS “	Caturharjo	Pandak
404	Paguyuban Karawitan “LARAS MANUNGGAL “	Gilangharjo	Pandak
405	Paguyuban Kesenian Reog “BIMA SAKTI “	Gilangharjo	Pandak
406	“ SANGGAR CANTIK “	Gilangharjo	Pandak
407	Sanggar Sendratari Kreban	Gilangharjo	Pandak
408	Paguyuban Kesenian Reog Wayang“PANDAN LARAS“	Wijirejo	Pandak
409	Sanggar Seni“MUDA LAKSMANA GESIKAN IV “	Wijirejo	Pandak
410	Group Keroncong“PUSPA WANGI“	Wijirejo	Pandak
411	Paguyuban "WIRAMA MUDHO BUDAYA"	Caturharjo	Pandak
412	Kelompok Seni Kethoprak "GILANG KRIDA BUDAYA"	Gilangharjo	Pandak
413	Paguyuban Reog "BANJAR BUDAYA"	Gilangharjo	Pandak
414	Paguyuban Seni Reog "TARUNA BUDAYA"	Gilangharjo	Pandak
415	PAGUYUBAN KETHOPRAK “SARI BUDOYO“	Wijirejo	pandak
416	PAGUYUBAN SENI REOG“ LESTARI BUDOYO “	Gilangharjo	Pandak
417	PAGUYUBAN SENI WAYANG WONG“ABIYOSO “	Caturharjo	Pandak
418	KELOMPOK KESANIAN HADROH DAN DAKWAH“ KHOIRUNNISA “	Caturharjo	Pandak
419	Paguyuban seni dan Budaya Manunggal Laras	Gilangharjo	Pandak
420	Paguyuban Gejog Lesung Sukma Laras	Triharjo	Pandak
421	Paguyuban Trisna Krida Sandiwara Budaya	Triharjo	Pandak
422	Paguyuban Trisna Dakwah Hadroh Padang Ati	Triharjo	Pandak
423	Paguyuban Trisna Bheksa Tari Budaya	Triharjo	Pandak
424	Paguyuban Trisna Bheksa Tari Budaya	Triharjo	Pandak
425	Organisasi Budaya Bregodo Trisna Manggala Putra	Triharjo	Pandak
426	Sanggar Seni Sekar Budaya Gilang	Gilangharjo	Pandak
427	Paguyuban Reog Bekso Manunggal Karso	Trimurti	Pandak
428	Rebana Modern Nada & Dakwah Thoriqul Jannah	Caturharjo	Pandak
429	KELOMPOK SENI HADROH "EL Hawa"	Caturharjo	Pandak
430	PAGUYUBAN SENI "GILANGHARJO WIYAKTA"	Gilangharjo	Pandak
431	PAGUYUBAN SENI REOG "RIA KELANA"	Gilangharjo	Pandak
432	Kelompok Kesenian Reog “Krida Sayekti”	Caturharjo	Pandak
433	Paguyuban Karawitan Putri “Laras Madyo”	Caturharjo	Pandak
434	Sanggar Seni “Catur Budaya”	Caturharjo	Pandak
435	Paguyuban Seni Pedalangan “Catur Manunggal”	Caturharjo	Pandak
436	Sanggar Seni “Sampar Budoyo”	Caturharjo	Pandak
437	Paguyuban Reog “Panca Budaya”	Wijirejo	Pandak

No	Jenis Kelompok	Desa	Kecamatan
438	Paguyuban Sinden Bantul “Pasiban”	Wijirejo	Pandak
439	Paguyuban Seni “Wiji Budaya”	Wijirejo	Pandak
440	Grup Kesenian Gamelan Qosidah Modern “Sewu Nada”	Wijirejo	Pandak
441	Paguyuban Kesenian Karawitan “Tri Manunggal”	Trharjo	Pandak
442	Paguyuban Seni Gejog Lesung “Gotong Royong”	Gilangharjo	Pandak
443	Paguyuban Reog “Kangen Sari”	Gilangharjo	Pandak
444	Paguyuban Seni Karawitan “Tunas Budaya”	Gilangharjo	Pandak
445	Paguyuban Seni Jathilan “Satrio Mudo”	Gilangharjo	Pandak
446	Sanggar Tari “Yupita Rini”	Gilangharjo	Pandak
447	Paguyuban Seni Kethoprak “Kridatama”	Gilangharjo	Pandak
448	Sanggar Seni Karawitan “Laras Panulangsih”	Gilangharjo	Pandak
449	Paguyuban Seni Sholawat “Esti Manunggal”	Gilangharjo	Pandak
450	Paguyuban Seni Karawitan “Giri Laras”	Gilangharjo	Pandak
451	Sanggar Seni “Guntur Laras”	Triharjo	Pandak
452	Paguyuban Hadroh “Al-Ittihad”	Triharjo	Pandak
453	Sanggar Seni “Tresna Budaya Triharjo”	Triharjo	Pandak
454	Sanggar Seni “Pitungkara”	Triharjo	Pandak
455	Sanggar Seni “Pamudja Baswara”	Triharjo	Pandak
456	Paguyuban Reog “Kaum Mudho”	Triharjo	Pandak
457	Grup Kesenian Karawitan “Wiji Laras”	Wijirejo	Pandak
458	Kelompok Seni Congkean “Laras Ati”	Triharjo	Pandak
459	Paguyuban Kesenian Kethoprak Mataram “Sewu Budaya”	Wijirejo	Pandak
460	Kelompok Kethoprak Mataram “Cipto Budoyo”	Wijirejo	Pandak
461	Kelompok Kethoprak Mataram “Ngesti Budoyo”	Wijirejo	Pandak
462	Kelompok Kethoprak Mataram “Kauman Syiar Budaya”	Wijirejo	Pandak
463	Kelompok Kethoprak Mataram “Trisno Budoyo”	Wijirejo	Pandak
464	Kelompok Kethoprak Mataram “Bergan Budoyo”	Wijirejo	Pandak
465	Kelompok Kethoprak Mataram “Sari Budoyo”	Wijirejo	Pandak
466	Kelompok Kethoprak Mataram “Kridha Budaya”	Wijirejo	Pandak
467	Kelompok Kethoprak Mataram “Muda Laksmana”	Wijirejo	Pandak
468	Sanggar Seni “Sekar Ayu”	Gilangharjo	Pandak
469	Kelompok Kethoprak Mataram “Dewan Budaya Wijirejo”	Wijirejo	Pandak
470	Sanggar Seni Tari “Banjar Beksa Muda”	Gilangharjo	Pandak
471	Paguyuban Seni Karawitan “Banjar Laras”	Gilangharjo	Pandak
472	Paguyuban Seni Reog “Krida Budaya”	Gilangharjo	Pandak
473	Sanggar Seni “Kridha Budaya”	Caturharjo	Pandak
474	Sanggar Kesenian “Muda Tamtama”	Wijirejo	Pandak
SRANDAKAN			
475	PAGUYUBAN SENI “SEKAR MUDA LARAS “	Trimurti	Srandakan
476	SANGGAR SENI “ BIMO MURTI “	Trimurti	Srandakan
477	PAGUYUBAN SENI “ KRIDA BEKSA LUMAKSANA“	Trimurti	Srandakan

No	Jenis Kelompok	Desa	Kecamatan
478	PAGUYUBAN JATILAN “ KUDA PRASAJA “	Trimurti	Srandakan
479	PAGUYUBAN REOG “ KRIDO BEKSO WIBISONO “	Poncosari	Srandakan
480	Majelis Taklim “ AISYIYAH BESOLE “	Poncosari	Srandakan
481	Paguyuban Karawitan Gadhon “ MURTI LARAS “	Trimurti	Srandakan
482	Sanggar “ SARI BUDOYO “	Poncosari	Srandakan
483	Sanggar Seni “ JEMPARING “	Trimurti	Srandakan
484	Paguyuban Kesenian “ GEREH PETHEK “	Trimurti	Srandakan
485	Kelompok Kesenian Rebana “ NURUL JANNAH “	Trimurti	Srandakan
486	Kelompok Kesenian Reog dan Tari Jalanan “PERSADA BANGKIT“	Trimurti	Srandakan
487	Paguyuban Seni Musik Pekbung “TOMBO ATI “	Trimurti	Srandakan
488	Ketoprak Mataram “SINAR MUDA BUDAYA “	Trimurti	Srandakan
489	Paguyuban Seni Karawitan Putri “SETYA LARAS “	Trimurti	Srandakan
490	Paguyuban Kesenian “NGESTI BUDAYA NENGAHAN “	Trimurti	Srandakan
491	Paguyuban Seni “ TRI MANUNGGAL BUDAYA “	Trimurti	Srandakan
492	Paguyuban Seni Jathilan “ KRIDO TURONGGO MANUNGGAL “	Trimurti	Srandakan
493	Paguyuban Seni Kerawitan Cundoko Sari	Trimurti	Srandakan
494	Paguyuban Seni Rebana Miftakhul Jannah	Trimurti	Srandakan
495	Paguyuban Seni Kethoprak "KARTIKA CANDRA MUDA BUDAYA"	Trimurti	Srandakan
496	Slawatan Jawi "SURYO Madyo Wiromo Kedung Budoyo"	Trimurti	Srandakan
497	Paguyuban Seni “SAMUDRA BUDAYA“	Poncosari	Srandakan
498	Paguyuban Kethoprak“WONO BUDOYO“	Poncosari	Srandakan
499	Paguyuban Sholawatan“MULTI LARAS “	Trimurti	Srandakan
500	Paguyuban Budaya Karawitan“NGESTI GUNA WIRAMA“	Trimurti	Srandakan
501	Kelompok Kesenian Reog“KRIDA MUDA BEKSO LUMAKSONO“	Trimurti	Srandakan
502	SANGGAR BUDAYA “ RESI BISMA DEWABRATA “	Poncosari	Srandakan
503	Kelompok Kesenian Laras Madya Hizbul Wathan Group	Trimurti	Srandakan
504	Paguyuban Kethoprak Tresno Budaya	Poncosari	Srandakan
505	Sanggar Tari & Sewa Pakaian Adat Indrajid	Poncosari	Srandakan
506	SANGGAR KESENIAN "Yitna Pawaka Dance"	Trimurti	Srandakan
507	KELOMPOK KESENIAN SHOLAWAT JAWA LARAS Madya "Santi Budoyo"	Poncosari	Srandakan
508	SANGGAR TARI "Surya Indah Budaya"	Poncosari	Srandakan
509	PAGUYUBAN KARAWITAN "Suryo Laras"	Poncosari	Srandakan
510	KELOMPOK SENI KARAWITAN "HANGESTI LARAS"	Trimurti	Srandakan
511	Paguyuban Seni Karawitan “Laras Ati”	Poncosari	Srandakan
512	Paguyuban Seni Gejok lesung Kreasi “Laras Ati”	Poncosari	Srandakan

No	Jenis Kelompok	Desa	Kecamatan
513	Paguyuban Campursari “Cahyo Kartiko Laras”	Trimurti	Srandakan
514	Paguyuban Hadroh “Nurul Fajri”	Trimurti	Srandakan
515	Paguyuban Seniman Tari Srandakan “Satria Aji”	Trimurti	Srandakan
516	Paguyuban Orkes Keroncong “Puspa Kencana”	Trimurti	Srandakan
517	Paguyuban Gejog Lesung “Manunggal Laras”	Trimurti	Srandakan
518	Paguyuban Seni Gejog Lesung Puron “Setyo Tuhu”	Trimurti	Srandakan
519	Paguyuban Seni Rebana “Nurul Iman”	Trimurti	Srandakan
520	Sanggar Seni “Kartiko Budoyo”	Trimurti	Srandakan
521	Paguyuban Seni dan Budaya “Naeswari”	Trimurti	Srandakan
522	Sanggar Seni “Rekso Budoyo”	Poncosari	Srandakan
523	Paguyuban Seni Reog “Bekso Lelono II”	Trimurti	Srandakan
524	Kelompok Seni Reog “Kridha Beksa Lumaksana”	Trimurti	Srandakan
525	Paguyuban Reog “Krido Bekso Wibisono”	Poncosari	Srandakan
526	Paguyuban Kesenian Jathilan “Turangga Wiraga Mudha”	Trimurti	Srandakan
527	Kelompok Jathilan “Angger Muda Budaya”	Trimurti	Srandakan
528	Kelompok Seni Musik Koes Plus “Satria Plus”	Trimurti	Srandakan
529	Kelompok Seni Jathilan “Kudha Prasaja”	Trimurti	Srandakan
530	Kelompok seni Reog “Langen Muda Budaya”	Trimurti	Srandakan
531	Kelompok Seni Musik Angklung “Astama”	Trimurti	Srandakan
532	Kelompok Rebana “Nurul Hidayah”	Trimurti	Srandakan
533	Kelompok Karawitan “Ngesti Guna Wirama”	Trimuti	Srandakan
534	Sanggar Tari “Tobel Art Dance Studio”	Trimurti	Srandakan
SANDEN			
535	Sanggar budaya “ KUNCUP MEKAR “	Gadingsari	Sanden
536	Paguyuban Jathilan “ KUDHO MANUNGGAL “	Gadingsari	Sanden
537	Sanggar Budaya “ KUNCUP MEKAR “	Gadingsari	Sanden
538	Paguyuban Seni Karawitan “ PRAMU KRIDO MURTI “	Gadingsari	Sanden
539	Kelompok Kesenian “ HADROH SYAUQUL MUHIBBIN “	Srigading	Sanden
540	Kelompok Kesenian “ SRANDUL MANULA BUDAYA “	Srigading	Sanden
541	Kelompok Kesenian “ QOSIDAH MA'RATUS SHOLEKAH “	Srigading	Sanden
542	Kelompok Kesenian “ SOLAWAT NABI AL-HIDAYAH “	Srigading	Sanden
543	Kelompok Kesenian Kethoprak “HANDOKO EKO MANUNGGAL“	Srigading	Sanden
544	Kelompok Kesenian Panembrana “SEKAR MADU “	Srigading	Sanden
545	Kelompok Kesenian Macapat “ BUDOYO SWORO “	Srigading	Sanden
546	Kelompok Kesenian Gejog Lesung “ SEKAR KINASIH “	Srigading	Sanden
547	Kelompok Kesenian Hadroh “SYIFAUH HAYAT “	Srigading	Sanden
548	Kelompok Kesenian Karawitan “ RUKUN MANUNGGAL “	Srigading	Sanden

No	Jenis Kelompok	Desa	Kecamatan
549	Paguyuban Sholawatan Ngudi Rukun	Srigading	Sanden
550	Ki Geter PW	Gadingsari	Sanden
551	Paseduluran Kasepuhan "PERDIKAN TEATER"	Gadingsari	Sanden
552	Grup Pembelajaran Seni "TOMBO LORO "	Gadingsari	Sanden
553	Kelompok Gejog Lesung "CANDRA WIRAMA"	Srigading	Sanden
554	Paguyuban Jathilan "YUDA KUDA MANGGALA"	Srigading	Sanden
555	Paguyuban Jathilan "KUDHO MANGGOLO"	Srigading	Sanden
556	Jathilan "KRIDA MUDA BUDAYA"	Gadingsari	Sanden
557	Kelompok Kesenian Hadroh "ELING GUSTI"	Gadingsari	Sanden
558	Sanggar Seni "MURTI BUDAYA"	Murtigading	Sanden
559	PAGUYUBAN KETHOPRAK " SRI CAHYA BUDAYA "	Srigading	Sanden
560	PAGUYUBAN KETHOPRAK " TARUNA BUDAYA "	Srigading	Sanden
561	Paguyuban Kerawitan "ONGGO LARAS "	Srigading	Sanden
562	Paguyuban Kesenian Kethoprak Tri Muda Budaya	Murtigading	Sanden
563	KELOMPOK KESENIAN KARAWITAN "Sekar Manis"	Srigading	Sanden
564	KETHOPRAK MATARAM "Manunggal Jati"	Murtigading	Sanden
565	KOMUNITAS "BOEK DHUWUR"	Murtigading	Sanden
566	Kelompok Karawitan "Langen Setya Rini"	Gadingharjo	Sanden
567	Kelompok Kesenian Reog "Krida Budaya"	Gadingharjo	Sanden
568	Kelompok Kesenian Gejog Lesung "Ngudi Lestari"	Gadingharjo	Sanden
569	Kelompok Srandul "Rukun Manunggal"	Gadingharjo	Sanden
570	Kesenian Reog "Mudo Aseh"	Srigading	Sanden
571	Bregodo Lombok Ijo "Jumeduling Maesa Sura"	Srigading	Sanden
572	Paguyuban Jathilan "Turonggo Mudo Prakoso"	Gadingsari	Sanden
573	Sanggar Seni "SekarThadji"	Murtigading	Sanden
574	Paguyuban Kesenian Tradisional "Laras Budaya"	Gadingsari	Sanden
575	Kelompok Bregada "Satriya Angun Angun"	Srigading	Sanden
576	Paguyuban Kethoprak "Wargo Budoyo"	Srigading	Sanden
577	Sanggar Karawitan "Langen Pradonggo 2"	Murtigading	Sanden
578	Kelompok Reog "Bhekso Wirogo Mudho"	Srigading	Sanden
579	Paguyuban Karawitan "Ngudi Wiromo"	Murtigading	Sanden
580	Sanggar "Baswara Budaya"	Murtigading	Sanden
581	Paguyuban Reog "Satrio Budoyo Mudo Mayungan"	Murtigading	Sanden
582	Paguyuban Seni Jathilan "Anom Budoyo"	Murtigading	Sanden
583	Paguyuban Seni Karawitan "Ronggo Budoyo"	Murtigading	Sanden
	BAMBANGLIPURA		
584	PAGUYUBAN SENI BUDOYO " KUDO MANUNGAL "	Sidomulyo	Bambanglipuro
585	Paguyuban Seni Tradisional Reog Wayang " KRIDO BEKSO TARUNO "	Sidomulyo	Bambanglipuro
586	Paguyuban Seni Reog " BAYU MUKTI "	Sidomulyo	Bambanglipuro
587	Paguyuban Seni Tradisional " KARAWITAN PATMASIWI "	Sidomulyo	Bambanglipuro

No	Jenis Kelompok	Desa	Kecamatan
588	Perkumpulan Wayang Wahyu “ BHUANA ALIT “	Sumbermulyo	Bambanglipuro
589	Paguyuban Kesenian Reog “ MANUNGAL BUDAYA ”	Mulyodadi	Bambanglipuro
590	Paguyuban Rampak Buto “BUTO SLEWAH GEDROEX “	Mulyodadi	Bambanglipuro
591	Kesenian Tradisional Thoklik Campursari “ SRIMULYO “	Mulyodadi	Bambanglipuro
592	Seni Srandul “ BUDOYO RINONCE “	Mulyodadi	Bambanglipuro
593	“ OMAH GAMELAN “	Sidomulyo	Bambanglipuro
594	Paguyuban Karawitan “LARAS MADYA“	Mulyodadi	Bambanglipuro
595	Paguyuban Seni dan Budaya “LARAS MADYA“	Sumbermulyo	Bambanglipuro
596	Paguyuban Seni Krawitan “PENI LARAS“	Sidomulyo	Bambanglipuro
597	Paguyuban Seni Ketoprak "DEMEN BUDOYO"	Sumbermulyo	Bambanglipuro
598	Sanggar Tari "ADJENG NJOGED"	Mulyodadi	Bambanglipuro
599	Paguyuban Seni Jathilan "TURONGGO MUDO"	Sidomulyo	Bambanglipuro
600	paguyuban karawitan “NGESTI BUDAYA“	Mulyodadi	Bambanglipuro
601	PAGUYUBAN SENI JATHILAN “HEGAR RIA“	Mulyodadi	Bambanglipuro
602	PAGUYUBAN KESENIAN REBANA “AL-HIDAYAH“	Sidomulyo	Bambanglipuro
603	SANGGAR DALANG “CERMO KARTIKA“	Mulyodadi	Bambanglipuro
604	PAGUYUBAN SENI “KAMBOJA TRESNO BUDOYO“	Sumbermulyo	Bambanglipuro
605	SANGGAR TARI “ PUSPO WARNI “	Sumbermulyo	Bambanglipuro
606	PAGUYUBAN SINOMAN “MUDHO LESTARI “	Sumbermulyo	Bambanglipuro
607	Sanggar Budaya Cendana Ngireng ireng	Sidomulyo	Bambanglipuro
608	PAGUYUBAN KETHOPRAK "Krida Catur Budaya"	Mulyodadi	Bambanglipuro
609	KETHOPRAK "Sumber Budoyo"	Sumbermulyo	Bambanglipuro
610	PAGUYUBAN KESENIAN MACAPAT "Laras Mulyo"	Sumbermulyo	Bambanglipuro
611	BREGODO "Suro Joyo dan Gajah Tomo"	Sumbermulyo	Bambanglipuro
612	REOG WAYANG "Taruna Kridho Budoyo"	Sumbermulyo	Bambanglipuro
613	REOG WAYANG "Kusuma Yudha"	Sumbermulyo	Bambanglipuro
614	PAGUYUBAN "Seni Krido Budoyo"	Sumbermulyo	Bambanglipuro
615	PAGUYUBAN KARAWITAN "TARUNO BUDOYO"	Mulyodadi	Bambanglipuro
616	PAGUYUBAN MACAPAT "LIPURO LARAS"	Mulyodadi	Bambanglipuro
617	PAGUYUBAN REOG WAYANG "NGURI BUDAYA"	Sidomulyo	Bambanglipuro
618	Sanggar Seni “Langgeng Budaya”	Mulyodadi	Bambanglipuro
619	Paguyuban Grobag Sapi “Guyub Rukun Bantul”	Mulyodadi	Bambanglipuro
620	Paguyuban Reog “Catur Manunggal Budoyo”	Sumbermulyo	Bambanglipuro
621	Sanggar Tari “Shinta Art Dance”	Mulyodadi	Bambanglipuro
622	Paguyuban Kesenian Jathilan “Turonggo Songo”	Sumberagung	Bambanglipuro
623	Kelompok Sanggar “Sedah Merah”	Mulyodadi	Bambanglipuro
624	Paguyuban Kethoprak “Muda Tama Budaya”	Sumbermulyo	Bambanglipuro
625	Paguyuban Karawitan Ibu-ibu “Sidolaras”	Sidomulyo	Bambanglipuro

No	Jenis Kelompok	Desa	Kecamatan
626	Paguyuban Karawitan “Mulyo Laras”	Sidomulyo	Bambanglipuro
627	Kelompok Hadroh “Aflah Al-Islam”	Sumbermulyo	Bambanglipuro
628	Paguyuban Kesenian Jathilan “Kudho Sembodro”	Sidomulyo	Bambanglipuro
629	Paguyuban Seni Karawitan “Saka Laras”	Mulyodadi	Bambanglipuro
KRETEK			
630	SANGGAR SENI “ TRI TUNGGAL “	Parangtritis	Kretek
631	Sanggar Seni Budaya “ PARANG GARUDA “	Parangtritis	Kretek
632	KELOMPOK SENI JATHILAN “ TURONGGO SAMODRO ”	Parangtritis	Kretek
633	Paguyuban Karawitan “ MUDO LARAS “	Tirtomulyo	Kretek
634	Paguyuban Seni Karawitan “ MUYOLARAS “	Tirtomulyo	Kretek
635	Paguyuban Seni “ WAYANG BUBRAH “	Parangtritis	Kretek
636	Paguyuban Seni Karawitan “ CIPTO LARAS “	Tirtomulyo	Kretek
637	Paguyuban Seni Beksan dan Wayang Orang “ SEKAR PURI BUDAYA “	Parangtritis	Kretek
638	Paguyuban Seni Ketoprak “HASTA BUDAYA “	Parangtritis	Kretek
639	Paguyuban Seni Jathilan “TURONGGA BLEDHE’X SAPUTRA	Parangtritis	Kretek
640	Paguyuban Seni Campur Sari “BLEDHE’X LARAS “	Parangtritis	Kretek
641	Sanggar Seni “BLEDHE’X WIRAMA KLIWIR “	Parangtritis	Kretek
642	Paguyuban Seni Karawitan “ SAMUDERA LARAS “	Parangtritis	Kretek
643	Paguyuban Kethoprak “ SAPTA BUDAYA “	Parangtritis	Kretek
644	Paguyuban Seni Karawitan “SAPTA LARAS“	Parangtritis	Kretek
645	Paguyuban Seni “WURI BUDAYA“	Parangtritis	Kretek
646	Sanggar Seni Pedalangan “PARIKESIT “	Parangtritis	Kretek
647	Paguyuban Campursari “PUTRO SEGORO KIDUL “	Parangtritis	Kretek
648	Paguyuban Seni Jathilan “KRIDO TURONGGO BEKSO “	Parangtritis	Kretek
649	Paguyuban Seni Krawitan “TRI TUNGGAL “	Parangtritis	Kretek
650	Seni Kerawitan Dan PedalanganTari “RAHAYU LARAS “	Parangtritis	Kretek
651	Sanggar Tari “ KANCIL ART “	Donotirto	Kretek
652	Paguyuban Seni Karawitan dan Pedalangan “ NGLURI MUDHA BUDAYA “	Donotirto	Kretek
653	Paguyuban Kesenian “ TRISNO BUDOYO “	Donotirto	Kretek
654	Paguyuban Seni Karawitan Dan Ketoprak “ LARAS MUDHO BUDHAYA “	Donotirto	Kretek
655	Paguyuban Kesenian Jatilan “ MUDHO PALUPI “	Tirtosari	Kretek
656	Kelompok Teater Drama “ BUKID “	Tirtosari	Kretek
657	Paguyuban Seni Kethoprak “ CIPTO KAWEDAR “	Donotirto	Kretek
658	Paguyuban Kesenian “ LANGEN MULYO “	Donotirto	Kretek
659	Paguyuban Karawitan Marsudi Laras	Tirtohargo	Kretek
660	Kelompok Kesenian Gejog Lesung "AYEM TENTREM"	Parangtritis	Kretek
661	Paguyuban Orkes Keroncong“REMAJA BUDAYA“	Donotirto	Kretek

No	Jenis Kelompok	Desa	Kecamatan
662	Paguyuban Seni Jathilan ""BEKSO WIROTOMO"	Tirtomulyo	Kretek
663	Paguyuban Kesenian Reog "MULYO BUDOYO"	Trimulyo	Kretek
664	PAGUYUBAN MACAPAT"Respati Palguna"		Kretek
665	Kelompok Seni Karawitan "Raras Sari Budoyo"	Tirtosari	Kretek
666	Kelompok Seni Kethoprak "Sari Budoyo"	Tirtosari	Kretek
667	Kelompok Seni Gejok Lesung "Onggosari"	Tirtosari	Kretek
668	Sanggar Seni "Wredha Budaya"	Donotirto	Kretek
669	Paguyuban Jathilan "Turonggo Tuo"	Tirtosari	Kretek
670	Sanggar Seni "Narotama"	Parangtritis	Kretek
671	Paguyuban Seni Musik Tradisional "Thek Thek"	Tirtohargo	Kretek
672	Paguyuban Karawitan "Gurun Pandan Sari Respati Manis"	Parangtritis	Kretek
673	Sanggar Seni Budaya "Manunggal Roso Karen"	Tirtomulyo	Kretek
674	Paguyuban Hadroh "Nurul Jadid"	Donotirto	Kretek
675	Paguyuban Seni Karawitan "Respati Kasih"	Parangtritis	Kretek
676	Kelompok Kesenian Ketoprak "Sekar Arum Budhaya"	Tirtomulyo	Kretek
677	Paguyuban Seni Macapat "Respati Kasih"	Tirtomulyo	Kretek
678	Paguyuban Kethoprak "Mulyo Budhoyo"	Tirtomulyo	Kretek
679	Kelompok Sholawat Gamelan "Hadroh Al-Mujahidin"	Tirtohargo	Kretek
680	Paguyuban Jathilan "Kemuning Kudo Bawono"	Tirtohargo	Kretek
681	Paguyuban Kethoprak Mataram "Krisna Budaya"	Tirtohargo	Kretek
682	Kelompok Teater "Kajimanan Kretek"	Donotirto	Kretek
683	Kelompok Kesenian Hadroh "Syauqul Muhibbin"	Trimulyo	Kretek
684	Kelompok Seni Kethoprak "Pantai Selatan"	Donotirto	Kretek
PUNDONG			
685	GRUP KESENIAN KARAWITAN " PAGUYUBAN WERDHA RARAS IRAMA "	Srihardono	Pundong
686	Group Karawitan " MELATHI LARAS "	Srihardono	Pundong
687	Sanggar Seni Reog " ROGORINOSO "	Srihardono	Pundong
688	FORUM KOMUNIKASI KETOPRAK BANTUL (FKKB) PUNDONG		Pundong
689	Paguyuban Kesenian " SRI BUDAYA "	Srihardono	Pundong
690	Lembaga Gejok Lesung " SENTUNG RAHAYU "	Srihardono	Pundong
691	Sanggar Seni " NGURI BUDAYA "	Srihardono	Pundong
692	Paguyuban Jathilan " TURONGGO MUDHO "	Seloharjo	Pundong
693	Komunitas karawitan remaja pundong " KAREP "	Srihardono	Pundong
694	Paguyuban Karawitan " PERTIWI LARAS "	Seloharjo	Pundong
695	Paguyuban Wayang Orang " MUDHO BUDOYO "	Panjangrejo	Pundong
696	Paguyuban Seni dan Karawitan " NGESTI LARAS "	Seloharjo	Pundong
697	Paguyuban Seni Reog Wayang Orang " INGAS MUDA PERKASA"	Panjangrejo	Pundong

No	Jenis Kelompok	Desa	Kecamatan
698	Paguyuban Jathilan Klasik “ TURONGGO BEKSO “	Seloharjo	Pundong
699	Kelompok Gejok Lesung PKK “ MERTI SENTONG LESTARI	Panjangrejo	Pundong
700	Paguyuban Merti Bumi Nyadran “SUMBER TUK SUROCOLO GOA JEPANG “	Seloharjo	Pundong
701	Paguyuban Merti Bumi Nyadran “SUMBER TUK SUROCOLO GOA JEPANG “	Seloharjo	Pundong
702	Paguyuban Seni Tari “TOPENG IRENG “	Seloharjo	Pundong
703	Seni Jathilan “ MUDHO MANUNGAL “	Seloharjo	Pundong
704	Kesenian Tradisional Nini Thowong “SABDO BUDOYO “	Panjangrejo	Pundong
705	Paguyuban Gejok Lesung “SENTUNG LARASATI “	Panjangrejo	Pundong
706	Paguyuban Seni Karawitan “BUDOYO RINI “	Seloharjo	Pundong
707	Karawitan “LANGEN WIROMO “	Seloharjo	Pundong
708	Paguyuban Terbang “LARAS MADYO“	Panjangrejo	Pundong
709	Paguyuban Kesenian Angklung “ PRATAMA NADA “	Seloharjo	Pundong
710	Paguyuban Merti Dusun “ PEDUKUHAN GEDANGAN “	Panjangrejo	Pundong
711	Paguyuban Kesenian Tradisional Gejog Lesung “ MERDO BUDOYO “	Panjangrejo	Pundong
712	Paguyuban Kesenian Gejog Lesung “ LESTARI BUDOYO “	Panjangrejo	Pundong
713	“ KETOPRAK SONGGO BUDOYO “	Seloharjo	Pundong
714	Sanggar Tari “ LANGEN MUDA BUDAYA “	Seloharjo	Pundong
715	“ JATHILAN TURONGGO YAKSO “	Seloharjo	Pundong
716	Paguyuban Gejog Lesung Lestari Laras	Seloharjo	Pundong
717	Sanggar Seni “NGURI BUDAYA“	Srihardono	Pundong
718	Kethoprak Mataram“JONGGRANG BUDAYA“	Srihardono	Pundong
719	Karawitan“NGUDI LARAS“	Seloharjo	Pundong
720	Paguyuban Karawitan“TRI MANUNGAL“	Seloharjo	Pundong
721	Karawitan "LARAS MUDO TARUNO"	Panjangrejo	Pundong
722	Sanggar "GUNUNG SEWU"	Panjangrejo	Pundong
723	Sanggar "GUNUNG SEWU"	Panjangrejo	Pundong
724	Paguyuban Seni "PUSPO MUDO BUDOYO"	Srihardono	Pundong
725	KARAWITAN “TARUNA LARAS“	Seloharjo	Pundong
726	PAGUYUBAN KETHOPRAK “SETO BUDOYO“	Seloharjo	Pundong
727	PAGUYUBAN SENI REOG “ MUDHA BUDAYA “	Srihardono	Pundong
728	SANGGAR KESENIAN “ MUDHO RINONCE “	Seloharjo	Pundong
729	PAGUYUBAN KETHOPRAK MATARAM “ TRIMUDO BUDOYO	Seloharjo	Pundong
730	SANGGAR SENI “CAHYA REMBULAN “	Srihardono	Pundong
731	Paguyuban Kesenian Karawitan Sekar Gendis Budoyo	Panjangrejo	Pundong
732	Sanggar Seni Rejo Budaya	Panjangrejo	Pundong
733	Sanggar budaya mudi laras Sareng Makaryo	Seloharjo	Pundong

No	Jenis Kelompok	Desa	Kecamatan
734	Paguyuban Seni Sholawatan Marsudi Rochmat	Srihardono	Pundong
735	Paguyuban Seni Kethoprak Mataram Cahya Budaya	Seloharjo	Pundong
736	Paguyuban Seni Gejog Lesung Sekar Giri Mangi	Seloharjo	Pundong
737	KELOMPOK KESENIAN HADROH "Ar Rohmah"	Panjangrejo	Pundong
738	KELOMPOK KESENIAN "Ngudi Laras"	Seloharjo	Pundong
739	SANGGAR BUDAYA "PERTIWI"	Seloharjo	Pundong
740	SHOLAWAT NABI "MUDO PALUPI"	Seloharjo	Pundong
741	Kesenian Jathilan "Kudo Kencono Jati"	Panjangrejo	Pundong
742	Kesenian Karawitan "Mersudi Laras"	Srihardono	Pundong
743	Sanggar "Selo Pereng"	Seloharjo	Pundong
744	Jamaah Sholawat Nabi "Mudo Palupi"	Srihardono	Pundong
745	Grup Sholawatan "Nurul Aamiin"	Srihardono	Pundong
746	Grup Hadroh "AL – HIDAYAH"	Srihardono	Pundong
747	Jamaah Hadroh "Al – Hikmah"	Srihardono	Pundong
748	Kelompok Seni Reog "Djogelo"	Srihardono	Pundong
749	Paguyuban Hadroh "Baitus Salam"	Seloharjo	Pundong
750	Sholawatan Jawa Mudha Palupi "Naalul Jannah"	Srihardono	Pundong
751	Grup Kesenian Musik Religi "Al-Wathoni"	Panjangrejo	Pundong
752	Sanggar Seni dan Budaya "Mudho Manunggal"	Srihardono	Pundong
IMOGIRI			
753	PAGUYUBAN SENI JHATILAN MATARAM "NGUPOYO WARGO"	Sriharjo	Imogiri
754	Sanggar Seni "SEKAR ARUM"	Karangtalun	Imogiri
755	Paguyuban Kesenian "TRI MANUNGKAL"	Sriharjo	Imogiri
756	Paguyuban Seni Ketoprak dan Karawitan "TRISNO BUDOYO"	Selopamioro	Imogiri
757	Paguyuban Kesenian Jathilan Tradisional "TURONGGO MUDHO"	Girirejo	Imogiri
758	Perkumpulan Pelestari Budaya "NGESTI LARAS"	Girirejo	Imogiri
759	Paguyuban Sholawatan Mudha Palupi "SEDYA RUKUN"	Imogiri	Imogiri
760	Bregodo Kaprajuritan "REKTA GIRI GORATAMA"	Imogiri	Imogiri
761	Bregodo Kaprajuritan "PUTRI CONDROSASI WIRATAMA"	Imogiri	Imogiri
762	Paguyuban Kesenian Tradisional Gejok Lesung "NGUDI LARAS"	Karangtengah	Imogiri
763	Paguyuban Kesenian Sholawat Maulud "SANGGA BUDAYA"	Karangtengah	Imogiri
764	"KELOMPOK SENI SAKA"	Imogiri	Imogiri
765	Organisasi Budaya "HADROH AL-MUSTSANA"	Kebonagung	Imogiri
766	Organisasi Budaya "KARAWITAN LANGEN SUKO"	Kebonagung	Imogiri
767	Organisasi Budaya "KETHOPRAK KARISMA ADI"	Kebonagung	Imogiri
768	Organisasi Budaya "JATHILAN KUDA LAKSANA"	Kebonagung	Imogiri

No	Jenis Kelompok	Desa	Kecamatan
769	Organisasi Budaya “ KARAWITAN AGUNG WIROMO “	Kebonagung	Imogiri
770	Organisasi Budaya “ HADROH NURUL MUSTHOFA “	Kebonagung	Imogiri
771	Paguyuban Campur Sari “ SEKAR WANGI “	Kebonagung	Imogiri
772	Gejok Lesung “ LESTARI BUDOYO “	Karangtengah	Imogiri
773	Kelompok Seni Karawitan “ NGESTI PERTIWI “	Selopamioro	Imogiri
774	Kelompok Karawitan “ LARAS NYAMLENG “	Selopamioro	Imogiri
775	Perkumpulan Pelestari Budaya “ MANUNGGAL RASA “	Girirejo	Imogiri
776	Kesenian Jathilan “ TURONGGO MUDHO “	Selopamioro	Imogiri
777	Paguyuban Karawitan “NGUDI LARAS “	Wukirsari	Imogiri
778	FORUM CINTA BUDAYA BANGSA “ FORCIBB “	Wukirsari	Imogiri
779	Paguyuban Seni Tradisi Ketoprak Mataram “ KRIDA BUDAYA “	Selopamioro	Imogiri
780	Seni Sholawat Jawi “ GEBYOG MUDHO PALUPI “	Wukirsari	Imogiri
781	Paguyuban Seni karawitan “ MADYO LARAS “	Wukirsari	Imogiri
782	Sanggar Karawitan “ CANDRARINI MUDALARAS “	Sriharjo	Imogiri
783	Himpunan Artis Musik Keroncong Indonesia “ HAMKRI “	Wukirsari	Imogiri
784	Sanggar Seni Keprajuritan “ PUSPITOSARI “	Wukirsari	Imogiri
785	Arena Seni Drama Dan Tari “ ARENA DRATA “	Imogiri	Imogiri
786	Paguyuban “ NGUDI LARAS “	Selopamioro	Imogiri
787	Orkes Keroncong “ SWARA IDAMAN “	Wukirsari	Imogiri
788	Reog Barong Gandrung	Karangtalun	Imogiri
789	Sekar Arum	Karangtalun	Imogiri
790	Sanggar Seni "SEKAR RINONCE"	Wukirsari	Imogiri
791	Sanggar Budaya“LANGEN BUDAYA“	Karangtengah	Imogiri
792	Qosidah Tradisional “JAMASDA“	Selopamioro	Imogiri
793	Hadroh“BAITUL MUTTAQIN“	Wukirsari	Imogiri
794	Jathilan“TURONGGO SETO“	Girirejo	Imogiri
795	Sanggar Seni“SAWIJI“	Wukirsari	Imogiri
796	Kelompok Rodat“ROUDLOTUL JANNAH “	Wukirsari	Imogiri
797	DZIKIR MAULUD RAWI JAWI“NGUDI LESTARI“	Selopamioro	Imogiri
798	Paguyuban Seni Budaya Mudha "DOGER MACAN GEMBONG"	Girirejo	Imogiri
799	Sanggar "ESTEHANGAT"	Sriharjo	Imogiri
800	Kelompok Kesenian Jathilan "KUDHO MANUNGGAL"	Selopamioro	Imogiri
801	Kelompok Seni "TEATER PAYUNG ANNO 1986"	Imogiri	Imogiri
802	Paguyuban Gejog Lesung "AGUNG LESTARI BUDAYA"	Kebonagung	Imogiri
803	PAGUYUBAN “BREGODO PAKSIKATON“	Wukirsari	Imogiri
804	PAGUYUBAN “BREGODO PAKSIKATON“	Wukirsari	Imogiri
805	SANGGAR SENI TRADISI “JATI BUDAYA“	Sriharjo	Imogiri
806	SANGGAR KESENIAN “PUROLOYO“	Wukirsari	Imogiri

No	Jenis Kelompok	Desa	Kecamatan
807	Sanggar Seni dan Budaya Paksikaton	Wukirsari	Imogiri
808	Paguyuban Seni Kuda Lumping Kudho Rumpoko	Sriharjo	Imogiri
809	KELOMPOK KESENIAN HADROH "Qotrunnada"	Kebonagung	Imogiri
810	KESENIAN KARAWITAN "Mudho Wiromo"	Selopamioro	Imogiri
811	KELOMPOK KESENIAN KARAWITAN "Putra Hargo Kawdhar"	Selopamioro	Imogiri
812	KELOMPOK KESENIAN KARAWITAN "MADYO LARAS"	Selopamioro	Imogiri
813	PAGUYUBAN SENI HADROH "AN-NUR"	Wukirsari	Imogiri
814	PAGUYUBAN SENI KETHOPRAK "MUDHO BUDOYO"	Wukirsari	Imogiri
815	PAGUYUBAN SENI GEJOG LESUNG "NGUDHI LARAS"	Wukirsari	Imogiri
816	PAGUYUBAN SENI JEMPARINGAN "GENDEWO MATARAM"	Wukirsari	Imogiri
817	Paguyuban Jathilan "Kudho Laksono Kebonagung Crew"	Kebonagung	Imogiri
818	Kelompok Seni Karawitan "Sekar Melati"	Selopamioro	Imogiri
819	Paguyuban Jathilan "Sri Turonggo Manunggal Jati"	Sriharjo	Imogiri
820	Kelompok Hadroh "Nurul 'Asyiqiin"	Selopamioro	Imogiri
821	Kelompok Sholawat Dzikir Maulid "Laras Mulyo"	Selopamioro	Imogiri
822	Paguyuban Karawitan "Ngesti Laras"	Selopamioro	Imogiri
823	Paguyuban Kethoprak Mataram "Kridho Budoyo"	Karangtengah	Imogiri
824	Sanggar Seni "mBanjar Sidartan"	Karangtengah	Imogiri
825	Kelompok Seni Budaya "Sigro Milir"	Imogiri	Imogiri
826	Kelompok Kesenian Jathilan Kreasi Baru "Mudho Slamet Sri Mulyo"	Selopamioro	Imogiri
827	Paguyuban Seni Campursari "G.R.E Djogjakarta"	Karangtalun	Imogiri
828	Kelompok Kesenian Rakyat Gejog Lesung "Puspasari"	Selopamioro	Imogiri
829	Kelompok Seni Gejog Lesung "Jati Kumandang"	Girirejo	Imogiri
830	Kelompok Sholawat "Laras Maulid"	Girirejo	Imogiri
831	Paguyuban Kesenian Karawitan "Ngudi Wiromo"	Girirejo	Imogiri
832	Kelompok Kesenian Karawitan "Ngesti Laras"	Girirejo	Imogiri
833	Paguyuban Kethoprak "Banyu Manunggal Roso"	Girirejo	Imogiri
834	Paguyuban Pelestari Budaya Laras Madyo "Ngesti Laras"	Girirejo	Imogiri
835	Kelompok Seni Gejog Lesung "Laras Ati"	Girirejo	Imogiri
836	Kelompok Jathilan "Turonggo Mudho Langen Budoyo"	Sriharjo	Imogiri
837	Kelompok Bergodo "Prajasuka"	Sriharjo	Imogiri
838	Kelompok Gejog Lesung "Sekar Wangi"	Sriharjo	Imogiri
839	Kelompok Hadroh Modern "Qolbun Salim"	Sriharjo	Imogiri
840	Kelompok Hadroh "Nada Nurani"	Sriharjo	Imogiri
841	Sholawatan Mudho Palupi "Sekar Jagat"	Sriharjo	Imogiri
842	Kelompok Karawitan "Sekar Mas"	Sriharjo	Imogiri
843	Kelompok Sholawat "Al Mahabbah"	Girirejo	Imogiri

No	Jenis Kelompok	Desa	Kecamatan
844	Paguyuban Karawitan “Ngudi Laras”	Girirejo	Imogiri
845	Kelompok Seni “Saka”	Imogiri	Imogiri
JETIS			
846	GRUP KESENIAN KARAWITAN “SEKAR WANGI “	Canden	Jetis
847	Forum Komunikasi Kelompok Kesenian dan Kebudayaan “S U M B E R L A R A S “	Sumberagung	Jetis
848	Paguyuban Seni Karawitan “LANGEN BUDOYO RINI “	Patalan	Jetis
849	Paguyuban Kethoprak “WATU NGELAK “	Trimulyo	Jetis
850	Paguyuban Karawitan “LARAS PERTIWI “	Canden	Jetis
851	Perkumpulan Seni Karawitan “LANGEN WIROMO “	Trimulyo	Jetis
852	Kesenian Sholawat Nabi Mudho Palupi “MUJI LARAS “	Canden	Jetis
853	Gejog Lesung “SEKAR RINONCE “	Trimulyo	Jetis
854	Paguyuban Karawitan dan Wayang Orang “KRIDA BEKSO WIRAMA MUDA “	Sumberagung	Jetis
855	Group Seni Slawatan “MUDO PALUPI “	Canden	Jetis
856	Perkumpulan Seni Karawitan “LANGEN WIROMO RINI “	Trimulyo	Jetis
857	Paguyuban Karawitan “LANGEN SUKO “	Sumberagung	Jetis
858	Seni Karawitan “NGUDI LARAS “	Canden	Jetis
859	Seni Jatilan “TURONGGO SETO “	Canden	Jetis
860	Kesenian Hadroh “NURUL MUKMIN “	Canden	Jetis
861	Srandul “JATI BUDAYA “	Canden	Jetis
862	Ketoprak Mataram “AGUNG BUDAYA “	Canden	Jetis
863	“TEATER LINGKAR PUTIH “	Patalan	Jetis
864	Paguyuban Kesenian Tradisional Reog “SEKAR TANJUNG “	Patalan	Jetis
865	Paguyuban Kethoprak Mataram “LINTANG RINONCE “	Trimulyo	Jetis
866	Paguyuban Kethoprak “CIPTO BUDOYO “	Sumberagung	Jetis
867	Jathilan Kreasi Baru “TURONGGO MUDHO KINASI “	Trimulyo	Jetis
868	Kelompok Hadroh “NURUL QOLBI “	Sumberagung	Jetis
869	Seni Karawitan dan Pedalangan “SIMBAR INTEN”	Canden	Jetis
870	Sanggar Seni dan Budaya “NARENDRA”	Patalan	Jetis
871	Group Seni Sholawat “AL MUSTOFA DEMANGAN”	Trimulyo	Jetis
872	Paguyuban Kesenian Santi Sworo “NGUDYO LARAS”	Sumberagung	Jetis
873	Bregodo Rakyat “TURI PUTIH “	Sumberagung	Jetis
874	Group Qosidah “TANLALANA”	Sumberagung	Jetis
875	Sanggar Tari dan Karawitan “LANGEN PUTRA”	Patalan	Jetis
876	Sanggar “TEMBOK”	Patalan	Jetis
877	Paguyuban Seni Karawitan Jawa “HARJA LARAS”	Trimulyo	Jetis
878	Orkes Keroncong “KRISTA BAHANA”	Sumberagung	Jetis
879	“ORKES SENOPATI”	Sumberagung	Jetis
880	Paguyuban Seni Karawitan Jawa “NGUDI LARAS”	Trimulyo	Jetis

No	Jenis Kelompok	Desa	Kecamatan
881	GROUP MUSIK HADROH "AL-HIDAYAH"	Sumberagung	Jetis
882	PAGUYUBAN SENI "TURONGGO JATI"	Canden	Jetis
883	PAGUYUBAN GEJOG LESUNG "LESTARI"	Patalan	Jetis
884	PAGUYUBAN KARAWITAN "SEKAR LARAS"	Patalan	Jetis
885	Paguyuban Kethoprak Mataram putri Pertiwi Budoyo	Trimulyo	Jetis
886	Paguyuban Mocopat Sekar Mulyo	Trimulyo	Jetis
887	Sanggar Seni Jathilan Turonggo Jati	Canden	Jetis
888	Paguyuban Seni Karawitan Laras Ati	Canden	Jetis
889	PAGUYUBAN KESENIAN KETHOPRAK "Pasekar Budaya"	Sumberagung	Jetis
890	SANGGAR SENI BUDAYA "Watu Ngelak"	Trimulyo	Jetis
891	Paguyuban Seni Reog "Tejo Budoyo"	Sumberagung	Jetis
892	Paguyuban Macapat "Panji Raras Budaya"		Jetis
893	Sanggar Tari "Sekar Melati"	Trimulyo	Jetis
894	Kelompok Kesenian Orkes Melayu "Afseena"	Sumberagung	Jetis
895	Paguyuban Campursari "Tresna Muda"	Sumberagung	Jetis
896	Paguyuban Kesenian Tradisional Reog "Sekar Tanjung"	Patalan	Jetis
897	Kelompok Seni Musik "Vokalis Rock Indonesia (VRI)"	Trimulyo	Jetis
898	Paguyuban Kesenian Tradisional "Turonggo Jati"	Canden	Jetis
899	Paguyuban Kesenian Angklung "Cakra Nada"	Trimulyo	Jetis
900	Kesenian Kasidah PKK Turi "Nurul Hidayah"	Sumberagung	Jetis
901	Sanggar Seni Sholawat "Al-Mustofa"	Trimulyo	Jetis
902	Paguyuban Gejog Lesung "Sumringah"	Trimulyo	Jetis
903	Sholawat Mudo Palupi "Ngudi Basuki"	Trimulyo	Jetis
904	Grup Hadroh Modern "Walisonggo"	Trimulyo	Jetis
905	Paguyuban Seni Jathilan "Turonggo Mudo Karangnongko"	Sumberagung	Jetis
906	Paguyuban Kesenian Karawitan "Marsudi Laras"	Patalan	Jetis
907	Paguyuban Sholawat Jowo "Pendopo Mamba'ul Hikmah"	Patalan	Jetis
908	Paguyuban Reog Wayang "Mudha Manunggal"	Patalan	Jetis
909	Kelompok Hadroh "Muhasabatul Qolby"	Sumberagung	Jetis
910	Kelompok Teater & Sastra "Unik Proyek Teater"	Trimulyo	Jetis
911	Paguyuban Budoyo Tradisional Merti Dusun "Ngudi Lestari Budoyo"	Canden	Jetis
BANGUNTAPAN			
912	KELOMPOK KESENIAN HADROH "TOMBO ATI"	Banguntapan	Banguntapan
913	Bergodo Ngeksigondo Mataram Kutho Gede "PASAREAN ASTONO LUHUR MATARAM KOTA GEDE"	Jagalan	Banguntapan
914	Kesenian Tradisional Jathilan Kreasi Baru "TURONGGO SEKAR KENCONO"	Jambidan	Banguntapan
915	"NGESTHI WIROMO RETNO"	Baturetno	Banguntapan
916	Kesenian Tradisional "SRANDOL"	Banguntapan	Banguntapan
917	Kelompok "HADRAH PERMATA"	Potorono	Banguntapan

No	Jenis Kelompok	Desa	Kecamatan
918	Paguyuban Kesenian Jathilan “ TURONGGO MUDHO SETYA MANUNGGAL “	Baturetno	Banguntapan
919	Kelompok Seni Karawitan “ MARDI WIROMO “	Banguntapan	Banguntapan
920	Komunitas Pecinta Musik Koes Plus “ P-PLUS/PLUMBON PLUS “	Banguntapan	Banguntapan
921	Kelompok Karawitan “ SEKAR ARUM “	Tamanan	Banguntapan
922	“ BERGODO SINGOSARI “	Singosaren	Banguntapan
923	“ SANGGAR BUDAYA SINGOSAREN “	Singosaren	Banguntapan
924	Kesenian Tradisional Jathilan Kreasi Baru “ SEKAR KENCONO “	Jambidan	Banguntapan
925	Kesenian Jathilan Kreasi Baru “KUDHO MATARAM “	Potorono	Banguntapan
926	Paguyuban Seni Hadroh “NURUL MUKMIN“	Jambidan	Banguntapan
927	Jathilan “KRIDHO TURONGGO“	Potorono	Banguntapan
928	Paguyuban Seni Karawitan "TIRTO WIJI ASIH"	Tamanan	Banguntapan
929	Sanggar Seni dan Karawitan "GEMA JAGATNATHA"	Banguntapan	Banguntapan
930	paguyuban orkes kroncong “MEKAR SARI“	Baturetno	Banguntapan
931	PAGUYUBAN SENI “HADROH KADARIA “	Baturetno	Banguntapan
932	PAGUYUBAN SENI KARAWITAN “KARTINI LARAS“	Banguntapan	Banguntapan
933	KELOMPOK KESENIAN“ BERGADA SORENG LAGA “	Jambidan	Banguntapan
934	Sanggar Kesenian Demang Tamtaka	Jambidan	Banguntapan
935	SANGGAR TARI "Sekar Mataram"	Singosaren	Banguntapan
936	SANGGAR SENI JATHILAN KLASIK "Kudho Sawunggaling"	Wirokerten	Banguntapan
937	Kelompok Seni Budaya “Assalam”	Singosaren	Banguntapan
938	Kesenian Panembromo “Puspito Laras”	Singosaren	Banguntapan
939	Paguyuban Karawitan “Sekar Melati”	Singosaren	Banguntapan
940	Kesenian Jathilan “Taruna Bhakti Tama”	Singosaren	Banguntapan
941	Kelompok Seni “Ayu Permata Dance Company”	Baturetno	Banguntapan
942	Grup Angklung “Gita Surya Madani”	Jomblang	Banguntapan
943	Paguyuban Karawitan “Taman Puspita Laras”	Tamanan	Banguntapan
944	Paguyuban Karawitan “Langen Mulya Budaya”		Banguntapan
945	Kesenian Jathilan “Sido Dadi”	Baturetno	Banguntapan
946	Paguyuban Karawitan “Laras Madya Budaya”	Banguntapan	Banguntapan
947	Paguyuban Seni Kethoprak “Ragil Kuning”	Tamanan	Banguntapan
948	Sanggar Tari “Ambar Arum”	Jambidan	Banguntapan
949	Sanggar Seni “Pringgo Mustiko Laras”	Banguntapan	Banguntapan
950	Kelompok Teater “Lombok Riwit”	Jambidan	Banguntapan
951	Paguyuban Mocapat “Bangun Sekar Budaya”		Banguntapan
952	Kelompok Teater “Sasangka”	Tamanan	Banguntapan
953	Kelompok Kesenian Jathilan “Demang Tamtaka”	Jambidan	Banguntapan
954	Kelompok Kesenian Kethoprak “Agung Budi Aji”	Jambidan	Banguntapan

No	Jenis Kelompok	Desa	Kecamatan
955	Kelompok Seni Kethoprak “Langen Mudha Budaya”	Potorono	Banguntapan
956	Sanggar Seni Tari Jathilan Kreasi “Mekar Wahyu Kencono”	Banguntapan	Banguntapan
957	Kelompok Kesenian Barongan “Rogo Bolo Mataram”	Singosaren	Banguntapan
PIYUNGAN			
958	Kelompok Hadroh “SABILUL MUHTADIN “	Srimulyo	Piyungan
959	Kelompok Seni “LEMAHDADI “	Sitimulyo	Piyungan
960	Kelompok Hadroh “AL FATAH “	Sitimulyo	Piyungan
961	Paguyuban Seni Tradisional Sholawat Nabi dan Tari Saman “DZIKIR MAULUD “	Srimulyo	Piyungan
962	Paguyuban Seni Tradisional Gejog Lesung “TJOKRO JUMENGGLUNG “	Srimulyo	Piyungan
963	“PAGUYUBAN DHEKAHAN GEDHE PAYAK “	Srimulyo	Piyungan
964	Paguyuban Kethoprak “RAS BUDOYO “	Srimulyo	Piyungan
965	Paguyuban Tresno Budoyo “SRIMPI “	Srimulyo	Piyungan
966	Bregada “PRAWIRA REJASAN “	Srimulyo	Piyungan
967	Paguyuban Karawitan “WIROMO RINI “	Srimulyo	Piyungan
968	Paguyuban Rondha Tek-Tek “NGABDUL BUDOYO “	Srimulyo	Piyungan
969	Paguyuban Jathilan “TURONGGO BUDOYO “	Srimulyo	Piyungan
970	Paguyuban Kesenian Jathilan “TURONGGO MUDHO “	Sitimulyo	Piyungan
971	Paguyuban Kesenian Jathilan Tradisional “KUDO SEMBODO “	Sitimulyo	Piyungan
972	Organisasi Budaya “HADROH BAITUROHMAN “	Sitimulyo	Piyungan
973	Sanggar Tari “LAKSITA “	Sitimulyo	Piyungan
974	“KETHOPRAK CAHYA BUDAYA “	Sitimulyo	Piyungan
975	Paguyuban Hadroh “NURUL QULBI “	Sitimulyo	Piyungan
976	Group Hadroh Ibu-Ibu “AL MARO-AH “	Sitimulyo	Piyungan
977	Kelompok Budaya dan Kesenian “SRANDUL LESTARI MULYO “	Sitimulyo	Piyungan
978	Kelompok Kesenian Organ Tunggal “Mr. T Entertainment “	Sitimulyo	Piyungan
979	Organisasi Budaya “HADROH AN NIDA “	Srimulyo	Piyungan
980	Paguyuban Orkes Keroncong “WIJAYA NADA“	Srimartani	Piyungan
981	Grup Hadroh “SHOHIBUL QOLBU “	Sitimulyo	Piyungan
982	Group Hadroh “TAMAN HATI “	Srimulyo	Piyungan
983	Paguyuban Sholawat Nabi “PITUTUR JATI “	Srimulyo	Piyungan
984	“TURONGGO MUDO LANGGENG PRAKOSO “	Srimartani	Piyungan
985	Sanggar Tari “MELATI RINONCE “	Srimulyo	Piyungan
986	“SATRIO MUDHO SEMBRANI “	Sitimulyo	Piyungan
987	Merti Dusun “KUPATAN KRING JOLOSUTRO “	Srimulyo	Piyungan
988	Kelompok Waosan “SHOLAWAT NABI “	Srimartani	Piyungan
989	Sanggar Seni Budaya “SATRIYA BUDAYA “	Srimulyo	Piyungan

No	Jenis Kelompok	Desa	Kecamatan
990	“ PAGUYUBAN WAHYU PITUTUR “	Sitimulyo	Piyungan
991	Sanggar Tari “ NIMAS PUTRI KENCANA “	Srimartani	Piyungan
992	Paguyuban Seni Jathilan “ MANUNGGA KARSO “	Srimartani	Piyungan
993	Paguyuban Jathilan Cakra Puspa	Srimulyo	Piyungan
994	Paguyuban Kesenian Manunggal	Srimartani	Piyungan
995	Paguyuban Warga “NGIJO - JOMBOR“	Srimulyo	Piyungan
996	Paguyuban Seni Jathilan“MANUNGGA KARSO“	Srimartani	Piyungan
997	Forum Remaja “NGANYANG BERSATU“	Sitimulyo	Piyungan
998	Paguyuban " MERTI DUSUN KUDEN"	Sitimulyo	Piyungan
999	Group Hadroh Sirooan Muniro	Sitimulyo	Piyungan
1000	Paguyuban Adat Catur Mulyo	Sitimulyo	Piyungan
1001	Paguyuban Adat Tradisi Mojosari Budaya	Sitimulyo	Piyungan
1002	Paguyuban Adat Tradisi Mojosari Budaya	Sitimulyo	Piyungan
1003	Sanggar Tari Sekar Kusuma	Srimartani	Piyungan
1004	KELOMPOK KESENIAN QOSIDAH "Puspita Nada"	Sitimulyo	piyungan
1005	KELOMPOK SANGGAR TARI "Sekar Arum"	Srimulyo	Piyungan
1006	PAGUYUBAN SENI "Mulyo Budoyo"	Srimulyo	Piyungan
1007	KESENIAN HADROH "Adz - Dzikru"	Sitimulyo	Piyungan
1008	PAGUYUBAN KESENIAN "BREGODO KUPATAN JOLOSUTRO"	Srimulyo	Piyungan
1009	PAGUYUBAN KESENIAN GEJOG LESUNG "JOLOSUTRO ASLI"	Srimulyo	Piyungan
1010	Sanggar Seni “Ajisaka”	Sitimulyo	Piyungan
1011	Kesenian Jathilan “Turonggo Seto”	Srimulyo	Piyungan
1012	Paguyuban Macapat “Tresna Budaya”	Sitimulyo	Piyungan
1013	Kelompok Hadroh “Majelis Sholawat IPPK”	Sitimulyo	Piyungan
1014	Kelompok Kesenian Hadroh “Baitussalam”	Sitimulyo	Piyungan
1015	Kelompok Bergodo “Sosro Birowo”	Sitimulyo	Piyungan
1016	Kelompok Sholawat Nabi “Laras Madya”	Sitimulyo	Piyungan
1017	Kelompok Hadroh Modern “Tali Jagad Lintang Songo”	Srimartani	Piyungan
1018	Paguyuban Bergodo “Bintoro”	Srimulyo	Piyungan
1019	Sanggar Seni “Sekar Arum”	Srimulyo	Piyungan
1020	Kelompok Seni Jathilan “Among Mudho Kawedar”	Sitimulyo	Piyungan
1021	Kelompok Hadroh “Gayeng Sareng”	Sitimulyo	Piyungan
1022	Kelompok Jathilan “Putra Kudha Beksa”	Sitimulyo	Piyungan
1023	Sanggar “Omah Opak”	Sitimulyo	Piyungan
1024	Kelompok Kesenian Jathilan “Sadar Budoyo”	Srimulyo	Piyungan
DLINGO			
1025	PERKUMPULAN SENI “ SANGGAR LESTARI BUDAYA “	Mangunan	Dlingo
1026	Paguyuban Campur Sari “ SIKMA NADA “	Mangunan	Dlingo
1027	FORUM PELESTARI BUDAYA (FPB)	Mangunan	Dlingo
1028	Sanggar Seni “ LARAS BUDOYO “	Mangunan	Dlingo

No	Jenis Kelompok	Desa	Kecamatan
1029	Sanggar Seni “ NGESTI BUDOYO “	Mangunan	Dlingo
1030	Forum Pelestari Budaya “ DESA TEMUWUH “	Temuwuh	Dlingo
1031	“ SANGGAR KRIDA BUDAYA “	Mangunan	Dlingo
1032	Paguyuban Seni Tari Tradisional Jathilan “ BEKSO MUDHO WIROMO “	Jatimulyo	Dlingo
1033	Sanggar Budaya “ SEROPAN 3 ”	Muntuk	Dlingo
1034	Paguyuban Seni Tari Jathilan “ SATRIO SEJATI “	Terong	Dlingo
1035	Paguyuban Seni Ketoprak “ NGESTI LARAS “	Terong	Dlingo
1036	Paguyuban Kesenian Reog “ GALIH JATI SARI “	Jatimulyo	Dlingo
1037	Group Sholawat Maulid Nabi “ AN-NUR “	Dlingo	Dlingo
1038	Paguyuban Seni Hadrah “ SABILAL MU’TADIN “	Dlingo	Dlingo
1039	Paguyuban Sholawat Nabi “ MARGO LARAS “	Dlingo	Dlingo
1040	Paguyuban Seni Sholawat “ DONO ROSO “	Dlingo	Dlingo
1041	Paguyuban Seni Sholawat Hadrah “ SAFINAH “	Dlingo	Dlingo
1042	Paguyuban Seni Jathilan “ KUDA PRAKOSA “	Dlingo	Dlingo
1043	Kesenian Gejlok Lesung “ GENDONG IROMO “	Dlingo	Dlingo
1044	Paguyuban Seni Jathilan “ TURONGGO PUSPITO “	Muntuk	Dlingo
1045	Paguyuban Seni Gejog Lesung “ ANDAYANI “	Muntuk	Dlingo
1046	Paguyuban Seni Jathilan “ CITRO BUDOYO ADILUHUNG “	Dlingo	Dlingo
1047	Kelompok Ronda Tek-Tek “ NGUDI AMAN “	Dlingo	Dlingo
1048	Paguyuban Seni Reog “ MAKARTI BUDOYO “	Dlingo	Dlingo
1049	Paguyuban Seni Reog “ NGREKSO PROJO “	Dlingo	Dlingo
1050	Sholawatan “ WIJI IMAN “	Dlingo	Dlingo
1051	Paguyuban Seni Sholawat Damaras “ NURUL KHASANAH “	Dlingo	Dlingo
1052	Karawitan “ KRIDHO WIROMO “	Dlingo	Dlingo
1053	Qasidah Modern “ RISMA NADA “	Dlingo	Dlingo
1054	Gejog Lesung “ PANUNTUN “	Dlingo	Dlingo
1055	Kesenian Doger “ SIDO MANUNGGAL “	Dlingo	Dlingo
1056	Solawat Hadroh “ IHDINASSABILA “	Dlingo	Dlingo
1057	Paguyuban Seni Sholawat Maulud “ NURUL UMAH “	Dlingo	Dlingo
1058	Kesenian Karawitan “ KRIDO UTOMO “	Dlingo	Dlingo
1059	Paguyuban Seni Jathilan “ TURONGGO MUDO PERWIRO “	Dlingo	Dlingo
1060	Paguyuban Seni Karawitan “ MUDO LARAS “	Dlingo	Dlingo
1061	Kesenian Musik “ WATON GUMYAK “	Dlingo	Dlingo
1062	Paguyuban Seni Kethoprak “ LESTARI MUDO BUDOYO “	Dlingo	Dlingo
1063	Group Ronda Thek-Thek “ SIDO MAJU “	Dlingo	Dlingo
1064	Paguyuban Seni Sholawat “ MUDHO PALUPI “	Dlingo	Dlingo
1065	Sanggar Seni Budaya “ MANGUN BUDAYA “	Mangunan	Dlingo
1066	Paguyuban Upacara Adat Merti Dusun “ SENDANG SETIKO	Terong	Dlingo

No	Jenis Kelompok	Desa	Kecamatan
1067	Paguyuban Seni Sholawat Donoroso "AL BAROKAH "	Temuwuh	Dlingo
1068	Paguyuban Seni Karawitan " SEDYO LARAS "	Temuwuh	Dlingo
1069	Paguyuban Tari Warog " GALIH JATI ANOM "	Jatimulyo	Dlingo
1070	Group Hadroh Asshoutul Qolbi	Jatimulyo	Dlingo
1071	Group Sholawat Jam'iyyah Sholawat Jawi	Jatimulyo	Dlingo
1072	Paguyuban Seni Turonggo Mudo Budoyo	Terong	Dlingo
1073	Paguyuban Seni Jathilan Turonggo Mudho Dwi Manunggal	Terong	Dlingo
1074	Paguyuban Seni Jathilan Sari Manunggal	Terong	Dlingo
1075	Paguyuban Seni Kethoprak Mataram Tresno Mudo Budoyo	Terong	Dlingo
1076	Group Hadroh Nur Fataa	Jatimulyo	Dlingo
1077	Kesenian Hadroh Assalam	Temuwuh	Dlingo
1078	Kesenian Hadroh Al Hikmah	Jatimulyo	Dlingo
1079	Kesenian Hadroh Nurul Huda	Dlingo	Dlingo
1080	Kethoprak "LESTARI MUDHA BUDAYA"	Dlingo	Dlingo
1081	Hadrah "SABILAL HUDA"	Temuwuh	Dlingo
1082	Kesenian Jathilan "KUDHO TUMENGGER"	Temuwuh	Dlingo
1083	Paguyuban Karawitan "SINAMBI LARAS"	Temuwuh	Dlingo
1084	Paguyuban Jathilan "TURONGGO NGESTI BUDOYO"	Muntuk	Dlingo
1085	Religi Hadroh "AL - AMIN "	Temuwuh	Dlingo
1086	Jaranan "SATRIA MUDA BUDAYA"	Temuwuh	Dlingo
1087	Kelompok Seni Hadroh "SUNAN GESENG"	Jatimulyo	Dlingo
1088	Seni Jathilan "TURONGGO MUDO BUDOYO"	Dlingo	Dlingo
1089	Paguyuban Seni Dolanan Anak "PUTRA BUDAYA"	Dlingo	Dlingo
1090	Gejog Lesung "MEKAR SARI"	Dlingo	Dlingo
1091	Paguyuban Seni Macapat "LARAS SWARA"	Dlingo	Dlingo
1092	Group Seni Hadroh "SIROJUL UMMAH"	Dlingo	Dlingo
1093	Bregada "MEKAR SARI WIRATAMTAMA"	Dlingo	Dlingo
1094	Paguyuban Kesenian Reog "TARUNA WIRA BUDAYA"	Temuwuh	Dlingo
1095	paguyuban seni dan budaya "SEKAR ARUM"	Terong	Dlingo
1096	PAGUYUBAN GEJOG LESUNG " KRIDO BUDOYO "	Dlingo	Dlingo
1097	PAGUYUBAN GEJOG LESUNG " SIDO MAKMUR "	Dlingo	Dlingo
1098	PAGUYUBAN GEJOG LESUNG "MANTEP MAJU RT 01 "	Dlingo	Dlingo
1099	PAGUYUBAN SENI KETHOP " GIRI BUDAYA "	Dlingo	Dlingo
1100	PAGUYUBAN KARAWIT " GIRI BUDAYA "	Dlingo	Dlingo
1101	PAGUYUBAN SENI HADROH " ELING PATINE "	Dlingo	Dlingo
1102	Paguyuban seni gejog lesung Pawarti	Dlingo	Dlingo
1103	Paguyuban karawitan Ngudi Laras	Temuwuh	Dlingo
1104	KELOMPOK KESENIAN KARAWITAN "Krido Budoyo"	Muntuk	Dlingo
1105	Paguyuban Reyog "Putra Wira Budaya"	Temuwuh	Dlingo
1106	Kesenian Jathilan "Cahyo Budoyo"	Dlingo	Dlingo

No	Jenis Kelompok	Desa	Kecamatan
1107	Paguyuban Gejok Lesung “Sekar Kemuning”	Temuwuh	Dlingo
1108	Grup Sholawat Rodat “Tegong Asinan”	Muntuk	Dlingo
1109	Paguyuban Seni Tari, Teater, dan Musik “Ngadhang Sarini”	Dlingo	Dlingo
1110	Sanggar Seni Budaya “Muda Manunggal”	Dlingo	Dlingo
1111	Kelompok Seni Karawitan “Niti Laras”	Muntuk	Dlingo
1112	Kelompok Seni Kenthong Rampak “Guyub Rukun”	Muntuk	Dlingo
1113	Grup Hadroh “Asyifaul Qolby”	Temuwuh	Dlingo
1114	Paguyuban Seni Ketoprak “Trisno Budoyo”	Muntuk	Dlingo
1115	Sanggar Seni dan Budaya “Trisno Budoyo”	Muntuk	Dlingo
1116	Paguyuban Seni Tari “Krido Iromo”	Muntuk	Dlingo
1117	Paguyuban Seni Gejog Lesung “Tanpo Laras”	Muntuk	Dlingo
1118	Kelompok Seni Musik “New Baratha”	Temuwuh	Dlingo

Sumber: Dinas Kebudayaan, 2020

2.3.1.2.16 Perpustakaan

1) Jumlah Perpustakaan

Gerakan Bantul Literasi di Kabupaten Bantul yang dilaksanakan pada tahun 2018 diharapkan dapat meningkatkan budaya literasi (baca, tulis, ucap) atau gemar membaca, suka menulis dan bisa mengungkapkan perasaan melalui kata-kata bagi seluruh masyarakat Bantul, sehingga visi misi Bantul sehat, cerdas dan sejahtera dapat terwujud.

Perpustakaan di Kabupaten Bantul terdiri dari satu perpustakaan daerah dan layanan perpustakaan keliling. Kegiatan peningkatan pelayanan perpustakaan dilakukan dengan pelayanan perpustakaan di Kantor Perpustakaan dan layanan perpustakaan keliling. Layanan perpustakaan keliling mencakup 17 kecamatan dan 75 desa yang ada di Kabupaten Bantul. Pelayanan perpustakaan dilaksanakan pada hari Senin-Kamis dan Jum’at. Untuk Senin – Kamis pelayanan dimulai dari pukul 08.00 – 16.00 dan Jumat dari pukul 08.00 – 14.30 sedangkan untuk hari Sabtu - Minggu dilayani dari pukul 08.00 – 12.00 WIB, dan pelayanan diliburkan pada saat hari libur nasional dan cuti bersama. Jumlah pengunjung di Perpustakaan rata-rata per hari 200 orang dan sampai akhir tahun total jumlah pengunjung mencapai 60.837 orang. Jangkauan layanan perpustakaan keliling sebanyak 189 lokasi, pelayanan dilakukan

selama 4 hari dalam 1 minggu, 16 hari dalam sebulan pada hari Senin-Kamis dengan rata-rata pengunjung perhari 1.481 orang.

Pelaksanaan perpustakaan keliling setiap hari Senin sampai dengan Kamis, dengan sasaran keliling meliputi perpustakaan sekolah, perpustakaan masjid, perpustakaan pondok pesantren, perpustakaan komunitas masyarakat, perpustakaan desa dan perpustakaan khusus (dinas/instansi). Dari semua unit armada yang ada, sudah menerapkan IT dengan sistem otomasi perpustakaan.

Tabel 2.124 Jenis Perpustakaan di Kabupaten Bantul

NO	JENIS PERPUSTAKAAN	JUMLAH	2019
1	Perpustakaan Daerah/Kabupaten	1	
2	Perpustakaan Desa	75	
3	Perpustakaan SD	392	
4	Perpustakaan SMP	113	
5	Perpustakaan SMA/SMK	83	
6	Perpustakaan Khusus/Instansi	7	
7	Perpustakaan Tempat Ibadah	56	
8	Perpustakaan Komunitas	106	
9	Perpustakaan Pondok Pesantren	7	
	Jumlah	840	

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bantul, 2020

2) Jumlah Pengunjung Perpustakaan

Jumlah pengunjung perpustakaan dapat menggambarkan budaya baca di daerah. Jumlah pengunjung perpustakaan dihitung berdasarkan pengunjung yang mengisi daftar kehadiran atau berdasarkan data yang diperoleh melalui system pendataan pengunjung. Jumlah pengunjung perpustakaan di Kabupaten disajikan pada Tabel 2.125.

Tabel 2.125 Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Bantul Tahun 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Pengunjung Perpustakaan milik Pemerintah Daerah (Pemda)	218.521	345.368	518.693	732.826	841.154

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bantul, 2020

Jumlah pengunjung perpustakaan di Kabupaten Bantul cenderung mengalami peningkatan. Peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2015 yang mencapai 218.521 orang dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 841.154 pengunjung. Hal ini mengindikasikan bahwa budaya baca di Kabupaten Bantul mengalami peningkatan. Peningkatan pengunjung perpustakaan di Kabupaten Bantul antara lain disebabkan oleh metode layanan dengan menggunakan sistem otomasi, paket dan manual, penambahan lokasi layanan keliling, sarana prasarana dan fasilitas khususnya layanan perpustakaan yang ada di kantor sudah dilengkapi WIFI, ruangan ber-AC, suasana nyaman serta tersedianya SDM pengelola perpustakaan yang memadai.

Tabel 2.126 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Menurut Usia

No	Jenis Pemustaka	Usia	Jenis Kelamin		Jumlah
			L	P	
1	Paud/TK	3-6 th	7.116	8.999	16.115
2	SD	7-12 th	196.792	266.977	463.769
3	SMP	13-15 th	32.331	43.036	75.367
4	SMA	16-18 th	47.456	99.093	146.549
5	Mahasiswa	>18 th	6.421	13.537	19.958
6	Pegawai	>18 th	25.123	42.179	67.302
7	Umum/lain-lain	>18 th	22.976	29.118	52.094
	Jumlah		338.215	502.939	841.154

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bantul, 2020

3) Koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah menunjukkan ketersediaan bahan pustaka dan bacaan yang dapat diakses oleh masyarakat. Jumlah koleksi buku yang tersedia di Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Bantul mengalami peningkatan sejak tahun 2013. Hal

ini disebabkan adanya peningkatan kemitraan dengan stakeholder perpustakaan dan adanya variasi koleksi. Koleksi bahan pustaka yang dimiliki oleh Perpustakaan Umum Kabupaten Bantul yang ada saat ini sebanyak 107.360 buku dengan jumlah judul bahan koleksi yang tersedia sebanyak 39.040 judul. Hal ini sudah memenuhi standar perpustakaan tipe A dengan koleksi sebanyak 17.000 judul. Selain itu, juga terdapat koleksi digital melalui *e-book* sebanyak 263 judul, masing-masing judul ada 8 buah, sehingga jumlah sebanyak 2.104 buah. Perkembangan jumlah koleksi bahan pustaka dari 2014-2018 dapat dilihat pada Tabel 2.127.

Tabel 2.127 Jumlah Koleksi Buku/ Bahan Pustaka
di Kabupaten Bantul Tahun 2015-2019

2015		2016		2017	
Judul	Buku	Judul	Buku	Judul	Buku
35.675	97.289	38.782	102.292	40.300	104.300
2018			2019		
Judul	Buku	e-book	Judul	Buku	e-book
39.040	107.360	2.104	39.547	113.897	2.104

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bantul, 2020

2.3.1.2.17 Kearsipan

Sesuai dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, salah satu urusan yang ditangani daerah adalah kearsipan. Urusan kearsipan diarahkan untuk penyelamatan dan pelestarian arsip daerah serta peningkatan kualitas pelayanan dalam bidang kearsipan. Arsip sebagai bukti pelaksanaan kegiatan instansi memiliki fungsi strategis dan dinamis. Strategis artinya bahwa informasi yang terekam dalam arsip tidak hanya memiliki nilai guna primer yang berguna bagi instansi pencipta sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen, tetapi arsip tentu memiliki nilai guna sekunder yaitu nilai guna kebugkutan dan informasional yang berguna untuk lembaga lain, orang, dan masyarakat luas. Nilai guna kebugkutan suatu arsip karena terkait dengan keberadaan instansi, benda, tempat, dan orang. Sementara nilai guna informasional suatu arsip karena

terkait dengan terjadinya peristiwa, kebijakan pemerintah, dan lain sebagainya.

Di Kabupaten Bantul urusan kearsipan tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang perpustakaan dan kearsipan.

Sampai saat ini di Kabupaten Bantul terdapat jumlah tenaga arsiparis ada 16 orang, jumlah arsip statis ada 2.649 dokumen dan jumlah pengelola kearsipan 154 orang.

Akuisisi dan pengelolaan arsip telah dilakukan pada tahun 2017 fokus pada dua tokoh yaitu tokoh keris (empu keris) mbah Djiwodiharjo dan pelukis ki Joko Pekik. Sedangkan tahun 2018 akuisisi arsip tokoh dalang Ki Timbul Hadiprayitno akuisisi arsip tokoh dalang Ki Timbul Hadiprayitno dan Arsip event tradisional Gerbang Madu Srimulyo Piyungan Dengan akuisisi arsip tersebut diharapkan dapat menambah hasanah arsip.

2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.3.2.1 Kelautan dan Perikanan

Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, mengamanatkan bahwa pengelolaan perikanan harus dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kebersamaan, kemitraan, kemandirian, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, kelestarian, dan pembangunan yang berkelanjutan.

Sasaran pembangunan kelautan dan perikanan adalah mencapai peningkatan produksi dan produktivitas perikanan dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi ikan, menyediakan bahan baku industri, meningkatkan pendapatan pembudidaya dan nelayan serta memperluas kesempatan berusaha dan kesempatan kerja. Potensi kelautan dan perikanan cukup besar dan masih terbuka peluang untuk pengembangannya.

1) **Produksi Perikanan Budidaya**

Terdapat 7 jenis ikan utama yang dibudidayakan di Kabupaten Bantul, yaitu gurami, nila, lele, bawal, patin, mas dan udang vanamei. Lele, nila dan gurami merupakan jenis ikan yang sangat diminati untuk dibudidayakan.

Tabel 2.128 Produksi Perikanan Budidaya menurut Jenis Ikan di Kabupaten Bantul Tahun 2015-2019

No.	Jenis Ikan	Produksi (Kg)				
		2015	2016	2017	2018*	2019
1	Gurami	2.038.280	1.860.867	2.028.830	2.164.370	1.723.948
2	Nila	2.231.763	1.924.565	2.114.000	2.567.437	2.618.329
3	Lele	6.106.252	6.738.202	7.094.430	7.028.122	7.425.503
4	Bawal	218.462	258.883	282.250	179.914	218.661
5	Patin	95.597	40.150	29.370	21.421	36.828
6	Mas	24.268	34.018	37.450	37.444	42.888
7	Udang Vannamei	650.602	507.038	440.890	292.292	374.440
JUMLAH		11.365.224	11.363.724	12.027.236	12.291.000	12.440.597

Sumber: Diperpautkan Kabupaten Bantul, 2020

Pada tahun 2019 produksi perikanan budidaya mengalami kenaikan sebesar 1,20 % atau 149.597 kg dari 12.291.000 kg pada tahun 2018 menjadi 12.440.597 kg pada tahun 2019. Produksi pada 6 jenis ikan mengalami peningkatan dan didominasi lele. Lele paling banyak dibudidayakan karena memiliki umur panen relatif lebih cepat, padat tebaranya lebih banyak, dan lebih tahan terhadap kondisi lingkungan yang kurang baik. Kenaikan produksi ini disebabkan adanya penerapan teknologi baru di masyarakat yaitu teknologi MATLAIR (hemat lahan dan air), berupa kolam bulat dengan inlet outlet dan aerasi serta manajemen air secara intensif sehingga dapat meningkatkan padat tebar ikan lele sampai dengan 400 ekor per meter kubik. Penurunan produksi ikan budidaya terjadi pada gurami, disebabkan langkanya ketersediaan bibit gurami dan adanya penyakit ikan yang menyebabkan kematian pada gurami.

Pelaku usaha budidaya ikan di Kabupaten Bantul sebagian besar skala rumah tangga biasa disebut sebagai Rumah Tangga Perikanan (RTP) budidaya. Pada tahun 2019 terdapat penambahan 50 RTP. Penambahan

RTP budidaya ini terutama pada budidaya lele. Adanya teknologi MATAIR menjadi daya tarik tersendiri karena mudah dan tidak memerlukan tempat yang luas, dapat diusahakan di pekarangan.

Tabel 2.129 Rumah Tangga Perikanan (RTP) Budidaya di Kabupaten Bantul Tahun 2015-2019

No.	Tahun	RTP Budidaya (unit)
1	2015	5.176
2	2016	5.176
3	2017	5.176
4	2018	5.176
5	2019	5.216

Sumber: Diperpautkan Kabupaten Bantul, 2020

Pengembangan budidaya perikanan didukung dengan pengembangan benih ikan melalui Balai Budidaya Ikan (BBI) yang berlokasi di Barongan, Sanden, Gesikan, Krapyak dan Pundong.

Tabel 2.130 Produksi Benih Ikan dari BBI di Kabupaten Bantul Tahun 2015-2019

No.	Tahun	Produksi Benih Ikan (ekor)
1	2015	2.079.065
2	2016	2.600.854
3	2017	3.378.975
4	2018	4.629.118
5	2019	4.530.470

Sumber: Diperpautkan Kabupaten Bantul, 2020

Berdasarkan Tabel 2.130 pada tahun 2019 diproduksi 4,5 juta ekor benih ikan dari BBI. Jika sandingkan dengan produksi perikanan budidaya (Tabel 2.128) dari tahun 2015 sampai dengan 2019 produksi ikan khususnya gurami, nila dan lele berkisar 10 juta sd 11 juta kg. Artinya BBI belum mampu memenuhi kebutuhan benih dan kekurangan benih ini dipenuhi dari Unit Pembenihan Rakyat (UPR).

Beberapa upaya telah dilakukan untuk meningkatkan produksi benih berkualitas pada UPR, antara lain dengan memberikan bantuan induk gurami, lele, nila, dan sarana prasarana pembesaran ikan maupun perbenihan ikan. Selain itu juga dilaksanakan pembinaan dan

pengembangan perikanan serta pemberian bantuan sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya baik pembesaran maupun pembenihan ikan.

2) Produksi Perikanan Tangkap

Kabupaten Bantul memiliki pantai sepanjang 13,5 km dan terdapat usaha perikanan tangkap yang beraktifitas pada 5 unit TPI yaitu TPI Depok, TPI Ngepet, TPI Patihan, TPI Kuwaru dan TPI Ngentak.

Tabel 2.131 Produksi Perikanan Tangkap
di Kabupaten Bantul Tahun 2015-2019

No.	Uraian	Jumlah (ton)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Produksi tangkap laut	391,37	234,30	624,75	473,01	497,77
2	Produksi tangkap perairan umum	349,23	282,20	260,60	295,43	305,08
Jumlah		741,60	516,50	885,35	768,44	812,85

Sumber: Diperpautkan Kabupaten Bantul, 2020

Pada tahun 2019 terjadi kenaikan produksi ikan tangkap laut dibanding periode tahun sebelumnya yaitu sebesar 24,76 ton atau 4,97%. Produksi tangkap perairan umum juga mengalami peningkatan 9,55 ton atau 3,13%. Peningkatan ini didukung oleh peningkatan produksi dari ikan ekonomis tinggi seperti ikan bawal dan ikan layur. Selain itu, program restocking ikan di perairan umum juga meningkatkan populasi ikan sehingga pada akhirnya meningkatkan produksi ikan tangkap perairan umum.

2.3.2.2 Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor strategis di Kabupaten Bantul. Selain sebagai lokomotif penggerak peningkatan perekonomian masyarakat, sektor ini juga memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Besarnya kontribusi sektor ini sangat tergantung pada jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bantul. Jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bantul. Meningkatnya jumlah wisatawan ke Kabupaten Bantul akan meningkatkan

PAD dari sektor pariwisata. Jumlah wisatawan dan PAD sektor pariwisata disajikan pada Tabel 2.132.

Tabel 2.132 Jumlah Kunjungan Wisatawan dan PAD Sektor Pariwisata di Kabupaten Bantul Tahun 2015-2019

No.	Tahun	Jumlah Wisatawan (Orang)	Jumlah PAD (Rp)
1.	2015	2.500.114	11.150.632.500,00
2.	2016	2.800.800	12.739.875.250,00
3.	2017	3.405.685	17.090.253.000,00
4.	2018	4.204.422	29.066.376.750,00
5.	2019	5.166.615	31.756.578.250,00

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, 2020

Jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bantul pada tahun 2019 mencapai 5.166.615 orang atau meningkat sebesar 22,89% dari tahun 2018. Sedangkan dari sisi kontribusi terhadap PAD 2018 mencapai Rp31.756.578.250,00 atau meningkat sebesar 9,26% dari perolehan tahun 2018. Peningkatan perolehan tersebut di atas selain didukung oleh keanekaragaman obyek wisata yang meliputi alam, budaya/religius, dan minat khusus/buatan, juga didukung oleh pengembangan desa-desa wisata sebagai *alternative tourism* di Kabupaten Bantul, sehingga dapat memberikan pilihan-pilihan destinasi wisata bagi wisatawan. Pencapaian jumlah kunjungan wisatawan tersebut di atas merupakan keberhasilan dari pelaksanaan strategi pengembangan pariwisata antara lain melalui peningkatan daya tarik obyek wisata, intensifikasi dan ekstensifikasi promosi pariwisata, peningkatan kemitraan dan jejaring pariwisata serta optimalisasi dan pemberdayaan kapasitas desa-desa wisata.

Tabel 2.133 Data Event Tahun 2019

NO.	JENIS EVENT	KETERANGAN
1	Festival Makanan Tradisional	Kegiatan PPDLN
2	Festival Ingkung	Kegiatan PPDLN
3	Festival Mie	Kegiatan PPDLN

NO.	JENIS EVENT	KETERANGAN
4	Festival Lampion	Kegiatan PPDLN
5	Festival Fashion Street	Kegiatan PPDLN
6	Festival Dayung	Kegiatan Peningkatan Daya Tarik
7	Festival Jogja Air Show (JAS)	Kegiatan Peningkatan Daya Tarik
8	Festival Malam 1 Syuro	Kegiatan Peningkatan Daya Tarik
9	Festival Malam 15 Syuro	Kegiatan Peningkatan Daya Tarik
10	Pentas Jathilan	Kegiatan Peningkatan Daya Tarik
11	Pentas Campursari	Kegiatan Peningkatan Daya Tarik
12	Pentas Koes Plus	Kegiatan Peningkatan Daya Tarik
13	Pentas Akhir Tahun	Kegiatan Peningkatan Daya Tarik
14	Pentas Aktraksi Wisata Parangtritis	Kegiatan Peningkatan Daya Tarik
15	The Harmony Nature & Culture Orchestra	Kegiatan PPDLN
16	Symphoni Orkestra	Kegiatan PPDLN
17	Surving Kompetisi	Kegiatan PPDLN
Sumber : Dinas Pariwisata, 2020		

Tabel 2.134 Jumlah Daya Tarik Wisata dan Usaha Pariwisata di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2018

No.	Jenis	2016	2017	2018	2019	Satuan	Keterangan
A.	Daya Tarik Wisata						
1	Alam	20	20	25	32	Unit	Pantai, goa, ekosistem bakau, gumuk pasir
2	Buatan	54	59	59	84	Unit	Taman rekreasi air, kolam renang, taman wisata agro dan Desa Wisata
B.	Usaha Pariwisata						
1	Hotel bintang	1	1	3	3	Unit	Sudah mempunyai ijin
2	Hotel non-bintang	94	117	56	56	Unit	Sudah mempunyai ijin
3	Restoran/rumah makan	199	225	142	142	Unit	
4	Jasa perjalanan wisata	25	67	33	33	Unit	Sudah mempunyai ijin

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, 2020

Kunjungan wisata meningkat pada lima hari besar tertentu, yaitu liburan tahun baru 2019 di obyek wisata Pantai Parangtritis; padusan 2018 di obyek wisata Pantai Parangtritis; lebaran 2018 di obyek wisata Pantai Parangtritis, obyek wisata Pantai Samas, obyek wisata Pantai Goa Cemara, obyek wisata Pantai Pandansimo, obyek wisata Pantai Kuwaru, obyek

wisata Goa Cerme, dan obyek wisata Goa Selarong; malam satu sura 2018 di obyek wisata Pantai Parangtritis, obyek wisata Pantai Samas, obyek wisata Pantai Goa Cemara, obyek wisata Pantai Pandansimo, dan obyek wisata Pantai Kuwaru; dan malam tahun baru 2019 di obyek wisata Pantai Parangtritis, obyek wisata Pantai Samas, obyek wisata Pantai Goa Cemara, obyek wisata Pantai Pandansimo, dan obyek wisata Pantai Kuwaru.

Namun masih ada ketimpangan jumlah pengunjung yang dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.135 Jumlah Wisatawan Per Destinasi Wisata
di Kabupaten Bantul Tahun 2014-2018

Nama Destinasi Wisata	2014	2015	2016	2017	2018
Pantai Parangtritis	1,879,000	1,999,870	2,229,125	2,996,204	2,895,187
Pantai Samas	60,650	140,850	247,293	668,740	730,875
Goa Cemara	88,909	95,260	84,687		
Pandansimo	141,573	163,169	140,050		
Kwaru	77,732	67,585	49,307		
Goa Selarong	36,731	39,925	36,818	36,652	37,847
Goa Cerme	13,756	13,455	13,520	9,788	7,924
Tirta Tamansari	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Pariwisata Kab. Bantul, 2020

Berdasarkan perda terbaru, mulai tahun 2017 Pantai Samas, Goa Cemara, Pandansimo dan Kwaru disebut sebagai ‘Pantai Kawasan Barat’. Berdasarkan data tersebut di atas, diketahui terdapat ketimpangan kunjungan wisatawan yang signifikan antara Pantai Parangtritis dan pantai lainnya. Rata-rata kunjungan wisatawan tahun 2014 – 2018 di Pantai Parangtritis yaitu sebesar 80,06% dari total kunjungan yang ada. Hal ini disebabkan karena Pantai Parangtritis merupakan ciri khas dari obyek wisata di Kabupaten Bantul.

Tabel 2.136 Desa Wisata di Kabupaten Bantul Tahun 2018

No.	Nama Desa Wisata	Alamat/ website	Potensi Wisata	Jenis Kategori	CP
1	Kaki Langit	Mangunan, Dlingo	Alam Perbukitan Aneka Kerajinan Kuliner tiwul dll.	berkembang	Purwoharsono 081804117711
2	Goa Gajah	Lemahbang Mangunan Dlingo	Goa Gajah	embrio	Sugimin 087839879069
3	Cempluk	Cempluk, mangunan, Dlingo	Wisata budaya & kerajinan	embrio	Suhardi 087739697151
4	Songgo Langit	Skorame, Mangunan, Dlingo	Wisata budaya & kerajinan	embrio	Lagimin 087839983308
5	Banyu Nibo	Rejosari, Terong, Dlingo	Pertanian terasering Tracking Gunung api purba Air terjun	embrio	Sagiyo 081804254475 Aris 08522843669 Sukamdan 087838391333
6	Karangasem	Karangasem Munthuk	Kerajinan Bambu, alam	embrio	Karyadi 083867161718
7	Karang Tengah	Karang Tengah, Imogiri Kasiutri.com	Budidaya Ulat Sutera & Batik Pewarna alami	maju	Pargiyanto 08128003052 Sogiyanto 085867224945
8	Kebon Agung	Desa Kebon Agung, Imogiri Kebonagungimogiri .blogspot.com	Wisata Pendidikan Pertanian	maju	Bachroni 081328732113 Dalbiya 081392525751
9	Candran	Desa Kebon Agung, Imogiri Kebonagungimogiri .blogspot.com	Museum Tani Gejog lesung Nini thowog	maju	Kristyo Bintoro 085100865311 Ponijo 085643752225
10	Wukirsari	Desa Wukirsari Imogiri Desawukirsari.com	Batik Tulis Pewarna Alami	maju	Nur Ahmadi 08175475794 Agus B 0274 6557238
11	Pujungrejo	Desa Wukirsari Imogiri	Kerajinan Kulit Seni tari	embrio	Sujiono 08179108397
12	Imogiri	Desa Imogiri, Imogiri	Wisata Budaya	embrio	Surojo 087838842188
13	Wunut	Desa Sriharjo, Imogiri	Alam Budaya	embrio	Sugiyanto 087838421730

No.	Nama Desa Wisata	Alamat/ website	Potensi Wisata	Jenis Kategori	CP
14	Krebet	Desa Sendang Sari, Pajangan Krebet.com	Kerajinan Batik Kayu	maju	Kemiskidi 0816685954, Yulianto 0818270657
15	Mangir, Ki Ageng Wonoboyo	Desa Sendangsari Pajangan	Wisata Sejarah mataram islam Reog Campursari Kuliner Gudeg manggar	embrio	Irwan Purnomo 085729810210 Muh. Irwan 08157955413
16	Guwosari Slarong	Desa Guwosari, Pajangan Guwosaricraft.com	Cagar Budaya & Kerajinan kayu Goa selarong	berkembang	Dahono 0817464977 Jumino 0274 9111498
17	Kampung Santan	Desa Guwosari, Pajangan Guwosaricraft.com	Kerajinan Tempurung Kuliner ingkung	berkembang	Zukron 086647545570 Nur taufik 085643454575
18	Kalak Ijo	Desa Guwasari, Pajangan	Kuliner ingkung, budaya	embrio	Haryanto 081227077577 Sareh 0815100204545
19	Tembi	Desa Timbulharjo, Sewon Tembivillage.wordpress.com	Aneka Kerajinan	maju	Dawud Subroto 081392133205
20	Kajigelem	Desa Bangunjiwo, Kasihan	wisata budaya pembuatan gerabah	berkembang	H. Suburjo Hartono, SE 0274 7475423
21	Jipangan	Jipangan, Bangunjiwo, Kasihan	Seni Budaya & kerajinan	berkembang	Darmawan 085640423376 Siyam 081328431269
22	Manding	Desa Sabdodadi, Bantul	Sentra Kerajinan Kulit	maju	Jumakir (0274) 6662191 Siti Fatimah 0274 8336586

No.	Nama Desa Wisata	Alamat/ website	Potensi Wisata	Jenis Kategori	CP
23	Jagalan	Desa Jagalan, Banguntapan	Cagar Budaya	embrio	Bambang Winardi 085868269754
24	Kalibuntung	Desa Srihardono, Pundong Desawisatakalibuntung.com	out bond pendidikan	berkembang	Eko 081568444252 Kholis 087839098211
25	Kampung Surocolo	Desa Seloharjo, Pundong	Seni Budaya, gua jepang	embrio	Rutijo 081804271322
26	Panjangrejo	Desa Panjangrejo, Pundong	Kerajinan Gerabah	berkembang	Suparjo 081802637571
27	Puton	Desa Trimulyo, Jetis	Alam dan perikanan	berkembang	Soraya Isfandiary 081328570018
28	Trimulyo	Desa Trimulyo, Jetis	Cagar Budaya & batik sekar nitik	embrio	Emam Darmawan 081804077645
29	Kiringan	Desa Candan, Jetis	Jamu Herbal	embrio	Sudiyatmi 08179426696
30	Mangrove	Tirtohargo Kretek	Alam, penanaman mangrove	embrio	Dwi Ratmanto 085100294460
31	Laguna Depok	Depok Parangtritis	Outbond, Kuliner sea food	embrio	Tanto 08193177723
32	Mulyodadi	Desa Mulyodadi, Bambanglipuro	Kuliner, senibudaya	embrio	Sigid 081328512189
33	Lopati	Desa Trimurti, Srandakan	Kuliner	berkembang	Pairin 081392883667
34	Gilangharjo	Desa Gilangharjo, Pandak	Wisata Alam Pendidikan	embrio	supriyanto 081903714747
35	Pandansari	Desa Gadingsari, Srandakan	Wisata Pantai & Buah Naga	embrio	Rohjiyanto 081804275277
36	Goa Cemara	Desa Gadingsari, Srandakan	Wisata Pantai, outbond	berkembang	Wahadi 081804197658
37	Kergan	Desa Tirtomulyo, Kretek	Wisata Pendidikan Perikanan	embrio	Sunarto
38	Ngringingan	Desa Palbapang, Bantul	Wisata Museum	embrio	Windu Hadi Kuntoro 085842856438

No.	Nama Desa Wisata	Alamat/ website	Potensi Wisata	Jenis Kategori	CP
39					

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, 2020

2.3.2.3 Pertanian

Sektor pertanian merupakan salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Bantul. Sektor ini memiliki peran penting terhadap perekonomian Kabupaten Bantul, karena merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB meskipun perannya semakin menurun karena pertumbuhan di sektor non pertanian pertumbuhannya relatif lebih cepat.

Tujuan pembangunan pertanian sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019, adalah meningkatkan ketersediaan dan diversifikasi untuk mewujudkan kedaulatan pangan, meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pangan dan pertanian, meningkatkan ketersediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, serta meningkatkan kualitas kinerja aparatur pemerintah bidang pertanian yang amanah dan profesional.

Dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, Pemerintah Kabupaten Bantul telah melaksanakan pembangunan pertanian dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada, yaitu pemanfaatan teknologi pertanian, SDM pertanian dan sarana produksi. Lahan pertanian di Kabupaten Bantul sesuai untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.

1) Produksi Tanaman Pangan

Komoditas tanaman pangan utama di Kabupaten Bantul adalah padi, jagung, kacang tanah dan kacang kedelai.

Tabel 2.137 Perkembangan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan Utama di Kabupaten Bantul Tahun 2015-2019

No	Komoditas/Uraian	Tahun				Ket.	
		2015	2016	2017	2018*		2019**
1	Padi Ladang						
	Luas Panen	120	65,00	45,00	197,00	23	ha
	Produktivitas (GKG)	57.08	35.54	39.21	45.56	50.10	ku/ha

No	Komoditas/Uraian	Tahun				Ket.	
		2015	2016	2017	2018*		2019**
	Produksi (GKG)	685	231	176,00	897,53	115	ton
	Produksi beras	433,92	145,99	111,16	575,00	73,6	ton
2	Padi Sawah						
	Luas Panen	29.642	29.944,00	30.376,40	31.182,30	29.524	ha
	Produktivitas (GKG)	67,18	61,11	62,60	60,06	63,56	ku/ha
	Produksi (GKG)	199.135	183.980,00	190.144,00	187.280,89	187.655	ton
	Produksi beras	125.857,11	116.275,00	119.790,67	119.899,86	120.099	ton
2	Padi						
	Luas Panen	29.762	30.009,00	30.421,40	31.379,30	29.597	ha
	Produksi (GKG)	199.820	183.211,00	190.320,00	188.182	188.089	ton
	Produksi beras	126.291	116.421,35	119.901,83	120.474,76	120.377	ton
3	Jagung						
	Luas Panen	4.312,00	3.647,00	3.283,00	3.565,10	4.934	ha
	Produktivitas	67,1	69,63	73,78	73,17	70,74	ku/ha
	Produksi (pipilan kering)	28.934	25.394,06	24.221,97	26.085,84	34.903	ton
4	Kedelai						
	Luas Panen	1.660,00	980,40	969,00	1.213,60	909	ha
	Produktivitas	16,77	12,87	13,67	15,52	15,90	ku/ha
	Produksi (wose kering)	2.784	1.261,77	1.324,62	1.883,51	1.445	ton
5	Kacang Tanah						
	Luas Panen	3.390	2.501,50	2.195,00	2.586,40	2.704,8	ha
	Produktivitas	17,75	13,78	16,20	15,73	15,03	ku/ha
	Produksi	6.017	3.447,07	3.555,90	4.068,41	4.065	ton

Sumber: Dispersipat Kabupaten Bantul, 2020

*Angka sangat sementara

Produksi padi mengalami penurunan sebesar 0.05 % atau turun sebesar 94 ton dibandingkan tahun 2018. Dari produksi padi sebesar 188.183 ton GKG menjadi 188.089 ton GKG. Penurunan produksi padi tahun 2019 ini disebabkan adanya kemarau yang cukup panjang.

Produksi jagung pada tahun 2019 adalah 34.903 ton sedangkan tahun 2018 adalah 26.086 ton sehingga bisa dikatakan produksi jagung mengalami kenaikan sebesar 25,28 % atau naik 8.823 ton dibandingkan tahun 2018. Walaupun begitu, terjadi penurunan produktivitas yang disebabkan karena kekurangan air terutama masa pertumbuhan biji yang berakibat pada berkurangnya ukuran tongkol

Pada tahun 2019 produksi kacang tanah sedikit mengalami penurunan produksi sebesar 0,074 % atau 3 ton dibandingkan tahun 2018. Produksi kedelai, pada tahun 2019 ini juga mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018. Penurunan produksi kedelai mencapai 23,26 % atau 438 ton.

2) Produksi Tanaman Hortikultura

Tanaman hortikultura terdiri dari tanaman sayuran dan buah-buahan. Tanaman sayuran yang banyak ditanam di Kabupaten Bantul antara lain bawang merah, cabai merah, dan pisang.

Tabel 2.138 Perkembangan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Hortikultura Utama di Kabupaten Bantul Tahun 2015-2019

No.	Komoditas /uraian	Tahun					Ket
		2015	2016	2017	2018	2019*	
1	Bawang Merah						
	Luas Panen	584	765	830	835	893	Ha
	Produksi	4.501,9	7.859,40	7.910,2	7.979,8	9.427	Ton
	Produktivitas	7,71	10,29	9,53	9,61	10,56	ton/ha
2	Cabai Merah						ket
	Luas Panen	469	116	366	402	298	Ha
	Produksi	1.825,30	409,25	1.497,6	7.979,8	1.166,4	Ton
	Produktivitas	3,89	3,52	4,09	4,79	3,91	Ton/Ha
3	Pisang						Ket
	Tanaman menghasilkan	391.409	376.235	228.310	228.310	294.198	Pohon
	Produksi	6.262,55	6.095	6.095,9	5.902,90	6.727,8	Ton
	Produktivitas	0,16	0,162	0,267	0,267	0,228	Ton/pohon

Sumber: Disperpautkan Kabupaten Bantul, 2020

*Angka sementara

Bawang merah mengalami peningkatan produksi sebesar 18,14% atau 1.447,2 ton. Kenaikan produksi ini terjadi karena terdapat peningkatan luas tanam 58 ha dan peningkatan produktifitas sebesar 9,9% dikarenakan adanya bantuan benih dan pupuk serta penerapan sistem tata tanam tepat.

Produksi cabai merah mengalami penurunan dari 1.752,6 ton pada tahun 2018 menjadi 1.166,41 ton pada tahun 2019. Penurunan ini disebabkan penurunan luas panen seluas 104 ha dan penurunan produktifitas sebesar 18,37%. Kemarau panjang menyebabkan ketersediaan air menjadi terbatas ini, petani mengurangi luas tanam cabenya. Tanaman cabe butuh air yang cukup agar pertumbuhannya optimum.

Pisang juga mengalami peningkatan produksi sebesar 13.97 % dari produksi sebesar 5.902,90 ton pada tahun 2018 menjadi 6.727,8 ton pada tahun 2019. Penurunan pisang ini dipengaruhi oleh cuaca iklim yang tidak mendukung produksi.

3) Produksi Tanaman Perkebunan

Komoditas perkebunan yang menjadi andalan di Kabupaten Bantul antara lain: tembakau, mete, tebu, kelapa dan kakao

Tabel 2.139 Produktivitas Komoditas Perkebunan di Kabupaten Bantul Tahun 2015-2019

No.	Komoditas/ Uraian	Tahun					Ket
		2015	2016	2017	2018	2019*	
1	Tembakau Rakyat						
	Luas Panen	478,60	172,00	316,00	305,00	175	ha
	Produksi	4.740,20	1.023,50	3.044	2.893,00	1.321,3	ku (rajang kering)
	Produktivitas	9,91	5,95	9,63	9,49	7,64	ku/ha (rajang kering)
2	Mete						
	Luas Panen	252,40	112,70	119,80	118,50	506,7	ha
	Produksi	174,95	34,29	134,40	82,95	156,07	ku (glondong krg)
	Produktivitas	0,69	0,30	0,76	0,70	0,31	ku/ha (glondong krg)
3	Tebu						
	Luas Panen	1333,66	1.174,32	1.207,69	1.022,89	1.042,67	ha
	Produksi	50.392,65	41.021,95	29.186,75	38.430,00	39.971,17	ku (hablur)
	Produktivitas	37,79	34,93	26,76	37,57	38,33	ku/ha (hablur)
4	Kelapa						
	Luas Panen	7.039,65	7.064,07	10.464,73	7.050,03	7.107,81	ha
	Produksi	89.456,53	91.342,50	112.677	103.931,80	104.794,70	ku (kopra)
	Produktivitas	12,71	12,93	15,87	14,74	14,74	ku/ha (kopra)
5	Kakao						
	Luas Panen	N/A	N/A	N/A	7,2	18,1	Ha
	Produksi	N/A	N/A	N/A	28,34	65,18	ku
	Produktivitas	N/A	N/A	N/A	3,94	15,16	Ku/Ha

Sumber: Dispersautkan Kabupaten Bantul, 2020

*Angka sementara

Pada tahun 2019 produksi tembakau mengalami penurunan sebesar 54,33 % atau 1.571,7 ku. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya luas panen seluas 132 Ha dan penurunan produktivitas sebesar 1,95 ku/ha dibanding tahun 2018.

Produksi kelapa mengalami peningkatan sebesar 862,9 ku. Meningkatnya produksi disebabkan oleh meningkatnya luas panen pada tahun 2019 yaitu sebesar 57,78 ha, dan jumlah pohon kelapa yang produktif berbuah meningkat pada tahun 2019.

Produksi tebu tahun 2019 meningkat 4,01 % atau 1.541,17 ku dibanding tahun 2018. Peningkatan ini disebabkan meningkatnya luas panen 20 ha dan produktifitas meningkat 2,02 % dari 37,57 ku/ha menjadi 38,33 ku/ha. Peningkatan produktifitas disebabkan adanya program Rawat Ratoon yang lebih intensif. Rawat ratoon adalah pemeliharaan tanaman tebu keprasan secara intensif. Dengan adanya program ini terjadi peningkatan rendemen tebu sehingga produksi tebu juga meningkat. Selain itu, cuaca kemarau yang lebih panjang pada tahun 2019 juga mendukung peningkatan produksi. Tanaman tebu membutuhkan sinar matahari selama masa tumbuh dan pemasakannya sehingga masa kemarau yang panjang sangat mendukung pertumbuhan tebu yang pada akhirnya meningkatkan produksinya juga.

Kakao merupakan salah satu tanaman perkebunan baru di Kabupaten Bantul yang mulai dibudidayakan sejak tahun 2016. Produksi Kakao pada tahun 2019 mengalami peningkatan yang signifikan dari 28,34 kwintal menjadi 153,69 kwintal atau mengalami peningkatan sebesar 81,56%. Peningkatan ini disebabkan produktivitas kakao yang mengalami peningkatan dari 3,94 ku/ha menjadi 21,65 ka/ha atau sebesar 81,72%. Tingginya peningkatan produksi terjadi karena pada tahun 2019 banyak tanaman kakao yang mulai produktif berbuah.

4) Produksi Komoditas Peternakan

Salah satu cakupan pertanian dalam arti luas adalah peternakan. Peternakan di Kabupaten Bantul memiliki potensi yang cukup besar meliputi ternak besar, ternak kecil, dan unggas.

Tabel 2.140 Populasi Ternak Besar di Kabupaten Bantul Tahun 2015-2019

No.	Jenis ternak	2015	2016	2017	2018	2019	Ket.
1	Sapi Potong	54.640	56.799	56.139	58.895	62.582	Ekor
2	Sapi Perah	247	284	80	72	68	Ekor
3	Kerbau	446	544	248	206	218	Ekor
4	Kuda	1.722	1.977	1.258	1564	1.631	Ekor

Sumber: Diperpautkan Kabupaten Bantul, 2020

Populasi sapi potong tahun 2019 mengalami kenaikan 5,89% atau sebanyak 3.687 ekor dibanding tahun 2018. Peningkatan jumlah populasi sapi potong tidak terlepas dari keberhasilan program UPSUS SIWAB (upaya khusus sapi indukan wajib bunting) yang ada di tahun 2018-2019. Jumlah ini diharapkan masih akan terus meningkat mengingat masih berlangsungnya program tersebut.

Sapi perah mengalami penurunan populasi, sedangkan kerbau dan kuda mengalami sedikit peningkatan populasi. Hal ini disebabkan tidak adanya upaya khusus dalam peningkatan populasi jenis ternak ini.

Tabel 2.141 Populasi Ternak Kecil di Kabupaten Bantul Tahun 2015-2019

No.	Jenis Ternak	2015	2016	2017	2018	2019	Ket.
1	Kambing	96.021	108.199	87.195	94.332	95.467	Ekor
2	Domba	71.754	83.790	74.955	77.197	74.441	Ekor
3	Babi	5.070	5.329	3.544	5.024	5.136	Ekor

Sumber: Diperpautkan Kabupaten Bantul, 2020

Populasi ternak kecil di Kabupaten Bantul didominasi oleh ternak kambing. Pada tahun 2019 terjadi peningkatan populasi kambing sebesar 1,2%, hal ini dikarenakan adanya program Inseminasi Buatan Kambing/Domba bersubsidi.

Populasi domba justru mengalami penurunan sebesar 3,7% disebabkan tingginya pemotongan domba dan konsumen daging domba dari pedagang sate serta naiknya pemotongan hewan qurban yang naik 0,37% dari tahun 2018

Tabel 2.142 Populasi Ternak Unggas di Kabupaten Bantul Tahun 2015-2019

No.	Unggas	2015	2016	2017	2018	2019	Ket.
1	Ayam buras	913.767	1.019.461	792.862	829.916	966.371	Ekor
2	Ayam ras petelur	777.726	821.587	712.307	759.199	765.137	Ekor
3	Ayam ras pedaging	1.006.163	1.068.221	841.103	1.093.222	1.128.489	Ekor
4	Itik	210.400	222.265	163.528	184.978	201.805	Ekor

Sumber: Diperpautkan Kabupaten Bantul, 2020

Populasi ternak unggas didominasi oleh ayam ras pedaging. Secara umum pada tahun 2019 terjadi kenaikan populasi unggas. Peningkatan ini didukung oleh menurunnya kejadian penyakit menular seperti Avian Influenza. Avian Influenza atau Flu burung adalah penyakit akibat virus influenza yang menjangkiti unggas. Penyakit ini sangat berbahaya karena bisa menyebabkan kerugian ekonomi yang terjadi akibat kematian unggas dalam jumlah besar.

Komoditas hasil peternakan utama yang berasal dari ternak besar, ternak kecil dan unggas tersebut di atas, meliputi daging telur dan susu. Komoditas ini mempunyai nilai gizi tinggi sehingga kebutuhan akan komoditas ini selalu meningkat. Meningkatnya kebutuhan tentu seyogyanya diiringi dengan peningkatan ketersediaannya.

Tabel 2.143 Produksi Komoditas Hasil Peternakan Utama di Kabupaten Bantul Tahun 2015-2019

No.	Komoditas	Tahun					Ket.
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Daging	14.142.366	14.742.551	14.751.000	14.855.725	15.088.317	Kg
2	Telur	7.572.329	8.072.166	7.184.368	7.329.945	7.789.187	Kg
3	Susu	304.662	365.127	184.777	102.484	80.541	Kg

Sumber: Diperpautkan Kabupaten Bantul, 2020

Kenaikan produksi daging pada tahun 2019 dipengaruhi oleh kenaikan kebutuhan daging di wilayah Kabupaten Bantul serta kenaikan pemotongan hewan qurban saat idul adha yaitu naik 2,51% dari tahun 2018. Produksi susu mengalami penurunan dari tahun 2018 yang disebabkan karena penurunan populasi sapi perah dan banyaknya sapi perah yang usianya semakin menua/sudah tidak produktif lagi.

5) Penanganan Penyakit Ternak

Penanganan kasus penyakit ternak tahun 2018 oleh UPT Puskesmas sebanyak 10.374 kasus meningkat dari tahun 2017 sebesar 6.669 kasus, dari penanganan kasus tersebut dapat diketahui adanya tiga kasus

penyakit terbanyak yang secara berurutan disebabkan oleh cacing (Helminthosis), Avitaminosis, dan Scabies.

UPT Rumah Pemotongan Hewan (RPH) merupakan Unit pelayanan masyarakat dalam menyediakan daging yang aman, sehat, utuh dan halal. Pada tahun 2018, UPT RPH mampu memberikan pelayanan pemotongan dengan jumlah pemotongan sebanyak 2.824 ekor.

6) Produksi Perikanan Tangkap

Kabupaten Bantul memiliki pantai sepanjang 13,5 km dan terdapat usaha perikanan tangkap yang beraktfitas pada 5 unit TPI yaitu TPI Depok, TPI Ngepet, TPI Patihan, TPI Kuwaru dan TPI Ngentak.

Tabel 2.144 Produksi Perikanan Tangkap di Kabupaten Bantul Tahun 2015 - 2019

No.	Uraian	Jumlah (ton)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Produksi tangkap laut	391,37	234,30	624,75	473,01	497,77
2	Produksi tangkap perairan umum	349,23	282,20	260,60	295,43	305,08
Jumlah		741,60	516,50	885,35	768,44	802,85

Sumber: Diperpautkan Kabupaten Bantul, 2020

Pada tahun 2019 terjadi kenaikan produksi ikan tangkap laut dibanding periode tahun sebelumnya yaitu sebesar 24,76 ton atau 4,97%. Produksi tangkap perairan umum juga mengalami peningkatan 9,55 ton atau 3,13%. Peningkatan ini didukung oleh peningkatan produksi dari ikan ekonomis tinggi seperti ikan bawal dan ikan layur. Selain itu, program restocking ikan di perairan umum juga meningkatkan populasi ikan sehingga pada akhirnya meningkatkan produksi ikan tangkap perairan umum.

7) Produksi Perikanan Budidaya

Terdapat 7 jenis ikan utama yang dibudidayakan di Kabupaten Bantul, yaitu gurami, nila, lele, bawal, patin, mas dan udang vanamei. Lele, nila dan gurami merupakan jenis ikan yang sangat diminati untuk dibudidayakan.

Tabel 2.145 Produksi Perikanan Budidaya menurut Jenis Ikan di Kabupaten Bantul Tahun 2015-2019

No.	Jenis Ikan	Produksi (Kg)				
		2015	2016	2017	2018*	2019
1	Gurami	2.038.280	1.860.867	2.028.830	2.164.370	1.723.948
2	Nila	2.231.763	1.924.565	2.114.000	2.567.437	2.618.329
3	Lele	6.106.252	6.738.202	7.094.430	7.028.122	7.425.503
4	Bawal	218.462	258.883	282.250	179.914	218.661
5	Patin	95.597	40.150	29.370	21.421	36.828
6	Mas	24.268	34.018	37.450	37.444	42.888
7	Udang Vannamei	650.602	507.038	440.890	292.292	374.440
JUMLAH		11.365.224	11.363.724	12.027.236	12.291.000	12.440.597**

Sumber: Diperpautkan Kabupaten Bantul, 2020

**Angka sementara

Pada tahun 2019 produksi perikanan budidaya mengalami kenaikan sebesar 1,20 % atau 149.597 kg dari 12.291.000 kg pada tahun 2018 menjadi 12.440.597 kg pada tahun 2019. Produksi pada 6 jenis ikan mengalami peningkatan dan didominasi lele. Lele paling banyak dibudidayakan karena memiliki umur panen relatif lebih cepat, padat tebaranya lebih banyak, dan lebih tahan terhadap kondisi lingkungan yang kurang baik. Kenaikan produksi ini disebabkan adanya penerapan teknologi baru di masyarakat yaitu teknologi MATLAIR (hemat lahan dan air), berupa kolam bulat dengan inlet outlet dan aerasi serta manajemen air secara intensif sehingga dapat meningkatkan padat tebar ikan lele sampai dengan 400 ekor per meter kubik.

Penurunan produksi ikan budidaya terjadi pada gurami, disebabkan langkanya ketersediaan bibit gurami dan adanya penyakit ikan yang menyebabkan kematian pada gurami.

2.3.2.4 Kehutanan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, urusan kehutanan sudah bukan merupakan wewenang pemerintah daerah kabupaten lagi, tetapi ditarik ke pemerintah daerah provinsi. Kewenangan kab/kota dalam urusan kehutanan berupa pelaksanaan pengelolaan taman hutan raya (TAHURA) kab/kota. Kabupaten Bantul tidak memiliki TAHURA sehingga urusan kehutanan tidak dilaksanakan di kabupaten Bantul.

2.3.2.5 Energi dan Sumber Daya Mineral

Kewenangan urusan ESDM oleh Kabupaten ini sangat terbatas, khususnya terkait Sumber Daya Energi dan kebutuhan energi secara umum. Dalam upaya menggali potensi sumber daya mineral di Kabupaten Bantul belum dapat untuk mencukupi kebutuhan masyarakat Bantul. Upaya yang telah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan energi adalah dengan melakukan kajian. Kajian Geothermal di Parang Wedang, Kretek menunjukkan bahwa energi panas bumi di Parangwedang belum dapat dijadikan alternatif energi dikarenakan standar panas minimal energi panas bumi seharusnya 90°C sedangkan panas bumi di Parangwedang adalah 40°C. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan beberapa kajian sebagai langkah awal ketercukupan kebutuhan energi di Kabupaten Bantul.

2.3.2.6 Perdagangan

1) Pasar Tradisional

Pada Tahun 2019 di Kabupaten Bantul terdapat 32 pasar dengan jumlah pedagang yang memiliki kios, los dan arahan sebanyak 12.433

pedagang. Pedagang yang menyediakan kebutuhan pokok sebesar 7,38% dari jumlah pedagang yang ada.

Tabel 2.146 Data Pasar Tradisional di Kabupaten Bantul Tahun 2019

No	Nama Pasar	Tahun Pembangunan	Operasional Pasar	Jumlah Pedagang	
				Kios + Los + Arahana	Kebutuhan Pokok
1	Pasar Bantul	2018	Harian	1.753	114
2	Pasar Niten	2008	Harian	894	94
3	Pasar Imogiri	2007	Harian	1.587	142
4	Pasar Piyungan	2007	Harian	1.092	78
5	Pasar Sorobayan	2015	2x dalam 5 hari	363	17
6	Pasar Mangiran	-	2x dalam 5 hari	315	19
7	Pasar Gumulan	2018	1x dalam 5 hari	342	3
8	Pasar Pijenan	-	Harian	239	15
9	Pasar Sungapan	2014	2x dalam 5 hari	134	3
10	Pasar Semampir	2017	2x dalam 5 hari	353	19
11	Pasar Celep	2014	Harian	206	4
12	Pasar Jodog	2018	Harian	281	15
13	Pasar Angruksari	2017	4x dalam 5 hari	581	56
14	Pasar Turi	2018	1x dalam 5 hari	764	27
15	Pasar Pundong	-	Harian	584	51
16	Pasar Gatak	2018	Harian	215	10
17	Pasar Barongan	2015	Harian	305	63
18	Pasar Dlingo	2014	2x dalam 5 hari	242	20
19	Pasar Jejeran	2012	3x dalam 5 hari	594	45
20	Pasar Pleret	2016	2x dalam 5 hari	688	70
21	Pasar Ngipik	2015	Harian	165	18
22	Pasar Panasan	2017	Harian	248	28
23	Pasar Klithikan Niten	2010	Harian	163	-
24	Pasar Seni Gabusan	-	Harian	58	-
25	Pasar Hewan Imogiri	-	1x dalam 5 hari	-	-
26	Pasar Hewan Pandak	2017	2x dalam 5 hari	23	-
27	Pasar Janten	2017	Harian	52	-
28	Pasar Jragan	2014	1x dalam 5 hari	69	1
29	Pasar Koripan	2015	2x dalam 5 hari	68	-
30	Pasar Grogol	2015	2x dalam 5 hari	27	4

No	Nama Pasar	Tahun Pembangunan	Operasional Pasar	Jumlah Pedagang	
				Kios + Los + Arahana	Kebutuhan Pokok
31	Pasar Bendosari	2018	Harian	19	-
32	Pasar Sangkeh	-	2x dalam 5 hari	9	1

Sumber: Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul, 2020

2) Ekspor Bersih Perdagangan

Perkembangan nilai ekspor di Kabupaten Bantul tahun 2015-2019 disajikan pada Tabel 2.147.

Tabel 2.147 Perkembangan Ekspor di Kabupaten Bantul Tahun 2015-2019

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Volume Ekspor (kg)	7.871.678,60	9.642.793.21 9,00	10.168.084,05	15.828.755,06	16. 645.724,5 9
2	Nilai Ekspor (US\$)	66.626.177,34	73.971.386.1 16,80	79.200.365,59	206.555.464,00	151.040.882, 38
3	Jumlah Negara Tujuan	43	42	44	45	79
4	Macam Komoditi	36	36	36	43	39

Sumber: Dinas Perdagangan, data diolah, 2020

Kondisi kinerja nilai ekspor pada tahun 2018 adalah sebesar 206.555.464 US\$, mengalami kenaikan dibanding tahun 2017. Peningkatan ekspor didukung oleh komoditi ekspor unggulan seperti tekstil, furniture, dan handicraft, sedangkan negara tujuan ekspor utama adalah Australia, USA, Jepang, Perancis, Hongkong, Rusia, Italia, dan Singapura. Pada tahun 2019, kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB tahun 2015-2019 disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.148 Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan di Kabupaten Bantul Tahun 2014-2018 (dalam juta rupiah)

No	Tahun	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
1.	2015	1.585.613
2.	2016	1.771.630
3.	2017	1.945.840
4.	2018	2.123.780
5.	2019	2.277.890

Sumber: BPS, 2020

2.3.2.7 Perindustrian

Sektor industri pengolahan merupakan penyumbang kontribusi terbesar kedua terhadap perekonomian Kabupaten Bantul setelah sektor pertanian. Kegiatan pembangunan industri di Kabupaten Bantul diarahkan pada peningkatan aktivitas dan daya saing industri kecil menengah. Lokasi dan jenis industri yang tersebar di Kabupaten Bantul cukup bervariasi. Jenis industri yang ada meliputi industri logam mesin, industri kimia, aneka industri, industri hasil pertanian, dan kehutanan. Pertumbuhan Industri di Kabupaten Bantul tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.149 Pertumbuhan Industri di Kabupaten Bantul Tahun 2015 - 2019

No	Sektor Industri	2015		2016		2017		2018		2019	
		Jumlah Unit Usaha	Tenaga Kerja	Jumlah Unit Usaha	Tenaga Kerja	Jumlah Unit Usaha	Tenaga Kerja	Jumlah Unit Usaha	Tenaga Kerja	Jumlah Unit Usaha	Tenaga Kerja
1.	Pangan	8.290	27.480	8.754	29.019	9.095	29.783	9.320	30.785	9.712	31.267
2.	Sandang dan Kulit	854	6.719	902	7.095	921	7.449	1.085	8.175	1.092	8.228
3.	Kerajinan Umum	7.143	24.772	7.543	26.159	7.912	28.623	8.240	30.074	8.574	30.875
4.	Kimia dan Bahan Bangunan	3.101	28.246	3.275	29.828	3.286	29.991	3.301	30.057	3.488	30.124
5.	Logam dan Jasa	1.035	2.900	1.093	3.062	1.096	3.162	1.143	3.373	1.493	3.403
Jumlah		20.423	90.117	21.567	95.164	22.310	99.008	23.089	102.464	24.359	103.897

Sumber data : Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian 2020

Potensi IKM di Kabupaten Bantul sebanyak 75 sentra lokasi IKM dengan jumlah pengrajin 22.645 IKM, tenaga kerja 99.920 orang, dan mampu memberikan kontribusi PDRB sebesar 15,17%. Adapun laju pertumbuhan industri di Kabupaten Bantul sebesar 3,47 %.

Ada 16 sub sektor yang termasuk industri kreatif yaitu aplikasi pengembangan game; arsitektur; desain interior; desain komunikasi visual; desain produk; fesyen; film, animasi dan video, fotografi; kriya; kuliner; musik; penerbitan; periklanan; seni pertunjukan; seni rupa; televisi dan radio. Cakupan Industri Kreatif di Kabupaten Bantul pada tahun 2019 sebesar 42,20% menurun dari tahun 2018 sebesar 42,90%.

Menurut Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) Ada 16 Sub sektor yang termasuk industri kreatif yaitu : aplikasi pengembangan game; arsitektur; desain interior; desain komunikasi visual; desain produk; fesyen; film, animasi dan video, fotografi; kriya; kuliner; musik; penerbitan; periklanan; seni pertunjukan; seni rupa; televisi dan radio. Apabila sub sektor industri kreatif tersebut dapat dikembangkan melalui Program Produk Andalan Setempat (PAS) yang menjadi kebijakan prioritas kabupaten, pelaku usaha IKM pasti akan berkembang sesuai kebutuhan pasar. Adapun Capaian Cakupan Industri Kreatif di Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut.

Tabel 2.150 Cakupan Industri Kreatif di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2019

No.	Tahun	Capaian Cakupan Industri Kreatif
1.	2016	39,50 %
2.	2017	41,11%
3.	2018	42.90%
4.	2019	42,20%

Sumber data: Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian, 2019

2.3.2.8 Transmigrasi

Penyelenggaraan urusan Transmigrasi sebagai suatu pendekatan untuk mencapai tujuan kesejahteraan, pemerataan pembangunan daerah, serta perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Pelaksanaan transmigrasi di Kabupaten Bantul sampai saat ini masih tergantung pada kuota dari Pemerintah Pusat. Perkembangan yang terjadi sekarang justru semakin

menurunnya kuota/jatah transmigran dari tahun ke tahun. Hal ini berbanding terbalik dengan jumlah animo, minat, serta pendaftar calon transmigran yang cukup besar. Penempatan transmigran dari tahun 2015-2019 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.151 Jumlah Transmigran di Kabupaten Bantul

Tahun	Jumlah (KK)	Jumlah Jiwa
2015	40	131
2016	50	150
2017	12	38
2018	28	94
2019	20	54

Sumber: Disnakertrans Kabupaten Bantul, 2020

Jumlah KK transmigran pada tahun 2018 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2017. Dalam kurun waktu 2014-2018, jumlah KK transmigran tertinggi pada tahun 2016 sebanyak 50 KK dan 150 jiwa.

2.3.3 Fokus Penunjang Urusan Pemerintahan

2.3.3.1 Sekretariat Daerah

Fungsi perumusan kebijakan merupakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah. Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Setda Kabupaten Bantul terdiri atas 10 Bagian.

2.3.3.2 Sekretariat DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan perwakilan yang telah diberi mandat oleh rakyat dalam urusan pemerintahan. DPRD merupakan mitra Kepala Daerah yang berkedudukan sama tetapi mempunyai fungsi yang berbeda. Dalam melaksanakan fungsinya DPRD di bantu oleh Sekretariat DPRD. Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan

mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD dalam melaksanakan hak, tugas dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

2.3.3.3 Inspektorat

Salah satu fungsi penunjang pemerintahan adalah pengawasan. Fungsi ini lebih dititikberatkan pada tindakan konsultatif dan preventif agar pelaksanaan pembangunan daerah berada di jalur yang benar.

Kebijakan pengawasan Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan salah satu bentuk dan tekad untuk mendukung cita-cita reformasi yaitu untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa sebagai konsekuensi untuk menciptakan kabupaten yang baik, efektif, efisien, dan bebas dari KKN. Kebijakan tersebut diambil oleh manajemen (instansi atau pejabat yang mempunyai kewenangan mengambil keputusan di bidang pengawasan) dan dijadikan sebagai pedoman bagi seluruh anggota organisasi APIP dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasannya.

Inspektorat Kabupaten Bantul sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran dan fungsi melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan yang diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007. Inspektorat provinsi dan kabupaten/kota mempunyai fungsi sebagai perencanaan program pengawasan; perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan; pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian pengawasan.

Auditor adalah pelaksana pengawasan yang mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan pengawasan intern pada instansi pemerintah dan memberikan rekomendasi berdasarkan temuan-temuan pemeriksaan yang disajikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Manfaat pengawasan internal melalui pemeriksaan auditor tidak hanya berupa banyaknya temuan yang dilaporkan, namun juga berupa efektivitas tindak lanjut oleh auditor. Pengawasan internal akan menjadi sia-sia tanpa tindakan perbaikan dalam penyelesaian tindak lanjut sehingga tujuan pengawasan

tidak tercapai, yakni peningkatan kinerja bagi organisasi dan akan menimbulkan ketidakpercayaan publik.

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) dalam lingkup pemerintah daerah di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 89 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Tuntutan kepatuhan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan auditor atau APIP di Indonesia dalam peraturan tersebut di atas, secara hukum mengisyaratkan kewajiban untuk penyelesaiannya. Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari suatu rangkaian pengawasan yang meliputi: perencanaan pengawasan, proses pengawasan, laporan hasil pengawasan sampai dengan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 2.152 Target dan Realisasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (THLP) Internal & Eksternal di Kabupaten Bantul Tahun 2015-2020

URAIAN	Thn 2015		Thn 2016		Thn 2017		Thn 2018		Thn 2019	Thn 2020
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Internal dan Eksternal	80,00%	89,00%	89,5%	90,50%	90,00%	91,78%	90,50%	90,49%	91,00%	91,50%

Sumber : Inspektorat Kabupaten Bantul, 2020

Dari tabel di atas terlihat bahwa Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan (THLP) baik internal maupun eksternal yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Bantul selama tahun 2015 - 2018 dengan realisasi

melebihi target yang telah direncanakan. Rata rata capaian Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan (THLP) baik internal maupun eksternal yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Bantul selama tahun 2015 – 2018 adalah sebesar 90,44%.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2016 tentang Formasi dan hasil Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, pada tahun 2018 masih terdapat kekurangan tenaga Aparatur Pengawasan sejumlah 38 personil. Kondisi jumlah tenaga Aparatur Pengawasan dan rincian kebutuhannya terdapat pada tabel berikut.

Tabel 2.153 Kondisi Jumlah Aparatur Pengawasan di Kabupaten Bantul Tahun 2018

No	Jenis Jabatan	Jumlah	Kebutuhan	Kekurangan
1	Struktural			
	Inspektur	1	1	
	Sekretaris	1	1	
	Inspektur Pembantu	4	4	
	Kasubag	3	3	
2	Fungsional Tertentu			
	Auditor	21	36	15
	P2UPD	6	20	14
	Auditor Kepegawaian	-	4	4
3	Fungsional Umum	14	19	5
Jumlah		50	88	38

Sumber: Inspektorat Kabupaten Bantul 2020

Berdasarkan hasil Audit Kinerja BPK terhadap Inspektorat Kabupaten Bantul tahun 2013 yang mendasarkan jumlah perhitungan formasi pada Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-971/K/SU/2005 tentang Pedoman Perhitungan Formasi Auditor pada Aparat Pengawas Internal Pemerintah, maka jumlah total auditor Inspektorat Kabupaten Bantul adalah 94 personil sedangkan kondisi saat ini berjumlah 21 personil sehingga ada kekurangan 73 personil. Terkait dengan kompetensi tenaga fungsional Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul telah melakukan pemetaan kompetensi terhadap pejabat fungsional yang ada. Kebutuhan kompetensi

yang di butuhkan berdasarkan sasaran audit sejumlah 24 kompetensi yang harus didukung dengan 3 jenis diklat fungsional dan 21 jenis diklat substantif. Untuk 3 jenis diklat fungsional (JFT Pertama, JFT Muda, JFA Madya) 27 personil pejabat fungsional telah mengikuti semua, sedangkan untuk 21 jenis diklat substantif belum merata diikuti oleh pejabat fungsional dan dilakukan secara bertahap.

2.3.3.4 Perencanaan

Penyusunan rencana pembangunan Kabupaten Bantul didasarkan pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya diturunkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dalam hal perencanaan, ketersediaan dan akurasi data tetap menjadi perhatian, di samping itu sejumlah studi dilakukan untuk menjadi pedoman arah pembangunan ke depan. Untuk sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan maka koordinasi dengan pemerintah DIY dan Pusat juga dilaksanakan.

Tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang semakin berkualitas dan kompetitif baik dalam aspek pelayanan publik dan akuntabilitas berbasis kinerja dan transparan memberi dampak terhadap penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang baik dan tepat dengan melibatkan seluruh *stakeholder* pembangunan secara komprehensif. Pengintegrasian perencanaan daerah dengan pengelolaan keuangan sampai dengan monev dan evaluasi kinerja dalam penerapan *e-Government* menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas tersebut.

2.3.3.5 Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan mengingat perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud merupakan sub-sistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah tersebut bertumpu pada upaya peningkatan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan publik baik dari sisi pendapatan maupun belanja.

Selain kedua undang-undang tersebut, terdapat peraturan perundang-undangan lain yang menjadi acuan pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Sumber-sumber keuangan yang menjadi pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan/dana transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dana perimbangan/dana transfer merupakan sumber pendapatan daerah yang bersumber dari transfer dana dari pemerintah atasan (APBN dan APBD DIY) yang dialokasikan kepada

daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, bagi hasil pajak daerah, dan bantuan keuangan. Dana perimbangan/dana transfer selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah. Ketiga komponen dana perimbangan ini merupakan bagian dari transfer ke daerah dari Pemerintah Pusat serta merupakan satu kesatuan yang utuh.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan selain untuk mempercepat realisasi visi dan misi daerah juga untuk mengatasi berbagai permasalahan pokok seperti penanganan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, perbaikan mutu pelayanan publik utamanya pelayanan dasar, peningkatan produktivitas sektor dominan yang mempengaruhi PDRB, dan perluasan daya saing investasi.

Untuk mewujudkan kebijakan tersebut perlu didukung kebijakan penajaman APBD yang sesuai visi dan misi daerah melalui efektifitas dan efisiensi belanja daerah dan upaya peningkatan pendapatan daerah yang tetap mendukung iklim investasi daerah serta adanya komitmen seluruh elemen pengelola keuangan daerah, sehingga tercipta pengelolaan keuangan yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Beberapa upaya strategis untuk mendukung terwujudnya *good governance* dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah yang profesional, terbuka, dan bertanggung jawab, ditempuh dengan:

1. Mempedomani kebijakan pemerintah dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah;
2. Mengupayakan aplikasi sistem informasi pengelolaan keuangan dan barang daerah yang terintegrasi dengan menjalin kerjasama dengan Perwakilan BPKP Pemda DIY untuk mengadakan asistensi penerapan

manajemen pengelolaan keuangan dan barang daerah yang transparan dan akuntabel melalui implementasi aplikasi Sepaka@t dan Simda BMD;

3. Menjalin kerjasama dengan perwakilan BPKP Pemda DIY untuk asistensi penerapan manajemen pengelolaan keuangan daerah melalui pendampingan atau *coaching clinic* penyusunan neraca SKPD dan pengelolaan keuangan BLUD Puskesmas;
4. Mengikuti Diklat teknis dan *workshop* mengenai pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah, perkembangan peraturan pengelolaan keuangan dan barang daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun lembaga keuangan lainnya;
5. Mengupayakan adanya informasi sedini mungkin dari pemerintah pusat agar prediksi pendapatan daerah, khususnya dana perimbangan, dalam APBD semakin realistis;
6. Melaksanakan sistem informasi pengelolaan pajak daerah yang terintegrasi melalui Simpada;
7. Meningkatkan koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penghasil dalam upaya tercapainya target pendapatan asli daerah yang diampu oleh masing-masing SKPD penghasil dan mengevaluasi atas kinerja pendapatan asli daerah;
8. Meningkatkan koordinasi antar SKPD untuk memonitor dan melaporkan pengelolaan keuangan dan barang daerah yang menjadi tanggung-jawabnya;
9. Penyebarluasan informasi pendapatan, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan aset daerah melalui media masa, media *online*, *leaflet*, dan lain-lain;
10. Menambah dan merevisi *Standard Operating Procedure* (SOP) pajak daerah, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan aset daerah berdasarkan peraturan yang berlaku;
11. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan

berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas melalui pembentukan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD);

12. Melaksanakan tata kelola keuangan berbasis akrual agar dapat menyajikan laporan keuangan lebih transparan dan akuntabel.

2.3.3.6 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah kepegawaian dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul dengan kedudukan sebagai pendukung atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kepegawaian serta perumusan kebijakan teknis kepegawaian.

Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2016. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan sebagai salah satu organisasi perangkat daerah, dipimpin oleh kepala badan, yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretaris dan kepala bidang.

Pegawai Negeri Sipil di Wilayah Kabupaten Bantul terdiri dari Pegawai Otonomi Daerah dan Pegawai Vertikal. Pegawai Otonomi Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 berjumlah 8.403 orang terdiri dari 3.353 laki-laki dan 5.048 perempuan. Jumlah ini menurun dibandingkan tahun 2017 ada 8.584 orang pegawai terdiri dari 3.658 orang laki-laki dan 4.926 orang perempuan. Hal tersebut disebabkan banyak pegawai yang pensiun. Jumlah Pegawai Otonomi Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017-2018 menurut golongan, disajikan pada Tabel 2.154.

Tabel 2.154 Kondisi Jumlah Pegawai di Kabupaten Bantul Tahun 2017-2018

No	Golongan	2017	2018	2019
1.	Golongan I	108	97	99
2.	Golongan II	1.170	1.180	972

No	Golongan	2017	2018	2019
3.	Golongan III	3.754	4.332	3.949
4.	Golongan IV	4.463	2.894	2.998

Sumber : Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, 2020

Pegawai Negeri Sipil di Wilayah Kabupaten Bantul terdiri dari Pegawai Otonomi Daerah dan Pegawai Vertikal. Pegawai Otonomi Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 berjumlah 8.018 orang mengalami penurunan sebesar 485 orang (5,7%). Hal tersebut disebabkan banyak pegawai yang pensiun.

2.3.3.7 Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan atau Litbang adalah kegiatan penelitian dan pengembangan yang memiliki kepentingan komersial dalam kaitannya dengan riset ilmiah murni dan pengembangan aplikatif di bidang teknologi. Litbang ini memegang peranan penting dan menjadi indikator kemajuan dari suatu organisasi.

Aktivitas Litbang biasanya dilakukan oleh suatu unit, lembaga, atau pusat khusus yang dimiliki oleh sebuah organisasi, perusahaan, perguruan tinggi, atau lembaga negara. Dalam konteks bisnis, "penelitian dan pengembangan" biasanya merujuk pada aktivitas yang berorientasi ke masa yang akan datang dan untuk jangka panjang, baik dalam bidang ilmu maupun dalam bidang teknologi. Metode yang dipakai dalam kegiatan Litbang biasanya menggunakan teknik riset ilmiah yang standar tanpa mengharapkan hasil yang pasti (bentuk riset ilmiah murni) atau untuk mendapatkan prakiraan hasil yang mempunyai nilai komersial dalam waktu dekat. Bentuk riset (penelitian) yang murni biasanya dihasilkan oleh lembaga penelitian seperti Batan, LIPI, Lapan, dan lain-lain. Sementara bentuk pengembangan dari hasil riset yang bersifat praktis bisa dilakukan oleh BPPT dan Pusat Litbang yang ada di masing-masing departemen pemerintah maupun perusahaan.

Di Kabupaten Bantul, fungsi penunjang penelitian dan pengembangan mencakup berbagai macam program yang memiliki ciri adanya unsur peningkatan dan berorientasi ke masa depan. Peningkatan yang dimaksud

bukan hanya dari sisi perangkat keras saja tetapi terutama sekali yang bersifat peningkatan kemampuan, pemberdayaan, dan pembinaan bagi sumber daya manusia.

Peningkatan daya saing antar daerah merupakan agenda yang sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, inovasi dalam pembangunan yang berjalan secara komprehensif serta terjadinya kolaborasi antar aktor pembangunan merupakan faktor kunci peningkatan daya saing.

Pemerintah Kabupaten Bantul senantiasa memotivasi dan mendorong aparat pemerintah, masyarakat, swasta, dan seluruh *stakeholders* untuk bersama-sama mengembangkan kreativitas dan inovasi serta lebih memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek). Inovasi sebagai cara untuk menerapkan Iptek yang telah ada disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan diupayakan selalu menjadi *mindset* semua elemen, sedangkan Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIDA adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga Litbang, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah.

Dalam melaksanakan pengembangan inovasi daerah, Pemerintah Kabupaten Bantul senantiasa menjalin kerjasama dengan daerah lain, pemerintah propinsi maupun pemerintah pusat, swasta, perguruan tinggi, lembaga riset, dan masyarakat, dengan senantiasa mengacu pada kondisi kultural/budaya Bantul agar terjadi kolaborasi/sinergitas sehingga menjadi sebuah sistem inovasi daerah yang saling terkait dan berkelanjutan.

Tahun 2018 merupakan tahun ketiga *Roadmap* SIDA diarahkan untuk sinergitas pengembangan tanaman pewarna alami batik tulis; pelatihan penanaman, penanganan pasca panen, pembuatan pasta pewarna; pendampingan pelatihan; budidaya tanaman pewarna batik alami; dan sosialisasi penggunaan pewarna batik alami.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah melibatkan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta dalam mengawali pengembangan indigofera sebagai tanaman pewarna batik alami, dan memberi pendampingan berupa *workshop* terkait (a) budidaya tanaman pewarna alami batik (tanaman indigofera) dan (b) proses pembuatan pasta pewarna batik hingga proses pewarnaan batik menggunakan pasta indigofera.

Selain Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Bantul menjalin kerjasama dengan Balai Besar Kerajinan dan Batik Kementerian Perindustrian RI. Kerja sama ini tentang pengembangan industri dan kerajinan batik di Kabupaten Bantul dengan ruang lingkup penelitian dan pengembangan teknologi di bidang kerajinan batik, penerapan hasil penelitian dan pengembangan dan rekayasa teknologi, pengembangan desain produk kerajinan dan batik, pelatihan teknis, penyediaan instruktur dan tenaga ahli, pemberian informasi dan layanan konsultasi, supervisi untuk mengembangkan IKM kerajinan dan batik di Kabupaten Bantul.

Kementerian Desa saat ini sedang giat membentuk Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) di tingkat kecamatan dan Kementerian Ristek Dikti telah mencanangkan 1000 desa inovasi di tahun 2014. Di Kabupaten Bantul telah dibentuk Posyantek di 13 kecamatan yaitu: Bantul, Srandakan, Sanden, Pundong, Bambanglipuro, Pandak, Imogiri, Dlingo, Pleret, Banguntapan, Sewon, Kasihan, dan Sedayu. Selain itu, telah dilakukan kegiatan sosialisasi desa inovasi dan inovasi desa di 17 kecamatan.

Pengabdian kepada masyarakat memberi manfaat kepada pemerintah daerah dan masyarakat antara lain: a) mendapatkan bantuan pemikiran dan tenaga dalam pemecahan masalah pembangunan daerah/lokasi, b) dikenalkannya pola pikir dalam merencanakan, merumuskan, melaksanakan berbagai program pembangunan, khususnya di pedesaan, c) tumbuhnya dorongan potensi dan inovasi di kalangan anggota masyarakat setempat dalam upaya pemenuhan kebutuhan lewat

pemanfaatan ilmu dan pengetahuan. Terkait pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat), telah dilaksanakan di Kabupaten Bantul, seperti terdapat pada tabel 2.155.

Tabel 2.155 Jumlah Penelitian/Survei dan Pengabdian kepada Masyarakat di Kabupaten Bantul Tahun 2018

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019
1	Penelitian/Validitas/Survei oleh:				
	- Perguruan Tinggi	4.381	3.463	3.310	2.453
	- Lembaga Survei	142	39	16	14
2	Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat:				
	- Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktek Kerja Lapangan (PKL)	258	281	318	106
	Jumlah	4.781	3.783	3.644	2573

Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul, 2020

2.3.3.8 Penunjang Pemerintahan Umum

Fungsi penunjang pemerintahan umum merupakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh kecamatan. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat adalah pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diangkat oleh Bupati.

Camat mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di Kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan;
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Camat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.4.1.1 Kemampuan Ekonomi Daerah

2.4.1.2 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

Pola pengeluaran konsumsi rumah tangga dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Selain itu, pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, di mana semakin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran maka semakin baik tingkat perekonomian penduduk. Pada kondisi pendapatan terbatas, pemenuhan kebutuhan makanan akan menjadi prioritas utama, sehingga pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah akan terlihat bahwa sebagian besar pendapatannya digunakan untuk membeli makanan.

Persentase pengeluaran konsumsi rumah tangga di Kabupaten Bantul dikelompokkan menjadi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, persentase pengeluaran untuk kelompok non makanan cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, persentase pengeluaran non makanan penduduk Bantul lebih dominan dibandingkan pengeluaran makanan. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat perekonomian penduduk di Kabupaten Bantul semakin baik.

Pembangunan urusan pertanian menempati prioritas utama dalam pembangunan ekonomi daerah. Peranan sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi daerah cukup nyata dilihat dari kontribusinya terhadap penyediaan pangan, penyedia bahan baku industri, penyedia lapangan kerja, PDRB, peningkatan pendapatan petani dan pelestarian lingkungan hidup. Besar kecilnya proporsi pendapatan rumahtangga petani dari sektor pertanian akan mempengaruhi besar kecilnya kekuatan nilai tukar pertanian bagi petani yang berkaitan erat dengan peran pertanian dalam pemenuhan kebutuhan rumahtangga petani. Di Kabupaten Bantul tahun 2019 memiliki indeks sebesar 103,75, sedikit lebih tinggi dari tahun 2018 yaitu 103,16. $NTP > 100$, hal tersebut berarti petani di Kabupaten Bantul mengalami surplus.

Tabel 2.156 Persentase Pengeluaran Konsumsi
di Kabupaten Bantul Tahun 2015-2019

No.	Jenis Pengeluaran Konsumsi	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)
1	Non Makanan	55.85	58.44	56.94	60,60	58,65
2	Makanan	44,15	41,56	43,06	39,40	41,35

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2020

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.4.2.1 Penyediaan Air Minum

Penyediaan dan Pengelolaan Air minum dilaksanakan bekerjasama dengan PDAM Kabupaten Bantul bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Bantul. Dalam rangka penanganan di lokasi rawan kekeringan dan belum terjangkau jaringan PDAM, selama lima tahun terakhir telah dibangun Hidran Umum (HU), pembangunan Sistem Instalasi Perpipaan Air Sederhana (SIPAS). Selain itu, untuk mendukung kawasan siap bangun/lingkungan siap bangun (Kasiba/Lisiba) Bantul Kota Mandiri dibangun Sistem Pengolahan Air Minum (SPAM) di IKK Pajangan. Sumber air minum sebagian besar berasal dari air tanah, baik air tanah dangkal yang berupa sumur gali maupun sumur dalam dan PDAM. Sebagian besar penduduk menggunakan sumur gali, mencapai lebih dari 77,57% dan

hanya sebagian kecil menggunakan air dari PDAM yang bersumber dari sumur dalam (lebih kurang 22,43%). Upaya Pemerintah Kabupaten Bantul untuk meningkatkan akses terhadap air bersih diantaranya dengan menambah jumlah sambungan rumah ke jaringan PDAM dan membangun instalasi Sistem Penyediaan Air Sederhana (SIPAS) melalui program APBD dan Pamsimas (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) di daerah yang rawan air bersih. Instalasi SIPAS yang terbangun tersebut selanjutnya diserahkan kepada masyarakat setempat untuk dimanfaatkan, dikelola, dan dipelihara.

Cakupan air bersih pada tahun 2018 menurut data Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul sebesar 100. Hal ini menunjukkan bahwa semua masyarakat Kabupaten Bantul sudah dapat mengakses air bersih, walaupun akses air bersih ini masih mengalami kendala dari segi kualitas, kontinuitas dan kuantitas. Pada beberapa rumah tangga di kecamatan Dlingo, Imogiri, dan Pandak, tidak semua air memenuhi syarat secara kualitas karena terjadi kesulitan mendapatkan air pada musim kemarau.

2.4.2.2 Penyediaan Komunikasi

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menentukan kebijakan bahwa *e-Government* merupakan salah satu pengungkit percepatan reformasi birokrasi, hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*, serta Peraturan Gubernur DIY Nomor 42 Tahun 2006 tentang *Blueprint Jogja Cyber Province*. Kebijakan ini berarti pula bahwa pemerintah Kabupaten Bantul memposisikan urusan komunikasi dan informatika sebagai komponen terpenting untuk menuju pemerintahan berbasis elektronik atau teknologi informasi dan komunikasi.

Pengembangan *e-Government* menitik beratkan pada layanan unggulan *Digital Government Services* (DGS). Agar system ini dapat berjalan dengan baik maka kebijakan ini didukung oleh sarana dan prasarana pengembangan jaringan internet yang baik pula.

Berkenaan dengan hal tersebut maka telah dilakukan penyajian informasi dan aplikasi *e-Gov* melalui *website*, serta 21 sistem informasi dan 56 aplikasi baik yang bersifat *intranet*, *desktop*, maupun *online* sebagaimana disajikan pada Tabel 2.157.

Tabel 2.157 Aplikasi Sistem Informasi di Kabupaten Bantul Tahun 2017-2019

No.	Tahun	Nama aplikasi
1	2017	SIM elapor
2	2017	SIM simbarang-nakertrans
3	2017	SIM simbarang-setwan
4	2017	Sistem pendaftaran online kendaraan
5	2017	SIM Wistlerblower
6	2017	SIM Zona Integritas
7	2017	SIM simbarangdlh
8	2017	SIM smscenter
9	2017	SIM tanahdesa
10	2017	SIM tanahkasultanan
11	2017	Sistem Informasi Desa (75 Desa)
12	2017	SIM Aset
13	2017	SIM Menara Telekomunikasi
14	2017	SIM rsudps
15	2017	SIM Perencanaan Pembangunan
16	2017	SIM Integrasi Data Kependudukan dan Kepesertaan Jaminan Kesehatan
17	2017	SIM Penanggulangan Kemiskinan
18	2017	SIM Pengendalian Pembangunan
19	2017	SIM Monografi desa
20	2017	SIM Pelaporan Administrasi Kesehatan Masyarakat
21	2017	SIM Perizinan
22	2017	Aplikasi Pengembangan Sekolah Adiwiyata
23	2017	Aplikasi agenda kegiatan DPRD
24	2017	Aplikasi dppkbpmd
25	2017	Aplikasi dprd
26	2017	Aplikasi dwp
27	2017	Aplikasi jdih-dprd
28	2017	Aplikasi Jejaring Pengelola Sampah Mandiri AMOR
29	2017	Aplikasi jrd
30	2017	Aplikasi kesiswaan
31	2017	Aplikasi layananinspektorat
32	2017	Aplikasi paten
33	2017	Aplikasi pbb
34	2017	Aplikasi perizinan-bappeda
35	2017	Aplikasi persuratan-bappeda
36	2017	Aplikasi perundanganri
37	2017	Aplikasi pkk
38	2017	Aplikasi pnpm-pmd
39	2017	Aplikasi potensiwisata
40	2017	Aplikasi ppid
41	2017	Aplikasi ppkd
42	2017	Aplikasi ppns
43	2017	Aplikasi profildkp
44	2017	Aplikasi profilkoperasi

No.	Tahun	Nama aplikasi
45	2017	Aplikasi puskesmas-pleret
46	2017	Aplikasi rkas
47	2017	Aplikasi sarpras-sd
48	2017	Aplikasi setda
49	2017	Aplikasi sik
50	2017	Aplikasi simpamong
51	2017	Aplikasi simpangindagkop
52	2017	Aplikasi simpegnaker
53	2017	Aplikasi simpel
54	2017	Aplikasi sinak
55	2017	Aplikasi sipleret
56	2017	Aplikasi siukm
57	2017	Aplikasi ulp-pbj
58	2017	Aplikasi umum
59	2017	Aplikasi warintek
60	2017	Aplikasi pencaker
61	2017	Aplikasi simperkes
62	2017	Aplikasi mpm
63	2017	Aplikasi pbdtd
64	2017	Aplikasi dpmpt
65	2017	Aplikasi e-investment
66	2017	Aplikasi lkpm-dpmpt
67	2017	Aplikasi Kearsipan
68	2017	Aplikasi SPSE
69	2017	Aplikasi Pelayanan Terpadu
70	2017	Aplikasi Pelayanan Terpadu
71	2017	Aplikasi Pengadaan Barang Secara Elektronik
72	2017	Aplikasi Sistem Pengelolaan Presensi
73	2018	Aplikasi E-Retribusi
74	2018	Aplikasi Kampung KB
75	2018	Aplikasi Pengembangan E-Lapor
76	2018	Aplikasi TIK
77	2018	Aplikasi Autentifikasi
78	2018	Jelajah Bantul
79	2018	Sigadis Pentul - SiPenTul
80	2018	Sistem Informasi Administrasi Puskesmas (SIAP)
81	2018	Sistem Informasi Manajemen Desa
82	2018	Survei Kepuasan Masyarakat
83	2019	eSurat Bantul
84	2019	Biss (Bantul Integreated Siren System)
85	2019	Pembayaran E-retribusi Kendaraan Bermotor.
86	2019	Dukcapil Smart.
87	2019	Tante Sosialita (Pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga Solusi Sehat Alami Untuk Kita)
88	2019	Garpu Salad (Gerakan Peduli Kesehatan Sulang Kidul)
89	2019	Sijawara Joss (Pasien Sakit Jiwa Sehat Sejahtera Jenius Olah Sampah)
90	2019	Geplak Manis Dibawa Andong (Gerakan Pemberantasan TB Bersama Warga Kec. Pundong)
91	2019	Sijempol (Sistem Jemput Bola)

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bantul, 2020

Selain website dan aplikasi sebagaimana dapat dilihat pada table di atas, juga diterapkan sarana komunikasi dan informasi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi lainnya, yaitu berupa pemanfaatan media telematika, seperti penggunaan aplikasi sistem informasi, SMS center, website daerah yaitu www.bantulkab.go.id, bantulbiz.com, bantulcraft.com, informasi SKPD melalui subdomain SKPD, Warung Informasi dan Teknologi (Warintek), fasilitas akses jaringan internet dan intranet SKPD dan *telecenter*.

Tabel 2.158 Media Komunikasi Pemerintah dan Masyarakat di Kabupaten Bantul Tahun 2019

No.	Media	2019
1	Siaran Taman Gabusan TVRI Yogyakarta	24 kali siaran dalam studio dan 6 kali luar studio
2	dialog Interaktif 3 stasiun radio (bantul Fm, Persatuan & Sonora Fm)	72 kali siaran
3	dinamika Pembangunan	8 kali peliputan umkm Bantul
4	Dialog Interaktif generasi muda star jog	12 kali siaran di beberapa SMA/SMK di Bantul
5	Penerbitan Buletin Sejada	7000 eksemplar tersebar s/d kelurahan
6	Website daerah (www.bantulkab.go.id)	54 sub domain
7	Media social Pemkab	IG, Twitter, Fb, Youtube (bantulTV)
8	Publikasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah kabupaten bantul	Media cetak dan elektronik selama 12 bulan
9	Jurnal Riset Daerah	Penerbitan 3 edisi reguler (bulan April, Agustus, dan Desember) dan Edisi Khusus tahun 2019
10	Lapor bantul.	148 laporan (147 direspon, 1 belum)
11	Panggilan darurat bantul 112	Launching bulan November 2012

Sumber: Kominfo Kabupaten Bantul, 2020

Selanjutnya untuk lebih memasyarakatkan kebijakan tersebut maka dibentuklah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), yaitu organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk masyarakat, di mana salah satu peran dan fungsi KIM adalah sebagai partner jaringan informasi dari pemerintah ke

masyarakat, sehingga nantinya dapat tercipta masyarakat yang peduli informasi. Jumlah KIM yang saat ini terdaftar di Diskominfo ada 19 KIM.

Peningkatan pembangunan infrastruktur jaringan internet dan intranet SKPD Pemerintah Kabupaten Bantul dapat dilihat dengan pembangunan jaringan fiber optic sepanjang 43,95 km yang tersebar di seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul, kecamatan, dan pemerintah tingkat desa serta Puskesmas.

2.4.2.3 Partisipasi Lembaga Swasta melalui CSR

Tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah bentuk tanggung jawab organisasi atau perusahaan terhadap masyarakat yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Di Kabupaten Bantul, CSR telah memberikan sumbangan yang tidak ternilai dan telah terbukti memberikan andil dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BUMN, lembaga keuangan non BUMN, instansi kesehatan, instansi pendidikan, dan perusahaan umum yang ada di Kabupaten Bantul telah banyak mengalokasikan dana CSR untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengapresiasi dan mendokumentasikan bantuan dana CSR tersebut, setiap tahun Pemerintah Kabupaten Bantul setiap tahun menerbitkan buku CSR Membangun Bantul. Pada tahun 2018 tercatat ada 49 instansi/lembaga dan perusahaan yang memberikan dana CSR kepada masyarakat Bantul, sebagaimana terdapat pada tabel berikut.

Tabel 2.159 Pemanfaatan CSR di Kabupaten Bantul Tahun 2018

No.	Perusahaan	Bidang Kegiatan
1	PT Pertamina TBBM Rewulu	UMKM dan Ekonomi Kreatif
2	PT. Pertamina	Kesehatan, Lingkungan Hidup, Pendidikan, Sosial, UMKM dan Ekonomi Kreatif
3	PT Bank Tabungan Negara	UMKM dan Ekonomi Kreatif
4	PT PLN (Persero)	Lingkungan Hidup
5	PT Telkom Indonesia	UMKM dan Ekonomi Kreatif
6	PT Bank Negara Indonesia Tbk	UMKM dan Ekonomi Kreatif
7	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Pendidikan, UMKM dan Ekonomi Kreatif
8	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	Lingkungan Hidup, UMKM dan Ekonomi Kreatif

No.	Perusahaan	Bidang Kegiatan
9	PT Bank BPD DIY Cabang Bantul	Lingkungan Hidup, Pendidikan, Sosial, UMKM dan Ekonomi Kreatif
10	PT Bank Syariah Mandiri Baranch Bantul	Kesehatan, Sosial, UMKM dan Ekonomi Kreatif
11	Bank Woori Saudara	Pendidikan, Sosial
12	KSPPS BMT Artha Amanah Sanden	Kesehatan, Pendidikan, Sosial
13	PT BPR Kurnia Sewon	Sosial
14	KSPPS Tamzis Bina Utama	Kesehatan, Pendidikan, Sosial
15	KSPPS BMT Ad Da'wah	Sosial
16	PD BPR Bank Bantul	Kesehatan, Lingkungan Hidup
17	Bank Danamon	UMKM dan Ekonomi Kreatif
18	PT Bank Central Asia Tbk	UMKM dan Ekonomi Kreatif
19	Tamziz Baituttamwil	UMKM dan Ekonomi Kreatif
21	RSU PKU Muhammadiyah Bantul	Kesehatan, Pendidikan, Sosial, UMKM dan Ekonomi Kreatif
22	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	Pendidikan, Sosial
23	Coca Cola Foundation Indonesia	Pendidikan
24	PT Unilever	Kesehatan, Lingkungan Hidup, UMKM dan Ekonomi Kreatif
25	Santika Premier Hotel	UMKM dan Ekonomi Kreatif
26	Mercure Accor Hotel	UMKM dan Ekonomi Kreatif
27	Mutiara Hotel	UMKM dan Ekonomi Kreatif
28	101 Hotel	UMKM dan Ekonomi Kreatif
29	Yogyakarta Plaza Hotel	UMKM dan Ekonomi Kreatif
30	Burza Hotel	UMKM dan Ekonomi Kreatif
31	PT Almi Furniture Perdana	Pendidikan, Sosial
32	PT Adi Satria Abadi (ASA)	Sosial
33	PT Bangun Jaya Mandiri	Sosial
34	PT Cahaya Mulia Persada Nusa	Lingkungan Hidup, Sosial
35	PT Indokor Bangun Desa	Sosial
36	PT Komitrando Emporio	Pendidikan
37	PT Lio Collection	Sosial
38	CV Prima Alam Sejahtera	Lingkungan Hidup, Sosial
39	PT Tirta Investama	Sosial
40	PT Yogyakarta Tembakau Indonesia	Lingkungan Hidup, Pendidikan, Sosial
41	PT Madubaru	Lingkungan Hidup, Sosial, UMKM dan Ekonomi Kreatif
42	PT IGP Internasional Bantul	Pendidikan, Sosial, UMKM dan Ekonomi Kreatif
43	Pusat Kemasan UKM	UMKM dan Ekonomi Kreatif
44	CV Arya Nurega	Lingkungan Hidup
45	CV Bunga Padi	Lingkungan Hidup
46	PT Aneka Dharma Persada	Lingkungan Hidup
47	PT Nindya Karya (Persero)	Lingkungan Hidup
48	Pusat Kemasan UKM	UMKM dan Ekonomi Kreatif
49	CV Arya Nurega	Lingkungan Hidup

Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul, 2020

2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

2.4.3.1 Angka Kriminalitas

Dalam mendukung terciptanya iklim berinvestasi di Kabupaten Bantul maka pemerintah daerah bersama dengan instansi vertikal (kepolisian dan kejaksaan) harus berupaya meningkatkan keamanan yang kondusif di masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga kuantitas dan kualitas kriminalitas dapat diminimalisir. Angka kriminalitas yang tertangani merupakan indikator yang berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat.

Tabel 2.160 Angka Kriminalitas di Kabupaten Bantul Tahun 2015-2019

No.	Jenis Kriminal	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah kasus Narkoba	21	45	46	78	95
2	Jumlah kasus Pembunuhan	3	4	0	2	2
3	Jumlah Kejahatan Seksual	19	4	29	15	41
4	Jumlah kasus Penganiayaan	53	81	135	81	85
5	Jumlah kasus Pencurian	410	345	395	281	362
6	Jumlah kasus Penipuan	143	88	76	94	122
7	Jumlah kasus Pemalsuan uang	0	0	2	0	0
8	Total Jumlah Tindak Kriminal Tertangani Selama 1 Tahun	649	567	683	551	707
9	Jumlah Penduduk	919.440	928.676	927.181	939.718	945.441
10	Angka Kriminalitas	0,071	0,061	0,074	0,055	0,074

Sumber: Satpol PP Kabupaten Bantul, 2020

Tabel 2.160 menunjukkan bahwa pada tahun 2019 angka kriminalitas di Kabupaten Bantul mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2018. Hal ini di mungkinkan karena beberapa faktor. Dilihat dari jenis kriminal yang mengalami peningkatan adalah jumlah kasus pencurian, penipuan dan kasus narkoba, beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan kasus tersebut antara lain permasalahan keluarga, pengaruh media sosial dan pergaulan. Perlunya upaya pemerintah untuk lebih meningkatkan sosialisasi atau penyuluhan bahaya narkoba dan sosialisasi pencegahan penyakit masyarakat. Selain itu tidak

mengabaikan faktor lain yang secara juga berpengaruh terhadap peningkatan kasus seperti faktor ekonomi, faktor sosial dan sanksi hukum yang tidak memberikan efek jera bagi pelaku.

2.4.3.2 Jumlah Demonstrasi

Salah satu yang harus dikendalikan dalam mendukung iklim investasi yang kondusif adalah demonstrasi/unjukrasa. Jumlah demonstrasi di Kabupaten Bantul tahun 2015-2019 disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.161 Jumlah Demonstrasi di Kabupaten Bantul Tahun 2015-2019

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019*
1	Bidang Politik	1	6	3	-	0
2	Ekonomi	6	2	5	1	1
3	Kasus pemogokan kerja	20	2	-	2	1
	Jumlah Demonstrasi/Unjuk Rasa	27	10	8	3	2

Sumber: Polres Kabupaten Bantul, 2016 dan Satuan Pol PP Kabupaten Bantul, 2020

* Angka sementara

Jumlah demonstrasi dari tahun 2015-2019 menunjukkan trend menurun terutama kasus pemogokan kerja. Hal ini dapat mendorong terwujudnya iklim investasi yang kondusif.

2.4.3.3 Kemudahan Perizinan

Pelayanan publik yang memuaskan masyarakat adalah tujuan akhir dari reformasi birokrasi, sejalan dengan hal tersebut pemerintah Kabupaten Bantul terus berupaya meningkatkan kualitas berbagai jenis pelayanan publik, termasuk di antaranya pelayanan di bidang perizinan, baik berupa penyederhanaan proses pengurusan perizinan, pemberian informasi yang cepat dan akurat maupun respon dan penyelesaian terhadap aduan yang masuk.

Kebijakan ini perlu dilaksanakan untuk meningkatkan standar pelayanan perizinan berusaha yang efisien, mudah dan terintegrasi tanpa mengabaikan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga proses penerbitan perizinan berusaha menjadi lebih cepat namun sesuai dengan

standar pelayanan yang ada sekaligus memberikan kepastian waktu dan biaya yang diperlukan.

Sebagai wujud komitmen Pemerintah untuk menciptakan iklim yang lebih kondusif dalam bidang pelayanan perizinan tersebut, maka dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, serta Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul, dibentuklah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Bantul.

Selanjutnya untuk lebih meningkatkan kinerja DPMPT, maka sesuai amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, ditetapkanlah Keputusan Bupati Bantul nomor 38 tahun 2018 tentang Pembentukan Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Tugas satgas diantaranya adalah mengawal dan membantu peningkatan pelayanan, penyelesaian hambatan, penyederhanaan atas izin berusaha, pengidentifikasian perizinan yang perlu direformasi (dimudahkan atau distandarisasi) dan pengembangan sistem online dalam rangka percepatan penyelesaian Perizinan Berusaha.

Dari kesepakatan rangkaian rapat koordinasi yang telah dilaksanakan oleh Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha, maka diterbitkanlah Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2018, yang memberi tanggung jawab kepada DPMPT untuk menerima limpahan kewenangan melaksanakan Pelayanan Perizinan dan Non perizinan, yang ada di wilayah pemerintahan Kabupaten Bantul.

Dalam perkembangannya pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2018 tanggal 21 Juni 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (online single submission-OSS).

Sistem ini memungkinkan investor dan calon investor mengurus izin usaha secara *online* tanpa dibatasi waktu dan tempat, disamping juga

memangkas birokrasi panjang dan memakan waktu yang semula diberlakukan. Segala bentuk usaha dapat menggunakan sistem OSS mulai dari PT, Firma, CV, hingga UKM.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah tersebut maka jenis pelayanan perizinan yang dikelola oleh DPMPT tahun 2019 dipilah menjadi pelayanan perizinan dengan OSS dan pelayanan perizinan non OSS, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.162 Pelayanan Perizinan OSS dan Non OSS Kabupaten Bantul Tahun 2019

Perizinan OSS		
No	Nama Perizinan	Jumlah Jenis Perizinan
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	1
2.	Perizinan Perdagangan	3
3.	Perizinan Perindustrian	2
4.	Perizinan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM)	2
5.	Perizinan Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPKP) dan Pertahanan	3
6.	Perizinan Perhubungan	2
7.	Perizinan Peternakan	1
8.	Perizinan Kesehatan	8
9.	Perizinan Usaha Pariwisata	1
10.	Perizinan Tenaga Kerja	1
Perizinan Non OSS		
No	Nama Perizinan	Jumlah Jenis Perizinan
1.	Perizinan Dasar	3
2.	Perizinan Kesehatan	24
3.	Perizinan Usaha Perikanan	1
4.	Perizinan Reklame	1

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul, 2020

Selain adanya penyederhanaan pelayanan dan efisiensi waktu dimana proses penyelesaian izin dapat diselesaikan paling lama 12 hari jika syarat yang diperlukan lengkap, jelas, dan benar, maka pengurusan izin

juga dapat dilaksanakan secara paralel (sekali mengajukan untuk beberapa jenis izin dalam obyek izin yang sama).

Waktu yang diperlukan bagi pelayanan perizinan secara terperinci disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.163 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Nomor Induk Berusaha (NIB)							
NO	Uraian	Lama Mengurus (hari kerja)		Jumlah Persyaratan (Dokumen)		Biaya Resmi	
		Pemenuhan Komitmen	Penyelesaian Dokumen	Perseorangan	Non Perseorangan		
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	1		8	11	Tidak dipungut biaya	
Perdagangan							
NO	Uraian	Lama Mengurus (hari kerja)		Jumlah Persyaratan (Dokumen)		Biaya Resmi	
		Pemenuhan Komitmen	Penyelesaian Dokumen	Pemenuhan Komitmen	Teknis		
2.	Surat Izin Usaha Perdagangan	- Perdagangan Umum = - - Toko Swalayan = 35 - Pusat Perbelanjaan = 35		3	5	- Umum = - - Swalayan berdiri sendiri = 3 - Swalayan terintegrasi = 1 - Pusat Perbelanjaan = 4	Tidak dipungut biaya
3.	Tanda Daftar Gudang (TDG)	30		5	5	3	Tidak dipungut biaya
4.	SIUP Mihol	35		5	11	- Pengecer Gol B dan C = 3 - Penjual Gol B dan C = 3	Tidak dipungut biaya
Perindustrian							
NO	Uraian	Lama Mengurus (hari kerja)		Jumlah Persyaratan (Dokumen)		Biaya Resmi	
		Pemenuhan Komitmen	Penyelesaian Dokumen	Pemenuhan Komitmen	Teknis		
5.	Izin Usaha Industri (IUI)	- SIINas selama 10 (sepuluh) hari kerja setelah diperoleh IUI (Izin Usaha Industri) - Surat Keterangan Dirjend Pembina Kawasan Industri: selama 10 (sepuluh) hari kerja sejak disampaikan ke SIINas - Penyampaian Data Industri - Izin Lokasi: paling lama 3 (tiga) tahun setelah diperoleh IUI - Izin Lingkungan: paling		20	5	4	Tidak dipungut biaya

		lama 3 (tiga) tahun setelah diperoleh IUI (Izin Usaha Industri)				
6.	Izin Perluasan Industri (IPI)	3	10	5	1	Tidak dipungut biaya

KUMKM

NO	Uraian	Lama Mengurus (hari kerja)		Jumlah Persyaratan (Dokumen)		Biaya Resmi
		Pemenuhan Komitmen	Penyelesaian Dokumen	Pemenuhan Komitmen	Teknis	
7.	Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)	Sesuai dengan SOP masing masing sektor		5		Tidak dipungut biaya
8.	Izin Koperasi Simpan Pinjam	30	30	5	7	Tidak dipungut biaya

PUPKP & Pertanian

NO	Uraian	Lama Mengurus (hari kerja)		Jumlah Persyaratan (Dokumen)		Biaya Resmi
		Pemenuhan Komitmen	Penyelesaian Dokumen	Pemenuhan Komitmen	Teknis	
9.	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	30	5	6	1	Tidak dipungut biaya
10.	Tanda Daftar Usaha Perseorangan	30	5	6	1	Tidak dipungut biaya
11.	Izin Lokasi	10	10	8		Tidak dipungut biaya

Perhubungan

NO	Uraian	Lama Mengurus (hari kerja)		Jumlah Persyaratan (Dokumen)			Biaya Resmi
		Pemenuhan Komitmen	Penyelesaian Dokumen	Pemenuhan Komitmen	Administrasi	Teknis	
12.	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang	6	7	5	8	Dalam Trayek = 4 Tidak Dalam Trayek = 5	Rp. 5.000.000
13.	Izin Trayek	6 Bulan	7	5	9	4	Rp. 5.000.000

A. Retribusi Surat Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Orang :**1. Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek:****a. Izin trayek antar Kabupaten/Kota dan angkutan**

perkotaanyangmelampauwilayahsatuprovinsiRp. 5.000.000,- per izin

2. Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek :

- a. Izin angkutan dengan tujuan tertentu Rp 5.000.000 perizin;
b. Izin angkutan pariwisata Rp 5.000.000 perIzin.

B. Retribusi Surat Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Orang :

Izin trayek antar Kabupaten/Kotadan angkutan perkotaan yang melampaui wilayah satu provinsi Rp. 5.000.000,- per izin

Peternakan

NO	Uraian	Lama Mengurus (hari kerja)		Jumlah Persyaratan (Dokumen)		Biaya Resmi
		Pemenuhan Komitmen	Penyelesaian Dokumen	Pemenuhan Komitmen	Administrasi	
14.	Pendaftaran Usaha Peternakan	2 bulan	5	14	-	Tidak dipungut biaya

Kesehatan

NO	Uraian	Lama Mengurus (hari kerja)		Jumlah Persyaratan (Dokumen)		Biaya Resmi
		Pemenuhan Komitmen	Penyelesaian Dokumen	Pemenuhan Komitmen Izin Usaha	Pemenuhan Komitmen Izin Komersial	
15.	Izin Usaha Apotek	6 bulan	9	5	5	Tidak dipungut biaya
16.	Mendirikan Rumah Sakit	2 Tahun	14	5	2	Tidak dipungut biaya
17.	Operasional Rumah Sakit	3 bulan	24	5	6	Tidak dipungut biaya
18.	Izin Operasional Klinik	1 Bulan	17	5	4	Tidak dipungut biaya
19.	Izin Operasional Laboratorium	1 Bulan	20	5	3	Tidak dipungut biaya
20.	Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	3 Bulan	11	5	2	Tidak dipungut biaya
21.	Toko Alat Kesehatan	2 Tahun	15	5	3	Tidak dipungut biaya
22.	Toko Obat	6 Bulan	9	5	5	Tidak dipungut biaya

Tanda Daftar Usaha Pariwisata					
NO	Uraian	Lama Mengurus (hari kerja)		Jumlah Persyaratan (Dokumen)	Biaya Resmi
		Pemenuhan Komitmen	Penyelesaian Dokumen		
23.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata	12	3	5	Tidak dipungut biaya

Tenaga Kerja						
NO	Uraian	Lama Mengurus (hari kerja)		Jumlah Persyaratan (Dokumen)		Biaya Resmi
		Pemenuhan Komitmen	Penyelesaian Dokumen	Pemenuhan Komitmen Izin Usaha	Pemenuhan Komitmen Izin Operasional	
24.	Izin Mendirikan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	1 Tahun	30	5	13	Tidak dipungut biaya

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul, 2020

Dari tabel di atas dapat diketahui waktu yang diperlukan untuk pengurusan perizinan dari masing-masing sektor, serta pungutan biaya untuk pengurusan izin tersebut (hampir semuanya tanpa biaya kecuali Ijin usaha sektor perhubungan yang dihitung sesuai peraturan yang ada).

Selanjutnya terkait data IMB yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.164 Penetapan IMB per Satuan Bangunan Menurut Kecamatan di Kabupaten Bantul tahun 2019

No.	Kecamatan	SIM Lama (01 Jan.- 19 Mei 2019)		SIM Baru (20 Mei - 31 Des.2019)		Jumlah
		IMB Gedung	IMB bkn Gedung	IMB Gedung	IMB bkn Gedung	
1	Bambang Lipuro	10	0	3	1	14
2	Banguntapan	118	11	163	18	310
3	Bantul	29	3	84	5	121
4	Dlingo	2	0	6	0	8
5	Imogiri	5	0	12	0	17
6	Jetis	22	0	103	1	126
7	Kasihan	185	4	300	15	504
8	Kretek	3	1	5	2	11
9	Pajangan	11	0	16	1	28

No.	Kecamatan	SIM Lama (01 Jan.- 19 Mei 2019)		SIM Baru (20 Mei - 31 Des.2019)		Jumlah
		IMB Gedung	IMB bkn Gedung	IMB Gedung	IMB bkn Gedung	
10	Pandak	13	1	10	3	27
11	Piyungan	22	2	30	2	56
12	Pleret	24	1	21	2	48
13	Pundong	3	2	5	1	11
14	Sanden	3	0	1	0	4
15	Sedayu	127	2	187	2	318
16	Sewon	132	6	96	8	242
17	Srandakan	6	1	10	0	17
Jumlah		715	34	1052	61	1862

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul, 2020

Sementara data penerbitan IMB selama 4 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.165 Penetapan IMB per Satuan Bangunan Menurut Kecamatan di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2019

No.	Kecamatan	2016	2017	2018	2019
1	Kasihan	600	387	701	504
2	Banguntapan	573	380	270	310
3	Sewon	303	159	174	242
4	Pleret	141	122	26	48
5	Bantul	97	58	106	121
6	Sedayu	87	283	141	318
7	Pajangan	34	38	116	28
8	Piyungan	27	41	49	56
9	Jetis	19	64	41	126
10	Bambang Lipuro	18	23	19	14
11	Srandakan	12	4	9	17
12	Pandak	9	12	16	27
13	Imogiri	8	15	11	17
14	Kretek	6	9	8	11
15	Dlingo	4	2	12	8
16	Pundong	3	6	6	11
17	Sanden	3	7	13	4

No.	Kecamatan	2016	2017	2018	2019
Jumlah		1.944	1.610	1.718	1.862

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul, 2020

Dari keseluruhan proses perizinan yang dikelola oleh DPMPPT dari tahun 2015 sampai dengan 2019, maka rekapitulasi dari permohonan izin tersebut dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.166 Rekapitulasi Perizinan di Kabupaten Bantul Tahun 2015-2019

No.	Jenis Izin	2015	2016	2017	2018	2019
1	Permohonan izin	6.930	6.807	6.165	5.664	3.793
2	Izin diterbitkan	5.940	6.021	5.986	5.502	2.784
3	Izin ditolak	151	165	177	148	929
4	Izin dalam proses	839	621	2	14	80

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul, 2020

2.4.3.4 Peraturan Daerah yang Mendukung Iklim Usaha

Peraturan Daerah merupakan sebuah instrumen kebijakan daerah yang sifatnya formal, melalui perda inilah dapat diindikasikan adanya insentif maupun disinsentif sebuah kebijakan di daerah terhadap aktivitas perekonomian. Perda yang mendukung iklim usaha dibatasi yaitu perda terkait dengan perijizinan, perda terkait dengan lalu lintas barang dan jasa, serta perda terkait dengan ketenagakerjaan.

Tabel 2.167 Perda yang Mendukung Iklim Usaha/Investasi di Kabupaten Bantul

Jenis Perda
1. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung; 2. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perizinan Usaha Bidang Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perizinan Usaha Bidang Perindustrian dan Perdagangan; 3. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi; 4. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Bantul; 5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembinaan Jasa Konstruksi; 6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan; 7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan dan Perizinan di Bidang Kesehatan;

Jenis Perda
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik; 9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata; 10. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2025; 11. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi; 12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021; 13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing; 14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Retribusi Jasa Usaha; 15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perizinan Pemanfaatan Ruang; 16. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi; 17. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelayanan Tera/Tera Ulang; 18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian wilayah Perkotaan Sewon Tahun 2018-2038; dan 19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian wilayah Perkotaan Kasihan Tahun 2018-2038. 20. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 21. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu. 22. Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan

Sumber: Bagian Hukum Kabupaten Bantul, 2020

2.4.3.5 Desa Berstatus Mandiri

Selain status desa perdesaan dan perkotaan, ada status desa berdasarkan perkembangan kemajuan desa, mengingat desa Kabupaten Bantul memiliki karakteristik yang berbeda-beda baik dari segi luas wilayah, kondisi ekonomi, politik, sosial budaya, dll. Hal ini penting karena pembangunan perdesaan merupakan salah satu amanat Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 86, yang salah satu ayatnya menyebutkan "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi desa dan pembangunan kawasan perdesaan". Selain itu juga mendukung salah satu Nawacita pemerintah, yaitu "Pembangunan Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan".

Ada dua status desa berdasarkan perkembangan kemajuan desa, yaitu Indeks Pembangunan Desa (IPD) dan Indeks Desa Membangun (IDM) yang merupakan hasil analisis dari basis data yang sama yaitu hasil

pendataan Potensi Desa (Podes) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2014. Berdasarkan hasil pendataan Podes pada tahun 2008, diketahui masih terdapat 16 desa dengan status “**desa tertinggal**”. Namun, berdasarkan tolok ukur IPD maupun IDM yang berbasis Podes Tahun 2014, tidak terdapat lagi desa di Kabupaten Bantul dengan status ‘**desa tertinggal**’. Hasil analisis terhadap status desa di Kabupaten Bantul menurut IPD maupun IDM, disajikan pada Tabel 2.168 berikut.

Tabel 2.168 Status Desa di Kabupaten Bantul Menurut Indeks Pembangunan Desa (IPD) dan Indeks Desa Membangun (IDM)

No.	Kecamatan	DESA	IDM	KLASIFIKASI	IPD	KLASIFIKASI
1	Srandakan	Poncosari	0.7641	Maju	77.86	Mandiri
		Trimurti	0.7658	Maju	78.47	Mandiri
2	Sanden	Srigading	0.7032	Berkembang	78.61	Mandiri
		Gadingsari	0.8038	Maju	75.36	Mandiri
		Gadingharjo	0.6977	Berkembang	64.79	Berkembang
		Murtigading	0.7678	Maju	74.39	Berkembang
3	Kretek	Tirtoharjo	0.7032	Berkembang	67.6	Berkembang
		Donotirto	0.8308	Mandiri	83.07	Mandiri
		Parangtritis	0.8511	Mandiri	82.64	Mandiri
		Tirtosari	0.676	Berkembang	68.86	Berkembang
		Tirtomulyo	0.800	Maju	75.71	Mandiri
4	Pundong	Seloharjo	0.7638	Maju	68.22	Berkembang
		Srihardono	0.8156	Mandiri	77.92	Mandiri
		Panjangrejo	0.7877	Maju	69.67	Berkembang
5	Bambanglipuro	Sumbermulyo	0.842	Mandiri	82.04	Mandiri
		Sidomulyo	0.7969	Maju	75.84	Mandiri
		Mulyodadi	0.7155	Maju	76.77	Mandiri
6	Pandak	Caturharjo	0.7452	Maju	73.63	Berkembang
		Wijirejo	0.7677	Maju	77.24	Mandiri
		Triharjo	0.7648	Maju	72.01	Berkembang
		Gilangharjo	0.8072	Maju	79.13	Mandiri
7	Pajangan	Guwosari	0.792	Maju	73.34	Berkembang
		Triwidadi	0.7198	Maju	68.76	Berkembang
		Sendangsari	0.7299	Maju	67.68	Berkembang
8	Bantul	Sabdodadi	0.7476	Maju	74.99	Berkembang
		Palbapang	0.801	Maju	80.52	Mandiri
		Ringinharjo	0.7427	Maju	74.2	Berkembang
		Bantul	0.8059	Maju	83.4	Mandiri
		Trirenggo	0.7702	Maju	72.87	Berkembang

No.	Kecamatan	DESA	IDM	KLASIFIKASI	IPD	KLASIFIKASI
9	Jetis	Patalan	0.7757	Maju	78.12	Mandiri
		Trimulyo	0.7935	Maju	77.23	Mandiri
		Canden	0.7661	Maju	71.77	Berkembang
		Sumberagung	0.7874	Maju	76.03	Mandiri
10	Imogiri	Selopamioro	0.7159	Maju	73.66	Berkembang
		Kebonagung	0.7282	Maju	71.86	Berkembang
		Sriharjo	0.7097	Maju	69.82	Berkembang
		Karangtalun	0.7729	Maju	73.03	Berkembang
		Karangtengah	0.6930	Berkembang	63.50	Berkembang
		Imogiri	0.7364	Maju	80.05	Mandiri
		Wukirsari	0.7643	Maju	78.38	Mandiri
		Girirejo	0.7261	Maju	64.28	Berkembang
11	Dlingo	Mangunan	0.7113	Maju	72.38	Berkembang
		Dlingo	0.6644	Berkembang	69.32	Berkembang
		Muntuk	0.7061	Berkembang	71.24	Berkembang
		Temuwuh	0.7471	Maju	73.21	Berkembang
		Jatimulyo	0.6366	Berkembang	64.91	Berkembang
		Terong	0.7318	Maju	77.16	Mandiri
12	Banguntapan	Tamanan	0.8371	Mandiri	79.05	Mandiri
		Baturetno	0.8339	Mandiri	82.35	Mandiri
		Jagalan	0.6481	Berkembang	64.98	Berkembang
		Banguntapan	0.8649	Mandiri	89.02	Mandiri
		Singosaren	0.7519	Maju	73.32	Berkembang
		Wirokerten	0.8181	Mandiri	78.66	Mandiri
		Jambidan	0.7240	Maju	69.30	Berkembang
		Potorono	0.8293	Mandiri	82.12	Mandiri
13	Pleret	Bawuran	0.6486	Berkembang	64.68	Berkembang
		Wonokromo	0.7954	Maju	78.26	Mandiri
		Wonolelo	0.6405	Berkembang	64.94	Berkembang
		Segoroyoso	0.7155	Maju	76.20	Mandiri
		Pleret	0.8271	Mandiri	80.81	Mandiri
14	Piyungan	Sitimulyo	0.7713	Maju	81.77	Mandiri
		Srimulyo	0.8053	Maju	79.20	Mandiri
		Srimartani	0.7377	Maju	75.02	Mandiri
15	Sewon	Pendowoharjo	0.8271	Mandiri	79.72	Mandiri
		Bangunharjo	0.8588	Mandiri	84.70	Mandiri
		Timbulharjo	0.8369	Mandiri	80.75	Mandiri
		Panggunharjo	0.8141	Maju	82.29	Mandiri
16	Kasihan	Tamantirto	0.7135	Maju	70.54	Berkembang
		Tirtonirmolo	0.7604	Maju	81.42	Mandiri

No.	Kecamatan	DESA	IDM	KLASIFIKASI	IPD	KLASIFIKASI
		Ngestiharjo	0.8264	Mandiri	82.03	Mandiri
		Bangunjiwo	0.7259	Maju	70.15	Berkembang
17	Sedayu	Argodadi	0.6739	Berkembang	66.13	Berkembang
		Argosari	0.7574	Maju	75.57	Mandiri
		Argomulyo	0.8641	Mandiri	75.35	Mandiri
		Argorejo	0.7710	Maju	79.96	Mandiri

Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul, 2020

Berdasarkan Tabel 2.168 analisis status desa di Kabupaten Bantul menurut IPD, dapat disimpulkan:

1. Tidak ada satupun desa di Kabupaten Bantul yang mendapat status tertinggal;
2. Jumlah desa yang berstatus 'Mandiri' sebanyak 41 desa dan 'Berkembang' sejumlah 34 desa;
3. Berdasarkan *ranking* IPD, tiga desa dengan skor tertinggi adalah Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan (89,02); Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon (84,70); dan Desa Bantul, Kecamatan Bantul (83,40). Adapun desa dengan nilai terendah adalah Desa Karangtengah, Kecamatan Imogiri (63,50); Desa Girirejo, Kecamatan Imogiri (64,28); dan Desa Bawuran, Kecamatan Pleret (64,68).

Sementara berdasarkan analisis menurut IDM, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tidak ada satupun desa di Kab. Bantul yang mendapat status tertinggal;
2. Menurut IDM, terdapat sejumlah 15 desa dengan kriteria 'Mandiri', 48 'Maju' dan sisanya 12 'Berkembang';
3. Menurut *ranking* IDM, tiga desa dengan skor tertinggi adalah Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan (0,8649); Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu (0,8641); dan Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon (0, 8588). Adapun desa dengan nilai terendah adalah Desa Jatimulyo, Kecamatan Dlingo (0,6366); Desa Wonolelo, Kecamatan Pleret (0,6405); dan Desa Bawuran, Kecamatan Pleret (0,6486).

2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

2.4.4.1 Kualitas Tenaga Kerja

Kualitas tenaga kerja dapat dilihat dari kualitas SDM yang mengenyam pendidikan tinggi dan mempunyai keahlian serta menguasai teknologi yang dibutuhkan di dunia kerja.

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional. Kualitas sumberdaya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah.

Tabel 2.169 Data Kepesertaan Jamsostek

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Pembilang :					
Jumlah pekerja/buruh peserta program jamsostek	23.906	25.325	23.753	26.664	28.666
Penyebut :					
Jumlah pekerja/buruh	40.932	40.484	42.842	48.908	49.036
Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta jamsostek	58,40%	62%	55,44%	54,73%	58,61%

Sumber : Disnakertrans, 2020

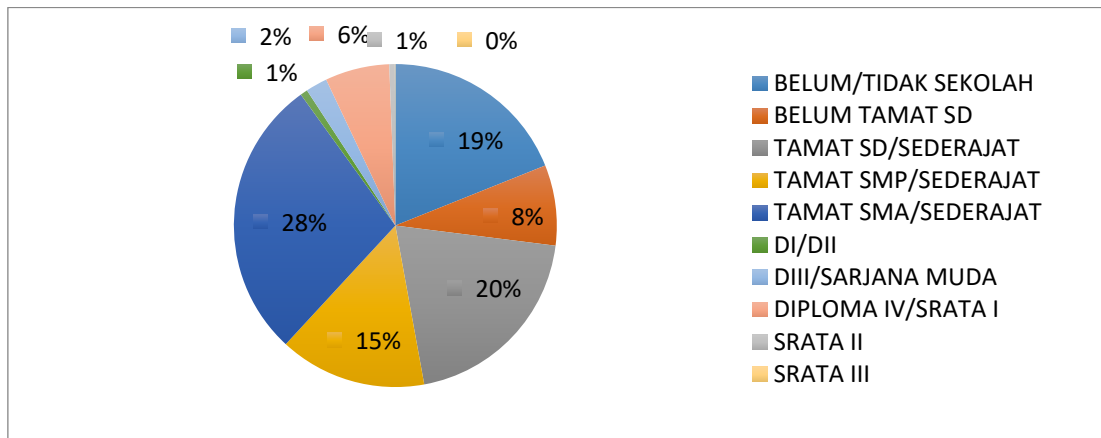
Tabel diatas menguraikan tentang data Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga kerja (Jamsostek). Peningkatan kualitas manusia tidak mungkin tercapai tanpa adanya jaminan hidup yang pasti untuk didapatkannya, dan peningkatan kualitas tenaga kerja serta perlindungan terhadap tenaga kerja harus disesuaikan dengan harkat dan martabat manusia (Abdul Khakim,2003:ix). Dalam hal perlindungan terhadap tenaga kerja maka

sudah selayaknya tenaga kerja mendapat jaminan perlindungan baik yang menyangkut keselamatannya, kesehatannya maupun kelangsungan hidupnya setelah tenaga kerja tersebut tidak lagi bekerja. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial tenaga Kerja. Di Kabupaten Bantul Jumlah kepesertaan Jamsostek mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan peran aktif dari pihak pekerja, perusahaan dan pemerintah daerah bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam berpartisipasi mendaftarkan pekerja dalam kepesertaan Jamsostek.

Pendidikan merupakan syarat utama yang harus ditempuh seseorang untuk dapat memasuki pasar kerja. Pendidikan yang diperoleh baik dari sekolah maupun dari luar sekolah akan memberikan bekal pengetahuan dan ketrampilan, sehingga akan memudahkan penempatan seorang karyawan sesuai dengan kecakapannya. Tingkat pendidikan yang dimiliki seorang karyawan akan mempengaruhi pola pikir, sikap dan tindakan dalam menghadapi suatu permasalahan yang timbul khususnya dalam masalah pekerjaan. Orang yang mempunyai tingkat pendidikan yang lebih tinggi pada umumnya lebih cepat mengatasi masalah yang dihadapi, daripada orang yang tingkat pendidikannya lebih rendah. Pendidikan mempunyai fungsi untuk meningkatkan kualifikasi tenaga kerja agar dapat lebih produktif. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja karena pendidikan baik formal maupun non formal seseorang diharapkan memiliki kemampuan untuk lebih memahami dalam mengadaptasi perubahan-perubahan di lingkungan kerja dengan lebih cepat. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan baik formal maupun non formal akan berpengaruh positif terhadap peningkatan produktivitas kerja seorang karyawan dari segi kuantitas. Karyawan yang tingkat pendidikannya tinggi akan mempunyai ketrampilan dalam pelaksanaan kerja sehingga mengurangi kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan kerja.

Jumlah penduduk menurut jenjang Pendidikan di Kabupaten Bantul paling banyak adalah lulusan SMA/ Sederajat yaitu sebesar 265.264 jiwa

atau 28%, kemudian lulusan DIII/ Sarjana Muda menempati peringkat kedua sebesar 19%, dari jumlah penduduk di Kabupaten Bantul.



Sumber : Disdukcapil, 2020

Gambar 2.48 Jumlah Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan

2.4.4.2 Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan menunjukkan besar beban tanggungan kelompok usia produktif atas penduduk usia non produktif. Kelompok usia produktif adalah penduduk yang berada pada kelompok umur 15-64 tahun, yang dianggap dapat bekerja dan berkontribusi secara ekonomi maupun sosial. Kelompok non produktif adalah penduduk yang berada pada kelompok umur 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas, yang dianggap belum mampu atau sudah tidak mampu bekerja sehingga tidak berkontribusi secara ekonomi maupun sosial.

Semakin besar rasio ketergantungan berarti semakin besar beban tanggungan bagi kelompok produktif. Angka ketergantungan dianggap rendah apabila kurang dari 30, sedang apabila antara 30-40 dan tinggi apabila lebih dari 40. Semakin rendah angka ketergantungan, mengindikasikan semakin baik kondisi perekonomian karena semakin rendah kelompok non produktif yang ditanggung secara ekonomi oleh kelompok produktif. Tanggungan dapat berbentuk jaminan sosial, bantuan pensiun dan fasilitas lain yang diperoleh kelompok non produktif.

Rasio ketergantungan di Kabupaten Bantul pada tahun 2019 sebesar 44,80. Hal ini menunjukkan bahwa 100 orang penduduk usia produktif di

Kabupaten Bantul harus menanggung 45 orang penduduk yang non produktif. Meski rasio ketergantungan tahun 2019 naik jika dibandingkan tahun 2018 (44,72) dan masih termasuk kategori tinggi. Oleh sebab itu untuk mengurangi rasio ketergantungan diharapkan pemerintah dapat meningkatkan pelayanan kesehatan dan pemberdayaan bagi lansia sehingga selain sehat dan kuat juga dapat lebih produktif.

Tabel 2.170 Rasio Ketergantungan di Kabupaten Bantul Tahun 2014–2018

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah penduduk usia < 15 tahun	197.912	206.905	196.441	198.537	198.900
2	Jumlah penduduk usia > 64 tahun	86.776	93.398	92.668	91.837	94.847
3	Jumlah penduduk usia tidak produktif (1+2)	284.688	300.303	289.109	290.374	293.747
4	Jumlah penduduk usia 15 – 64 tahun	634.752	619.143	638.072	649.344	655.578
5	Rasio ketergantungan (3/4)	44,85	48,5	46,69	44,72	44,80

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul Semester 2, 2020

2.5. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Salah satu indikator yang menunjukkan kondisi pelayanan dasar masyarakat adalah capaian SPM. SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal sebagaimana tertuang dalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan PP nomor 2 Tahun 2018 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang mengamanatkan bahwa urusan wajib dasar sebagai dasar penyusunan SPM ada enam bidang meliputi:

1. Bidang Pendidikan;
2. Bidang Kesehatan;

3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Bidang Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
6. Bidang Sosial.

Materi muatan SPM meliputi:

a. Jenis pelayanan dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.

Jenis pelayanan dasar berbeda-beda pada masing-masing jenis SPM (pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan sosial).

Setiap jenis pelayanan dasar memiliki mutu pelayanan dasar yang ditetapkan oleh kementrian teknis.

b. Mutu pelayanan dasar

Mutu pelayanan dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam pelayanan dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.

Mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar ditetapkan dalam standar teknis yang diatur dalam Peraturan Menteri Terkait.

c. Penerima layanan dasar

Penerima pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar adalah warga negara yang berhak memperoleh pelayanan dasar secara minimal sesuai dengan jenis dan mutu pelayanan dasarnya.

2.5.1 Bidang Pendidikan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan standar nasional pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan (Peraturan Pemerintah

Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan).

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, maka menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk memenuhi SPM bidang pendidikan.

Tabel 2.171 Capaian SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Bantul Tahun 2019

No	Bidang Urusan Pendidikan	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	PAUD dan PNF	Pendidikan anak usia dini	Jumlah anak usia 5 – 6 th dalam PAUD yang mendapat layanan	27.060	27.060	100
2	SD	Pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7 – 12 th dalam pendidikan dasar (SD/MI) yang mendapat layanan	81.294	81.294	100
3	SMP	Pendidikan dasar	Jumlah anak usia 12 – 15 th dalam pendidikan dasar (SMP/MTs) yang mendapat layanan	39.578	39.578	100
4	PAUD dan PNF	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah anak usia 7 – 18 th dalam Pendidikan kesetaraan yang mendapat layanan	1.373	1.373	100

2.5.2 Bidang Kesehatan

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan maka menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk memenuhi SPM bidang kesehatan.

Tabel 2.172 Capaian SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Bantul Tahun 2019

No.	Jenis Layanan Dasar	Indikator	Sasaran	Realisasi	Capaian
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil.	Jumlah ibu hamil yang sudah bersalin dan memasuki trimester 3	14.312		
		Jumlah ibu hamil mendapat layanan kesehatan sesuai standar		13.848	97

No.	Jenis Layanan Dasar	Indikator	Sasaran	Realisasi	Capaian
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin.	13.088		
		Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		13.072	99,8
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir.	13.072		
		Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		10.998	84,1
4.	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita.	60.005		
		Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		42.135	70,2
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar.	27.861		
		Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		27.861	100
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang telah mengakses pelayanan kesehatan	98.438		
		Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		98.438	100
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang telah mengakses pelayanan kesehatan	49.942		
		Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		41.063	82,2
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang ditemukan	29.337		
		Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		29.337	100
9.	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang ditemukan	11.954		
		Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		11.954	100
10.	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang ditemukan	2.999		
		Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang		2.999	100

No.	Jenis Layanan Dasar	Indikator	Sasaran	Realisasi	Capaian
		mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar			
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis.	9.224		
		Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		9022	98
		Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang tidak mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		0	0
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	12.787		
		Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		12.787	100

2.5.3 Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat maka menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk memenuhi SPM bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Tabel 2.173 Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Bantul Tahun 2019

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	$\frac{222.979}{222.979} \times 100 \% = 100 \%$
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	$\frac{318.539}{318.539} \times 100 \% = 100 \%$

2.5.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat maka menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk memenuhi SPM bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Tabel 2.174 Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Bantul Tahun 2019

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR (Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2018)	TARGET	REALISASI
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	$\frac{110}{110} \times 100 \% = 100 \%$
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	100%	$\frac{5}{5} \times 100 \% = 100 \%$

2.5.5 Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota maka menjadi

acuan bagi pemerintah daerah untuk memenuhi SPM bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.

Tabel 2.175 Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Bantul Tahun 2019

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	0	0	100%
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Informasi rawan bencana	16.655	16.655	100%
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	82.334	82.334	100%
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	11.464	11.464	100%
5.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Satgas PBK BPBD Kab. Bantul $\frac{203}{227} \times 100\% = 89,43\%$ Layanan Pemadaman yang Dilakukan oleh Kelompok		89,43%+10,57%	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		Relawan (Balakar, dan atau lainnya) yang Dibentuk dan/atau Dibawah Pembinaan BPBD Kab. Bantul			
		$\frac{24}{227} \times 100\% = 10,57\%$			

2.5.6 Bidang Sosial

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota maka menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk memenuhi SPM bidang sosial.

Tabel 2.176 Capaian SPM Bidang Sosial di Kabupaten Bantul Tahun 2019

No.	Uraian	Realisasi Tahun 2019	Rumus
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial (Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma)	$\frac{200}{200} \times 100\% = 100\%$	$\frac{\text{Jumlah yang ditangani}}{\text{Jumlah Target Penangan}} \times 100\%$
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial (Pelayanan dasar bagi anak asuh panti sosial)	$\frac{500}{500} \times 100\% = 100\%$	$\frac{\text{Jumlah yang ditangani}}{\text{Jumlah Target Penangan}} \times 100\%$
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial (Bimbingan sosial dan bantuan bagi KK miskin non potensial/kesrakat dan lansia rentan sosial ekonomi)	$\frac{200}{200} \times 100\% = 100\%$	$\frac{\text{Jumlah yang ditangani}}{\text{Jumlah Target Penangan}} \times 100\%$
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial (Penanganan dan pembinaan permasalahan)	$\frac{57}{57} \times 100\% = 100\%$	$\frac{\text{Jumlah yang ditangani}}{\text{Jumlah Target Penangan}} \times 100\%$

No.	Uraian	Realisasi Tahun 2019	Rumus
5	kesejahteraan sosial dan kesehatan masyarakat)		
	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota (Penyediaan beras penyangga/Buffer stock)	~	~

2.6. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2019 dan Realisasi RPJMD Tahun 2016-2021

Pelaksanaan pembangunan daerah seharusnya sesuai dengan rencana yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan dalam jangka waktu 20 tahun (RPJPD), lima tahun (RPJMD) dan satu tahun (RKPD). Perencanaan pembangunan daerah juga tertuang dalam dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaannya melalui program dan kegiatan pembangunan.

Namun dalam pelaksanaannya terkadang hasilnya tidak sesuai dengan target yang diharapkan, oleh sebab itu perlu dilakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan tersebut.

Evaluasi dilakukan dengan maksud untuk dapat mengetahui bagaimana pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan. Selain itu dapat menjadi *feedback* dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan di masa yang akan datang.

Pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2019 bermuara pada sasaran daerah yang diharapkan yang dapat dikonfirmasi melalui capaian indikator (tolok ukur) kinerja yang telah ditetapkan. Berikut adalah capaian dari sasaran daerah selama tahun 2019 yang diukur dari pencapaian indikator sasaran yang juga merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati Bantul.

Tabel 2.177 Target dan Capaian IKU Bupati Bantul Tahun 2019

No	Sasaran Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	2019			
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Predikat Kinerja
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas	Indonesia Governance Index (IGI)	Klasifikasi (nilai)	7,5	7,72	102,93	Sangat tinggi
2	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Umur Harapan Hidup	tahun	73,60	73,77	100,08	Sangat tinggi
3	Terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas	Angka Harapan Lama Sekolah	tahun	15,23	15,15	98,69	Sangat tinggi
4	Turunnya jumlah masyarakat kurang mampu	Angka Kemiskinan	persen	10,86	12,92	81,03	Tinggi
5	Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas	Pertumbuhan ekonomi	persen	5,45	5,53	100,37	Sangat tinggi
		Pemerataan Pendapatan	angka	0,39	0,448*	85,13	Tinggi
6	Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan	persen	22	22,89	104,05	Sangat tinggi
7	Terciptanya industri kreatif yang berkualitas	Cakupan Industri Kreatif	persen	45	46,2	102,67	Sangat tinggi
8	Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat	Pertumbuhan produksi tanaman pangan	persen	0,102	3,83*	3.654	Sangat tinggi
		Pertumbuhan produksi	persen	1,08	1,09*	100,93	Sangat tinggi

No	Sasaran Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	2019			
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Predikat Kinerja
		tanaman hortikultura					
		Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing, domba, kuda, unggas)	persen	0,8	1,57*	196,25	Sangat tinggi
		Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan	persen	0,25	0,57*	228,00	Sangat tinggi
9	Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat	Pertumbuhan produksi perikanan	persen	1,40	1,41*	100,71	Sangat tinggi
10	Terpenuhinya sarana prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur	angka	76	76,77*	101,01	Sangat tinggi
11	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	angka	56	60,40	107,84	Sangat tinggi
12	Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana	Desa Tangguh Bencana	persen	38,66	46,67*	120,72	Sangat tinggi
13	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	persen	72,5	72,5	100,00	Sangat tinggi
14	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas	persen	0,070	0,074	94,29	Sangat tinggi

No	Sasaran Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	2019			
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Predikat Kinerja
15	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	angka	65	69,7*	107,23	Sangat tinggi

Sumber : Bappeda Kabupaten Bantul, 2020

Sesuai dengan Skala Nilai Peringkat Kinerja yang terdapat dalam lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, hasil penilaian kinerja dari target seluruh IKU Bupati masuk dalam gradasi nilai /skala intensitas kinerja dengan hasil sangat tinggi dan tinggi. Gradasi ini menunjukkan realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

Kinerja tahun 2019 apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD, telah melebihi separuh dari target tahun 2021. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun 2019 terhadap target akhir RPJMD disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.178 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran s.d Tahun 2019 terhadap target Akhir RPJMD

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2019	Target Akhir RPJMD 2016 - 2021	Capaian s.d Tahun 2019 terhadap Target Akhir RPJMD
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas	Indonesia Governance Index (IGI)	Klasifikasi (nilai)	7,72	8,5	90,82
2	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Umur Harapan Hidup	tahun	73,77*	73,70	99,95

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2019	Target Akhir RPJMD 2016 - 2021	Capaian s.d Tahun 2019 terhadap Target Akhir RPJMD
3	Terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas	Angka Harapan Lama Sekolah	tahun	15,15	15,54	96,72
4	Turunnya Jumlah Masyarakat Kurang Mampu	Angka Kemiskinan	persen	12,92*	8,32	44,71
5	Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas	Pertumbuhan ekonomi	persen	5,53	5,60	97,68
		Pemerataan Pendapatan	angka	0,448*	0,37	78,92
6	Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan	persen	22,89	24	95,38
7	Terciptanya industri kreatif yang berkualitas	Cakupan Industri Kreatif	persen	46,2	50	92,40
8	Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat	Pertumbuhan produksi tanaman pangan	persen	3,83*	0,1030	97,09
		Pertumbuhan produksi tanaman hortikultura	persen	1,09	1,125	96,89
		Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing, domba, kuda, unggas)	persen	1,57	1,00	157,00
		Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan	persen	0,57	0,35	162,86
9	Terpenuhinya kebutuhan	Pertumbuhan produksi perikanan	persen	1,41	1,5	94,00

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2019	Target Akhir RPJMD 2016 - 2021	Capaian s.d Tahun 2019 terhadap Target Akhir RPJMD
	perikanan masyarakat					
10	Terpenuhinya sarana prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur	angka	76,77	80	95,96
11	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	angka	56	60,39	83,88
12	Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana	Desa Tangguh Bencana	persen	46,67	52	89,75
13	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	persen	72,5	80,0	90,63
14	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas	persen	0,074	0,060	76,67
15	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	angka	69,7	75	92,93

Sumber : Bappeda Kabupaten Bantul, Data terolah tahun 2020

Mencermati pencapaian IKU Bupati tahun 2019 dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Bantul 2016 – 2021, tampak bahwa dari 19 IKU Bupati, sebanyak 18 indikator masuk dalam kategori pencapaian kinerja tinggi dan sangat tinggi, dan terdapat satu (1) indikator dengan capaian kinerja rendah, yaitu angka kemiskinan. Untuk itu diperlukan upaya dan kerja keras agar target penurunan angka kemiskinan bisa dicapai.

Capaian sasaran pembangunan pada tahun 2019 didukung oleh kinerja Perangkat Daerah. Capaian sasaran Perangkat Daerah selama

tahun 2019 yang diukur dari pencapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah, terdapat pada tabel berikut:

Tabel 2.179 Capaian Kinerja Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2019

SASARAN DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN 2019	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	TARGET TAHUN 2019	CAPAIAN TAHUN 2019	PERANGKAT DAERAH
1. Terwujudnya penyelenggara-raan pemerintah-an daerah yang berkualitas	Indeks Tata Kelola Pemerintahan (Indonesia Governance Index/IGI)	Klasifikasi	7,5 (Baik)	Nilai Maturitas SPIP	angka	3,1 (Level 2)	3,17	Inspektorat
				Persentase pemenuhan kompetensi Aparatur	persen	90,50	90,14	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
				Nilai Evaluasi Kinerja SKPD	angka	70	71,9	SETDA
				Indeks Kepuasan Masyarakat	angka	82	86,97	SETDA
				Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	angka	3,6 (sangat tinggi)	3,4478	SETDA
				Persentase SKPD yang menyelenggarakan kearsipan sesuai standar dengan nilai baik	persen	52	52	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				Nilai Indeks Kepuasan Aparatur	angka	81,70	82,733	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
				Percepatan Layanan Perizinan dan Non	persen	81	83,8	Dinas Penanaman

SASARAN DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN 2019	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	TARGET TAHUN 2019	CAPAIAN TAHUN 2019	PERANGKAT DAERAH
				Perizinan Tepat Waktu				Modal dan Pelayanan Terpadu
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	angka	79,5	85,89	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	angka	90	89	Kecamatan
				Persentase SKPD yang menerapkan Layanan Unggulan Digital Government Services (DGS)	persen	80	80,69	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Index kualitas layanan informasi publik	persen	80	78,56	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Rata-rata Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	persen	89	99,55	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Persentase Instansi yang Memanfaatkan Data Penduduk Disdukcapil	persen	85	85	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Indeks Kepuasan Masyarakat	angka	80,30	92,3	Dinas Kependudukan

SASARAN DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN 2019	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	TARGET TAHUN 2019	CAPAIAN TAHUN 2019	PERANGKAT DAERAH
								dan Pencatatan Sipil
				Persentase Penegakan Perda	persen	66	66	Satpol PP
				Persentase pemilih yang berpartisipasi	persen	75	86,77	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
				Prosentase Raperda yang disetujui bersama	persen	80	82	Setwan
				Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	angka	80 (A)	81,39	SETDA
				Persentase rata-rata capaian sasaran daerah	persen	94,75	107,31	Bappeda
				Persentase rata-rata Pencapaian Target Kinerja Program PD	persen	90,75	99,40	Bappeda
				Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	persen	95	100	Kecamatan
				Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	persen	88	88	Kecamatan

SASARAN DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN 2019	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	TARGET TAHUN 2019	CAPAIAN TAHUN 2019	PERANGKAT DAERAH
				Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	persen	90	90	Kecamatan
				Opini Pemeriksaan BPK	Predikat	1 (WTP)	1 (WTP)	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
				Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	persen	24	23,11	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
				Persentase PAD terhadap Belanja Daerah	persen	19	22,89	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
2. Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Umur Harapan Hidup	Tahun	73,60	AKI per 100.000 kelahiran hidup	angka	85	99,49	Dinas Kesehatan
				AKB per 1000 kelahiran hidup	angka	8,2	8,33	Dinas Kesehatan
				Net Death Rate (permil)	angka	16,7	18,7	RSUD PS
				Total Fertility Rate (TFR)	%	2,08	1,79	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa

SASARAN DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN 2019	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	TARGET TAHUN 2019	CAPAIAN TAHUN 2019	PERANGKAT DAERAH
				Prevalensi Balita Gizi Buruk	persen	0,39	0,41	Dinas Kesehatan
				Ketersediaan Energi	kcal/kapita/hari	3.090	3.123	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan Dan Perikanan
				Ketersediaan Protein	gr/kapita/hari	72,6	89,95	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan Dan Perikanan
				Skor Pola Pangan Harapan	angka	93,50	93,7	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan Dan Perikanan
				Angka Kesakitan/Insidence Rate (IR) DBD	angka	120	140	Dinas Kesehatan
				Prevalensi penderita HIV	persen	<0,2	0,12	Dinas Kesehatan
				Persentase prestasi olahraga tingkat propinsi (PPDA/Pekan Olah Raga Pelajar) yang diikuti	persen	28	32,18	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
3. Terwujudnya akses dan mutu		Tahun	15,23	APK SD	angka	96,3	95,26	Dinas Pendidikan,

SASARAN DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN 2019	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	TARGET TAHUN 2019	CAPAIAN TAHUN 2019	PERANGKAT DAERAH
pendidikan yang berkualitas	Angka Harapan Lama Sekolah							Pemuda dan Olahraga
				APK SMP	angka	95,25	101,38	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
				APM SD	angka	84,55	85,86	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
				APM SMP	angka	68	76,8	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
				Angka Melanjutkan ke SMP	angka	100	108,56	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
				Angka Melanjutkan ke SLTA	angka	100	111,18	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
				Angka Rata-Rata Lama Sekolah	angka	8,94	9,54	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
				Peringkat rata-rata nilai USM SD/MI	Angka (SD)	Ranking II DIY	Ranking III DIY	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

SASARAN DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN 2019	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	TARGET TAHUN 2019	CAPAIAN TAHUN 2019	PERANGKAT DAERAH
				Peringkat rata-rata nilai UN SMP/MTs	Angka (SMP)	Ranking II DIY	Ranking III DIY	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
				Jumlah Prestasi Non Akademik Tk Nasional	Buah	6	4	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
				Persentase kelulusan SD	persen	100	100	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
				Persentase kelulusan SMP	persen	100	100	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
				Angka putus sekolah SD	angka	0,02	0,004	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
				Angka putus sekolah SMP	angka	0,02	0,01	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
				APK PAUD	angka	98,85	106,24	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
				Persentase Peningkatan Pemustaka yang	persen	31	31	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

SASARAN DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN 2019	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	TARGET TAHUN 2019	CAPAIAN TAHUN 2019	PERANGKAT DAERAH
				berkunjung ke Perpustakaan				
4. Turunnya Jumlah Masyarakat Kurang Mampu	Angka kemiskinan	Persen	10,86	Angka Pengangguran	angka	3,0	3,06	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Nilai Tukar Petani	angka	101,8	107,08	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan Dan Perikanan
				Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	persen	12,75	7,29	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Indeks Membangun Desa	Jumlah Desa Mandiri	20	24	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Persentase kategori keluarga kurang sejahtera	-	- (Sudah tidak menjadi IKU)	- (Sudah tidak menjadi IKU)	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

SASARAN DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN 2019	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	TARGET TAHUN 2019	CAPAIAN TAHUN 2019	PERANGKAT DAERAH
				Rata-rata jumlah jiwa dalam keluarga (jiwa)	-	- (Sudah tidak menjadi IKU)	- (Sudah tidak menjadi IKU)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5. Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,45	Pertumbuhan Ekspor	persen	7	-26,84	Dinas Perdagangan
				Jumlah Pasar Tipe A	unit	2	4	Dinas Perdagangan
				Pertumbuhan PDRB Sub Kategori Perdagangan	persen	5,33	5,69	Dinas Perdagangan
				Pertumbuhan Investasi	persen	8,09	9,3	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian
				Percepatan Belanja Pemerintah	persen	68	56,75	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	Pemerataan Pendapatan	Angka	0,39	Upah Minimum Kabupaten	Rupiah	1.578.389	1.649.800	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian
				Jumlah Usaha Mikro yang Naik Kelas	unit	180	185	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian

SASARAN DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN 2019	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	TARGET TAHUN 2019	CAPAIAN TAHUN 2019	PERANGKAT DAERAH
				Jumlah Usaha Mikro yang Naik Kelas	unit	180	185	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian
				Peningkatan tingkat Kesehatan Koperasi	unit	10	10	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian
				Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Kelas Kelompok Tani	Kelompok	33	69	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan Dan Perikanan
6. Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisata	Persen	22	Jumlah Kunjungan Wisatawan	orang	4.445.781	5.166.615	Dinas Pariwisata
				Lama Tinggal Wisatawan	hari	2	2	Dinas Pariwisata
7. Terciptanya industri kreatif yang berkualitas	Cakupan industri kreatif	Persen	45	Pertumbuhan industri	persen	3,4	3,5	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian
8. Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat	Pertumbuhan produksi tanaman pangan	Persen	0,1020	Produksi Tanaman Pangan (padi, jagung, kedelai)	ton	231.796,40	216.359,70	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan

SASARAN DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN 2019	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	TARGET TAHUN 2019	CAPAIAN TAHUN 2019	PERANGKAT DAERAH
	Pertumbuhan produksi tanaman hortikultura	Persen	1,08	Produksi Tanaman Hortikultura (bawang merah, cabai merah, pisang)	ton	6.624,39	15.805	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
	Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan	Persen	0.25	Produksi tanaman Perkebunan (tembakau, tebu, kelapa)	ton	14.560,40	14.608,71	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
	Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing, domba, kuda, unggas)	Persen	0,80	Peningkatan Produksi daging (sapi, kambing, domba, kuda, unggas)	ton	14.513,63	15.088,32	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
9. Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat	Pertumbuhan produksi perikanan	Persen	1,40	Peningkatan Produksi Perikanan	ton	13.198	13.243	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
10. Terpenuhinya sarana-prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Infrastruktur	Klasifikasi	76	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap	persen	75,08	75,10	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Persentase Gedung Pemerintah Kondisi Baik	persen	82	84	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan

SASARAN DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN 2019	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	TARGET TAHUN 2019	CAPAIAN TAHUN 2019	PERANGKAT DAERAH
								Kawasan Permukiman
				Persentase kecukupan air irigasi	persen	82,16	82,19	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Persentase Kawasan kumuh perkotaan yang tertangani	persen	90	92,49	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Persentase penurunan kecelakaan lalu lintas	persen	1,83	1,95	Dinas Perhubungan
11. Terwujudnya lingkungan hidup yang kualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	56	Indeks Kualitas Air (IKA)	angka	45	39,63	Dinas Lingkungan Hidup
				Indeks Kualitas Udara (IKUd)	angka	70	90,9	Dinas Lingkungan Hidup
				Indeks Tutupan Lahan	angka	46,57	53,09	Dinas Lingkungan Hidup
				Volume sampah yang tertangani	ribu m ³	450	452	Dinas Lingkungan Hidup

SASARAN DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN 2019	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	TARGET TAHUN 2019	CAPAIAN TAHUN 2019	PERANGKAT DAERAH
12. Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiap-siagaan bencana	Desa Tangguh Bencana	Desa	38,66	Persentase Reaksi Tanggap Darurat Bencana yang memenuhi respon time 15 menit	persen	99	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Persentase Sekolah Siaga Bencana	persen	4,2	4,12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Persentase Relokasi Warga	persen	63,64	89,09	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Persentase penanganan banjir	persen	34,12	34	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
13. Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Presentase kesesuaian pemanfaatan ruang	Persen	72.5	Persentase dokumen tata ruang yang sudah diperdakan	dokumen	3	2	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
				Persentase cakupan pengendalian tata ruang	persen	75	73	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
				Cakupan Sertifikasi Tanah	%	92	99,37	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
14. Terwujudnya ketentraman dan	Angka Kriminalitas	Persen	0,070	Jumlah intoleransi di masyarakat	kasus	0	2	Kantor Kesatuan Bangsa Dan

SASARAN DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN 2019	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	TARGET TAHUN 2019	CAPAIAN TAHUN 2019	PERANGKAT DAERAH
ketertiban masyarakat								Politik Dalam Negeri
				Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3	persen	100	100	Sat Pol PP
				Rasio kekerasan Perempuan dan Anak	Rasio	0,38	0,73	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Jumlah Pemuda Pelopor	orang	4	5	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
15. Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	75	Cakupan Perlindungan Warisan Budaya	persen	24	24	Dinas Kebudayaan
				Jumlah Desa Budaya	Desa	14	12	Dinas Kebudayaan

Evaluasi kinerja sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pada Lampiran E.60 terdapat pada tabel berikut.

Tabel 2.180 Evaluasi Kinerja Program Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RPKD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RPKD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB																	
1	PENDIDIKAN																	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		Angka Harapan Lama sekolah																Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Program pendidikan anak usia dini	Persentase lembaga PAUD yang aktif melaksanakan kegiatan	Persen	97	2.979.106.922	96	2.605.731.994											Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah peserta	peserta			2.000	78.541.000		81.480.000									Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah lembaga	lembaga			40	529.693.400		286.556.000									Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		Jumlah peserta gebyar PAUD	peserta			300	0											Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		Jumlah verifikasi lembaga	lembaga			8	0											Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		jumlah peserta bimtek	peserta			300	0											Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		jumlah mitra PAUD	lembaga			6	0											Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengadaan sarana dan prasarana KBM PAUD	jumlah ruang kelas PAUD	ruang			5	1.718.794.594		2.172.231.000									Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	jumlah peserta lomba gugus PAUD	peserta			17	278.703.000		615.288.000									Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		jumlah peserta lomb Bunda Paud	peserta			17	0											Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		jumlah lembaga penerima BOP PAUD	lembaga			1.209	0											Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		jumlah peserta lomba kreativitas PAUD	peserta			200	0											Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	Persentase peningkatan kompetensi guru/kepala sekolah SD/MI dalam pembelajaran	persen	57	75.721.132.048	56	132.966.097.040											Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		Persentase peningkatan kompetensi guru/kepala sekolah SMP/MTs dalam pembelajaran	persen	54		54	0											Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		Persentase peningkatan sarana prasarana mutu pendidikan SD	persen	98		97	0											Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		Persentase peningkatan sarana prasarana mutu pendidikan SMP	persen	97		96	0											Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		Persentase penyelenggaraan pendidikan dasar SD/MI sesuai SPM	persen	98		97	0											Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		Persentase penyelenggaraan pendidikan dasar SMP/MTs sesuai SPM	persen	80		79	0											Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Persentase pengembangan bakat minat/prestasi siswa SD/MI, SMP/MTs	persen	66		95	0											Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Penyelenggaraan Pendidikan Dasar SMP	BOP siswa SMP	siswa			26.300	16.933.075.000		16.901.650.000									Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		jumlah penerima operasional sekolah model rujukan, UNBK, sekolah khusus bakat istimewa olahraga dan inklusi	sekolah			112	0											Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Penyelenggaraan UNAS/UASBN Pendidikan Dasar	jumlah peserta ujian UNBK dan USM daerah	siswa			25.670	944.412.000		50.000.000									Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Perijinan SD dan SMP Baru	jumlah terbitnya surat ijin/rekomendasi sekolah baru	izin/rekomendasi			4	10.050.000		10.875.000									Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Pengembangan Pendidikan Dasar SMP	jumlah kelompok kerja lesson study	homebase			23	35.335.000		49.250.000									Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Pembangunan, rehab sarana dan prasarana bangunan pendidikan Dasar	jumlah sarana dan prasarana yang terbangun dan terrehab sekolah SMP	unit			7	6.109.747.900		1.900.000.000									Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Pengembangan kompetensi siswa pendidikan dasar	jumlah lomba pengembangan kompetensi siswa SMP	lomba			5	467.540.000		49.250.000									Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	jumlah peserta sosialisasi	peserta			500	467.540.000		87.525.000									Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Pengembangan Kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Dasar SD	jumlah sekolah penerima bahan ajar, naskah USM Daerah dan implementasi kurtilas	sekolah			502	48.225.000		225.625.000									Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Pengembangan pendidikan dasar berbasis hak-hak anak dan kearifan lokal	jumlah cabang lomba	lomba			3	267.050.000		83.620.000									Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RPKD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RPKD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengembangan Pendidikan Dasar SD	jumlah lokasi penyelenggara	lokasi			3	141.585.000		600.345.000									Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Pembangunan, rehab sarana dan prasarana bangunan pendidikan SD	jumlah sarana dan prasarana yang terbangun dan terrehab sekolah SD	unit			17	915.300.000		1.900.000.000									Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan SD	jumlah sekolah penerima rehab dan koleksi buku perpustakaan	sekolah			2	5.638.227.266		4.592.648.000									Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Pengembangan kompetensi siswa pendidikan SD	jumlah kegiatan pengembangan kompetensi siswa SD	lomba			2	3.206.771.900		1.400.955.700									Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	penyelenggaraan pendidikan dasar SD/MI	jumlah penerima BOP siswa SD Negeri	siswa			10	1.531.150.190		32.206.275.000									Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		jumlah sekolah rujukan, sekolah model dan sekolah inklusi	sekolah			57	26.216.364.000											Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan siswa	jumlah penerima bantuan pendidikan	siswa			388	1.575.000		73.125.000									Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Pengembangan Kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan SMP	jumlah sekolah penerima bahan ajar, kisi-kisi mapel UN dan implementasi Kurtilas	sekolah			388	1.575.000		103.450.000									Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan SMP	jumlah ruang kelas dan komputer	unit			112	133.820.000		2.666.347.000									Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Monitoring dan evaluasi dan Pelaporan BOS	jumlah sekolah	sekolah			28	2.519.535.000		34.375.000									Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD	jumlah sekolah	sekolah			60.000	45.035.047.055											Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP	jumlah sekolah	sekolah			26.000	22.751.892.548											Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Persentasi kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sesuai SPM	persen	70	53.608.610.215	68	46.470.811.500											Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Evaluasi standar pelayanan minimal	jumlah sekolah	sekolah			501	124.585.000		75.682.000									Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan	jumlah verifikasi peningkatan mutu	verifikasi			16	46.118.731.500		49.646.400.000									Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		jumlah penerima insentif GTT/PTT PNF	orang			4.317	0											Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		jumlah penerima insentif GTT/PTT SD	orang			3.361	0											Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		jumlah penerima insentif GTT/PTT SMP	orang			1.867	0											Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan	jumlah dokumen	dokumen			4	227.495.000		136.400.000									Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Progran manajemen pelayanan pendidikan	Persentase SD sesuai dengan standar nasional pendidikan dalam pelayanan kepada masyarakat	sekolah	30	1.213.933.085	26	646.718.748											Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		Persentase SMP sesuai dengan standar nasional pendidikan dalam pelayanan kepada masyarakat	sekolah	51		47	0											Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	jumlah aplikasi e raport	Aplikasi			1	131.500.000											Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Penyusunan kalender pendidikan dan penerimaan peserta didik baru (PPDB)	jumlah peserta PPDB dan kalender pendidikan	sekolah			1.056	406.893.748		444.425.000									Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
	Pembinaan dan operasional dewan pendidikan	tersosialisasikannya program dewan pendidikan	sosialisasi			5	53.975.000		75.800.000									Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Pengembangan jardiknas dan pemeliharaan ICT	jumlah paket koneksi	bulan			0	0											Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Penanaman iman, taqwa, dan akhlak mulia	jumlah buku	buku			1.000	42.475.000											Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Peningkatan pelayanan pendidikan inklusi	jumlah siswa inklusi				25	11.875.000		25.400.000									Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Program peningkatan nilai akademik	Peringkat rata-rata nilai US/M SD/MI	nilai	1	4.150.212.410	3	3.388.056.400											Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		Peringkat rata-rata nilai UN SMP/MTs	nilai	1		2	0											Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Penambahan Pelajaran	jumlah siswa SMP/MTs yang mendapat tambahan pelajaran	siswa			13.100	2.722.045.000											Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		jumlah siswa SD/MI yang mendapat tambahan pelajaran	siswa			12.900	0											Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Peningkatan Metode Pengajaran	jumlah guru peserta diklat peningkatan mutu	peserta			650	644.061.400		234.970.000									Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Peningkatan Peran Orangtua	jumlah peserta pendampingan peningkatan peran orang tua terhadap anak didik	peserta			502	21.950.000											Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Program pendidikan non formal	Persentase lembaga pendidikan non formal (PKBM, LKP, TBM) yang aktif melaksanakan kegiatan	persen	92	2.276.263.718	91	1.378.745.800											Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Penyelenggaraan pendidikan non formal	jumlah PKBM, pendidikan berbasis keluarga, UNPK, dan SKB	peyelenggara			5	961.570.800		983.280.000									Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RPKD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RPKD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengembangan Pendidikan non formal	jumlah peserta pelatihan	peserta			550	252.335.000		275.375.000									Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Paket A dan B	jumlah penyelenggaraan paket A dan B	penyelenggara			13	99.280.000		211.550.000									Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Penyelenggaraan Paket C setara SMU	jumlah penyelenggaraan paket C	penyelenggara			12	65.560.000		147.250.000									Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2	KESEHATAN																	Dinas Kesehatan
		Umur Harapan Hidup																Dinas Kesehatan
	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Persentase pelayanan kesehatan ibu		100	5.488.395.987	19	1.476.361.756											Dinas Kesehatan
		Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin		100		0	0											Dinas Kesehatan
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Angka Kematian Ibu		327	133.900.000	0	0		4.995.823.000									Dinas Kesehatan
		Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4		95		0	0											Dinas Kesehatan
		Cakupan Pelayanan Ibu Nifas		95		0	0											Dinas Kesehatan
		Cakupan pertolongan Persalinan oleh Bidan atau Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan		99		0	0											Dinas Kesehatan
		Jumlah ibu hamil/ bersalin mendapat Jampersal	kali	0	0	3	1.325.270.756											Dinas Kesehatan
		Jumlah kegiatan pertemuan (Rakor, peningkatan kapasitas, AMP)	kali	26	113.500.000	16	146.531.000											Dinas Kesehatan
		Jumlah Honorarium Tim Non PNS	kali	0	0	0	4.560.000											Dinas Kesehatan
		Jumlah Honorarium Pegawai Kontrak		12	20.400.000	0	0											Dinas Kesehatan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RPKD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RPKD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir		100	147.790.313	2	64.222.500											Dinas Kesehatan
		Persentase pelayanan kesehatan Balita		100		0	0											Dinas Kesehatan
	Pelayanan kesehatan anak dan Balita	Angka Kematian Bayi		282	33.100.000	0	0		24.175.000									Dinas Kesehatan
		Cakupan Kunjungan Neonatal Lengkap		92		0	0											Dinas Kesehatan
		Cakupan Kunjungan Bayi		90		0	0											Dinas Kesehatan
		Cakupan Pelayanan Balita		90		0	0											Dinas Kesehatan
		Jumlah Kegiatan Pertemuan (AMP, SDIDTK, MTBS, Pemberdayaan Masyarakat, Evaluasi)		10	33.100.000	2	64.222.500											Dinas Kesehatan
		Jumlah belanja alat peraga		0	0	0	0											Dinas Kesehatan
						0	0											Dinas Kesehatan
	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Angka Bebas Jentik (ABJ)		75	680.410.236	93	878.010.680											Dinas Kesehatan
		Meningkatnya penemuan kasus HIV		75	512.079.638	0	0											Dinas Kesehatan
		Pelayanan kesehatan orang dengan Tb		100		0	0											Dinas Kesehatan
		Cakupan Desa Universal Child Immunization (UCI)		100	351.261.778	0	0											Dinas Kesehatan
	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk					0	0		274.938.000									Dinas Kesehatan
		Audit kasus DBD				0	88.281.500											Dinas Kesehatan
		Pengadaan insektisida dan lavasida				1	3.650.000											Dinas Kesehatan
		honor tim PSN kab				1	59.875.000											Dinas Kesehatan
		workshop penyakit akibat vektor				5	2.730.000											Dinas Kesehatan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
		terlaksananya fogging focus				34	18.281.500											Dinas Kesehatan
		terlaksananya pertemuan program DBD				2	2.395.000											Dinas Kesehatan
		terlaksananya PSN				1	1.350.000											Dinas Kesehatan
	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular					0	502.991.880		274.938.000									Dinas Kesehatan
		Koordinasi pelaksanaan Program				11	24.875.000											Dinas Kesehatan
		honorarium non PNS				3	2.795.000											Dinas Kesehatan
		evaluasi /validasi data program				4	6.355.000											Dinas Kesehatan
		sosialisasi penyakit menular				5	13.932.800											Dinas Kesehatan
		belanja pengendalian penyakit menular				8	31.200.000											Dinas Kesehatan
		peningkatan kapasitas petugas				0	0											Dinas Kesehatan
		audit kasus menular				0	0											Dinas Kesehatan
		Revitalisasi gerduda				1	2.950.000											Dinas Kesehatan
		Aktive Selective Case Finding				2	1.950.000											Dinas Kesehatan
		Linsek Linprog (linsek, workshop)				0	0											Dinas Kesehatan
		penemuan TB				0	0											Dinas Kesehatan
		prevensi HIV				0	0											Dinas Kesehatan
	Peningkatan surveillance dan penanggulangan wabah	Penyelenggaraan Kesehatan CJH				0	64.639.500		363.660.000									Dinas Kesehatan
		Jumlah Kegiatan Rapat Surveilans				0	0											Dinas Kesehatan
		Jumlah Belanja Medis				0	0											Dinas Kesehatan
		Jumlah Belanja Analisa Laboratorium				0	0											Dinas Kesehatan
		Jumlah Penggandaan Juknis Kegiatan Surveilans				0	0											Dinas Kesehatan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1. Jumlah Peningkatan Kapasitas Petugas Surveilans, Imunisasi dan Haji				1	9.425.000											Dinas Kesehatan
		2. Jumlah Peningkatan Jejaring Surveilans dengan Lintas Sektoral				1	6.400.000											Dinas Kesehatan
		3. Jumlah Perencanaan dan Evaluasi Program Surveilans, Imunisasi dan Haji				7	27.333.500											Dinas Kesehatan
		4. Jumlah Distribusi Vaksin				0	3.900.000											Dinas Kesehatan
		5. Jumlah Pengadaan Barang Pendukung Program Surveilans, Imunisasi dan Haji				6	2.700.000											Dinas Kesehatan
						0	0											Dinas Kesehatan
	Program obat dan perbekalan kesehatan	Persentase Penggunaan Obat Rasional (POR)		95	6.098.767.126	67	2.373.686.261											Dinas Kesehatan
	Pengadaan obat dan peningkatan layanan farmasi	Pengadaan Obat				0	0	4.290.115.000										Dinas Kesehatan
		Jumlah pengadaan obat dan perbekalan kesehatan				40	2.239.386.280											Dinas Kesehatan
		Jumlah pengadaan gedung				0	0											Dinas Kesehatan
		Jumlah pengadaan sarpras				2	51.480.000											Dinas Kesehatan
		Waktu distribusi obat ke puskesmas				0	0											Dinas Kesehatan
		Jumlah paket pemusnahan obat				9	27.000.000											Dinas Kesehatan
		Waktu pengelolaan, move dan pelaporan obat				7	55.819.981											Dinas Kesehatan
		Jumlah pengadaan obat penunjang yandas, program dan perbekalan kesehatan				9	27.000.000											Dinas Kesehatan
		Jumlah pengadaan software/aplikasi obat				1	55.819.981											Dinas Kesehatan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Program upaya kesehatan masyarakat	Jumlah workshop manajemen Puskesmas		27	94.323.832.270	0	0											Dinas Kesehatan
		Cakupan Puskemas melaksanakan Gerakan Masyarakat Sehat (Germas)		27		0	0											Dinas Kesehatan
		Cakupan Puskemas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)		27		0	0											Dinas Kesehatan
		Pelayanan Rumah Sakit Tipe D		100		0	0											Dinas Kesehatan
	Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan					26	436.925.000		662.790.000									Dinas Kesehatan
	1602	Belanja Pegawai dan honor Tim	OB			1	2.660.000											Dinas Kesehatan
		Rapat Koordinasi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Tradisional	Kali			8	7.750.000											Dinas Kesehatan
		Peningkatan Kapasitas SDM Pelayanan Kesehatan Dasar dan Tradisional	Kali			15	64.300.000											Dinas Kesehatan
		Workshop Pelayanan Kesehatan dasar dan Tradisional	Kali			1	76.850.000											Dinas Kesehatan
		Bimbingan Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar dan Tradisional	Kali			0	33.750.000											Dinas Kesehatan
		pelayanan psikolog di puskesmas	OB			1	194.500.000											Dinas Kesehatan
	Peningkatan kesehatan masyarakat	Jumlah kegiatan UKM Puskesmas				0	387.662.020		488.708.500									Dinas Kesehatan
		terlaksananya pembekalan aplikasi PIS PK (yankesdas)				0	0											Dinas Kesehatan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
		Terlaksananya penyamaan persepsi DO PIS PK (yankesdas)				0	0											Dinas Kesehatan
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	- Terlaksananya kegiatan pengelolaan keuangan barang, kepegawaian dan program sesuai dengan ketentuan				50	42.780.500	116.475.000										Dinas Kesehatan
	Perijinan dan pengawasan praktek tenaga dan sarana kesehatan	Perijinan dan Pengawasan Praktik Tenaga & Sarana Kesehatan				0	2.660.000	108.092.500										Dinas Kesehatan
		Terlaksananya binwasdal bidang kesehatan	orang			0	2.660.000											Dinas Kesehatan
		Terlaksananya FGD Perizinan	orang			0	0											Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Update Knowledge Petugas Perizinan	orang			0	0											Dinas Kesehatan
		Terlaksananya pengembangan software Pelayanan Perizinan di Bidang Kesehatan (SIMPERKES)	unit			0	40.875.000											Dinas Kesehatan
		Terbitnya Perda Pelayanan dan Perizinan Bidang Kesehatan	buah			0	0											Dinas Kesehatan
	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Srandakan	Terlaksananya pelayanan kesehatan di Puskesmas				108	1.592.779.663	2.363.072.925										Dinas Kesehatan
		Belanja gaji pegawai BLUD	Kali			3	82.380.000											Dinas Kesehatan
		Belanja Barang dan Jasa	Kali			101	1.483.537.387											Dinas Kesehatan
		-BMHP	Kali			7	92.931.658											Dinas Kesehatan
		-Jasa Pelayanan	Kali			3	1.013.428.278											Dinas Kesehatan
		-Perkantoran	Kali			11	54.055.150											Dinas Kesehatan
		-Kerumahtanggaan	Kali			74	301.210.680											Dinas Kesehatan
		-Pemeliharaan	Kali			6	21.911.621											Dinas Kesehatan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
		belanja modal	Kali			4	26.862.266											Dinas Kesehatan
		- tanah	Kali			0	0											Dinas Kesehatan
		- peralatan dan mesin	Kali			2	20.322.266											Dinas Kesehatan
		- gedung dan bangunan	Kali			2	6.540.000											Dinas Kesehatan
		- jalan, jaringan, instalasi	Kali			0	0											Dinas Kesehatan
		- asset tetap lainnya	Kali			0	0											Dinas Kesehatan
	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Sanden	Terlaksananya pelayanan kesehatan di Puskesmas				0	1.611.312.610		2.348.750.000									Dinas Kesehatan
		Belanja gaji pegawai BLUD	kali			12	49.250.000											Dinas Kesehatan
		Belanja Barang dan Jasa				0	0											Dinas Kesehatan
		-BMHP	jenis			45	109.978.797											Dinas Kesehatan
		-Jasa Pelayanan	kali			36	924.494.350											Dinas Kesehatan
		-Perkantoran	jenis			46	78.415.180											Dinas Kesehatan
		-Kerumahtanggaan	jenis			68	323.506.192											Dinas Kesehatan
		-Pemeliharaan	kali			10	58.288.131											Dinas Kesehatan
		belanja modal				0	0											Dinas Kesehatan
		- tanah				0	0											Dinas Kesehatan
		- peralatan dan mesin	jenis			18	67.379.960											Dinas Kesehatan
		- gedung dan bangunan				0	0											Dinas Kesehatan
		- jalan, jaringan, instalasi				1	0											Dinas Kesehatan
		- asset tetap lainnya				0	0											Dinas Kesehatan
	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kretek	Terlaksananya pelayanan kesehatan di Puskesmas				0	1.555.410.061		2.280.000.000									Dinas Kesehatan
		Belanja gaji pegawai BLUD	Kali			12	68.825.750											Dinas Kesehatan
		Belanja Barang dan Jasa				12	1.434.237.311											Dinas Kesehatan
		-BMHP	Kali			12	103.742.466											Dinas Kesehatan
		-Jasa Pelayanan	Kali			12	885.849.173											Dinas Kesehatan
		-Perkantoran	Kali			12	98.539.579											Dinas Kesehatan
		-Kerumahtanggaan	Kali			12	230.879.359											Dinas Kesehatan
		-Pemeliharaan	Kali			12	115.226.734											Dinas Kesehatan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
		belanja modal				12	52.347.000											Dinas Kesehatan
		- tanah				0	0											Dinas Kesehatan
		- peralatan dan mesin	Kali			0	34.626.000											Dinas Kesehatan
		- gedung dan bangunan				0	0											Dinas Kesehatan
		- jalan, jaringan, instalasi				0	0											Dinas Kesehatan
		- asset tetap lainnya	Kali			0	17.721.000											Dinas Kesehatan
	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pundong	Terlaksananya pelayanan kesehatan di Puskesmas				0	2.333.427.110	3.071.310.000										Dinas Kesehatan
		Belanja gaji pegawai BLUD				0	162.450.000											Dinas Kesehatan
		Belanja Barang dan Jasa				0	2.131.289.465											Dinas Kesehatan
		-BMHP				0	90.535.892											Dinas Kesehatan
		-Jasa Pelayanan				0	1.152.809.578											Dinas Kesehatan
		-Perkantoran				0	172.592.510											Dinas Kesehatan
		-Kerumahtanggaan				0	658.687.533											Dinas Kesehatan
		-Pemeliharaan				0	56.663.952											Dinas Kesehatan
		belanja modal				0	39.687.645											Dinas Kesehatan
		- tanah				0	0											Dinas Kesehatan
		- peralatan dan mesin				0	39.687.645											Dinas Kesehatan
		- gedung dan bangunan				0	0											Dinas Kesehatan
		- jalan, jaringan, instalasi				0	0											Dinas Kesehatan
		- asset tetap lainnya				0	0											Dinas Kesehatan
	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Bambanglipuro	Terlaksananya pelayanan kesehatan di Puskesmas				0	5.610.782.189	3.274.540.000										Dinas Kesehatan
		Belanja gaji pegawai BLUD				0	149.580.000											Dinas Kesehatan
		Belanja Barang dan Jasa				0	2.897.251.117											Dinas Kesehatan
		-BMHP				0	211.258.167											Dinas Kesehatan
		-Jasa Pelayanan				0	1.231.612.070											Dinas Kesehatan
		-Perkantoran				0	78.399.450											Dinas Kesehatan
		-Kerumahtanggaan				0	280.453.409											Dinas Kesehatan
		-Pemeliharaan				0	57.653.370											Dinas Kesehatan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
		belanja modal				0	178.077.730											Dinas Kesehatan
		- tanah				0	0											Dinas Kesehatan
		- peralatan dan mesin				0	82.997.330											Dinas Kesehatan
		- gedung dan bangunan				0	39.221.750											Dinas Kesehatan
		- jalan, jaringan, instalasi				0	0											Dinas Kesehatan
		- asset tetap lainnya				0	0											Dinas Kesehatan
	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pandak I	Terlaksananya pelayanan kesehatan di Puskesmas				0	1.429.840.610		2.078.619.025									Dinas Kesehatan
		Belanja Gaji Pegawai BLUD				12	56.636.490											Dinas Kesehatan
		Belanja Barang dan Jasa				655	1.300.108.716											Dinas Kesehatan
		- BMHP				300	104.154.340											Dinas Kesehatan
		- Jasa Pelayanan				60	879.106.658											Dinas Kesehatan
		- Perkantoran				150	73.245.600											Dinas Kesehatan
		- Kerumahtanggaan				115	236.645.118											Dinas Kesehatan
		- Pemeliharaan				30	6.957.000											Dinas Kesehatan
		Belanja Modal				8	73.095.404											Dinas Kesehatan
		- Tanah				0	0											Dinas Kesehatan
		- Peralatan dan mesin				7	73.095.404											Dinas Kesehatan
		- Gedung dan bangunan				0	0											Dinas Kesehatan
		- Jalan, jaringan, instalasi				1	0											Dinas Kesehatan
		- Asset tetap lainnya				0	0											Dinas Kesehatan
	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pandak II	Terlaksananya pelayanan kesehatan di Puskesmas				0	1.169.577.100		1.783.000.000									Dinas Kesehatan
		Belanja gaji pegawai BLUD	OH			15	109.719.000											Dinas Kesehatan
		Belanja Barang dan Jasa	Bulan			0	1.048.505.350											Dinas Kesehatan
		-BMHP	Jenis			3	50.677.700											Dinas Kesehatan
		-Jasa Pelayanan	Bulan			3	695.456.950											Dinas Kesehatan
		-Perkantoran	Buah			3	77.205.250											Dinas Kesehatan
		-Kerumahtanggaan	Jenis			3	213.769.250											Dinas Kesehatan
		-Pemeliharaan	Bulan			3	11.396.200											Dinas Kesehatan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
		belanja modal				4	11.352.750											Dinas Kesehatan
		- tanah				0	0											Dinas Kesehatan
		- peralatan dan mesin	Unit			0	11.352.750											Dinas Kesehatan
		- gedung dan bangunan				0	0											Dinas Kesehatan
		- jalan, jaringan, instalasi				0	0											Dinas Kesehatan
		- asset tetap lainnya	Unit			0	0											Dinas Kesehatan
	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Bantul I	Terlaksananya pelayanan kesehatan di Puskesmas				0	1.578.472.760		2.336.130.000									Dinas Kesehatan
		Belanja gaji pegawai BLUD				0	0											Dinas Kesehatan
		Belanja Barang dan Jasa				0	0											Dinas Kesehatan
		-BMHP				0	0											Dinas Kesehatan
		-Jasa Pelayanan				0	0											Dinas Kesehatan
		-Perkantoran				0	0											Dinas Kesehatan
		-Kerumahtanggaan				0	0											Dinas Kesehatan
		-Pemeliharaan				0	0											Dinas Kesehatan
		belanja modal				0	0											Dinas Kesehatan
		- tanah				0	0											Dinas Kesehatan
		- peralatan dan mesin				0	0											Dinas Kesehatan
		- gedung dan bangunan				0	0											Dinas Kesehatan
		- jalan, jaringan, instalasi				0	0											Dinas Kesehatan
		- asset tetap lainnya				0	0											Dinas Kesehatan
	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Bantul II	Terlaksananya pelayanan kesehatan di Puskesmas				0	995.166.020		1.670.430.000									Dinas Kesehatan
		Belanja gaji pegawai BLUD				0	41.850.000											Dinas Kesehatan
		Belanja Barang dan Jasa				0	0											Dinas Kesehatan
		-BMHP				0	72.159.150											Dinas Kesehatan
		-Jasa Pelayanan				0	646.671.339											Dinas Kesehatan
		-Perkantoran				0	26.862.925											Dinas Kesehatan
		-Kerumahtanggaan				0	71.037.206											Dinas Kesehatan
		-Pemeliharaan				0	28.699.700											Dinas Kesehatan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
		belanja modal				0	15.424.700											Dinas Kesehatan
		- tanah				0	0											Dinas Kesehatan
		- peralatan dan mesin				0	29.324.700											Dinas Kesehatan
		- gedung dan bangunan				0	0											Dinas Kesehatan
		- jalan, jaringan, instalasi				0	0											Dinas Kesehatan
		- asset tetap lainnya				0	0											Dinas Kesehatan
	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Jetis I	Terlaksananya pelayanan kesehatan di Puskesmas				0	1.499.125.859	2.055.000.000										Dinas Kesehatan
		Belanja gaji pegawai BLUD	orang			12	41.598.200											Dinas Kesehatan
		Belanja Barang dan Jasa				12	1.407.061.936											Dinas Kesehatan
		-BMHP				12	99.561.335											Dinas Kesehatan
		-Jasa Pelayanan				12	957.180.489											Dinas Kesehatan
		-Perkantoran				12	90.628.198											Dinas Kesehatan
		-Kerumahtanggaan				12	209.490.864											Dinas Kesehatan
		-Pemeliharaan				12	50.201.050											Dinas Kesehatan
		belanja modal				12	50.465.723											Dinas Kesehatan
		- tanah				0	0											Dinas Kesehatan
		- peralatan dan mesin				12	50.465.723											Dinas Kesehatan
		- gedung dan bangunan				0	0											Dinas Kesehatan
		- jalan, jaringan, instalasi				0	0											Dinas Kesehatan
		- asset tetap lainnya				0	0											Dinas Kesehatan
	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Jetis II	Terlaksananya pelayanan kesehatan di Puskesmas				0	1.054.823.309	1.462.000.000										Dinas Kesehatan
		Belanja gaji pegawai BLUD				12	39.599.600											Dinas Kesehatan
		Belanja Barang dan Jasa				0	959.688.429											Dinas Kesehatan
		-BMHP	kali			12	39.519.271											Dinas Kesehatan
		-Jasa Pelayanan	kali			12	677.210.050											Dinas Kesehatan
		-Perkantoran	kali			12	64.457.500											Dinas Kesehatan
		-Kerumahtanggaan	kali			12	104.272.420											Dinas Kesehatan
		-Pemeliharaan	kali			12	74.229.188											Dinas Kesehatan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
		belanja modal				0	55.535.280											Dinas Kesehatan
		- tanah				0	0											Dinas Kesehatan
		- peralatan dan mesin	kali			12	87.203.874											Dinas Kesehatan
		- gedung dan bangunan				0	0											Dinas Kesehatan
		- jalan, jaringan, instalasi				0	0											Dinas Kesehatan
		- asset tetap lainnya				0	0											Dinas Kesehatan
	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Imogiri I	Terlaksananya pelayanan kesehatan di Puskesmas	212			207	1.691.852.067	2.076.200.000										Dinas Kesehatan
		Belanja gaji pegawai BLUD	12			12	57.198.400											Dinas Kesehatan
		Belanja Barang dan Jasa	100			100	1.633.938.667											Dinas Kesehatan
		-BMHP	20			20	79.784.731											Dinas Kesehatan
		-Jasa Pelayanan	20			20	1.039.709.621											Dinas Kesehatan
		-Perkantoran	20			20	259.575.006											Dinas Kesehatan
		-Kerumahtanggaan	20			20	164.699.959											Dinas Kesehatan
		-Pemeliharaan	20			20	90.169.350											Dinas Kesehatan
		belanja modal	100			95	715.000											Dinas Kesehatan
		- tanah	0			0	0											Dinas Kesehatan
		- peralatan dan mesin	50			45	715.000											Dinas Kesehatan
		- gedung dan bangunan	0			0	14.998.500											Dinas Kesehatan
		- jalan, jaringan, instalasi	0			0	24.997.500											Dinas Kesehatan
		- asset tetap lainnya	50			45	0											Dinas Kesehatan
	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Imogiri II	Terlaksananya pelayanan kesehatan di Puskesmas				0	954.637.479	2.063.325.000										Dinas Kesehatan
		Belanja gaji pegawai BLUD	Orang Kali			12	73.500.000											Dinas Kesehatan
		Belanja Barang dan Jasa				0	872.248.379											Dinas Kesehatan
		-BMHP	Jenis			8	84.523.700											Dinas Kesehatan
		-Jasa Pelayanan	Bulan			12	606.734.629											Dinas Kesehatan
		-Perkantoran	Jenis			10	51.806.550											Dinas Kesehatan
		-Kerumahtanggaan	Jenis			12	115.506.000											Dinas Kesehatan
		-Pemeliharaan	Kali			12	13.677.500											Dinas Kesehatan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir PeriodeRPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RPKD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RPKD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		belanja modal				0	8.889.100											Dinas Kesehatan
		- tanah	Bidang			0	0											Dinas Kesehatan
		- peralatan dan mesin	Jenis			10	8.889.100											Dinas Kesehatan
		- gedung dan bangunan	Unit			0	0											Dinas Kesehatan
		- jalan, jaringan, instalasi	Jenis			0												Dinas Kesehatan
		- asset tetap lainnya	Jenis			0	0											Dinas Kesehatan
	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Dlingo I	Terlaksananya pelayanan kesehatan di Puskesmas				0	1.256.422.599		1.698.262.480									Dinas Kesehatan
		Belanja gaji pegawai BLUD				0	0											Dinas Kesehatan
		Belanja Barang dan Jasa				0	0											Dinas Kesehatan
		-BMHP	Kali			0	39.816.540											Dinas Kesehatan
		-Jasa Pelayanan	Kali			0	506.191.900											Dinas Kesehatan
		-Perkantoran	Kali			0	220.792.249											Dinas Kesehatan
		-Kerumahtanggaan	Kali			0	0											Dinas Kesehatan
		-Pemeliharaan	Kali			0	27.153.800											Dinas Kesehatan
		belanja modal				0	0											Dinas Kesehatan
		- tanah				0	0											Dinas Kesehatan
		- peralatan dan mesin	Kali			0	25.000.000											Dinas Kesehatan
		- gedung dan bangunan				0	0											Dinas Kesehatan
		- jalan, jaringan, instalasi				0	0											Dinas Kesehatan
		- asset tetap lainnya				0	0											Dinas Kesehatan
	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Dlingo II	Terlaksananya pelayanan kesehatan di Puskesmas				0	825.547.252		1.242.205.000									Dinas Kesehatan
		Belanja gaji pegawai BLUD	Orang Bulan			33	67.500.000											Dinas Kesehatan
		Belanja Barang dan Jasa				93	722.900.662											Dinas Kesehatan
		-BMHP	Jenis			11	21.624.346											Dinas Kesehatan
		-Jasa Pelayanan	Kali			12	574.320.825											Dinas Kesehatan
		-Perkantoran	Jenis			4	38.683.935											Dinas Kesehatan
		-Kerumahtanggaan	Jenis			4	79.951.056											Dinas Kesehatan
		-Pemeliharaan	Kali			13	8.320.500											Dinas Kesehatan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
		belanja modal				4	67.194.000											Dinas Kesehatan
		- tanah	Unit			0	0											Dinas Kesehatan
		- peralatan dan mesin	Unit			5	20.346.910											Dinas Kesehatan
		- gedung dan bangunan	Unit			2	14.799.680											Dinas Kesehatan
		- jalan, jaringan, instalasi	Unit			0	0											Dinas Kesehatan
		- asset tetap lainnya	Unit			0	0											Dinas Kesehatan
	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pleret	Terlaksananya pelayanan kesehatan di Puskesmas				12	2.022.236.890	3.069.046.000										Dinas Kesehatan
		Belanja gaji pegawai BLUD				12	67.650.400											Dinas Kesehatan
		Belanja Barang dan Jasa				12	1.868.013.626											Dinas Kesehatan
		-BMHP				12	115.986.970											Dinas Kesehatan
		-Jasa Pelayanan				12	1.177.696.315											Dinas Kesehatan
		-Perkantoran				12	329.264.425											Dinas Kesehatan
		-Kerumahtanggaan				12	170.269.110											Dinas Kesehatan
		-Pemeliharaan				12	74.796.806											Dinas Kesehatan
		belanja modal				9	86.572.864											Dinas Kesehatan
		- tanah				0	0											Dinas Kesehatan
		- peralatan dan mesin				9	38.569.100											Dinas Kesehatan
		- gedung dan bangunan				0	0											Dinas Kesehatan
		- jalan, jaringan, instalasi				0	0											Dinas Kesehatan
		- asset tetap lainnya				0	0											Dinas Kesehatan
	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Piyungan	Terlaksananya pelayanan kesehatan di Puskesmas				99	2.210.940.034	3.128.000.000										Dinas Kesehatan
		Belanja gaji pegawai BLUD				3	152.775.000											Dinas Kesehatan
		Belanja Barang dan Jasa				90	2.006.363.759											Dinas Kesehatan
		-BMHP				15	221.446.537											Dinas Kesehatan
		-Jasa Pelayanan				3	1.345.141.790											Dinas Kesehatan
		-Perkantoran				20	97.952.759											Dinas Kesehatan
		-Kerumahtanggaan				40	269.996.080											Dinas Kesehatan
		-Pemeliharaan				12	71.826.593											Dinas Kesehatan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RPKD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RPKD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
		belanja modal				6	114.339.975											Dinas Kesehatan
		- tanah				0	0											Dinas Kesehatan
		- peralatan dan mesin				4	31.748.000											Dinas Kesehatan
		- gedung dan bangunan				1	0											Dinas Kesehatan
		- jalan, jaringan, instalasi				1	33.275.000											Dinas Kesehatan
		- asset tetap lainnya				0	0											Dinas Kesehatan
	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Banguntapan I	Terlaksananya pelayanan kesehatan di Puskesmas Banguntapan I				0	1.601.682.903		2.190.405.000									Dinas Kesehatan
		Belanja gaji pegawai BLUD	Orang			1	14.847.750											Dinas Kesehatan
		Belanja Barang dan Jasa				0	1.474.372.384											Dinas Kesehatan
		-BMHP	Jenis			25	122.056.493											Dinas Kesehatan
		-Jasa Pelayanan	Jenis			1	885.741.000											Dinas Kesehatan
		-Perkantoran	Jenis			12	237.173.387											Dinas Kesehatan
		-Kerumahtanggaan	Jenis			15	66.510.161											Dinas Kesehatan
		-Pemeliharaan	Jenis			4	162.891.343											Dinas Kesehatan
		belanja modal				0	112.462.769											Dinas Kesehatan
		- tanah				0	0											Dinas Kesehatan
		- peralatan dan mesin	Jenis			1	112.462.769											Dinas Kesehatan
		- gedung dan bangunan				0	0											Dinas Kesehatan
		- jalan, jaringan, instalasi				0	0											Dinas Kesehatan
		- asset tetap lainnya				0	0											Dinas Kesehatan
	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Banguntapan II	Terlaksananya pelayanan kesehatan di Puskesmas				0	1.270.051.505		1.877.975.800									Dinas Kesehatan
		Belanja gaji pegawai BLUD				0	59.500.000											Dinas Kesehatan
		Belanja Barang dan Jasa				0	0											Dinas Kesehatan
		-BMHP				0	179.975.953											Dinas Kesehatan
		-Jasa Pelayanan				0	770.204.300											Dinas Kesehatan
		-Perkantoran				0	53.407.983											Dinas Kesehatan
		-Kerumahtanggaan				0	138.223.045											Dinas Kesehatan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
		-Pemeliharaan				0	44.988.224											Dinas Kesehatan
		belanja modal				0	23.752.000											Dinas Kesehatan
		- tanah				0	0											Dinas Kesehatan
		- peralatan dan mesin				0	23.752.000											Dinas Kesehatan
		- gedung dan bangunan				0	0											Dinas Kesehatan
		- jalan, jaringan, instalasi				0	0											Dinas Kesehatan
		- asset tetap lainnya				0	0											Dinas Kesehatan
	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Banguntapan III	Tertaksananya pelayanan kesehatan di Puskesmas				0	665.498.110	921.258.000										Dinas Kesehatan
		Belanja gaji pegawai BLUD				0	0											Dinas Kesehatan
		Belanja Barang dan Jasa				0	0											Dinas Kesehatan
		-BMHP				0	0											Dinas Kesehatan
		-Jasa Pelayanan				0	0											Dinas Kesehatan
		-Perkantoran				0	0											Dinas Kesehatan
		-Kerumahtanggaan				0	0											Dinas Kesehatan
		-Pemeliharaan				0	0											Dinas Kesehatan
		belanja modal				0	0											Dinas Kesehatan
		- tanah				0	0											Dinas Kesehatan
		- peralatan dan mesin				0	0											Dinas Kesehatan
		- gedung dan bangunan				0	0											Dinas Kesehatan
		- jalan, jaringan, instalasi				0	0											Dinas Kesehatan
		- asset tetap lainnya				0	0											Dinas Kesehatan
	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Sewon I	Tertaksananya pelayanan kesehatan di Puskesmas				0	800.057.091	2.787.500.000										Dinas Kesehatan
		Belanja gaji pegawai BLUD	bij			3	85.196.400											Dinas Kesehatan
		Belanja Barang dan Jasa				0	623.344.591											Dinas Kesehatan
		-BMHP	bij			3	123.869.059											Dinas Kesehatan
		-Jasa Pelayanan	bij			3	856.333.544											Dinas Kesehatan
		-Perkantoran	bij			3	35.821.650											Dinas Kesehatan
		-Kerumahtanggaan	bij			3	200.409.312											Dinas Kesehatan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
		-Pemeliharaan	bij			3	24.665.400											Dinas Kesehatan
		belanja modal				0	91.516.100											Dinas Kesehatan
		- tanah				0	0											Dinas Kesehatan
		- peralatan dan mesin	bij			1	91.516.100											Dinas Kesehatan
		- gedung dan bangunan				0	0											Dinas Kesehatan
		- jalan, jaringan, instalasi				0	0											Dinas Kesehatan
		- asset tetap lainnya				0	0											Dinas Kesehatan
	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Sewon II	Tertaksananya pelayanan kesehatan di Puskesmas				0	1.636.720.323		2.136.550.000									Dinas Kesehatan
		Belanja gaji pegawai BLUD	bij			3	14.031.000											Dinas Kesehatan
		Belanja Barang dan Jasa				3	1.116.708.863											Dinas Kesehatan
		-BMHP	bij			3	299.558.649											Dinas Kesehatan
		-Jasa Pelayanan	bij			3	585.630.890											Dinas Kesehatan
		-Perkantoran	bij			3	53.029.121											Dinas Kesehatan
		-Kerumahtanggaan	bij			3	364.442.427											Dinas Kesehatan
		-Pemeliharaan	bij			3	129.918.664											Dinas Kesehatan
		belanja modal				0	13.787.300											Dinas Kesehatan
		- tanah				0	0											Dinas Kesehatan
		- peralatan dan mesin	bij			3	34.850.300											Dinas Kesehatan
		- gedung dan bangunan				1	10.000.000											Dinas Kesehatan
		- jalan, jaringan, instalasi				0	0											Dinas Kesehatan
		- asset tetap lainnya				0	0											Dinas Kesehatan
	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kasihan I	Tertaksananya pelayanan kesehatan di Puskesmas				0	2.218.157.592		2.775.000.000									Dinas Kesehatan
		Belanja gaji pegawai BLUD				75	144.047.600											Dinas Kesehatan
		Belanja Barang dan Jasa				0	0											Dinas Kesehatan
		-BMHP				30	95.248.423											Dinas Kesehatan
		-Jasa Pelayanan				400	1.115.514.973											Dinas Kesehatan
		-Perkantoran				100	241.731.303											Dinas Kesehatan
		-Kerumahtanggaan				200	264.408.740											Dinas Kesehatan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
		-Pemeliharaan				48	95.734.615											Dinas Kesehatan
		belanja modal				0	0											Dinas Kesehatan
		- tanah				0	0											Dinas Kesehatan
		- peralatan dan mesin				15	261.471.938											Dinas Kesehatan
		- gedung dan bangunan				0	0											Dinas Kesehatan
		- jalan, jaringan, instalasi				0	0											Dinas Kesehatan
		- asset tetap lainnya				0	0											Dinas Kesehatan
	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kasihan II	Tertaksananya pelayanan kesehatan di Puskesmas				0	1.375.349.900	1.812.000.000										Dinas Kesehatan
		Belanja gaji pegawai BLUD				0	15.714.000											Dinas Kesehatan
		Belanja Barang dan Jasa				0	0											Dinas Kesehatan
		-BMHP				0	135.520.310											Dinas Kesehatan
		-Jasa Pelayanan				0	845.159.048											Dinas Kesehatan
		-Perkantoran				0	52.251.500											Dinas Kesehatan
		-Kerumahtanggaan				0	203.262.542											Dinas Kesehatan
		-Pemeliharaan				0	67.700.500											Dinas Kesehatan
		belanja modal				0	0											Dinas Kesehatan
		- elektronik				0	5.148.000											Dinas Kesehatan
		- meubeler				0	6.435.000											Dinas Kesehatan
		- alat kesehatan				0	22.287.000											Dinas Kesehatan
		- komputer				0	2.678.500											Dinas Kesehatan
		- gedung				0	39.996.000											Dinas Kesehatan
	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pajangan	Tertaksananya pelayanan kesehatan di Puskesmas				0	1.988.842.093	2.850.000.000										Dinas Kesehatan
		Belanja gaji pegawai BLUD				38	57.448.400											Dinas Kesehatan
		Belanja Barang dan Jasa				0	1.802.900.968											Dinas Kesehatan
		-BMHP				5	145.076.799											Dinas Kesehatan
		-Jasa Pelayanan				12	1.124.452.594											Dinas Kesehatan
		-Perkantoran				4	78.394.558											Dinas Kesehatan
		-Kerumahtanggaan				23	377.111.327											Dinas Kesehatan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
		-Pemeliharaan				6	77.865.690											Dinas Kesehatan
		belanja modal				0	128.492.725											Dinas Kesehatan
		- tanah				0	0											Dinas Kesehatan
		- peralatan dan mesin				18	128.492.725											Dinas Kesehatan
		- gedung dan bangunan				0	0											Dinas Kesehatan
		- jalan, jaringan, instalasi				0	0											Dinas Kesehatan
		- asset tetap lainnya				0	0											Dinas Kesehatan
	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Sedayu I	Tertaksananya pelayanan kesehatan di Puskesmas				0	1.156.888.835	1.750.000.000										Dinas Kesehatan
		Belanja gaji pegawai BLUD	bulan			0	18.438.200											Dinas Kesehatan
		Belanja Barang dan Jasa				0	1.109.557.554											Dinas Kesehatan
		-BMHP	Jenis			0	51.039.052											Dinas Kesehatan
		-Jasa Pelayanan	Bulan			0	723.194.676											Dinas Kesehatan
		-Perkantoran	Jenis			0	246.368.111											Dinas Kesehatan
		-Kerumahtanggaan	Jenis			0	62.659.185											Dinas Kesehatan
		-Pemeliharaan	jenis			0	26.296.530											Dinas Kesehatan
		belanja modal				0	28.893.081											Dinas Kesehatan
		- tanah				0	0											Dinas Kesehatan
		- peralatan dan mesin	jenis			0	28.893.081											Dinas Kesehatan
		- gedung dan bangunan				0	0											Dinas Kesehatan
		- jalan, jaringan, instalasi				0	0											Dinas Kesehatan
		- asset tetap lainnya				0	0											Dinas Kesehatan
	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Sedayu II	Tertaksananya pelayanan kesehatan di Puskesmas				0	1.009.413.375	1.500.000.000										Dinas Kesehatan
		Belanja gaji pegawai BLUD				12	46.250.000											Dinas Kesehatan
		Belanja Barang dan Jasa				12	739.999.856											Dinas Kesehatan
		-BMHP				12	124.025.686											Dinas Kesehatan
		-Jasa Pelayanan				12	704.291.718											Dinas Kesehatan
		-Perkantoran				12	27.667.690											Dinas Kesehatan
		-Kerumahtanggaan				12	86.569.945											Dinas Kesehatan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
		-Pemeliharaan				12	8.392.336											Dinas Kesehatan
		belanja modal				0	0											Dinas Kesehatan
		- tanah				0	0											Dinas Kesehatan
		- peralatan dan mesin				0	12.216.000											Dinas Kesehatan
		- gedung dan bangunan				0	0											Dinas Kesehatan
		- jalan, jaringan, instalasi				0	0											Dinas Kesehatan
		- asset tetap lainnya				0	0											Dinas Kesehatan
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Srandakan	Terselenggaranya upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas				96	330.925.000		645.000.000									Dinas Kesehatan
		PIS PK				7	110.640.000											Dinas Kesehatan
		UKM Esensial				71	152.085.000											Dinas Kesehatan
		UKM Pengembangan				5	17.055.000											Dinas Kesehatan
		Fungsi Manajemen				9	16.550.000											Dinas Kesehatan
		STBM				0	7.460.000											Dinas Kesehatan
		Dukungan Manajemen				3	10.200.000											Dinas Kesehatan
		UKM APBD				1	16.935.000											Dinas Kesehatan
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sanden	Terselenggaranya upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas				0	208.017.500		645.000.000									Dinas Kesehatan
		PIS PK	KK			3.517	60.475.316											Dinas Kesehatan
		UKM Esensial	Upaya			7	213.038.500											Dinas Kesehatan
		UKM Pengembangan	Upaya			5	22.220.000											Dinas Kesehatan
		Fungsi Manajemen	kali			17	16.340.000											Dinas Kesehatan
		STBM	desa			2	18.906.000											Dinas Kesehatan
		Dukungan Manajemen	kali			64	6.300.000											Dinas Kesehatan
		UKM APBD	kali			6	3.485.000											Dinas Kesehatan
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Kretek	Terselenggaranya upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas				0	393.120.000		645.000.000									Dinas Kesehatan
		PIS PK	KK			2.220	91.345.000											Dinas Kesehatan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir PeriodeRPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPd Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPd tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		UKM Esensial	Upaya			6	259.755.000											Dinas Kesehatan
		UKM Pengembangan	Upaya			10	8.640.000											Dinas Kesehatan
		Fungsi Manajemen	Kali			16	18.775.000											Dinas Kesehatan
		STBM	Desa			2	9.560.000											Dinas Kesehatan
		Dukungan Manajemen	Kali			1	5.045.000											Dinas Kesehatan
		UKM APBD				0	0											Dinas Kesehatan
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pundong	Terselenggaranya upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas				0	416.087.400		645.000.000									Dinas Kesehatan
		PIS PK				0	209.740.000											Dinas Kesehatan
		UKM Esensial				0	258.840.000											Dinas Kesehatan
		UKM Pengembangan				0	43.331.000											Dinas Kesehatan
		Fungsi Manajemen				0	16.640.000											Dinas Kesehatan
		STBM				0	18.820.000											Dinas Kesehatan
		Dukungan Manajemen				0	10.869.000											Dinas Kesehatan
		UKM APBD				0	24.100.000											Dinas Kesehatan
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bambanglipuro	Terselenggaranya upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas				0	475.825.700		675.000.000									Dinas Kesehatan
		PIS PK				0	98.913.000											Dinas Kesehatan
		UKM Esensial				0	251.585.300											Dinas Kesehatan
		UKM Pengembangan				0	66.430.500											Dinas Kesehatan
		Fungsi Manajemen				0	24.005.000											Dinas Kesehatan
		STBM				0	11.110.000											Dinas Kesehatan
		Dukungan Manajemen				0	5.325.700											Dinas Kesehatan
		UKM APBD				0	18.456.200											Dinas Kesehatan
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pandak I	Terselenggaranya upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas				338	309.837.000		635.000.000									Dinas Kesehatan
		PIS PK				15	144.650.000											Dinas Kesehatan
		UKM Esensial				182	305.860.000											Dinas Kesehatan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir PeriodeRPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPd Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPd tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		UKM Pengembangan				47	80.894.000											Dinas Kesehatan
		Fungsi Manajemen				19	17.585.000											Dinas Kesehatan
		STBM				2	16.789.000											Dinas Kesehatan
		Dukungan Manajemen				46	19.586.000											Dinas Kesehatan
		UKM APBD				27	15.780.000											Dinas Kesehatan
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pandak II	Terselenggaranya upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas				0	303.053.400		635.000.000									Dinas Kesehatan
		PIS PK	KK			2	42.250.000											Dinas Kesehatan
		UKM Esensial	Kegiatan			40	279.873.700											Dinas Kesehatan
		UKM Pengembangan	Kegiatan			4	69.632.700											Dinas Kesehatan
		Fungsi Manajemen	Kegiatan			0	29.120.000											Dinas Kesehatan
		STBM	Desa			0	31.435.000											Dinas Kesehatan
		Dukungan Manajemen	Kegiatan/OH			30	58.500.000											Dinas Kesehatan
		UKM APBD	Kegiatan			3	25.000.000											Dinas Kesehatan
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bantul I	Terselenggaranya upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas				406	685.475.000		650.000.000									Dinas Kesehatan
		PIS PK				21	122.460.000											Dinas Kesehatan
		UKM Esensial				257	403.788.600											Dinas Kesehatan
		UKM Pengembangan				38	46.350.000											Dinas Kesehatan
		Fungsi Manajemen				41	36.000.000											Dinas Kesehatan
		STBM				27	32.825.000											Dinas Kesehatan
		Dukungan Manajemen				14	4.051.400											Dinas Kesehatan
		UKM APBD				8	40.000.000											Dinas Kesehatan
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bantul II	Terselenggaranya upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas				0	710.646.900		660.000.000									Dinas Kesehatan
		PIS PK				0	113.278.000											Dinas Kesehatan
		UKM Esensial				0	266.745.000											Dinas Kesehatan
		UKM Pengembangan				0	7.350.000											Dinas Kesehatan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
		Fungsi Manajemen				0	30.900.000											Dinas Kesehatan
		STBM				0	12.400.000											Dinas Kesehatan
		Dukungan Manajemen				0	17.475.000											Dinas Kesehatan
		UKM APBD				0	39.583.000											Dinas Kesehatan
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Jetis I	Terselenggaranya upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas	bulan			0	433.932.500		660.000.000									Dinas Kesehatan
		PIS PK				12	77.680.000											Dinas Kesehatan
		UKM Esensial				12	209.455.000											Dinas Kesehatan
		UKM Pengembangan				12	40.845.000											Dinas Kesehatan
		Fungsi Manajemen				12	60.474.500											Dinas Kesehatan
		STBM				12	20.640.000											Dinas Kesehatan
		Dukungan Manajemen				0	0											Dinas Kesehatan
		UKM APBD				12	27.728.000											Dinas Kesehatan
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Jetis II	Terselenggaranya upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas				0	449.346.842		675.302.000									Dinas Kesehatan
		PIS PK	kk			3.381	111.912.000											Dinas Kesehatan
		UKM Esensial	kegiatan			2	299.439.092											Dinas Kesehatan
		UKM Pengembangan	kegiatan			1	9.490.000											Dinas Kesehatan
		Fungsi Manajemen	kali			5	19.400.000											Dinas Kesehatan
		STBM	desa			0	13.335.000											Dinas Kesehatan
		Dukungan Manajemen	kegiatan			2	15.735.282											Dinas Kesehatan
		UKM APBD	kegiatan			2	31.455.000											Dinas Kesehatan
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Imogiri I	Terselenggaranya upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas	100			97	263.398.100		635.000.000									Dinas Kesehatan
		PIS PK	20			18	100.980.000											Dinas Kesehatan
		UKM Esensial	15			14	286.255.000											Dinas Kesehatan
		UKM Pengembangan	20			20	97.530.000											Dinas Kesehatan
		Fungsi Manajemen	15			15	31.550.000											Dinas Kesehatan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir PeriodeRPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RPKD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RPKD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		STBM	0			0	0											Dinas Kesehatan
		Dukungan Manajemen	10			10	1.423.100											Dinas Kesehatan
		UKM APBD	20			20	21.225.000											Dinas Kesehatan
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Imogiri II	Terselenggaranya upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas				0	503.012.100		645.000.000									Dinas Kesehatan
		PIS PK				4.920	68.275.000											Dinas Kesehatan
		UKM Esensial				91	180.011.100											Dinas Kesehatan
		UKM Pengembangan				8	71.570.000											Dinas Kesehatan
		Fungsi Manajemen				5	14.410.000											Dinas Kesehatan
		STBM				3	3.600.000											Dinas Kesehatan
		Dukungan Manajemen				8	5.800.000											Dinas Kesehatan
		UKM APBD				3	9.990.000											Dinas Kesehatan
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Dlingo I	Terselenggaranya upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas				0	399.521.000		650.000.000									Dinas Kesehatan
		PIS PK	KK			0	84.136.000											Dinas Kesehatan
		UKM Esensial	Upaya			0	235.647.050											Dinas Kesehatan
		UKM Pengembangan	Jenis			0	108.565.000											Dinas Kesehatan
		Fungsi Manajemen	Kali			0	23.115.000											Dinas Kesehatan
		STBM	Desa			0	32.475.000											Dinas Kesehatan
		Dukungan Manajemen	Kali			0	10.235.000											Dinas Kesehatan
		UKM APBD	Kali			0	18.695.000											Dinas Kesehatan
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Dlingo II	Terselenggaranya upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas				0	448.720.112		670.000.000									Dinas Kesehatan
		PIS PK				17	61.804.000											Dinas Kesehatan
		UKM Esensial				255	244.817.194											Dinas Kesehatan
		UKM Pengembangan				65	54.189.918											Dinas Kesehatan
		Fungsi Manajemen				17	15.779.000											Dinas Kesehatan
		STBM				15	12.440.000											Dinas Kesehatan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir PeriodeRPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RPKD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RPKD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Dukungan Manajemen				36	37.900.000											Dinas Kesehatan
		UKM APBD				12	21.790.000											Dinas Kesehatan
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pleret	Terselenggaranya upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas				0	240.593.200		725.000.000									Dinas Kesehatan
		PIS PK				12	89.259.600											Dinas Kesehatan
		UKM Esensial				12	148.335.000											Dinas Kesehatan
		UKM Pengembangan				12	126.790.000											Dinas Kesehatan
		Fungsi Manajemen				12	58.600.000											Dinas Kesehatan
		STBM				12	23.040.000											Dinas Kesehatan
		Dukungan Manajemen				12	17.396.800											Dinas Kesehatan
		UKM APBD				12	24.755.000											Dinas Kesehatan
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Piyungan	Terselenggaranya upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas				0	343.694.300		710.000.000									Dinas Kesehatan
		PIS PK	KK			12.000	45.775.000											Dinas Kesehatan
		UKM Esensial	Jenis			6	161.070.740											Dinas Kesehatan
		UKM Pengembangan	Jenis			10	57.994.620											Dinas Kesehatan
		Fungsi Manajemen	Kali (rapat)			28	12.995.000											Dinas Kesehatan
		STBM	Desa			1	0											Dinas Kesehatan
		Dukungan Manajemen	Kali			12	11.492.700											Dinas Kesehatan
		UKM APBD	Kali			12	22.837.000											Dinas Kesehatan
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Banguntapan I	Terselenggaranya upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas Banguntapan I				0	435.242.000		680.000.000									Dinas Kesehatan
		UKM Esensial	jenis kegiatan			70	261.194.000											Dinas Kesehatan
		STBM	jenis kegiatan			5	17.795.000											Dinas Kesehatan
		Penyedia tenaga dengan perjanjian kontrak	jenis kegiatan			3	40.500.000											Dinas Kesehatan
		UKM Pengembangan	jenis kegiatan			5	16.690.000											Dinas Kesehatan
		PIS PK	jenis kegiatan			9	53.499.000											Dinas Kesehatan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir PeriodeRPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPd Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPd tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Fungsi manajemen	jenis kegiatan			7	30.100.000											Dinas Kesehatan
		Nusantara Sehat	jenis kegiatan			0	0											Dinas Kesehatan
		UKM APBD	jenis kegiatan			12	15.464.000											Dinas Kesehatan
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Banguntapan II	Terselenggaranya upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas				0	309.625.000		680.000.000									Dinas Kesehatan
		PIS PK				0	0											Dinas Kesehatan
		UKM Esensial				0	0											Dinas Kesehatan
		UKM Pengembangan				0	0											Dinas Kesehatan
		Fungsi Manajemen				0	0											Dinas Kesehatan
		STBM				0	0											Dinas Kesehatan
		Dukungan Manajemen				0	0											Dinas Kesehatan
		UKM APBD				0	0											Dinas Kesehatan
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Banguntapan III	Terselenggaranya upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas				0	424.030.000		740.000.000									Dinas Kesehatan
		PIS PK	KK			0	0											Dinas Kesehatan
		UKM Esensial	Upaya			0	0											Dinas Kesehatan
		UKM Pengembangan	Upaya			0	0											Dinas Kesehatan
		Fungsi Manajemen	Kali			0	0											Dinas Kesehatan
		STBM	Desa			0	0											Dinas Kesehatan
		Dukungan Manajemen	Kali			0	0											Dinas Kesehatan
		UKM APBD	Upaya			0	0											Dinas Kesehatan
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sewon I	Terselenggaranya upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas				0	440.670.000		740.000.000									Dinas Kesehatan
		PIS PK	keluarga			6.671	74.855.000											Dinas Kesehatan
		UKM Esensial	jenis			4	265.905.000											Dinas Kesehatan
		UKM Pengembangan	jenis			1	50.015.000											Dinas Kesehatan
		Fungsi Manajemen	kali			7	15.050.000											Dinas Kesehatan
		STBM	desa			0	15.570.000											Dinas Kesehatan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir PeriodeRPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RPKD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RPKD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Dukungan Manajemen	kali			7	7.130.000											Dinas Kesehatan
		UKM APBD	kali			7	12.145.000											Dinas Kesehatan
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sewon II	Terselenggaranya upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas				0	440.950.700		840.000.000									Dinas Kesehatan
		PIS PK				0	154.820.000											Dinas Kesehatan
		UKM Esensial				0	185.235.000											Dinas Kesehatan
		UKM Pengembangan				0	38.945.000											Dinas Kesehatan
		Fungsi Manajemen				0	23.690.000											Dinas Kesehatan
		STBM				0	12.080.000											Dinas Kesehatan
		Dukungan Manajemen				0	26.180.700											Dinas Kesehatan
		UKM APBD				0	0											Dinas Kesehatan
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Kasihan I	Terselenggaranya upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas				0	521.226.184		710.000.000									Dinas Kesehatan
		PIS PK				0	112.740.000											Dinas Kesehatan
		UKM Esensial				99	221.037.084											Dinas Kesehatan
		UKM Pengembangan				253	62.190.000											Dinas Kesehatan
		Fungsi Manajemen				34	30.800.000											Dinas Kesehatan
		STBM				13	15.075.000											Dinas Kesehatan
		Dukungan Manajemen				29	52.514.100											Dinas Kesehatan
		UKM APBD				70	26.870.000											Dinas Kesehatan
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Kasihan II	Terselenggaranya upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas				0	488.048.100		840.000.000									Dinas Kesehatan
		PIS PK				0	112.767.000											Dinas Kesehatan
		UKM Esensial				0	203.486.200											Dinas Kesehatan
		UKM Pengembangan				0	95.461.800											Dinas Kesehatan
		Fungsi Manajemen				0	11.500.000											Dinas Kesehatan
		STBM				0	24.490.000											Dinas Kesehatan
		Dukungan Manajemen				0	12.517.100											Dinas Kesehatan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir PeriodeRPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RPKD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RPKD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		UKM APBD				0	27.826.000											Dinas Kesehatan
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pajangan	Terselenggaranya upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas				0	454.433.100		645.000.000									Dinas Kesehatan
		PIS PK				37	119.440.000											Dinas Kesehatan
		UKM Esensial				300	261.790.000											Dinas Kesehatan
		UKM Pengembangan				47	28.000.000											Dinas Kesehatan
		Fungsi Manajemen				40	17.060.000											Dinas Kesehatan
		STBM				6	2.270.000											Dinas Kesehatan
		Dukungan Manajemen				3	4.623.100											Dinas Kesehatan
		UKM APBD				70	21.250.000											Dinas Kesehatan
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sedayu I	Terselenggaranya upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas				0	533.817.000		645.000.000									Dinas Kesehatan
		PIS PK	KK			1.326	112.570.000											Dinas Kesehatan
		UKM Esensial	Jenis			1	224.788.000											Dinas Kesehatan
		UKM Pengembangan	Jenis			2	119.950.000											Dinas Kesehatan
		Fungsi Manajemen	Kali			6	23.611.000											Dinas Kesehatan
		STBM	Desa			1	29.175.000											Dinas Kesehatan
		Dukungan Manajemen	Kali			12	5.675.000											Dinas Kesehatan
		UKM APBD	Kali			2	18.048.000											Dinas Kesehatan
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sedayu II	Terselenggaranya upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas				21	551.775.200		635.000.000									Dinas Kesehatan
		PIS PK				4	109.805.000											Dinas Kesehatan
		UKM Esensial				9	304.049.000											Dinas Kesehatan
		UKM Pengembangan				8	67.637.500											Dinas Kesehatan
		Fungsi Manajemen				12	25.913.200											Dinas Kesehatan
		STBM				3	8.850.000											Dinas Kesehatan
		Dukungan Manajemen				6	15.803.500											Dinas Kesehatan
		UKM APBD				4	19.717.000											Dinas Kesehatan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Operasional Rumah Sakit					0	0		6.239.292.197									RSUD
		Terlaksananya belanja pegawai operasional BLUD	kegiatan			0	0											RSUD
		Terlaksananya belanja barang dan jasa untuk pemenuhan RSD	kegiatan			0	0											RSUD
		Terlaksananya belanja modal untuk operasional RSD	kegiatan			0	0											RSUD
	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase peserta PKP mendapatkan sertifikat PIRT		80	151.250.000	90	1.476.361.756											Dinas Kesehatan
		Persentase cakupan tindak lanjut hasil pemeriksaan BBPOM		100	140.500.000	0	0											Dinas Kesehatan
	Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan			321	119.000.000	0	0											Dinas Kesehatan
		pertemuan(Penyebaran info,sosialisasi,evaluasi)keamanan pangan		11	43.560.000	55	22.241.000											Dinas Kesehatan
		Jumlah peserta PKP PIRT		310	75.440.000	35	2.000.000											Dinas Kesehatan
	Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan			1.726	75.440.000	0	53.117.000		324.015.000									Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Penyuluhan Keamanan Pangan P-IRT	orang	1.375	42.812.500	0	15.307.000											Dinas Kesehatan
		Terverifikasinya PIRT	unit	1	25.477.500	92	5.833.000											Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Review dan Evaluasi Kegiatan SPP-IRT	orang	350	7.150.000	70	4.575.000											Dinas Kesehatan
		Terlaksananya evaluasi keamanan pangan				0	0											Dinas Kesehatan
		Terlaksananya workshop obat dan yanfar				0	0											Dinas Kesehatan
	Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Cakupan desa siaga kategori baik (Purnama dan mandiri)		75	1.942.216.144	0	1.184.144.420											Dinas Kesehatan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RPKD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RPKD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar		100		0	408.054.920											Dinas Kesehatan
	Promosi Kesehatan	Cakupan desa siaga kategori baik (purnama dan mandiri)				0	36.625.000		383.040.000									Dinas Kesehatan
		Evaluasi kader kesehatan remaja				0	517.290.730											Dinas Kesehatan
		Pengembangan media informasi kesehatan				0	776.089.500											Dinas Kesehatan
	Pemberdayaan masyarakat sehat	Dusun Bebas 4 Masalah Kesehatan (DB4MK)				0	0		342.172.500									Dinas Kesehatan
		Penyusunan RAD germas				0	0											Dinas Kesehatan
		Pembinaan sekolah model germas				0	0											Dinas Kesehatan
		Pengangkatan tenaga honorarium promkes				0	0											Dinas Kesehatan
		Pembinaan Dusun pemberdayaan kesehatan				0	28.990.000											Dinas Kesehatan
		Lomba Toga				0	12.075.000											Dinas Kesehatan
		Lomba HKG PKK KB Kes				0	28.254.500											Dinas Kesehatan
		Workshop Penjaringan dengan lintas sektor				0	0											Dinas Kesehatan
		reward db4mk				300	757.835.000											Dinas Kesehatan
		sosialisasi dan evaluasi BOK				0	78.800.000											Dinas Kesehatan
	Program perbaikan gizi masyarakat	Persentase prevalensi Balita stunting		11	3.183.719.494	0	0											Dinas Kesehatan
		Persentase cakupan Balita ditimbang		80		0	0											Dinas Kesehatan
	Peningkatan status gizi	Prevalensi Balita Gizi Buruk	persen	0		1	1.622.766.850		2.221.977.500									Dinas Kesehatan
		Angka balita stunting	persen	12		0	0											Dinas Kesehatan
		Status balita gizi kurang	persen	9		0	0											Dinas Kesehatan
		Cakupan Keluarga Sadar Gizi	persen	94		0	0											Dinas Kesehatan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Remaja Putri dapat Tablet Tambah Darah	persen			0	0											Dinas Kesehatan
		Jumlah balita Kurus mendapat PMT	balita	590	448.200.000	600	126.000.000											Dinas Kesehatan
		Jumlah bumil KEK mendapat PMT	ibu hamil	210	113.400.000	300	63.000.000											Dinas Kesehatan
		Jumlah pelatihan PMBA bagi kader	kader kesehatan	24	51.469.500	84	167.992.000											Dinas Kesehatan
		Jumlah Kegiatan Pertemuan (Workshop, Audit Kasus Gizi Buruk, Sosialisasi, Rakor)	kali	39	93.769.500	129	342.776.100											Dinas Kesehatan
		Jumlah honor Tim Pembina dan wakil pembina	kali	0	0	1	0											Dinas Kesehatan
		Jumlah Antropometri Kit	unit			135	922.998.750											Dinas Kesehatan
	Program pengembangan lingkungan sehat	jumlah desa melaksanakan 5 pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Desa	54	3.057.627.107	0	0											Dinas Kesehatan
	Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan Lingkungan			2.999	0	0	0		727.700.000									Dinas Kesehatan
		Terselenggaranya program kabupaten sehat				0	0											Dinas Kesehatan
		- Terlaksananya sosialisasi Pokja Desa Sehat		2		0	0											Dinas Kesehatan
		- Terlaksananya Rakor Kabupaten Sehat		35		0	0											Dinas Kesehatan
		- Pembinaan pokja/tatapan Kab. Sehat		8		0	0											Dinas Kesehatan
		Workshop Movev Desa Stop BABS		2		0	0											Dinas Kesehatan
		Workshop Evaluasi 5 pilar STBM				0	0											Dinas Kesehatan
		Pelatihan Pemucuan STBM		75		0	0											Dinas Kesehatan
		Pengujian sampel kualitas air		2.000		0	0											Dinas Kesehatan
		Pelatihan laik sehat DAM		2		0	0											Dinas Kesehatan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pelatihan RPAM		2		0	0											Dinas Kesehatan
		Workshop Pamsimas		2		0	0											Dinas Kesehatan
		Validasi data kesling		4		0	0											Dinas Kesehatan
		Penyehatan (Laik Sehat) TPM		4		0	0											Dinas Kesehatan
		Penyehatan (Laik Sehat) TTU		1		0	0											Dinas Kesehatan
		Monev program kesorga		3		0	0											Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Tes Kebugaran Haji		750		0	0											Dinas Kesehatan
		pendampingan pembentukan UKK		50		0	0											Dinas Kesehatan
		Monev UKK		4		0	0											Dinas Kesehatan
		TOT kader kesehatan kerja		55		0	0											Dinas Kesehatan
	Program standarisasi pelayanan kesehatan	Jumlah Puskesmas yang terakreditasi		27	761.343.895	0	0											Dinas Kesehatan
		Jumlah Puskesmas menyusun profil kesehatan		27	150.061.405	0	0											Dinas Kesehatan
		Jumlah akreditasi Rumah Sakit		27	475.661.744	0	0											Dinas Kesehatan
	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan				1.896.099.400	12	448.952.348		991.497.500									Dinas Kesehatan
		Jumlah puskesmas terakreditasi	unit	27	1.078.515.000	10	439.452.348											Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Pendampingan pascaakreditasi	kali	2	205.070.000	2	1.000.000											Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Update Knowledge Pendampingan Akreditasi Puskesmas	orang	50	16.500.000	0	8.500.000											Dinas Kesehatan
	Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	Nilai IKM			100.500.000	0	60.439.300		86.245.500									Dinas Kesehatan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
	- Rapat Koordinasi SIK, IKM	Terlaksananya pelayanan data dan informasi Puskesmas				0	0											Dinas Kesehatan
	- Workshop DEST, PPID					0	0											Dinas Kesehatan
	Pelayanan Kesehatan Rujukan:					199	451.747.890		465.397.500									Dinas Kesehatan
	- Beroperasinya Pelayanan PSC di Kabupaten Bantul					0	0											Dinas Kesehatan
		* Terlaksananya Evaluasi Program PSC	Orang	50	875.000	25	875.000											Dinas Kesehatan
		* Terlaksananya Operasional PSC	kegiatan	1	18.000.000	1	31.500.000											Dinas Kesehatan
		* Terlaksananya Rakor Tim PSC	Orang	80	2.800.000	80	4.207.000											Dinas Kesehatan
		* Terlaksananya Belanja Sewa Komunikasi Integrasi PSC	set	1	162.132.000	1	319.999.200											Dinas Kesehatan
		* Terlaksananya Pengembangan Aplikasi PSC	Aplikasi	1	10.000.000	1	9.900.000											Dinas Kesehatan
		* Terlaksananya Belanja Pakaian Kerja Lapangan PSC	buah	20	6.000.000	40	24.000.000											Dinas Kesehatan
		* Terlaksananya Belanja Pemeliharaan HT dan RPU	kali	4	5.000.000	4	8.750.000											Dinas Kesehatan
		* Terlaksananya Belanja Sewa Frekuensi dan Pajak Radio	set	1	4.000.000	1	1.294.540											Dinas Kesehatan
	- Meningkatnya Pelayanan Kegawatdaruratan dan Penanggulangan Bencana	* Terlaksananya Rapat Koordinasi Supervisor dan Koordinator Posko	Orang	60	2.100.000	60	3.900.000											Dinas Kesehatan
		* Terlaksananya Rapat koordinasi LP/LS Pelayanan Kesehatan Rujukan dan bencana	Orang	200	7.000.000	240	14.000.000											Dinas Kesehatan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		* Terlaksananya Rapat koordinasi kesiapsiagaan Hari Raya Idul Fitri	Orang	160	5.600.000	160	11.200.000											Dinas Kesehatan
		* Terlaksananya Kesiapsiagaan Hari Raya Idul Fitri	Kegiatan	1	30.770.000	1	59.200.000											Dinas Kesehatan
		* Terlaksananya Kesiapsiagaan Hari Besar dan Event Tertentu	Kegiatan	1	18.220.500	2	40.996.125											Dinas Kesehatan
		* Terlaksananya Workshop Primary Health Care Disaster Plan	Orang	70	12.650.000	70	12.650.000											Dinas Kesehatan
		* Terlaksananya Bimbingan Teknis SPGDT	Orang	35	2.225.000	35	4.450.000											Dinas Kesehatan
		* Terlaksananya Workshop Penyusunan rencana penanggulangan bencana dan krisis kesehatan	Orang	60	11.200.000	60	22.400.000											Dinas Kesehatan
	Monev Kualitas Pelayanan RS di Kabupaten Bantul	* Terlaksananya Workshop Manajemen Mutu RS	Orang	80	7.300.000	120	21.900.000											Dinas Kesehatan
	Berdirinya Rumah sakit kelas D di Kabupaten Bantul	* Terlaksananya Workshop perencanaan dan Pelaksanaan operasional RS kelas D	Kegiatan	-	-	0	0											Dinas Kesehatan
		* Terlaksananya Rakor perencanaan dan pelaksanaan operasional RS kelas D	Kegiatan	-	-	0	0											Dinas Kesehatan
		* Terlaksananya Evaluasi Program PSC	Orang	75	3.970.412	0	0											Dinas Kesehatan
		* Terlaksananya Evaluasi Program PSC	Orang	75	3.970.412	0	0											Dinas Kesehatan
	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	Jumlah peserta PBI Jamkesda		100	23.501.805.951	0	21.215.835.423											Dinas Kesehatan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RPKD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RPKD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pelayanan Jamkesda pada UPT Jamkesda	Jumlah pembayaran klaim/bulan	kali			6	6.323.668.399		35.820.000.000									Dinas Kesehatan
		Jumlah pembayaran premi/bulan	kali			6	14.891.987.024											Dinas Kesehatan
		Jumlah pembayaran kalim PSC /bulan	kali			6	180.000											Dinas Kesehatan
	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya	Persentase sarana prasarana Puskesmas memenuhi standar		100	18.731.350.664	26	3.881.134.450											Dinas Kesehatan
	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas		kali			1	583.419.000		2.436.148.000									Dinas Kesehatan
	Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan		kali			9	613.649.884		1.456.842.000									Dinas Kesehatan
	Pembangunan, Perluasan, dan Rehab Puskesmas, Pustu dan Jaringannya					16	743.943.550		2.193.418.000									Dinas Kesehatan
		* Terlaksananya Perluasan Gedung PSC	kali			1	63.531.028											Dinas Kesehatan
		* Terlaksananya Rehab Puskesmas Kretek	kali			1	624.012.522											Dinas Kesehatan
		* Terlaksananya Pengadaan IPAL Puskesmas Kretek	kali			0	0											Dinas Kesehatan
		* Terlaksananya Kegiatan Penunjang Pengadaan Gedung	kegiatan			1	61.050.000											Dinas Kesehatan
	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang bermitra dengan UPT Kesehatan Daerah	institusi	91	354.801.502	12	460.140.000											Dinas Kesehatan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jumlah institusi pendidikan yang menyampaikan laporan hasil kemitraan dibagi jumlah institusi pendidikan yang bermitra pada tahun yang sama dikali 100%		100	117.069.972	0	0											Dinas Kesehatan
	Pendampingan Jamkesda	Jumlah operasional Jamkesda/bulan	kali			12	213.000.000		188.000.000									Dinas Kesehatan
	Kemitraan pelayanan kesehatan	Institusi yang bermitra dengan kesehatan				91	247.140.000		239.315.000									Dinas Kesehatan
	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Cakupan Puskesmas Santun Lansia		22	161.261.698	0	0											Dinas Kesehatan
		Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut		100		0	0											Dinas Kesehatan
	Pelayanan kesehatan Lansia	Puskesmas Santun Usila Strata II	puskesmas	15	18.595.000	0	147.000.000		31.625.000									Dinas Kesehatan
		Jumlah Kegiatan Pertemuan (Workshop dan Rakor)	kali	0	0	4	28.275.000											Dinas Kesehatan
		Jumlah honor Tim Pembina dan wakil pembina Bugar Lansia	kali	0	0	0	0											Dinas Kesehatan
		Jumlah Alat Pemeriksaan Kesehatan	kali			0	0											Dinas Kesehatan
	Program peningkatan pencegahan penyakit tidak menular	Jumlah desa memiliki Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM		76	1.543.751.653	0	1.660.512.000											Dinas Kesehatan
		Pelayanan kesehatan pada usia produktif		100		0	0											Dinas Kesehatan
		Pelayanan kesehatan penderita hipertensi		100		0	0											Dinas Kesehatan
		Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus (DM)		100		0	0											Dinas Kesehatan
		Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat		100		0	0											Dinas Kesehatan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RPKD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RPKD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular					0	0		260.530.500									Dinas Kesehatan
		Jumlah peningkatan kapasitas petugas puskesmas dan rumah sakit	30 kali			7	13.604.800											Dinas Kesehatan
		Jumlah deteksi dini faktor risiko PTM dan keswa	7 kali			2	4.400.000											Dinas Kesehatan
		Jumlah pengadaan barang pendukung kegiatan PTM dan keswa	5 kali			1	54.120.000											Dinas Kesehatan
	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata				1 6.900.505.688	0	23.471.640.000											RSUD
		BOR		80		67	0											RSUD
		LOS		6		5	0											RSUD
		TOI		2		2	0											RSUD
		BTO		50		17	0											RSUD
	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Alat- Alat Kesehatan Rumah Sakit Instalasi Bedah Sentral	alat kesehatan	28	13.888.505.688	1	22.392.659.000		16.461.181.100									RSUD
		Alat- Alat Kesehatan Rumah Sakit CSSD	alat kesehatan	4		0	0											RSUD
		Alat- Alat Kesehatan Rumah Sakit Instalasi Gawat Darurat (IGD)	alat kesehatan	16		10	0											RSUD
		Alat- Alat Kesehatan Rumah Sakit ICCU	alat kesehatan	2		0	0											RSUD
		Alat- Alat Kesehatan Rumah Sakit ICU	alat kesehatan	129		72	0											RSUD
		Alat- Alat Kesehatan Rumah Sakit Instalasi Laboratorium	alat kesehatan	10		0	0											RSUD

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RPKD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RPKD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Alat- Alat Kesehatan Rumah Sakit Instalasi NICU	alat kesehatan	2		0	0											RSUD
		Alat- Alat Kesehatan Rumah Sakit Instalasi PICU	alat kesehatan	73		0	0											RSUD
		Alat- Alat Kesehatan Rumah Sakit Instalasi Radiologi	alat kesehatan	9		0	0											RSUD
		Alat- Alat Kesehatan Unit Laundry Rumah Sakit	alat kesehatan	2		1	0											RSUD
		Alat- Alat Kesehatan Rawat Inap Rumah Sakit	alat kesehatan	24		0	0											RSUD
		Alat- Alat Kesehatan PONEK	alat kesehatan	0		0	0											RSUD
		Pengadaan Bahan Medis (Obat- Obatan) Habis Pakai	paket	1		2	0											RSUD
		Terlaksananya Kegiatan Perjalanan Dinas	kali	1		1	0											RSUD
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Lainnya	Terlaksananya kegiatan pengadaan cetakan promosi rumah sakit	paket	1	1.200.000.000	1	1.078.981.000		6.971.988.600									RSUD
		Terlaksananya kegiatan workshop penjangkaran pelayanan kemitraan	kali	1		1	0											RSUD
		Terlaksananya kegiatan publikasi dan promosi dalam rangka HUT RSUD	paket	1		1	0											RSUD
	Penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita dampak asap rokok	Pengadaan Alat- Alat Kesehatan Rumah Sakit Instalasi Rawat Inap dan Rawat Jalan	unit	2	1.812.000.000	0	0		1.677.214.100									RSUD
	Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit	Terlaksananya Pengadaan Cetakan Rekam Medik	paket	0	0	0	0											RSUD
	Peningkatan sarana promosi kesehatan dan kapasitas SDM	Terlaksananya Kegiatan Promosi Kesehatan Dalam Rangka Hari Kesehatan Nasional	paket	0		0	0											RSUD

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Terlaksananya Kegiatan Character Building	paket	0		0	0											RSUD
		Terlaksananya Pengadaan Papan Nama Rumah Sakit Dalam Rangka Promosi Kresehatan Rumah Sakit	paket	0		0	0											RSUD
		Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Kalender Rumah Sakit dalam rangka Promosi Kesehatan Rumah Sakit	paket	0		0	0											RSUD
		Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Merchandise dan Buku Agenda dalam Rangka Promosi dan Publikasi Rumah Sakit	paket	0		0	0											RSUD
	Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit	Capaian SPM		88	138.224.312.552	78	126.768.757.137											RSUD
		Capaian Evaluasi Kinerja		80		88	0											RSUD
		Nilai AKIP		85		72	0											RSUD
		Capaian Evaluasi Kinerja	angka	80		0	0											RSUD
		Nilai Akip	Angka	85		0	0											RSUD
	Pengelolaan BLUD RSUD	Jumlah Paket Pengelolaan BLUD RSUD	paket	12	138.224.312.552	12	129.476.842.479		138.000.000.000									RSUD
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Nilai AKIP				0	0											Dinas Kesehatan
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Cakupan jembatan tertangani																Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RPKD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RPKD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Program Pembangunan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Cakupan penanganan jalan Kabupaten	km	17	83.376.118.330	17	80.216.041.978											Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Cakupan jembatan tertangani				0	0											Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Jumlah ruas Jalan Kabupaten yang dipelihara	ruas			57	16.171.192.500		10.692.157.000									Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Jumlah jembatan tertangani	unit			6	0											Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	Peningkatan jalan	Jumlah peningkatan jalan kabupaten	ruas			66	64.044.849.478		119.130.685.000									Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Jumlah tanah untuk jalan tersedia	unit			1	0											Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	Program pembangunan rehabilitasi/ pemeliharaan infrastruktur perdesaan	Persentase cakupan penanganan jalan pedesaan	%	18	26.449.026.060	0	31.965.071.200											Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	Pembangunan infrastruktur perdesaan	Jumlah jalan desa terbangun	ruas			95	31.965.071.200		29.367.692.431									Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jumlah Showroom OVOP	unit			1	0											Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Cakupan sarana prasarana kebinamargaan	unit	2	3.019.954.400	2	2.667.513.000											Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	Jumlah alat berat (stom walls) yang dipelihara	unit			15	2.667.513.000		293.696.000									Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Pemeliharaan wheel Loader	unit			0	0											Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	Program pengembangan jasa konstruksi	Persentase usaha jasa konstruksi kriteria baik	%	85	1.328.484.838	1	854.189.500											Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	Pengembangan Jasa Konstruksi	Jumlah pelatihan tenaga terampil	orang			150	656.220.000		696.592.500									Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Jumlah Peningkatan Kapasitas SDM	kali			3	0											Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	Peningkatan Teknologi Informasi	Jumlah Survey kepuasan	jenis			2	197.969.500		192.250.000									Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Digitalisasi data	unit			1	0											Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	Program Pembangunan Gedung	Persentase cakupan gedung pemerintah kondisi baik	%	84	11.480.790.729	1	10.598.192.000											Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	Pembangunan Gedung	Jumlah gedung pemerintah terbangun	unit			20	10.598.192.000		7.723.350.000									Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Cakupan penyediaan air baku	lokasi	13	146.726.205	9	132.065.000											Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana air baku	Jumlah paket pemeliharaan sumur bor	paket			2	132.065.000		55.125.000									Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Cakupan pemanfaatan sumber air/mata air	lokasi	41	1.490.655.964	26	1.323.485.000											Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampung air lainnya	Jumlah paket pembangunan/pemeliharaan embung	paket			5	1.255.725.000		1.061.925.000									Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya air	Jumlah rambu larangan pemanfaatan sumber daya air	unit			27	67.760.000		64.705.000									Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jumlah peserta sosialisasi pemanfaatan sumber daya air	orang			0	0											Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	Perencanaan Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air	Jumlah rambu larangan	unit			0	0											Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Cakupan pengembangan IPAL Komunal	unit	55	14.953.702.910	41	14.882.342.000											Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	Penyediaan sarana dan prasarana air minum dan air limbah	Tersedianya SR Air Limbah Terpusat	kecamatan			3	10.425.631.000		11.856.108.000									Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Jumlah saluran Drainase Lingkungan	unit			26	0											Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Pembangunan IPAL Komunal	unit			6	0											Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	Pengembangan pengelolaan, prasarana dan sarana air minum dan air limbah	Studi air minum dan air limbah	paket			2	152.231.000		308.205.000									Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum dan air limbah	Jumlah Pembangunan SPAM	unit			3	4.304.480.000		10.829.758.000									Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jumlah pembangunan SR Air Minum	paket			3	0											Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Jumlah SPAMDes	paket			3	0											Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Persentase saluran irigasi berfungsi baik	%	82	21.953.857.052	1	18.127.216.505											Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	Perencanaan pembangunan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Jumlah dokumen perencanaan/kajian/studi	dokumen			4	298.560.000		411.055.000									Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Jumlah paket Rehabilitasi/peningkatan jaringan irigasi	paket			41	17.483.279.505		13.280.932.200									Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	Pengelolaan jaringan irigasi					0	0											Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi					0	0											Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	Peningkatan/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Jumlah bahan bangunan pemeliharaan saluran irigasi	paket			9	345.377.000		354.460.000									Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jumlah oli pintu air	liter			487	0											Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Jumlah BBM solar pompa air	liter			5.612	0											Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Jumlah alat alat perlengkapan kerja UPT	paket			9	0											Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase/Gorong-gorong	Cakupan drainase jalan kabupaten tertangani	m	500	12.247.279.866	683	10.074.801.000											Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase/Gorong-gorong	Jumlah talud, drainase dan gorong -gorong terbangun	paket			49	10.074.801.000		11.246.300.000									Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	Program Perencanaan Tata Ruang	Cakupan dokumen tata ruang yang sudah di-perda-kan	Dokumen	4	1.397.711.084	0	948.814.000											Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
	Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang	Bahan Raperda tentang RTRW	Dokumen			1	227.203.500		266.100.000									Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
	Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL	Bahan Raperda tentang RDTR	Dokumen			1	144.580.000		272.700.000									Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
	Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang	sosialisasi tentang Peraturan Perundang-undangan Tentang Rencana Tata Ruang	Desa			4	45.050.000											Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
	Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan	Dokumen Rencana Teknis Ruang	Dokumen			1	76.937.000											Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen RTBL tersusun	Dokumen			3	402.651.000		750.000.000									Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RPKD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RPKD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Studi tentang Tata Ruang	Dokumen Studi tentang Tata Ruang	Dokumen			1	52.392.500		90.525.000									Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang kawasan	Tersusunnya Dokumen RDTR dan PZ	Dokumen			0	0											Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
						0	0											Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase efektifitas penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tanah dan tata ruang	Persentase	80	1.734.994.862	71	1.001.280.500											Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
	Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	Konsolidasi tanah	Bidang			90	489.302.500		837.700.000									Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
		Pengendalian dan monitoring	Kecamatan			6	0											Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
		Audit pemanfaatan tanah tahun 2018	Kecamatan			2	0											Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
	Pengembangan data pemanfaatan ruang	Survei dan penentuan lokasi absolute tanah kas desa dan tanah SG	Peta Desa			3	256.485.000		384.770.000									Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
		Publikasi	Siaran			7	0											Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
	Pengawasan Pemanfaatan Ruang	Digitalisasi pengendalian pemanfaatan ruang	Dokumen			1	255.493.000		251.070.000									Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
		Digitalisasi audit pemanfaatan ruang	Dokumen			1	0											Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
		pendataan asset penyerahan prasarana sarana dan utilitas (PSU) perumahan di 6 Kecamatan	Dokumen			2	0											Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
		penyusunan konsep dan perancangan fasad sebagai citra kota Jl. Jendral Sudirman	Dokumen			1	0											Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RPKD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RPKD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN																	
	Program Pengembangan Perumahan	Persentase penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	%	55	3.119.958.593	1	1.412.430.045											Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan	Jumlah dokumen perencanaan/ studi	dokumen			4	308.323.000		209.680.000									Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	Penyelenggaraan pengembangan perumahan	Dokumen hasil monitoring	dokumen			1	61.754.000		112.150.000									Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Jumlah Sim Perumahan	dokumen			1	0											Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Jumlah Penerima bantuan RTLH	cpb			317	284.155.900		2.711.232.000									Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	Operasional dan pemeliharaan rusunawa empat unit	bulan			12	758.197.145		1.053.885.000									Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Operasional pelayanan sanitasi dan permakaman	bulan			12	0											Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Cakupan kawasan kumuh yang tertangani	lokasi	2	832.198.123	2	732.790.000											Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penanganan Kawasan Kumuh	jumlah kawasan kumuh tertangani	kawas			2	732.790.000		78.300.000									Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	Program Pengelolaan Area Pemakaman	Cakupan Pengembangan TPU	Unit	1	875.201.242	1	627.074.000											Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman	Jalan kompleks TPU Imogiri	unit			1	627.074.000		557.800.000									Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Tersedianya liang lahat TPU Imogiri	paket			1	0											Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman
4	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT																	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program Peningkatan Kesiapsiagaan, Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Cakupan SDM dan Sarpras dalam Penanggulangan Kebakaran	persen	100	786.671.861	280	77.152.000											Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Pencegahan, Pelaksanaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	cakupan kegiatan pencegahan, pelaksanaan dan pengendalian bahaya kebakaran	persen			80	609.428.500		1.515.317.400									Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Pendidikan dan Pelatihan Bahaya Kebakaran	jumlah peserta pendidikan dan pelatihan	Ok			200	77.152.000											Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program Penanganan Kedaruratan Bencana	Persentase Ketersediaan logistik prabencana dan tanggap darurat bencana		90	550.000.000	0	0											Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Kebencanaan	Persentase Ketersediaan data dan informasi kebencanaan		90	330.000.000	0	0											Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana	persen			180	3.262.259.000											Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana		2	3.600.304.535	154	1.631.129.500											Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	jumlah pemantauan dan penyebarluasan informasi bencana serta evakuasi	bulan			12	158.839.000											Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Peningkatan ketrampilan dan kualitas penanggulangan bencana alam	jumlah pelatihan tanggap bencana	desa			14	0											Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Jumlah pengadaan chainsaw		unit	14	14	0											Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Sosialisasi mitigasi penanggulangan bencana alam & sosial	Jumlah pelaksanaan Simulasi/Gladi	kali	desa	981.525.000	7	344.480.000											Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Jumlah peserta Seminar Refleksi Gempa		orang		0	0											Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Jumlah pelaksanaan sosialisasi mitigasi bencana		kali		0	0											Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Jumlah pelaksanaan sarasehan		kali		0	0											Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	pemantauan dan penyaluran bantuan bencana alam	jumlah penyaluran bantuan bencana	Paket			3	231.912.750											Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RPKD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RPKD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengembangan desa siaga bencana	jumlah pelatihan dan pendampingan di 4 desa yg sdh terbentuk desa tangguh bencana	desa			4	54.925.000											Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Gladi posko dan gladi lapang	jumlah gladi posko dan gladi lapang	keg			2	28.375.000											Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Pengembangan budaya sadar bencana	jumlah pengembangan budaya sadar bencana	kali			1	0											Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Penyelenggaraan posko pengendalian bencana	jumlah hari posko kedaruratan bencana	hari			30	27.256.000											Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Penguatan kapasitas satgas BPBD	jumlah satgas yang dilatih	satgas			4	113.368.750											Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Penguatan FPRB	jumlah anggota forum yang difasilitasi	orang			100	48.400.000											Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Pembentukan Sekolah Siaga Bencana	jumlah sekolah yang dibentuk	sekolah			2	74.560.000											Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Pembentukan Desa Tangguh Bencana	jumlah desa yang dibentuk	desa			1	269.773.000											Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Pengembangan Sistem Informasi Kebencanaan	jumlah SIM kebencanaan dan aplikasi yang dibuat	aplikasi			4	74.630.000											Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Pengembangan Sekolah Siaga Bencana	jumlah pengembangan sekolah yang sudah dibentuk	sekolah			4	13.775.000											Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Pembuatan Dokumen Penanggulangan Bencana	jumlah dokumen RPB yang dibuat	dok			2	190.835.000											Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Rawan Bencana	Terfasilitasinya masyarakat korban bencana		2	3.068.360.335	7	705.919.012											Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Bencana					2	150.592.635											Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Relokasi Korban Bencana Alam	jumlah kk yang direlokasi	KK			5	156.826.305											Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Penyiapan Lahan untuk Relokasi Bencana Alam	jumlah lahan yang disiapkan	unit			1	541.092.707											Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Bina Lingkungan Sarpras di Lokasi Korban Bencana Alam	jumlah bantuan drainase utk korban relokasi	kk			1	2.375.000											Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Rehabilitasi Pasca Bencana	jumlah jalan irigasi yang di rehab	unit			0	5.625.000		59.912.500									Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan																Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase cakupan pembinaan wawasan kebangsaan	persen	100	358.231.343	100	279.185.000		236.559.825									Kesatuan Bangsa dan Politik
	Pendidikan Wawasan Kebangsaan	Jumlah peserta workshop, peserta lomba upacara	orang	300	358.231.343	300	279.185.000											Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase FKUB aktif		100	135.470.796	100	114.256.000		8.225.000									Kesatuan Bangsa dan Politik
	Pemantauan orang asing	Jumlah rapat koordinas	orang			60	7.540.000											Kesatuan Bangsa dan Politik
		Jumlah FGD	orang			40	0		99.280.000									Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir PeriodeRPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Pemberdayaan kerukunan antar umat beragama dan etnis	Jumlah pemberdayaan kerukunan umat beragama	orang			280	106.716.000											Kesatuan dan Politik	Bangsa
		Jumlah forum pembauran kebangsaan	orang			160	0											Kesatuan dan Politik	Bangsa
	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Persentase FKDM tingkat kecamatan	persen	100	238.804.440	100	198.830.000		119.162.500									Kesatuan dan Politik	Bangsa
	Pembinaan satuan keamanan lingkungan di masyarakat	Jumlah rakoord rutin	orang			30	81.495.000											Kesatuan dan Politik	Bangsa
		Jumlah FGD PKS	orang			100	0											Kesatuan dan Politik	Bangsa
		Jumlah FGD kominda	orang			100	0		94.727.500									Kesatuan dan Politik	Bangsa
	Pemberdayaan masyarakat untuk kewaspadaan dini dan menjaga keamanan lingkungan	Jumlah rakoord tim	kali			6	117.335.000											Kesatuan dan Politik	Bangsa
		terlaksananya FGD	kali			4	0											Kesatuan dan Politik	Bangsa
		FKDM	kali			0	0											Kesatuan dan Politik	Bangsa
		terlaksananya FGD Pemberdayaan	kali			3	0											Kesatuan dan Politik	Bangsa
	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat)	Angka penyalahgunaan narkoba (Peringkat penyalahgunaan narkoba)		4	101.967.856	4	80.200.000		27.402.500									Kesatuan dan Politik	Bangsa
	Penerbitan dan Konseling pelajar tidak disiplin	Jumlah penerbitan pelajar tidak disiplin	kali			10	42.375.000											Kesatuan dan Politik	Bangsa
		Jumlah konseling di dalam kelas	kali			3	0		14.487.500									Kesatuan dan Politik	Bangsa
	Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Jumlah sosialisasi	orang			160	37.825.000											Kesatuan dan Politik	Bangsa

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RPKD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RPKD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jumlah raker	orang			0	0											Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program perencanaan pembangunan daerah	Tingkat kesesuaian Program Kegiatan Renstra dan Renja				0	0											Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program pendidikan politik masyarakat	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu		150		0	272.682.000											Kesatuan Bangsa dan Politik
				175		0	0											Kesatuan Bangsa dan Politik
					173.019.423	0	0											Kesatuan Bangsa dan Politik
				1		0	0											Kesatuan Bangsa dan Politik
				2		0	0											Kesatuan Bangsa dan Politik
				450		0	0											Kesatuan Bangsa dan Politik
				60		0	0											Kesatuan Bangsa dan Politik
				1		0	0											Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Persentase pelanggaran kantrantibmas yang ditindaklanjuti		100	785.552.903	0	0		2.721.330.000									Satuan Polisi Pamong Praja
	Operasi pengamanan dan Patroli Wilayah	Operasi Pengamanan dan patroli wilayah	Kali			465	701.030.000											Satuan Polisi Pamong Praja
	Program Peningkatan Ketertiban dan Keamanan	Cakupan kawasan Tertib		30	621.199.807	0	562.475.000		364.935.000									Satuan Polisi Pamong Praja
	Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketrentaman Masyarakat	Penanganan Pengaduan Masyarakat	Ok			735	562.475.000											Satuan Polisi Pamong Praja
		Penertiban	Ok			1.856	0											Satuan Polisi Pamong Praja

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir PeriodeRPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPd Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPd tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Ok			250	0											Satuan Polisi Pamong Praja
		Operasi Gabungan	Ok			666	0											Satuan Polisi Pamong Praja
		Pembinaan Satuan Keamanan Lingkungan	Ob			79	0											Satuan Polisi Pamong Praja
		Penanganan Konflik	Ok			486	0											Satuan Polisi Pamong Praja
		Sosialisasi Pedukuhan Sapta tertib	Ok			0	0											Satuan Polisi Pamong Praja
		Safari Kantrantibmas	Ok			100	0											Satuan Polisi Pamong Praja
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Rasio Linmas terhadap Jumlah RT	Persen	80	284.527.178	0	641.350.000		426.642.500									Satuan Polisi Pamong Praja
	Pembinaan dan Penyuluhan dan Keamanan Lingkungan	Peningkatan Kapasitas anggota Satlinmas dalam pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Ok			450	161.000.000											Satuan Polisi Pamong Praja
		Penyuluhan Bina Masyarakat	Ok			385	0											Satuan Polisi Pamong Praja
		Pelatihan Ketrampilan Penyelamatan (rescue) Linmas	Ok			0	0		309.622.500									Satuan Polisi Pamong Praja
	Pemberdayaan Linmas	Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Ok			0	480.350.000											Satuan Polisi Pamong Praja
		Apel siaga linmas	Ok			475	0											Satuan Polisi Pamong Praja
		Pemberdayaan FKDM dan Linmas	Ok			200	0											Satuan Polisi Pamong Praja
		Peringatan Hut Sat Pol PP dan Linmas	Ok			1.400	0											Satuan Polisi Pamong Praja

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Program Penegakan Perda	Persentase pelanggaran Perda yang ditindak	Persentase	95	1.364.925.922	0	0											Satuan Polisi Pamong Praja
	Operasi Penegakan Perda	Operasi Yustisi dan Non Yustisi	Kali			64	378.897.000		352.362.500									Satuan Polisi Pamong Praja
	Pengkajian Pengawasan dan Pengendalian	Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan miras dan narkoba	Ok			150	131.420.000		99.840.000									Satuan Polisi Pamong Praja
		Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi	Ok			100	0											Satuan Polisi Pamong Praja
		Workshop pengembangan kapasitas PPNS dan trantib	Ok			100	0											Satuan Polisi Pamong Praja
		Pengkajian Perda	Ok			0	0											Satuan Polisi Pamong Praja
		Peninjauan lapangan	Ok			11	0											Satuan Polisi Pamong Praja
5	SOSIAL																	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial		90	2.291.200.446	90	8.351.093.100											Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	Jumlah penerima bantuan permakanan; Jumlah lanjut usia yang ditangani; jumlah peserta pelayanan jamkesmas bagi penyandang disabilitas; jumlah ABH yang mengikuti family gathering; jumlah peserta sosialisasi adopsi				9	7.150.187.100		252.875.000									Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Peningkatan kualitas KAMPANYE SOSIAL, pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	jumlah razia anjal, gepeng dan penyakit sosial lainnya; Jumlah jenazah terlanjar yang tertangani; Jumlah klien yang diantar TRC; Jumlah penghuni panti Hafara yang yang terfasilitasi				9	229.160.000		474.307.000									Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	Jumlah peserta pelatihan dan pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial				22	614.237.000		62.880.000									Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Penyuluhan pencegahan peredaran /penggunaan miras dan narkoba serta berkembangnya praktek prostitusi	Jumlah peserta FGD/ workshop anti napza, HANI, sos P4GN; Jumlah peserta pelatihan kader forlanza; Jumlah peserta sosialisasi narkoba; Jumlah lokasi kecamatan senam masal				0	357.509.000		92.440.000									Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Jumlah penerima bantuan permakanan; Jumlah peserta monitoring dan evaluasi PMKS; Jumlah peserta pemetaan PMKS; Jumlah peserta peningkatan pelayanan PMKS				0	0		9.866.873.006									Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan bantuan sosial	Cakupan pemberdayaan masyarakat melalui bantuan bagi keluarga miskin	persen	60	1.788.326.404	55	1.144.835.900											Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Pemberdayaan manajemen usaha bagi keluarga miskin	Jumlah KUBE berprestasi	KUBE	70	207.026.800	17	76.055.000		77.515.000									Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir PeriodeRPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Sosialisasi, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan bantuan bagi WARGA miskin	Jumlah Program keluarga harapan (PKH); Jumlah Perempu nwan sosial ekonomi (WRSE)			881.351.600	17	595.677.500		433.552.500									Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Pendampingan, Pemantauan dan Penyaluran Bantuan	Jumlah penerima bantuan BPNT; Jumlah penerima bantuan RTLH; Jumlah penerima bantuan TAGANA; jumlah penerima bantuan korban bencana			699.948.004	17	473.103.400		769.121.000									Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	Cakupan kemndirian lembaga kesejahteraan sosial	persen	75	1.327.938.962	65	1.154.855.400											Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Jumlah SDM yang doberikan pelatihan / sosialisasi kesejahteraan sosial			652.182.600	22	555.315.400		422.189.850									Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Pendampingan Kegiatan Karang taruna	Jumlah peserta organisasi karang taruna yang memperoleh fasilitasi kegiatan			315.606.362	93	272.715.000		142.609.600									Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Peningkatan Kualitas Kesetiakawanan sosial nasional	Jumlah peserta HKSN; Jumlah makam pahlawan dan monument yang dipelihara; Jumlah peserta sepeda sehat perjuangan			360.150.000	20	326.825.000		183.584.400									Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Program pelayanan pendataan jaminan bantuan sosial	Cakupan pelayanan data kepesertaan jaminan kesehatan sosial	persen	100	1.353.580.137	100	1.178.142.830											Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Updating Keluarga Miskin	Jumlah kebutuhan updating basis data terpadu			480.963.095	17	434.271.250		440.459.738									Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir PeriodeRPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RPKD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RPKD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyusunan Data Base KK Miskin Penerima Bantuan	Jumlah data base KK miskin penerima bantuan			872.617.042	17	743.871.580		1.127.460.350									Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
6	KETENAGAKERJAAAN																	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
		Angka Kemiskinan																Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
	Program penempatan tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	persen	87	394.926.607	84,5	482.102.360											Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
	Penyuluhan ketenagakerjaan	Jumlah peserta penyuluhan ketenagakerjaan	orang			135	101.445.000		196.989.500									Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
	Penempatan pencari kerja	Jumlah Pencari Kerja Yang ditempatkan	orang			3.245	380.657.360		56.350.000									Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
	Program perluasan kerja	Persentase tenaga kerja yang berwirausaha	persen	75	20.822.905.781	71,5	21.972.877.597											Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
	Kegiatan terapan teknologi tepat guna	Jumlah Peserta TTG	Jumlah Peserta TTG			40	94.270.000		91.070.000									Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
	Kegiatan Padat Karya Produktif dan Infrastruktur	Jumlah lokasi padat karya	lokasi			216	21.819.257.597		17.290.000.000									Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
	Pemanduan dan Pembinaan Usaha Tenaga Kerja Lansia dan Penyandang Cacat	Jumlah Peserta Pemanduan dan Pembinaan Usaha Tenaga Kerja Lansia dan Penyandang Cacat	orang			60	59.350.000		54.550.000									Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase pencari kerja yang menyerap informasi bursa kerja	persen	87	596.147.199	83,2	556.472.900											Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
	Penanggulangan permasalahan ketenagakerjaan	Jumlah tindakan pencegahan yang dilakukan diperusahaan/LPTKIS/PPTKIS	kali			10	17.400.000		13.900.000									Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
	Penyusunan dan penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	Jumlah lowongan yang tersedia	orang			3.115	539.072.900		556.550.000									Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
		Jumlah peserta sosialisasi informasi bursa tenaga kerja	orang			1.500	0											Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
		jumlah kegiatan bantul expo	orang			1	0											Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
	Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja	Presentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	persen	85	2.286.774.251	77,5	1.856.012.250											Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
	Kegiatan Pembinaan LPK	Jumlah Peserta Workshop Pembinaan LPK	orang			50	208.966.750		149.079.650									Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
		Jumlah Peserta Bimtek dari LPK	orang			20	0											Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
		Jumlah LPK Penerima Subsidi Program	LPK			10	0											Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
	Pemberdayaan Wirausaha bagi Lulusan Pelatihan	Jumlah Peserta Pemberdayaan Wirausaha bagi lulusan pelatihan	orang			60	153.572.000		53.500.000									Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
	Pemagangan / OJT Mantan Peserta Pelatihan di Perusahaan	Jumlah Peserta Pemagangan Tenaga Kerja di Perusahaan	orang			40	180.591.000		225.612.500									Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
		Jumlah peserta Sosialisasi Pemagangan	orang			40	0											Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
	Uji kompetensi peserta latihan di BLK	Jumlah Peserta uji kompetensi	orang			32	32.277.550		32.580.000									Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir PeriodeRPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RPKD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RPKD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%			12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Pengukuran Produktifitas Tenaga Kerja	Jumlah karyawan perusahaan/ IKM yang terlatih pada pelatihan analisis pengukuran produktivitas tenaga kerja	orang			120	0		373.498.750									Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	
	Sosialisasi dan Pelatihan Tentang Produktifitas Tenaga Kerja	Jumlah peserta yang terlatih dari Karyawan Perusahaan/ IKM tentang produktivitas tenaga kerja	orang			0	0											Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	
	Pelatihan Menjahit	Jumlah Peserta Pelatihan	orang			64	170.722.400		311.325.000									Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	
	Pelatihan mekanik	Jumlah Peserta Pelatihan	orang			48	119.223.400		163.065.000									Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	
	Pelatihan teknisi	Jumlah Peserta Pelatihan	orang			16	36.159.500		129.935.000									Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	
	Pelatihan mebelair	Jumlah Peserta Pelatihan	orang			16	45.818.900		92.715.000									Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	
	Pelatihan juru las	Jumlah Peserta Pelatihan	orang			16	48.043.900		198.760.000									Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	
	Pelatihan software	Jumlah Peserta Pelatihan	orang			48	142.669.700		174.425.000									Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	
	Pelatihan tata boga	Jumlah Peserta Pelatihan	orang			64	186.674.000		74.955.000									Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	
	Pelatihan Batik tulis	Jumlah Peserta Pelatihan	orang			16	59.528.500		40.680.000									Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	
	Pelatihan bahasa inggris	Jumlah Peserta Pelatihan	orang			16	52.737.000		51.275.000									Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RPKD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RPKD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Penetapan nilai kebutuhan hidup layak	rupiah	1.773.479	1.013.606.015	1.649.800	868.949.800											Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
	penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Jumlah penyelesaian perselisihan HI	kasus			55	266.086.000		224.222.000									Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
	penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Kegiatan Sosialisasi Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial	orang			240	65.770.000		297.333.500									Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	Jumlah peserta sosialisasi	orang			250	54.860.000											Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
	Pendampingan dewan pengupahan	Jumlah kegiatan pendampingan Dewan pengupahan	kali			27	100.765.400		116.925.000									Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
	Pemberdayaan lembaga kerjasama tripartit daerah	Jumlah peserta kegiatan sosialisasi pelaksanaan LKS bipartit	orang			260	57.025.000		57.900.000									Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
	bimbingan teknis penyelesaian perselisihan industrial	Jumlah Peserta yang mengikuti Bimbingan Teknik Penyelesaian Perselisihan hubungan industrial	orang			300	91.590.000		91.700.000									Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
	Peningkatan Kesejahteraan Pekerja	Jumlah peserta peringatan Hari Buruh Internasional (May Day)	orang			1.200	131.300.000		129.350.000									Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
	Pendampingan Pembuatan Persyaratan kerja	Jumlah peserta sosialisasi sinergitas sarana persyaratan kerja	orang			220	46.930.000		91.632.500									Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
	Pemberdayaan Sarana Kesejahteraan Kerja	Jumlah peserta Pendampingan dan Pembinaan SP/SB, dan Sosialisasi BPJS Kepada Karyawan Perusahaan	orang			180	54.623.400		67.800.000									Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK																	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Cakupan Desa dan Kecamatan Layak Anak		80	284.527.178	70	288.591.000		15.857.750									Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Pelaksanaan sosialisasi dan KIE kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Sosialisasi dan advokasi				18	54.880.000		101.797.183									Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Pengembangan Kabupaten Layak Anak	sosialisasi dan pelatihan				17	181.016.000		43.880.892									Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Operasional Sekretariat Forum Anak Bantul	Partisipasi Fonaba				4	52.695.000											Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah		30	244.706.388	30	192.769.590		33.820.643									Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Penyusunan pilah gender dan pemberdayaan Perempuan dan anak	Terlaksananya Pengolahan Updating dan Analisis Data Gender				80	30.105.000		74.820.000									Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Pelatihan Bimbingan Manajemen Usaha, Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Pelatihan tentang pemahaman KDRT bagi Guru BK, Pelatihan kelompok desa prima, Pelatihan & penguatan kelembagaan				50	55.899.990		32.682.000									Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Operasional Gabungan Organisasi Wanita	Rakor & peringatan Hari Kartini dan hari ibu				22	49.359.600		48.975.000									Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Penunjang Kegiatan Dharma Wanita	Kegiatan DWP				54	57.405.000											Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Presentasi penanganan korban kekerasan perempuan dan anak		100	520.534.112	100	452.710.900		262.362.000									Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Pendampingan upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	Penanganan kasus				320	287.230.900		66.195.000									Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Peningkatan SDM Forum Penanganan Korban Kekerasan dan Pengegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang	Pelatihan & rakor FPKK				3	92.185.000		71.890.000									Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Pelaksanaan Pemulihan dan Penjangkauan Lingkungan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak					0	73.295.000											Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8	PERTANAHAN																	
	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Cakupan penyelenggaraan pelayanan pertanahan dan ruang	persentase	100	186.290.172	93	125.991.480											Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
	Inventarisasi Tanah Kas Desa	Jumlah database terupdate	Desa			75	27.425.000		28.100.000									Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
		Jumlah peserta sosialisasi	Orang			80	0											Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Persetifkation dan Sewa Tanah Pemerintah DIY	Jumlah pendaftaran berkas dan pembayaran ke kantor pertanahan	Bidang			64	50.216.480		31.050.000									Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
		Sosialisasi	Orang			200	0											Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
	Pemanfaatan Tanah SG	Permohonan surat kekancingan / Rekomendasi Bupati	Dokumen			36	48.350.000		77.875.000									Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
	Persertifikatan Tanah Warga (PRODA)	Terdaptarnya tanah milik warga	Dokumen			0	0											Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
						0	0											Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
	Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Angka penanganan konflik pertanahan	Angka	20	36.448.435	15	31.325.000											Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
	Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Jumlah permasalahan pertanahan yang ditangani / difasilitasi	Buah			15	31.325.000		70.000.000									Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
		Jumlah Peserta sosialisasi konflik pertanahan	Orang			70	0											Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
		Jumlah Peserta FGD konflik pertanahan	Orang			30	0											Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
9	LINGKUNGAN HIDUP																	Dinas Lingkungan Hidup
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup																Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Konsentrasi DO (dissolved oxygen) di Sungai Winongo (Satuan: mg/L)	mg/l	8	8.474.416.319	8	7.381.824.563											Dinas Lingkungan Hidup
	Pengkajian dampak lingkungan	Jumlah Pembangunan IPAL Biogas	Unit			1	5.540.797.188		5.229.405.000									Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah dokumen AMDAL IPAL Jaringan Desa Sumbermulyo	Dokumen			1	0											Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah Pembangunan IPAL Tahu Tempe	Unit			4	0											Dinas Lingkungan Hidup

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
		Jumlah Sungai Terpantau Kualitas Airnya (5 sungai 15 titik)	sungai			5	0											Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah Lokasi Terpantau Kualitas Udara Ambient	Lokasi			6	0											Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah Pembangunan IPAL Terpadu	Unit			1	0											Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah penyusunan DED IPAL Desa Sumbermulyo	Dokumen			0	0											Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah IPAL Biogas	unit			0	0											Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah Buku Laporan GRK	dokumen			0	0											Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah pemantauan kualitas air sungai	kali			0	0											Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah Buku Kajian Sistem Pengolahan Limbah Cair Domestik Berbasis Masyarakat	dokumen			0	0											Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah Buku Kajian Daya Tampung Beban Pencemar di Sungai Code	dokumen			0	0											Dinas Lingkungan Hidup
	Pengembangan kapasitas laboratorium lingkungan hidup	Jumlah Alat Perlengkapan Lapangan Pemantauan	set			5	738.482.925		327.230.000									Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah Pengadaan Bahan Kimia	kali			8	0											Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah Pengujian Kualitas	kali			11	0											Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah Uji Profisiensi	kali			1	0											Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah Pembayaran iuan KAN dan Surveilien	kali			1	0											Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah Kursus Teknis Personil Laboratorium	kali			4	0											Dinas Lingkungan Hidup

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RPKD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RPKD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jumlah Dokumen Penelitian Pembuatan Dokumen Mutu Lingkungan	dokumen			1	0											Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah alat laboratorium	jenis			5	0											Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah Data Kualitas Lingkungan untuk Menunjang Pelaksanaan SKPD	data			0	0											Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah Pengujian Kualitas LingkunganJumlah Pengujian Kualitas Lingkungan	kali			0	0											Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah Alat Laboratorium	set			0	0											Dinas Lingkungan Hidup
	Pengendalian Kerusakan Lingkungan Alami dan Buatan	Jumlah Penanaman Bibit Tanaman Bekas Lahan Pertambangan	Batang			15.750	1.102.544.450		867.990.000									Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah Dokumen Kajian Tambang Karst	Dokumen			1	0											Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah pengadaan bangunan IPAL Terpadu Kawasan Industri Piyungan	Unit			1	0											Dinas Lingkungan Hidup
	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Angka penurunan konsentrasi SO2 di udara ambien				0	0											Dinas Lingkungan Hidup
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Penambahan luasan tutupan lahan di kawasan lindung (sempadan pantai, mata air, lahan kritis) (Satuan: Ha/tahun)	ha/th	1	4.360.156.491	1	5.696.103.562											Dinas Lingkungan Hidup
	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air	DED Telaga Desa di Kec Dlingo	Dokumen			1	923.875.000		1.009.685.000									Dinas Lingkungan Hidup
		kajian mutu air di Kawasan TPA Piyungan	Dokumen			1	0											Dinas Lingkungan Hidup
		Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK)	Dokumen			1	0											Dinas Lingkungan Hidup

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir PeriodeRPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RPKD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RPKD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		kajian penelitian konservasi sungai	Dokumen			1	0											Dinas Hidup	Lingkungan
		Poster Lingkungan Hidup	Buah			4.730	0											Dinas Hidup	Lingkungan
		Pengadaan Casing Biopori	Unit			750	0											Dinas Hidup	Lingkungan
		Pengadaan Biopori	Unit			175	0											Dinas Hidup	Lingkungan
		pembuatan SPAH	Unit			1	0											Dinas Hidup	Lingkungan
		Kajian /Study Kualitas Air Dan Tingkat Pencemaran Air Sungai	Dokumen			1	0											Dinas Hidup	Lingkungan
		Jumlah baliho konservasi sumber daya air	unit			0	0											Dinas Hidup	Lingkungan
	Koordinasi pengelolaan konservasi SDA	Jumlah bibit tanaman sepadan mata sungai	Batang			2.500	907.285.500		775.805.000									Dinas Hidup	Lingkungan
		Jumlah bibit mangrove	Batang			10.000	0											Dinas Hidup	Lingkungan
		Jumlah bibit tanaman lahan kritis	Batang			4.000	0											Dinas Hidup	Lingkungan
		Jumlah evaluasi Kalpataru	Kategori			4	0											Dinas Hidup	Lingkungan
		Jumlah bibit tanaman penghijauan lingkungan	Batang			10.000	0											Dinas Hidup	Lingkungan
		Jumlah bibit tanaman sepadan sungai	Batang			2.500	0											Dinas Hidup	Lingkungan
		Jumlah pengadaan bibit tanaman	Batang			0	0											Dinas Hidup	Lingkungan
	Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem	Jumlah pembangunan taman	Taman			7	3.864.943.062		3.194.910.000									Dinas Hidup	Lingkungan
		Jumlah kajian pengembangan RTH Kota sebagai sarana publik	Dokumen			1	0											Dinas Hidup	Lingkungan
		Jumlah penanaman bibit tanaman	Batang			750	0											Dinas Hidup	Lingkungan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
		Jumlah Landcape Hutan Kota di Kec Bantul	Dokumen			1	0											Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah penyusunan DED Telaga Desa Caturharjo	Dokumen			1	0											Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah kajian penyusunan RTH di Kecamatan Sedayu	Dokumen			1	0											Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah kajian penyusunan RTH di Kecamatan Sewon	Dokumen			1	0											Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah penyusunan DED Telaga Desa Imogiri	Dokumen			1	0											Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah buku kajian lingkungan pemanfaatan pasar Piyungan	dokumen			0	0											Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah buku kajian lingkungan pemanfaatan pasar Ngipik	dokumen			0	0											Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah DED RTH Kcamatan Kasihan	dokumen			0	0											Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah DED RTH Kcamatan Banguntapan	dokumen			0	0											Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah DED RTH Kcamatan Piyungan	dokumen			0	0											Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah DED Telaga Desa Kec Piyungan	dokumen			0	0											Dinas Lingkungan Hidup
	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah Sekolah Adiwiyata				0	0											Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah Usaha/Kegiatan di Kab. Bantul yang memiliki dokumen lingkungan/UKL/UPL)	Dokumen	842	918.517.012	600	1.025.195.500											Dinas Lingkungan Hidup
	Pengembangan data dan informasi lingkungan	Jumlah dokumen KLHS	dokumen			2	658.097.000		520.305.000									Dinas Lingkungan Hidup

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Jumlah aplikasi dokumen lingkungan	aplikasi			1	0											Dinas Lingkungan Hidup	
		Jumlah peserta sosialisasi dokumen lingkungan	orang			600	0											Dinas Lingkungan Hidup	
		Tersedianya data lingkungan	dokumen			2	0											Dinas Lingkungan Hidup	
		Tersedianya aplikasi dokumen lingkungan hidup	aplikasi			1	0											Dinas Lingkungan Hidup	
		Jumlah sosialisasi tentang DPLH untuk sekolah	kali			0	0											Dinas Lingkungan Hidup	
	Penyusunan data sumberdaya alam dan neraca sumberdaya hutan (NSDH) nasional dan daerah	Jumlah peserta FGD penyusunan IKPLHD	orang			50	76.300.000		75.975.000									Dinas Lingkungan Hidup	
		Jumlah dokumen IKPLHD	dokumen			1	0											Dinas Lingkungan Hidup	
		Terlaksananya penyusunan dokumen IKPLHD	dokumen			1	0											Dinas Lingkungan Hidup	
		Jumlah workshop lingkungan hidup	kali			0	0											Dinas Lingkungan Hidup	
		Jumlah data kualitas lingkungan hidup	dokumen			0	0											Dinas Lingkungan Hidup	
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah peserta workshop pelaporan dokumen lingkungan	orang			850	122.150.000		40.625.000									Dinas Lingkungan Hidup	
		Terlaksananya workshop pelaporan dokumen lingkungan	kali			17	0											Dinas Lingkungan Hidup	
		Jumlah sosialisasi tentang dokumen lingkungan	kali			0	0											Dinas Lingkungan Hidup	
	Penyelesaian Aduan dan Sengketa Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen KLHS	persen			100	80.193.500		64.875.000									Dinas Lingkungan Hidup	
		Jumlah aplikasi dokumen lingkungan	orang			3	0											Dinas Lingkungan Hidup	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RPKD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RPKD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12	
		Jumlah peserta sosialisasi dokumen lingkungan	kali			250	0											Dinas Lingkungan Hidup	
		Jumlah aduan terselesaikan	aduan			0	0											Dinas Lingkungan Hidup	
	Penyusunan Raperda Lingkungan Hidup	Jumlah penyusunan Naskah Akademik Raperda RPPLH	dokumen			1	88.455.000		47.730.000									Dinas Lingkungan Hidup	
		Jumlah peserta sosialisasi putaran perundang - undangan bidang LH	orang			300	0											Dinas Lingkungan Hidup	
		Jumlah penyusunan Peraturan Bupati (Perbup Penataan Lahan dan Perbup Penerapan Sanksi Administrasi LH)	Perbup			2	0											Dinas Lingkungan Hidup	
		Jumlah rancangan peraturan bupati	Raperbup			0	0											Dinas Lingkungan Hidup	
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Jumlah kelompok pengelola sampah (Satuan: kelompok)	kelompok	145	9.359.199.194	157	7.772.131.633											Dinas Lingkungan Hidup	
	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Jumlah gerobak sampah	unit			38	4.692.371.599		3.797.030.000									Dinas Lingkungan Hidup	
		Pengadaan Pick Up Operasional Sampah	unit			1	0											Dinas Lingkungan Hidup	
		Jumlah Chain Saw	unit			5	0											Dinas Lingkungan Hidup	
		Jumlah Mesin Pemotong Rumput	unit			10	0											Dinas Lingkungan Hidup	
		Jumlah Mesin Pencacah Sampah Organik	unit			31	0											Dinas Lingkungan Hidup	
		Jumlah pengadaan kendaraan roda tiga	unit			18	0											Dinas Lingkungan Hidup	
		Jumlah pengadaan container	unit			10	0											Dinas Lingkungan Hidup	
		Jumlah Mesin Pencacah Sampah Plastik	unit			2	0											Dinas Lingkungan Hidup	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RPKD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RPKD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12	
		Jumlah Belanja Kantong pilah sampah	set			4.000	0											Dinas Lingkungan Hidup	
		Jumlah pengadaan komposter	unit			0	0											Dinas Lingkungan Hidup	
		Jumlah pengadaan Dump Truck	unit			0	0											Dinas Lingkungan Hidup	
		Jumlah pengadaan Arm Roll	unit			0	0											Dinas Lingkungan Hidup	
		Jumlah pengadaan tong sampah pilah 3	set			0	0											Dinas Lingkungan Hidup	
		Jumlah pengadaan alat penyemprot pestisida	unit			0	0											Dinas Lingkungan Hidup	
		Jumlah pembangunan rumah pilah sampah desa/dusun	unit			0	0											Dinas Lingkungan Hidup	
		Jumlah pembangunan depo sampah	unit			0	0											Dinas Lingkungan Hidup	
		Jumlah pengadaan Sky lift	unit			0	0											Dinas Lingkungan Hidup	
		Jumlah pengadaan pakaian kerja lapangan	unit			0	0											Dinas Lingkungan Hidup	
		Jumlah pengadaan Back Hoe Loader	unit			0	0											Dinas Lingkungan Hidup	
	Kerjasama pengelolaan persampahan	Jumlah Sharing Sekber Kartamantul	kali			0	1.335.351.634		1.435.780.000									Dinas Lingkungan Hidup	
		Jumlah Pembayaran Upah Pungut Masyarakat	kali			0	0											Dinas Lingkungan Hidup	
		Jumlah kontribusi sampah TPA Piyungan	kali			0	0											Dinas Lingkungan Hidup	
		Jumlah pelaksanaan kegiatan bersih sungai	kali			0	0											Dinas Lingkungan Hidup	
		Jumlah pelaksanaan pelatihan pengelolaan persampahan	kali			0	0											Dinas Lingkungan Hidup	
		Jumlah laporan kinerja pengelolaan persampahan	dokumen			0	0											Dinas Lingkungan Hidup	
		Jumlah pelaksanaan pertemuan saka kalpataru	kali			0	0											Dinas Lingkungan Hidup	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RPKD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RPKD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
		Jumlah pelaksanaan pertemuan JPSM	kali			0	0											Dinas Lingkungan Hidup
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah pengadaan alat pengolah Limbah B3 Puskesmas	unit			0	221.905.000		18.680.000									Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah peserta sosialisasi Limbah B3	orang			0	0											Dinas Lingkungan Hidup
		Meningkatnya pemahaman tentang pengelolaan Limbah B3	orang			0	0											Dinas Lingkungan Hidup
		Terkelolanya Limbah B3 di Puskesmas	puskesmas			0	0											Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah peserta sosialisasi tentang limbah dan penanganan limbah B3	orang			0	0											Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah pendampingan penanganan limbah B3	kali			0	0											Dinas Lingkungan Hidup
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah lokasi kegiatan kampung hijau dan proklam	lokasi			11	1.068.270.900		672.900.000									Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah peserta Workshop sekolah Adiwiyata	orang			100	0											Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah peserta workshop forum komunikasi lingkungan	orang			100	0											Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah lokasi kegiatan pondok pesantren berwawasan lingkungan	lokasi			5	0											Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah peserta sosialisasi sekolah Adiwiyata	orang			600	0											Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah peserta Workshop JPSM	orang			50	0											Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah sekolah adiwiyata	sekolah			0	0											Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah pelaksanaan peringatan hari-hari LH	kali			0	0											Dinas Lingkungan Hidup

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jumlah pontren berwawasan LH	lokasi			0	0											Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah peserta workshop Forkom LH	kali			0	0											Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah pelaksanaan evaluasi kampung hijau/ proklam	kali			0	0											Dinas Lingkungan Hidup
	Evaluasi Adipura	Jumlah lokasi pemantauan titik pantau adipura	lokasi			31	454.232.500	302.155.000										Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah evaluasi kebersihan kantor tingkat kecamatan	kali			1	0											Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah evaluasi Adipura	kali			2	0											Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah Buku Profil LH	dokumen			1	0											Dinas Lingkungan Hidup
		Terwujudnya keindahan dan kebersihan kota/wilayah	lokasi			31	0											Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah peserta lomba kebersihan kantor	kali			0	0											Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah buku profil DLH	dokumen			0	0											Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah publikasi melalui TV dan radio	kali			0	0											Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah pemantauan titik pantau Adipura	kali			0	0											Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah dokumen studi penelitian	dokumen			0	0											Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah naskah Akademik	dokumen			0	0											Dinas Lingkungan Hidup
10	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Kepemilikan Kartu Keluarga		100	3.195.987.999	0	3.289.983.154											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Kepemilikan KTP_EL		99		0	0											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
	Pelaksanaan KIA (Kartu Identitas Anak)					0	886.974.688		414.850.000									Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Uang Lembur PNS	OK			110	1.450.000											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Uang Lembur Non PNS	OK			0	0											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Belanja ATK	Tahun			323	561.434.288											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Belanja Cetak	Kpg/Rim			56.670	309.790.400											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat	OK			193	3.375.000											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Lembur	OM			850	10.925.000											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Pelayanan Mutasi Penduduk					0	30.790.000		63.288.000									Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Unag Lembur PNS	OL			400	5.500.000											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Unag Lembur Non PNS	OL			0	0											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Belanja ATK	BH			400	5.000.000											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Penggandaan	Lbr			1.250	312.500											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Sewa Gedung /Tempat / Kantor	Kali			1	800.000											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir PeriodeRPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPd Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPd tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat	OM			40	700.000											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Lembur	OM			599	9.977.500											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	OM			200	3.500.000											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Honor Peserta Seminar/ Simposium/Sosialisasi/ Workshop	OH			100	5.000.000											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan					0	98.929.000											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Honor Panitia Pelaksana Kegiatan	Data			3.500	7.000.000											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Uang Lembur PNS	OL			450	5.745.000											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Uang Lembur PNS	OL			0	0											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Belanja ATK				1.750	17.500.000											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Belanja Penggandaan	Lbr			30.000	7.500.000											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Belanja Sewa Gedung/Tempat/ Kantor	Kali			7	7.000.000											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat	OM			500	8.750.000											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Lembur	OM			649	11.234.000											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	OM			840	14.700.000											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Honor Nara Sumber/ Moderator/ Tenaga Ahli	Jpl			4	2.000.000											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Honor Peserta Seminar/ Simposium/ Sosialisasi/ Workshop	OH			350	17.500.000											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Peningkatan Kebijakan Mutu Publik Dalam Bidang SDM					0	318.435.500		97.424.000									Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Uang Lembur PNS	OL			350	5.000.000											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Uang Lembur Non PNS	OL			0	0											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat	OM			1.500	26.250.000											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Lembur	OM			849	8.737.500											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Belanja Bimbingan Teknis / BINTEK	Paket			80	40.350.000											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Jasa Petugas Entry Data dan Digital SIG entry data Kependudukan	Data			93.000	193.248.000											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Belanja Jasa Pengadaan Aplikasi	Aplikasi			1	44.850.000											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK)					0	1.954.853.966											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Belanja ATK	Tahun			0	698.243.000											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Belanja Telekomunikasi	Bln			10	4.000.000											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Belanja Publikasi	Bulan			5	30.900.000											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Belanja Cetak	Bulan			32.526	867.053.964											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Belanja Penggandaan	Tahun			32.526	18.004.000											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Belanja Sewa Gedung / Tempat/ Kantor	Kali			5	2.000.000											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Om			400	14.000.000											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	OM			400	14.000.000											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	OK			1.218	86.900.000											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	OA			47	134.173.002											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Honor Nara Sumber/ Moderator/ Tenaga Ahli	Oh			68	17.350.000											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Belanja Jasa Petugas Foting / Fumigasi	Paket			825	57.750.000											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RPKD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RPKD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jumlah Honor Peserta Seminar/ Simposium/ Sosialisasi/ Workshop	OH			0	10.480.000											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Program Kesenjangan Kebijakan Kependudukan	Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun		96	1.364.925.923	0	1.110.443.000											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Kepemilikan Akta Kematian		75		0	0											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Pengelolaan Dokumen Pencatatan Sipil				395.900.000	0	315.130.000		301.695.000									Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Honor Panitia Pelaksanaan Kegiatan	OL	900		0	135.000.000											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Uang Lembur PNS	OL	250		419	5.790.000											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Uang Lembur Non PNS	OL	55		0	0											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Belanja ATK	Tahun	1		0	25.535.000											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Belanja Penggandaan	Tahun	1		8.199	128.605.000											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat	OM	150		480	10.200.000											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Lembur	OM	175		500	10.000.000											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Sinkronisasi Kebijakan				173.019.423	0	204.398.000		35.400.000									Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan	Tahun	1		10	27.000.000											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
		Jumlah Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa	OK	2		6	1.700.000											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Uang Lembur PNS	OL	450		448	5.970.000											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Uang Lembur Non PNS	OL	60		0	0											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Belanja Cetak	Tahun	1		0	78.078.000											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat	OM	650		1.000	17.500.000											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Lembur	OL	300		500	8.300.000											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Belanja Pakaian Kerja Pelayanan	BH	100		95	53.050.000											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Belanja Jasa Petugas Entry Data dan Digital SIG	OB	25.000		64	12.800.000											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Inovasi Pelayanan Akta Kelahiran dan Kematian				796.000.600	0	590.915.000		768.850.000									Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Honor Panitia Pelaksana Kegiatan	Bulan	12		999	560.300.000											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Uang Lembur PNS	OL	195		497	6.615.000											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Uang Lembur Non PNS	OL	90		0	0											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat	OM	650		700	12.250.000											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RPKD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RPKD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Lembur	OM	500		600	11.750.000											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						0	0											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Program Pengelolaan Data Kependudukan	Persentase instansi yang memanfaatkan data penduduk Disdukcapil		95	522.592.118	0	670.548.750											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Pemutakhiran Data Kependudukan				90.674.000	0	71.745.000		86.526.000									Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa	OK	3		3	850.000											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Uang Lembur PNS	OL	145		120	1.800.000											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Uang Lembur Non PNS	OL	35		0	0											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Belanja ATK	Tahun	1		200	10.000.000											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Belanja Cetak	Tahun	1		24	3.600.000											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Belanja Penggandaan	Tahun	1		5.800	1.450.000											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Belanja Sewa Gedung/ Tempat	Tahun	1		3	1.500.000											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat	OM	750		500	8.745.000											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Lembur	OM	750		160	3.000.000											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	OM	750		400	7.000.000											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Honor Peserta Seminar/ Simposium/Sosialisasi/Workshop	OH	500		200	9.000.000											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Belanja Jasa Pengadaan Aplikasi	Aplikasi	1		1	24.800.000											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Honor Narasumber/Moderator/Tenaga Ahli	OA	3		0	0											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Publikasi Kebijakan Kependudukan				209.378.118	0	418.648.750		148.826.000									Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Belanja ATK	Set	650		750	87.000.000											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Belanja Publikasi	Bulan	12		0	45.140.000											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Belanja Penggandaan	Lbr	1.780		18.200	31.348.750											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Belanja Sewa Gedung/ Tempat	Kali	2		2	1.500.000											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Belanja Sewa Peralatan Display	Keg	2		2	39.900.000											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat	OM	100		600	10.500.000											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	OM	1.900		1.500	70.560.000											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jumlah Honor Nara Sumber / Moderator/ Tenaga Ahli	Jpl	40		36	33.000.000											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Belanja Jasa Harian Lepas / Penjaga Bantul Expo	OH	35		22	2.200.000											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Belanja Honor Peserta Seminar/ Simposium/ Sosialisasi/ Workshop	OH	850		750	90.000.000											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Belanja Jasa Transport Petugas Stand Bantul Expo	OH	115		150	7.500.000											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Penyusunan Buku Profil Kependudukan				86.400.000	0	66.985.000		59.721.000									Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa	OK	3		3	850.000											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Uang Lembur PNS	OL	95		74	1.110.000											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Uang LemburNon PNS	OL	65		0	0											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Belanja ATK	Set	350		200	10.000.000											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Belanja Cetak	Buku	80		120	29.800.000											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Belanja Sewa Gedung/ Tempat/ Kantor	Kali	3		2	1.500.000											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat	OM	285		200	7.000.000											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Tamu	OM	40		90	2.250.000											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RPKD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RPKD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Lembur	OM	450		200	6.475.000											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Honor Peserta Seminar/ Simposium/ Sosialisasi/ Workshop	OH	3		200	8.000.000											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Pengolahan dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat				53.650.000	0	24.820.000		22.261.500									Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Uang Lembur PNS	OL	3		75	1.125.000											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Uang Lembur Non PNS	OL	95		0	0											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Belanja ATK	Set	75		60	1.200.000											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Belanja Publikasi	Lbr	5.500		5.000	10.000.000											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat	OM	150		350	6.120.000											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Lembur	OM	350		90	1.875.000											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	OM	400		120	2.100.000											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Honor Peserta Seminar / Simposium/ Sosialisasi/ Workshop	OH	400		60	2.400.000											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan Data				82.850.000	0	88.350.000		76.200.000									Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa	OK	3		3	850.000											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
		Jumlah Uang Lembur PNS	OL	120		90	1.350.000											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Uang Lembur Non PNS	OL	45		0	0											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Belanja ATK	Set	25		200	5.000.000											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Belanja Publikasi	Keg/Lbr	6.500		1.604	21.900.000											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Belanja Cetak	Lbr	95.000		15.200	3.800.000											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Belanja Tempat/ Kantor	Keg	4		5	2.500.000											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat	OM	350		200	7.000.000											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Lembur	OM	200		120	2.250.000											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	OM	250		200	7.000.000											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Honor Peserta Seminar/ Simposium/ Sosialisasi/ Workshop	OH	150		200	10.000.000											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Belanja Jasa Pengadaan Aplikasi	Aplikasi	1		1	26.700.000											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
11	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	cakupan penanganan dalam program pemberdayaan ekonomi keluarga	Warga Binaan	-	30.168.005	0	0											Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Pedampingan Program Layanan bagi Keluarga Miskin dan PMKS	Jumlah peserta orientasi anggota kelompok UPPKS dari keluarga miskin				0	0		17.500.000									Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Cakupan pelatihan kader tenaga pendamping kelompok bina keluarga sejahtera (bina keluarga balita, bina keluarga remaja, bina keluarga lansia)		-	172.533.562	20	670.315.000											Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
						375	256.570.000											Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Program peningkatan keberdayaan masyarakat desa	Cakupan pemberdayaan desa	Persen	20	809.424.022	20	274.416.400											Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Jumlah peserta bimtek BKK dan P2MD	Orang			375	77.712.400		216.990.000									Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jumlah peserta pencanangan BKK dan P2MD	Orang			150	0											Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Jumlah proposal BKK yang diverifikasi	Proposal			1.870	0											Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Jumlah proposal P2MD yang diverifikasi	Proposal			209	0											Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	Jumlah kegiatan Bimtek P3MD	Sub Kegiatan			2	41.625.000		20.600.000									Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Jumlah peserta Bimtek pengawasan	Orang			0	0											Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Jumlah peserta Bimtek pengkajian potensi desa				80	0											Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
		Jumlah peserta bimtek perencanaan pembangunan desa				330	0											Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa	Pengelolaan data profil desa	Desa			50	70.550.000		37.300.000									Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Jumlah peserta evaluasi profil desa	Orang			0	0											Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Jumlah peserta bimtek kapasitas desa	Orang			330	0											Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Jumlah peserta bimtek profil desa dan desa online				330	0											Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Penyiapan masyarakat pengelola air bersih (PAB) Pedesaan	Jumlah Lokasi penerima bantuan PAB	Lokasi			0	84.529.000		50.206.000									Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jumlah peserta monitoring PAB	Orang			0	0											Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Jumlah peserta Workshop penguatan kelembagaan PAB	Orang			100	0											Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Jumlah peserta bimtek kelembagaan PAB	Orang			0	0											Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Jumlah peserta bimtek kelembagaan PLP	Orang			0	0											Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Jumlah peserta lomba PAB	Orang			0	0											Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Jumlah peserta pencahangan PAB-PLP	Orang			0	0											Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jumlah peserta bintek administrasi PLP	Orang			0	0											Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Cakupan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persen	30	1.925.182.850	30	1.501.686.500											Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	Jumlah pelaksanaan pendampingan Musyawarah Pembangunan Desa	Desa			75	19.282.500		8.133.000									Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Jumlah peserta Bimtek Kapasitas Pamong	Orang			150	0											Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Penyelenggaraan lomba desa	Jumlah peserta ekspos lomba desa (17x30 Orang)	Orang			-	820.070.000		441.240.000									Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Jumlah peserta Bimtek lomba desa	Orang			110	0											Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jumlah peserta verifikasi lapangan	Orang			1.800	0											Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Jumlah peserta lomba desa	Desa			17	0											Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Jumlah peserta pencanangan lomba desa	Desa			75	0											Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Bulan bakti gotong royong masyarakat dan LKD	Jumlah Desa Pemenang Lomba LPMD Berprestasi Tingkat Kabupaten	Kejuaraan			6	221.405.000		84.861.750									Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Jumlah peserta lomba LPMD	Desa			17	0											Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Jumlah peserta Bimtek peningkatan kapasitas LPMD	Orang			110	0											Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RPKD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RPKD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
		Jumlah peserta bimtek peningkatan kapasitas PKK	Orang			110	0											Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Jumlah peserta pencanangan BBGRM	Orang			350	0											Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Pendampingan kegiatan TMMD	Jumlah Lokasi yang terfasilitasi TMMD Sengkuyung dan karya bakti TNI	Lokasi			2	247.400.000		434.091.750									Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Jumlah peserta upacara penutupan TMMD	Orang			1.500	0											Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Jumlah peserta Pencanangan TMMD	Orang			300	0											Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Jumlah peserta upacara pembukaan TMMD	Orang			1.500	0											Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RPKD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RPKD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Bantul Ekspo dan karnaval	Jumlah pelaksanaan pameran bantul Ekspo dan karnaval	Kali			2	38.200.000		13.000.000									Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Pengembangan desa siaga	Jumlah peserta lomba desa siaga aktif	Kejuaraan			17	84.350.000		12.626.000									Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Pendampingan Kerjasama Desa	Jumlah sub kegiatan pendampingan kerjasama desa	Kegiatan			6	70.979.000		33.720.000									Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Jumlah peserta bimtek peningkatan kapasitas BP-UPK	Orang			51	0											Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Jumlah peserta bimtek peningkatan kapasitas UPK	Orang			51	0											Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Jumlah peserta bimtek kerja sama antar desa	Orang			100	0											Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jumlah peserta money UPK dan kelompok SPP	Kecamatan			17	0											Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Jumlah peserta bimtek peningkatan kapasitas BKAD	Orang			51	0											Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Jumlah peserta bimtek kelompok SPP	Orang			140	0											Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Program peningkatan peran perempuan di pedesaan	Cakupan desa sasaran peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera	Persen	5	181.644.299	0	139.705.000											Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Peningkatan Peranan Wanita Menuju keluarga Sehat sejahtera (P2WKSS)	Jumlah peserta lomba P2W-KSS	Desa			17	139.705.000		999.800.000									Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Jumlah peserta pengenalan program dan pelatihan Ketramprilan P2W-KSS	Orang			640	0											Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RPKD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RPKD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jumlah peserta pembinaan pada desa program lanjutan	Orang			210	0											Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Program pemberdayaan masyarakat	cakupan pelayanan tim penggerak pembinaan kesejahteraan keluarga dalam pemberdayaan masyarakat	Persen	100	6.290.071.988	86	5.531.524.300											Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Cakupan lembaga yang menerima penyaluran dana pemberian makanan tambahan		2.410		0	0											Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah sub kegiatan TP PKK	Sub Kegiatan			25	235.362.500		350.105.000									Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah pemberian PMTAS	Kali			70	5.296.161.800		2.132.652.500									Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Jumlah Penerima PMT PAUD	Kali			28	0											Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
		Jumlah peserta lomba HKG PKK KKBKes Tingkat DIY	Orang			300	0											Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Jumlah peserta bimtek pokjanal posyandu	Orang			100	0											Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Jumlah pemberian PMT bagi anak balita di posyandu	Posyandu			1.139	0											Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Jumlah peserta lomba pengelolaan posyandu tingkat kabupaten	Orang			400	0											Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Jumlah peserta Bimtek pengelola PMT Posyandu	Orang			130	0											Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Jumlah peserta bimtek pengelola PMT-AS TK	Orang			534	0											Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RPKD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RPKD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jumlah peserta bimtek pengelola PMT PAUD	Orang			716	0											Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Jumlah peserta pelatihan kader posyandu	Orang			225	0											Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Program perbaikan gizi masyarakat	Cakupan pemberian PMTAS TK				0	0											Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Cakupan pemberian PMTAS PAUD				0	0											Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Jumlah lembaga ekonomi desa yang difasilitasi	Persen	7	820.884.573	7	260.470.000											Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Pelatihan ketrampilan usaha EKONOMI PERDESAAN	Jumlah Sub kegiatan Bumdes	Kegiatan			4	260.470.000		235.217.750									Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RPKD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RPKD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
		Jumlah peserta money Bumdes	Desa			6	0											Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Jumlah peserta Bimtek lembaga keuangan perdesaan	Orang			0	0											Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Jumlah kunjungan lapangan pengelola UP2K-PKK	Orang			300	0											Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Jumlah peserta bimtek pengelola UP2K-PKK	Orang			0	0											Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Jumlah peserta bimtek produk unggulan kawasan pedesaan	Orang			0	0											Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Jumlah peserta lomba pengelola UP2K-PKK	Orang			17	0											Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jumlah peserta Workshop program Global Gotong Royong (G2R)	Orang			100	0											Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Pemberdayaan usaha EKONOMI perdesaan	Jumlah peserta lomba pasar desa	Pasar Desa			13	257.462.000		76.600.000									Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Jumlah peserta Bimtek pengelola pasar desa	Orang			80	0											Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Jumlah peserta mobilitas training pedagang pasar desa	Orang			200	0											Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Jumlah peserta Rakerda Pasar Desa	Orang			60	0											Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Pengembangan Teknologi Tepat Guna	Jumlah pelaksanaan kegiatan TTG	Kelompok			4	236.995.000		123.047.500									Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir PeriodeRPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jumlah peserta pelatihan pembentukan dan pengembangan posantekdes	Orang			0	0											Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Jumlah peserta bimtek pengembangan TTG Tingkat Kabupaten	Orang			100	0											Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Jumlah peserta bimtek peningkatan kapasitas pengelolaan posyantekdes	Orang			0	0											Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Jumlah peserta pelatihan ketrampilan hasil pertanian dan peternakan berbasis TTG	Orang			0	0											Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Jumlah peserta gelar TTG Kabupaten	Orang			700	0											Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Jumlah peserta lokakarya Gelar TTG se Kab Bantul	Orang			125	0											Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RPKD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RPKD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
12	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Program pelayanan kontrasepsi	Persentase kepesertaan KB MKJP		40	127.144.427	38	115.900.000											Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	Jumlah bahan obat-obatan	Jenis			4	115.900.000		171.275.000									Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Jumlah peserta vasektomi (MOP)	Orang			100	0											Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Program keluarga berencana	Cakupan peserta keluarga berencana aktif		77	6.059.529.632	77	6.217.584.500											Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Pelayanan KIE	Jumlah peserta promosi KIE Program KB	Kali / Orang			22.810	4.469.669.500		5.306.784.000									Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jumlah pelaksanaan KIE program KB	Kecamatan			0	0											Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Pembinaan Keluarga Berencana	Jumlah peserta pelatihan petugas pelayanan KB	Orang			0	1.488.580.000		364.300.000									Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Jumlah peserta evaluasi kinerja PPKB	Orang			120	0											Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Jumlah peserta orientasi program KKBPK bagi toma	Orang			130	0											Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Monitoring dan evaluasi Yandu KB Kesehatan dan kespro dalam rangka TNI manunggal	Jumlah pelaksanaan kegiatan penilaian kegiatan KRR, Ibu Anak dan Pembinaan KB	Kali			0	45.000.000		40.050.000									Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Jumlah pelaksanaan movev	Kali			5	0											Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pemantapan mekanisme operasional	Jumlah koordinasi tingkat kecamatan	Kali			0	136.291.100		13.000.000									Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Jumlah peserta rakor kecamatan	Orang			0	17.050.000											Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Jumlah koordinasi tingkat desa	Kali			0	0											Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Jumlah peserta koordinasi Tk Desa	Orang			0	0											Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Jumlah peserta pelatihan kampung KB				160	0											Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Jumlah peserta rakor tri komponen	Orang			0	0											Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jumlah peserta pelatihan kampung KB	Orang			0	0											Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Pelaksanaan Kegiatan Hari Keluarga Tingkat Kabupaten	Jumlah pelaksanaan kegiatan Hari Keluarga Nasional	kali			1.500	201.550.000		117.538.800									Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Jumlah peserta bimtek jambore PLKB dan IMP	Orang			100	0											Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Pencanangan dan Pembentukan Kampung KB	Jumlah peserta pencanangan kampung KB	Orang			0	22.875.000		4.375.000									Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Jumlah kampung KB yang dicanangkan	Kampung KB			9	0											Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Jumlah peserta koordinasi kampung KB	Orang			150	0											Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan KB	Jumlah Pemenang Lomba PLKB, IMP dan KB Pria	Kejuaraan			5	34.549.500		34.100.000									Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Jumlah peserta motivator KB Pria	Orang			17	0											Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Jumlah peserta lomba KB Lestari usia 10 tahun	Orang			17	0											Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Jumlah peserta lomba KB Lestari usia 15 tahun	Orang			17	0											Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Jumlah peserta lomba KB Lestari usia 20 tahun	Orang			17	0											Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Jumlah peserta lomba PLKB	Orang			17	0											Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jumlah peserta lomba IMP	Orang			17	0											Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Program kesehatan reproduksi remaja	Cakupan sosialisasi kesehatan reproduksi remaja	Persen	2.000	187.206.182	2.000	169.400.000											Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Jumlah pertemuan KIE tentang KRR	kali			0	35.200.000		304.250.000									Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Jumlah peserta pelatihan kespro	Orang			225	0											Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Lomba forum PIK remaja	Jumlah peserta orientasi PIK Remaja	Orang			150	39.200.000		31.500.000									Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Jumlah juara kelompok PIK R dari jalur masyarakat dan sekolah	Kelompok			6	0											Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	KIE kesehatan reproduksi remaja bagi remaja	Jumlah peserta KIE/pelatihan kespro	Orang			2.000	95.000.000		90.000.000									Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Program kerja sama informasi dengan media massa	Cakupan media sosialisasi				0	0											Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Cakupan pelayanan kader IMP	Persen	100	82.676.788	90	75.365.000											Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Pendampingan Forum IMP	Jumlah kunjungan rumah/homevisit	Kali/orang			100	75.365.000		40.140.000									Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Jumlah pelaksanaan pertemuan forum IMP (12x34 orang)	Kali/orang			408	0											Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Jumlah peserta KIE kunjungan rumah/lapangan	Orang			0	0											Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RPKD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RPKD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Program pengembangan analisa data dan dampak kependudukan	Cakupan sistem aplikasi pencatatan dan pelaporan yang dibuat	Persen	100	321.386.800	100	249.483.400											Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Analisa Data dan Dampak Kependudukan	Jumlah peserta Bimtek updating data		300		75	136.355.000		114.600.000									Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Pengolahan, Updating Serta Analisa Data, dan Statistik Daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengolahan, updating dan analisis data statistik daerah		12		0	33.550.000		37.500.000									Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Jumlah peserta Bimtek aplikasi pelaporan program KKBPk	Orang			600	0											Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Fasilitasi Proses Pencatatan Pelaporan Pelayanan Kontrasepsi dan Pengendalian Lapangan	Jumlah peserta pertemuan pengendalian program	Orang	408		0	79.578.400		18.050.000									Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Jumlah peserta Bimtek pendataan keluarga	Orang			180	0											Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jumlah peserta pelatihan pendataan keluarga	-	-		500	0											Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Cakupan pelatihan kader tenaga pendamping kelompok bina keluarga sejahtera (bina keluarga balita, bina keluarga remaja, bina keluarga lansia)	Persen	51	172.533.562	34	316.422.000											Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan	Jumlah peserta pelatihan BKB, BKR, BKL	Orang			275	31.000.000		24.750.000									Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Pengembangan ADITUKA (asuhan Dini Tumbuh Kembang Anak)	Jumlah peserta Orientasi ADITUKA	kader			225	26.375.000		24.250.000									Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Pendampingan Forum komunikasi kader posdaya	Jumlah pertemuan forum kader Posdaya	Orang			192	13.400.000		13.230.000									Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Evaluasi Kegiatan Tribina (BKB, BKR, dan BKL) dan POSDAYA	Jumlah penerima hadiah kategori lomba Tribina dan Posdaya	Kategori			0	101.480.000		45.817.000									Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RPKD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RPKD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jumlah Juara perorangan	Orang			3	0											Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Jumlah Juara kelompok Tribina dan UPPKS	Orang			12	0											Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Monitoring dan Evaluasi pengelolaan dana bergulir bagi kelompok Ekonomi Produktif Keluarga Pra Sejahtera dan KS I	Monitoring kelompok UPPKS	orang			250	144.167.000		14.625.000									Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Jumlah peserta orientasi UPPKS sumber modal non PEKM dan KUPK	Orang			75	0											Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	cakupan penanganan dalam program pemberdayaan ekonomi keluarga		360	30.168.005	0	0											Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
13	PERHUBUNGAN																	Dinas Perhubungan
	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Presentase angkutan umum yang layak jalan	persen	81	1.034.800.000	6	797.513.360											Dinas Perhubungan
	Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang di Lingkungan Terminal	Jumlah pemeliharaan terminal dan TPR	Lokasi			1	351.619.360		312.850.000									Dinas Perhubungan
	Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan	Jumlah survey lalu lintas	dokumen			1	150.343.000		151.675.000									Dinas Perhubungan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
		Jumlah Study Database	dokumen			0	0											Dinas Perhubungan
	Pelayanan perijinan di bidang perhubungan	Jumlah Koordinasi Perijinan	kali			2	12.950.000		12.950.000									Dinas Perhubungan
	Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	Jumlah kegiatan Sosialisasi	kali			2	282.601.000		194.000.000									Dinas Perhubungan
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase ketersediaan fasilitas keselamatan jalan yang ideal	persen	95	1.633.415.351	1.112	2.347.670.975											Dinas Perhubungan
	Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah Service dan Kalibrasi	kali			1	172.840.000		176.175.000									Dinas Perhubungan
	Rehabilitasi/Pemeliharaan APILL, Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan	Jumlah APILL Yang terpelihara	unit			10	662.501.000		349.615.000									Dinas Perhubungan
		Jumlah Rambu Yang Terpelihara	unit			46	0											Dinas Perhubungan
		Jumlah Flashing Lamp Yang Terpelihara	unit			5	0											Dinas Perhubungan
		Jumlah Pemeliharaan Kerb	meter			100	0											Dinas Perhubungan
	Rehabilitasi/ Pemeliharaan LPJU	Jumlah LPJU yang terpelihara	Unit			950	1.512.329.975		1.403.320.000									Dinas Perhubungan
	Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas	Persentase ketersediaan LPJU	persen	44	22.101.858.047	1.865	19.894.393.496											Dinas Perhubungan
		Persentase Ketersediaan rambu jalan kabupaten				0	0											Dinas Perhubungan
	Pengadaan pagar pengaman jalan	Jumlah paku jalan	meter			215	861.890.000		569.410.000									Dinas Perhubungan
		Jumlah delinator	unit			726	0											Dinas Perhubungan
			unit			250	0											Dinas Perhubungan
	Pengadaan Flashing Lamp		unit			3	0		844.700.000									Dinas Perhubungan
		Jumlah flashing lamp terpasang	unit			0	682.780.550											Dinas Perhubungan
		Jumlah pelican crossing	unit			1	0											Dinas Perhubungan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Jumlah cermin tikungan	unit			670	18.349.722.946		12.855.006.000									Dinas Perhubungan
						0	0											Dinas Perhubungan
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Ketersediaan simpul transportasi yang memadai	persen	79	179.993.286	1	162.996.000											Dinas Perhubungan
	Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal	Jumlah halte yang terpasang	unit			1	162.996.000		164.075.000									Dinas Perhubungan
	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Persentase kendaraan bermotor wajib uji yang lolos uji	persen	88	990.382.685	193	1.139.635.500											Dinas Perhubungan
	Pengadaan Prasarana Pendukung PKB	Jumlah Plat Uji	buah			40	1.139.635.500		850.145.000									Dinas Perhubungan
		Jumlah Cetak Stiker Tanda Uji	lembar			40	0											Dinas Perhubungan
		Jumlah Cetak Blangko Permohonan Uji	lembar			15	0											Dinas Perhubungan
		Jumlah Cetak Surat Penetapan Restribusi	lembar			40	0											Dinas Perhubungan
		Jumlah Cetak Kartu Pemeriksaan Kendaraan	lembar			5	0											Dinas Perhubungan
		Jumlah Smart Card PKB	buah			3	0											Dinas Perhubungan
		Jumlah Cetak Surat Keterangan Tidak Lulus Uji	lembar			50	0											Dinas Perhubungan
		Jumlah Upgrade Software	kali			2	0											Dinas Perhubungan
		Jumlah Kajian	dokumen			2	0											Dinas Perhubungan
		Jumlah printer smart card	unit			1	0											Dinas Perhubungan
		Jumlah card reader	unit			1	0											Dinas Perhubungan
		Jumlah printer L310 Epson	unit			1	0											Dinas Perhubungan
	Pengembangan Kelalu-Lintasan	Persentase penurunan pelanggaran lalu lintas	persen	16	3.537.216.106	5.611	4.595.417.140											Dinas Perhubungan
	Peningkatan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas	Jumlah peserta event pembinaan parkir	Orang			100	824.935.000		737.141.000									Dinas Perhubungan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jumlah kegiatan pelajar pelopor	Orang			100	0											Dinas Perhubungan
		Jumlah peserta sosialisasi pelajar	Orang			150	0											Dinas Perhubungan
		Jumlah peserta sefty riding	Orang			150	0											Dinas Perhubungan
		Jumlah peserta event simpatik	Orang			0	0											Dinas Perhubungan
		Jumlah pembinaan operasional LLAJ	kali			300	455.932.000											Dinas Perhubungan
	Pengembangan perencanaan penyelenggaraan manajemen rekayasa lalu lintas	Jumlah survey lalu lintas	dokumen			2	0		90.635.000									Dinas Perhubungan
	Pengembangan fasilitas perekayasa lalu lintas	Jumlah rambu lalu lintas yang terpasang	unit			120	3.314.550.140		2.086.762.500									Dinas Perhubungan
		Jumlah RPPJ yang terpasang	unit			12	0											Dinas Perhubungan
		Jumlah tali pembatas arus lalu lintas yang terpasang	meter			1.735	0											Dinas Perhubungan
		Jumlah rambu petunjuk himbauan keselamatan pada titik rawan kecelakaan	unit			40	0											Dinas Perhubungan
		Jumlah APILL yang terpasang	lokasi			2	0											Dinas Perhubungan
		Jumlah Road Barrier yang terpasang	unit			0	0											Dinas Perhubungan
		Luas marka parkir yang terpasang	m2			500	0											Dinas Perhubungan
		Luas marka dalam kota	m2			1.200	0											Dinas Perhubungan
		Luas marka luar kota	m2			1.200	0											Dinas Perhubungan
14	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase perluasan infrastruktur jaringan	%	78	16.555.740.245	72	14.538.090.142											Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
		Persentase pembangunan pusat data (warehouse data)	%	60		52	0											Dinas Komunikasi dan Informatika
	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Peningkatan infrastruktur jaringan internet dan intranet	%	90	5.707.087.999	90	4.605.451.239		8.490.475.000									Dinas Komunikasi dan Informatika
		Pemeliharaan Tower	tower	80		80	0											Dinas Komunikasi dan Informatika
		Sewa Ethernet untuk Jaringan Intranet dan Internet	bln	12		12	0											Dinas Komunikasi dan Informatika
		Rancangan jalur Backbone internet dan intranet di lingkungan perkantoran pemda, kecamatan dan desa	dok	1		1	0											Dinas Komunikasi dan Informatika
		Pembangunan backbone internet dan intranet di lingkungan perkantoran pemda, kecamatan dan desa	Km	53		46	0											Dinas Komunikasi dan Informatika
		Pemeliharaan Backbone internet dan intranet di lingkungan perkantoran pemda dan kecamatan	bulan	12		12	0											Dinas Komunikasi dan Informatika
		Peningkatan kualitas akses infrastruktur jaringan internet dan internet	%	75		75	0											Dinas Komunikasi dan Informatika
		Terbangunnya jalur utama infrastruktur jaringan internet dan internet di kabupaten Bantul	lokasi	96		96	0											Dinas Komunikasi dan Informatika
		Berkembangnya Komunikasi dan Informasi dan Media massa	%	96		96	0											Dinas Komunikasi dan Informatika
	Pembinaan dan Pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	peningkatan kapasitas data center Pemkab. Bantul	%	75	4.779.108.748	90	4.185.691.465		238.775.000									Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RPKD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RPKD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Perancangan dan pembangunan Videotron	unit	1		1	0											Dinas Komunikasi dan Informatika
		Penyusunan Data Aset TIK	Database	1		1	0											Dinas Komunikasi dan Informatika
		Pemeliharaan Jaringan dan Pembangunan Infrastruktur Jaringan Pemerintah Kab. Bantul	Site	176		176	0											Dinas Komunikasi dan Informatika
		Peningkatan Kapasitas Warehouse Data Pemkab. Bantul	%	75		75	0											Dinas Komunikasi dan Informatika
	Pengkajian dan Pengembangan sistem informasi	Penyelenggaraan pemberdayaan telematika dan pengembangan system informasi	%	90	5.812.394.298	90	5.653.147.438		1.017.600.000									Dinas Komunikasi dan Informatika
		Data Kesehatan Pemkab. Bantul	database	1		1	0											Dinas Komunikasi dan Informatika
		Terfasilitasinya sistem informasi berbasis online	aplikasi	157		157	0											Dinas Komunikasi dan Informatika
		Stabilisasi jaringan internet di OPD dan Puskesmas	bln	12		12	0											Dinas Komunikasi dan Informatika
		Berita Website di Kabupaten Bantul dalam dua bahasa (Jawa dan Inggris)	berita	120		120	0											Dinas Komunikasi dan Informatika
		Mendukung layanan DGS Kesehatan di puskesmas dan rumah sakit	lokasi	41		41	0											Dinas Komunikasi dan Informatika
		Pengelolaan Website beserta subdomainnya	website	54		54	0											Dinas Komunikasi dan Informatika
		Pelaksanaan Workshop Bidang TIK	kegiatan	1		1	0											Dinas Komunikasi dan Informatika
		Layanan DGS Pemerintah Kabupaten Bantul	layanan	2		2	0											Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyelenggaraan Pemberdayaan Telematika Dan Pengembangan Sistem Informasi	%	80		80	0											Dinas Komunikasi dan Informatika
	Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi	Terlaksananya Penyusunan dan publikasi peraturan Pemerintah Daerah bidang TIK	%	80	257.149.200	80	93.800.000		43.662.500									Dinas Komunikasi dan Informatika
		Sosialisasi Kebijakan TI di Pemkab. Bantul	kali	1		1	0											Dinas Komunikasi dan Informatika
		Meningkatnya Kualitas Kebijakan Komunikasi dan Informasi	%	100		100	0											Dinas Komunikasi dan Informatika
	Pengendalian sistem keamanan informasi	Persentase gangguan informasi yang tertangani	%	0	0	0	0											Dinas Komunikasi dan Informatika
		Sosialisasi Kemanan Informasi	kali	1		0	0											Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jumlah Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	set	1		0	0											Dinas Komunikasi dan Informatika
		Pelaksanaan kegiatan sterilisasi	ruangan	2		0	0											Dinas Komunikasi dan Informatika
		Pemeliharaan Jaringan telekomunikasi	bln	12		0	0											Dinas Komunikasi dan Informatika
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	paket	1		0	0											Dinas Komunikasi dan Informatika
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	paket	1		0	0											Dinas Komunikasi dan Informatika
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	paket	1		0	0											Dinas Komunikasi dan Informatika
		Penyediaan Layanan Frekuensi Radio	ISR	2		0	0											Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Terjaminnya Keamanan Informasi, komunikasi dan Pengendalian	%	100		0	0											Dinas Komunikasi dan Informatika
						0	0											Dinas Komunikasi dan Informatika
	Program Pengkajian dan Pengembangan Persandian	Prosentase Gangguan Informasi yang tertangani	%	87	777.932.549	21	777.812.184											Dinas Komunikasi dan Informatika
	Pembinaan dan Pengembangan Bidang Persandian	Jumlah Pemanfaatan layanan persandian bagi perangkat daerah	layanan	20	454.263.967	10	425.697.968		506.875.000									Dinas Komunikasi dan Informatika
		Perancangan Komunikasi Radio Pemkab. Bantul	dok	1		1	0											Dinas Komunikasi dan Informatika
		Gelar Jaring Persandian Daerah (Forum Komunikasi Sandi Daerah)	kali	1		1	0											Dinas Komunikasi dan Informatika
		Pengamanan Sinyal Komunikasi Internal Pemkab. Bantul	kali	2		1	0											Dinas Komunikasi dan Informatika
		Sterilisasi Ruangan Pimpinan dan OPD yang Rentan Penyadapan	lokasi	5		2	0											Dinas Komunikasi dan Informatika
		Rekening Telepon Pemda	line telp	37		5	0											Dinas Komunikasi dan Informatika
		Pengamanan Berita Rahasia	bulan	12		12	0											Dinas Komunikasi dan Informatika
		Kelancaran Komunikasi Internal Pemkab. Bantul	%	72		72	0											Dinas Komunikasi dan Informatika
		Peningkatan Keamanan Ruang Pimpinan	%	60		60	0											Dinas Komunikasi dan Informatika
	Pengendalian Sistem Keamanan Informasi	Prosentase penanganan gangguan dari seluruh incident	%	1	323.668.582	0	352.114.216											Dinas Komunikasi dan Informatika
		Sewa Frekuensi Radio Internal Pemda. Bantul	frekuensi	3		1	0											Dinas Komunikasi dan Informatika
		Workshop Sosialisasi Kemanan Informasi	kegiatan	1		30	0											Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		peningkatan keahlian di bidang Keamanan Informasi	kali	1		1	0											Dinas Komunikasi dan Informatika
		Penambahan saluran telepon	line/telepon	5		5	0											Dinas Komunikasi dan Informatika
		Pemeliharaan Jaringan telepon Pemkab. Bantul	jaringan telepon	30		1	0											Dinas Komunikasi dan Informatika
		Terbangunya repeater radio komunikasi	site	1		1	0											Dinas Komunikasi dan Informatika
		Penambahan Tower Repeater Radiokom	tower	1		3	0											Dinas Komunikasi dan Informatika
		Prosentase peningkatan pengamanan sistem informasi	%	20		20	0											Dinas Komunikasi dan Informatika
	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Persentase SDM yang memiliki pengetahuan dan keterampilan berbasis TI	%	50	99.411.803	48	53.270.000											Dinas Komunikasi dan Informatika
	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	Pelatihan Aparatur Pemerintah di bidang Teknologi dan Informasi	orang	238		238	53.270.000											Dinas Komunikasi dan Informatika
		Pelaksanaan Pelatihan Bidang TIK	kali	1		1	0											Dinas Komunikasi dan Informatika
	Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Prosentase penningkatan tata kelola sistem informasi dan layanan publik	%	75	989.252.756	67	860.232.900											Dinas Komunikasi dan Informatika
	Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	Jumlah Sosialisasi Smartcity	kali	4	171.876.168	4	167.639.000		157.500.000									Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jumlah Workshop Smartcity	kali	2		2	0											Dinas Komunikasi dan Informatika
		Peningkatan Penyelenggaraan Informasi Publik	%	100		100	0											Dinas Komunikasi dan Informatika
		Peningkatan Penyelenggaraan Informasi Publik	%	100		0	0											Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RPKD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RPKD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pemberdayaan KID dan PPID	SK Bupati	SK	1	425.879.370	1	355.743.400		97.925.000									Dinas Komunikasi dan Informatika
		Data Perekonomian	Data	6		6	0											Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jml Kegiatan Forum PPID	kali	5		5	0											Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jml Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik Desa	kecamatan	17		17	0											Dinas Komunikasi dan Informatika
		Data IPM	Dokumen	1		1	0											Dinas Komunikasi dan Informatika
		Cakupan data statistik sektoral	%	100		100	0											Dinas Komunikasi dan Informatika
		Terlaksananya Ketugasan PPID	%	100		100	0											Dinas Komunikasi dan Informatika
	Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	%	100		100	336.850.500		70.050.000									Dinas Komunikasi dan Informatika
		Forum KIM Kabupaten	kali	4		4	0											Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jml Pemantauan Menara Telekomunikasi	kali	624		624	0											Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jumlah sosialisasi kelompok masyarakat	kali	17		17	0											Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jumlah publikasi Pertunjukan rakyat	kali	12		12	0											Dinas Komunikasi dan Informatika
		Terlaksananya Pemantauan Menara Telekomunikasi	%	100		100	0											Dinas Komunikasi dan Informatika
		Terlaksananya kegiatan kelompok Informasi Masyarakat(KIM)	%	100		100	0											Dinas Komunikasi dan Informatika
	Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media	Persentase peningkatan sosialisasi pembangunan pemerintah daerah	%	75	1.153.092.364	70	1.914.325.350											Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RPKD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RPKD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah pemanfaatan media massa dalam penyebarluasan penyelenggaraan pemerintah daerah	MASS MEDIA	5	1.153.092.364	9	1.730.785.350		711.680.000									Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jml advertorial	media	5		5	0											Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jml Iklan Layanan Masyarakat	kali	2		2	0											Dinas Komunikasi dan Informatika
		karnaval Mobil hias	unit	1		1	0											Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jml siaran TV Swasta luar Studio	kali	6		6	0											Dinas Komunikasi dan Informatika
		Pemeliharaan Portal TV	bln	12		12	0											Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jml dialog Interaktif 3 stasiun radio	kali	72		72	0											Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jml Penerbitan Buletin Sejada	eksemplar	7.000		7.000	0											Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jml Peliputan dinamika Pembangunan	kali	8		8	0											Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jml Siaran Taman Paseban dalam Studio	kali	24		24	0											Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jml Siaran Pers Iklan Kegiatan	kali	30		30	0											Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jml Pembuatan vidio Profil	Kali	1		1	0											Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jml Dialog Interaktif generasi muda lewat radio	kali	12		12	0											Dinas Komunikasi dan Informatika
		keikutsertaan Bantul Ekspo	stand	1		1	0											Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jml Siaran TV luar Studio	kali	1		1	0											Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jml pariwisata	media	1		1	0											Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RPKD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RPKD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Publikasi Kegiatan di Media Cetak	bln	12		12	0											Dinas Komunikasi dan Informatika
	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Jml Bimtek Jurnalistik dan fotografi	kali	1		1	0		397.325.000									Dinas Komunikasi dan Informatika
		Sosialisasi IKM	kali	1		1	0											Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jumlah Pengaduan Masyarakat melalui SMS Center	aduan	150		150	0											Dinas Komunikasi dan Informatika
		Penyampaian informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui website pemerintah daerah	berita	520		0	0											Dinas Komunikasi dan Informatika
	Program kerjasama informasi dengan mass media	Persentase peningkatan sosialisasi pembangunan		75	2.150.112.092	0	0											Dinas Komunikasi dan Informatika
	Program Penyajian Data Statistik Daerah	Data statistik acuan perencanaan pembangunan daerah		7	221.028.500	0	0											Dinas Komunikasi dan Informatika
15	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH																	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Jumlah KUKM yang mendapatkan kemudahan akses permodalan	unit usaha	80	457.758.333	60	471.875.000											Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
	Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah					0	471.875.000		709.873.000									Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
		pasar rakyat	lokasi			5	0											Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		kampung digital	lokasi			5	0											Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian
		workshop kemitraan pelaku usaha mikro kecil dengan lembaga keuangan dan pelaku usaha menengah/besar	unit usaha			150	0											Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian
		pendampingan usaha mikro kecil				17	0											Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian
		sosialisasi percepatan IUMK	orang			1	0											Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah wirausaha baru	unit usaha	400	542.859.532	280	456.696.000											Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian
	Pengembangan Kewirausahaan					0	456.696.000		1.157.135.000									Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian
		peningkatan usahawan baru	orang			0	0											Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian
		terlaksananya pelatihan wirausaha baru				0	0											Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian
		workshop bagi UMKM	orang			0	0											Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RPKD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RPKD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		workshop pemasaran online	orang			0	0											Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian
		sosialisasi pembiayaan bagi usaha mikro	orang			0	0											Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian
		pelatihan ex binaan lapas	orang			0	0											Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian
		jumlah peserta pelatihan penguatan untuk pelaku usaha mikro	unit usaha			220	0											Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian
		jumlah unit usaha yang mengikuti pelatihan untuk calon wirausaha baru	unit usaha			140	0											Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Cakupan partisipasi produk Usaha Mikro	jenis	3	95.769.702	5	238.276.000											Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian
		Cakupan produktivitas IKM dan UMKM				0	0											Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian
	Peningkatan Promosi UMKM					0	238.276.000		15.250.000									Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian
		jumlah promosi	kali			0	0											Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian
		jumlah workshop	kali			0	0											Dinas Koperasi, Usaha Kecil

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RPKD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RPKD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																		Menengah, dan Perindustrian
		studi banding	kali			0	0											Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
		sosialisasi	kali			0	0											Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
		jumlah pelaksanaan pameran	kali			2	0											Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Cakupan koperasi yang melaksanakan RAT		95	1.107.119.479	88,21	943.159.640											Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
		Cakupan peningkatan koperasi aktif				0	0											Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
	Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi					0	90.975.000		87.475.000									Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
		terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/UPS				233	0											Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
		Terlaksananya Revitalisasi Koperasi				0	0											Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
		Terlaksananya Penilaian Koperasi Berprestasi	koperasi			20	0											Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RPKD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RPKD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		terlaksananya pembinaan penguatan koperasi				10	0											Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian
		terlaksananya monev NRB dana pemerintah				1	0											Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian
	Peningkatan Manajemen Perkoperasian					0	660.250.000		393.375.200									Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian
		jumlah pelatihan kompetensi juru buku	kali			1	0											Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian
		jumlah pelatihan pengembangan usaha koperasi usaha koperasi	kali			2	0											Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian
		jumlah pelatihan bagi pengawas koperasi	kali			1	0											Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian
		jumlah pelatihan pengelolaan usaha	kali			1	0											Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian
		jumlah pelatihan permodalan	kali			2	0											Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian
		mengikuti Harkopnas tingkat Nasional.	kali			1	0											Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian
		terlaksananya pelatihan pembukuan				0	0											Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RPKD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RPKD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		pelatihan pengawasan internal				0	0											Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian
		terlaksananya promosi produk koperasi dan anggota koperasi				0	0											Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian
		terlaksananya pelatihan analisa pembiayaan	orang			0	0											Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian
	Pengembangan Kerjasama dan Kemitraan Koperasi					0	88.417.400		121.425.000									Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian
		terlaksananya workshop pengembangan koperasi	kali			2	0											Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian
		terlaksananya bimtek pengurus koperasi terkait pengentasan kemiskinan	kali			2	0											Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian
		terlaksananya monev pengentasan kemiskinan	kali			2	0											Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian
		jumlah pelatihan pelaku usaha melalui koperasi	kali			1	0											Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian
		terlaksananya workshop pengembangan kopersi				0	0											Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian
		terlaksananya konsultasi kebijakan perkoperasian				0	0											Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		pelatihan UMKM				0	0											Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian
		terlaksananya FGD akses permodalan				0	0											Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian
	Peningkatan Kualitas Kelembagaan DEKOPINDA					0	118.464.400		94.979.400									Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian
		jumlah pelaksanaan tangkas trampil SLTA	kali			1	0											Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian
		jumlah pelaksanaan tangkas trampil SLTP	kali			1	0											Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian
		pelaksanaan sarasehan	kali			1	0											Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian
		jumlah pelatihan anggota Dekopinda	kali			1	0											Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian
		Jumlah pelaksanaan Upacara Hari Koperasi	kali			1	0											Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian
16	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Peran serta pemuda dalam kegiatan Kepemudaan	orang	500	81.629.136	500	2.392.087.000		177.500.000									Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RPKD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RPKD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan	jumlah pemuda pelopor keamanan lingkungan	peserta			100	144.750.000		1.455.302.500									Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Pembinaan organisasi kepemudaan dan peningkatan peran serta pemuda	jumlah peserta pembinaan pemuda	peserta			2.000	2.247.337.000											Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Cakupan pemuda terlatih dibidang kewirausahaan	peserta	60	81.629.136	60	59.410.000		59.280.000									Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	jumlah pemuda	peserta			30	59.410.000											Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda	Cakupan pelaksanaan kegiatan pemuda pelajar	lomba	3	918.796.752	3	758.435.000		1.078.715.000									Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Pengembangan potensi pemuda	jumlah pengembangan potensi pemuda/pelajar	pelatihan			5	758.435.000											Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Program pengembangan kebijakan dan manajemen olah raga	Cakupan cabor yang difasilitasi dan diberdayakan	cabor	60	86.123.379	36	78.496.780											Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan	jumlah keolahragaan 2 cabang olahraga yang terlatih	cabor			60	78.496.780		59.043.000									Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga	Cakupan cabang olahraga yang ikut kompetisi	cabor	36	94.478.726.112	23	9.296.545.300											Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Pengembangan olahraga rekreasi	jumlah peserta yang terlibat dalam kegiatan	peserta			80.000	5.618.444.400		1.028.007.200									Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Pembinaan dan Penyelenggaraan kompetisi olahraga	jumlah cabang olahraga dan seni	cabor			30	3.678.100.900		3.413.067.415									Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga	Rasio sarana prasarana olahraga dalam kondisi baik dibanding cabang olahraga	persen	23	6.365.160.452	90	5.345.412.261											Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana olahraga	sarana dan prasarana di kompleks Stadion Sultan Agung dan lapangan Dwi Windu	lokasi			2	5.345.412.261		933.699.980									Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
17	KEBUDAYAAN																	Dinas Kebudayaan
	Program Pengembangan Nilai Budaya	Peningkatan Peristiwa Seni Budaya.	kali	300	5.122.187.126	452	4.548.976.745											Dinas Kebudayaan
	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Jumlah Penyelenggaraan Kirab dan Apel Budaya Santri	kali			1	4.470.002.745											Dinas Kebudayaan
		Jumlah Penyelenggaraan Pentas Hari Jadi Bantul	kali			1	0											Dinas Kebudayaan
		Jumlah Penyelenggaraan Pentas Hut RI	kali			1	0											Dinas Kebudayaan
		Jumlah Penyelenggaraan Pentas Wayang Kulit	kali			1	0											Dinas Kebudayaan
		Pentas Seni Jathilan	kali			1	0											Dinas Kebudayaan
		Pentas Seni Kethoprak	kali			1	0											Dinas Kebudayaan
		Pentas Seni	kali			1	0											Dinas Kebudayaan
		Penyelenggaraan Pentas Seni	kali			1	0											Dinas Kebudayaan
		Pelatihan Kesenian Kecamatan	kali			1	0											Dinas Kebudayaan
		Baliho	buah			1	0											Dinas Kebudayaan
		Cetak Buku Potensi Desa Budaya	kali			1	0											Dinas Kebudayaan
	Pembuatan Film Dokumenter	Jumlah Kesenian Tradisional (Montro) Yang Didokumentasikan Dalam Bentuk Film	dokumen/ film			1	78.974.000											Dinas Kebudayaan
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Peningkatan jumlah peristiwa budaya		0	0	0	0											Dinas Kebudayaan
	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya daerah	Peningkatan kerjasama pengelolaan kebudayaan daerah	angka	1	52.547.179	1	47.900.000											Dinas Kebudayaan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir PeriodeRPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah	Jumlah kerjasama bidang kebudayaan yang dilaksanakan	kali			1	47.900.000											Dinas Kebudayaan
	Program Pengelolaan Warisan Budaya Tak Benda	Peningkatan upaya pelestarian budaya tak benda	Persen	7	315.030.761	0	201.970.500											Dinas Kebudayaan
	Pengembangan Nilai dan Geografi Sejarah	Jumlah Situs Sejarah Yang Dikaji	Lokasi			1	46.735.000											Dinas Kebudayaan
	Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam	Lomba Foto Dokumen Dolanan Anak	kali			0	0											Dinas Kebudayaan
	Penyelenggaraan Dialog Kebudayaan	Jumlah Peserta Workshop Bahasa dan Sastra Jawa	Peserta			1	40.999.500											Dinas Kebudayaan
	Seminar dalam rangka Revitalisasi dan Reaktualisasi Budaya Lokal	Jumlah Penyelenggaraan Pawiyatan Pranatacara Bahasa Jawa di Pandak dan Pajangan	kali			10	114.236.000											Dinas Kebudayaan
	Program Pengelolaan Warisan Budaya Benda	Cakupan pengelolaan benda, situs, kawasan cagar budaya	Persen	5	771.341.030	3	562.327.500											Dinas Kebudayaan
	Sosialisasi Pengelolaan Warisan Budaya Cagar Budaya	Jumlah peserta sosialisasi dan workshop	orang			450	299.611.000											Dinas Kebudayaan
		Dokumen Peneletian Inovasi Batik Tulis Imogiri	dokumen			0	0											Dinas Kebudayaan
		Dokumen Peneletian Pengembangan Corak Etnik Sarung Keris Banyusumurup	dokumen			0	0											Dinas Kebudayaan
		Dokumen Peneletian Pengembangan Budaya Montro Pleret	dokumen			0	0											Dinas Kebudayaan
	Seminar Pemanfaatan Cagar Budaya	Kajian Startegis Kreasi seni Ukir Wayang	kali			1	123.107.000											Dinas Kebudayaan
		Seminar Pemanfaatan Cagar Budaya	kali			0	0											Dinas Kebudayaan
	Rehab Cagar Budaya	Rehab Cagar Budaya	kali			2	139.609.500											Dinas Kebudayaan
	Pengembangan Museum	Dokumen Pengembangan Museum	dok			0	0											Dinas Kebudayaan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RPKD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RPKD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
18	PERPUSTAKAAN																	
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Cakupan yang memiliki Akreditasi Nasional	Jumlah	10	2.072.259.553	6	1.703.187.736											Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan Sekolah dan Desa yang memiliki Akreditasi Nasional	Jumlah	10	2.150.754.179	0	0											Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Kepustakaan	Jumlah koordinasi dengan forkom kabupaten dan kota se DIY	Kali	5	131.580.000	5	48.150.000		18.220.000									Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Jumlah Perpustakaan yang memiliki Akreditasi Nasional	Jumlah	6	53.085.375	6	0											Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca	Jumlah peserta pekan literasi	Orang	100	330.477.243	100	277.505.900		63.750.036									Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Jumlah peserta sosialisasi rumah/pojok baca	Orang	400		400	0											Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Jumlah Buletin	Eksemplar	500		500	0											Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah	Jumlah koleksi bahan pustaka	Eksemplar	2.000	274.031.888	2.000	246.375.140		126.975.000									Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah pembinaan Perpustakaan	Desa	75	328.663.960	0	0		38.886.750									Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Jumlah Lomba Perpustakaan	Jenis	2		2	246.375.140											Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Jumlah Pendataan Perpustakaan	Desa	75		0	0											Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Pelatihan Pengelolaan Perpustakaan	Jumlah peserta pelatihan pengelola perpustakaan	Orang	100	82.202.400	75	304.303.400		25.000.000									Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Pengembangan Sarpras Perpustakaan	Jumlah lokasi pojok baca	Jumlah lokasi pojok baca	10	1.003.798.688	10	768.543.296											Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Program Peningkatan Pelayanan Perpustakaan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perpustakaan	Nilai	90	517.540.349	89	465.960.000											Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengembangan Pelayanan Perpustakaan	Jumlah layanan keliling	Kali	768	204.072.750	768	185.100.000		184.100.000									Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Jumlah layanan sabtu minggu	Kali	96		96	0											Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Jumlah Carfreedy	Kali	12		12	0											Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Jumlah penjajaran bahan pustaka	Kali	24		24	0											Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Jumlah evaluasi dan supervisi	Kali	48		48	0											Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Peningkatan Promosi Perpustakaan	Jumlah peserta Festival cerita	Orang	200	313.467.599	200	280.860.000		104.317.500									Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Jumlah peserta Lomba Menulis	Orang	200		200	0											Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Jumlah peserta Lomba Mendongeng	Orang	40		40	0											Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Jumlah Bantul Exspo	Kali	1		1	0											Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Jumlah Karnaval	Kali	1		1	0											Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Jumlah Lomba Alih Huruf Aksara Jawa	Orang	100		100	0											Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
19	KEARSIPAN																	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pengguna arsip	Nilai	84	227.823.287	83	186.598.000		66.115.000									Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip	Tersusunnya dokumen naskah sumber arsip	Dokumen	1	50.687.438	1	44.798.000		31.875.000									Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Jumlah Tokoh/Tema sumber arsip	Orang	1		1	0											Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Pengembangan Sistem Informasi Kearsipan Statis	Jumlah peserta bimtek	Orang	60	102.945.938	60	82.725.000											Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RPKD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RPKD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Peningkatan Pelayanan Kearsipan	Jumlah Pameran	Kali	1	74.189.911	1	59.075.000		34.240.000									Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
						0	0											Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Cakupan OPD dan Desa dengan pengelolaan sistem administrasi kearsipan tertata baik	Persen	40	414.065.835	52	301.269.400		56.400.000									Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Pengklasifikasian data	Jumlah pelaksanaan penilaian dan penyusutan arsip	Kali	1	53.517.932	2	49.983.700		23.000.000									Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Jumlah OPD/Desa dengan pengelolaan sistem kearsipan tertata baik	OPD/Desa	30		30	0											Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Kajian sistem administrasi kearsipan	Jumlah peraturan kearsipan	Jumlah peraturan kearsipan	2	172.320.750	2	153.899.500											Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Jumlah OPD/Desa dengan pengelolaan sistem kearsipan tertata baik	OPD/Desa	30		30	0											Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Pengawasan Kearsipan	Jumlah peserta apresiasi kearsipan	OPD/Desa	52	188.227.153	52	97.386.200		33.400.000									Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Jumlah peserta seleksi arsiparis/pengelola arsip	Orang	10		10	0											Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Jumlah OPD/Desa dengan pengelolaan sistem kearsipan tertata baik	OPD/Desa	30		30	0											Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
						0	0											Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Cakupan arsip statis yang diakuisisi		25	1.042.423.355	22	1.150.656.700		370.305.000									Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Jumlah pengadaan sarana pengolahan arsip	Macam	2	173.313.000	3	180.300.000		151.750.000									Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Jumlah sosialisasi arsip keluarga	Kali	8	509.555.788	8	554.433.700		136.030.000									Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jumlah dokumen atau arsip yang didata	Berkas	10.000		15.000	0											Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Akuisisi dan Pengelolaan Arsip	Jumlah Peserta Workshop	Orang	100	359.564.567	100	415.923.000		82.525.000									Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Akuisisi arsip tokoh/tema	Tokoh/Tema	1		1	0											Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
1	KELAUTAN DAN PERIKANAN																	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
	Program Peningkatan Produksi Perikanan	Cakupan produksi perikanan			2.551.300.042	9.610	2.586.980.908											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya		833		0	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Jumlah produksi perikanan tangkap		12.801		0	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
	Peningkatan Sarana Prasarana Perikanan Budidaya	Jumlah paket pengadaan peningkatan sarana prasarana perikanan budidaya				3	1.135.037.658		1.031.669.000									Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Jumlah peserta workshop perikanan budidaya				150	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Jumlah pengawasan penyakit, pakan, obat ikan				15	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
	Peningkatan Kapasitas Usaha dan Kelembagaan Perikanan	Jumlah peserta pelatihan budidaya ikan hias				40	783.739.150		381.955.000									Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jumlah peserta pelatihan budidaya ikan gurami				50	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Jumlah pengadaan kegiatan peningkatan kapasitas usaha dan kelembagaan perikanan				3	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Jumlah peserta pelatihan pasca panen perikanan				40	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Jumlah peserta sekolah lapang budidaya ikan				120	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Jumlah kategori evaluasi pelaku utama perikanan				3	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Jumlah peserta pelatihan budidaya ikan				180	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Jumlah peserta Bimtek Budidaya Ikan Media kolam bulat				100	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Jumlah peserta kontes ikan hias				250	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Jumlah kategori kontes ikan hias				10	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan UPT Balai Benih Ikan	Produksi benih BBI				4.458.000	426.458.100		423.532.000									Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Perikanan Tangkap	Jumlah penyediaan operasional TPI				12	241.746.000		469.200.000									Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jumlah pengadaan peningkatan prasarana dan sarana perikanan tangkap				3	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Jumlah peserta sosialisasi perundang-undangan				160	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Jumlah peserta sosialisasi TPI higienis				100	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Pengadaan Ikan Nila Merah				2.500	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
2	PARIWISATA																	Dinas Pariwisata
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Cakupan promosi pariwisata	persen	90	2.277.026.146	75	3.576.156.075											Dinas Pariwisata
	Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata	Jumlah kajian	dokumen			4	262.274.500											Dinas Pariwisata
	Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata	Jumlah kerjasama dengan mitra pariwisata	kegiatan			5	208.842.500		191.250.000									Dinas Pariwisata
	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	Jumlah promosi dan kerjasama pariwisata	kegiatan			32	2.877.341.575		1.000.685.000									Dinas Pariwisata
	Pengembangan Sistem Informasi dan Pengendalian Pemasaran Pariwisata	Jumlah promosi melalui TI	kegiatan			4	227.697.500		39.525.000									Dinas Pariwisata
						0	0											Dinas Pariwisata
	Program pengembangan destinasi pariwisata	Cakupan peningkatan destinasi pariwisata	buah	3	10.617.517.915	3	10.061.750.718											Dinas Pariwisata
	Pengembangan daerah tujuan wisata	Jumlah dokumen pengembangan daerah tujuan wisata, Jumlah sarana dan prasarana destinasi	dokumen			10	8.122.241.893		5.721.920.000									Dinas Pariwisata

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Peningkatan daya tarik Wisata	Jumlah pentas seni di destinasi wisata	kegiatan			113	1.590.468.825		1.085.160.000									Dinas Pariwisata
	Peningkatan Pelayanan Kepariwisataaan	Jumlah koordinasi peningkatan pelayanan kepariwisataaan	kegiatan			7	349.040.000											Dinas Pariwisata
	Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Destinasi Wisata	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana destinasi wisata	kegiatan			0	0											Dinas Pariwisata
						0	0											Dinas Pariwisata
	Program pengembangan kemitraan	Cakupan mitra pariwisata	mitra	3	1.641.630.921	3	1.472.305.800											Dinas Pariwisata
	Pengembangan SDM , Kelembagaan dan Pengendalian Pariwisata	Jumlah peserta sertifikasi kompetensi SDM usaha pariwisata	orang			280	897.932.000		1.039.384.000									Dinas Pariwisata
	Pemberdayaan Desa Wisata	Jumlah lomba desa wisata dan workshop	kegiatan			15	348.718.800		145.875.000									Dinas Pariwisata
	Pengembangan Kelembagaan Pariwisata	Jumlah sarasehan forkom pokdarwis	kegiatan			10	225.655.000		490.700.000									Dinas Pariwisata
3	PERTANIAN																	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Cakupan peningkatan kemampuan kelembagaan kelas kelompok tani		38	656.269.290	34	570.685.000											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	Terlaksananya pelatihan penyuluh swadaya				75	241.495.000		185.942.500									Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Terlaksananya penyusunan program penyuluhan				18	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Terlaksananya koordinasi BPP dan manajemen teknologi				17	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Terlaksananya talkshow di TV				2	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Terlaksananya Publikasi melalui media radio				10	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Terlaksananya penyusunan bulletin				200	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Terlaksananya peningkatan kapasitas penyuluh				200	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
	Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan	Terlaksananya sosialisasi pembentukan taruna tani				100	329.190.000		214.110.400									Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Terlaksananya OVOP pisang				25	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Terlaksananya SLA				25	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Terlaksananya koordinasi lantip trengginas				150	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Terlaksananya pelatihan manajemen taruna tani				100	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Terlaksananya verifikasi penghargaan petugas dan petani				7	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Terlaksananya identifikasi dan penilaian kelas kelembagaan / kelompok tani				834	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RPKD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RPKD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Terlaksananya klinik agribisnis keliling				140	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Terlaksananya pelatihan perbanyak tanaman				25	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Terlaksananya pameran				1	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Terlaksananya PEDDA				45	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
	Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/ perkebunan	Cakupan jumlah kelompok bahan pangan yang di konsumsi	kelompok	9	792.063.707	9	751.434.000											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Angka ketersediaan pangan pokok	ton	475		465	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
	Peningkatan Pengankaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Gerakan B2SA	orang			60	308.265.000		264.000.000									Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Penghitungan skor pola pangan harapan (PPH)	desa			75	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Lomba pangan lokal	orang			50	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Lomba cipta menu	kecamatan			17	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Pelatihan olahan pangan lokal	orang			20	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jumlah peserta lomba KWT (kelompok wanita tani)	kelompok			6	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Terlaksananya penganekaragaman konsumsi pangan	kelompok			6	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Sosialisasi keamanan pangan bagi PKK, pengolah, penjual dan siswa SD	orang			500	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Jumlah peserta lomba pendamping KWT	orang			6	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Pemantauan pangan segar	sampel			180	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Pelatihan / sekolah lapangan pemanfaatan pekarangan bagi siswa SD dan KWT	sekolah / kelompok			12	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
	Pemantauan Distribusi dan Pengembangan Cadangan Pangan	Terlaksananya analisis akses pangan pokok	kali			1	192.629.000		199.498.000									Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Terlaksananya analisis cadangan pangan RT	kali			1	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Jumlah peserta pelatihan lumbung pangan	orang			25	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Jumlah peserta pembinaan LDPM	orang			425	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Jumlah peserta pembinaan lumbung pangan	orang			400	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
		Jumlah pemantauan harga dan stok pangan	kali			884	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Jumlah peserta pelatihan LDPM	orang			50	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Jumlah peserta pembinaan PUPM/TTI	orang			225	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
	Peningkatan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Daerah Rawan Pangan	Terlaksananya Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	kali			1	250.540.000		267.700.000									Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Jumlah peserta pelatihan teknis Demapan (Desa mandiri pangan)	orang			125	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Jumlah peserta pembinaan Demapan	orang			624	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan	orang			200	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Terlaksananya pendataan dan analisis Neraca Bahan Makanan (NBM)	kali			12	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Terlaksananya intervensi daerah rawan pangan	kali			2	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Terlaksananya lomba Demapan	kali			1	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian	Pengembangan Infrastruktur irigasi		25	6.538.925.171	10	5.935.013.896											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Cakupan pengembangan jaringan dan optimasi air		3.000		0	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Cakupan penguatan kelembagaan petani pemakai air		10		0	1.234.414.113											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
	Peningkatan Prasarana Pertanian	Jumlah rehab puskesmas Pandak (SILPA DAK)				1	5.265.851.696		2.420.380.000									Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Jumlah Pengadaan alat transportasi (SILPA DAK)				8	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Jumlah rehabilitasi jaringan irigasi (PIK)				1	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Jumlah DAM Parit (SILPA DAK)				5	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		jumlah peserta sosialisasi pembiayaan pertanian				100	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		jumlah peserta evaluasi LKMA PUAP				140	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Jumlah pagar BPP Pajangan (SILPA DAK)				1	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Jumlah rehab Puskesmas Sanden (DAK)				1	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Jumlah pengadaan keinformasian / laptop (SILPA DAK)				18	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
		Jumlah peserta pelatihan penguatan kelembagaan P3A				100	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Jumlah irigasi air tanah dangkal (PIK)				1	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		jumlah irigasi air tanah dangkal (DAK)				28	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Jumlah DAM Parit (DAK)				6	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Jumlah irigasi air tanah dangkal (SILPA DAK)				15	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Jumlah pembangunan rumah potong hewan (DAK)				1	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Jumlah pagar BPP Sewon				1	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		jumlah peserta SL Iklim				20	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Jumlah peserta sosialisasi pendampingan PSP				400	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
	Peningkatan Sarana dan Teknologi Pertanian	Jumlah pengawasan peredaran pupuk dan pestisida				10	669.162.200		502.252.500									Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Jumlah dokumen apraisal Petroganik				1	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jumlah Peserta pelatihan Pembuatan Pupuk Organik				125	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Jumlah bahan baku pengadaan produksi pupuk organik				279.700	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Jumlah Pengadaan Pestisida				2	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Jumlah peserta evaluasi pemanfaatan Alsintan				425	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Jumlah Peserta workshop Pupuk				80	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Jumlah pengujian sampel Pupuk				7	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Jumlah jenis pengadaan alat perlengkapan produksi pupuk organik				6	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Jumlah bulan penyediaan operasional pembuatan pupuk organik				12	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Jumlah Peserta Pelatihan Alsintan				150	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Jumlah Peserta Workshop Alsintan				40	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Angka produktivitas padi (GKG)		66	4.878.958.301	65	4.142.140.721											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir PeriodeRPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Angka produktivitas jagung (pipil kering)		60		0	4.142.140.721											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Angka produktivitas kedelai (wose)		16		0	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Angka Produktivitas bawang merah		11		0	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Angka produktivitas pisang		8		0	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Angka produktivitas cabe merah		3		0	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Angka produktivitas Tembakau (rajang kering)		8		0	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Angka produktivitas Tebu (hablur gula)		40		0	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Angka produktivitas kelapa (kopra)		13		0	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Cakupan luas tanam kakao		210		0	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
	Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Berkelanjutan	Jumlah peserta workshop pengembangan TPHB				95	1.113.535.200		552.155.000									Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Jumlah peserta pelatihan budidaya pertanian organik				180	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RPKD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RPKD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
		Jumlah peserta pelatihan tanaman hortikultura (cabai)				90	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Jumlah peserta pelatihan budidaya tanaman herbal dan pengolahannya				25	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Jumlah peserta workshop pola tanam berbasis pasar TPHB				90	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Jumlah peserta budidaya tanaman buah-buahan di Sanden				25	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Jumlah peserta pelatihan budidaya tanaman TOGA				100	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Jumlah peserta pelatihan pengembangan kakao				100	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Jumlah peserta pelatihan budidaya hortikultura (pangan lokal)				90	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Jumlah peserta pelatihan hidroponik				60	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Jumlah peserta pelatihan GAP hortikultura				25	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Jumlah peserta pelatihan pengembangan pangan lokal				25	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Jumlah peserta pelatihan budidaya tanaman buah-buahan di Terong				30	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RPKD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RPKD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
		Jumlah peserta SL penerapan teknologi tajarwo padi				125	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Balai Benih Pertanian (BPP)	Jenis pengadaan bibit tanaman				4	1.213.362.396		1.119.417.200									Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Jumlah calon benih padi yang dianalisis				0	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Jumlah sertifikasi lapangan				35	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Jumlah penyediaan operasional UPT BBP				12	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Jenis pengadaan pupuk				3	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Jenis pengadaan perlengkapan				15	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	Jumlah peserta SL pembibitan sayuran				90	208.279.500		317.157.000									Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Jumlah peserta SL pembibitan bawang merah				60	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Jumlah peserta workshop penangkar benih				75	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Jumlah peserta SL pembibitan kelapa				60	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengendalian dan Perlindungan Tanaman	Jumlah peserta Pelatihan Pengaruh Iklim terhadap Pertanian				75	299.720.185		605.669.000									Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Jumlah peserta Pelatihan Pengendalian OPT dan Perlindungan Tanaman				90	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Jumlah peserta gerakan pengendalian organisme pengganggu tanaman				2.000	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Jumlah peserta Workshop Pengendalian OPT				75	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Jumlah Peserta Pelatihan TBS				60	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
	Pengembangan Agribisnis Pertanian	Jumlah peserta pelatihan pengolahan hasil				60	1.307.243.440		766.755.000									Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Jumlah pameran				31	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Jumlah kategori festival pisang				4	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Jumlah peserta pelatihan penanganan pasca panen				40	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Persentase pembentukan unit pelayanan jasa alat mesin pertanian (UPJA) baru				0	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak				1.040.384.519	60	946.549.752											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RPKD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RPKD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Cakupan PAD UPT RPH				0	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Cakupan pelayanan kesehatan ternak		6.800		0	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Cakupan PAD UPT Puskesmas				0	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Angka kasus penyakit hewan menular strategis (Rabies, Anthrax, Brucellosis, Hog Cholera)				0	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Persentase penurunan jumlah kasus Avian Influenza (AI) terlapor				0	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Persentase pengawasan pangan asal hewan yang ASUH (Aman, Sehat Utuh, Halal)				0	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Cakupan ternak yang dipotong sesuai dengan kaidah yang baik dan benar		6.000		2.249	946.549.752											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
	Pendukung Kegiatan UPT Poskeswan	Jumlah Paket Penyediaan Operasional UPT Puskesmas				2	280.520.837		274.815.166									Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Jumlah Paket Pengadaan Bahan Material Medis				1	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Jumlah Paket Pengadaan Obat-obatan Hewan/ Ternak				1	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Jumlah pengadaan perlengkapan pelayanan kesehatan hewan				2	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pendukung Kegiatan UPT Rumah Pemotongan Hewan	Jumlah pembangunan perlengkapan gedung UPT				3	480.633.915		320.463.100									Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Jumlah penyediaan operasional UPT RPH				12	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Jumlah pengadaan perlengkapan pemotongan hewan				2	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
	Peningkatan Kesehatan Ternak	Cetak leaflet				3.000	185.395.000		206.550.000									Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Jumlah pengadaan trocar				10	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Jumlah pengadaan vaksin AI ND				50.000	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Jumlah peserta bimbingan paramedik dan petugas Puskesmas				30	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Jumlah peserta bimbingan dokter hewan praktek				30	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Jumlah pengadaan desinfektan				150	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Jumlah peserta sosialisasi PHM				425	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Pemeriksaan specimen				40	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Angka produksi telur		10.700	873.336.311	8.013	877.293.974											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Angka produksi susu		580.000		80.541	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
	Agribisnis Peternakan Unggulan Daerah	Jumlah IB kambing				0	877.293.974		756.865.000									Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		jumlah sampel pakan yang diawasi				0	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Jumlah evaluasi petugas dan produk peternakan				0	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		terlaksananya kegiatan penetasan ayam buras				0	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Jumlah Lomba Ternak Unggul (kontes)				0	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Jumlah peserta pelatihan peternakan				0	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Jumlah peserta bimtek KT kambing di Dlingo				0	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan				305.414.023	80	909.246.423											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Angka produksi telur				8.013	577.293.974											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RPKD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RPKD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Angka produksi susu				80.541	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Angka populasi Ternak				0	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Persentase pengawasan pangan asal hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal)		47		45	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
	Peningkatan Kesmasvet, Pengolahan dan Pemasaran	Terselenggaranya sosialisasi peduli ASUH				325	331.952.449		403.050.000									Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Terselenggaranya sosialisasi pengelolaan RPA				25	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Terselenggaranya bimtek pemotongan hewan qurban bagi takmir				100	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Jumlah dokumen UKL UPL Segoroyoso				1	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Terselenggaranya promosi produk poaternakan				29	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Terselenggaranya koordinasi petugas pemeriksa hewan qurban				150	0											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
4	ENERGI DAN SUMBER DAYA ALAM																	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
	Program potensi energi	Cakupan pengembangan potensi energi	persentase	100	113.886.960	60	96.941.500											Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pendataan Potensi Energi					0	96.941.500	####										Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian
		terlaksananya kajian energi	kajian			2	0											Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian
		jumlah rakor BBM & LPJ	kali			3	0											Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian
5	PERDAGANGAN																	Dinas Perdagangan
		Pertumbuhan Ekonomi																Dinas Perdagangan
	Program peningkatan dan pengembangan ekspor	Nilai ekspor	US\$	82.998.905	1.615.370.496	115.148.452	2.971.639.051											Dinas Perdagangan
	Pengembangan ekspor dengan instansi terkait/asosiasi/pengusaha					0	226.207.000		32.850.000									Dinas Perdagangan
		Jumlah Publikasi Melalui Media Cetak/ Elektronik	Kali			11	0											Dinas Perdagangan
		Jumlah Publikasi Melalui Sosial Media	Dokumen			1	0											Dinas Perdagangan
		Jumlah Peserta Sosialisasi Ijin Usaha Perdagangan	Orang			60	0											Dinas Perdagangan
	Pengembangan Pasar dan Ekspor Daerah					0	1.276.664.750		649.235.000									Dinas Perdagangan
		Pameran yang diikuti	Kali			7	0											Dinas Perdagangan
		Jumlah Peserta Pelatihan	Orang			120	0											Dinas Perdagangan
		Jumlah dokumen penataan ekspor	Dokumen			1	0											Dinas Perdagangan
	Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan	Cakupan kawasan pedagang kaki lima	Kawasan	5	1.508.684.912	3	1.468.767.301											Dinas Perdagangan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan					0	747.257.000		105.750.000									Dinas Perdagangan
		Jumlah lokasi sentra kuliner	Kawasan			1	0											Dinas Perdagangan
		Jumlah Pendataan dan Kajian PKL di Kec. Srandakan	Dokumen			1	0											Dinas Perdagangan
		Jumlah Pendataan dan Kajian PKL di Kec. Pleret	Dokumen			1	0											Dinas Perdagangan
		Jumlah Penyusunan DED PKL di Kabupaten Bantul	Dokumen			1	0											Dinas Perdagangan
	Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan					0	721.510.301		186.150.000									Dinas Perdagangan
		Jumlah Tenda untuk PKL	Unit			18	0											Dinas Perdagangan
		Jumlah Kawasan PKL yang terbangun	Kawasan			1	0											Dinas Perdagangan
		Jumlah Peserta Sosialisasi Penataan PKL	Orang			80	0											Dinas Perdagangan
		Jumlah Pemetaan PKL	Dokumen			1	0											Dinas Perdagangan
		Jumlah lokasi terpadu PKL	Kawasan			1	0											Dinas Perdagangan
						0	0											Dinas Perdagangan
	Program pemberdayaan pedagang	Persentase pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat	%	5	1.010.843.252	0	1.142.285.200											Dinas Perdagangan
	Peningkatan SDM, Kelembagaan dan Promosi Pasar					0	1.142.285.200		315.995.800									Dinas Perdagangan
		Jumlah Peserta Pendampingan APPSI	Orang			210	0											Dinas Perdagangan
		Jumlah Peserta Pelatihan Pedagang Pasar (10 kali)	Orang			400	0											Dinas Perdagangan
		Terlaksananya Lomba Pasar Bersih	Kali			1	0											Dinas Perdagangan
		Terlaksananya Grebeg Pasar	Kali			1	0											Dinas Perdagangan
		Terlaksananya Peresmian Pasar	Kali			1	0											Dinas Perdagangan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
		Penayangan Advetorial dan Videotron	Tahun			1	0											Dinas Perdagangan
		Jumlah Bailho Terpasang	unit			4	0											Dinas Perdagangan
	Program penataan pasar rakyat	Persentase kondisi pasar rakyat baik	%	1	7.717.843.526	75	8.283.482.174											Dinas Perdagangan
	Pembangunan dan Rehabilitasi Pasar Rakyat					0	4.720.245.074		316.050.000									Dinas Perdagangan
		Tersusunnya DED pasar rakyat	Dokumen			2	0											Dinas Perdagangan
		Terlaksananya pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan pasar rakyat	Pasar			20	0											Dinas Perdagangan
	Pengembangan Pasar Rakyat Ber SNI					0	31.750.600		40.026.000									Dinas Perdagangan
		Jumlah pendampingan Pengembangan Pasar Rakyat Ber-SNI (Pasar Imogiri)	Bulan			12	0											Dinas Perdagangan
	Revitalisasi Pasar Rakyat					0	3.293.315.000		3.500.000.000									Dinas Perdagangan
		Terlaksananya pembangunan/revitalisasi/rehabilitasi pasar rakyat	Unit			2	0											Dinas Perdagangan
	Intensifikasi Pendapatan Pasar					0	238.171.500		82.800.000									Dinas Perdagangan
		Jumlah Kajian Potensi Pasar Rakyat	Dokumen			1	0											Dinas Perdagangan
		Jumlah FGD Potensi Pasar Rakyat	Kali			1	0											Dinas Perdagangan
		Jumlah Penguatan SDM Pasar	Kali			1	0											Dinas Perdagangan
		Evaluasi Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan Pasar, Dana Bergulir dan Pengelolaan MCK	Kali			38	0											Dinas Perdagangan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RPKD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RPKD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Cakupan alat UTTP (ukur takar timbang dan perlengkapannya) yang ditera/tera ulang		9	1.873.401.017	9	1.574.654.223											Dinas Perdagangan
	Pelayanan Kemetrolgian Daerah					0	1.574.654.223		100.000.000									Dinas Perdagangan
		Jumlah UTTP yang ditera/tera ulang	Unit			60.000	0											Dinas Perdagangan
		Jumlah Pelaksanaan Koordinasi	Kali			25	0											Dinas Perdagangan
		Jumlah Peserta Sosialisasi Kemetrolgian	Orang			240	0											Dinas Perdagangan
		Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Kemetrolgian	Kali			3	0											Dinas Perdagangan
		Jumlah Pelaksanaan Sidang Tera Ulang di Pasar	Kali			60	0											Dinas Perdagangan
		Jumlah Pelaksanaan Sidang Tera Ulang di Puskesmas	Kali			15	0											Dinas Perdagangan
		Jumlah Pelaksanaan Tera/Tera Ulang Dilokasi UTTP Berada	Kali			100	0											Dinas Perdagangan
		Update Data Potensi Wajib Tera/Tera Ulang	Kegiatan			1	0											Dinas Perdagangan
	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Persentase deviasi harga komoditas strategis	%	≤ 5	175.334.249	5	148.668.500											Dinas Perdagangan
	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk					0	69.758.000		49.480.000									Dinas Perdagangan
		Terlaksananya pemantauan harga barang kebutuhan pokok	Dokumen			12	0											Dinas Perdagangan
		Terlaksananya operasi pasar bahan kebutuhan pokok strategis	Kali			2	0											Dinas Perdagangan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir PeriodeRPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengembangan Pengelolaan Gedung dengan Sistem Resi Gudang					0	35.770.500											Dinas Perdagangan
		Jumlah Peserta Sosialisasi SRG	Orang			150	0											Dinas Perdagangan
		Jumlah Peserta Temu Usaha	Orang			30	0											Dinas Perdagangan
	Peningkatan pelayanan perdagangan					0	43.140.000		42.162.000									Dinas Perdagangan
		Jumlah Kegiatan Perdagangan Yang Dipantau Dan Diawasi	Jenis			9	0											Dinas Perdagangan
6	PERINDUSTRIAN																	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
	Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi	Cakupan usaha yang terstandarisasi	IKM	50	310.439.739	50	244.330.000											Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
	Pengembangan Sistem dan Inovasi Teknologi Industri					0	244.330.000		142.850.000									Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
		sosialisasi SNI	IKM			0	0											Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
		Sosialisasi HKI	IKM			20	0											Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
		Sosialisasi SVLK	IKM			20	0											Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RPKD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RPKD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
		sosialisasi HALAL				50	0											Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian
		sosialisasi PIRT				0	0											Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian
		Terselenggaranya pameran				0	0											Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian
		workshop penguatan sentra				0	0											Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian
		jumlah kursus penyuluhan keamanan pangan SP-IRT	IKM			50	0											Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian
		sertifikasi HKI	sertifikat			18	0											Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian
		sertifikasi SVLK	sertifikat			2	0											Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian
		sertifikasi Halal	sertifikat			30	0											Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian
		sertifikasi SPIRT	sertifikat			0	0											Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian
		terlaksananya promosi IKM	IKM			3	0											Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Persentase nilai produksi				0	0											Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Persentase IKM Non Sentra yang dikembangkan	presentase	7	1.158.753.061	5	1.111.740.000											Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
	Pembinaan IKM Melalui Dekranas Kabupaten Bantul					0	358.350.000		411.640.000									Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
		terlaksananya promosi kegiatan Dekranas	kali			3	0											Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
		jumlah event				0	0											Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
		terlaksananya pelatihan	kali			1	0											Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
		sosialisasi peraturan dan program kerja dekranasda	orang			50	0											Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
		studi banding bagi anggota dan pengurus Dekranas	orang			50	0											Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
	Pengembangan dan Pemberdayaan IKM					0	402.190.000		801.200.000									Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
		jumlah pelatihan industri	kelompok			0	0											Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RPKD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RPKD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
		jumlah peserta pelatihan industri	IKM			300	0											Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian
	Pengembangan Pemasaran IKM					0	216.300.000		81.708.000									Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian
		pameran	kali			0	0											Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian
		workshop bekrift	kali			0	0											Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian
		jumlah promosi bagi IKM di event kegiatan Nasional	kali			2	0											Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian
	Pengembangan Industri Kreatif					0	134.900.000		123.290.000									Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian
		terlaksananya festival batik				0	0											Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian
		workshop penguatan industri kreatif				0	0											Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian
		terlaksananya publikasi/iklan pengembangan produk melalui media sosial				0	0											Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian
		terlaksananya pameran				0	0											Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RPKD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RPKD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		jumlah koordinasi antar pengurus Korwil APKASI	kali			1	0											Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian
		jumlah promosi bagi IKM di event Kementrian	kali			1	0											Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian
	Program penataan struktur industri	Cakupan kerjasama pemenuhan bahan baku industri	IKM	2	348.133.289	1	679.351.620											Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian
	Pengembangan Kebijakan dan Kerjasama Industri					0	679.351.620		5.950.964.635									Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian
		terjalannya kemitraan				0	0											Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian
		raperda RPIK	dokumen			1	0											Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian
		persetujuan prinsip	rekomendasi			0	0											Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian
		kajian pada sentra				1	0											Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian
		pelatihan pada pengrajin untuk dimitrakan dengan PT.YIP	pelatihan			0	0											Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian
		terlaksananya promosi IKM	IKM			7	0											Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RPKD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RPKD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	Persentase pengembangan sentra industri potensial	persentase	80	1.029.661.427	30	473.525.060											Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian
	Pemberdayaan IKM Sentra					0	456.725.060		520.000.000									Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian
		Pelatihan IKM	IKM			60	0											Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian
		Promosi IKM	IKM			10	0											Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian
		terlaksananya Baliho pada sentra	unit			5	0											Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian
		terselenggaranya FGD	kali			1	0											Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian
	Fasilitasi Pelaksanaan Kemitraan IKM dan Perusahaan Besar dalam Pengadaan Bahan Baku Industri Hasil Tembakau					0	16.800.000											Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian
		Kemitraan IKM dan Perusahaan Besar				0	0											Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian
7	TRANSMIGRASI																	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
	Program transmigrasi umum	Presentase penempatan transmigrasi	persen	72	545.110.065	64	419.027.650											Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (Akhir PeriodeRPJMD) (RPJMD PERUBAHAN No. 19 2018)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RPKD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RPKD tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3		4		5		6		7		8		9= 8/7x100%		10= 6+8		11= 10/5x100%		12
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyuluhan, dan Transmigrasi	Pengarahannya, Penempatan Transmigrasi	Jumlah KK yang ditempatkan	KK			20	419.027.650		4.820.915.000									Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
			Jumlah Penyebarluasan informasi Transmigrasi	Kali			30	0											Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul, diolah, 2020

2.7. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah diuraikan berdasarkan hasil capaian kinerja penyelenggaraan urusan pembangunan daerah, dan adanya permasalahan dampak dari pandemi Covid – 19.

2.7.4 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Permasalahan penyelenggaraan urusan pembangunan daerah dibagi menjadi : 1) urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 2) urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 3) urusan pilihan, dan 4) urusan penunjang, secara rinci diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 2.181 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2019	Capaian 2019	Interpretasi 2019	Permasalahan RKPD 2021	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
					Belum Tercapai (<)			
					Sesuai (=)			
					Melampaui (>)			
	Aspek Kesejahteraan Masyarakat							
	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi							
	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,45	5,53	Melampaui	Laju pertumbuhan perekonomian Kabupaten Bantul di bawah DIY.	Peningkatan pertumbuhan dan kontribusi sektor skunder-tercier dengan lokomotif pembangunan daerah berbasis industri pariwisata.	
	Pemerataan Pendapatan	Angka	0,39	0,448	Belum Tercapai	Pelambatan pertumbuhan sektor primer (pertanian, kehutanan, dan perikanan) karena pergeseran dari sektor primer ke sektor skunder (industri pengolahan dan penyediaan akomodasi, makan-minum) serta sektot terciar (jasa).	Modernisasi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan serta penciptaan lapangan kerja baru melalui sektor primer, skunder dan terciar.	
						Pertumbuhan kelompok menengah ke atas belum diiringi pertumbuhan kelompok miskin	Dukungan program pengentasan kemiskinan dan peningkatan SDM	
	Fokus kesejahteraan masyarakat							
	Indeks Pembangunan Manusia	Angka Indeks	79,83	80,01	Melampaui			

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2019	Capaian 2019	Interpretasi 2019	Permasalahan RKPD 2021	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
	Angka Kemiskinan	%	10,86	12,92	Belum Tercapai	Belum ketepatan sasaran program, kurangnya keterpaduan dalam implementasi, serta belum optimalnya fungsi institusi yang mengoordinasikan penanggulangan kemiskinan	Dukungan keterpaduan program kemiskinan lintas sektor	
	Fokus Seni Budaya dan Olahraga							
	Cakupan Pelestarian adat dan tradisi	Persen	24					Disbud
	Persentase prestasi olahraga tingkat propinsi (POPDA/Pekan Olah Raga Pelajar) yang diikuti	%	28	32,18	Melampaui			Dikpora
	Aspek Pelayanan Umum							
	Fokus Layanan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar							
	Urusan Pendidikan							
	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,23	15,15	Belum Tercapai	(1) Belum optimalnya kinerja pengelolaan BOP SD dan SMP; (2) Belum optimalnya APM SD/MI; (3) Belum optimalnya APM SMP/MTs; (4) Belum optimalnya penanganan Tingkat Putus Sekolah.	(1) Orangtua sadar dan peduli manfaat pendidikan untuk peningkatan taraf hidup anaknya di masa yang akan datang; (2) Aksesibilitas SD dan SMP Gratis Berkualitas.	

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2019	Capaian 2019	Interpretasi 2019	Permasalahan RKPD 2021	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	8,94	9,54	Melampaui	Belum optimalnya kinerja pengelolaan BOP SD dan SMP.	Orangtua sadar dan peduli manfaat pendidikan untuk peningkatan taraf hidup anaknya di masa yang akan datang.	Dikpora
						Belum optimalnya APM SD/MI.	Aksesibilitas SD dan SMP Gratis Berkualitas.	
						Belum optimalnya APM SMP/MTs.		
						Belum optimalnya penanganan Tingkat Putus Sekolah.		
						Masih banyak SD yang belum memiliki ruang perpustakaan yang memenuhi SPM	Dilaksanakan pembangunan ruang/gedung perpustakaan secara bertahap.	Dikpora
						Perlu peningkatan Kesejahteraan bagi GTT dan PTT	Diupayakan penambahan insentif secara bertahap.	Dikpora
						Masih kurangnya partisipasi warga dalam penyelenggaraan Pendidikan Non Formal	Dibutuhkan peran aktif dari semua pihak untuk memberikan motivasi agar warga belajar memiliki kesadaran untuk belajar secara aktif di PKBM masing-masing	Dikpora
	Angka Partisipasi Kasar (APK)							

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2019	Capaian 2019	Interpretasi 2019	Permasalahan RKPD 2021	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
	APK SD/MI	%	96,3	95,26	Belum Tercapai	Sebagian siswa bersekolah di luar wilayah kabupaten	Dukungan program peningkatan mutu pendidikan SD/MI	
	APK SMP/MTs	%	95,25	101,38	Melampaui			
	APK PAUD	%	98,85	106,24	Melampaui	Masih rendahnya kualitas pembelajaran di lembaga PAUD yang dikelola oleh kelompok masyarakat atau pihak swasta	Orangtua sadar dan peduli manfaat PAUD.	Dikpora
						Belum optimalnya kinerja pengelolaan BOP jenjang PAUD	Orangtua jadi Guru dan Guru jadi Orangtua.	
						Belum optimalnya aksesibilitas PAUD Berkualitas		
						Masih kurangnya penilik PAUD, Penilik LKP dan Penilik PKBM	Penambahan penilik PAUD, Penilik LKP dan Penilik PKBM	Dikpora
	Angka Partisipasi Murni (APM)							
	APM SD/MI	%	84,55	85,86	Melampaui			
	APM SMP/MTs	%	68	76,8	Melampaui			
	Peringkat rata-rata nilai USM SD/MI	Angka (SD)	Ranking II DIY	Ranking III DIY	Belum Tercapai	Kualitas Guru SD / MI dan SMP / MTs	Ada guru yang kompeten dalam peningkatan kualitas dan penuntasan target pembelajaran	Dikpora

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2019	Capaian 2019	Interpretasi 2019	Permasalahan RKPD 2021	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
						Belum optimalnya kualitas pembelajaran dan disiplin penuntasan target pembelajaran	Orangtua berperan konstruktif dalam peningkatan kualitas pembelajaran di rumah	
	Peringkat rata-rata nilai UN SMP/MTs	Angka (SMP)	Ranking II DIY	Ranking III DIY	Belum Tercapai		Siswa termotivasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran untuk meningkatkan nilai UN nya.	
	Jumlah Prestasi Non Akademik Tk Nasional	Buah	6	4	Belum Tercapai			
	Presentase Kelulusan							
	SD/MI	%	100	100	Sesuai			
	SMP/MTs	%	100	100	Sesuai			
	Angka Melanjutkan							
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	100	108,56	Melampaui			
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	100	111,18	Melampaui			
	Angka Putus Sekolah							
	SD/MI	%	0,02	0,004	Melampaui	Belum optimalnya peningkatan kualitas pembelajaran di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).	PKBM yang terselenggara secara efisien dan efektif	Dikpora

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2019	Capaian 2019	Interpretasi 2019	Permasalahan RKPD 2021	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
	SMP/MTs	%	0,02	0,01	Melampaui	Belum optimalnya kinerja pengelolaan BOP PKBM	Peserta pendidikan kesetaraan yang termotivasi untuk menuntaskan pembelajarannya.	
	Urusan Kesehatan							
	Umur Harapan Hidup	Tahun	73,60	73,77	Melampaui	Masih perlunya upaya penguatan internalisasi Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di masyarakat	Masyarakat berparadigma sehat, lingkungannya sehat dan penyakit menular dan tidak menular terkendali secara optimal	Dinkes
						GERMAS belum menjadi budaya hidup di masyarakat,		
						Indeks Keluarga Sehat masih rendah		
						Belum optimalnya pencapaian SPM Bidang Kesehatan, 12 Jenis Pelayanan Dasar		

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2019	Capaian 2019	Interpretasi 2019	Permasalahan RKPD 2021	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
						Belum optimalnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular		
						Masih belum optimalnya kinerja puskesmas		
						Masih rendahnya jumlah Tempat Pengelolaan Makanan/TPM (kantin, warung makan, restoran dan jasa boga) yang memiliki sertifikat laik sehat		
						Perlu percepatan peningkatan cakupan desa melaksanakan 5 pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)		
						Belum Optimalnya kemitraan dengan lintas program, lintas sektor, dan pemangku kepentingan terkait		
						Ancaman infeksi <i>new emerging</i> dan <i>re-emerging</i> yang dapat menimbulkan Kegawatdaruratan Kesehatan Masyarakat		

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2019	Capaian 2019	Interpretasi 2019	Permasalahan RKPD 2021	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
						Belum optimalnya BINWASDAL pada yankes swasta.		
						Belum optimalnya pelaksanaan sistem penanggulangan gawat darurat terpadu		
						Peningkatan Kasus Penyakit Tidak Menular dan ODGJ	Skrining faktor risiko penyakit tidak menular pada OPD di Kab Bantul	Dinkes
							Skrining kepada masyarakat umum yang dilakukan puskesmas	Dinkes
							Deteksi dini pada penderita retardasi mental	Dinkes
							Pengobatan dan pemantauan keteraturan minum obat.	Dinkes
	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 KH	85	99,49	Belum Tercapai	Belum optimalnya pelaksanaan sistem penanggulangan gawat darurat terpadu		Puskesmas
	Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1000 KH	8,2	8,33	Belum Tercapai	Keberlangsungan pelaksanaan akreditasi Puskesmas belum optimal		

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2019	Capaian 2019	Interpretasi 2019	Permasalahan RKPD 2021	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
						Prosentase ALKES yang dikalibrasi di puskesmas masih rendah		
						Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi Masih di atas target	Pelatihan / update knowledge EKG untuk dokter (sudah dilaksanakan) baru 1 dokter per puskesmas	Dinkes
							Pemeriksaan EKG untuk ibu hamil DIWAJIBKAN minimal 1 kali atau sesuai indikasi	Dinkes
							Pendampingan puskesmas oleh SpOG sesuai regio puskesmas	Dinkes
							Pengadaan USG untuk Puskesmas	Dinkes
							Rujukan ibu hamil ke Puskesmas yang mempunyai USG (rujukan horizontal), pembiayaan direncanakan oleh Jamkesda sesuai Perda yang baru	Dinkes
							Binwasdal praktik PMB oleh Dinkes dioptimalkan, gunakan SPO dan check list binwasdal yang telah disusun, SPO punishment nakes yang bermasalah	Dinkes
							Pembinaan PMB dan nakes agar kejadian kematian ibu tidak berulang	Dinkes
							Penyusunan SOP pemantauan bumil berisiko	Dinkes

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2019	Capaian 2019	Interpretasi 2019	Permasalahan RKPD 2021	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
							Penyusunan SOP pendampingan rujukan (follow up)	Dinkes
							Kepastian pembiayaan bumil, koordinasi pembiayaan oleh Jampersal, Jamkesda, RS dan BPJS kesehatan	Dinkes
	Prevalensi Balita Gizi Buruk	%	0,39	0,41	Belum Tercapai	Belum optimalnya pelayanan persalinan di puskesmas		
	Prevalensi penderita HIV	Angka	<0,2	0,12	Belum Tercapai	Belum optimalnya pelayanan <i>Antenatal Care</i> (ANC) di puskesmas		
						Banyak pasien HIV AIDS yang loss to follow up	Validasi data layanan LFU (Lost Follow Up) dan kerjasama dengan Pendukung Sebaya telah ditingkatkan dengan harapan pasien LFU dan alpa dapat ditekan untuk masa yang akan datang	Dinkes
	Angka Kesakitan/Insidence Rate (IR) DBD	Per 100.000 penduduk	120	140	Belum Tercapai	Belum optimalnya pemanfaatan DGS di puskesmas (Digital Government System – data pelayanan kesehatan terpusat)		
						Peningkatan Tajam Kasus DBD	Kegiatan pengendalian bekerjasama dengan Yayasan Tahija dalam Eliminate Dengue Project (EDP), yaitu dengan melepas nyamuk Wolbacia	Dinkes

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2019	Capaian 2019	Interpretasi 2019	Permasalahan RKPD 2021	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
							Mengeluarkan surat edaran Kepala Dinas Kesehatan No tentang 443/497/2019 Kewaspadaan Dengue	Dinkes
							Peningkatan penyuluhan oleh petugas DBD	Dinkes
							Pemberdayaan kader-kader dusun, remaja dan siswa SD untuk PSN	Dinkes
							Melakukan dan koordinasi di tingkat kecamatan	Dinkes
							Melaksanakan foging sesuai Standar Prosedur yang telah ditetapkan	Dinkes
							Pelaksanaan pelayanan deteksi dini DB di puskesmas pada semua kasus demam yang sudah ≥ 2 hari, dengan cara pemeriksaan menggunakan antigen dengue	Dinkes
							Promosi kesehatan tentang kewaspadaan DB melalui media elektronik	Dinkes
							Pembagian Larvasida di wilayah endemik pada saat PE	Dinkes
							KIE dan kerjasama Lintas program dan lintas sektor	Dinkes
							Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui gertak PSN	Dinkes
	Net Death Rate (permil)	Per 1000 Pasien	16,7	18,7	Belum Tercapai	Belum optimalnya pelaksanaan sistem penanggulangan gawat darurat terpadu	RSUD menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang prima	RSUD

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2019	Capaian 2019	Interpretasi 2019	Permasalahan RKPD 2021	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
						Prosentase alkes yang dikalibrasi di RSUD masih rendah		
						Belum optimalnya ketersediaan alkes sesuai perkembangan kebutuhan.		
						Belum optimalnya pelayanan Antenatal Care (ANC) di puskesmas		
						Belum memadainya pelayanan 24 jam dokter spesialis		
						Belum optimalnya ketersediaan obat-obatan		
						Belum optimalnya pengendalian penerapan SOP RSUD		
						Kurang lancarnya <i>Cash Flow</i> Keuangan RSUD		
						Meningkatnya angka kematian/ Net Death Rate (NDR) di rumah sakit dari 16,98 permil menjadi 22,62 permil. Hal ini kemungkinan merupakan dampak diterapkannya rujukan berjenjang online oleh BPJS Kesehatan sehingga pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang dirujuk ke RSUD Panembahan Senapati sebagian besar merupakan pasien-pasien dalam kondisi parah dan perlu penanganan yang intensif (layanan spesialisistik, sub spesialisistik dan gawat darurat).	Menerapkan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien	RSUD
							Menjalin kemitraan dengan pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama	RSUD
							Melakukan koordinasi dengan BPJS Kesehatan dan stakeholder terkait untuk memperbaiki sistem rujukan pelayanan kesehatan online yang baru saja diterapkan	RSUD
							Meningkatkan kompetensi SDM dan pemenuhan sarana dan prasarana rumah sakit	RSUD

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2019	Capaian 2019	Interpretasi 2019	Permasalahan RKPD 2021	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
	Permasalahan terkait adanya pandemi covid-19					Semua Sumber Daya digunakan fokus untuk penanggulangan pandemi covid 19, sehingga permasalahan kesehatan yang lain misal : kematian ibu, Demam Berdarah Dengue, Penyakit Tidak Menular berkurang dalam penanggannya	1. Tenaga kesehatan dan masyarakat mentaati protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka penanggulangan pandemi covid 19 2. Ketersediaan anggaran dan sumber daya lain setiap saat sesuai kebutuhan yang ada	RSUD
						Sumber Daya Manusia yang ada rentan terhadap penularan Covid 19 sehingga ketersediaan SDM bisa berkurang sewaktu-waktu (rotolnya apabila rapid test positif maka harus isolasi 14 hari, begitu juga untuk tenaga yang kontak dengan pasien konfirmasi covid-19 tanpa APD standar	3. Kerjasama seluruh stakeholder terutama non kesehatan dalam penanggulangan covid 19 dan permasalahan kesehatan yang lain 4. Penentuan skala prioritas dalam penanganan masalah kesehatan secara umum	
						Perencanaan anggaran menjadi sulit, karena : a. Kurang predictable (kasusnya sulit diprediksi) b. Ketersediaan barang terbatas c. Harga fluktuatif		
						Komunikasi berjejaring yang sulit baik tingkat propinsi maupun ke masyarakat. Hal ini salah satunya disebabkan adanya hoax		

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2019	Capaian 2019	Interpretasi 2019	Permasalahan RKPD 2021	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
						Pedoman penanganan yang sangat dinamis (dalam 1 bulan 4 kali revisi)		
	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Infrastruktur	Klasifikasi	76	76,77	Melampaui			
	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap	%	75,08	75,1	Melampaui	Sampai dengan Bulan Desember 2019 Masih 25,08% jalan di Kabupaten Bantul yang belum mantab.	Kegiatan Rehabilitasi, pemeliharaan, dan Peningkatan Jalan. Salah satunya adalah jalan Cinomati	DPUPKP
	Persentase Gedung Pemerintah Kondisi Baik	%	82	84	Melampaui	Sampai dengan Bulan Desember 2019 Masih 16% Gedung Pemerintah di Kabupaten Bantul yang belum dalam kondisi Baik	Kegiatan Pemeliharaan dan Pembangunan Gedung Pemerintah	DPUPKP
	Presentase penanganan banjir	%	34,12	34	Belum Tercapai	Sampai dengan Desember 2019 masih 66% dari daerah rawan banjir luapan belum tertangani dengan baik. Baseline Luas daerah rawan banjir luapan tahun 2014 adalah 893,56 Ha	Pemeliharaan dan pembangunan saluran drainase, bangunan penguat tebing sungai, dan penyusunan masterplane drainase Kabupaten Bantul	DPUPKP
	Persentase Kecukupan Air Irigasi	%	82,16	82,19	Melampaui	Masih 17,81% Derah Irigasi kewenangan Kab. Bantul yang belum dilayani / tercukupi air dengan baik	Pemeliharaan dan pembangunan Saluran Irigasi, serta Pemanfaatan dan pengelolaan sumber air Irigasi dengan baik	DPUPKP

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2019	Capaian 2019	Interpretasi 2019	Permasalahan RKPD 2021	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
	Presentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	72,5	80	Melampaui	Masih sekitar 27,5% wilayah di Kabupaten Bantul belum sesuai pemanfaatan ruang nya	Sosialisasi dan upaya penertiban RTRW dan RDTR di Kabupaten Bantul	Dipertaru
	Jumlah dokumen tata ruang yang sudah diperdakan	Dokumen	3	2	Belum Tercapai	Belum selesainya perda hasil peninjauan ulang RTRW dan RDTRK	Percepatan penyusunan perda hasil review RTRW dan RDTR	Dipertaru
	Persentase cakupan pengendalian tata ruang	%	75	73	Belum Tercapai	RTRW Kabupaten Bantul belum di review, RDTR Kawasan Perkotaan, Perdesaan, dan Pansela belum selesai	Review RTRW, dan RDTR segera diperdakan, termasuk LP2B dan Lahan Sawah Berkelanjutan	Dipertaru
	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman							
	Persentase Kawasan kumuh perkotaan yang tertangani	%	90	92,49	Melampaui	Banyak lokasi kumuh yang belum masuk kedalam SK Kumuh	Peninjauan ulang SK Kumuh Kabupaten Bantul, pembangunan dan penataan di wilayah kumuh	DPUPKP
	Urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat							
	Angka Kriminalitas	Persen	0,070	0,074	Belum Tercapai			

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2019	Capaian 2019	Interpretasi 2019	Permasalahan RKPD 2021	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
	Persentase Penegakan Perda	%	66	66	Sesuai	Penegakan perda belum optimal	Ketegasan dalam penegakan perda	Satpol PP
						Masih belum optimalnya manajemen penugasan personil Satpol PP	Ada personil Satpol PP yang kompeten dalam peningkatan TRANTIBUM dan LINMAS	
						Belum optimalnya peran komunitas (atau paguyuban) yang terkait dengan Perda dan Perkada dalam peningkatan kesadaran masyarakat terhadap substansi Perda dan Perkada		
	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3	%	100	100	Sesuai		Koordinasi sinergis yang efektif dalam Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Satpol PP

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2019	Capaian 2019	Interpretasi 2019	Permasalahan RKPD 2021	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
	Jumlah intoleransi di masyarakat	Kasus	0	2	Belum Tercapai	Meningkatnya potensi konflik sosial di tengah masyarakat yang semakin terbuka terhadap informasi luar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan	Masyarakat peduli dan aktif membangun semangat kesatuan bangsa dan nasionalisme	Kesbangpol
						Semakin berkurangnya semangat nasionalisme, kebebasan yang kebablasan, lebih mengutamakan kepentingan pribadi/golongan, dan terjebak dalam konflik sosial		
						Masih rendahnya kesadaran pengurus organisasi sosial kemasyarakatan terhadap legalisasi peran kelembagaannya	LSM, Ormas dan OKP aktif meningkatkan legalisasi peran kelembagaannya	
						Belum optimalnya pelaksanaan TL rekomendasi Tim Kewaspadaan Dini	Para pihak terkait aktif dalam TL Rekomendasi TKD.	
						Belum semua Dusun memiliki Jaga Warga	Masyarakat mengetahui potensi konflik dan dapat menyelaurnya secara bertanggung-jawab	
	Persentase pemilih yang berpartisipasi	%	75	86,77	Melampaui	Besaran bantuan Keuangan Partai Politik baru dipenuhi Rp 1.927 per satu suara sah per tahun	Diusulkan kenaikan anggaran	Kesbangpol

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2019	Capaian 2019	Interpretasi 2019	Permasalahan RKPD 2021	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
	Desa Tangguh Bencana	Desa	38,66	46,67	Melampaui	Belum semua Desa Tangguh Bencana yang dibentuk, ditindaklanjuti dengan kegiatan pengembangan Desa Tangguh Bencana. Hal ini menyebabkan tingkat kesiapsiagaan terhadap bencana menurun	Peran serta Desa dalam Pembentukan Desa Tangguh Bencana dan pengembangannya Pemanfaatan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dalam proses perencanaan Pelaksanaan Dokumen Rencana Kontijensi Tsunami, Rencana Kontijensi Gempa dan Rencana Kontijensi Banjir	BPBD
	Persentase kecepatan Reaksi Tanggap Darurat Bencana yang memenuhi respon time 15 menit	%	99	100	Melampaui	WMK (wilayah manajemen bencana kebakaran) baru mencapai 353,35 km ² (69,71% dari luas kabupaten Bantul)	Dukungan 3 pos pemadam kebakaran di Kasihan, Banguntapan, Imogiri yang sudah operasional dan tambahan 3 pos di Piyungan Pundong Sedayu, namun belum dapat operasional Penguatan kelembagaan dan SDM Pemadam Kebakaran Sapas pendukung Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	BPBD

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2019	Capaian 2019	Interpretasi 2019	Permasalahan RKPD 2021	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
	Persentase Relokasi Warga	%	63,64	89,09	Melampaui	Masih terdapat masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan rawan bencana	penyediaan dan status lahan tempat relokasi bencana	BPBD
	Persentase Sekolah Siaga Bencana	%	4,2	4,12	Belum Tercapai	Kesadaran bahwa sekolah berada pada kawasan bahaya bencana masih rendah, dari 511 sekolah baru 4,12% (21 sekolah Siaga Bencana)	Pembentukan sekolah siaga bencana secara mandiri	BPBD
	Urusan Sosial							
	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	%	12,75			Belum optimalnya integrasi sistem pendataan PMKS untuk penetapan target group untuk diintervensi dan sebagai dasar penilaian keberhasilan intervensi kebijakan.	PMKS aktif meningkatkan status kesejahteraan diri dan keluarganya.	Dinsos P3A
						Belum optimalnya pencapaian target SPM Bidang Sosial Kabupaten	Masyarakat tidak tergantung pada bantuan pemerintah tapi selalu berusaha untuk mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan diri dan keluarganya.	
						Belum optimalnya validitas pendataan PMKS di tingkat Operator data TKPK, TKSK, serta PKH	Pemerintah DIY aktif mensinergikan, mengkoordinasikan, dan mengawasi kebijakan penanganan PMKS.	
						Belum optimalnya sinergi, koordinasi dan pengawasan kebijakan penanganan PMKS di tingkat Kabupaten Bantul dan dengan Pemerintah DIY.		

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2019	Capaian 2019	Interpretasi 2019	Permasalahan RKPD 2021	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
						Belum sinerginya kesiap-siagaan kedaruratan kebencanaan dan penanganan korban bencana		
						Belum optimalnya pemanfaatan Potensi Kesos	Semua pihak aktif dalam memberdayakan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)	Dinsos P3A
						Belum optimalnya pelayanan pemberdayaan oleh TKSK dan Peksos		
						Masih rendahnya kemampuan TKSK dalam fasilitasi kebijakan pembangunan sosial yang inovatif.		
	Fokus Layanan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar							
	Urusan Tenaga Kerja							
	Angka Pengangguran	%	3,0	3,06	Belum Tercapai	Kualitas tenaga kerja tidak memenuhi kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja	Adanya keterpaduan kebijakan penciptaan kesempatan kerja	Disnakertrans
						Ketersediaan lapangan kerja yang masih sedikit.		
						Masih rendahnya produktivitas usaha kecil sehingga penyerapan angkatan kerja masih rendah		

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2019	Capaian 2019	Interpretasi 2019	Permasalahan RKPD 2021	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
						Pelayanan penempatan tenaga kerja belum optimal		
						Informasi pasar kerja yang belum optimal		
						Penumbuhan dan pengembangan pekerja mandiri belum optimal		
						Belum optimal data dan informasi angkatan kerja		
						Belum optimalnya pembinaan peran LPTKIS dalam peningkatan penempatan angkatan kerja		
						Pemberi kerja belum sesuai dalam penerapan ketentuan peraturan ketenagakerjaan	Para pihak disiplin menerapkan aturan ketenagakerjaan	Disnakertrans
						Tenaga kerja mengabaikan aturan ketenagakerjaan yang berlaku		
	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
	Rasio kekerasan Perempuan dan Anak	Rasio	0,38			Masyarakat masih menganggap masalah rumah tangga adalah masalah interen yang tabu untuk diperbincangkan serta pengaruh lingkungan yang belum kondusif dalam perlindungan perempuan dan anak	Tiap rumah tangga memahami hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga dan mampu menyelesaikan permasalahan rumah tangga secara konstruktif dan mandiri	Dinsos P3A

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2019	Capaian 2019	Interpretasi 2019	Permasalahan RKPD 2021	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
						Belum efektifnya peran satgas perlindungan (tomas dan toga) dalam peningkatan kapasitas rumah tangga dalam penyelesaian kasus rumah tangga.		
						Masih belum optimalnya kerjasama para pihak terkait dalam pengurangan kekerasan dalam rumah tangga.		
						Masih belum optimalnya pemenuhan hak-hak perempuan.	Masyarakat menerapkan prinsip kesetaraan dan keadilan gender di dalam lingkungan keluarganya.	
						Belum optimalnya penerapan penganggaran responsif gender.		
						Belum optimalnya peran PUG		
						Belum optimal peran PUSPA (Partisipasi Publik Kesejahteraan Sosial Perempuan dan Anak).		
						Belum optimalnya peran tomas dan toga dalam pelemagaan prinsip kesetaraan dan keadilan gender di lingkungan.		
						Masih belum tepatnya pola pengasuhan anak.	Tomas dan Toga berperan aktif dalam peningkatan kualitas pola pengasuhan anak	

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2019	Capaian 2019	Interpretasi 2019	Permasalahan RKPD 2021	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
							Pihak swasta aktif meningkatkan fasilitas umum yang berorientasi pada perlindungan hak anak	
						Belum optimalnya ketersediaan sarpras perlindungan hak anak.		
						Belum adanya APSAI (Asosiasi Perusahaan Sayang Anak Indonesia)		
	Urusan Pangan							
45	Ketersediaan energi	kkal/kapita/hari	3.090	3.125	Melampaui	Ketersediaan energi protein belum diiringi dengan konsumsi energi protein	Jaminan ketersediaan pangan yang berasal dari produksi/panen dan pengelolaan cadangan pangan	Diperpautkan
46	Ketersediaan protein	kkal/kapita/hari	72,6	89,95	Melampaui			
47	Skor Pola Pangan Harapan	Angka	93,50	93,70	Melampaui	Konsumsi pangan didominasi padi-padian, pangan hewani dan sayur/buah. Konsumsi pangan lokal berupa umbi2an masih rendah	keaktifan KWT dalam pemanfaatan lahan pekarangan untuk budidaya pangan lokal dan melakukan diversifikasi/penganeka ragaman pangan lokal	Diperpautkan
48	Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Kelas Kelompok Tani	Kelompok	33	69	Melampaui	Belum optimalnya peran penyuluh swadaya atau mandiri	Keaktifan PPL dalam melakukan bimbingan kepada kelompok tani (834 kelp teregister)	Diperpautkan
						Rendahnya kaderisasi di Gapoktan/ kelompok tani	Kelompok menjadi tempat pembelajaran bagi anggota untuk meningkatkan produktivitas pertaniannya	
	Urusan Pertanian							

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2019	Capaian 2019	Interpretasi 2019	Permasalahan RKPD 2021	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
49	Cakupan Sertifikasi Tanah	%	92			Kesulitan dalam pendataan dan pengukuran tanah	optimalisasi pendataan tanah, menjalin kerjasama dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul	Dipertaru
	Urusan Lingkungan Hidup							
50	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	56,00	60,39	Melampaui	Pencapaian IKA yang rendah	Capaian IKA, IKU dan Indeks Tutupan Lahan	DLH
							Pemahaman masyarakat tentang regulasi LH dan penerapannya	
	Indeks Kualitas Air (IKA)	Angka	45	39,63	Belum Tercapai	Tingginya pencemaran air sungai oleh limbah rumah tangga, industri, dan sampah	Kualitas air pada 5 sungai : Winongo, Oyo, Bedog, Code dan Gajahwong	DLH
							Masyarakat peduli dan aktif dalam menjaga kualitas lingkungan hidup sekitarnya	
	Indeks Kualitas Udara (IKUd)	Angka	70	90,9	Melampaui	transportasi sebagai penyumbang polusi udara terbesar	Penanaman tanaman penghijauan	DLH
	Indeks Tutupan Lahan	Angka	46,57	53,09	Melampaui	Terbatasnya lahan ruang terbuka hijau perkotaan (capaian : 14,34%, UU : 20%)	Penanaman tanaman penghijauan	DLH
	Volume sampah yang tertangani	ribu m3	450	452	Melampaui	Masih belum optimalnya pengelolaan sampah mandiri.	Kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam pengelolaan sampah dengan prinsip 3R	DLH
	Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil							

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2019	Capaian 2019	Interpretasi 2019	Permasalahan RKPD 2021	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
	Rata-rata Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	89	99,55	Melampaui	Kesadaran Masyarakat yang rendah untuk mengubah data base dan peristiwa penting kependudukan	Masyarakat aktif mengurus administrasi kependudukan dan catatan sipil	Disdukcapil
						Masih banyak data yang dilaporkan masyarakat yang tidak valid sehingga rentan terhadap permasalahan hukum	Terselenggaranya layanan ADMINDUK berbasis digital.	Disdukcapil
						Belum terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan dokumen KTP- El karena lambatnya pengadaan blangko		
						Cakupan kepemilikan KIA anak usia 0 – 16 tahun belum tercapai	Kerjasama dengan dinas pendidikan untuk melakukan kerjasama mendata anak yang belum memiliki KIA	Disdukcapil
							Memberikan sosialisasi kepada guru dan orang tua	Disdukcapil
						Cakupan kepemilikan Akta Kelahiran anak usia 0 – 18 tahun belum optimal	Melakukan kerjasama dengan rumah sakit dan puskesmas untuk melakukan kegiatan jemput bola akta kelahiran	Disdukcapil

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2019	Capaian 2019	Interpretasi 2019	Permasalahan RKPD 2021	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
							Membangun pola pikir masyarakat akan pentingnya kepemilikan akta kelahiran melalui sosialisasi	Disdukcapil
						Kesadaran masyarakat untuk segera merubah status perkawinan akibat dari peristiwa penting (pernikahan) yang dialami masih rendah yang mengakibatkan data kependudukan yang disajikan tidak valid dan akurat	Menerbitkan KTP baru (ktp dengan status baru) bagi penduduk bantul yang melangsungkan pernikahan tersebut. Sebagai instansi pelaksana yang berhadapan langsung dengan masyarakat yaitu seluruh KUA di Kabupaten bantul	Disdukcapil
						Kesadaran masyarakat untuk segera mengurus akta kematian masih rendah, masyarakat hanya mengurus akta kematian jika akan dibutuhkan	Sosialisasi dan menciptakan inovasi Akasi Simpati (Pembuatan akta kematian sehari jadi)	Disdukcapil
	Persentase Instansi yang Memanfaatkan Data Penduduk Disdukcapil	%	85	85	Sesuai	Belum semua PD terkoneksi dengan DISDUK CAPIL.	Semua PD melakukan kerjasama pemanfaatan data DISDUK CAPIL.	Disdukcapil
						Belum optimalnya penerapan Kebijakan SATU DATA Kependudukan.	Komitmen Pemerintah Daerah untuk menerapkan Kebijakan SATU DATA Kependudukan.	
	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	80,3	92,3	Melampaui	Pemuthakiran data kependudukan belum optimal	Menciptakan inovasi smart on , untuk Proses input perubahan data menggunakan IT (HP)	Disdukcapil
								Bagian Organisasi
	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2019	Capaian 2019	Interpretasi 2019	Permasalahan RKPD 2021	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
	Indeks Desa Membangun	Jumlah Desa Mandiri	20	24	Melampaui	Masih rendahnya kompetensi aparatur desa	Pemerintahan Desa mampu meningkatkan kualitas perencanaan dan pencapaian targetnya	DPPKBPM
						Belum optimalnya integrasi perencanaan pembangunan dengan prinsip Desa Membangun		
						Belum optimalnya peran LPMD dalam pengembangan desa		DPPKBPM
						Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan bantuan dana bergulir yang ada di masyarakat		DPPKBPM
						Masih rendahnya kualitas perencanaan Pembangunan Desa dan Pencapaian Targetnya		DPPKBPM
						Belum optimalnya potensi dan permasalahan di desa menjadi dasar perencanaan pembangunan desa		DPPKBPM

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2019	Capaian 2019	Interpretasi 2019	Permasalahan RKPD 2021	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
						Belum optimalnya sinergi pengembangan BUMDes	BUMDes berkembang sebagai salah satu motor dalam Desa Membangun	DPPKBPM
						Masih rendahnya kemampuan SDM pengelola BUMDes		
	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
	Persentase kategori keluarga kurang sejahtera	%	-			Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang KKBPK	Masyarakat aktif dalam Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBP)	DPPKBPM
						Angka unmet need masih cukup tinggi 8,42%		
						Masih adanya pernikahan di bawah umur (di bawah 20 tahun)	Tercapainya PA (peserta KB Aktif) dan PB (Peserta KB Baru)	
						Belum optimalnya Program Ketahanan Keluarga sehingga pemanfaatan modal Pinjaman dana Bergulir dalam kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)		
	Rata-rata jumlah jiwa dalam keluarga (jiwa)	Jiwa	-					DPPKBPM
	Total Fertility Rate (TFR)	%	2,08	1,79	Melampaui	TFR belum mencapai kondisi ideal		DPPKBPM
	Urusan Perhubungan							

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2019	Capaian 2019	Interpretasi 2019	Permasalahan RKPD 2021	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
	Persentase penurunan kecelakaan lalu lintas	%	1,83			Masih Tingginya Angka Kecelakaan Lalulintas di Kabupaten Bantul dikarenakan kesadaran masyarakat dalam berlalulintas masih rendah serta masih perlunya penambahan jumlah rambu dan perangkat / piranti keselamatan lalulintas di Kabupaten Bantul	sosialisasi dan penegakan aturan berlalulintas dengan baik, pemasangan rambu dan piranti keselamatan lalulintas secara maksimal (rambu, penerangan jalan, cctv,	Dishub
	Urusan Komunikasi dan Informatika							
	Persentase SKPD yang menerapkan Layanan Unggulan Digital Government Services (DGS)	%	80	75,33	Belum Tercapai	Belum optimalnya tingkat kematangan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Jangkauan ketersediaan infrastruktur TIK	Diskominfo
						Belum optimalnya pengelolaan infrastruktur TIK	Pengembangan dan pengendalian infrastruktur jaringan umum	
						Belum optimalnya ketersediaan infrastruktur TIK milik pemerintah dan milik umum	Standar keamanan informasi berdasar penilaian ISO 270001	
						Belum optimalnya penerapan standar keamanan informasi		
						Terbatasnya infrastruktur TIK dan Belum meratanya sistem jaringan komunikasi di Kabupaten Bantul	Membangun jalur utama jaringan internet dan intranet Pemerintah Kabupaten Bantul dengan teknologi Fiber Optic yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Bantul sebagai sarana implementasi SPBE	Diskominfo
						Belum adanya regulasi pengembangan e-government dan master Plan IT, juga	Menyusun masterplan TIK sebagai dasar pelaksanaan pembangunan TIK di Kabupaten Bantul	Diskominfo

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2019	Capaian 2019	Interpretasi 2019	Permasalahan RKPD 2021	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
	Indeks kualitas layanan informasi publik	Angka	80	78,56	Belum Tercapai	Kurang optimalnya penyerapan informasi dari masyarakat	Efektifitas pemanfaatan saluran informasi dan komunikasi	Diskominfo
						Kurang optimalnya penyampaian informasi kepada masyarakat	Frekwensi pemanfaatan media komunikasi berbasis IT	
						Masih terbatasnya sumberdaya komunikasi dan informatika	Optimalisasi lembaga pengelola diseminasi informasi publik	
						Belum dapat menyajikan semua data/informasi yang seharusnya disajikan untuk masyarakat.	Meningkatkan peran PPID badan publik dalam diseminasi informasi publik.	Diskominfo
						Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap haknya dalam mengakses dan memperoleh informasi publik.	Melibatkan masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.	Diskominfo
						tata kelola data yang belum baik, Sistem informasi dan data base belum saling terintegrasi	Implementasi Perpres Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia sebagai dasar tata kelola data di Kabupaten Bantul.	Diskominfo
	Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah							
	Cakupan Jumlah KUKM yang Naik Kelas	Unit	180	185	Melampaui	Perkembangan UKM masih bersifat sektoral	Penumbuh-kembangan ekosistem UKM melalui incubator bisnis berbasis cluster	DKUKMP
	Jumlah Usaha Mikro yang Naik Kelas	Unit	180	185	Melampaui	Rendahnya aksesibilitas UKM pada teknologi dan permodalan usaha	Pembentukan konsosium Usaha Mikro berbasis Koperasi Produksi	DKUKMP
	Peningkatan tingkat Kesehatan Koperasi	Unit	10	12	Sesuai	Proporsi koperasi sehat sangat rendah (3,5%) karena fluktuasi profesionalisme dan akuntabilitas pengelolaan koperasi	Peningkatan mutu manajemen koperasi melalui pengembangan kapasitas pengelola koperasi	DKUKMP

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2019	Capaian 2019	Interpretasi 2019	Permasalahan RKPD 2021	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
	Urusan Penanaman Modal							
	Pertumbuhan Investasi	%	8,09	9,3	Melampaui	Masih rendahnya realisasi investasi di Kabupaten Bantul	Ada sinergi untuk realisasi potensi Daerah oleh Investor dari Daerah dengan teknologi yang sesuai dengan situasi dan kondisi di Daerah untuk pemenuhan kebutuhan Daerah dan ekspor dari Daerah.	DPMPT
						Belum optimalnya penerapan aplikasi Perizinan Berusaha Terpadu secara Elektronik (<i>Online Single Submission</i> = OSS)	Ada informasi potensi daerah yang akurat dan mudah diakses yang memudahkan investor untuk pengambilan keputusan penanaman modalnya.	
						Belum optimalnya pemasaran potensi unggulan daerah.		
						Belum optimalnya peran kelompok-kelompok masyarakat dan koperasi yang ada di daerah sebagai investor di sektor unggulan daerah		
						Belum optimalnya sinergi peningkatan realisasi penanaman modal		

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2019	Capaian 2019	Interpretasi 2019	Permasalahan RKPD 2021	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
						Masih belum optimalnya penyerapan tenaga kerja pada proyek penanaman modal yang disetujui		
						Belum akuratnya isi data / informasi permohonan	Data / informasi permohonan harus akurat dan valid.	DPMPT
						Belum optimalnya Sistem Perizinan Online Daerah		
						Belum optimalnya penerapan SOP Kajian Teknis Permohonan Perizinan dan Non Perizinan		
						Adanya perubahan regulasi yang membuat harus adanya penyesuaian di Daerah sementara pelayanan harus jalan.		
						Rendahnya realisasi investasi di Kabupaten Bantul dibandingkan daerah lainnya di DIY	Menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui sinkronisasi regulasi pelaksanaan penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan perijinan di daerah	DPMPT
							Meningkatkan promosi penanaman modal untuk menarik minat investor/ pelaku usaha agar berinvestasi di Kabupaten Bantul	DPMPT

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2019	Capaian 2019	Interpretasi 2019	Permasalahan RKPD 2021	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
	Urusan Kepemudaan dan Olahraga							
	Jumlah Pemuda Pelopor	Orang	4	5	Melampaui	Belum adanya regulasi bidang kepemudaan untuk memperjelas arah pembangunan urusan kepemudaan	Pemuda peduli dan aktif meningkatkan perannya dalam proses pembangunan daerah	Dikpora
							Pemuda peduli dan aktif dalam peningkatan kesejahteraannya.	
						Belum optimalnya fasilitasi dan apresiasi atlet siswa berprestasi, sehingga banyak atlet siswa berprestasi pindah daerah untuk mendapat apresiasi yang lebih dari daerah lain.	Adanya fasilitas dan apresiasi untuk mendorong munculnya atlet berprestasi secara berkelanjutan.	
						Belum adanya regulasi yang mengatur tentang Keolahragaa di Kabupaten Bantul.		
						Belum optimalnya ketersediaan sarpras olah raga		
						Sulitnya menemukan pemuda yang memenuhi kriteria sebagai pemuda pelopor pembangunan, yang memiliki kiprah atau pengaruh kepada masyarakat	Melakukan kerjasama dengan forum pemuda pelopor untuk menemukan calon pemuda pelopor, dan mendampingi mereka agar dapat lolos dan sukses dalam seleksi tingkat nasional.	Dikpora

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2019	Capaian 2019	Interpretasi 2019	Permasalahan RKPD 2021	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
						Belum adanya regulasi yang khusus mengatur tentang kepemudaan dan olahraga	Melakukan komunikasi dengan Pemerintah Daerah dan DPRD mengenai proses penyusunan regulasi kepemudaan dan olahraga.	Dikpora
						Pelajar berprestasi olahraga Kabupaten Bantul sering kali memilih melanjutkan sekolah ke daerah lain, karena Kabupaten Bantul belum mampu memberikan fasilitas yang lebih baik kepada atlet berprestasi.	Perlu dilakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam penerimaan siswa baru dari atlet berprestasi dan pemberian beasiswa bagi mereka.	Dikpora
						Fasilitas latihan di Kabupaten Bantul masih sangat kurang, terutama belum memiliki Gedung Olahraga dan kolam renang standar nasional.	Diusulkan pembangunan Gedung Olahraga dan kolam renang yang memiliki standar nasional.	Dikpora
	Urusan Statistik							
						Belum optimalnya penyediaan data statistik sektoral	Penerapan E-Gov di semua aspek pemerintahan	Diskominfo
						Belum optimalnya penerapan Layanan Unggulan <i>Digital Government Services</i> (DGS) di PD		
						Belum optimalnya penerapan standar keamanan informasi	Tingkat keamanan informasi, data dan aplikasi yang terintegrasi	Diskominfo
	Urusan Persandian							

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2019	Capaian 2019	Interpretasi 2019	Permasalahan RKPD 2021	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
						Masih perlunya peningkatan penerapan SOP Forum Komunikasi Sandi Daerah	Rekomendasi FORKOMSANDA ditindak-lanjuti secara tepat syarat.	
						Belum optimalnya penerapan SOP Pengamanan Informasi di SKPD	Adanya penilaian berkala penerapan SOP Pengamanan Informasi di SKPD	Diskominfo
						Peralatan sandi di kabupaten bantul yang ada sudah kurang memenuhi Standart BSSN sehingga kurang maksimal dalam mendukung kegiatan persandian	Pengajuan pemenuhan peralatan sandi kepada TAPD agar sesuai dengan kebutuhan Standart BSSN	Diskominfo
						Masih terbatasnya personil sandi terutama di bidang TI karena beratnya persyaratan yang ditetapkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk menjadi sandiman.	Peningkatan kualitas dan kompetensi personil melalui diklat, bimtek, dan kursus persandian yang dilaksanakan oleh BSSN selaku Pembina Tunggal Persandian.	Diskominfo
	Urusan Kebudayaan							
	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	75	69,7	Belum tercapai	Belum jelasnya arah revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal	Para stakeholders bersinergi dalam revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal	

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2019	Capaian 2019	Interpretasi 2019	Permasalahan RKPD 2021	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
						Menurunnya minat generasi muda dalam pelestarian seni dan budaya lokal		
	Jumlah desa budaya	Desa	14	12	Belum tercapai	Belum jelasnya arah pengembangan Rintisan Desa Budaya sebagai dasar pembinaan	Para stakeholders bersinergi dalam pengembangan Desa Budaya	Disbud
						Menurunnya minat generasi muda dalam pelestarian seni dan budaya lokal		
	Cakupan Perlindungan Warisan Budaya	Persen	24	24	Sesuai	Kurang optimalnya perencanaan Pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya	Para stakeholders disiplin dalam tindak-lanjut roadmap Pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya	Disbud
						Kendala aturan dalam perbaikan/rehab kondisi cagar budaya yang rusak		
	Urusan Perpustakaan							
	Persentase Peningkatan Pemustaka yang berkunjung ke Perpustakaan	%	31	31	Sesuai	· Masih rendahnya kecakapan membaca	· Masyarakat sadar pada manfaat perpustakaan untuk peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan sikap perilakunya	Dispusip
						· Masih rendahnya akses pada bahan bacaan berkualitas melalui perpustakaan Daerah	· Masyarakat gemar sumbang link ebook gratis berkualitas	

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2019	Capaian 2019	Interpretasi 2019	Permasalahan RKPD 2021	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
						· Masih rendahnya akses terhadap alternatif bahan bacaan berkualitas; seperti ebook	· Masyarakat Gemar Sumbang Buku	Dispusip
						· Masih rendahnya minat dan budaya dan baca masyarakat		Dispusip
	Urusan Kearsipan							
	Persentase SKPD yang menyelenggaraan kearsipan sesuai standar dengan nilai baik	%	52	52	Sesuai	Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber informasi	Meningkatkan promosi perpustakaan kepada masyarakat	Dispursip
							Mengoptimalkan peran masyarakat dalam promosi perpustakaan dengan pembentulan Satgas Literasi	Dispursip
	Fokus Layanan Urusan Pilihan							
	Urusan Kelautan dan Perikanan							
	Pertumbuhan produksi perikanan	%	1,35	1,14	Belum Tercapai			
	Produksi Perikanan	ton	13198	13243	Melampaui	Ketersediaan bibit, pakan dan air (jumlah dan kualitas) terbatas	Ketersediaan bibit, pakan dan air (jumlah dan kualitas)	Diperpautkan
						Budidaya ikan masih didominasi nila, lele dan gurame		
						Usaha perikanan skala rumah tangga/ usaha sambilan	Keaktifan petugas Posikandu (pos kesehatan ikan terpadu)	
							Keaktifan kelompok usaha perikanan	
							Keaktifan PPL/pendamping dalam membina kelompok	

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2019	Capaian 2019	Interpretasi 2019	Permasalahan RKPD 2021	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
							Tersedianya informasi dan akses pasar	
						Kurangnya minat sebagai nelayan	Tersedianya 5 TPI dan dukungan sapras	
	Urusan Pariwisata							
	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan	%	22	22,89	Melampaui			
	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	4.445.781	5.166.615	Melampaui	Trens kunjungan wisatawan tidak merata pada seluruh destinasi (dominasi pada destinasi Kawasan Pantai Parangtritis dan Kawasan Hutan Pinus Dlingo)	Peningkatan Daya Tarik Wisata (DTW) Daerah melalui program Loka Wisata Sehat (<i>Premium Tourism</i>) dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata	Dinas Pariwisata
	Lama Tinggal Wisatawan	Hari	2	2	Sesuai	Minimnya fasilitas akomodasi, penginapan dan atraksi malam hari	Peningkatan fasilitas akomodasi, penginapan dan atraksi malam hari berbasis masyarakat melalui kegiatan DEWI BERSERI (Desa Wisata Bersih, Sehat, Mandiri) dan <i>BANTUL JUOSS EVENT</i>	Dinas Pariwisata
	Urusan Pertanian							
	Pertumbuhan produksi tanaman pangan	%	0,1020	3,83	Melampaui		Ketersediaan bibit, pupuk, pestida dan air (jumlah dan kualitas)	Diperpautkan
	Pertumbuhan produksi tanaman hortikultura	%	1,08	1,09	Melampaui		Pemanfaatan alat mesin pertanian yang mendukung percepatan olah tanah, tanam dan panen.	Diperpautkan
		%	0,25	0,57	Melampaui		Keaktifan Regu Pengendali Hama/penyakit tanaman	Diperpautkan

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2019	Capaian 2019	Interpretasi 2019	Permasalahan RKPD 2021	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
	Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan						Keaktifan kelompok tani/ternak/gapoktan	Diperpautkan
							Keaktifan PPL/pendamping dalam membina kelompok dan pelatihan ²	Diperpautkan
							Tersedianya informasi dan akses pasar	Diperpautkan
	Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing, domba, kuda, unggas)	%	0,8	1,57	Melampaui	Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha peternakan untuk mencari izin usaha	Membangun kerjasama dengan petugas IUMK /DKUKPM	Diperpautkan
	Produksi Daging	ton	14513,63	15088,32	Melampaui	Usaha peternakan sering menimbulkan masalah pencemaran limbah di masyarakat.	Efektifitas Rumah Potong Hewan dan pembinaan kepada Rumah Potong Hewan /Unggas	Diperpautkan
							Pengolahan/ pemanfaatan limbah ternak	Diperpautkan
						Masih beredar daging dengan kualitas rendah	Penerapan ASUH (Aman Sehat Utuh Halal)	Diperpautkan
						Adanya penyakit ternak yang menyebabkan kematian pada ternak	Keaktifan Dokter hewan dan efektifitas Puskesmas dalam penanganan penyakit ternak	Diperpautkan
						Fluktuasi harga hasil	Informasi akses pasar bagi para peternak	Diperpautkan
	Produksi Tanaman pangan	ton	231.796,40	216.359,70	Belum Tercapai	Luasan lahan sawah semakin menurun	Pengamanan lahan sawah dari alih fungsi lahan (Program LP2B)	Diperpautkan
	Produksi Tanaman Hortikultura	ton	6624,39	15805	Melampaui	Keberhasilan panen sangat tergantung pada iklim	Pengaturan pola tanam dengan memperhatikan iklim	Diperpautkan

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2019	Capaian 2019	Interpretasi 2019	Permasalahan RKPD 2021	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
						Fluktuasi harga hasil panen		Diperpautkan
						Hasil panen tidak tahan lama, perlunya penanganan pasca panen yang lebih baik	Perbaikan penanganan pasca panen dan perbaikan informasi/akses pasar	Diperpautkan
						Rendahnya minat menanam tanaman biofarmaka	Pemanfaatan lahan pekarangan, lahan di bawah tegakan dan lahan marginal	Diperpautkan
	Produksi Tanaman Perkebunan	ton	14.560,40	14.608,71	Melampaui	minat terhadap tanaman perkebunan rendah (mete, kakao, tebu, tembakau dan kelapa)	Pemanfaatan lahan pekarangan dan lahan marginal	Diperpautkan
	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral							
	Cakupan Pengembangan Potensi Ketersediaan Energi	%	77	77		Kewenangan urusan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten hanya terbatas pada kecukupan energi industri.	Optimasi kemitraan dengan PT. Pertamina (Persero), PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dalam menjaga kecukupan keterseiaan energi industri di Kabupaten Bantul.	DKUKMP
	Urusan Perdagangan							
	Pertumbuhan Ekspor	%	7	-26,84	Belum tercapai	Komoditi daerah berstandar ekspor masih sangat terbatas	Peningkatan volume dan nilai ekspor komoditi unggulan (mebel, pakaian dan kerajinan) ke pasar internasional di Amerika, Jerman, Australia dan ASEAN	Dinas Perdagangan
	Jumlah Pasar Tipe A	Unit	2	4	Sesuai	Proporsi pasar dengan type A masih rendah (12,5%) karena lemahnya regenerasi pedagang dan minimnya kepemilikan lahan.	Peningkatan kualitas pasar rakyat melalui program Pasar Anyar (<i>Bantul Premium Market</i>)	Dinas Perdagangan

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2019	Capaian 2019	Interpretasi 2019	Permasalahan RKPD 2021	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
	Pertumbuhan PDRB Sub Kategori Perdagangan	%	5,33	5,69	Melampaui	Penurunan kunjungan pasar rakyat	Peningkatan pelayanan pasar berbasis online (<i>pasar online, e-payment dan e-retribusi</i>)	Dinas Perdagangan
	Urusan Perindustrian							
	Cakupan Industri Kreatif	%	45	46,2	Melampaui			
	Pertumbuhan industri	%	3,4	3,5	Melampaui	Akses jalan masuk Kawasan Industri (KI) Piyungan belum selesai	Penyelesaian akses jalan masuk kawasan dan penyiapan pemngembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) industri kreatif berbasis UMKM	DKUKMP
						Pemanfaatan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) Sedayu-Pajangan belum merata	Pembangunan jalan masuk kawasan, peningkatan indeks kemudahan berusaha (<i>Ease of Doing Business Index</i>) dan <i>After Care Service Industri</i>	DKUKMP
92	Urusan Transmigrasi							
						Belum adanya pedoman resmi dari pusat tentang pola kerjasama bidang transmigrasi yang berfungsi untuk percepatan pembangunan sosial dan pembangunan wilayah	Daerah tujuan membutuhkan transmigran yang berkualitas, yaitu yang dapat menjadi motor percepatan pembangunan sosial dan wilayah di daerah tujuan	Disnakertrans
						Lokasi yang ditawarkan oleh pusat tidak selalu sesuai dengan minat calon transmigran	Adanya sinergi kebijakan Transmigrasi antara Pusat dengan Daerah Asal dan Daerah Tujuan.	Disnakertrans
	Fokus Layanan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan							
	Indeks Tata Kelola Pemerintahan (Indonesia Governance Index/IGI)	Klasifikasi	7,5 (Baik)	7,72	Melampaui			

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2019	Capaian 2019	Interpretasi 2019	Permasalahan RKPD 2021	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
Fungsi Penunjang Perencanaan								
	Persentase rata-rata capaian sasaran daerah	%	94,75	107,31	Melampaui			
	Persentase rata-rata Pencapaian Target Kinerja Program PD	%	90,75	99,4	Melampaui			
Fungsi Penunjang Keuangan								
	Opini Pemeriksaan BPK	Predikat	1 (WTP)			Sistem informasi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah (SEPAKAT) belum berjalan dengan baik	Perangkat Daerah menerapkan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja .	BKAD
	Percepatan Belanja Pemerintah	%	68	56,75	Belum tercapai	Belum optimalnya Pengendalian atas penatausahaan aset daerah.	Komitmen Perangkat Daerah untuk melakukan pencatatan dan pelaporan aset daerah.	BKAD
	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	24	23,11	Belum Tercapai	Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan sesuai waktu yang direncanakan	Perangkat Daerah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	BKAD
	Persentase PAD terhadap Belanja Daerah	%	19	22,89	Melampaui	Pengendalian atas penatausahaan piutang pajak dan retribusi belum optimal	Penerapan prosedur proyeksi TIAP RINCIAN OBJEK PAD yang lebih terbuka berdasarkan basis data yang mendekati potensi riil dan dilengkapi dengan informasi tiap permasalahan dan kendalanya.	BKAD
Fungsi Penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan								
	Presentase Pemenuhan Kompetensi Aparatur	%	90,5	90,14	Melampaui	Pengembangan potensi pegawai belum optimal	Pemenuhan diklat sesuai kebutuhan kompetensi jabatan	BKPP

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2019	Capaian 2019	Interpretasi 2019	Permasalahan RKPD 2021	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
	Nilai Indeks Kepuasan Aparatur	%	81,7	82,733	Melampaui	Belum optimalnya Sistem Informasi Kepegawaian untuk mendukung manajemen ASN		
Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan								
						Fokus litbang belum sesuai dengan kebutuhan perencanaan.	Hasil litbang bersifat konstruktif dan rekomendasinya berbentuk program dan kegiatan sesuai kebutuhan perencanaan pembangunan	Bappeda
Fungsi Penunjang Lainnya								
Fungsi Penunjang Pengawasan								
	Nilai Maturitas SPIP	Level	Level 2 (3,1)	Level 2 (3,17)	Melampaui	Penyelesaian tindak lanjut temuan internal dan eksternal belum optimal	1. Komitmen obyek pemeriksaan dalam menyelesaikan tindak lanjut	Inspektorat
							2. Monev tindak lanjut temuan	
						- Belum optimalnya penerapan SOP fasilitasi fungsi legislasi, SOP fasilitasi fungsi budgeting dan SOP fasilitasi fungsi pengawasan DPRD	Komitmen bersama dalam peningkatan kinerja fungsi-fungsi DPRD	Setwan
Fungsi Penunjang Perumusan Kebijakan								
	Nilai Evaluasi Kinerja SKPD	Angka	70	71,9	Melampaui			Setda
	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	82	86,97	Melampaui			

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2019	Capaian 2019	Interpretasi 2019	Permasalahan RKPD 2021	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai	3,6 (Sangat Tinggi)	3,4478	Belum Tercapai	Belum optimalnya kualitas perencanaan tahunan Daerah	SKPD menerapkan SOP proses perencanaan; yaitu SOP penyusunan rencana, SOP penetapan rencana, SOP pelaksanaan dan pengendaliannya, serta SOP evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan.	Bappeda
						Belum optimalnya kualitas perencanaan di SKPD	SKPD aktif mengentri data capaian kinerja pada SIPD sesuai prosedurnya.	Bappeda
						Belum optimalnya kualitas sinergi pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah.	SKPD meyakini bahwa pengendalian dan evaluasi merupakan saran untuk <i>proving</i> dan <i>improving</i> kinerja	
						Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Usulan kegiatan dari Desa yang berkualitas dan berorientasi pada Nangkis sesuai kriteria yang telah ditetapkan.	
						Belum optimalnya kualitas Musrenbangdes dan Musrenbang Kecamatan		

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2019	Capaian 2019	Interpretasi 2019	Permasalahan RKPD 2021	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Nilai	80 (A)	81,39	Melampaui	Dokumen Renbangda belum optimal berorientasi pada penanggulangan kemiskinan untuk peningkatan kesejahteraan.	SKPD selalu berupaya untuk meningkatkan ketepatan bentuk kegiatan, ketepatan lokasi kegiatan, ketepatan kelompok sasaran, dan ketepatannya dengan target tahunan.	Bappeda
	Persentase Belanja Pegawai	%	48	45,04	Belum Tercapai			BKAD
	Persentase Raperda yang disetujui	%	80	82	Melampaui	Penetapan Perda tidak memenuhi target karena mekanisme melibatkan pemerintah propinsi dan/atau pemerintah pusat	Pembahasan dan rekomendasi tindak lanjut dilaksanakan pada Kegiatan Legislasi pada tahun berikutnya	Bagian Hukum
	Fungsi Penunjang Pemerintahan Umum							
	IKM Kecamatan	%	90	89	Belum Tercapai	Masih perlunya peningkatan pemahaman masyarakat tentang syarat dan ketentuan PATEN	Masyarakat memahami syarat dan ketentuan PATEN sehingga dapat memenuhinya untuk mempercepat pelayanan PATEN yang diajukan	Kecamatan
						Masih perlunya peningkatan kedisiplinan dalam penerapan SOP PATEN		

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2019	Capaian 2019	Interpretasi 2019	Permasalahan RKPD 2021	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	%	90	100	Melampaui	Belum optimalnya penerapan SOP Pendampingan Sinkronisasi RKPDes dan APBDes dari Kecamatan.	Desa dan BPD mau dan mampu secara tepat syarat memenuhi tiap tahapan perencanaan pembangunan desa.	Kecamatan
						Belum optimalnya peran pendamping desa dalam mensinergikan pendampingannya dengan Kecamatan.		
	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	%	88	88	Sesuai	Belum optimalnya penerapan SOP Pembinaan Kinerja Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Desa	Ada SOP Penilaian Kinerja Pemerintahan dan Tingkat Reformasi Birokrasi Desa.	Kecamatan

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2019	Capaian 2019	Interpretasi 2019	Permasalahan RKPD 2021	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
						Belum optimalnya tindak-lanjut rekomendasi hasil penilaian kinerja Reformasi Birokrasi Desa	Beberapa kriteria penilaian meliputi: jam kerja, update monografi desa, kedisiplinan pelaporan, ketepatan siklus perencanaan bangdes.	
							SOP disusun oleh Bagian Organisasi, tetapi penilaiannya dapat dimandatkan pada Kecamatan.	
	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	%	90	90	Sesuai	Belum optimalnya penerapan SOP Pembinaan Musrenbangdes	Adanya SOP Pembinaan Musrenbangdes.	Kecamatan
							Dalam SOP itu ada kriteria usulan, plafon alokasi usulan, dan ketentuan lain yang menjadi rambu-rambu usulan di Musrenbangdes	
						Belum optimalnya penerapan SOP FORKOMPIMCA.	Rekomendasi FORKOMPIMCA diteruskan dan dapat ditindak-lanjuti secara tepat syarat oleh para pihak terkait.	Kecamatan
	Aspek Daya Saing							
	Nilai Tukar Petani	Angka	101,8	107,8	Melampaui	Petani tidak bisa mengatur harga jual hasil panennya, harga tergantung pasar	Harga jual hasil pertanian	
	Percepatan Layanan Perizinan dan Non Perizinan Tepat Waktu	%	81					Diperpautkan
	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	79,5	85,89	Melampaui			DPMPT
	Upah Minimum Kabupaten	Rp	1.578.389	1.649.800	Melampaui			DPMPT

Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul, diolah, 2020

2.7.5 Permasalahan Dampak Covid-19

Covid-19 secara umum memiliki dampak yang besar bagi masyarakat menengah kebawah. Adanya beberapa kebijakan untuk mencegah penularan wabah virus corona, antara lain penerapan social distancing dan pengaturan jadwal kerja dari rumah (work from home), mengakibatkan pengurangan hak kerja (PHK) bagi para pegawai di perusahaan /pabrik, UMKM dan pedagang kaki lima tidak bisa berjualan dengan normal, jasa ojek online tidak bisa beroperasi seperti biasa sebab orderan yang menurun. Kondisi ini menyebabkan perekonomian menurun. Berikut ini identifikasi permasalahan pada sektor yang terdampak covid-19 yaitu :

Tabel 2.182 Permasalahan Dampak Pandemi Covid-19 di Kabupaten Bantul Tahun 2020

NO	SEKTOR	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	EKONOMI	Daya beli dan daya jual masyarakat menurun	- Pemberdayaan masyarakat / UKM - Peningkatan transaksi online
		Harga tidak stabil	- Optimalisasi TPID, antara lain melalui operasi pasar
		PAD 2020 menurun akibat : - adanya kebijakan relaksasi pajak, - penurunan target retribusi karena penutupan obyek wisata	- Relaksasi pajak dihentikan - Membuka kembali obyek wisata dengan penerapan protokol kesehatan.
2	PERTANIAN	- Distribusi hasil pertanian terkendala. - Menurunnya produksi beberapa hasil pertanian	- Fasilitasi Pemda untuk jejaring petani dan konsumen/ masyarakat. - Peningkatan saprodi hasil pertanian

NO	SEKTOR	PERMASALAHAN	SOLUSI
3	KESEHATAN	Masih adanya penularan kasus covid 19 di masyarakat	- Penerapan protocol kesehatan di masyarakat. - Pelayanan kesehatan bagi penderita
4	PENDIDIKAN	Kegiatan Belajar Mengajar secara online	- Penyiapan sarpras penunjang - Peningkatan kapasitas SDM
5	SOSIAL	Pengangguran bertambah akibat PHK 1.987 orang, yg dirumahkan 5.986 orang.	Padat karya berprotokol kesehatan
		- Wilayah rawan tindak kriminal (penjarahan dll) - Kecenderungan masyarakat yg kurang disiplin terhadap penerapan protocol kesehatan	Pemantauan dan patrol wilayah